

AUDITED



LAPORAN KEUANGAN

**PEMERINTAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

**KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN**

2024



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, merencanakan, dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan, kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dan evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tanggal 31 Desember 2024, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 30.B/LHP/XIX.MKS/05/2025 tanggal 23 Mei 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Makassar, 23 Mei 2025

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Winner Franky Halimoon M. S.E., Ak., M.Ak., CSFA, CA,
ACPA, ERPAP, GRCA, GRCP

Register Negara Akuntan No. RNA-14533

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 yang didasarkan pada kriteria:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
- d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang memiliki 42 SKPD.

5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengujian atas laporan keuangan tersebut di atas meliputi:

- a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca dan Laporan Perubahan SAL per 31 Desember 2024;
- b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024;
- c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024;

- d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan Atas Laporan Keuangan;
- e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan LKPD;
- f. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan
- g. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan LKPD.

6. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk sistem pengendalian intern terkait, serta penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, Pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (*reperformance*), dan prosedur analitis, serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, Pemeriksa mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberikan komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

7. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama 40 hari mulai tanggal 9 April s.d. 18 Mei 2024 berdasarkan Surat Tugas Nomor 129/ST/XIX.MKS/4/2025 tanggal 8 April 2025.

8. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

DAFTAR ISI

	Halaman
SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TA 2024.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
LAPORAN KEUANGAN	
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	
3. NERACA KOMPARATIF	
4. LAPORAN OPERASIONAL	
5. LAPORAN ARUS KAS	
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD.....	5
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	57
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	60
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....	65
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	215
BAB VII PENUTUP	218
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2022 - 2024..... 6
Tabel 2.2	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2022 - 2024.. 7
Tabel 2.3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2022 – 2024 8
Tabel 2.4	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2022 - 2024..... 9
Tabel 2.5	Rasio Gini Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2022 – 2024 10
Tabel 2.6	PDRB Perkapita Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 – 2024..... 11
Tabel 2.7	Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Pangkep Tahun 2020 – 2024 15
Tabel 2.8	Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 18
Tabel 2.9	Angkatan Kerja, TPAK, TPT dan Status Pekerjaan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024 20
Tabel 2.10	Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuk IPM di Kabupaten Pangakejene dan Kepulauan tahun 2020-2024 28
Tabel 2.11	Rincian Capaian Target Kinerja..... 54
Tabel 3.1	Rincian Capaian Target Kinerja..... 57
Tabel 7.5.1.1.	Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan 67
Tabel 7.5.1.1.a	Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan – PAD..... 67
Tabel 7.5.1.1.a.1	Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah - Pajak Daerah..... 68
Tabel 7.5.1.1.a.1.a	Pajak Hotel..... 68
Tabel 7.5.1.1.a.1.b	Pajak Restoran 69
Tabel 7.5.1.1.a.1.c	Pajak Hiburan 69

Tabel 7.5.1.1.a.1.d	Pajak Reklame	69
Tabel 7.5.1.1.a.1.e	Pajak Penerangan Jalan	70
Tabel 7.5.1.1.a.1.f	Pajak Parkir.....	70
Tabel 7.5.1.1.a.1.g	Pajak Air Tanah	70
Tabel 7.5.1.1.a.1.h	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	71
Tabel 7.5.1.1.a.1.i	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	71
Tabel 7.5.1.1.a.1.j	Rincian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).....	72
Tabel 7.5.1.1.a.1.k	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	72
Tabel 7.5.1.1.a.2	Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah - Retribusi Daerah	73
Tabel 7.5.1.1.a.2.a	Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah - Retribusi Daerah - Retribusi Jasa Umum	73
Tabel 7.5.1.1.a.2.b	Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah - Retribusi Daerah - Retribusi Jasa Usaha	74
Tabel 7.5.1.1.a.2.c	Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah - Retribusi Daerah - Retribusi Perizinan Tertentu.....	74
Tabel 7.5.1.1.a.3	Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	75
Tabel 7.5.1.1.a.4	Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah - Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.....	76
Tabel 7.5.1.1.a.4.a	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan.....	76
Tabel 7.5.1.1.a.4.b	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan.....	77
Tabel 7.5.1.1.a.4.c	Jasa Giro	77
Tabel 7.5.1.1.a.4.d	Pendapatan Bunga.....	77
Tabel 7.5.1.1.a.4.e	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	78
Tabel 7.5.1.1.a.4.f	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	78
Tabel 7.5.1.1.a.4.g	Pendapatan dari Pengembalian.....	79
Tabel 7.5.1.1.a.4.h	Pendapatan BLUD	79
Tabel 7.5.1.1.b	Pendapatan Transfer.....	80
Tabel 7.5.1.1.b.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	80
Tabel 7.5.1.1.b.1.1	Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	81

Tabel 7.5.1.1.b.1.1.a	Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan - Bagi Hasil Pajak	81
Tabel 7.5.1.1.b.1.1.b	Jadwal Transfer Dana Alokasi Umum (DAU)	82
Tabel 7.5.1.1.b.1.1.b	Rincian Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU).	83
Tabel 7.5.1.1.b.1.1.c	Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan - Dana Alokasi Khusus (DAK)	83
Tabel 7.5.1.1.b.1.1.c.1	Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan - Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler.....	84
Tabel 7.5.1.1.b.1.1.c.2	Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	84
Tabel 7.5.1.1.b.1.1.c.3	Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan - Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan	85
Tabel 7.5.1.1.b.1.2.a	Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	86
Tabel 7.5.1.1.b.1.2.b	Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	86
Tabel 7.5.1.1.b.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	86
Tabel 7.5.1.1.b.2.a	Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Provinsi - Bagi Hasil Pajak Provinsi	87
Tabel 7.5.1.1.b.2.b	Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Antar Daerah - Bantuan Keuangan	89
Tabel 7.5.1.1.b.2.b.1	Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Antar Daerah - Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	89
Tabel 7.5.1.1.c	Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	90
Tabel 7.5.1.1.c.1	Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - Pendapatan Hibah	91
Tabel 7.5.1.1.c.2	Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.....	91
Tabel 7.5.1.2	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja.....	92
Tabel 7.5.1.2.a	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja – Operasi	92
Tabel 7.5.1.2.a.1	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi - Pegawai..	93
Tabel 7.5.1.2.a.2	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi - Barang dan Jasa.....	93

Tabel 7.5.1.2.a.2.a	Rincian Realisasi Barang dan Jasa Dana Kapitasi JKN.....	95
Tabel 7.5.1.2.a.3	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi - Belanja Bunga.....	95
Tabel 7.5.1.2.a.4	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi – Hibah.....	96
Tabel 7.5.1.2.a.5	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi - Belanja Bantuan Sosial	96
Tabel 7.5.1.2.b	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal	97
Tabel 7.5.1.2.b.1	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal – Tanah.....	98
Tabel 7.5.1.2.b.2	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal - Peralatan dan Mesin.....	98
Tabel 7.5.1.2.b.3	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	100
Tabel 7.5.1.2.b.4	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan	101
Tabel 7.5.1.2.b.5	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	102
Tabel 7.5.1.2.b.6	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal - Aset Lainnya	103
Tabel 7.5.1.2.c	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga	104
Tabel 7.5.1.2.d	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer	105
Tabel 7.5.1.2.d.1	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil.....	105
Tabel 7.5.1.2.d.1.a	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah.....	106
Tabel 7.5.1.2.d.1.b	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah.....	106
Tabel 7.5.1.2.d.2	Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan - ke Desa	107
Tabel 7.5.1.3.a	Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan – Penerimaan..	108
Tabel 7.5.1.3.b	Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan - Pengeluaran..	108
Tabel 7.5.1.4	Rincian SiLPA	109
Tabel 7.5.2	Rincian Saldo Anggaran Lebih	110
Tabel 7.5.3	Rincian Komposisi Aset.....	111
Tabel 7.5.3.1	Rincian Komposisi Aset.....	111
Tabel 7.5.3.1.a	Rincian Komposisi Aset Lancar.....	112
Tabel 7.5.3.1.a.1	Rincian Kas di Kas Daerah	113

Tabel 7.5.3.1.a.1.a	Rincian Kas di Bendahara Umum Daerah.....	113
Tabel 7.5.3.1.b	Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran.....	114
Tabel 7.5.3.1.c	Rincian Kas di Bendahara Penerima	114
Tabel 7.5.3.1.d	Pendapatan dan Belanja BLUD.....	115
Tabel 7.5.3.1.e	Rincian Kas di Bendahara FKTP Kapitasi	115
Tabel 7.5.3.1.f	Rincian Kas di Bendahara BOS	116
Tabel 7.5.3.1.g	Rincian Kas Lainnya Di Bendahara FKTP Bunga JKN	117
Tabel 7.5.3.1.g.1	Rincian Kas Lainnya BOK.....	117
Tabel 7.5.3.1.g.2	Rincian Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Pembantu ...	118
Tabel 7.5.3.1.g.3	Rincian Kas Lainnya di Bendahara FKTP	119
Tabel 7.5.3.1.h	Rincian Kas di Bendahara BOSP	119
Tabel 7.5.3.1.i	Rincian Kas Dana BOK Puskesmas	120
Tabel 7.5.3.1.k	Rincian Piutang Pajak Daerah.....	121
Tabel 7.5.3.1.l	Rincian Piutang Retribusi	121
Tabel 7.5.3.1.m	Rincian Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah	122
Tabel 7.5.3.1.n	Rincian Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	122
Tabel 7.5.3.1.o	Rincian Piutang Dana Bagi Hasil Pajak	123
Tabel 7.5.3.1.p	Rincian Piutang Lainnya	124
Tabel 7.5.3.1.p.1	Rincian Piutang Lainnya - Daftar Tunggakan Dana Bergulir.	125
Tabel 7.5.3.1.p.2	Rincian Piutang Lainnya - Tagihan Piutang Pihak Ketiga	126
Tabel 7.5.3.1.r.1	Rincian Penyisihan Piutang Pajak.....	127
Tabel 7.5.3.1.r.2	Rincian Penyisihan Piutang Retribusi	127
Tabel 7.5.3.1.r.3	Rincian Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah - Penyertaan Modal	128
Tabel 7.5.3.1.r.4	Rincian Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	128
Tabel 7.5.3.1.r.5	Rincian Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil Pajak.....	128
Tabel 7.5.3.1.s	Rincian Piutang Lainnya - Penyisihan Piutang Lainnya.....	129
Tabel 7.5.3.1.t	Beban Dibayar Di Muka	130
Tabel 7.5.3.1.u	Rincian Persediaan.....	130
Tabel 7.5.3.2	Rincian Investasi Jangka Panjang	131
Tabel 7.5.3.2.a	Rincian Investasi Jangka Panjang - Investasi Permanen	131

Tabel 7.5.3.2.a.1	Rincian Penilaian Investasi Permanen - PDAM Kab. Pangkep	132
Tabel 7.5.3.2.a.2	Rincian Penilaian Investasi Permanen - BPR Citra Mas	132
Tabel 7.5.3.2.a.3	Rincian Penilaian Investasi Permanen - Perumda Mappatuwo	133
Tabel 7.5.3.3	Rincian Aset Tetap	134
Tabel 7.5.3.3.a	Rincian Aset Tetap – Tanah	135
Tabel 7.5.3.3.a.1	Rincian Mutasi Aset Tetap – Tanah	136
Tabel 7.5.3.3.b	Rincian Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	138
Tabel 7.5.3.3.b.1	Rincian Mutasi Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	139
Tabel 7.5.3.3.c	Rincian Aset Tetap - Gedung dan Bangunan	153
Tabel 7.5.3.3.c.1	Rincian Mutasi Aset Tetap - Gedung dan Bangunan	154
Tabel 7.5.3.3.d	Rincian Aset Tetap - Jalan, Irigasi dan Jaringan	165
Tabel 7.5.3.3.d.1	Rincian Mutasi Aset Tetap - Jalan, Irigasi dan Jaringan	165
Tabel 7.5.3.3.e	Rincian Mutasi Aset Tetap - Jalan, Irigasi dan Jaringan	171
Tabel 7.5.3.3.e.1	Rincian Mutasi Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya	171
Tabel 7.5.3.3.f	Rincian Aset Tetap - Konstruksi Dalam Pengerjaan	172
Tabel 7.5.3.3.f.1	Rincian Mutasi Aset Tetap - Konstruksi Dalam Pengerjaan ..	173
Tabel 7.5.3.3.g	Rincian Mutasi Aset Tetap - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	176
Tabel 7.5.3.4	Rincian Aset Lainnya	177
Tabel 7.5.3.4.a	Rincian Aset Lainnya - Tagihan Jangka Panjang	177
Tabel 7.5.3.4.a.1	Rincian Piutang TP-TGR yang belum ditetapkan SKTJM	178
Tabel 7.5.3.4.b	Rincian Nilai Perolehan Aset Tak Berwujud	178
Tabel 7.5.3.4.c	Rincian Amortisasi Aset Tak Berwujud	179
Tabel 7.5.3.4.d	Rincian Aset Lain – Lain	180
Tabel 7.5.3.5.a	Rincian Kewajiban Jangka Pendek	182
Tabel 7.5.3.5.c	Rincian Utang Belanja	183
Tabel 7.5.3.5.c.1	Rincian Utang Belanja Modal	183
Tabel 7.5.3.6	Rincian Ekuitas Akhir	184
Tabel 7.5.4.1	Rincian Pendapatan – LO	185
Tabel 7.5.4.1.a.	Rincian Pendapatan - Pendapatan Asli Daerah – LO	185
Tabel 7.5.4.1.a.1	Rincian Pendapatan Asli Daerah - LO - Pajak Daerah	186
Tabel 7.5.4.1.a.2	Rincian Pendapatan Asli Daerah - LO - Retribusi Daerah	187

Tabel 7.5.4.1.a.3	Rincian Pendapatan Asli Daerah - LO - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.....	188
Tabel 7.5.4.1.a.4	Rincian Pendapatan Asli Daerah - LO - Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.....	189
Tabel 7.5.4.1.b	Rincian Pendapatan Transfer – LO	189
Tabel 7.5.4.1.b.1.a	Rincian Pendapatan Transfer - LO - Dana Perimbangan.....	190
Tabel 7.5.4.1.b.2	Rincian Pendapatan Transfer - LO - Pemerintah Pusat Lainnya (Dana Penyesuaian).....	191
Tabel 7.5.4.1.b.3.a	Rincian Pendapatan Transfer antar Daerah - LO (Pendapatan Bagi Hasil Pajak)	191
Tabel 7.5.4.1.b.3.b	Rincian Pendapatan Transfer antar Daerah - LO (Bantuan Keuangan dari Provinsi).....	192
Tabel 7.5.4.2	Rincian Beban – LO.....	194
Tabel 7.5.4.2.a	Rincian Beban - LO - Beban Operasi.....	194
Tabel 7.5.4.2.a.1	Rincian Beban Operasi - LO - Beban Pegawai.....	195
Tabel 7.5.4.2.a.2	Rincian Beban Operasi - LO - Beban Barang	196
Tabel 7.5.4.2.a.3	Rincian Beban - LO - Beban Jasa	196
Tabel 7.5.4.2.a.4	Rincian Beban Operasi - LO - Beban Pemeliharaan	197
Tabel 7.5.4.2.a.5	Rincian Beban Operasi - LO - Beban Perjalanan Dinas	198
Tabel 7.5.4.2.a.6	Rincian Beban Operasi - LO - Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	198
Tabel 7.5.4.2.a.7	Rincian Beban Operasi - LO - Barang dan Jasa BOS.....	199
Tabel 7.5.4.2.a.8	Rincian Beban Operasi - LO - Barang dan Jasa BOK Puskesmas	199
Tabel 7.5.4.2.a.9	Rincian Beban Operasi - LO - Barang dan Jasa BLUD.....	199
Tabel 7.5.4.2.a.10	Rincian Beban Operasi - LO - Beban Bunga.....	200
Tabel 7.5.4.2.a.11	Rincian Beban Operasi - LO - Beban Hibah	200
Tabel 7.5.4.2.a.11.a	Rincian Beban Operasi - LO - Beban Hibah Uang.....	201
Tabel 7.5.4.2.a.11.b	Rincian Beban Operasi - LO - Beban Hibah Barang.....	201
Tabel 7.5.4.2.a.12	Rincian Beban Operasi - LO - Beban Bantuan Sosial	202
Tabel 7.5.4.2.a.13	Rincian Beban Operasi - LO - Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	203
Tabel 7.5.4.2.a.14	Rincian Beban Operasi - LO - Beban Penyisihan Piutang.....	203
Tabel 7.5.4.2.b	Rincian Beban Transfer – LO	204

Tabel 7.5.4.3	Rincian Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	204
Tabel 7.5.4.4	Rincian Pos Luar Biasa - LO - Beban Luar Biasa	205
Tabel 7.5.4.5	Rincian Surplus/Defisit – LO.....	205
Tabel 7.5.5.1.a	Rincian Arus Kas Masuk - Aktivitas Operasi.....	206
Tabel 7.5.5.2	Rincian Arus Kas Keluar - Aktivitas Operasi.....	207
Tabel 7.5.5.3.a	Rincian Arus Kas Masuk - Aktivitas Investasi	208
Tabel 7.5.5.4	Rincian Arus Kas Keluar - Aktivitas Investasi	208
Tabel 7.5.5.5.a	Rincian Arus Kas Masuk - Aktivitas Pendanaan.....	209
Tabel 7.5.5.6	Rincian Arus Kas Keluar - Aktivitas Pendanaan.....	209
Tabel 7.5.5.7.b	Rincian Arus Kas Masuk - Aktivitas Transitoris.....	210
Tabel 7.5.5.4.c	Rincian Arus Kas Keluar - Aktivitas Transitoris.....	210
Tabel 7.5.5.8.	Rincian Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas	211
Tabel 7.5.5.8.a	Rincian Perhitungan Saldo Akhir Kas.....	211
Tabel 7.5.5.8.b	Rincian Saldo Akhir Kas.....	212
Tabel 7.5.6.1	Rincian Laporan Perubahan Ekuitas	214

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kedudukan Ekonomi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Terhadap Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024	14
Gambar 2.2 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	15
Gambar 2.3 Berikut Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan dan Nasional serta wilayah sekitarnya Tahun 2021 s/d 2024.....	16
Gambar 2.4 Sektor Utama Kontribusi PDRB Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Tahun 2020-2024	18
Gambar 2.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	21
Gambar 2.6 Presentase Kemiskinan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	22
Gambar 2.7 Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	23
Gambar 2.8 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	24
Gambar 2.9 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024	24
Gambar 2.10 PDRB Per Kapita Kab. Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 - 2024	25
Gambar 2.11 Perbandingan Rasio Gini Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024.....	26
Gambar 2.12 Gini Ratio Menurut Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan Tahun 2024	27
Gambar 2.13 Perkembangan IPM Kabupaten Pangkep, SulSel dan Nasional	

	Tahun 2020-2024	29
Gambar 2.14	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Pangkep, SulSel dan Nasional Tahun 2020-2024	30
Gambar 2.15	Harapan Lama Sekolah (HLS) Pangkep, Sul Sel dan Nasional Tahun 2020-2024	31
Gambar 2.16	Usia Harapan Hidup (UHH) Pangkep, SulSel dan Nasional Tahun 2020-2024	31
Gambar 2.17	Perkembangan Indikator Pengeluaran Per Kapita Pangkep, Sul Sel dan Nasional Tahun 2018-2024.....	32
Gambar 7.5.1.1	Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2024.....	66
Gambar 7.5.1.2	Pembiayaan Daerah Bersih Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2024	107

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Daftar Pegawai
Lampiran	1.a	Kas di Bendahara Umum Daerah
Lampiran	1.b	Laporan Dana Non Kapitasi JKN Per Puskesmas
Lampiran	1.c	Laporan Hasil Reviu Penggunaan Dana JKN Kapitasi Per FKTP (Puskesmas)
Lampiran	1.d	Laporan Realisasi Penggunaan Dana BOSP Reguler SD Negeri
Lampiran	1.e	Kertas Kerja Reviu Dana BOS Reguler SMP Negeri
Lampiran	1.e.1	Kertas Kerja Reviu Dana BOS Kinerja SMP Negeri
Lampiran	1.f.1	Rincian Kas Lainnya
Lampiran	1.f.2	Realisasi BOK Salur Puskesmas Lingkup Dinas Kesehatan
Lampiran	2	Rekap Daftar Piutang Daerah
Lampiran	3	Rekap Daftar Piutang Retribusi Daerah
Lampiran	4	Rincian Piutang Pengelolaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Sah Penyertaan Modal Deviden
Lampiran	5	Rekap Piutang dan Penyisihan Piutang Lain - Lain PAD
Lampiran	6	Rincian Piutang Bagi Hasil Pajak
Lampiran	7	Rekap Rincian Piutang Lainnya
Lampiran	8	Beban Dibayar Dimuka
Lampiran	9.a	Rekap Persediaan
Lampiran	10	Rekapitulasi Barang ke Neraca
Lampiran	11	Rincian Aset Tetap – Tanah
Lampiran	12	Rincian Aset Tetap – Peralatan dan Mesin
Lampiran	13	Rincian Aset Tetap – Gedung dan Bangunan
Lampiran	14	Rincian Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan
Lampiran	15	Rincian Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya
Lampiran	16	Rincian Aset Tetap – Konstruksi dalam Pengerjaan
Lampiran	17	Daftar Aset Akumulasi Penyusutan
Lampiran	18	Rekap Aset Lainnya
Lampiran	19	Rekapitulasi Nilai Kerugian Daerah Yang Masih Berupa Informasi Kerugian Daerah atau Belum Ditetapkan dengan SKTJM dan Belum Ditindaklanjuti
Lampiran	20	Rekap Pendapatan Dibayar Dimuka

Lampiran	21	Rekap Utang Belanja Daerah
Lampiran	21.a	Rekap Utang Belanja Pegawai
Lampiran	21.b	Rekap Utang Belanja Barang dan Jasa
Lampiran	21.c	Rekap Utang Belanja Hibah
Lampiran	22	Rekap Utang Belanja Modal



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan Isinya telah menyajikan Informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran Lebih, operasional, serta Perubahan ekuitas dan catatan atas laporan Keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Pangkajene, 23 Mei 2025

B U P A T I

MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Reff	2024		%	2023
			Anggaran	Realisasi		
1	PENDAPATAN - LRA	7.5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	a.				
3	Pendapatan Pajak Daerah	1	105.900.082.990,00	136.543.303.074,16	128,94	94.937.575.968,44
4	Pendapatan Retribusi Daerah	2	14.558.602.523,00	12.095.295.506,00	83,08	9.440.950.198,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	13.309.057.431,00	13.009.057.431,00	97,75	12.927.838.786,00
6	Lain-Lain PAD yang Sah	4	66.529.377.337,00	67.055.196.023,60	100,79	59.317.018.887,45
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		200.297.120.261,00	228.702.852.036,76	114,18	176.623.383.839,89
8						
9	PENDAPATAN TRANSFER	b.				
10	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1				
11	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERimbangan	1.1				
12	Dana Bagi Hasil Pajak	1.1.a	21.979.024.000,00	25.613.641.664,00	116,54	27.085.286.494,00
13	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		-	-	-	-
14	Dana Alokasi Umum	1.1.b	769.416.938.000,00	787.431.926.000,00	102,34	746.290.902.260,00
15	Dana Alokasi Khusus	1.1.c	349.390.409.000,00	341.828.158.407,00	97,84	344.179.419.601,00
16	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		1.140.786.371.000,00	1.154.873.726.071,00	101,23	1.117.555.608.365,00
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA INSENTIF DAERAH	1.2				
18	Dana Insentif Daerah (DID)	1.2.a	-	-	-	17.797.293.000,00
19	Jumlah Dana Insentif Daerah (DID)		-	-	-	17.797.293.000,00
20						
21	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA DESA	1.2.b				
22	Dana Desa (DD)		66.353.380.000,00	66.353.379.960,00	100,00	65.102.177.990,00
23	Insentif fiskal		11.568.556.000,00	11.568.556.000,00	100,00	-
24	Jumlah Dana Desa (DD) & Insentif Fiskal		77.921.936.000,00	77.921.935.960,00	100,00	65.102.177.990,00
25	Jumlah Pendapatan Transfer - Pemerintah Pusat		1.218.708.307.000,00	1.232.795.662.031,00	101,16	1.200.455.079.345,00
26						
27	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	2				
28	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah	2.a	67.958.846.017,00	53.106.576.104,00	78,15	76.123.891.525,02
29	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	2.b	19.998.430.750,00	7.564.323.750,00	37,82	26.002.606.500,00
30	Jumlah Pendapatan Antar Daerah		87.957.276.767,00	60.670.899.854,00	68,98	102.126.498.025,02
31	Jumlah Pendapatan Transfer dan Bantuan Keuangan		1.306.665.583.767,00	1.293.466.561.886,00	98,99	1.302.581.577.370,02
32						
33	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	c				
34	Pendapatan Hibah	1.c	-	100.001,98	-	2.002.555.272,00
35	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	2.c	28.389.375.000,00	22.910.716.961,00	80,70	23.429.994.836,00
36	Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah		28.389.375.000,00	22.910.816.962,98	80,70	25.432.550.108,00
37	Jumlah Pendapatan		1.535.352.079.048,00	1.545.080.230.884,74	100,63	1.504.637.511.317,81
38						
39	BELANJA	7.5.1.2				
40	BELANJA OPERASI	a.				
41	Belanja Pegawai	1.	671.113.470.504,00	680.312.992.167,00	98,39	611.642.239.921,00
42	Belanja Barang dan Jasa	2.	409.741.881.763,00	379.281.519.837,12	92,57	366.587.257.014,79
43	Belanja Bunga	3	220.000.000,00	215.000.000,00	97,73	-
44	Belanja Hibah	4	62.351.073.001,00	61.888.921.596,00	99,26	64.547.861.642,00
45	Belanja Bantuan Sosial	5	2.905.933.319,00	2.758.326.941,00	94,92	16.988.146.913,00
46	Jumlah Belanja Operasi		1.146.332.358.587,00	1.104.466.790.541,12	96,36	1.059.766.505.490,79
47						
48	BELANJA MODAL	b.				
49	Belanja Modal Tanah	1.	927.888.300,00	465.430.000,00	50,16	4.390.301.200,00
50	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.	57.574.173.999,00	54.607.117.769,37	94,85	55.003.140.097,00
51	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.	102.420.248.244,00	99.027.835.883,00	96,69	110.546.633.594,54
52	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.	71.557.435.386,00	70.691.907.253,00	98,79	118.039.778.751,92
53	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.	8.825.647.800,00	8.829.456.200,00	100,04	9.404.188.287,00
54	Belanja Modal Aset Lainnya	6.	929.849.400,00	701.827.900,00	75,46	58.165.501,00
55	Jumlah Belanja Modal		242.235.243.129,00	234.323.375.005,37	96,73	297.442.205.431,46
56						
57	BELANJA TAK TERDUGA					
58	Belanja Tak Terduga	c.	1.961.000.800,00	1.958.577.900,00	99,88	3.970.415.183,00
59	Jumlah Belanja Tak Terduga		1.961.000.800,00	1.958.577.900,00	99,88	3.970.415.183,00
60	Jumlah Belanja		1.390.528.602.516,00	1.340.738.713.446,49	96,42	1.361.178.126.105,25
61						
62	TRANSFER DAERAH	d.				
63	BAGI HASIL	1				
64	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa	a	5.295.004.150,00	3.932.848.999,00	74,27	7.310.298.051,00
65	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa	b	727.930.126,00	519.676.708,00	71,39	937.488.790,00
66	Jumlah Transfer / Bagi Hasil Pendapatan ke Desa		6.022.934.276,00	4.452.525.707,00	73,93	8.247.786.841,00
67						
68	BANTUAN KEUANGAN	2				
69	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa					

No	Uraian	Reff	2024		%	2023
			Anggaran	Realisasi		
69	Bantuan Keuangan ke Desa	a.	145.467.288.100,00	145.467.288.060,00	100,00	141.201.419.293,00
70	Bantuan Keuangan Lainnya		-	-	-	-
71	Jumlah Transfer Bantuan Keuangan		145.467.288.100,00	145.467.288.060,00	100,00	141.201.419.293,00
72	Jumlah Transfer		151.490.222.376,00	149.919.813.767,00	98,96	149.449.206.134,00
73	Jumlah Belanja dan Transfer		1.542.018.824.892,00	1.490.658.527.213,49	96,67	1.510.627.332.239,25
74						
75	SURPLUS / (DEFISIT)		(6.666.745.844,00)	54.421.703.671,25	(816,32)	(5.989.820.921,34)
76						
77	PEMBIAYAAN	7.5.1.3				
78	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	a.	-	-	-	-
79	Penggunaan SILPA		14.666.745.844,00	11.026.844.179,66	75,18	13.516.665.101,00
80	Penerimaan Pinjaman Daerah		-	-	-	8.000.000.000,00
81	Penerimaan Kembali Piutang		-	-	-	-
82	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		14.666.745.844,00	11.026.844.179,66	75,18	21.516.665.101,00
83						
84	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	b.	-	-	-	-
85	Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah		-	-	-	4.500.000.000,00
86	Pembayaran Pokok Utang		8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	100,00	-
87	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	100,00	4.500.000.000,00
88	Pembiayaan Netto		6.666.745.844,00	3.026.844.179,66	45,40	17.016.665.101,00
89						
90	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	7.5.1.4	-	57.448.547.850,91	-	11.026.844.179,66

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Pangkajene, 23 Mei 2025
 PEMERINTAH KABUPATEN
 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
 BUPATI.



H. MUHAMMAD YUSRIAN TALOGAU



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)				
No	Uraian	Reff	2024	2023
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	7.5.2.	11.026.844.179,66	13.516.665.101,00
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		11.026.844.179,66	13.516.665.101,00
3	Subtotal (1 - 2)		-	-
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)		57.448.547.850,91	11.026.844.179,66
5	Subtotal (3 + 4)		57.448.547.850,91	11.026.844.179,66
6	Koreksi/Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		-	-
7	Lain-Lain		-	-
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)		57.448.547.850,91	11.026.844.179,66

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

Pangkajene, 23 Mei 2025

PEMERINTAH KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
BUPATI



H. MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NERACA

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Reff	2024	2023
1	ASET	7.5.3		
2	ASET LANCAR	7.5.3.1		
3	Kas di Kas Daerah	a.	51.192.990.140,33	8.342.507.349,12
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	b.	600.100,19	6.900.001,00
5	Kas di Bendahara Penerimaan	c.	37.794.200,00	576.290.600,00
6	Kas di Bendahara BLUD	d.	5.182.497.148,03	514.530.737,97
7	Kas di Bendahara FKTP	e.	19.962.911,00	67.189.850,00
8	Kas di Bendahara BOS	f.	-	14.299.000,00
9	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	g.	791.946,36	1.505.126.641,57
10	Kas Dana BOSP	h.	42.884.196,00	-
11	Kas Dana BOK Puskesmas	i.	971.027.209,00	-
12	Piutang	j.	127.451.490.749,24	124.343.614.547,40
13	Piutang Pajak Daerah	k.	87.154.824.781,68	86.387.139.424,84
14	Piutang Retribusi Daerah	l.	4.924.221.232,86	4.735.902.043,86
15	Piutang Pengelolaan Hasil Kekayaan Daerah yang Sah	m.	563.744.044,00	563.744.044,00
16	Piutang Lain-Lain PAD yang SAH	n.	9.637.390.612,00	9.633.100.649,00
17	Piutang Transfer Antar Daerah	o.	24.153.388.975,00	22.003.807.282,00
18	Piutang Lainnya	p.	1.017.921.103,70	1.019.921.103,70
19	Penyisihan Piutang	q.	(78.305.609.909,84)	(76.722.197.806,61)
20	Penyisihan Piutang Pendapatan	r.	(77.287.688.806,14)	(75.702.276.702,91)
21	Penyisihan Piutang Lainnya	s.	(1.017.921.103,70)	(1.019.921.103,70)
22	Beban dibayar Dimuka	t.	408.290.618,65	80.846.584,03
23	Persediaan	u.	18.430.799.952,15	13.741.026.849,61
24	Jumlah Aset Lancar		125.433.519.261,11	72.470.134.354,09
25	INVESTASI JANGKA PANJANG	7.5.3.2		
26	Investasi Non Permanen			
27	Investasi Permanen			
28	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	a.	39.528.791.312,05	41.853.015.898,97
29	Jumlah Investasi Permanen		39.528.791.312,05	41.853.015.898,97
30	ASET TETAP	7.5.3.3		
31	Tanah	a.	212.073.758.071,18	207.933.654.592,45
32	Peralatan dan Mesin	b.	788.979.235.345,36	725.415.924.885,92
33	Gedung dan Bangunan	c.	1.337.566.477.298,15	1.254.724.273.673,74
34	Jalan, Irigasi dan Jaringan	d.	2.514.619.243.433,95	2.440.488.664.108,83
35	Aset Tetap Lainnya	e.	20.202.107.113,81	19.557.668.713,81
36	Konstruksi dalam Pengerjaan	f.	63.778.749.287,69	52.594.442.830,63
37	Akumulasi Penyusutan	g.	(3.075.669.573.822,97)	(2.808.947.040.527,09)
38	Jumlah Aset Tetap		1.861.549.996.727,17	1.891.767.588.278,29
41	DANA CADANGAN			
42	Dana Cadangan			
43	Jumlah Dana Cadangan		-	-
44	ASET LAINNYA	7.5.3.4		
45	Tagihan Jangka Panjang	a.	94.760.874,00	99.260.874,00
46	Aset Tak Berwujud	b.	6.466.292.636,45	5.768.117.595,45
47	Amortisasi Aset Tak Berwujud	c.	(4.547.846.494,63)	(3.846.229.649,54)
48	Aset Tak Berwujud Netto	d.	1.918.446.141,82	1.921.887.945,91
49	Aset Lain-Lain	e.	11.581.425.827,81	11.545.175.827,81
	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)		324.179.000,00	-
50	Jumlah Aset Lainnya		13.918.811.843,63	13.566.324.647,72
51	Jumlah Aset		2.040.431.119.143,96	2.019.657.063.179,07
52	KEWAJIBAN	7.5.3.5		
53	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
54	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	a.	-	8.000.000.000,00
55	Pendapatan diterima dimuka	b.	129.570.458,33	137.457.666,70
56	Utang Belanja	c.	57.427.721.660,89	52.883.646.884,49
57	Utang Jangka Pendek Lainnya	d.	-	-
58	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		57.557.292.119,22	61.021.104.551,19
59	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
60	Kewajiban Jangka Panjang			
61	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-

No	Uraian	Reff	2024	2023
62	Jumlah Kewajiban		57.557.292.119,22	61.021.104.551,19
63	EKUITAS	7.5.3.6	1.982.873.827.024,74	1.958.635.958.627,88
64	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.040.431.119.143,96	2.019.657.063.179,07
			-	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

Pangkajene, 23 Mei 2025
PEMERINTAH KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
BUPATI.



H. MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Reff	2024	2023	Kenalkan / (Penurunan)	%
1	KEGIATAN OPERASIONAL					
2	PENDAPATAN	7.5.4.1				
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	a.				
4	Pendapatan Pajak Daerah - LO	1.	137.296.075.839,37	96.326.568.166,50	40.969.507.472,87	42,53
5	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	2.	12.286.665.697,00	11.149.813.004,00	1.136.852.693,00	10,20
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	3.	13.009.057.431,00	13.041.042.112,34	(31.984.681,34)	(0,25)
7	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO	4.	67.075.785.986,60	64.917.755.778,59	2.158.030.208,01	3,32
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (4 s/d 7)		229.667.584.753,97	185.435.179.061,43	44.232.405.692,54	55,81
9						
10	PENDAPATAN TRANSFER - LO	b.				
11	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.				
12	Dana Bagi Hasil Pajak - LO		14.229.219.664,00	14.684.424.120,00	(455.204.456,00)	(3,10)
13	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO		11.708.601.000,00	8.735.978.250,00	2.972.622.750,00	34,03
14	Dana Alokasi Umum - LO		787.431.926.000,00	746.290.902.260,00	41.141.023.740,00	5,51
15	Dana Alokasi Khusus - LO		341.828.158.407,00	344.179.419.601,00	(2.351.261.194,00)	(0,68)
16	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan (11 s/d 16)		1.155.197.905.071,00	1.113.890.724.231,00	41.307.180.840,00	3,71
17						
18	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya					
19	Dana Penyesuaian - LO	2.	11.568.556.000,00	17.797.293.000,00	(6.228.737.000,00)	(35,00)
20	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		11.568.556.000,00	17.797.293.000,00	(6.228.737.000,00)	(35,00)
21						
22	Transfer Pemerintah Provinsi	3				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	a)	60.216.121.547,00	68.832.746.498,02	(8.616.624.951,02)	(12,52)
24	Bantuan Keuangan dari Provinsi - LO	b)	2.604.360.000,00	30.962.570.250,00	(28.358.210.250,00)	(91,59)
25	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (22 s/d 23)		62.820.481.547,00	99.795.316.748,02	(36.974.835.201,02)	(37,05)
26	Jumlah Pendapatan Transfer - LO (17 + 20 + 24)		1.229.586.942.618,00	1.231.483.333.979,02	(1.896.391.361,02)	(0,15)
27						
28	LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	c.				
29	Pendapatan Hibah - LO		16.912.207.329,98	16.705.368.281,10	206.839.048,88	1,24
30	Pendapatan Lainnya - LO		22.910.716.961,00	23.429.994.836,00	(519.277.875,00)	(2,22)
31	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO (27 s/d 28)		39.822.924.290,98	40.135.363.117,10	(312.438.826,12)	(0,78)
32	Jumlah Pendapatan (8 + 25 + 29)		1.499.077.451.662,95	1.457.053.876.157,55	42.023.575.505,40	2,88
33						
34	BEBAN	7.5.4.2				
35	BEBAN OPERASI	a.				
36	Beban Pegawai - LO	1.	663.886.369.058,00	611.395.215.006,00	52.491.154.052,00	8,59
37	Beban Barang - LO	2.	82.592.110.083,95	102.663.483.180,68	(20.071.373.096,73)	(19,55)
38	Beban Persediaan - LO		-	-	-	-
39	Beban Jasa - LO	3.	145.443.606.104,71	146.176.061.565,72	(732.455.461,01)	(0,50)
40	Beban Pemeliharaan - LO	4.	7.898.735.957,00	7.059.777.865,24	838.958.091,76	11,88
41	Beban Perjalanan Dinas - LO	5.	47.041.568.567,00	49.954.359.813,63	(2.912.791.216,63)	(5,83)
42	Beban Uang/Jasa Untuk diberikan ke Pihak	6.	7.341.404.760,00	7.376.971.100,00	(35.566.340,00)	(0,48)
43	Beban barang dan Jasa BOS - LO	7.	42.060.514.566,00	45.969.495.825,00	(3.908.981.259,00)	(8,50)
44	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	8.	500.127.264,00	-	500.127.264,00	-
45	Beban barang dan Jasa BLUD - LO	9.	54.638.666.833,63	32.685.232.929,43	21.973.433.904,20	67,27
46	Beban Bunga - LO	10.	215.000.000,00	-	215.000.000,00	-
47	Beban Subsidi - LO		-	-	-	-
48	Beban Hibah - LO	11.	59.550.024.144,00	65.949.988.908,00	(6.399.962.764,00)	(9,70)
49	Beban Bantuan Sosial - LO	12.	2.610.556.941,00	9.258.946.913,00	(6.648.389.972,00)	(71,81)
50	Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO	13.	270.121.356.783,97	263.820.661.088,24	6.300.695.695,73	2,39
51	Beban Penyisihan Piutang - LO	14.	2.203.469.729,06	2.445.549.516,21	(242.079.787,15)	(9,90)
52	Beban Lain-Lain - LO		-	-	-	-
53	Jumlah Beban Operasi (33 s/d 44)		1.386.103.510.822,32	1.344.735.741.711,15	41.367.769.111,17	3,08
54						
55	BEBAN TRANSFER	b.				
56	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa - LO	1.	83.566.433.807,00	84.347.028.144,00	(780.594.337,00)	(0,93)
57	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya - LO		-	-	-	-
58	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO		377.591.060,99	-	377.591.060,99	-
59	Jumlah Beban Transfer (47 s/d 48)		83.944.024.867,99	84.347.028.144,00	(403.003.276,01)	(0,48)
60	Jumlah Beban		1.470.047.535.690,31	1.429.082.769.855,15	40.964.765.835,16	2,87
61						
62	Jumlah Surplus / (Defisit) dari Beban (30 - (45 + 49))		29.029.915.972,64	27.971.106.302,40	1.058.809.670,24	3,79
63						
64						
65						
66	SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	7.5.4.3				
67	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		620.042.370,83	-	620.042.370,83	-
68	SURPLUS NON OPERASIONAL		620.042.370,83	-	-	-
69						
70	Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	a	7.121.239.116,26	8.153.377.655,57	(1.032.138.539,31)	(12,66)

No	Uraian	Reff	2024	2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
71	DEFISIT NON OPERASIONAL		7.121.239.116,26	8.153.377.655,57	(1.032.138.539,31)	(12,66)
72	Jumlah Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional (52 s/d 53)		(6.501.196.745,43)	(8.153.377.655,57)	1.652.180.910,14	(20,26)
73						
74	Surplus / (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		22.528.719.227,21	19.817.728.646,83	2.710.990.580,38	13,68
75						
76	POS LUAR BIASA					
77	PENDAPATAN LUAR BIASA - LO					
78	Pendapatan Luar Biasa - LO		-	-	-	-
79	Jumlah Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
80						
81	BEBAN LUAR BIASA - LO					
82	Beban Luar Biasa - LO	7.5.4.4	1.547.677.900,00	3.970.415.183,00	(2.422.737.283,00)	(61,02)
83	Jumlah Beban Luar Biasa		1.547.677.900,00	3.970.415.183,00	(2.422.737.283,00)	(61,02)
84	Jumlah Surplus / (Defisit) dari Pos Luar Biasa		(1.547.677.900,00)	(3.970.415.183,00)	(2.422.737.283,00)	61,02
85						
86	SURPLUS / (DEFISIT)	7.5.4.5	20.981.041.327,21	15.847.313.463,83	5.133.727.863,38	32,39

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

Pangkajene, 23 Mei 2025
PEMERINTAH KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN



H. MUHAMMAD YUSRI LALOGAU



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Reff	2024	2023
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
2	Arus Masuk Kas	7.5.5.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah	a	136.543.303.074,16	94.937.575.968,44
4	Penerimaan Retribusi Daerah	b	12.095.295.508,00	9.440.950.198,00
5	Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	c	13.009.057.431,00	12.927.838.786,00
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	d	66.890.940.723,60	59.130.875.287,45
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil	e	25.613.641.664,00	27.085.286.494,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum	f	787.431.926.000,00	746.290.902.260,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	g	124.338.989.980,00	134.234.092.286,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	h	217.489.168.427,00	209.945.327.315,00
11	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Penugasan	i	-	-
12	Penerimaan Dana Insentif Daerah	j	-	17.797.293.000,00
13	Penerimaan Dana Desa	j	66.353.379.960,00	65.102.177.990,00
14	Penerimaan Insentif Fiskal		11.568.556.000,00	-
15	Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	k	53.106.576.104,00	76.123.891.525,02
16	Penerimaan Bantuan Keuangan	l	7.564.323.750,00	26.002.606.500,00
17	Penerimaan Hibah	m	100.001,98	2.002.555.272,00
18	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	n	22.910.716.961,00	23.429.994.836,00
		g	-	-
19	Jumlah Arus Masuk Kas (01 s/d 20)		1.544.915.975.584,74	1.504.451.367.717,91
20	Arus Keluar Kas	7.5.5.2		
21	Pembayaran Pegawai	a	660.312.992.167,00	611.642.239.921,00
23	Pembayaran Barang dan Jasa	b	379.281.519.837,12	366.587.257.014,79
24	Pembayaran Subsidi		215.000.000,00	0,00
26	Pembayaran Hibah	c	61.888.921.596,00	64.547.861.642,00
27	Pembayaran Bantuan Sosial	d	2.758.326.941,00	16.988.146.913,00
29	Pembayaran Bantuan Keuangan		-	-
30	Pembayaran Tak Terduga	f	1.958.577.900,00	3.970.415.183,00
32	Pembayaran Belanja Bagi Hasil Retribusi kepada Pemerintahan	g	4.452.525.707,00	8.247.786.841,00
33	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan ke Daerah Provinsi			
35	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	h	145.467.288.060,00	141.201.419.293,00
36	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik			
38	Pembayaran Kejadian Luar Biasa		-	-
39	Jumlah Arus Keluar Kas (22 s/d 34)		1.256.335.152.208,12	1.213.185.126.807,79
41	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi (20 - 34)		288.580.823.376,62	291.266.240.910,12
42	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN	7.5.5.3		
43	Arus Masuk Kas			
44	Penjualan Aset Lainnya	a	-	186.143.600,00
45	Penjualan Aset Lain-lain	b	164.255.300,00	-
46	Jumlah Arus Masuk Kas (39 s/d 47)		164.255.300,00	186.143.600,00
47	Arus Kas Keluar	7.5.5.4		
48	Perolehan Tanah	a	465.430.000,00	4.390.301.200,00
49	Perolehan Peralatan dan mesin	b	54.607.117.769,37	55.003.140.097,00
50	Perolehan Gedung dan Bangunan	c	99.027.835.883,00	110.546.633.594,54
51	Perolehan Jalan, irigasi dan jaringan	d	70.691.907.253,00	118.039.776.751,92
52	Perolehan Aset Tetap Lainnya	e	8.829.456.200,00	9.404.188.287,00
53	Perolehan Aset Lainnya	f	701.627.900,00	58.165.501,00
54	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	4.500.000.000,00
55	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen			
56	Jumlah Arus Keluar Kas (50 s/d 58)		234.323.375.005,37	301.942.205.431,46
57	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi		(234.159.119.705,37)	(301.756.061.831,46)
58	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	7.5.5.5		
59	Arus Masuk Kas	7.5.5.5		
60	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
61	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain		0,00	0,00
62	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank	a	0,00	8.000.000.000,00

No	Uraian	Reff	2024	2023
63	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
64	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
65	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
66	Jumlah Arus Masuk Kas (61 s/d 71)		0,00	8.000.000.000,00
67	Arus Keluar Kas	7.5.5.6		
68	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat		0,00	0,00
69	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain		0,00	0,00
70	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank	a	8.000.000.000,00	0,00
71	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
72	Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
73	Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
74	Jumlah Arus Keluar Kas (75 s/d 83)		8.000.000.000,00	0,00
75	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan (72 - 84)		-8.000.000.000,00	8.000.000.000,00
76	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	7.5.5.7		
77	Arus Masuk Kas			
78	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	a	43.742.941.010,00	48.666.645.794,00
79	Penyesuaian Saldo awal Bendahara Penerima		-	-
80	Penyesuaian Saldo awal FKTP		-	-
81	Jumlah Arus Masuk Kas		43.742.941.010,00	48.666.645.794,00
80	Arus Keluar Kas			
81	Pengeluaran perhitungan pihak ketiga		43.742.941.010,00	48.666.645.794,00
82	Jumlah Arus Keluar Kas		43.742.941.010,00	48.666.645.794,00
83	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris		-	-
84	Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	7.5.5.8	46.421.703.671,25	(2.489.820.921,34)
85				
86	Saldo Awal Kas	7.5.5.8.a	11.026.844.179,66	13.516.665.101,00
87	Saldo Akhir Kas	7.5.5.8.b	57.448.547.850,91	11.026.844.179,66
88	Saldo Akhir Kas		57.448.547.850,91	11.026.844.179,66

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

Pangkajene, 23 Mei 2025
PEMERINTAH KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
BUPATI,



H. MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	Uraian	Reff	2024	2023
1	EKUITAS AWAL	7.5.6.1	1.958.635.958.627,88	1.937.408.637.176,95
2	SURPLUS / (DEFISIT) - LO		20.981.041.327,21	15.847.313.463,83
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR		3.256.827.069,65	5.380.007.987,10
4	Saldo Awal Persediaan		-	-
5	Persediaan		-	-
6	Selisih Revaluasi Aset Tetap		-	-
7	Saldo Awal Koreksi Ekuitas		-	-
8	Saldo Awal BOS		-	-
9	Review BOS		-	-
10	Perubahan Aset		-	-
11	Penyusutan		-	-
12	Aset Tak Berwujud (ATB)		-	-
13	Piutang		-	-
14	Jasa Giro		-	-
15	Utang Jangka Pendek Lainnya		-	-
16	Koreksi Lainnya		3.256.827.069,65	5.380.007.987,10
17	Perubahan Ekuitas		-	-
18			-	-
19	EKUITAS AKHIR		1.982.873.827.024,74	1.958.635.958.627,88

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

Pangkajene, 23 Mei 2025

PEMERINTAH KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
BUPATI,



H. MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU



7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

7.1. PENDAHULUAN

7.1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan memiliki manfaat untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan ini dapat digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu pemerintah daerah serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Tujuan dari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah ini harus dapat memberikan manfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik itu keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- (1) Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- (2) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- (3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- (4) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- (5) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

7.1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 136 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7073);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);



18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiscal Nasional (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6909);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 799);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1076);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 582);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023 Nomor 12);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 Nomor 5);
28. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 Nomor 45);
29. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 Nomor 18).
30. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 34 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 34);



7.1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan disusun sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
 - A. Umum
 - B. Maksud dan Tujuan
 - C. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - D. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
- BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2024
 - A. Ekonomi Makro
 - B. Kebijakan Keuangan
 - C. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
 - A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - B. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian Target
- BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI
 - A. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPKD
 - B. Basis Pengukuran yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan SKPKD
 - C. Basis Pengukuran yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan SKPKD
 - D. Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
- BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
 - A. Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan SKPKD
 - 1. Pendapatan
 - 2. Belanja
 - 3. Pembiayaan
 - 4. Aset
 - 5. Kewajiban, dan
 - 6. Ekuitas Dana
 - B. Pengungkapan atas pos-pos asset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas
- BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN
- BAB VII PENUTUP



7.2. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2024

7.2.1. EKONOMI MAKRO

Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024

7.2.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan ekonomi daerah adalah strategi yang dikembangkan oleh pemerintah daerah untuk mempromosikan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di daerah. Kebijakan ini dapat berupa regulasi, investasi, pembiayaan, dan strategi lainnya yang ditujukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan ekonomi. Kebijakan ini juga dapat berupa strategi yang mengatur aspek-aspek seperti infrastruktur, produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Kebijakan ini dapat membantu meningkatkan kesempatan kerja, menciptakan pasar yang berkembang, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut. Kebijakan ekonomi daerah juga dapat meningkatkan keadilan sosial dan mengurangi ketimpangan antara wilayah.

Adapun langkah dan strategi kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2024 dalam pencapaian Pembangunan sesuai tema Pembangunan tahun 2024 Pemantapan Pelayanan Publik, Inklusifitas Pertumbuhan Ekonomi, Pengembangan Iklim Demokrasi di Dukung Oleh Pemeliharaan Kualitas Ketentraman Dan Ketertiban adalah:

1. Peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
2. Meningkatkan Komitmen pimpinan dan staf dalam implementasi SAKIP di OPD;
3. Meningkatkan komitmen pimpinan dan staf dalam pengelolaan keuangan dari perencanaan sampai dengan pertanggungjaban;
4. Pemanfaatan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan publik;
5. Penerapan teknologi Informasi elektronik secara terintegrasi untuk mendukung pengembangan good governance antar organisasi di lingkungan pemerintah;
6. Pengintegrasian sektor pertanian, perikanan dan perkebunan melalui sektor pariwisata dan meningkatkan akses pemasaran produk melalui toko online;
7. Memperkuat sistem dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan;
8. Akselerasi pemerataan pembangunan infrastruktur kecamatan luar kota;
9. Meningkatkan manajemen dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;
10. Meningkatkan promosi komunikasi, informasi dan edukasi promotif dan preventif hidup sehat;



11. Pemberdayaan masyarakat dalam Pengembangan usaha pengolahan hasil produksi pertanian dan perikanan serta sektor potensial lainnya skala kecil dan menengah;
12. Meningkatkan perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
13. Penyediaan infrastruktur pengelolaan air limbah dan persampahan; dan
14. Penguatan upaya pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pembangunan rendah karbon.

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan dan penciptaan kesempatan kerja. Hal tersebut sesuai dengan teori atau proses penetasan ke bawah (trickle down effect). Untuk Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari 2020 sampai tahun 2024 mengalami trend yang positif, yakni dari Tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar -1,69 persen akibat dampak dari Covid-19, terus mengalami pemulihan ekonomi dan trend kenaikan hingga tahun 2023 dari 3,46 persen meningkat menjadi 4,93 persen pada tahun 2022 dan 4,75 persen di tahun 2023. Untuk tahun 2024 pertumbuhan ekonomi kabupaten Pangkajene dan Kepulauan kembali mengalami kenaikan menjadi 5,00 persen. bila dibandingkan dengan provinsi dan nasional pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 mengalami pertumbuhan yang sama atau setara yaitu dikisaran 5 persen lebih.

Adapun Perkembangan Capaian laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi dan Nasional Tahun 2022-2024 digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2022 - 2024 (persen)

Pertumbuhan Ekonomi	Tahun		
	2022	2023	2024
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	4,93	4,75	5
Provinsi Sulawesi Selatan	5,09	4,51	5,02
Nasional	5,31	5,04	5,02

Sumber: BPS dan diolah oleh Bappedalitbangda Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025

Jika dilihat dari nilai PDRB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2024 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Nilai PDRB pada Tahun 2023 menjadi Rp19.236,71 Miliar kemudian naik menjadi Rp20.197,59 Miliar ditahun 2024. Atau mengalami kenaikan Nilai PDRB perkembangan Atas Harga Dasar Konstan (ADHK) sebesar naik Rp960,88 Miliar.



7.2.1.2. Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan sedangkan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Selama periode tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berkurang sebanyak 3,124 ribu jiwa, dari 46,06 ribu jiwa pada tahun 2023 menjadi 42,94 ribu jiwa pada tahun 2024. Berdasarkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam rentang waktu satu tahun, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 0,99 persen poin, dari 13,40 persen pada tahun 2023 menjadi 12,41 persen pada tahun 2024.

Adapun perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi dan Nasional untuk Tahun 2022-2024 digambarkan pada tabel berikut;

Tabel 2.2 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2022 - 2024 (persen)

Kemiskinan	Tahun		
	2022	2023	2024
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	13,92	13,40	12,41
Provinsi Sulawesi Selatan	8,66	8,70	7,77
Nasional	9,57	9,36	8,57

Sumber: BPS dan diolah oleh Bappelitbangda Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2025

7.2.1.3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase dari jumlah orang yang mencari pekerjaan dari jumlah orang yang sedang aktif mencari pekerjaan. Ini diukur dengan menghitung jumlah orang yang sedang mencari pekerjaan dibagi dengan jumlah populasi usia produktif. Ini adalah indikator utama untuk mengukur tingkat pengangguran di sebuah negara. Tingkat terbuka yang tinggi menunjukkan bahwa ada banyak orang yang mencari pekerjaan tetapi tidak dapat menemukannya. Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan bagaimana kondisi ekonomi sebuah negara. Jika tingkat pengangguran terbuka tinggi, itu berarti bahwa ekonomi sedang lesu dan bahwa ada banyak orang yang sedang tertinggal.



Untuk mengukur tingkat ketersediaan kesempatan kerja oleh pemerintah kabupaten maka tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu ukurannya. Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2024 sebesar 3,99 dari 4,75 yang ditargetkan. Kondisi ini menunjukkan tingkat capaian TPT Kab.Pangkajene dan Kepulauan sebesar 116,00% yang menunjukkan TPT trend yang positif karena terjadi penurunan pada tingkat pengangguran. Bila disandingkan dengan tahun 2023 dengan capaian TPT sebesar 5,05 maka memperlihatkan adanya penurunan yang cukup signifikan sebesar 1,06 point ditahun 2024. Hal ini menunjukkan trend yang sangat positif dalam upaya keseriusan pemerintah dalam menurunkan tingkat pengangguran di Kab.Pangkajene dan Kepulauan.

Adapun Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024 digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2022 – 2024 (persen)

Kemiskinan	Tahun		
	2022	2023	2024
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	5,23	5,05	3,99
Provinsi Sulawesi Selatan	4,51	4,33	4,19
Nasional	5,86	5,5 - 6,0	5,0 – 5,7

Sumber: BPS dan diolah oleh Bappelitbangda Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2025

7.2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengetahui tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, meliputi: Angka Usia Harapan Hidup (UHH) untuk mengukur peluang hidup; rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf untuk mengukur status tingkat pendidikan penduduk; serta pengeluaran riil per kapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak.

Kualitas sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam setiap gerak pembangunan. Tantangan besar pembangunan adalah bagaimana dapat memperbaiki kualitas kehidupan manusia. Upaya perbaikan kualitas manusia, selain upaya peningkatan pendapatan adalah juga perlu upaya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan manusia. sebagai alat ukur yang relevan untuk mengetahui peningkatan derajat kualitas SDM ditetapkan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM mengukur pencapaian keseluruhan dari suatu negara atau daerah dengan tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat (a long healthy life),



dimensi pengetahuan (knowledge) dan dimensi standar hidup layak (descent standard of living).

Berdasarkan Hasil Publikasi oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sejak tahun 2022 setelah pelaksanaan Sensus Penduduk Lanjutan (Long Form SP2020) yang dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19, BPS melakukan perubahan pengukuran IPM dengan menggunakan metode Hasil Long Form 2020. Pengukuran dengan metode ini dianggap yang lebih akurat dan komprehensif, lebih presisi dan dapat diandalkan sehingga dapat membantu pemerintah dalam membuat kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Pangkep terutama dalam hal Umur Harapan Hidup, yang merupakan salah satu komponen IPM. Adapun realisasi perkembangan IPM Kab.Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 berdasarkan Hasil Long Form 2020 sebesar 73,87 dari target 71,03 yang ditargetkan. Kondisi menunjukkan tingkat capaian IPM Pangkep sebesar 103,99% dan bila disandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 73,23, maka ditahun 2024 ini trend IPM mengalami peningkatan sebesar 0,64 point. Perkembangan IPM Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi dan Nasional Tahun 2022-2024 digambarkan pada tabel berikut;

Tabel 2.4 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2022 - 2024 (persen)

Kemiskinan	Tahun		
	2022	2023	2024
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	69,79	73,23	73,87
Provinsi Sulawesi Selatan	73,96	74,60	75,18
Nasional	73,77	74,39	75,02

Sumber: BPS dan diolah oleh Bappelitbangda Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2025

7.2.1.5. Rasio Gini

Rasio Gini adalah angka yang menggambarkan bagaimana suatu populasi membagi kesenjangan kekayaan atau pendapatan. Rasio Gini adalah nilai antara 0 dan 1, di mana nilai 0 menunjukkan bahwa semua orang memiliki kesenjangan yang sama, sedangkan nilai 1 menunjukkan bahwa satu orang memiliki semua kekayaan atau pendapatan. Nilai rata-rata rasio Gini biasanya antara 0,2 dan 0,5 untuk berbagai negara. Nilai rasio Gini yang lebih tinggi menunjukkan bahwa pendapatan di antara orang-orang lebih tidak merata.

Rasio Gini adalah angka yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan atau kekayaan dalam suatu ekonomi. Rasio Gini berkisar antara 0 dan 1, dengan nilai 0 menunjukkan bahwa semua penduduk memiliki pendapatan yang sama, dan nilai 1



menunjukkan bahwa semua pendapatan dihasilkan oleh satu orang. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan lebih besar ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Rasio Gini sering digunakan untuk membandingkan tingkat kesenjangan antara orang kaya dan miskin di suatu negara.

Pada tahun 2024 nilai Rasio Gini Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ditargetkan sebesar 0,324 dan terealisasi sebesar 0,317. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan terhadap kondisi ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan adanya penurunan ketimpangan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,354. Menurunnya ketimpangan ini dipengaruhi salah satunya adalah peningkatan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan mengurangi kesenjangan pendapatan.

Tabel 2.5 Rasio Gini Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2022 - 2024 (persen)

Kemiskinan	Tahun		
	2022	2023	2024
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	0,334	0,354	0,317
Provinsi Sulawesi Selatan	0,365	0,377	0,363
Nasional	0,403	0,378	0,377

Sumber: BPS dan diolah oleh Bappelitbangda Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2025

7.2.1.6. PDRB Perkapita

PDRB Perkapita adalah nilai Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dibagi dengan jumlah penduduk di daerah tersebut. Ini mengukur tingkat kesejahteraan di daerah tertentu, dan juga dipergunakan sebagai indikator kekuatan ekonomi relatif antara daerah yang berbeda. PDRB perkapita adalah jumlah total pendapatan dari produk domestik regional dibagi dengan jumlah penduduk yang menghasilkan pendapatan tersebut. Ini adalah ukuran kesejahteraan dan kemakmuran di daerah tertentu. Semakin tinggi PDRB perkapita, semakin tinggi tingkat kesejahteraan di daerah tersebut.

PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau persatu orang penduduk. Peningkatan PDRB ini dipengaruhi oleh berjalannya kegiatan ekonomi yang juga mempengaruhi tingkat kemakmuran masyarakat. Berdasarkan PDRB ADHK Tahun 2010, nilai PDRB perkapita Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp90,37 juta dan terealisasi sebesar Rp96,33 juta atau dengan tingkat capaian sebesar 106,59. Hal tersebut menunjukkan bahwa aktifitas ekonomi Masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berjalan sangat baik yang



mengindikasikan peningkatan kemakmuran masyarakat dan ini tercermin dari Pendapatan Domestik Regional Bruto per Kapita. PDRB per kapita yang semakin meningkat.

Tabel 2.6 PDRB Perkapita Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 - 2024 (juta)

Kemiskinan	Tahun		
	2022	2023	2024
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	80,74	91,86	96,33
Provinsi Sulawesi Selatan	65,59	69,70	73,57

7.2.1.7. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2024

Arah kebijakan Ekonomi makro secara nasional ditujukan terutama untuk mendukung prioritas pembangunan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dengan fokus belanja untuk peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pangan (pertanian dan perikanan), pariwisata, jaring pengaman sosial, dunia usaha, dan UMKM.

Kebijakan tersebut dilakukan secara komprehensif dengan reformasi di bidang belanja melalui kebijakan antara lain pertama, efisiensi belanja melalui penajaman biaya operasional sejalan dengan perubahan proses kerja. Kedua, optimalisasi teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian pelayanan (service delivery). Ketiga, redesain sistem penganggaran yang menggunakan pendekatan belanja yang lebih baik (spending better) yang fokus pada pelaksanaan program prioritas berbasis pada hasil (result based) dan efisiensi kebutuhan dasar, serta antisipatif terhadap berbagai tekanan (automatic stabilizer).

Arah kebijakan ekonomi makro secara nasional menderivasi arah kebijakan perekonomian daerah. Interaksi arah kebijakan ini merupakan faktor penting guna menjamin efektifitas pendanaan dalam pencapaian sasaran perekonomian daerah dan sasaran pembangunan nasional melalui pendekatan secara holistik ini akan lebih terfokus pada penyelesaian permasalahan-permasalahan perekonomian regional dan nasional, sehingga dampak yang dihasilkan dan manfaat yang diperoleh dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

7.2.1.8. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah adalah strategi yang dirancang oleh pemerintah daerah untuk mengelola dan menggunakan sumber daya keuangan yang tersedia untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Ini termasuk mengatur pajak, hutang, belanja, dan pembuatan



anggaran daerah. Tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan pengalokasian anggaran yang ada dan memastikan bahwa sumber daya keuangan daerah digunakan secara efisien dan efektif. Kebijakan keuangan daerah juga dapat membantu pemerintah daerah memenuhi tujuan pembangunan jangka panjangnya.

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2024 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD tahun 2021-2026, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR).

Regulasi terbaru yang menjadi rujukan kebijakan pengelolaan keuangan daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana komponen keuangan daerah meliputi komponen Pendapatan daerah, Belanja daerah dan Pembiayaan daerah yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dengan demikian, arah kebijakan Keuangan Daerah akan diuraikan pada masing-masing komponen Keuangan Daerah sebagai berikut:

7.2.1.9. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pendapatan daerah adalah peningkatan pendapatan daerah melalui berbagai cara, termasuk Peningkatan pendapatan pajak daerah, Peningkatan pendapatan non-pajak, Peningkatan pendapatan lainnya, Peningkatan pendapatan daerah melalui pengelolaan sumber daya alam daerah, Peningkatan pendapatan daerah melalui pemberian insentif kepada pelaku usaha di daerah, Peningkatan pendapatan daerah melalui peningkatan efisiensi pengelolaan biaya pemerintah daerah, Peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi pemanfaatan aset daerah, Peningkatan pendapatan daerah melalui peningkatan pemasaran produk dan jasa daerah.

Dikaitkan dengan Kebijakan Umum Pendapatan Daerah dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, kebijakan pendapatan daerah ditujukan guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan fiskal, serta meningkatkan ruang



fiskal daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi objek untuk tujuan tersebut, selain menggambarkan kapasitas fiskal daerah juga berpotensi meningkatkan ruang fiskal daerah untuk kebutuhan alokasi belanja prioritas pembangunan daerah.

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Pendapatan daerah meliputi semua rekening kas daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh daerah.

Dalam hal peraihan pendapatan daerah sampai saat ini masih banyak dikendala dan permasalahan yang dihadapi terutama dalam peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), adapun permasalahannya adalah:

- a. Regulasi yang berlaku saat ini sudah jauh ketinggalan dibanding dengan peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Semisal beberapa peraturan daerah yang mengatur masalah tarif atau besarnya pajak/retribusi daerah terlalu kecil dibanding dengan keadaan perekonomian saat ini.
- b. Tingkat kesadaran Wajib Pajak/Retribusi yang masih rendah, disisi lain masih adanya upaya dari wajib pajak/retribusi untuk menghindari dari kewajiban membayar pajak/retribusi daerah.
- c. Belum adanya mekanisme khusus untuk mengetahui data obyek pajak, yang menyebabkan data obyek pajak tidak sesuai dengan fakta/keadaan.
- d. Fasilitas obyek retribusi belum memadai khususnya pada obyek wisata, menyebabkan sangat sedikitnya kunjungan ulang yang dilakukan oleh wisatawan.
- e. Lemahnya data dan penatausahaan perpajakan/retribusi daerah.
- f. Masih lemahnya kapasitas petugas yang menangani pungutan pendapatan daerah.
- g. Belum optimalnya kinerja BUMD.

Dengan melihat analisis kondisi / eksisting perkembangan perekonomian yang ada, mengamati perkembangan pembangunan di kawasan strategis dan melihat permasalahan yang ada, maka strategi yang ditempuh dalam peningkatan pendapatan daerah ialah:

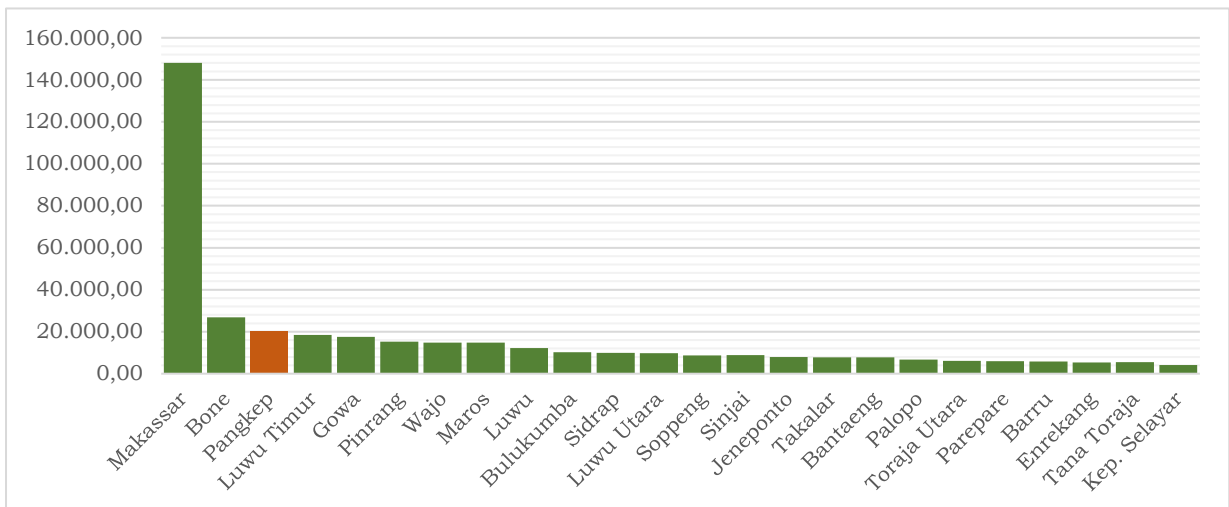
- a. Peninjauan dan penetapan regulasi yang berkaitan dengan pendapatan daerah,
- b. Peningkatan kualitas manajemen/pengelolaan potensi pendapatan daerah,
- c. Peningkatan kualitas SDM
- d. Peningkatan investasi.



Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Untuk dapat melihat pertumbuhan ekonomi kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, maka perlu menganalisis kedudukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dibandingkan dengan kab/kota lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan, dan selanjutnya juga melihat kedudukan ekonomi provinsi Sulawesi Selatan terhadap nasional. Kabupaten Pangkajene dan kepulauan PDRB berada pada peringkat ke 3 dari 24 kabupaten/kota yang ada di provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai PDRB atas harga konstan di tahun 2023 sebesar Rp19.236,71 Milyar.

Gambar 2.1 Kedudukan Ekonomi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Terhadap Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024



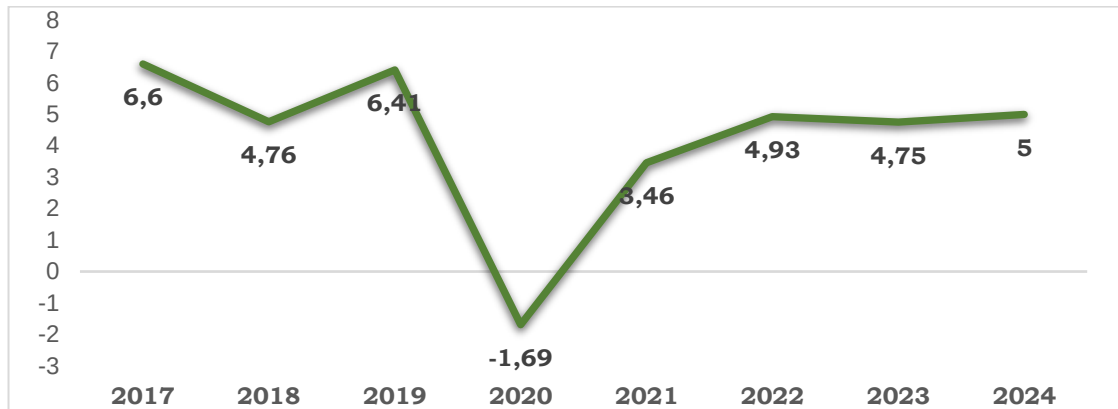
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan cenderung fluktuatif, yakni dari 6,6 persen pada tahun 2017, turun menjadi 4,76 persen pada 2018, naik menjadi 6,41 pada tahun 2019, mengalami kontraksi sebesar -1,69 persen pada 2020, naik pada tahun 2021 sebesar 3,46 persen dan naik kembali menjadi sebesar 4,93 persen pada tahun 2022. Sedangkan untuk tahun 2023 pertumbuhan ekonomi kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebesar 4,75 persen dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 5,00 persen.



Laju Pertumbuhan PDRB dari Tahun 2017-2024 disajikan pada grafik sebagai berikut:

Gambar 2.2 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan



Sumber. Badan Pusat Statistik Kab. Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025

Struktur PDRB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari sisi pengeluaran pada tahun 2024 juga tidak mengalami perubahan yang berarti. Perekonomian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan masih didominasi oleh Komponen Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 44,25 persen, dan diikuti oleh Net Ekspor Barang dan Jasa sebesar 32,89 persen. Bahkan selama kurun waktu tahun 2020-2024 perekonomian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menurut pengeluaran didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga, dengan kontribusi lebih dari separuh nilai PDRB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Komponen lainnya yang cukup besar memberikan peranan terhadap PDRB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah PMTB, serta impor dan ekspor barang dan jasa. Kondisi ini menggambarkan bahwa ekonomi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sangat tergantung pada pengeluaran konsumsi rumah tangga, meskipun tren kontribusinya fluktuatif dalam lima tahun terakhir.

Tabel 2.7 Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Pangkep Tahun 2020 – 2024 (%)

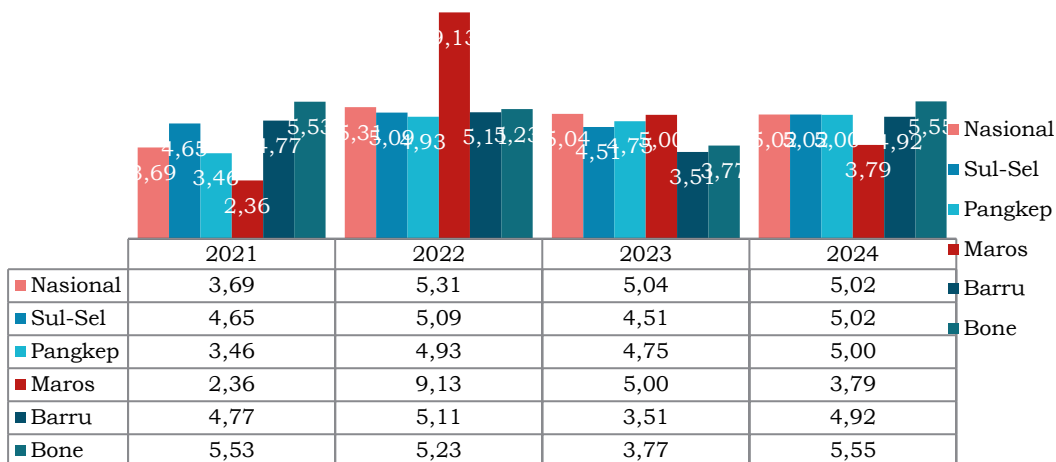
Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	41,64	41,10	42,03	43,09	44,25
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,16	1,11	1,15	1,16	1,30
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,15	4,92	4,59	4,99	5,24
Pembentukan Modal Tetap Bruto	15,62	16,46	16,32	16,37	16,16
Perubahan Inventori	0,44	0,06	0,36	0,05	0,15
Net Ekspor Barang dan Jasa	35,98	36,34	35,19	34,34	32,89
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2025



Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pangkep pada tiga tahun terakhir masih lebih rendah dibandingkan angka pertumbuhan ekonomi nasional, dan pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nasional, Provinsi dan Kabupaten Bone, dan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru dan Kabupaten Maros.

Gambar 2.3 Berikut Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan dan Nasional serta wilayah sekitarnya Tahun 2021 s/d 2024



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan 2025

Dalam rangka pembangunan daerah, diperlukan penentuan prioritas kebijakan agar pembangunan daerah dapat lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk menentukan prioritas kebijakan tersebut adalah dengan melalui analisis struktur ekonomi secara menyeluruh. Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama enam tahun terakhir (2020-2024) struktur perekonomian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Konstruksi dan; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Di antara kelima lapangan usaha tersebut, Pertambangan dan Penggalian; serta Industri Pengolahan adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Sedangkan lapangan usaha sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Konstruksi dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor mengalami penurunan peranan.



Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 5 persen. Salah satu penyebab meningkatnya peranan lapangan usaha Industri Pengolahan; Pertambangan dan Penggalian adalah Pertumbuhan kategori ini disebabkan karena meningkatnya kategori yang berhubungan langsung dengan kategori ini seperti konstruksi. Selain itu, Perusahaan pertambangan, khususnya pertambangan pasir dan kapur mulai kembali meningkatnya produksi akibat demand yang juga meningkat. Selain itu pertambangan yang dilakukan oleh usaha individu sudah mulai gencar kembali.

Sementara itu, penurunan yang terjadi pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan kelangkaan yang terjadi pada ketersediaan pupuk dan diperparah dengan cuaca buruk dan bencana yang terjadi di sepanjang tahun 2023 untuk beberapa jenis tanaman khususnya tanaman bahan makanan.

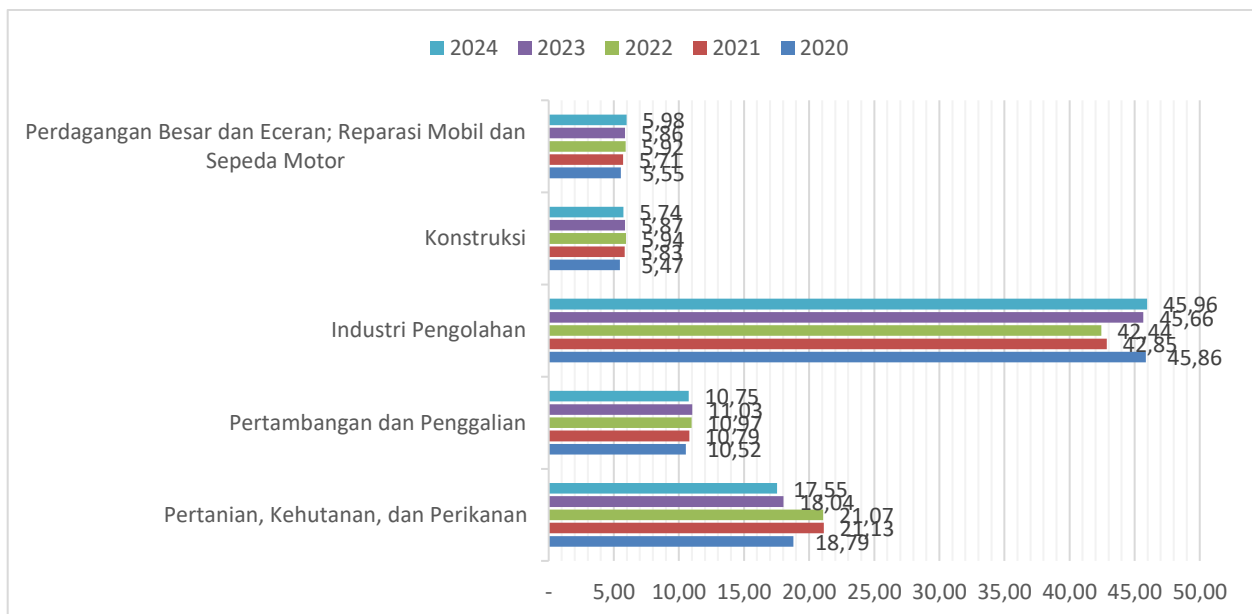
Dari sektor - sektor yang berkontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten pangkajene dan Kepulaun, perlu dilihat pergeseran perubahan struktur ekonomi dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui dalam kurung waktu dari tahun 2018-2023 apakah terjadi pergeseran sektor ekonomi kabupaten pangkajene dan kepulauan. Sektor industri Pengolahan merupakan sektor yang berkontribusi besar dalam pertumbuhan PDRB, ternyata memiliki pertumbuhan yang negatif dimana kontribusinya terus turun sejak tahun 2017 sampai tahun 2022 namun pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan yang diakibatkan oleh meningkatnya produksi semen yang dilakukan oleh PT. Semen Tonasa dan sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami peningkatan dari tahun 2017-2023, sedangkan, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; sektor Konstruksi, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang saat ini kontribusinya belum begitu signifikan namun memiliki tren pertumbuhan yang terus meningkat. Belum terlihat adanya pergeseran sektor ekonomi di Kabupaten Pangkajene dan kepulauan dimana sektor industri pengolahan masih menjadi sektor utama. Tetapi, jika dalam beberapa tahun mendatang tren pertumbuhannya diasumsikan sama, maka akan terdapat pergeseran sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan menggantikan sektor Industri Pengolahan. Hal ini dapat dilihat dari grafik di bawah.



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

Gambar 2.4 Sektor Utama Kontribusi PDRB Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Tahun 2020-2024



Sumber. Badan Pusat Statistik Kab. Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024

Dari segi laju pertumbuhan PDRB, sektor-sektor di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki laju pertumbuhan yang beragam. Pada tahun 2024, sektor Jasa Perusahaan merupakan sektor dengan laju pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 9,93 persen, sementara sektor Jasa Keuangan dan Asuransi adalah sektor dengan laju pertumbuhan terendah yaitu sebesar 0,30 persen. Adapun sektor-sektor yang memiliki laju pertumbuhan cukup tinggi adalah sektor Jasa Lainnya sebesar 9,36 persen, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 9,18 persen, dan Real Estat 8,31 persen.

Tabel 2.8 Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Sektor	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,93	11,91	5,00	-6,33	9,18
Pertambangan dan Penggalian	0,49	8,49	4,95	4,84	3,52
Industri Pengolahan	-3,99	-2,45	2,92	10,30	3,92
Pengadaan Listrik dan Gas	-3,79	17,21	35,47	0,79	0,81
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	7,59	4,41	8,69	-0,05	3,18
Konstruksi	2,82	9,88	6,23	2,21	2,78
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-2,16	8,21	9,88	4,27	6,16
Transportasi dan Pergudangan	-13,66	7,35	16,91	5,55	3,81



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

Sektor	2020	2021	2022	2023	2024
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-8,7	5,84	22,14	0,07	6,19
Informasi dan Komunikasi	11,83	8,81	7,13	3,07	3,00
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,99	7,88	-1,76	-7,10	0,30
Real Estat	4,06	4,17	6,37	2,48	8,01
Jasa Perusahaan	-7,44	7,14	15,83	7,80	9,93
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-0,19	-0,19	3	3,18	5,52
Jasa Pendidikan	9,72	5,57	3,62	3,62	6,79
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,86	8,95	9,78	3,67	7,21
Jasa Lainnya	-8,6	8,77	10,33	9,14	9,36

Sumber : Kabupaten Pangkep Dalam Angka Tahun 2024

Pertumbuhan ekonomi Kabupatem pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 4,75 persen. Hal ini terutama dipengaruhi kondisi perekonomian global yang masih diselimuti ketidakpastian dan momentum pemilihan umum atau pemilu.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 mencapai 4,75 persen, sedikit melebihi proyeksi Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebesar 4,60 - 6,13 persen. Penyumbang utama pertumbuhan ini adalah peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi. Konsumsi rumah tangga, yang merupakan komponen terbesar dari produk domestik bruto (PDB) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, tumbuh 1,06 persen di 2023. Kenaikan upah minimum dan bantuan sosial pemerintah menjadi faktor pendorong utama peningkatan konsumsi rumah tangga. Di tengah tantangan ekonomi global dan inflasi yang tinggi, peningkatan konsumsi rumah tangga menunjukkan bahwa daya beli masyarakat Pangkajene dan Kepulauan masih terjaga. Secara kumulatif sepanjang 2023, realisasi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,75 persen, melambat dibandingkan pertumbuhan 4,93 persen pada 2022. Hal ini sejalan dengan perkiraan akibat perlambatan ekonomi global dan aktivitas domestik yang terdampak inflasi tinggi.

7.2.1.10. Tingkat Pengangguran Terbuka

Salah satu indikator yang bisa dipakai dalam melihat atau menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan yang ada. Gambaran kondisi ketenagakerjaan seperti persentase angkatan kerja yang bekerja, dan distribusi lapangan pekerjaan sangat berguna untuk melihat prospek ekonomi suatu daerah. Salah satu tantangan besar Kabupaten Pangkajene



dan Kepulauan adalah menciptakan lapangan kerja atau usaha yang layak bagi angkatan kerja yang besar dan cenderung terus meningkat karena perubahan struktur umur penduduk. Tantangan ini mencakup dua aspek sekaligus yaitu penciptaan lapangan kerja baru bagi angkatan kerja yang belum bekerja, dan peningkatan produktivitas kerja bagi mereka yang sudah bekerja sehingga memperoleh imbalan kerja yang memadai untuk dapat hidup secara layak.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja di suatu wilayah pada waktu tertentu. Angka ini dapat menggambarkan banyaknya pengangguran di suatu wilayah. Nilai TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar tenaga kerja. Sebaliknya, TPT yang rendah menunjukkan semakin banyak angkatan kerja yang terserap di pasar tenaga kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2024 sebesar 5,05 persen, turun 0,18 persen poin dibandingkan dengan tahun 2023. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2024 sebanyak 188.189 orang.

Berikut perkembangan penduduk usia kerja dan angkatan kerja Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024:

Tabel 2.9 Angkatan Kerja, TPAK, TPT dan Status Pekerjaan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

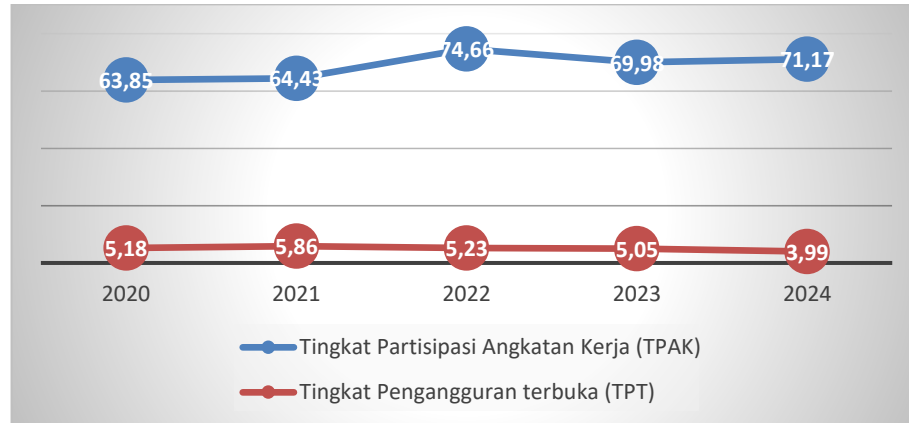
Kegiatan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Angkatan Kerja	161.910	165.108	193.279	188.189	194.139
Bekerja	153.521	155.435	183.176	178.680	186.391
Tidak Bekerja	8.389	9.673	10.103	9.509	7.748
Bukan Angkatan Kerja	91.649	91.135	65.608	80.711	78.634
Sekolah	14.524	15.729	-	15.047	-
Mengurus Rumah Tangga	65.507	62.481	-	59.639	-
Lainnya	11.618	12.925	-	6.025	-
Jumlah	253.559	256.243	258.887	268.900	272.773
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	63,85	64,43	74,66	69,98	71,17
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,18	5,86	5,23	5,05	3,99

Sumber: BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2025

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selama kurun waktu lima tahun (2018-2023) cenderung fluktuatif. Secara lebih lengkap, perkembangan TPAK dan TPT Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat dilihat pada Grafik berikut:



Gambar 2.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)



Sumber: BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2025

Antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada kondisi normal adalah hubungan terbalik, yaitu semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka TPT makin rendah. Hal ini karena banyak sektor ekonomi mengalami kemajuan dan menyerap tenaga kerja sehingga pengangguran menjadi berkurang. Dengan asumsi dasar bahwa rasio antara pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja tetap, artinya tidak ada pergeseran yang signifikan terhadap pola produksi dan teknologi yang digunakan. Dengan kata lain tidak ada perubahan pola produksi padat karya ke padat modal ataupun dengan penggunaan alat berteknologi yang menggunakan lebih sedikit tenaga kerja dalam berproduksi.

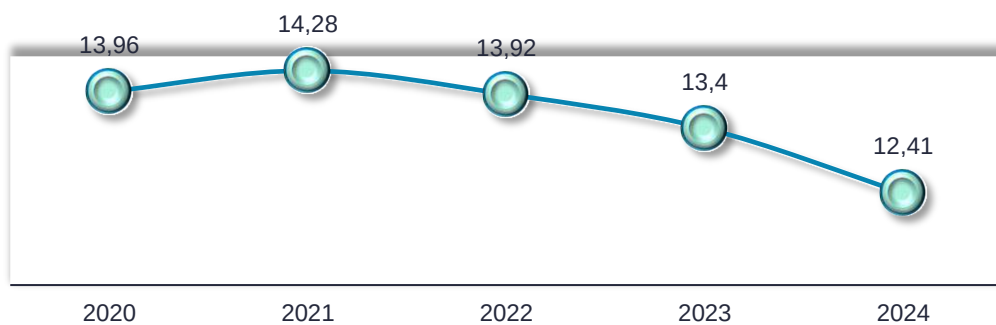
Upaya Yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pangkep yakni Mengembangkan agrobisnis perdesaan melalui revitalisasi perikanan, pertanian dan perkebunan rakyat, meningkatkan kualitas dan nilai tambah komoditi unggulan, meningkatkan aksesibilitas petani terhadap teknologi, meningkatkan kapasitas pelaku usaha dagang kecil, fasilitasi usaha perdagangan konvensional dan non konvensional (e-commerce), penguatan kemitraan antara petani dengan pelaku/pengusaha pengolahan dan pemasaran serta pencitraan produk dalam rangka promosi serta menarik investasi agrobisnis, perluasan pertanian organik, revitalisasi pasar tradisional serta penataan kawasan dan diversifikasi produk unggulan dan memperluas kesempatan kerja melalui fasilitasi akses informasi ketenagakerjaan dan meningkatkan produktifitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pembinaan.



7.2.1.11. Angka Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Selama periode tahun 2023, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berkurang sebanyak 1,4 ribu jiwa, dari 47,53 ribu jiwa pada tahun 2022 menjadi 46,06 ribu jiwa pada tahun 2023 atau mengalami penurunan sebesar 0,52 persen. Berdasarkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam rentang waktu satu tahun, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 0,52 persen poin, dari 13,92 persen pada tahun 2022 menjadi 13,40 persen pada tahun 2023 dan 12,41 persen pada tahun 2024. Perkembangan tingkat miskin di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terlihat sebagaimana grafik sebagai berikut:

Gambar 2.6 Presentase Kemiskinan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2024.

Beberapa faktor yang diduga terkait dengan kondisi kemiskinan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selama periode tahun 2024 antara lain adalah:

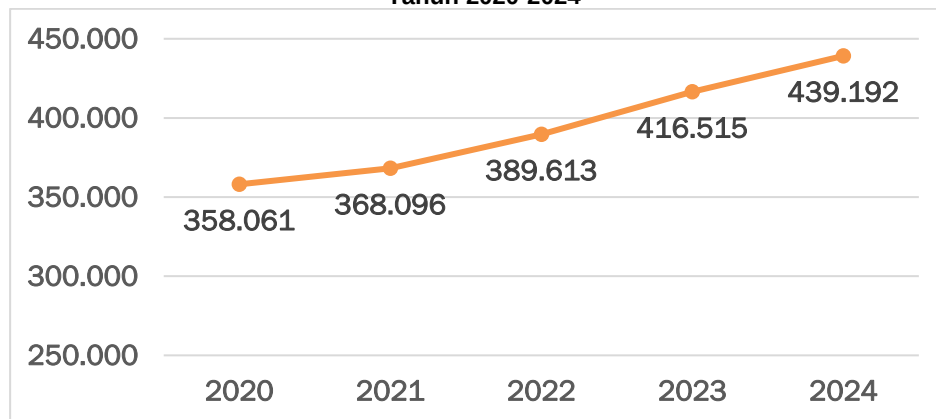
- Indeks Kesulitan Geografis (IKG) tinggi, berada pada urutan nomor 3 di Provinsi Sulawesi Selatan.
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri atas indeks kesehatan, Indeks Pengeluaran dan Indeks Pendidikan relatif sedang.
- Jumlah penduduk hampir miskin relatif banyak
- Program perlindungan sosial masih belum tepat sasaran.
- Jumlah Penduduk Miskin

Garis kemiskinan digunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Penunjukkan



perkembangan garis kemiskinan pada periode 2020 - 2024. Selama periode tersebut, garis kemiskinan selalu menunjukkan peningkatan setiap tahun. Selanjutnya, pada Tahun 2024, garis kemiskinan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tercatat sebesar Rp 416.515 per kapita per bulan. Artinya, angka tersebut merupakan batas minimum yang harus dipenuhi seseorang untuk mendapatkan kebutuhan dasarnya sebulan baik kebutuhan makanan maupun non makanan. Dibandingkan dengan tahun 2023, garis kemiskinan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengalami peningkatan 1,06 persen. Namun secara umum, persentase peningkatan garis kemiskinan pada periode tiga tahun terakhir cenderung menurun.

Gambar 2.7 Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024



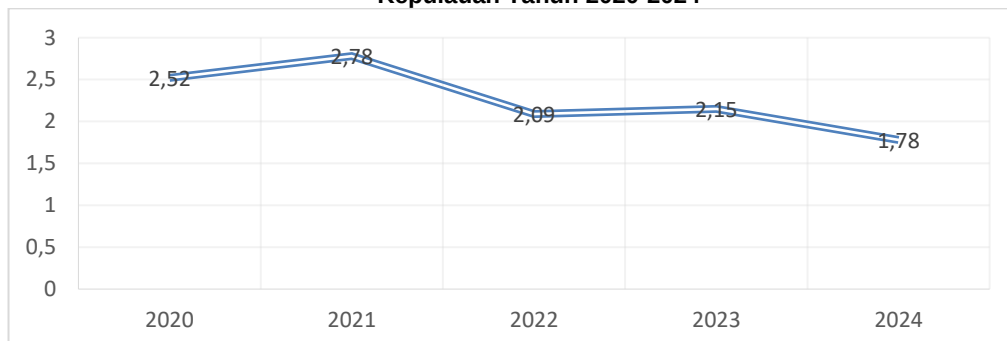
Sumber : BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2024

a. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan atau sering disingkat P1, merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Tingkat kedalaman ini mempengaruhi seberapa besar usaha pemerintah mengangkat penduduk untuk keluar dari kemiskinan. Capaian P1 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami perkembangan yang fluktuatif, yaitu pada tahun 2020 sebesar 2,52, pada tahun 2021 naik sebesar 2,78 dan kemudian turun menjadi sebesar 2,15 pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 sebesar 1,78.



Gambar 2.8 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024

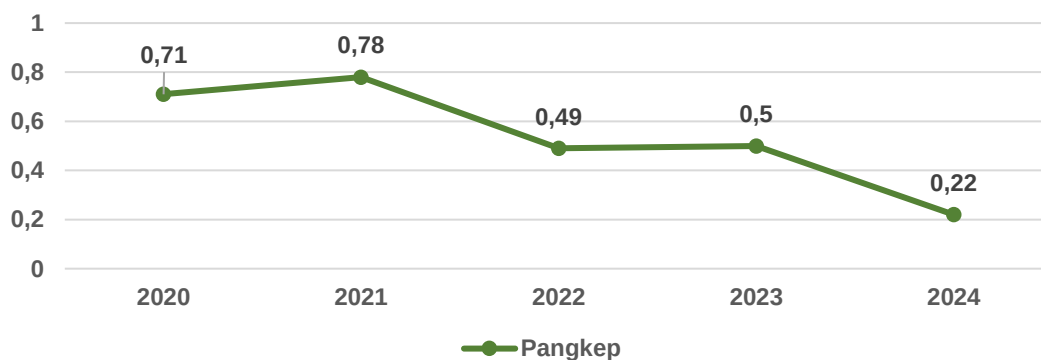


Sumber : BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2024

b. Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan atau disingkat P2, merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami perkembangan yang fluktuatif yaitu pada tahun 2020 sebesar 0,71 dan mengalami peningkatan ditahun di tahun 2022 sebesar 0,49 dan turun menjadi menjadi 0,22 pada tahun 2024.

Gambar 2.9 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2024

7.2.1.12. PDRB Per Kapita

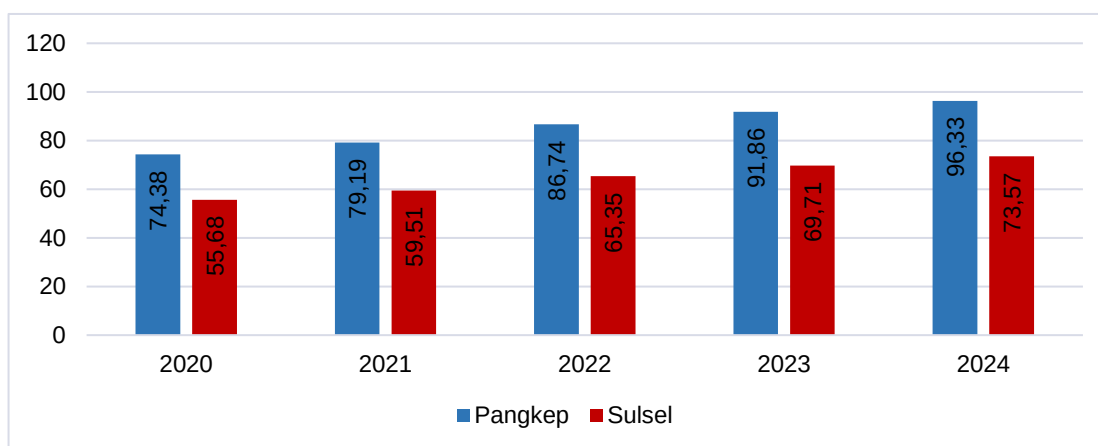
Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor



produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB Per Kapita Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan atas dasar harga berlaku sejak tahun 2020 hingga 2024 senantiasa mengalami kenaikan, namun di tahun 2020 mengalami penurunan dan kembali naik di tahun 2022, 2023 dan 2024. Kenaikan PDRB per kapita pada tahun 2024 diakibatkan oleh kembalinya aktivitas ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19.

Gambar 2.10 PDRB Per Kapita Kab. Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan 2024

PDRB per kapita Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan jika dibandingkan dengan PDRB per kapita Sulawesi Selatan dan Nasional dari Tahun 2019 – 2023 menunjukkan trend kenaikan, kecuali Tahun 2020 yang menurun saat terjadi Pandemi Covid-19. Pada Tahun 2021 perekonomian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan dan Nasional sudah berangsur pulih seiring terkendalinya pandemi covid-19 walaupun masih di bawah capaian sebelum pandemi Tahun 2019.

7.2.1.13. Rasio Gini

Indikator Rasio gini Pada tahun 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang diukur oleh Rasio gini adalah sebesar 0,317. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,36 dan Nasional sebesar 0,381, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan lebih rendah dari Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional.

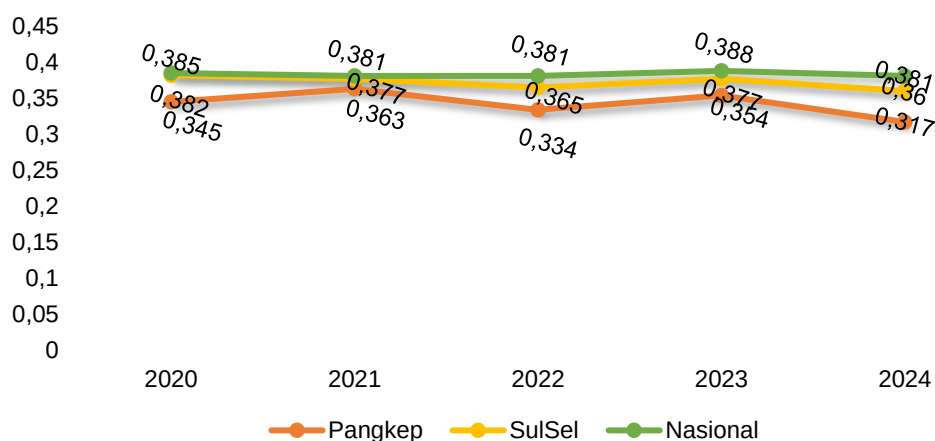
Kebijakan Pembangunan Ekonomi diperlukan dalam rangka menekan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat kabupaten Pangkep, menyusun rencana aksi (action



plan) Pembangunan Ekonomi dalam rangka menekan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat Kabupaten Pangkep.

Rasio Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Rasio Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa. Berikut Grafik perbandingan Rasio Gini Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024;

Gambar 2.11 Perbandingan Rasio Gini Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

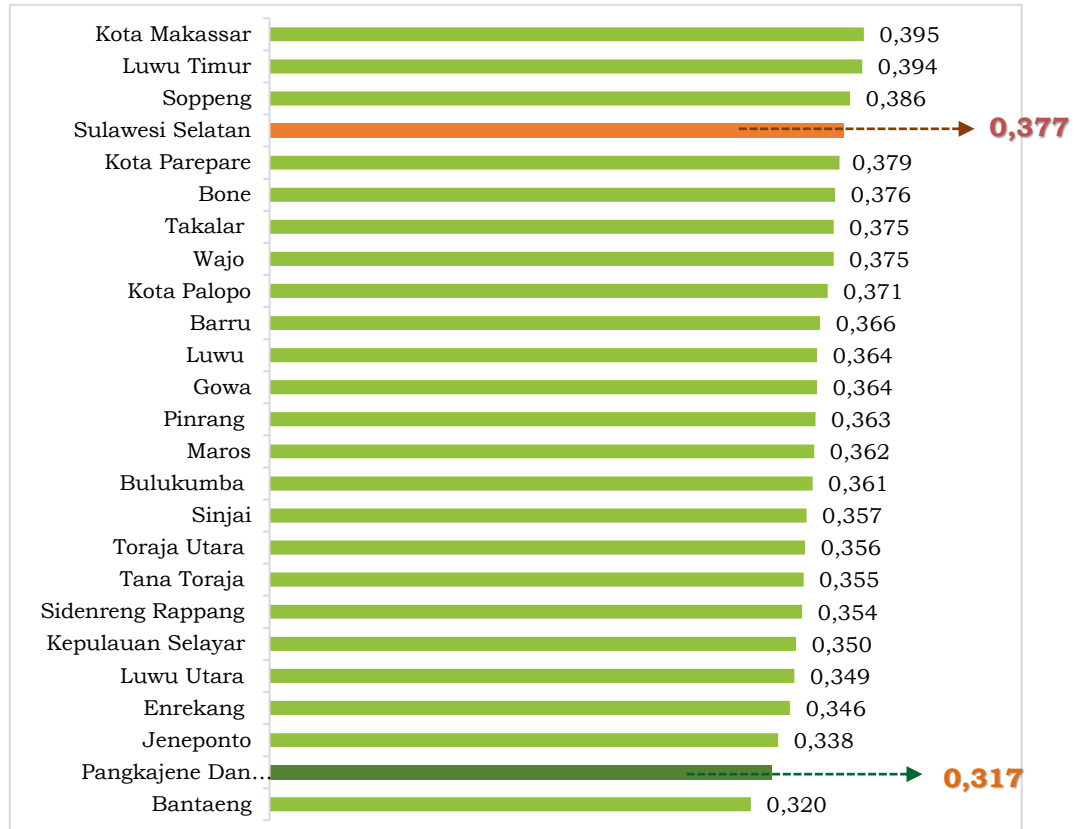


Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan 2024

Rasio gini pada tahun 2020 sebesar 0,345. Pada tahun 2021 Rasio gini Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan naik menjadi 0,363, pada tahun 2022 naik menjadi 0,334 dan tahun 2023 menjadi 0,354 sedangkan tahun 2024 menjadi 0,317. Indikator Rasio gini Pada tahun 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulaun yang diukur oleh Rasio gini adalah sebesar 0,317. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,36 dan Nasional sebesar 0,381, Kabupaten Pangkajene dan Kepulaun lebih rendah dari Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional.



Gambar 2.12 Gini Ratio Menurut Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan Tahun 2024



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan 2024

7.2.1.14. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengetahui tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, meliputi: Angka Usia Harapan Hidup (UHH) untuk mengukur peluang hidup; rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf untuk mengukur status tingkat pendidikan penduduk; serta pengeluaran riil per kapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak.

Kualitas sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam setiap gerak pembangunan. Tantangan besar pembangunan adalah bagaimana dapat memperbaiki kualitas kehidupan manusia. Upaya perbaikan kualitas manusia, selain upaya peningkatan pendapatan adalah juga perlu upaya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan manusia. sebagai alat ukur yang relevan untuk mengetahui peningkatan derajat kualitas SDM ditetapkan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM mengukur



pencapaian keseluruhan dari suatu negara atau daerah dengan tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat (a long healthy life), dimensi pengetahuan (knowledge) dan dimensi standar hidup layak (descent standard of living).

Indikator pembentuk IPM meliputi usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, pengeluaran per kapita yang disesuaikan mengalami kenaikan dalam kurun waktu 2020-2024. Indeks komponen IPM di masing-masing Kabupaten sekitar Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terus mengalami peningkatan, data tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.10 Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuk IPM di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2020-2024

Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Pangkep	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
A. Indeks Kesehatan	80,18	80,38	80,95	81,34	81,71
Angka Harapan Hidup (AHH)	72,12	72,25	72,62	72,87	73,11
B. Indeks Pendidikan	60,98	61,87	62,33	63,26	63,82
Harapan Lama Sekolah	12,76	12,77	12,78	12,8	12,81
Rata-rata Lama Sekolah	7,66	7,92	8,05	8,31	8,47
C. Indeks Pengeluaran	74,15	74,46	75,24	76,32	77,3
Paritas Daya Beli (Pengeluaran)	11.405	11.519	11.817	12.241	12.643
IPM Kabupaten Pangkep	71,31	71,81	72,41	73,23	73,87

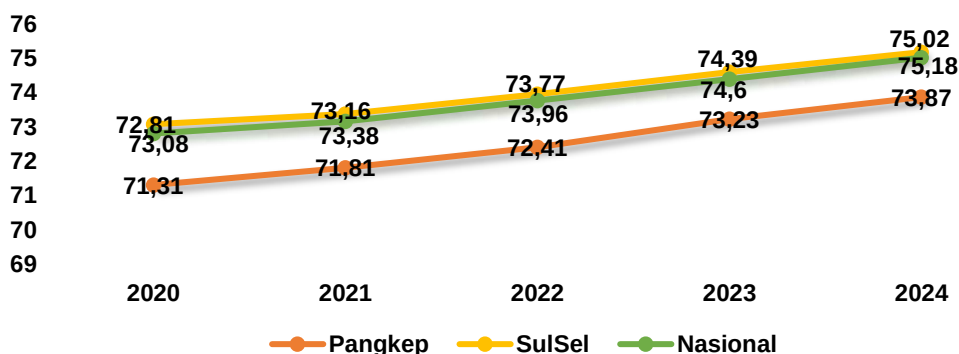
Sumber : BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2024

Dengan IPM sebesar 73,87 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengalami pertumbuhan IPM sebesar 0,64 dari tahun sebelumnya. Capaian level IPM Kabupaten mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 73,23. Komponen yang memiliki andil terbesar terhadap IPM Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah indikator angka harapan hidup dan pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan.

Perhitungan IPM menggunakan metode rata-rata geometric, artinya capaian satu komponen IPM tidak dapat digantikan oleh capaian komponen lainnya, sehingga ketiga dimensi IPM yang terdiri dari 4 komponen tersebut memiliki kepentingan yang setara. Capaian IPM Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengalami peningkatan selama kurun waktu 2020 hingga 2024, namun masih berada di bawah provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional.



Gambar 2.13 Perkembangan IPM Kabupaten Pangkep, SulSel dan Nasional Tahun 2020-2024



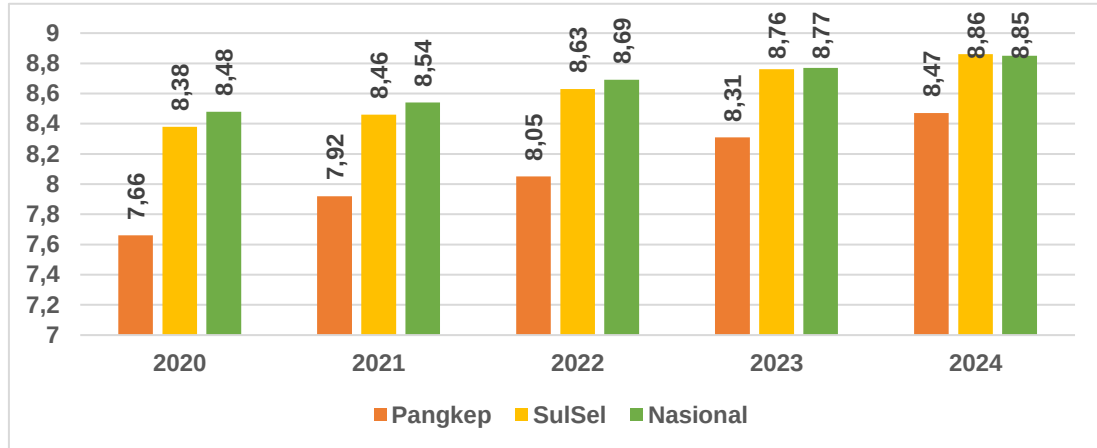
Sumber : BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2024

Perkembangan kinerja IPM sempat melambat di tahun 2020 disebabkan pandemi covid-19. Namun secara perlahan mulai bangkit di tahun 2021 dan 2022, bahkan tahun 2023 laju pertumbuhan semakin cepat sebesar 3,44 melampaui saat sebelum terjadi pandemic covid-19. Faktor yang sangat mempengaruhi penurunan laju pertumbuhan IPM di tahun 2020 adalah komponen pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Namun, pada tahun 2024 percepatan pertumbuhan IPM bukan hanya dipengaruhi oleh komponen pengeluaran per kapita tetapi juga komponen Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Rata-rata Lama Sekolah (RLS) digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat partisipasi pendidikan di suatu wilayah, termasuk untuk mengetahui pemenuhan terhadap Wajib Belajar (WAJAR) 12 Tahun. Rata rata Lama Sekolah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2024 sebesar 8,47, maknanya rata-rata penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan usia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan formal selama 8,47 tahun atau setara kelas IX (SMP Kelas 3). Upaya untuk meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah, salah satunya dengan pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Kinerja RLS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan masih di bawah Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, namun laju pertumbuhan lebih baik bahkan meningkat signifikan dari 0,13 pada tahun 2022 menjadi 0,42 pada tahun 2024. Peningkatan laju pertumbuhan tersebut mengindikasikan bahwa program-program penanganan ATS yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terutama intervensi melalui pendidikan non formal dan kesetaraan mulai menunjukkan hasil.



Gambar 2.14 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Pangkep, SulSel dan Nasional Tahun 2020-2024

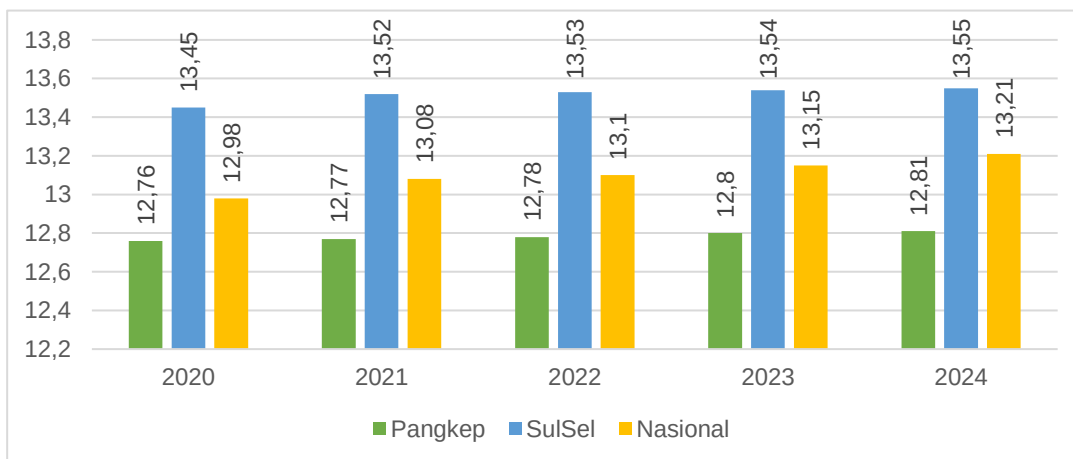


Sumber : BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2024

Harapan Lama Sekolah (HLS) digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan formal di berbagai jenjang antara lain direpresentasikan dalam penyediaan akses pemerataan dan mutu layanan pendidikan. HLS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebesar 12,81 pada tahun 2024 artinya bahwa peluang bagi penduduk usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal selama 12,81 tahun atau setara Diploma 1 (D1). Capaian HLS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan masih berada di bawah provinsi Sulawesi Selatan dan nasional, dan laju pertumbuhan cenderung melambat dari 0,55 menjadi 0,31 di tahun 2023. Pelambatan ini terjadi antara lain disebabkan peningkatan minat masyarakat terhadap pendidikan non formal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), ditunjukkan dari jumlah peserta PKBM yang terus meningkat. Ke depan, nampaknya jalur pendidikan formal bukan satu-satunya pilihan untuk memperoleh akses layanan pendidikan tetapi terdapat juga jalur pendidikan non formal umum maupun keagamaan seperti PKBM dan pondok pesantren. Sehingga pendidikan non formal baik umum maupun keagamaan perlu ditingkatkan kualitasnya, meskipun secara kewenangan berada pada pemerintah kabupaten/kota dan pusat.



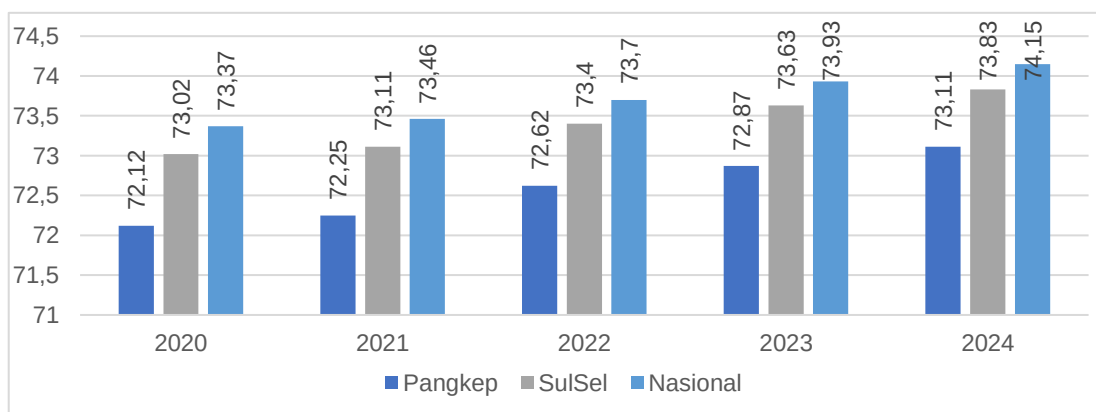
Gambar 2.15 Harapan Lama Sekolah (HLS) Pangkep, Sul Sel dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan 2024

Usia Harapan Hidup (UHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH juga dapat digunakan untuk menggambarkan derajat kesehatan masyarakat. Capaian UHH Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan masih dibawah provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, namun laju pertumbuhan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan meningkat di tahun 2023 sebesar 0,24 dibandingkan nasional yang meningkat menjadi 0,39 di tahun 2023.

Gambar 2.16 Usia Harapan Hidup (UHH) Pangkep, SulSel dan Nasional Tahun 2020-2024



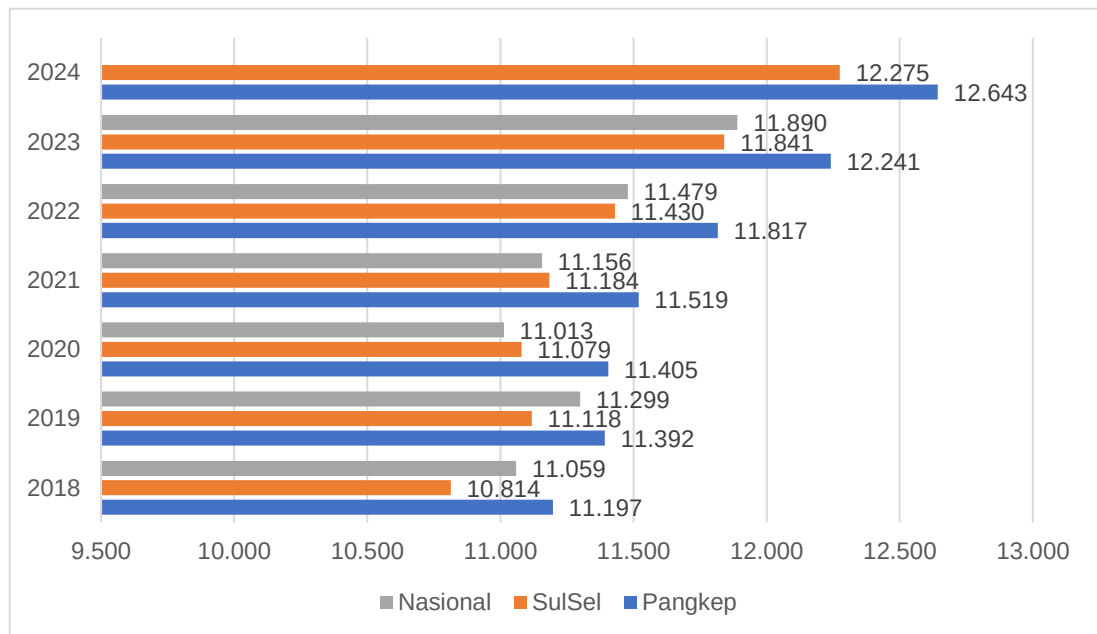
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan 2024

Begitu juga dengan kondisi ditunjukkan oleh capaian indikator pengeluaran per kapita disesuaikan, Namun Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk pengeluaran per kapita disesuaikan tetap mengalami peningkatan hal tersebut dipengaruhi masih tingginya



tingkat daya beli masyarakat dan pada tahun 2023 sampai tahun 2024. Capaian pengeluaran perkapita disesuaikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan diatas provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, di tahun 2024 sebesar 12.643 juta dibandingkan dengan sulawesi selatan sebesar 12.275 juta.

Gambar 2.17 Perkembangan Indikator Pengeluaran Per Kapita Pangkep, Sul Sel dan Nasional Tahun 2018-2024



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan 2024

7.2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Untuk memenuhi target yang ditetapkan sebagai usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Pemerintah Daerah secara terus menerus berupaya meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka peningkatan kapasitas fiskal, sebagai sumber dana untuk pembiayaan pengelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang dalam menyusun Kebijakan Keuangannya tetap memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Kebijakan pengalokasian dana APBD secara sungguh-sungguh telah



didasarkan pada arahan pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan nomenklatur pembukuan anggaran berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Adapun tema Pembangunan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk Tahun 2024 yang telah tergambar dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2024 adalah **“Penguatan Kapasitas Infrastruktur Daerah dan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas”**.

7.2.2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2024

Arah kebijakan Ekonomi makro secara nasional ditujukan terutama untuk mendukung prioritas pembangunan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dengan fokus belanja untuk peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pangan (pertanian dan perikanan), pariwisata, jaring pengaman sosial, dunia usaha, dan UMKM.

Kebijakan tersebut dilakukan secara komprehensif dengan reformasi di bidang belanja melalui kebijakan antara lain pertama, efisiensi belanja melalui penajaman biaya operasional sejalan dengan perubahan proses kerja. Kedua, optimalisasi teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian pelayanan (service delivery). Ketiga, redesain sistem penganggaran yang menggunakan pendekatan belanja yang lebih baik (spending better) yang fokus pada pelaksanaan program prioritas berbasis pada hasil (result based) dan efisiensi kebutuhan dasar, serta antisipatif terhadap berbagai tekanan (automatic stabilizer).

Arah kebijakan ekonomi makro secara nasional menderivasi arah kebijakan perekonomian daerah. Interaksi arah kebijakan ini merupakan faktor penting guna menjamin efektifitas pendanaan dalam pencapaian sasaran perekonomian daerah dan sasaran pembangunan nasional melalui pendekatan secara holistik ini akan lebih terfokus pada penyelesaian permasalahan-permasalahan perekonomian regional dan nasional, sehingga dampak yang dihasilkan dan manfaat yang diperoleh dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis pada berbagai prospek dan tantangan ekonomi daerah, dan sejalan dengan arah kebijakan ekonomi makro RKP 2024, maka strategi yang akan ditempuh oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur serta inovasi dalam pelayanan publik;
2. Meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah yang berkeadilan;
3. Pengembangan komoditas sektor unggulan pada kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru;
4. Peningkatan Pemerataan pembangunan, Pengembangan dan peningkatan kualitas iklim usaha perekonomian daerah;
5. Menurunkan kemiskinan;



6. Meningkatkan akses terhadap penciptaan lapangan dan kesempatan kerja, termasuk penyandang disabilitas diberbagai bidang pembangunan serta Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja;
7. Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan menengah;
8. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan;
9. Peningkatan moralitas dan karakter masyarakat Sulawesi Selatan berlandaskan nilai nilai agama dan nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat;
10. Peningkatan peran dan kapasitas perempuan, anak dan disabilitas dalam pembangunan;
11. Hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumber daya alam;
11. Peningkatan kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

7.2.2.2. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

Arah kebijakan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 disusun berdasarkan arah kebijakan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026. Arah kebijakan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 yaitu:

1. Penguatan inovasi berbasis teknologi informasi dalam pelayanan publik.
2. Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah.
3. Penyediaan infrastruktur sumberdaya air.
4. Peningkatan lapangan kerja, investasi dan industrialisasi pengolahan produk unggulan daerah.
5. Peningkatan promosi wisata melalui pemanfaatan teknologi media promosi dan informasi pariwisata.
6. Peningkatan kerjasama dengan pelaku wisata.
7. Penguatan kapasitas usaha kelompok miskin dan rentan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial lainnya.
8. Akselerasi peningkatan kualitas lulusan pendidikan menengah umum dalam meluluskan Tamatan pada seleksi perguruan tinggi negeri bereputasi.
9. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan untuk penguatan fungsi pelayanan kesehatan dasar.
10. Peningkatan kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak.
11. Peningkatan peran masyarakat dan lembaga keagamaan dalam aktualisas nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan pembangunan.
12. Peningkatan pemberdayaan lembaga keagamaan, pesantren, dan penyelenggara keagamaan dalam aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya.
13. Peningkatan ekspor melalui nilai tambah dan daya saing produk pengolahan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan.
14. Penyediaan infrastruktur pengelolaan air limbah dan persampahan.



15. Penguatan upaya pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pembangunan rendah karbon.

7.2.2.3 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kebijakan keuangan daerah adalah strategi yang dirancang oleh pemerintah daerah untuk mengelola dan menggunakan sumber daya keuangan yang tersedia untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Ini termasuk mengatur pajak, hutang, belanja, dan pembuatan anggaran daerah. Tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan pengalokasian anggaran yang ada dan memastikan bahwa sumber daya keuangan daerah digunakan secara efisien dan efektif. Kebijakan keuangan daerah juga dapat membantu pemerintah daerah memenuhi tujuan pembangunan jangka panjangnya.

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2024 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD tahun 2021-2026, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR).

Regulasi terbaru yang menjadi rujukan kebijakan pengelolaan keuangan daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana komponen keuangan daerah meliputi komponen Pendapatan daerah, Belanja daerah dan Pembiayaan daerah yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dengan demikian, arah kebijakan Keuangan Daerah akan diuraikan pada masing-masing komponen Keuangan Daerah sebagai berikut:

7.2.2.3.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pendapatan daerah adalah peningkatan pendapatan daerah melalui berbagai cara, termasuk Peningkatan pendapatan pajak daerah, Peningkatan pendapatan non-pajak, Peningkatan pendapatan lainnya, Peningkatan pendapatan daerah melalui pengelolaan sumber daya alam daerah, Peningkatan pendapatan daerah melalui pemberian insentif kepada pelaku usaha di daerah, Peningkatan pendapatan daerah melalui peningkatan efisiensi pengelolaan biaya pemerintah daerah, Peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi pemanfaatan aset daerah, Peningkatan pendapatan daerah melalui peningkatan pemasaran produk dan jasa daerah.

Dikaitkan dengan Kebijakan Umum Pendapatan Daerah dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, kebijakan pendapatan daerah ditujukan guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan fiskal, serta meningkatkan ruang



fiskal daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi objek untuk tujuan tersebut, selain menggambarkan kapasitas fiskal daerah juga berpotensi meningkatkan ruang fiskal daerah untuk kebutuhan alokasi belanja prioritas pembangunan daerah.

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Pendapatan daerah meliputi semua rekening kas daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh daerah.

Dalam hal peraihan pendapatan daerah sampai saat ini masih banyak kendala dan permasalahan yang dihadapi terutama dalam peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), adapun permasalahannya adalah:

- a. Regulasi yang berlaku saat ini sudah jauh ketinggalan dibanding dengan peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Semisal beberapa peraturan daerah yang mengatur masalah tarif atau besarnya pajak/retribusi daerah terlalu kecil dibanding dengan keadaan perekonomian saat ini.
- b. Tingkat kesadaran Wajib Pajak/Retribusi yang masih rendah, disisi lain masih adanya upaya dari wajib pajak/retribusi untuk menghindari dari kewajiban membayar pajak/retribusi daerah.
- c. Belum adanya mekanisme khusus untuk mengetahui data obyek pajak, yang menyebabkan data obyek pajak tidak sesuai dengan fakta/keadaan.
- d. Fasilitas obyek retribusi belum memadai khususnya pada obyek wisata, menyebabkan sangat sedikitnya kunjungan ulang yang dilakukan oleh wisatawan.
- e. Lemahnya data dan penatausahaan perpajakan/retribusi daerah.
- f. Masih lemahnya kapasitas petugas yang menangani pungutan pendapatan daerah.
- g. Belum optimalnya kinerja BUMD.

Dengan melihat analisis kondisi / eksisting perkembangan perekonomian yang ada, mengamati perkembangan pembangunan di kawasan strategis dan melihat permasalahan yang ada, maka strategi yang ditempuh dalam peningkatan pendapatan daerah ialah:

- a. Peninjauan dan penetapan regulasi yang berkaitan dengan pendapatan daerah,
- b. Peningkatan kualitas manajemen/pengelolaan potensi pendapatan daerah,
- c. Peningkatan kualitas SDM d. Peningkatan investasi.

Dengan strategi tersebut di atas maka kebijakan daerah yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain sebagai berikut:

- a. Peninjauan dan penyusunan/penetapan regulasi yang berkaitan dengan pendapatan daerah,
- b. Meningkatkan kualitas BUMD,
- c. Meningkatkan inovasi peningkatan pendapatan
- d. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pada obyek pajak/Retribusi
- e. Meningkatkan kualitas SDM f. Meningkatkan pelayanan perijinan



f. Mempercepat pembangunan infrastruktur

Adapun upaya upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan daerah antara lain:

- a. Melakukan peninjauan perda dan menyusun kembali sesuai dengan regulasi dan kondisi.
- b. Peningkatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pada BUMD.
- c. Penyertaan modal kepada BUMD.
- d. Merancang design / mekanisme khusus untuk menjaring data produksi atas obyek pajak sehingga wajib pajak tidak bisa melakukan rekayasa data produksi atas obyek pajak.
- e. Ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan.
- f. Memperbaiki fasilitas obyek Retribusi.
- g. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
- h. Penegakan Peraturan Daerah.
- i. Mengintensifkan penagihan pajak/retribusi daerah.
- j. Melaksanakan sosialisasi guna memberikan pemahaman kepada masyarakat kaitannya dengan keajiban pembayaran pajak daerah.
- k. Bimbingan teknis untuk pengelola pendapatan pajak/retribusi daerah
- l. Penyederhanaan dan transparansi pelayanan perijinan
- m. Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak / retribusi daerah menuju pelayanan prima.
- n. Pembangunan infrastruktur di kawasan pertumbuhan ekonomi.
- o. Pembangunan infrastruktur di kawasan penyangga KSPN, kawasan peruntukan industri.

7.2.2.3.2 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah

Hasil analisa terhadap tantangan dan prospek perekonomian maka diperlukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang selanjutnya akan menjadi penerimaan daerah. Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah diharapkan dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan daerah.

Upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dilakukan melalui pemberdayaan dan peningkatan kinerja BUMD, optimalisasi pelayanan BLUD, PD penghasil dan pengelolaan aset Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Komposisi kontribusi penerimaan PAD terhadap pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sangat bergantung pada sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah



Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD.

Dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024, perencanaan pendapatan daerah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PAD dihitung dengan memperhatikan realisasi pendapatan selama 2 tahun terakhir dan perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Asumsi Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah disusun berdasarkan pagu indikatif sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2026.

Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang Sah, melalui upaya:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
2. Peningkatan pengelolaan keuangan dan asset daerah;
3. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi;
4. Revisi dan evaluasi Perda-perda yang berhubungan dengan pendapatan daerah.

7.2.2.3.3. Strategi dan Prioritas Pendapatan

Dalam rangka mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, maka Pemerintah Daerah menetapkan strategi dan prioritas sebagai berikut:

a. Insentififikasi dan Eksentifikasi Pendapatan

Intensifikasi yaitu dengan cara mengintensifkan penagihan; melakukan peremajaan data objek dan subyek; pengadaan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan pendapatan; meningkatkan pengawasan intern maupun eksternal; melaksanakan evaluasi penerimaan dan meningkatkan kompetensi aparat pengelola pendapatan.

Ekstensifikasi yaitu dengan cara menggali sumber penerimaan yang baru; melakukan penyesuaian aturan/peraturan daerah sesuai potensi yang ada.

- b. Pelaksanaan secara efektif sistem dan prosedur pemungutan pendapatan Daerah;
- c. Peningkatan *professionalisme* aparat di bidang pendapatan;
- d. Peningkatan koordinasi dan kerjasama terhadap para pengelola Pendapatan Asli Daerah;
- e. Pelaksanaan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah baik dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun dengan pemerintah daerah lainnya;
- f. pengembangan kerjasama dalam upaya peningkatan pendapatan daerah maupun dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan aset - aset daerah;
- g. Pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah di bidang pendapatan daerah;



- h. Peningkatan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat maupun akurasi data dalam hal penerimaan dana bagi hasil dari pemerintah propinsi;
- i. Melakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah.

Seiring dengan telah ditetapkannya strategi dan prioritas pendapatan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah menjabarkannya dalam APBD 2024 dengan rencana anggaran perubahan sebesar Rp1.535.352.079.048,00

Diharapkan dengan tercapainya target pendapatan yang telah ditetapkan, akan dapat membiayai semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

7.2.2.3.4. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah merupakan keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah tentang penggunaan anggaran untuk membiayai kegiatan dan program di wilayah mereka. Arah kebijakan belanja daerah dapat berbeda-beda tergantung pada prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah. Namun, secara umum, ada beberapa arah kebijakan belanja daerah yang umum dilakukan, antara lain

- 1. Prioritas pada kegiatan dan program yang mendukung pengembangan ekonomi daerah, seperti investasi infrastruktur, pelatihan tenaga kerja, dan pengembangan usaha kecil dan menengah.
- 2. Fokus pada pengembangan sektor publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3. Peningkatan efisiensi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah, termasuk pengurangan pengeluaran yang tidak produktif dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan keuangan daerah.
- 4. Pengembangan sumber daya manusia melalui investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat daya saing daerah.
- 5. Pengembangan kapasitas institusi pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan efektif.

Semua arah kebijakan belanja daerah di atas harus didasarkan pada kebutuhan dan prioritas masing-masing daerah serta mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran dengan baik.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, efisien, efektif, dan akuntabel serta berorientasi money follow program berbasis money follow function dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan pada tugas dan fungsi pokok Perangkat Daerah.



Dengan hal tersebut di atas maka kebijakan yang diambil untuk penggunaan dana Tahun Anggaran 2024 ialah mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di kawasan strategis kabupaten, peningkatan pelayanan dasar pada bidang pendidikan, kesehatan, perumahan permukiman, peningkatan ketahanan pangan, peningkatan keterampilan bagi penduduk usia kerja, meningkatkan kualitas dan kontinuitas produk produk unggulan dan mengurangi kemiskinan.

Pengelolaan belanja sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, transparan, akuntabel dan disiplin anggaran. Untuk anggarannya disusun dengan prinsip money follow program berbasis money follow function dengan pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas, nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Struktur Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut:

7.2.2.3.4.1. Belanja Operasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kelompok Belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai berupa Penganggaran alokasi belanja gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD); Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan Penganggaran dana tambahan penghasilan guru Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah disesuaikan dengan ketentuan perundangundangan.

2) Belanja barang dan Jasa.

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan, termasuk



barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dan Pengadaan barang/jasa dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

3) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4) Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan Usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lain yang akan diberikan subsidi terlebih dahulu dilakukan audit Keuangan oleh kantor akuntan public sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dapat memberikan Hibah kepada pemerintah pusat; pemerintah daerah lain; Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dialokasikan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berdasarkan Pasal 23A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Bantuan Sosial terdiri atas Bantuan Sosial yang direncanakan dan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan



sebelumnya. Pengalokasian anggaran Hibah dan Bantuan Sosial berdasarkan usulan/proposal yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari calon penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

7.2.2.3.4.2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya. Pengadaan asset tetap memenuhi kriteria:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- c. Batas minimal kapitalisasi aset.

Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset sampai asset tersebut siap digunakan. Belanja modal meliputi belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;

- a. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- b. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- c. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. Belanja asset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap lainnya mencakup asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok asset tetap a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- e. Belanja asset lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak memenuhi definisi asset tetap, dan harus disajikan di pos asset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

7.2.2.3.4.3. Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali



dan pengaruh pemerintah daerah. Penganggaran Belanja Tidak Terduga mengacu pada Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tatacara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat Bencana Dan Penanganan Gangguan Keamanan Serta Penghentian Konflik Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

7.2.2.3.4.4. Belanja Transfer

a. Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota

Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi dianggarkan secara bruto. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran 2024, dan alokasi anggaran pelampauan target Tahun Anggaran 2023 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota atau alokasi kurang salur pada tahun sebelumnya. Dari aspek teknis penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah maka akan diuraikan daftar nama pemerintah Kabupaten/Kota selaku penerima bagi hasil pajak daerah sesuai kode rekening berkenaan.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Pengalokasian Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia atau tidak cukup tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut sesuai kemampuan keuangan daerah. Bantuan Keuangan bersifat stimulan, yang berdasarkan usulan/proposal yang diterima oleh Pemerintah Provinsi dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tatacara penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan mengacu dan memperhatikan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Tatacara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan



Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus, bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan. Bantuan keuangan terdiri atas:

- a. bantuan keuangan antar Daerah provinsi;
- b. bantuan keuangan antar Daerah kabupaten/kota;
- c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota diluar wilayahnya;
- d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
- e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Kebijakan Belanja Daerah dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2024, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi belanja daerah terkait program dan kegiatan diupayakan untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan lebih berperspektif gender.

2. Perencanaan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

3. Alokasi belanja daerah untuk setiap kegiatan dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan, program dan kegiatan direncanakan dengan didasarkan pada kebutuhan riil dan mengutamakan produksi dalam negeri serta dapat melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis.

4. Terhadap kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proporsi belanja modal diupayakan lebih besar dibanding dengan belanja pegawai atau belanja barang dan jasa dengan tetap memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri



Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan berdasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007.

Kerangka pendanaan yang merupakan perspektif rencana penganggaran untuk tahun ke depan. Sebagai perspektif rencana, maka analisis harus didasarkan atas asumsi makro ekonomi dan kondisi sosial masyarakat yang diinginkan, dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Hal ini diawali dengan proyeksi asumsi makro ekonomi, kondisi sosial masyarakat, pokok-pokok kebijakan fiskal, kemudian proyeksi pendapatan dan belanja daerah, dan terakhir perhitungan kerangka pendanaan yang akan menunjukkan potensi kapasitas riil keuangan daerah.

Sejak berakhirnya agenda pembangunan milenium (MDGs) pada tahun 2015, Indonesia bersama-sama dengan 193 negara lainnya sepakat untuk mengadopsi agenda pembangunan global yang dinamakan Sustainable Development Goals (SDGs). Belajar dari pengalaman MDGs lalu, kini Indonesia berusaha menghindari keterlambatan pengimplementasian SDGs. Indonesia tidak ingin kehilangan momentum dan euphoria implementasi SDGs masyarakat dunia.

Dengan mengusung tema “Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan”, SDGs yang berisi 17 Tujuan dan 169 Target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (berlaku sejak 2016 hingga 2030), guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berlaku bagi seluruh negara (universal), sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai Tujuan dan Target SDGs.

Berbeda dari pendahulunya Millenium Development Goals (MDGs), SDGs dirancang dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik itu Pemerintah, Civil Society Organization (CSO), sektor swasta, akademisi, dan sebagainya. Kurang lebih 8,5 juta suara warga di seluruh dunia juga berkontribusi terhadap Tujuan dan Target SDGs.

Tidak Meninggalkan Satu Orangpun merupakan Prinsip utama SDGs. Dengan prinsip tersebut setidaknya SDGs harus bisa menjawab dua hal yaitu, Keadilan Prosedural yaitu sejauh mana seluruh pihak terutama yang selama ini tertinggal dapat terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan dan Keadilan Substansial yaitu sejauh mana kebijakan dan program pembangunan dapat atau mampu menjawab persoalan-persoalan warga terutama kelompok tertinggal.

Sebagai wujud komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan SDGs, Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) SDGs Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan



Berkelanjutan. Perpres tersebut juga merupakan komitmen agar pelaksanaan dan pencapaian SDGs dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak. Dalam upaya pencapaian target TPB/SDGs yang menjadi prioritas pembangunan memerlukan sinergi kebijakan perencanaan yakni Pencapaian Target, Kesesuaian, serta keselarasan TPB/SDGs dalam dokumen perencanaan RKPD.

7.2.2.3.5. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, dan pada hakikatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari tahun 2015-2019 sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diperuntukkan antara lain untuk penyertaan modal dan pembayaran pokok hutang. Sesuai Pasal 22 dan Pasal 59 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, bahwa Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan antara lain untuk:

1. Penyertaan Modal dan Pemenuhan kewajiban (Hutang Daerah)
2. Penetapan SILPA harus berdasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional serta diupayakan semakin menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran.
3. SILPA tahun berjalan positif dapat dipergunakan untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
4. SILPA dapat untuk menutupi deficit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan antara lain untuk:

1. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada PT. Bank
Sulselbar cabang Pangkajene dan Kepulauan setiap tahun



2. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada beberapa Badan Usaha Milik Daerah.

7.2.2.3.6. Pendanaan Pembangunan Lainnya

Dengan terbatasnya sumber-sumber penerimaan dan besarnya kebutuhan dana untuk pembangunan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk mencari alternatif pendanaan dalam membangun. Sumber-sumber pendanaan pembangunan non-APBD yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembangunan antara lain: 1) APBN; 2) Corporate Social Responsibility (Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)); 3) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU); 4) Pembiayaan Utang Daerah (Pinjaman Daerah, Obilgasi Daerah, Sukuk Daerah). Adapun penjelasan alternatif pendanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

7.2.2.3.7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Penyelesaian pembangunan dalam suatu daerah membutuhkan banyak sumber pendanaan, pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selain bersumber dari APBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh perangkat daerah.

7.2.2.3.8. Corporate Social Responsibility (Program Kemitraaan)

Pendanaan pembangunan selain APBN dan APBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang perlu dimaksimalkan yaitu Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Mitra PKBL dan TJSL yang diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, namun turut juga berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar dalam jangka panjang. Dalam artian bahwa tanggung jawab sosial yang dilakukan tidak hanya untuk mendapatkan nilai tambah dari masyarakat tetapi tanggung jawab ini harus berkesinambungan sampai waktu yang cukup panjang. Program pembangunan yang dikerjasamakan dengan mitra PKBL dan TJSL lebih diutamakan pada program yang mendukung prioritas Bupati serta yang bersentuhan langsung dengan masyarakat serta berkesinambungan dan berdampak positif terhadap masyarakat, penekanan kepada 3 (tiga) hal tersebut bahwa bantuan yang diberikan dirancang memiliki dampak yang berkelanjutan karena kerjasama program pembangunan PKBL dan TJSL berbeda dengan donasi bencana alam yang bersifat tidak terduga dan tidak dapat diprediksi. Program yang dikerjasamakan dengan mitra PKBL dan TJSL harus berdampak positif kepada masyarakat, baik secara ekonomi, lingkungan, maupun sosial.



7.2.3. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah dilakukan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil. Penetapan indikator kinerja daerah dituangkan dalam bentuk target kinerja yang akan dicapai pada waktu tertentu yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran target dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan berupa Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Selain itu ditetapkan pula Indikator Kinerja SPM dan Indikator Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan yang selaras dengan isu strategis nasional dan global.

7.2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH TAHUN 2024

7.2.4.1. Indikator Kinerja Makro

Indikator makro pembangunan merupakan indikator kinerja pembangunan yang menggambarkan keberhasilan pembangunan daerah secara umum. Pencapaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Kinerja makro merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja beberapa sektor, urusan, dan bidang pemerintahan. Adapun indikator makro pembangunan terdiri dari: 1. IDM, 2. Angka Kemiskinan, 3. Tingkat Pengangguran Terbuka, 4. Pertumbuhan Ekonomi, 5. PDRB/ Kapita, 6. Gini Ratio.

7.2.4.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program.

7.2.4.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan indikator yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada masa jabatan pemerintah daerah.



7.2.5. INDIKATOR KINERJA STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

7.2.6. INDIKATOR KINERJA TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN / SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGs)

Kegiatan “Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs)” merupakan bagian dari agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dimana pada bulan Agustus 2015, 193 negara termasuk Indonesia menyepakati 17 TPB yang secara resmi dinyatakan diadopsi pada 25 September 2015 dengan mengusung agenda "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development" yang berarti ("Mengubah dunia kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan"), dimana pelaksanaannya di Indonesia dituangkan dalam Perpres 59/2017 tentang “Pelaksanaan Pencapaian TPB”.

Adapun ke-17 TPB tersebut yaitu:

1. Tanpa kemiskinan (No poverty);
2. Tanpa kelaparan (Zero hunger);
3. Kehidupan sehat dan sejahtera (Good health and well-being);
4. Pendidikan berkualitas (Quality education);
5. Kesetaraan gender (Gender equality);
6. Air bersih dan sanitasi layak (Clean water and sanitation);
7. Energi bersih dan terjangkau (Affordable and clean energy);
8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (Decent work and economic growth);
9. Industri, inovasi dan infrastruktur (Industry, innovation, and infrastructure);
10. Berkurangnya kesenjangan (Reduced inequalities);
11. Kota dan komunitas berkelanjutan (Sustainable cities and communities);



12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (Responsible consumption and production);
13. Penanganan perubahan iklim (Climate action);
14. Ekosistem laut (Life below water);
15. Ekosistem daratan (Life on land);
16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh (Peace, justice, and strong institutions); dan
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan (Partnerships for the goals).

Masing-masing tujuan memiliki indikator target, dimana setiap indikator diintervensi oleh program/kegiatan dari berbagai stakeholder yang dituangkan dalam Matriks Rencana Aksi Daerah. Secara teknis dalam menyusun matriks tsb harus berpijak pada Metadata Indikator TPB yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang pada tahun 2020 telah menyusun Metadata 2 sebagai pengganti dari Metadata 1. Maka dari itu, pada 2022 Kabupaten Pangkep sudah mulai menyesuaikan dan menggunakan Metadata 2 tsb dalam penyusunan Matriks SDGs, sehingga data capaian SDGs yang disajikan dalam RKPD kali ini adalah sudah berdasarkan pada Metadata 2. Walau demikian, perlu diketahui pula indikator yang beririsan antara Metadata 1 dengan Metadata 2 mengingat indikator SDGs dalam RPJMD masih berlandaskan pada Metadata 1.

7.2.6.1 Strategi dan Prioritas Belanja

Dalam menyusun strategi dan prioritas program-program yang akan dilaksanakan sepanjang Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengacu pada sasaran dan prioritas yang hendak dicapai pada tahun 2023, yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang kemudian dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD 2023, maka ditetapkan prioritas program-program seiring dengan kemampuan APBD yang telah ditetapkan sebesar Rp1.557.304.082.633,00.

Prioritas yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2023, yaitu terfokus pada upaya penyelesaian masalah yang mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Prioritas-prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan Aksesibilitas Dan Pemerataan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
- b. Pengembangan sektor unggulan dan potensi ekonomi lokal untuk mendorong peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi masyarakat
- c. Pembangunan Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
- d. Pembangunan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Untuk Meningkatkan Ketahanan Bencana



- e. Pengembangan SDM Yang Berkualitas Dan Pemberdayaan Berbasis Peningkatan Karakter Serta Budaya Masyarakat Dalam Rangka Menjaga Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Menciptakan Stabilitas Sosial Dan Politik
- f. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi
- g. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dan Akuntabilitas Kinerja Berbasis Teknologi Informasi Serta Inovasi Sistem Pemerintahan Yang Terintegratif Dalam Proses Bisnis Di Semua Level Pemerintahan

Prioritas-prioritas tersebut tersebar dalam 3 (tiga) urusan, 5 (lima) unsur dan 37 (tiga puluh tujuh) bidang, meliputi:

- a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar
 - 1. Bidang Pendidikan;
 - 2. Bidang Kesehatan;
 - 3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
 - 5. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; dan
 - 6. Bidang Sosial.
- b. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
 - 1. Bidang Tenaga Kerja;
 - 2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 3. Bidang Pangan;
 - 4. Bidang Lingkungan Hidup;
 - 5. Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil;
 - 6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - 7. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 8. Bidang Perhubungan;
 - 9. Bidang Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian;
 - 10. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - 12. Bidang Penanaman Modal;
 - 13. Bidang Perpustakaan.
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan
 - 1. Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - 2. Bidang Pariwisata Pemuda dan Olahraga;
 - 3. Bidang Pertanian;
 - 4. Bidang Perdagangan; dan Perindustrian
 - 5. Bidang Perindustrian
- d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
 - 1. Sekretariat Daerah; dan



- 2. Sekretariat DPRD
- e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
 - 1. Perencanaan;
 - 2. Keuangan;
 - 3. Kepegawaian; dan
 - 4. Penelitian dan Pengembangan
- f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
 - 1. Inspektorat Daerah
- g. Unsur Kewilayahan
 - 1. Kecamatan
- h. Unsur Pemerintahan Umum
 - 1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang terakhir dijabarkan dari Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dan mengacu pada prioritas nasional yang termuat pada RPJMN tahun 2020-2024. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah. Prioritas tahun 2023 masih banyak dipengaruhi adanya pandemi Covid-19 yang telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Sulawesi selatan juga cukup besar dengan terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah daerah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2023. Dengan demikian perencanaan pembangunan pada tahun 2023 akan difokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar, peningkatan sistem kesehatan, memperkuat sistem ketahanan pangan nasional,



membangun sistem perlindungan sosial secara terpadu. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan daerah tahun 2023 yaitu Pemantapan Kesejahteraan melalui Pembangunan Manusia yang Produktif dan Berkarakter, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

7.2.6.2. Strategi dan Prioritas Pembiayaan

Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, dan pada hakikatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari tahun-tahun sebelumnya bersumber sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Namun untuk tahun anggaran 2023 ini, penerimaan pembiayaan bersumber dari SiLPA dan Pinjaman Jangka Pendek yang sumber dari PT. Bank Sulselbar sebesar Rp8.000.000.000,00 diperuntukan untuk menutupi pendanaan PILKADA. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diperuntukkan antara lain untuk penyertaan modal dan pembayaran pokok hutang. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan antara lain untuk : 1. Penyertaan Modal dan Pemenuhan kewajiban (Hutang Daerah) 2. Penetapan SILPA harus berdasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional serta diupayakan semakin menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran. 3. SILPA tahun berjalan positif dapat dipergunakan untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. 4. SILPA dapat untuk menutupi



defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan antara lain untuk : 1. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada PT.Bank Sulselbar cabang Pangkajene dan Kepulauan setiap tahun 2. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada beberapa Badan Usaha Milik Daerah.

7.2.7. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Berdasarkan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yang kemudian dijabarkan dalam APBD, Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengalokasikan untuk mengelola dana sebesar Rp 1.542.018.824.892,00 yang terdiri dari 3 (tiga) urusan, 5 (lima) unsur dan 37 (tiga puluh tujuh) bidang, yaitu:

Tabel 2.11 Rincian Capaian Target Kinerja

KODE	URAIAN	ANGGARAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	963.571.828.075,00	31	91	305
1.01	BIDANG PENDIDIKAN	471.218.246.376,00	5	14	85
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	360.659.082.924,00			
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	84.669.287.257,00	10	21	62
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	21.886.254.097,00	5	16	39
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	19.448.429.123,00	5	25	74
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	5.690.528.298,00	6	15	45
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	104.184.980.592,00	72	176	484



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

KODE	URAIAN	ANGGARAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	7.112.031.952,00	4	13	36
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	556.016.400,00	5	9	11
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	3.404.883.427,00	4	12	35
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	979.038.300,00	3	3	3
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	16.241.058.544,00	10	18	46
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.293.158.817,00	5	15	44
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.065.268.823,00	5	11	43
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	15.285.135.072,00	4	15	47
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	7.426.374.563,00	3	12	36
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.035.088.751,00	3	11	44
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	8.070.196.443,00	6	14	36
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5.565.313.446,00	5	12	35
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	4.086.697.000,00	3	5	7
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	208.510.500,00	1	1	5
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	47.963.300,00	1	2	3
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	763.196.100,00	5	7	8
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	14.957.383.254,00	3	11	39



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

KODE	URAIAN	ANGGARAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	87.665.900,00	2	5	6
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	36.166.075.342,00	24	49	113
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	8.019.712.552,00	5	13	31
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	5.971.423.399,00	4	10	26
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	16.292.804.191,00	6	15	35
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	2.331.676.000,00	6	8	11
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.550.459.200,00	3	3	10
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	103.868.948.817,00	22	64	153,00
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	51.830.313.530,00	20	47	93
4.02	SEKRETARIAT DPRD	52.038.635.287,00	2	17	60
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	220.167.991.547,00	12	52	210
5.01	PERENCANAAN	7.891.248.292,00	3	13	47
5.02	KEUANGAN	203.733.552.667,00	5	23	112
5.03	KEPEGAWAIAN	6.795.150.688,00	2	10	43
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	602.493.800,00	1	2	2
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.145.546.100,00	1	4	6
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	11.499.627.189,00	3	10	40
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	11.499.627.189,00	3	10	40
7	UNSUR KEWILAYAHAN	69.032.185.786,00	20	200	410
7.01	KECAMATAN	69.032.185.786,00	20	200	410
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	33.527.187.544,00	6	12	36
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	33.527.187.544,00	6	12	36
JUMLAH		1.542.018.824.892,00	190	654	1.751



7.3. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

7.3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Dalam menyusun rencana kerja tahun 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah menentukan untuk mengelola dana sebesar Rp1.542.018.824.892,00 dan secara keseluruhan realisasi dari anggaran yang ditetapkan adalah sebesar Rp1.490.658.527.213,49 atau 96,67%.

Secara terinci realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah:

Tabel 3.1 Rincian Capaian Target Kinerja

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	963.571.828.075,00	928.927.014.888,49	96,40
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	471.218.246.376,00	464.952.426.684,00	98,67
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	360.659.082.924,00	335.542.009.165,49	93,04
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	84.669.287.257,00	82.709.519.980,00	97,69
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	21.886.254.097,00	21.486.847.137,00	98,18
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	19.448.429.123,00	18.677.363.557,00	96,04
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	5.690.528.298,00	5.558.848.365,00	97,69
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	104.184.980.592,00	101.382.816.648,00	97,31
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	7.112.031.952,00	6.912.266.016,00	97,19
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	556.016.400,00	534.489.180,00	96,13
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	3.404.883.427,00	3.363.497.677,00	98,78



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	979.038.300,00	516.350.000,00	52,74
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	16.241.058.544,00	15.601.426.839,00	96,06
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.293.158.817,00	6.194.562.935,00	98,43
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.065.268.823,00	5.008.925.277,00	98,89
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	15.285.135.072,00	15.150.624.446,00	99,12
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	7.426.374.563,00	7.243.345.699,00	97,54
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.035.088.751,00	7.764.195.085,00	96,63
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	8.070.196.443,00	7.677.324.981,00	95,13
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5.565.313.446,00	5.520.551.377,00	99,20
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA	4.086.697.000,00	4.085.743.400,00	99,98
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	208.510.500,00	193.306.400,00	92,71
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	47.963.300,00	44.979.700,00	93,78
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	763.196.100,00	757.907.500,00	99,31
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	14.957.383.254,00	14.743.304.236,00	98,57
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	87.665.900,00	70.015.900,00	79,87
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	36.166.075.342,00	34.883.288.069,00	96,45
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	8.019.712.552,00	7.909.920.916,00	98,63
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	5.971.423.399,00	5.795.774.380,00	97,06



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	16.292.804.191,00	15.986.498.267,00	98,12
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	2.331.676.000,00	2.030.257.802,00	87,07
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.550.459.200,00	3.160.836.704,00	89,03
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	103.868.948.817,00	100.179.321.875,00	96,45
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	51.830.313.530,00	49.523.153.993,00	95,55
4.02	SEKRETARIAT DPRD	52.038.635.287,00	50.656.167.882,00	97,34
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	220.167.991.547,00	215.277.677.417	97,78
5.01	PERENCANAAN	7.891.248.292,00	7.651.377.683	96,96
5.02	KEUANGAN	203.733.552.667,00	199.179.632.874	97,76
5.03	KEPEGAWAIAN	6.795.150.688,00	6.739.028.660	99,17
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	602.493.800,00	571.596.000	94,87
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.145.546.100,00	1.136.042.200	99,17
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	11.499.627.189,00	10.957.951.915	95,29
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	11.499.627.189,00	10.957.951.915	95,29
7	UNSUR KEWILAYAHAN	69.032.185.786,00	65.715.398.852	95,20
7.01	KECAMATAN	69.032.185.786,00	65.715.398.852	95,20
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	33.527.187.544,00	33.335.057.549	99,43
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	33.527.187.544,00	33.335.057.549	99,43
JUMLAH		1.542.018.824.892,00	1.490.658.527.213,49	96,67

7.3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan adalah:

1. Terbatasnya dana yang tersedia, mengakibatkan masing-masing OPD berusaha untuk dapat mengelola dana yang tersedia dengan sebaik dan seefisien mungkin;
2. Perubahan cuaca yang tidak menentu, mengakibatkan beberapa kegiatan mengalami penundaan pelaksanaan dari jadwal yang telah ditetapkan;
3. Luasnya wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, mengakibatkan tidak meratanya pengembangan suatu wilayah, pimpinan SKPD terpaksa melakukan skala prioritas untuk menentukan wilayah yang perlu dikembangkan segera;
4. Masih rendahnya kesadaran akan pendidikan dan kesehatan yang baik.



7.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

7.4.1. ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Tujuan menyusun laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan, dengan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Pendapatan;
2. Belanja;
3. Transfer;
4. Pembiayaan;
5. Aset;
6. Kewajiban, dan;
7. Ekuitas;
8. Beban.

7.4.2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, adalah:

1. Basis Kas, adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
Basis kas ini digunakan untuk pengakuan atas pendapatan, belanja dan pembiayaan - LRA.
2. Basis Akrual, adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
Basis akrual ini digunakan untuk pengakuan atas pendapatan – LO, beban, asset, kewajiban dan ekuitas.

7.4.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Kebijakan akuntansi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010



tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Basis Pengukuran yang digunakan adalah:

1. Pendapatan dicatat berdasarkan nilai kotor, tanpa dikurangi besaran yang diperlukan untuk memperoleh pendapatan Neraca;
2. Belanja dicatat berdasarkan nilai kotor tanpa dikurangi besaran yang diperlukan untuk memperoleh barang/jasa tersebut;
3. Aset dicatat berdasarkan nilai perolehan;
4. Pengukuran yang digunakan menggunakan mata uang Rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu kedalam mata uang rupiah.

7.4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pemerintah daerah

Laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports), laporan finansial, dan CaLK.

Laporan pelaksanaan anggaran, terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran; dan
2. Laporan Perubahan SAL.

Laporan finansial, terdiri dari:

1. Neraca;
2. Laporan Operasional;
3. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
4. Laporan Arus Kas.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan – LRA, belanja, transfer dan pembiayaan.

Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (a) Pendapatan – LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih



dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah;

- (b) Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah;
- (c) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
- (d) Pembiayaan (Financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup deficit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir. dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari asset, kewajiban dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber- sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya;
- (b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah;
- (c) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah.
- (d) Laporan Operasional



Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO, beban, transfer dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (a) Pendapatan – LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- (b) Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- (c) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
- (d) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan.
- (e) Surplus/defisit-LO. adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

e. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

- (a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
- (b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- (a) Ekuitas awal;
- (b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- (c) Koreksi-koreksi langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari

dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:



1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode periode sebelumnya;

2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

(d) Ekuitas akhir.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam laporan perubahan ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan

g. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontijensi dan komitmen-komitmen lainnya. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut:

- (a) Mengungkapkan informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- (b) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- (c) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- (d) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- (e) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- (f) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka (on the face) laporan keuangan;
- (g) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka (on the face) laporan keuangan.



7.5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

7.5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2024 merupakan rekapitulasi dari Laporan Realisasi Anggaran SKPD di lingkup Pemerintah Daerah Pangkajene dan Kepulauan.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Bantuan Keuangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sebagai sumber pembiayaan utama keuangan daerah, pendapatan memerlukan intervensi dalam mengoptimalkan obyek-obyek pendapatan yang didukung dengan regulasi yang sehat, profesionalisme dan integritas pengelola, data yang akurat, serta sistem penerimaan yang simultan. Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selalu berupaya untuk meningkatkan pendapatannya, utamanya Pendapatan Asli Daerah, salah satu upaya yang dilakukan adalah berusaha meningkatkan penerimaan pada sektor pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp1.535.352.079.048,00 dan terealisasi sebesar Rp1.545.080.230.884,74 atau 100,63%, atau mengalami kenaikan pendapatan sebesar Rp40.442.719.566,83 atau sebesar 2,69% dari realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.504.637.511.317,91.

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Belanja Operasi ditujukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan tanpa menimbulkan Aset Tetap. Belanja Modal diaksentuasikan untuk mendukung kegiatan pembangunan berupa Aset Tetap. Dan Belanja Tak Terduga ditujukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kegiatan diluar perencanaan pemerintah daerah. Serta Belanja Transfer ditujukan untuk pemerataan pembangunan. Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp1.542.018.824.892,00 dan terealisasi sebesar Rp1.490.658.527.213,49 atau 96,67%, mengalami penurunan belanja sebesar Rp19.968.805.025,76 atau sebesar 1,32% dari realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.510.627.332.239,25.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran

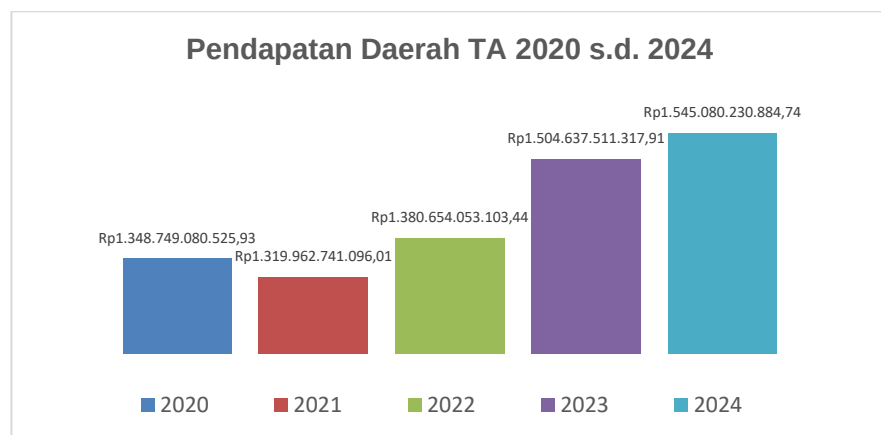


berikutnya. Anggaran Pembiayaan Bersih pada Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp6.666.745.844,00 dengan realisasi sebesar Rp3.026.844.179,66 atau 45,40%.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Anggaran SiLPA Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp57.448.547.850,91 atau mengalami kenaikan sebesar Rp46.421.703.671,25 atau 420,99% dari realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp11.026.844.179,66.

	2024	2023
7.5.1.1 Pendapatan Daerah	Rp1.545.080.230.884,74	Rp1.504.637.511.317,91

Realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.545.080.230.884,74 atau mencapai 100,63% dari anggaran Pendapatan Daerah TA 2024 sebesar Rp1.535.352.079.048,00. Realisasi Pendapatan Daerah berasal dari Penerimaan Asli Daerah sebesar Rp228.702.852.036,76 Pendapatan Transfer sebesar Rp1.293.466.561.885,00 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp22.910.816.962,98. Realisasi Pendapatan Daerah TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp40.442.719.566,83 atau lebih tinggi 2,69% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp1.504.637.511.317,91. Perkembangan realisasi Pendapatan Daerah sejak Tahun Anggaran 2020 s.d. 2024 dapat dilihat pada Gambar 7.5.1.1 Pendapatan Daerah.



Gambar 7.5.1.1 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2024



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024
Catatan atas Laporan Keuangan

Tabel 7.5.1.1. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Pendapatan Asli Daerah	200.297.120.281,00	228.702.852.036,76	114,18	176.623.383.839,89
2	Pendapatan Transfer	1.306.665.583.767,00	1.293.466.561.885,00	98,99	1.302.581.577.370,02
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	28.389.375.000,00	22.910.816.962,98	80,70	25.432.550.108,00
Jumlah		1.535.352.079.048,00	1.545.080.230.884,74	100,63	1.504.637.511.317,91

7.5.1.1.a	Pendapatan Asli Daerah	2024	2023
		Rp228.702.852.036,76	Rp176.623.383.839,89

Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp228.702.852.036,76 atau mencapai 114,18% dari Anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp200.297.120.281,00. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp52.079.468.196,87 atau lebih tinggi 29,49% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp176.623.383.839,89. Realisasi Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

Tabel 7.5.1.1.a Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan - PAD

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Pajak Daerah	105.900.082.990,00	136.543.303.074,16	128,94	94.937.575.968,44
2	Retribusi Daerah	14.558.602.523,00	12.095.295.508,00	83,08	9.440.950.198,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.309.057.431,00	13.009.057.431,00	97,75	12.927.838.786,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	66.529.377.337,00	67.055.196.023,60	100,79	59.317.018.887,45
Jumlah		200.297.120.281,00	228.702.852.036,76	114,18	176.623.383.839,89

7.5.1.1.a.1	Pendapatan Pajak Daerah	2024	2023
		Rp136.543.303.074,16	Rp94.937.575.968,44

Realisasi Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp136.543.303.074,16 atau mencapai 128,94% dari anggaran Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp105.900.082.990,00 Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp41.605.727.105,72 atau lebih tinggi 43,82% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp94.937.575.968,44. Realisasi Pajak Daerah terdiri dari:



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

Tabel 7.5.1.1.a.1 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah - Pajak Daerah
(dalam rupiah)

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	24.400.000,00
2	Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	3.822.553.883,00
3	Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	22.700.000,00
4	Pajak Reklame	400.000.000,00	391.680.650,00	97,92	339.227.400,00
5	Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	26.580.646.287,00
6	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	533.800.000,00
7	Pajak Air Tanah	140.000.000,00	78.531.175,00	56,09	148.603.625,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	57.506.475.591,00	94.642.885.078,00	164,58	52.137.335.675,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	9.453.585.422,00	6.015.956.181,16	63,64	6.416.307.838,44
10	Pajak Daerah dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	8.656.114.592,00	5.040.244.488,00	58,23	4.912.001.260,00
11	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	29.743.907.385,00	30.374.005.502,00	102,12	0,00
Jumlah		105.900.082.990,00	136.543.303.074,16	128,94	94.937.575.968,44

7.5.1.1.a.1.a Pajak Hotel

Realisasi Pajak Hotel Tahun Anggaran 2024 tidak terealisasi dikarenakan adanya perubahan PP 35 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Undang-undang Nomor 1 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) dan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah berubah menjadi Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) – Hotel.

Tabel 7.5.1.1.a.1.a Pajak Hotel

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Pajak hotel	0,00	0,00	0,00	24.400.000,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	24.400.000,00

7.5.1.1.a.1.b Pajak Restoran

Realisasi Pajak Restoran Tahun Anggaran 2024 tidak terealisasi dikarenakan adanya perubahan PP 35 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Undang-undang Nomor 1 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) dan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah berubah menjadi Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) – Restoran.



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

Tabel 7.5.1.1.a.1.b Pajak Restoran

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	3.822.553.883,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	3.822.553.883,00

7.5.1.1.a.1.c Pajak Hiburan

Realisasi Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2024 tidak terealisasi dikarenakan adanya perubahan PP 35 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Undang-undang Nomor 1 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) dan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah berubah menjadi Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) – Hiburan.

Tabel 7.5.1.1.a.1.c Pajak Hiburan

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
2	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	22.700.000,00

7.5.1.1.a.1.d Pajak Reklame

Realisasi Pajak Reklame Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp52.453.250,00 atau lebih tinggi 15,46% dibandingkan dengan realisasi Pajak Reklame Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp339.227.400,00. Dalam realisasi Pajak Reklame tersebut.

Tabel 7.5.1.1.a.1.d Pajak Reklame

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	124.815.000,00	386.216.150,00	309,43	334.289.900,00
2	Pajak Reklame Kain	274.985.000,00	5.464.500,00	1,99	4.937.500,00
3	Pajak Reklame Melekat/Stiker	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		400.000.000,00	391.680.650,00	97,92	339.227.400,00



7.5.1.1.a.1.e Pajak Penerangan Jalan

Realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2024 tidak terealisasi dikarenakan adanya PP 35 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Undang-undang Nomor 1 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) dan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah berubah menjadi Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) – Penerangan Jalan.

Tabel 7.5.1.1.a.1.e Pajak Penerangan Jalan

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	0,00	0,00	0,00	25.979.602.451,00
2	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	0,00	0,00	0,00	601.043.836,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	26.580.646.287,00

7.5.1.1.a.1.f Pajak Parkir

Realisasi Pajak Parkir Tahun Anggaran 2024 tidak terealisasi dikarenakan adanya perubahan PP 35 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Undang-undang Nomor 1 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) dan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah berubah menjadi Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) – Parkir.

Tabel 7.5.1.1.a.1.f Pajak Parkir

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	533.800.000,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	533.800.000,00

7.5.1.1.a.1.g Pajak Air Tanah

Realisasi Pajak Air Tanah Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp70.072.450,00 atau lebih rendah 47,15% dibandingkan dengan realisasi Pajak Air Tanah Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp148.603.625,00.

Tabel 7.5.1.1.a.1.g Pajak Air Tanah

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Pajak Air Tanah	140.000.000,00	78.531.175,00	56,09	148.603.625,00
Jumlah		140.000.000,00	78.531.175,00	56,09	148.603.625,00



7.5.1.1.a.1.h Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp94.642.885.078,00 mengalami kenaikan sebesar Rp42.505.549.403,00 atau lebih tinggi 81,53% dibandingkan dengan realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp52.137.335.675,00 Dalam realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tersebut.

Tabel 7.5.1.1.a.1.h Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Pajak Batu Kapur	43.944.409.000,00	72.825.795.910,00	165,72	39.896.974.450,00
2	Pajak Marmer	4.782.079.000,00	5.023.610.865,00	105,05	3.072.819.825,00
3	Pajak Pasir dan Kerikil	104.895.000,00	91.790.000,00	87,51	157.966.200,00
4	Pajak Pasir Kuarsa	383.984.000,00	372.735.980,00	97,07	574.461.000,00
5	Pajak Tanah Liat	7.506.010.591,00	15.883.556.323,00	211,61	7.346.077.200,00
6	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	785.098.000,00	445.396.000,00	56,73	1.089.037.000,00
Jumlah		57.506.475.591,00	94.642.885.078,00	164,58	52.137.335.675,00

7.5.1.1.a.1.i Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp400.351.657,28 atau lebih rendah 6,24% dibandingkan dengan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp6.416.307.838,44.

Tabel 7.5.1.1.a.1.i Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	PBBP2	9.453.585.422,00	6.015.956.181,16	63,64	6.416.307.838,44
Jumlah		9.453.585.422,00	6.015.956.181,16	63,64	6.416.307.838,44

7.5.1.1.a.1.j Pajak Daerah Dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Realisasi Pajak Daerah Dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.040.244.488,00 mengalami kenaikan sebesar Rp128.243.228,00 atau lebih tinggi 2,61% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp4.912.001.260,00. Dalam realisasi Pajak Daerah Dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terdiri dari:



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

Tabel 7.5.1.1.a.1.j Rincian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	BPHTB-Pemindahan Hak	8.656.114.592,00	5.040.244.488,00	58,23	4.912.001.260,00
2	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		8.656.114.592,00	5.040.244.488,00	58,23	4.912.001.260,00

7.5.1.1.a.1.k Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp30.374.005.502,00, adanya perubahan PP 35 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Undang-undang Nomor 1 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) dan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah berubah menjadi Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Dalam realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) terdiri dari:

Tabel 7.5.1.1.a.1.k Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	PBJT-Restoran	4.000.000.000,00	4.239.581.709,00	105,99	0,00
2	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	5.767.514.000,00	4.417.254.860,00	76,59	0,00
3	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	19.496.793.385,00	21.170.428.306,00	108,58	0,00
4	PBJT-Hotel	30.000.000,00	67.474.727,00	224,92	0,00
5	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	429.600.000,00	459.263.900,00	106,91	0,00
6	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	20.000.000,00	20.002.000,00	100,01	0,00
Jumlah		29.743.907.385,00	30.374.005.502,00	102,12	0,00

7.5.1.1.a.2	Retribusi Daerah	2024	2023
		Rp12.095.295.508,00	Rp9.440.950.198,00

Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp2.654.345.310,00 atau lebih tinggi 28,12% dibandingkan dengan realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp9.440.950.198,00. Dalam realisasi Retribusi Daerah tersebut terdiri dari:



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

Tabel 7.5.1.1.a.2 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah - Retribusi Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Retribusi Jasa Umum	8.219.805.702,00	8.750.886.379,00	106,46	7.034.928.780,00
2	Retribusi Jasa Usaha	4.507.053.821,00	2.650.520.849,00	58,81	2.003.764.874,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	1.831.743.000,00	693.888.280,00	37,88	402.256.544,00
Jumlah		14.558.602.523,00	12.095.295.508,00	83,08	9.440.950.198,00

7.5.1.1.a.2.a Retribusi Jasa Umum

Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.715.957.599,00 atau lebih tinggi 24,39% dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp7.034.928.780,00 yang terdiri dari:

Tabel 7.5.1.1.a.2.a Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah - Retribusi Daerah - Retribusi Jasa Umum

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.541.594.000,00	6.263.833.999,00	137,92	4.626.011.000,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	0,00	0,00	0,00	256.072.500,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.079.000.000,00	504.700.000,00	46,77	381.800.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	1.996.961.702,00	1.495.024.880,00	74,86	1.205.852.280,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	90.000,00	0,00	100.028.500,00
6	Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
8	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	443.164.500,00
9	Retribusi Pelayanan Persampahan	596.250.000,00	483.237.500,00	81,05	0,00
10	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	6.000.000,00	4.000.000,00	66,67	0,00
Jumlah		8.219.805.702,00	8.750.886.379,00	106,46	7.034.928.780,00

7.5.1.1.a.2.b Retribusi Jasa Usaha

Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp646.755.975,00 atau lebih tinggi 32,28% dibandingkan dengan



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp2.003.764.874,00.

Tabel 7.5.1.1.a.2.b Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah - Retribusi Daerah - Retribusi Jasa Usaha

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	1.616.618.624,00
2	Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan	20.000.000,00	17.700.000,00	88,50	5.000.000,00
3	Retribusi Tempat Pelelangan	153.750.000,00	113.700.000,00	73,95	78.080.000,00
4	Retribusi Terminal	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
5	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	290.800.000,00	184.170.000,00	63,33	0,00
6	Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH)	150.000.000,00	119.685.000,00	79,79	95.795.000,00
7	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	146.515.000,00	79.037.500,00	53,94	68.021.250,00
8	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	638.100.000,00	154.308.100,00	24,18	136.050.000,00
9	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	480.000.000,00	268.200.000,00	55,88	0,00
10	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	2.617.888.821,00	1.713.720.249,00	65,46	0,00
Jumlah		4.507.053.821,00	2.650.520.849,00	58,81	2.003.764.874,00

7.5.1.1.a.2.c Retribusi Perizinan Tertentu

Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp291.631.736,00 atau lebih besar 72,50% dibandingkan dengan realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp402.256.544,00.

Tabel 7.5.1.1.a.2.c Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah - Retribusi Daerah - Retribusi Perizinan Tertentu

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.831.743.000,00	693.888.280,00	37,88	402.256.544,00
Jumlah		1.831.743.000,00	693.888.280,00	37,88	402.256.544,00



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

Pendapatan Hasil		2024	2023
7.5.1.1.a.3.	Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp 13.009.057.431,00	Rp12.927.838.786,00

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp13.009.057.431,00 atau mencapai 97,75% dari anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp13.309.057.431,00. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp81.218.645,00 atau lebih besar 0,63% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp12.927.838.786,00. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berasal dari:

Tabel 7.5.1.1.a.3 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

(dalam rupiah)					
No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	13.309.057.431,00	13.009.057.431,00	97,75	12.927.838.786,00
Jumlah		13.309.057.431,00	13.009.057.431,00	97,75	12.927.838.786,00

7.5.1.1.a.3.a Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terealisasi sebesar Rp13.009.057.431,00 dari anggaran sebesar Rp13.309.057.431,00 atau sebesar 97,75%. Penerimaan ini bersumber dari bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan), realisasi sebesar Rp13.009.057.431,00 ini merupakan Dividen yang bersumber dari Bank Sulselbar berdasarkan hasil RUPS tertanggal 15 Maret 2024, sedangkan dari BUMD Lainnya seperti PDAM, BPR Citra Mas dan Perumda Mappatuwo untuk Tahun Anggaran 2024 tidak memberikan Dividen samasekali.

		2024	2023
7.5.1.1.a.4	Lain-Lain PAD yang Sah	Rp67.055.196.023,60	Rp59.317.018.887,45

Realisasi Lain - lain PAD yang Sah pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp67.055.196.023,60 atau mencapai 100,79% mengalami kenaikan sebesar Rp7.738.177.136,15 atau lebih tinggi 13,05% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp59.317.018.887,45 dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

**Tabel 7.5.1.1.a.4 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah - Lain-Lain
Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	150.000.000,00	164.255.300,00	109,50	186.143.600,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.317.680.000,00	41.780.000,00	1,80	418.000.000,00
3	Penerimaan Jasa Giro	325.429.017,00	2.101.282.998,80	645,70	1.832.661.728,00
4	Pendapatan Bunga	372.868.372,00	532.065.072,09	142,70	385.210.016,52
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	3.745.857.761,00	4.011.246.425,16	107,08	1.328.954.970,19
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan	30.000.000,00	56.502.102,00	188,34	27.484.846,25
7	Pendapatan dari Pengembalian	1.587.542.187,00	2.769.077.495,00	174,43	1.427.521.299,88
8	Pendapatan BLUD	58.000.000.000,00	57.378.986.630,55	98,93	53.711.042.426,61
Jumlah		66.529.377.337,00	67.055.196.023,60	100,79	59.317.018.887,45

Tabel 7.5.1.1.a.4.a Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp21.888.300,00 atau lebih rendah 11,76% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp186.143.600,00. Dalam realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan merupakan hasil penjualan bahan bangunan.

Tabel 7.5.1.1.a.4.a Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	186.143.600,00
2	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	150.000.000,00	164.255.300,00	109,50	0,00
Jumlah		150.000.000,00	164.255.300,00	109,50	186.143.600,00

Tabel 7.5.1.1.a.4.b Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp376.220.000,00 atau lebih rendah 90,00% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp418.000.000,00. Dalam realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan tersebut terdiri dari hasil sewa BMD sebesar Rp11.780.000,00 dan hasil kerja sama pemanfaatan BMD sebesar Rp30.000.000,00.



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

Tabel 7.5.1.1.a.4.b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Hasil Sewa BMD	5.780.000,00	11.780.000,00	203,81	218.000.000,00
2	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	2.311.900.000,00	30.000.000,00	1,30	200.000.000,00
Jumlah		2.317.680.000,00	41.780.000,00	1,80	418.000.000,00

Tabel 7.5.1.1.a.4.c Jasa Giro

Realisasi Jasa Giro Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp268.621.270,80 atau lebih besar 14,66% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp1.832.661.728,00. Dalam realisasi Jasa Giro tersebut terdiri dari jasa giro pada kas daerah sebesar Rp2.078.603.069,80 dan jasa giro pada Kas di Bendahara sebesar Rp22.679.929,00.

Tabel 7.5.1.1.a.4.c Jasa Giro

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Jasa Giro pada Kas Daerah	325.429.017,00	2.078.603.069,80	638,73	1.832.661.728,00
2	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00	22.679.929,00	0,00	0,00
Jumlah		325.429.017,00	2.101.282.998,80	645,70	1.832.661.728,00

7.5.1.1.a.4.d Pendapatan Bunga

Realisasi Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp146.855.055,57 atau lebih besar 38,12% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp385.210.016,52.

Tabel 7.5.1.1.a.4.d Pendapatan Bunga

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	372.868.372,00	532.065.072,09	142,70	385.210.016,52
Jumlah		372.868.372,00	532.065.072,09	142,70	385.210.016,52

7.5.1.1.a.4.e Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Realisasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp2.682.291.454,97 atau lebih besar 201,83% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp1.328.954.970,19.



Tabel 7.5.1.1.a.4.e Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	3.745.857.761,00	4.011.246.425,16	107,08	1.328.954.970,19
Jumlah		3.745.857.761,00	4.011.246.425,16	107,08	1.328.954.970,19

7.5.1.1.a.4.f Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp29.017.255,75 atau lebih tinggi 105,58% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp27.484.846,25.

Tabel 7.5.1.1.a.4.f Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	30.000.000,00	56.502.102,00	188,34	27.484.846,25
Jumlah		30.000.000,00	56.502.102,00	188,34	27.484.846,25

7.5.1.1.a.4.g Pendapatan dari Pengembalian

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.341.556.195,12 atau lebih tinggi 93,98% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp1.427.521.299,88. Dalam realisasi Pendapatan dari Pengembalian tersebut terdiri dari pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS sebesar Rp161.159,00 dan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-Tunjangan-tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS sebesar Rp2.768.916.336,00.



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

Tabel 7.5.1.1.a.4.g Pendapatan dari Pengembalian

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	0,00	0,00	0,00	1.088.037.068,66
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0,00	323.847.631,00
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	15.636.600,22
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS	1.587.542.187,00	161.159,00	0,01	0,00
5	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-Tunjangan Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	0,00	2.768.916.336,00	0,00	0,00
Jumlah		1.587.542.187,00	2.769.077.495,00	174,43	1.427.521.299,88

7.5.1.1.a.4.h Pendapatan BLUD

Realisasi Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp3.667.944.203,94 atau lebih tinggi 6,83% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp53.711.042.426,61, realisasi Pendapatan BLUD tersebut:

Tabel 7.5.1.1.a.4.h Pendapatan BLUD

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	53.711.042.426,61
2	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	58.000.000.000,00	57.378.986.630,55	98,93	0,00
Jumlah		58.000.000.000,00	57.378.986.630,55	98,93	53.711.042.426,61

7.5.1.1.b.	Pendapatan Transfer	2024	2023
		Rp1.293.466.561.885,00	Rp1.302.581.577.370,02

Realisasi Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.293.466.561.885,00 atau mencapai 98,99% dari anggaran Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.306.665.583.767,00. Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp9.115.015.485,02 atau lebih rendah 0,70% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp1.302.581.577.370,02. Realisasi Pendapatan Transfer berasal dari:



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024
Catatan atas Laporan Keuangan

Tabel 7.5.1.1.b Pendapatan Transfer

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.218.708.307.000,00	1.232.795.662.031,00	101,16	1.200.455.079.345,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	87.957.276.767,00	60.670.899.854,00	68,98	102.126.498.025,02
Jumlah		1.306.665.583.767,00	1.293.466.561.885,00	98,99	1.302.581.577.370,02

7.5.1.1.b.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.232.795.662.031,00 atau mencapai 101,16% dari Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.218.708.307.000,00. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp32.340.582.686,00 atau lebih tinggi 2,69% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp1.200.455.079.345,00 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berasal dari:

Tabel 7.5.1.1.b.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	1.140.786.371.000,00	1.154.873.726.071,00	101,23	1.117.555.608.355,00
2	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	17.797.293.000,00
3	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Desa	66.353.380.000,00	66.353.379.960,00	100,00	65.102.177.990,00
4	Transfer Pemerintah Pusat – Insentif fiskal	11.568.556.000,00	11.568.556.000,00	100,00	0,00
Jumlah		1.218.708.307.000,00	1.232.795.662.031,00	101,16	1.200.455.079.345,00

Transfer		2024	2023
7.5.1.1.b.1.1	Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	Rp1.154.873.726.071,00	Rp1.117.555.608.355,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan khususnya Dana Bagi Hasil terdapat penyaluran TDF (Treasury Deposit Facility) yang merupakan instrument untuk mengelolah likuiditas, yakni sebesar Rp3.639.901.664,00 berdasarkan surat Kementerian Keuangan Nomor: S-54/PK/PK.2/2024 perihal penyaluran dana Treasury Deposit Facility ke RKUD dalam rangka mendukung kebutuhan belanja daerah Tahun Anggaran 2024. Terdiri dari pengeluaran non anggaran pokok TDF-DBH sebesar Rp3.599.223.000,00 kemudian pengeluaran non anggaran



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

pihak ketiga remunirasi TDF pada rekening TDF-DBH sebesar Rp40.678.664,00 Dalam realisasi Dana Perimbangan tersebut terdiri dari:

Tabel 7.5.1.1.b.1.1 Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	21.979.024.000,00	25.613.641.664,00	116,54	27.085.286.494,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	769.416.938.000,00	787.431.926.000,00	102,34	746.290.902.260,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	127.570.584.000,00	124.338.989.980,00	97,47	134.234.092.286,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	221.819.825.000,00	217.489.168.427,00	98,05	209.945.327.315,00
Jumlah		1.140.786.371.000,00	1.154.873.726.071,00	101,23	1.117.555.608.355,00

Dana Bagi Hasil Pajak merupakan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Dana Perimbangan. Dalam Tahun Anggaran 2024 Bagi Hasil Pajak dianggarkan sebesar Rp21.979.024.000,00 dan terealisasi sebesar Rp25.613.641.664,00 atau 116,54%, dengan rincian sebagai berikut:

7.5.1.1.b.1.1.a Dana Bagi Hasil	2024	2023
	Rp25.613.641.664,00	Rp27.085.286.494,00

Dana Bagi Hasil merupakan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Dana Perimbangan. Tahun Anggaran 2024 Dana Bagi Hasil, dianggarkan sebesar Rp21.979.024.000,00 dan terealisasi sebesar Rp25.613.641.664,00 atau 116,54% mengalami penurunan sebesar Rp1.471.644.830,00 atau 5,43%.

Tabel 7.5.1.1.b.1.1.a Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan - Bagi Hasil Pajak

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.224.524.000,00	1.244.301.000,00	101,62	13.511.725.444,00
2	DBH PPh Pasal 21	9.020.838.000,00	12.407.194.664,00	137,54	4.630.831.200,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	253.545.000,00	0,00	206.751.600,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	256.881.000,00	262.827.000,00	102,31	273.428.000,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	0,00	49.000,00	0,00	4.387.892.500,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	385.555.000,00	385.506.000,00	99,99	99.816.300,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	61.139.000,00	0,00	383.956.400,00



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
8	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	2.238.455.000,00	2.177.316.000,00	97,27	473.766.750,00
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	31.007.000,00	0,00	0,00	0,00
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	8.821.764.000,00	8.821.764.000,00	100,00	3.117.118.300,00
Jumlah		21.979.024.000,00	25.613.641.664,00	116,54	27.085.286.494,00

7.5.1.1.b.1.1.b	Dana Alokasi Umum (DAU)	2024	2023
		Rp787.431.926.000,00	Rp746.290.902.260,00

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan Dana Perimbangan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari Pemerintah Pusat dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Otonomi Daerah. Pada Tahun Anggaran 2024, Dana Alokasi Umum (DAU) dianggarkan sebesar Rp769.416.938.000,00 dan terealisasi sebesar Rp787.431.926.000,00 atau 102,34%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.1.1.b.1.1.b Jadwal Transfer Dana Alokasi Umum (DAU)
(dalam rupiah)

No	Peruntukan Bulan	Rincian Transfer	
		2024	2023
1	Januari	47.955.628.000,00	43.040.392.000,00
2	Februari	95.911.256.000,00	43.040.392.000,00
3	Maret	47.955.628.000,00	43.040.392.000,00
4	April	101.013.535.000,00	103.535.250.000,00
5	Mei	47.955.628.000,00	43.040.392.000,00
6	Juni	51.755.628.000,00	43.040.392.000,00
7	Juli	127.542.490.000,00	43.040.392.000,00
8	Agustus	47.955.628.000,00	43.040.392.000,00
9	September	51.755.628.000,00	131.882.679.000,00
10	Oktober	47.955.628.000,00	42.939.741.110,00
11	November	92.170.553.000,00	94.345.466.150,00
12	Desember	27.504.696.000,00	72.305.022.000,00
Jumlah		787.431.926.000,00	746.290.902.260,00



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

Tabel 7.5.1.1.b.1.1.b Rincian Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)
(dalam rupiah)

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	DAU	575.467.536.000,00	593.482.524.000,00	103,13	746.290.902.260,00
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	7.600.000.000,00	7.600.000.000,00	100,00	0,00
3	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	9.489.708.000,00	9.489.708.000,00	100,00	0,00
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	100.459.798.000,00	100.459.798.000,00	100,00	0,00
5	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	63.355.018.000,00	63.355.018.000,00	100,00	0,00
6	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	13.044.878.000,00	13.044.878.000,00	100,00	0,00
Jumlah		769.416.938.000,00	787.431.926.000,00	102,34	746.290.902.260,00

7.5.1.1.b.1.1.c	Dana Alokasi Khusus	2024	2023
		Rp341.828.158.407,00	Rp344.179.419.601,00

Dana Alokasi Khusus merupakan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk membiayai kebutuhan khusus. Tahun Anggaran 2024 Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sebesar Rp349.390.409.000,00 dan terealisasi sebesar Rp341.828.158.407,00 atau 97,84%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.1.1.b.1.1.c Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan - Dana Alokasi Khusus (DAK)

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	DAK Reguler	125.488.089.000,00	122.264.037.080,00	97,43	60.337.704.056,00
2	DAK Non Fisik	221.819.825.000,00	217.489.168.427,00	98,05	209.945.327.315,00
3	DAK Penugasan	2.082.495.000,00	2.074.952.900,00	99,64	73.896.388.230,00
Jumlah		349.390.409.000,00	341.828.158.407,00	97,84	344.179.419.601,00

Dana Alokasi Khusus (DAK) ini terdiri dari beberapa jenis Dana Alokasi Khusus (DAK), diantaranya adalah:

1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler, untuk Tahun Anggaran 2024 ini, DAK Reguler dianggarkan sebesar Rp125.488.089.000,00 dan terealisasi sebesar Rp122.264.037.080,00 atau 97,43% mengalami kenaikan sebesar Rp61.926.333.024,00 atau lebih tinggi 102,63%



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp60.337.704.056,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.1.1.b.1.1.c.1 Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan - Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.103.193.000,00	1.078.102.200,00	97,73	1.717.120.949,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	23.102.550.000,00	22.698.629.863,00	98,25	24.363.989.150,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.542.480.000,00	2.492.996.100,00	98,05	12.691.655.850,00
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	880.326.000,00	873.631.000,00	99,24	0,00
5	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	10.500.000.000,00	10.364.114.000,00	98,71	0,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0,00	0,00	0,00	422.356.000,00
7	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	21.400.595.000,00	21.079.054.250,00	98,50	21.142.582.107,00
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB	3.794.113.000,00	3.711.227.600,00	97,82	0,00
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	62.164.832.000,00	59.966.282.067,00	96,46	0,00
Jumlah		125.488.089.000,00	122.264.037.080,00	97,43	60.337.704.056,00

2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, untuk Tahun Anggaran 2024 ini, DAK Non Fisik dianggarkan sebesar Rp221.819.825.000,00 dan terealisasi sebesar Rp217.489.168.427,00 atau 98,05% mengalami kenaikan sebesar Rp7.543.841.112,00 atau 3,59% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp209.945.327.315,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.1.1.b.1.1.c.2 Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	49.255.800.000,00	49.255.669.000,00	100,00	51.131.319.990,00
2	DAK Bantuan Operasional Penyelenggara PAUD	5.960.400.000,00	5.905.440.000,00	99,08	5.957.700.000,00
3	DAK Tunjangan Profesi Guru	105.746.021.000,00	103.761.549.000,00	98,12	100.380.129.204,00
4	DAK Tambahan Penghasilan Guru	1.255.100.000,00	1.255.100.000,00	100,00	296.955.005,00
5	DAK Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana	32.505.686.000,00	29.998.581.051,00	92,29	28.458.867.541,00



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
6	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	366.131.000,00	0,00	0,00	0,00
7	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.725.000.000,00	1.725.000.000,00	100,00	0,00
8	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
9	DAK Tunjangan Khusus Guru	11.122.937.000,00	12.191.195.000,00	109,60	10.162.797.000,00
10	DAK Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan dan Kesetaraan	2.704.400.000,00	2.515.300.000,00	93,01	2.855.100.000,00
11	DAK Dana Pelayanan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	1.483.815.000,00
12	DAK PK2UKM	0,00	0,00	0,00	196.365.000,00
13	DAK Dana Bantuan BLPS	0,00	0,00	0,00	203.385.000,00
14	DAK Fasilitas Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	369.860.000,00
15	DAK Non Fisik-BOKB-KB	9.205.590.000,00	9.182.482.255,00	99,75	4.323.958.575,00
16	DAK Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	625.075.000,00
17	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	1.972.760.000,00	1.668.852.121,00	84,59	3.500.000.000,00
Jumlah		221.819.825.000,00	217.489.168.427,00	98,05	209.945.327.315,00

3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan, untuk Tahun Anggaran 2024 ini, DAK Penugasan dianggarkan sebesar Rp2.082.495.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.074.952.900,00 atau 99,64% mengalami penurunan sebesar Rp71.821.435.330,00 atau 97,19 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp73.896.388.230,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.1.1.b.1.1.c.3 Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan - Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	DAK Bidang Jalan	0,00	0,00	0,00	20.278.979.000,00
2	DAK Bidang Kesehatan dan KB	0,00	0,00	0,00	14.756.451.677,00
3	DAK Bidang Pasar	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DAK Bidang Irigasi	0,00	0,00	0,00	2.685.769.800,00
5	DAK Air Minum	0,00	0,00	0,00	0,00
6	DAK Bidang Pertanian	0,00	0,00	0,00	12.633.267.000,00
7	DAK Pariwisata	0,00	0,00	0,00	4.159.797.180,00
8	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	8.868.890.000,00
9	DAK Bidang Industri Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	10.513.233.573,00
10	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	2.082.495.000,00	2.074.952.900,00	99,64	0,00
Jumlah		2.082.495.000,00	2.074.952.900,00	99,64	73.896.388.230,00



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

7.5.1.1.b.1.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	2024	2023
		Rp77.921.935.960,00	Rp82.899.470.990,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp77.921.936.000,00 terealisasi sebesar Rp77.921.935.960,00 atau 100% mengalami penurunan sebesar Rp4.977.535.030,00 atau 6,00% dikarenakan pada tahun 2023 realisasi dari dana transfer terdiri dari Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp17.797.293.000,00 dan Dana Desa sebesar Rp65.102.177.990,00 sementara di tahun 2024 Dana Desa sebesar Rp66.353.379.960,00 dan Dana Insentif Fiskal sebesar Rp11.568.556.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.1.1.b.1.2.a Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
(dalam rupiah)

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	17.797.293.000,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	17.797.293.000,00

Tabel 7.5.1.1.b.1.2.b Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
(dalam rupiah)

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Dana Desa	66.353.380.000,00	66.353.379.960,00	100,00	65.102.177.990,00
2	Insentif Fiskal	11.568.556.000,00	11.568.556.000,00	100,00	0,00
Jumlah		77.921.936.000,00	77.921.935.960,00	100,00	65.102.177.990,00

7.5.1.1.b.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	2024	2023
		Rp60.670.899.854,00	Rp102.126.498.025,02

Pendapatan Transfer antar Daerah dari anggaran sebesar Rp87.957.276.767,00 dan terealisasi sebesar Rp60.670.899.854,00 atau sebesar 68,98%. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp41.455.598.171,02 atau lebih rendah 40,59% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp102.126.498.025,02 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.1.1.b.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah
(dalam rupiah)

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	17.871.480.999,00	10.618.203.114,00	59,41	17.179.356.786,00



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	9.952.412.042,00	6.947.513.620,00	69,81	11.532.647.330,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	18.928.806.710,00	14.793.747.507,00	78,15	27.451.626.052,02
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	116.535.249,00	187.756.397,00	161,12	125.589.253,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	21.089.611.017,00	20.559.355.466,00	97,49	19.834.672.104,00
6	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	16.868.430.750,00	4.959.963.750,00	29,40	4.992.438.500,00
7	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	3.130.000.000,00	2.604.360.000,00	83,21	21.010.168.000,00
Jumlah		87.957.276.767,00	60.670.899.854,00	68,98	102.126.498.025,02

7.5.1.1.b.2.a	Pendapatan Bagi Hasil	2024	2023
		Rp53.106.576.104,00	Rp76.123.891.525,02

Dari Realisasi Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp53.106.576.104,00 yang menjadi realisasi Bagi Hasil Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp36.062.732.572,00 yakni realisasi dari Bulan Januari 2024 hingga Bulan Mei 2024 untuk Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Air Permukaan, dan Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan I hingga Triwulan III, sisanya merupakan realisasi piutang bagi hasil Tahun Anggaran 2023. Namun ada realisasi Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Bulan Desember 2023 sebesar Rp2.977.081.949,00 yang kami hitung sebagai realisasi 2024, karena yang menjadi dasar pencatatan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 565/VI/Tahun 2024 (setelah dilakukan audit baru terbit). Pendapatan Transfer antar Daerah – Pendapatan Bagi Hasil mengalami penurunan sebesar Rp23.017.017.315.421,02 atau lebih rendah 30,24% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp76.123.891.525,02 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.1.1.b.2.a Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Provinsi - Bagi Hasil Pajak Provinsi

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	17.871.480.999,00	10.618.203.114,00	59,41	17.179.356.786,00
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	9.952.412.042,00	6.947.513.620,00	69,81	11.532.647.330,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	18.928.806.710,00	14.793.747.507,00	78,15	27.451.626.052,02



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
4	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	116.535.249,00	187.756.397,00	161,12	125.589.253,00
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	21.089.611.017,00	20.559.355.466,00	97,49	19.834.672.104,00
Jumlah		67.958.846.017,00	53.106.576.104,00	78,15	76.123.891.525,02

7.5.1.1.b.2.b	Bantuan Keuangan	2024	2023
		Rp7.564.323.750,00	Rp26.002.606.500,00

Hingga 31 Desember 2024 yang terealisasi adalah untuk:

1. Bantuan Keuangan untuk Kesehatan (PBI) terealisasi adalah sebesar Rp4.959.963.750,00 yang merupakan Piutang Bantuan Keuangan untuk Kesehatan Tahun Anggaran 2023 (berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 169/I/Tahun 2023 tentang Penetapan Kuota Peserta Program Kesehatan Gratis yang didaftarkan), sedangkan untuk realisasi Bantuan Keuangan untuk Kesehatan (PBI) Tahun Anggaran 2024 sama sekali tidak teralisasi;
2. Bantuan Keuangan Khusus berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 187/II/Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp630.000.000,00 terealisasi sebesar Rp630.000.000,00;
3. Bantuan Keuangan Khusus berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 369/IV/Tahun 2024 tentang pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.974.360.000,00 yang merupakan pekerjaan lanjutan RDF (sesuai nilai Kontrak) dan sisanya sebesar Rp500.000.000,00 yang merupakan pembebasan lahan pemakaman tidak cair sama sekali.

Realisasi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp18.438.282.750,00 atau lebih rendah 70,91% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp26.002.606.500,00. Dalam realisasi Bantuan Keuangan tersebut terdiri dari:



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

Tabel 7.5.1.1.b.2.b Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Antar Daerah - Bantuan Keuangan

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	16.868.430.750,00	4.959.963.750,00	29,40	4.992.438.500,00
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	3.130.000.000,00	2.604.360.000,00	83,21	21.010.168.000,00
Jumlah		19.998.430.750,00	7.564.323.750,00	37,82	26.002.606.500,00

Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mendapat Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan senilai Rp7.564.323.750,00 dari anggaran sebesar Rp19.998.430.750,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 169/I/Tahun 2023 tentang Penetapan Kuota Peserta Program Kesehatan Gratis yang di daftarkan dan dibayarkan iurannya oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota, yang untuk penyalurannya di buatkan SK Kembali per Triwulan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk Tahun 2023, penyalurannya berdasarkan:

- a. Nomor 1737/XII/Tahun 2023 tentang Alokasi Bantuan Pembayaran Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Peserta Penerima Biaya Iuran Lokal Pelayanan Kesehatan Gratis Per Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan III Juli s/d September 2023.
- b. Nomor 1825/XII/Tahun 2023 tentang Alokasi Bantuan Pembayaran Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Peserta Penerima Biaya Iuran Lokal Pelayanan Kesehatan Gratis Per Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan IV Oktober s/d Desember 2023.

Dengan realisasi sebesar Rp4.959.963.750,00;

2. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 187/II/Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2024 dan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 369/IV/Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2024 dengan besaran SK sebesar Rp3.130.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.604.360.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.1.1.b.2.b.1 Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Antar Daerah - Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi

No	Nama OPD	Nama Kegiatan	Anggaran	Salur dari Provinsi	Realisasi Kasda	Sisa Anggaran dari Salur Provinsi
1	Dinas Lingkungan Hidup	Lanjutan RDF	2.000.000.000,00	1.974.510.000,00	1.974.510.000,00	0,00



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

No	Nama OPD	Nama Kegiatan	Anggaran	Salur dari Provinsi	Realisasi Kasda	Sisa Anggaran dari Salur Provinsi
2	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Pengadaan Tanah Tempat Pemakaman	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Kesatuan Bangsa dan Politik dan 13 Kecamatan	Pengadaan Laptop	15.000.000,00	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00
		Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (13 Kecamatan, 13 Danramil dan 13 Polsek)	390.000.000,00	390.000.000,00	387.000.000,00	3.000.000,00
4	D P M D	Penanganan Stunting Gizi Buruk	225.000.000,00	225.000.000,00	220.050.000,00	4.950.000,00
Total			3.130.000.000,00	2.604.360.000,00	2.596.410.000,00	7.950.000,00

7.5.1.1.c	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	2024	2023
		Rp22.910.816.962,98	Rp25.432.550.108,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp22.910.816.962,98 atau mencapai 80,70% dari anggaran Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp28.389.375.000,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp2.521.733.145,02 atau lebih rendah 9,92% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp25.432.550.108,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah berasal dari:

Tabel 7.5.1.1.c Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
(dalam rupiah)

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Pendapatan Hibah	0,00	100.001,98	0,00	2.002.555.272,00
2	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	28.389.375.000,00	22.910.716.961,00	80,70	23.429.994.836,00
Jumlah		28.389.375.000,00	22.910.816.962,98	80,70	25.432.550.108,00

7.5.1.1.c.1	Pendapatan Hibah	2024	2023
		Rp100.001,98	Rp2.002.555.272,00

Realisasi Pendapatan Hibah pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp100.001,98 yang merupakan Pendapatan Sumbangan dari Pihak Ketiga/Sejenis terdiri dari penerimaan Kelebihan penyeteroran Silpa Bunga JKN, antara lain PKM Pamantauang sebesar Rp0,16, PKM Pundata Baji sebesar Rp0,06, PKM Tupabbiring Utara sebesar Rp0,36, PKM Sabutung sebesar Rp0,72, PKM Bungoro sebesar Rp0,68 dan Kelebihan Pengembalian Saldo Kas Lainnya pada Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan Labakkang sebesar Rp100.000,00. Realisasi Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp2.002.455.270,02 atau lebih rendah 100% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp2.002.555.272,00. Realisasi Pendapatan Hibah berasal dari:



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

Tabel 7.5.1.1.c.1 Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah -
Pendapatan Hibah

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
2	Sumbangan Pihak Ketiga/sejenis	0,00	100.001,98	0,00	2.555.272,00
Jumlah		0,00	100.001,98	0,00	2.002.555.272,00

**Lain-Lain
Pendapatan Daerah
yang Sah -
Pendapatan Sesuai
dengan Ketentuan
Peraturan
Perundang-undangan**

2024
Rp22.910.716.961,00

2023
Rp23.429.994.836,00

Realisasi Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah – Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp22.910.716.961,00 atau mencapai 80,70% dari anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp28.389.375.000,00. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp519.277.875,00 atau lebih rendah 2,22% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp23.429.994.836,00. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ini merupakan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD.

Tabel 7.5.1.1.c.2 Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
- Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD	28.389.375.000,00	22.910.716.961,00	0,00	23.429.994.836,00
Jumlah		28.389.375.000,00	22.910.716.961,00	80,70	23.429.994.836,00



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

7.5.1.2	Belanja dan Transfer Daerah	2024	2023
		Rp1.490.658.527.213,49	Rp1.510.627.332.239,25

Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.490.658.527.213,49 atau 96,67% dari anggaran belanja sebesar Rp1.542.018.824.892,00. Realisasi tersebut lebih kurang 1,32% dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.510.627.332.239,25. Realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 lebih rendah dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.1.2 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Operasi	1.146.332.358.587,00	1.104.456.760.541,12	96,35	1.059.765.505.490,79
2	Belanja Modal	242.235.243.129,00	234.323.375.005,37	96,73	297.442.205.431,46
3	Belanja Tak Terduga	1.961.000.800,00	1.958.577.900,00	99,88	3.970.415.183,00
4	Belanja Transfer	151.490.222.376,00	149.919.813.767,00	98,96	149.449.206.134,00
Jumlah		1.542.018.824.892,00	1.490.658.527.213,49	96,67	1.510.627.332.239,25

7.5.1.2.a	Belanja Operasi	2024	2023
		Rp1.104.456.760.541,12	Rp1.059.765.505.490,79

Realisasi Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.104.456.760.541,12 atau 96,35% dari anggaran belanja sebesar Rp1.146.332.358.587,00. Realisasi tersebut lebih tinggi 4,22% dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.059.765.505.490,79. Realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.1.2.a Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja - Operasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Pegawai	671.113.470.504,00	660.312.992.167,00	98,39	611.642.239.921,00
2	Belanja Barang dan Jasa	409.741.881.763,00	379.281.519.837,12	92,57	366.587.257.014,79
3	Belanja Bunga	220.000.000,00	215.000.000,00	97,73	0,00
4	Belanja Hibah	62.351.073.001,00	61.888.921.596,00	99,26	64.547.861.642,00
5	Belanja Bantuan Sosial	2.905.933.319,00	2.758.326.941,00	94,92	16.988.146.913,00
Jumlah		1.146.332.358.587,00	1.104.456.760.541,12	96,35	1.059.765.505.490,79



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

7.5.1.2.a.1.	Belanja Pegawai	2024	2023
		Rp660.312.992.167,00	Rp611.642.239.921,00

Realisasi Belanja Pegawai pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp660.312.992.167,00 atau 98,39% dari anggaran belanja sebesar Rp671.113.470.504,00. Realisasi tersebut lebih tinggi 7,96% dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp611.642.239.921,00. Realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.1.2.a.1 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi - Pegawai

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	454.445.096.838,00	451.177.719.440,00	99,28	419.415.427.493,00
2	Tambahan Penghasilan PNS	50.986.676.287,00	49.490.774.591,00	97,07	45.403.816.583,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	145.881.866.633,00	140.554.640.955,00	96,35	126.085.899.147,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	16.421.493.531,00	16.081.950.844,00	97,93	17.484.270.141,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.185.474.118,00	1.081.945.737,00	91,27	1.052.000.357,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	2.138.798.097,00	1.873.530.600,00	87,60	2.146.761.200,00
7	Belanja Pegawai BLUD	54.065.000,00	52.430.000,00	96,98	54.065.000,00
Jumlah		671.113.470.504,00	660.312.992.167,00	98,39	611.642.239.921,00

7.5.1.2.a.2	Belanja Barang dan Jasa	2024	2023
		Rp379.281.519.837,12	Rp366.587.257.014,79

Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp379.281.519.837,12 atau 92,57% dari anggaran belanja sebesar Rp409.741.881.763,00. Realisasi tersebut lebih tinggi 3,46% dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp366.587.257.014,79. Realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.1.2.a.2 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi - Barang dan Jasa

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Bahan Pakai Habis	88.453.781.539,00	83.362.664.174,00	94,24	73.307.817.494,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	8.548.000,00



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
3	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	8.068.121.614,00	7.434.520.032,00	92,15	0,00
4	Belanja Jasa Kantor	107.702.778.442,00	99.983.763.224,00	92,83	101.240.706.148,39
5	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	37.205.202.350,00	28.220.034.822,00	75,85	26.994.447.150,00
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.976.361.000,00	1.759.231.000,00	89,01	2.682.552.700,00
7	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.619.354.900,00	3.534.489.000,00	97,66	4.107.277.000,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	832.891.120,00	827.711.620,00	99,38	644.120.126,58
9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	390.818.000,00	382.081.000,00	97,76	476.651.150,00
10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0,00	0,00	0,00	356.382.300,00
11	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	7.332.144.536,00	6.656.103.356,00	90,78	4.657.430.149,00
12	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.039.353.611,00	992.967.674,00	95,54	1.007.648.885,00
13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	25.509.541,00	5.404.268,00	21,19	0,00
14	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
15	Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	46.943.300,00
16	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.227.729.600,00	2.946.485.855,00	91,29	3.440.308.789,00
17	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.176.928.339,00	3.904.376.102,00	93,47	3.219.598.280,24
18	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.377.365.000,00	2.367.754.000,00	99,60	387.127.496,00
19	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
20	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	49.106.985.416,00	46.893.041.557,00	95,49	49.469.788.024,63
21	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	155.400.000,00	115.696.380,00	74,45	468.685.789,00
22	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.372.694.000,00	7.341.404.760,00	99,58	7.332.571.100,00
23	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	44.400.000,00
24	Belanja Barang dan Jasa BOS	32.475.728.940,00	32.453.559.895,00	99,93	36.204.608.159,00
25	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	697.558.200,00	500.127.264,00	71,70	0,00
26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	53.490.175.615,00	49.585.103.854,12	92,70	50.487.144.973,95
Jumlah		409.741.881.763,00	379.281.519.837,12	92,57	366.587.257.014,79

Realisasi belanja barang dan jasa ini termasuk didalamnya belanja barang dan jasa yang bersumber dari Dana Kapitasi JKN pada FKTP yang dikelola oleh 23 Puskesmas dan satu RSUD Pratama di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebesar Rp20.671.104.710,00 dengan uraian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

Tabel 7.5.1.2.a.2.a Rincian Realisasi Barang dan Jasa Dana Kapitasi JKN

(dalam rupiah)

No	Nama Puskesmas / FKTP	Rincian Transfer	
		2024	2023
1	PKM Pangkajene	1.422.373.254,00	1.361.710.140,00
2	PKM Bonto Perak	990.119.367,00	907.345.563,00
3	PKM Minasata'ne	1.490.989.654,00	1.698.963.511,00
4	PKM Kalabbirang	701.532.296,00	740.020.913,00
5	PKM Balocci	807.966.101,00	891.748.300,00
6	PKM Bantimala	559.984.436,00	701.090.708,00
7	PKM Bungoro	1.389.921.666,00	1.397.176.891,00
8	PKM Bowong Cindea	817.978.198,00	755.211.185,00
9	PKM Labakkang	1.068.141.272,00	1.036.678.599,00
10	PKM Pundata Baji	773.266.068,00	750.790.464,00
11	PKM Taraweang	1.120.255.312,00	1.091.024.856,00
12	PKM Ma'rang	1.428.864.463,00	1.398.388.486,00
13	PKM Padang Lampe	438.600.590,00	477.046.357,00
14	PKM Segeri	764.837.575,00	745.548.827,00
15	PKM Baring	320.512.991,00	313.013.353,00
16	PKM Mandalle	672.164.318,00	717.684.879,00
17	PKM Lk. Tupabbiring	844.503.286,00	832.304.080,00
18	PKM Sarappo	1.008.669.439,00	1.029.529.666,00
19	PKM Sabutung	1.065.878.100,00	1.164.763.035,00
20	PKM Lk. Tangaya	1.027.890.924,00	1.052.505.649,00
21	PKM Sailus	632.998.812,00	591.720.673,00
22	PKM Lk. Kalmas	876.762.388,00	874.456.630,00
23	PKM Pammantauang	446.894.200,00	467.802.340,00
24	RSU PRATAMA	0,00	49.870.636,00
Jumlah		20.671.104.710,00	21.046.395.741,00

7.5.1.2.a.3. Belanja Bunga	2024	2023
	Rp215.000.000,00	Rp0,00

Realisasi Belanja Bunga pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp215.000.000,00 atau 97,73% dari anggaran belanja sebesar Rp220.000.000,00. Realisasi Belanja Bunga Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp215.000.000,00 merupakan pembayaran Bunga Kredit Modal Kerja atas Pinjaman pada PT. Bank Sulselbar berdasarkan Nomor SK Pemberian Kredit (SPKK) SR/1112/R/PK/XII/2023 sebesar Rp8.000.000.000,00 pada Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.1.2.a.3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi - Belanja Bunga

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	220.000.000,00	215.000.000,00	97,73	0,00
Jumlah		220.000.000,00	215.000.000,00	97,73	0,00



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

7.5.1.2.a.4. Belanja Hibah	2024	2023
	Rp61.888.921.596,00	Rp64.547.861.642,00

Realisasi Belanja Hibah pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp61.888.921.596,00 atau 99,26% dari anggaran belanja sebesar Rp62.351.073.001,00, realisasi tersebut lebih rendah 4,12% dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp64.547.861.642,00. Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.1.2.a.4 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi - Hibah

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	30.043.585.000,00	30.023.585.500,00	99,93	16.407.421.600,00
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	27.882.590.601,00	27.440.439.430,00	98,41	47.236.000.042,00
3	Belanja Hibah Dana BOS	3.509.200.000,00	3.509.200.000,00	100,00	0,00
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	915.697.400,00	915.696.666,00	100,00	904.440.000,00
Jumlah		62.351.073.001,00	61.888.921.596,00	99,26	64.547.861.642,00

7.5.1.2.a.5. Belanja Bantuan Sosial	2024	2023
	Rp2.758.326.941,00	Rp16.988.146.913,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.758.326.941,00 atau 94,92% dari anggaran belanja sebesar Rp2.905.933.319,00. Realisasi tersebut lebih rendah 83,76% dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp16.988.146.913,00. Realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 lebih rendah dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.1.2.a.5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi - Belanja Bantuan Sosial

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	2.775.933.319,00	2.728.326.941,00	98,29	13.965.131.533,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	130.000.000,00	30.000.000,00	23,08	2.146.036.200,00
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	876.979.180,00
Jumlah		2.905.933.319,00	2.758.326.941,00	94,92	16.988.146.913,00



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

7.5.1.2.b. Belanja Modal	2024	2023
	Rp234.323.375.005,37	Rp297.442.205.431,46

Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp234.323.375.005,37 atau 96,73% dari anggaran belanja sebesar Rp242.235.243.129,00, realisasi tersebut lebih rendah 21,22% dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp297.442.205.431,46. Realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 lebih rendah dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.1.2.b Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
(dalam rupiah)

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Tanah	927.888.300,00	465.430.000,00	50,16	4.390.301.200,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.574.173.999,00	54.607.117.769,37	94,85	55.003.140.097,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	102.420.248.244,00	99.027.835.883,00	96,69	110.546.633.594,54
4	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	71.557.435.386,00	70.691.907.253,00	98,79	118.039.776.751,92
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.825.647.800,00	8.829.456.200,00	100,04	9.404.188.287,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	929.849.400,00	701.627.900,00	75,46	58.165.501,00
Jumlah		242.235.243.129,00	234.323.375.005,37	96,73	297.442.205.431,46

7.5.1.2.b.1. Belanja Modal Tanah	2024	2023
	Rp465.430.000,00	Rp4.390.301.200,00

Realisasi Belanja Modal Tanah pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp465.430.000,00 atau 50,16% dari anggaran belanja sebesar Rp927.888.300,00. Realisasi tersebut lebih rendah 89,40% dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.390.301.200,00. Realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 lebih rendah dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

Tabel 7.5.1.2.b.1 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal - Tanah

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	129.376.000,00
3	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	902.888.300,00	440.430.000,00	48,78	4.260.925.200,00
5	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal Tanah untuk Makam	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah		927.888.300,00	465.430.000,00	50,16	4.390.301.200,00

7.5.1.2.b.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2024	2023
		Rp54.607.117.769,37	Rp55.003.140.097,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp54.607.117.769,37 atau 94,85% dari anggaran belanja sebesar Rp57.574.173.999,00. Realisasi tersebut lebih rendah 0,72% dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp55.003.140.097,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.1.2.b.2 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal - Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Besar Darat	1.458.950.000,00	1.458.000.000,00	99,93	2.163.490.000,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	4.623.414.274,00	4.589.786.875,00	99,27	1.694.284.500,00
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Kendaraan Bermotor	11.490.517.903,00	11.265.870.000,00	98,04	5.907.750.000,00
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	15.000.000,00	14.825.000,00	98,83	26.500.000,00
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	300.000.000,00	298.500.000,00	99,50	419.000.000,00



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	21.000.000,00	16.500.000,00	78,57	132.850.000,00
8	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	16.015.998,00	15.170.000,00	94,72	43.535.000,00
9	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	22.830.000,00
10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	21.050.000,00	20.900.000,00	99,29	9.615.726.047,00
11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	1.002.176.500,00	949.017.500,00	94,70	965.385.005,00
12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	7.085.670.816,00	6.785.751.960,00	95,77	9.436.453.615,00
13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	3.554.657.585,00	3.363.070.541,00	94,61	641.548.927,00
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	4.285.631.808,00	4.259.007.000,00	99,38	381.278.000,00
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	174.739.200,00	152.825.000,00	87,46	121.980.000,00
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00	452.725.000,00
17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	5.489.479.570,00	4.992.087.533,00	90,94	8.067.408.670,00
18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-unit Laboratorium	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	100.000.000,00	99.045.000,00	99,05	0,00
20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	0,00	0,00	0,00	422.356.000,00
21	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Komputer Unit	4.683.613.300,00	4.447.393.500,00	94,96	3.872.587.000,00
23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Komputer	2.906.054.400,00	2.819.128.500,00	97,01	1.429.360.500,00
24	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Belanja Modal Sumur	0,00	0,00	0,00	82.000.000,00



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
26	Belanja Modal Alat Deteksi	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Belanja Modal Alat Pelindung	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	20.470.000,00	16.250.000,00	79,38	0,00
29	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	0,00	0,00	0,00	20.500.000,00
30	Belanja Modal Peralatan Olahraga	116.150.000,00	116.100.000,00	99,96	0,00
31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	6.790.734.260,00	6.778.979.109,00	99,83	6.489.088.432,00
32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	295.359.000,00	295.359.000,00	100,00	0,00
33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.105.489.385,00	1.835.551.251,37	59,11	2.594.503.401,00
Jumlah		57.574.173.999,00	54.607.117.769,37	94,85	55.003.140.097,00

7.5.1.2.b.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2024	2023
		Rp 99.027.835.883,00	Rp110.546.633.594,54

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp99.027.835.883,00 atau 96,69% dari anggaran belanja sebesar Rp102.420.248.244,00. Realisasi tersebut lebih rendah 10,42% dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp110.546.633.594,54. Realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 lebih rendah dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.1.2.b.3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal - Gedung dan Bangunan
(dalam rupiah)

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	91.378.589.331,00	88.604.392.733,00	96,96	102.041.472.610,54
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	3.246.125.523,00	3.245.626.523,00	99,98	3.851.641.500,00
3	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	95.652.000,00	95.652.000,00	100,00	4.680.000,00
4	Belanja Modal Candi/Tanda batas	6.356.111.390,00	5.849.929.512,00	92,04	4.354.219.484,00
5	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.343.770.000,00	1.232.235.115,00	91,70	294.620.000,00
Jumlah		102.420.248.244,00	99.027.835.883,00	96,69	110.546.633.594,54



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

7.5.1.2.b.4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	2024	2023
		Rp70.691.907.253,00	Rp118.039.776.751,92

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp70.691.907.253,00 atau 98,79% dari anggaran belanja sebesar Rp71.557.435.386,00. Realisasi tersebut lebih rendah 40,11% dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 yang berjumlah Rp118.039.776.751,92. Realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 lebih rendah dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.1.2.b.4 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	48.153.890.628,00	47.585.631.543,00	98,82	81.308.541.589,92
2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	2.187.347.450,00	2.027.425.150,00	92,69	2.597.933.400,00
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	716.634.250,00	715.834.250,00	99,89	4.178.809.300,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	0,00	0,00	0,00	519.345.000,00
5	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.477.142.700,00	1.397.257.880,00	94,59	5.890.824.600,00
6	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	1.383.209.700,00	1.343.514.361,00	97,13	97.080.000,00
7	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	3.985.125.650,00	3.979.374.500,00	99,86	10.704.621.012,00
8	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	1.367.884.200,00	1.361.845.200,00	99,56	3.495.691.428,00
9	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	5.092.800.000,00	5.089.600.000,00	99,94	8.000.000,00
10	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	40.000.000,00	39.700.000,00	99,25	49.919.500,00
11	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	2.565.000.000,00	2.565.000.000,00	100,00	0,00
12	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
13	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	4.588.400.808,00	4.586.724.369,00	99,96	9.129.010.922,00
14	Belanja Modal Jaringan Telepon	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
Jumlah		71.557.435.386,00	70.691.907.253,00	98,79	118.039.776.751,92

7.5.1.2.b.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2024	2023
		Rp8.829.456.200,00	Rp9.404.188.287,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8.829.456.200,00 atau 100,04% dari anggaran belanja sebesar Rp8.825.647.800,00. Realisasi tersebut lebih rendah 6,11% dibandingkan dengan belanja realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.404.188.287,00. Realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 lebih rendah dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.1.2.b.5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya
(dalam rupiah)

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Bahan Perpustakaan Tercetak	262.500.000,00	262.000.000,00	99,81	0,00
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terekam dan Bentuk Mikro	7.500.000,00	7.350.000,00	98,00	0,00
3	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	43.120.000,00	42.950.000,00	99,61	82.745.000,00
4	Belanja Modal Tanda Penghargaan	582.750.000,00	582.400.000,00	99,94	45.000.000,00
5	Belanja Modal Tanaman	20.000.000,00	19.913.400,00	99,57	0,00
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	833.138.000,00
7	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Aset Tetap Lainnya BOS	7.833.094.800,00	7.838.192.600,00	100,07	8.437.405.287,00
8	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	76.683.000,00	76.650.200,00	99,96	0,00
9	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Tetap Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00
Jumlah		8.825.647.800,00	8.829.456.200,00	100,04	9.404.188.287,00



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

7.5.1.2.b.6.	Belanja Modal Aset Lainnya	2024	2023
		Rp701.627.900,00	Rp58.165.501,00

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Realisasi sebesar Rp701.627.900,00 dan dianggarkan sebesar Rp929.849.400,00. Realisasi tersebut lebih rendah 79,78% dibandingkan dengan belanja Tahun 2023 sebesar Rp58.165.501,00. Realisasi belanja tahun 2024 lebih rendah dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.1.2.b.6 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal - Aset Lainnya
(dalam rupiah)

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	923.349.400,00	695.927.900,00	75,37	29.970.000,00
2	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	6.500.000,00	5.700.000,00	87,69	28.195.501,00
Jumlah		929.849.400,00	701.627.900,00	75,46	58.165.501,00

7.5.1.2.c.	Belanja Tak Terduga	2024	2023
		Rp1.958.577.900,00	Rp3.970.415.183,00

Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Realisasi Belanja Tak Terduga pada tahun 2024 berjumlah Rp1.958.577.900,00. atau sebesar 99,88% dari anggaran belanja sebesar Rp1.961.000.800,00. Realisasi tersebut lebih rendah 50,67% dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.970.415.183,00. Realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 lebih rendah dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

Tabel 7.5.1.2.c Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Tak Terduga	1.961.000.800,00	1.958.577.900,00	99,88	3.970.415.183,00
Jumlah		1.961.000.800,00	1.958.577.900,00	99,88	3.970.415.183,00

Pada Tahun Anggaran 2024, Belanja Tak Terduga dimanfaatkan untuk:

- Angin Puting Beliung dan Kebakaran (Badan Penggulangan Bencana Daerah / BPBD) sebesar Rp979.567.000,00
- Penyaluran bantuan bencana alan banjirdan longsor di Kab. Enrekang, sidrap, wajo dan Luwu (Dinas Sosial) sebesar Rp54.900.000,00
- Pekan Imunisasi Nasional (Dinas Kesehatan) sebesar Rp200.000.000,00
- Perbaikan atap pasar sentral Segeri (Badan Penanggulangan Bencana Daerah / BPBD) sebesar Rp82.000.000,00
- Pelaksanaan posko darurat bencana (Badan Penanggulangan Bencana Daerah / BPBD) sebesar Rp36.500.000,00
- Pembangunan tanggul penahan tanah Panaikang (Badan Penggulangan Bencana Daerah / BPBD) sebesar Rp200.000.000,00
- Penyetoran atas silpa dana BOSP (Dinas Pendidikan) sebesar Rp37.596.000,00
- Pengembalian Dana Bantuan Keuangan Khusus (subsidi transportasi darat) Dinas Perhubungan sebesar Rp214.250.900,00
- Perbaikan atap bangunan UPT SD Negeri 32 Tumampua VI Dinas Pendidikan sebesar Rp128.900.000,00
- Untuk Indikasi kelebihan pembayaran DAK Fisik Tahap III TA 2024 Dinas KB sebesar Rp27.084.000,00

7.5.1.2.d	Belanja Transfer	2024	2023
		Rp149.919.813.767,00	Rp149.449.206.134,00

Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah ke Kabupaten dan Desa sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Realisasi Belanja Transfer pada tahun 2024 berjumlah Rp149.919.813.767,00 atau 98,96% dari anggaran belanja sebesar Rp151.490.222.376,00. Realisasi tersebut lebih tinggi 0,31% dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp149.449.206.134,00. Realisasi Belanja Transfer tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

Tabel 7.5.1.2.d Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	6.022.934.276,00	4.452.525.707,00	73,93	8.247.786.841,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	145.467.288.100,00	145.467.288.060,00	100,00	141.201.419.293,00
Jumlah		151.490.222.376,00	149.919.813.767,00	98,96	149.449.206.134,00

7.5.1.2.d.1	Belanja Bagi Hasil	2024	2023
		Rp4.452.525.707,00	Rp8.247.786.841,00

Belanja Bagi Hasil adalah pengeluaran uang dari Pemerintah ke Kabupaten/Desa sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Realisasi Belanja Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.452.525.707,00 atau 73,93% dari anggaran belanja sebesar Rp6.022.934.276,00. Realisasi tersebut lebih rendah 46,02% dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp8.247.786.841,00. Realisasi Belanja Bagi Hasil tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.1.2.d.1 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa	5.295.004.150,00	3.932.848.999,00	74,27	7.310.298.051,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa	727.930.126,00	519.676.708,00	71,39	937.488.790,00
Jumlah		6.022.934.276,00	4.452.525.707,00	73,93	8.247.786.841,00

7.5.1.2.d.1.a	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah	2024	2023
		Rp3.932.848.999,00	Rp7.310.298.051,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah adalah pengeluaran uang dari Pemerintah ke Kabupaten/Desa sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2024 sejumlah Rp3.932.848.999,00 atau 74,27% dari anggaran belanja sebesar Rp5.295.004.150,00. Realisasi tersebut lebih rendah 46,20% dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.310.298.051,00 dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

Tabel 7.5.1.2.d.1.a Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah
(dalam rupiah)

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa	5.295.004.150,00	3.932.848.999,00	74,27	7.310.298.051,00
Jumlah		5.295.004.150,00	3.932.848.999,00	74,27	7.310.298.051,00

7.5.1.2.d.1.b	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah	2024	2023
		Rp519.676.708,00	Rp937.488.790,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah adalah pengeluaran uang dari Pemerintah ke Kabupaten/Desa sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp519.676.708,00 atau 71,39% dari anggaran belanja sebesar Rp727.930.126,00. Realisasi tersebut lebih rendah 44,57% dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp937.488.790,00. Realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.1.2.d.1.b Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah
(dalam rupiah)

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa	727.930.126,00	519.676.708,00	71,39	937.488.790,00
Jumlah		727.930.126,00	519.676.708,00	71,39	937.488.790,00

7.5.1.2.d.2.a	Belanja Bantuan Keuangan	2024	2023
		Rp145.467.288.060,00	Rp141.201.419.293,00

Belanja Bantuan Keuangan terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp66.353.379.960,00 dan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota Kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp79.113.908.100,00 maka realisasi Belanja Bantuan Keuangan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp145.467.288.060,00 atau 100,00% dari anggaran belanja sebesar Rp145.467.288.100,00. Realisasi tersebut lebih tinggi 3,02% dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp141.201.419.293,00. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024
Catatan atas Laporan Keuangan

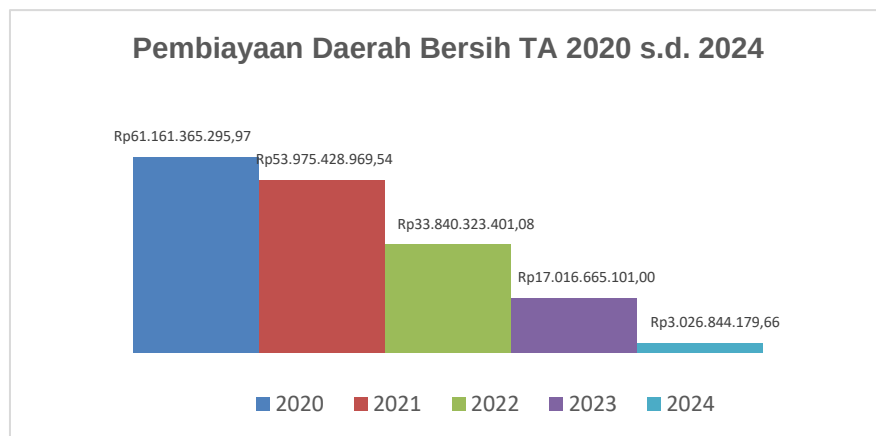
Tabel 7.5.1.2.d.2 Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan - ke Desa

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	145.467.288.100,00	145.467.288.060,00	100,00	141.201.419.293,00
Jumlah		145.467.288.100,00	145.467.288.060,00	100,00	141.201.419.293,00

7.5.1.3	Pembiayaan	2024	2023
		Rp3.026.844.179,66	Rp17.016.665.101,00

Realisasi Pembiayaan Daerah Bersih pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.026.844.179,66 atau mencapai 45,40% dari anggaran Pembiayaan Daerah Bersih Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.666.745.844. Realisasi Pembiayaan Daerah Bersih berasal dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp11.026.844.179,66 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp8.000.000.000,00. Realisasi Pembiayaan Daerah Bersih Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp13.989.820.921,34 atau lebih rendah 82,21% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp17.016.665.101,00. Perkembangan realisasi Pembiayaan Daerah Bersih sejak Tahun Anggaran 2019 s.d 2024 dapat dilihat pada Gambar 7.5.1.3 Pembiayaan Daerah Bersih.



Gambar 7.5.1.2 Pembiayaan Daerah Bersih Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2024



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

7.5.1.3.a.	Penerimaan Pembiayaan	2024	2023
		Rp11.026.844.179,66	Rp21.516.665.101,00

Pada Tahun Anggaran 2024, Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp14.666.745.844,00 dan terealisasi sebesar Rp11.026.844.179,66 atau 75,18%, dengan rincian sebagai berikut.

Realisasi Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya terealisasi sebesar Rp11.026.844.179,66 atau mengalami penurunan 18,42% dari SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp13.516.665.101,00.

Tabel 7.5.1.3.a Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan - Penerimaan
(dalam rupiah)

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	14.666.745.844,00	11.026.844.179,66	75,18	13.516.665.101,00
2	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	8.000.000.000,00
3	Penerimaan kembali piutang dari Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		14.666.745.844,00	11.026.844.179,66	75,18	21.516.665.101,00

Penggunaan SiLPA tahun berkenan sebesar Rp11.026.844.179,66 merupakan SiLPA tahun sebelumnya.

7.5.1.3.b.	Pengeluaran Pembiayaan	2024	2023
		Rp8.000.000.000,00	Rp4.500.000.000,00

Pada Tahun Anggaran 2024, Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp8.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp8.000.000.000,00 atau 100%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.1.3.b Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan - Pengeluaran
(dalam rupiah)

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Penyertaan Modal pada BUMD	0,00	0,00	0,00	4.500.000.000,00
2	Pembayaran Pokok Utang	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah		8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	100,00	4.500.000.000,00



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan merupakan pembayaran pokok pinjaman Kredit Modal Kerja pada Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah dari pinjaman modal kerja pada Bank Sulselbar Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan Nomor SK Pemberian Kredit (SPKK) SR/1112/R/PK/XII/2023.

7.5.1.4	SiLPA	2024	2023
		Rp57.448.547.850,91	Rp11.026.844.179,66

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) sebesar Rp57.448.547.850,91 merupakan penjumlahan dari surplus/defisit dengan pembiayaan netto pada Laporan Realisasi Anggaran. Berdasarkan Neraca, komponen SiLPA di sajikan sebesar Rp57.448.547.850,91 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.1.4 Rincian SiLPA

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2024	2023
1	Kas		
a	Saldo Akhir Kas di BUD	51.192.990.140,33	8.342.507.349,12
b	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	37.794.200,00	576.290.600,00
c	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	600.100,19	6.900.001,00
d	Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
e	Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD	5.182.497.148,03	514.530.737,97
f	Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	0,00	14.299.000,00
g	Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi Pada FKTP	19.962.911,00	67.189.850,00
h	Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	791.946,36	1.505.126.641,57
i	Saldo Akhir Kas Dana BOSP	42.884.196,00	0,00
j	Saldo Akhir Kas Dana BOK Puskesmas	971.027.209,00	0,00
Jumlah Kas (a s.d f)		57.448.547.850,91	11.026.844.179,66



7.5.2 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp57.448.547.850,91 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.2 Rincian Saldo Anggaran Lebih

(dalam rupiah)

Uraian	2024	2023
Saldo Anggaran Lebih Awal	11.026.844.179,66	13.516.665.101,00
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	11.026.844.179,66	13.516.665.101,00
Subtotal (1 - 2)	-	-
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	57.448.547.850,91	11.026.844.179,66
Subtotal (3 + 4)	57.448.547.850,91	11.026.844.179,66
Koreksi/Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-	-
Lain-Lain	-	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	57.448.547.850,91	11.026.844.179,66

Penjelasan lebih lanjut atas Perubahan SAL Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

- Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp11.026.844.179,66 menjadi saldo awal 2024;
- Penerimaan Pembiayaan-Penggunaan SiLPA Tahun 2024 yang tercatat pada LRA sebesar Rp11.026.844.179,66 sementara penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp13.516.665.101,00;
- Selisih Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dengan Penggunaannya sebesar Rp0,00 dengan rincian (Rp11.026.844.179,66 – Rp11.026.844.179,66); dan
- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) sebesar Rp57.448.547.850,91 merupakan penjumlahan surplus/defisit dengan pembiayaan netto pada Laporan Realisasi Anggaran.



7.5.3 PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Penjelasan Pos-Pos Neraca ini menguraikan secara singkat mengenai posisi Saldo Rekening Neraca yang disajikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini. Posisi Keuangan per 31 Desember 2024 dan tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan diuraikan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 7.5.3 Rincian Komposisi Aset

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	
				Nilai	%
1	Aset	2.040.431.119.143,96	2.019.657.063.179,07	20.774.055.964,89	1,03
2	Kewajiban	57.557.292.119,22	61.021.104.551,19	-3.463.812.431,97	(5,68)
3	Ekuitas	1.982.873.827.024,74	1.958.635.958.627,88	24.237.868.396,86	1,24

Dengan rincian komposisi aset sebagai berikut:

7.5.3.1	Aset	2024	2023
		Rp2.040.431.119.143,96	Rp2.019.657.063.179,07

Aset pada Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.040.431.119.143,96 terdiri dari:

Tabel 7.5.3.1 Rincian Komposisi Aset

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	
				Nilai	%
1	Aset Lancar	125.433.519.261,11	72.470.134.354,09	52.963.384.907,02	73,08
2	Investasi Jangka Panjang	39.528.791.312,05	41.853.015.898,97	-2.324.224.586,92	(5,55)
3	Aset Tetap	1.861.549.996.727,17	1.891.767.588.278,29	-30.217.591.551,12	(1,60)
4	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aset Lainnya	13.918.811.843,63	13.566.324.647,72	352.487.195,91	2,60
Jumlah		2.040.431.119.143,96	2.019.657.063.179,07	20.774.055.964,89	1,03

7.5.3.1.a	Aset Lancar	2024	2023
		Rp125.433.519.261,11	Rp72.470.134.354,09

Aset lancar terdiri dari Kas dan Setara Kas dan Aset Selain Kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Nilai Aset Lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan per 31 Desember 2024 sebesar Rp125.433.519.261,11 dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024
Catatan atas Laporan Keuangan

Tabel 7.5.3.1.a Rincian Komposisi Aset Lancar

(dalam rupiah)					
No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	
				Nilai	%
1	Kas di Kas Daerah	51.192.990.140,33	8.342.507.349,12	42.850.482.791,21	513,64
2	Kas di Bendahara Penerimaan	37.794.200,00	576.290.600,00	(538.496.400,00)	(93,44)
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	600.100,19	6.900.001,00	(6.299.900,81)	(91,30)
4	Kas di BLUD	5.182.497.148,03	514.530.737,97	4.667.966.410,06	907,23
5	Kas lainnya di Bendahara FKTP	-	-	-	-
6	Kas di Bendahara Dana BOS	-	14.299.000,00	(14.299.000,00)	(100,00)
7	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	19.962.911,00	67.189.850,00	(47.226.939,00)	(70,29)
8	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	791.946,36	1.505.126.641,57	(1.504.334.695,21)	(99,95)
9	Kas Dana BOSP	42.884.196,00	-	42.884.196,00	-
10	Kas Dana BOK Puskesmas	971.027.209,00	-	-	-
11	Jumlah Kas Setara Kas (11 = 1 s/d 10)	57.448.547.850,91	11.026.844.179,66	45.450.676.462,25	412,18
12	Piutang Pajak	87.154.824.781,68	86.387.139.424,84	767.685.356,84	0,89
13	Penyisihan Piutang Pajak	(74.328.600.870,53)	(73.182.530.512,64)	(1.146.070.357,89)	1,57
14	Piutang Pajak Bersih (14 = 12 + 13)	12.826.223.911,15	13.204.608.912,20	(378.385.001,05)	(2,87)
15	Piutang Retribusi	4.924.221.232,86	4.735.902.043,86	188.319.189,00	3,98
16	Penyisihan Piutang Retribusi	(1.798.228.629,67)	(1.587.724.743,91)	(210.503.885,76)	13,26
17	Piutang Retribusi Bersih (17 = 15 + 16)	3.125.992.603,19	3.148.177.299,95	(22.184.696,76)	(0,70)
18	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah - Penyertaan Modal	563.744.044,00	563.744.044,00	-	-
19	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah - Penyertaan Modal	(502.734.408,00)	(412.385.906,70)	(90.348.501,30)	21,91
20	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah - Penyertaan Modal Bersih (20 = 22 + 23)	61.009.636,00	151.358.137,30	(90.348.501,30)	(59,69)
21	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	9.637.390.612,00	9.633.100.649,00	4.289.963,00	0,04
22	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	(537.357.953,06)	(409.616.503,25)	(127.741.449,81)	31,19
23	Piutang Lain-lain PAD yang Sah (23 = 21 + 22)	9.100.032.658,94	9.223.484.145,75	(123.451.486,81)	(1,34)
24	Piutang Dana Bagi Hasil Pajak	24.153.388.975,00	22.003.807.282,00	2.149.581.693,00	9,77
25	Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil Pajak	(120.766.944,88)	(110.019.036,41)	(10.747.908,47)	9,77
26	Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Bersih (26 = 24 + 25)	24.032.622.030,12	21.893.788.245,59	2.138.833.784,53	9,77
27	Piutang Lainnya	1.017.921.103,70	1.019.921.103,70	(2.000.000,00)	(0,20)
28	Penyisihan Piutang Lainnya	(1.017.921.103,70)	(1.019.921.103,70)	2.000.000,00	(0,20)
29	Piutang Lainnya Bersih (29 = 27 - 28)	-	-	-	-
30	Beban di Bayar dimuka	408.290.618,65	80.846.584,03	327.444.034,62	405,02
31	Persediaan	18.430.799.952,15	13.741.026.849,61	4.689.773.102,54	34,13
	Jumlah	125.433.519.261,11	72.470.134.354,09	51.992.357.698,02	71,74

7.5.3.1.a.1	Kas dan Setara Kas	2024	2023
		Rp57.448.547.850,91	Rp11.026.844.179,66

Kas dan Setara Kas pada Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan per 31 Desember 2024 sebesar Rp57.448.547.850,91 terdiri dari:



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

7.5.3.1.a.1	Kas di Kas Daerah	2024	2023
		Rp51.192.990.140,33	Rp8.342.507.349,12

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp51.192.990.140,33 merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang terdiri dari saldo rekening Kas Daerah pada Bank Sulselbar Cabang Pangkep, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.3.1.a.1 Rincian Kas di Kas Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	
				Nilai	%
1	Kas di Kas Daerah	51.192.990.140,33	8.342.507.349,12	42.850.482.791,21	513,64
	Jumlah	51.192.990.140,33	8.342.507.349,12	42.850.482.791,21	513,64

Untuk rincian Kas di Kas Daerah (RK BUD) sebesar Rp51.192.990.140,33 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.3.1.a.1.a Rincian Kas di Bendahara Umum Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	No Rekening	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	
					Nilai	%
1	Bank SulSelBar Cabang Pangkep	011.001.3832.1	51.192.990.140,33	8.342.507.349,12	42.850.482.791,21	513,64
2	BRI Cabang Pangkep	223-01-000385-30-3	0,00	0,00		
3	BNI Cabang Pangkep	831.99144	0,00	0,00		
4	Bank Mandiri Cabang Semen Tonasa	152-00-8802222-9	0,00	0,00		
5	Bank Mandiri Cabang Pangkep	152-00-2015555-8	0,00	0,00		
6	Bank Bukopin Cabang Pangkep	1004398081	0,00	0,00		
	Jumlah		51.192.990.140,33	8.342.507.349,12	42.850.482.791,21	513,64

Rincian dapat dilihat pada lampiran 1a

7.5.3.1.b	Kas di Bendahara Pengeluaran	2024	2023
		Rp600.100,19	Rp6.900.001,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp600.100,19 merupakan Kas di Bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan merupakan sisa Tambahan Uang (TU) sampai dengan 31 Desember 2024 yang belum disetor ke Kas Daerah sebesar Rp600.100,00 dan Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kesehatan (RSUD Batiling) Sebesar Rp0,19 yang merupakan sisa Uang Persediaan



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

Tahun Anggaran 2023 yang belum disetorkan pada Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.3.1.b Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	
				Nilai	%
1	Dinas Pendidikan	600.100,00	0,00	-600.100,00	0,00
2	Dinas kesehatan	0,19	6.900.001,00	-6.900.000,82	(100,00)
	Jumlah	600.100,19	6.900.001,00	-6.299.900,82	-91,30

7.5.3.1.c	Kas di Bendahara Penerimaan	2024	2023
		Rp37.794.200,00	Rp576.290.600,00

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp37.794.200,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.3.1.c Rincian Kas di Bendahara Penerima

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	
				Nilai	%
1	Kota Pangkajene	-	15.207.100,00	- 15.207.100,00	-100
2	Bonto Perak	-	-	-	0,00
3	Minasatene	-	61.192.600,00	- 61.192.600,00	-100
4	Kalabbirang	-	170.316.000,00	- 170.316.000,00	-100
5	Bowong Cindea	-	50.414.200,00	- 50.414.200,00	-100
6	Taraweang	-	29.800.400,00	- 29.800.400,00	-100
7	Marang	-	47.617.200,00	- 47.617.200,00	-100
8	Pundata Baji	-	66.922.600,00	- 66.922.600,00	-100
9	Baring	-	6.394.700,00	- 6.394.700,00	-100
10	Mandalle	-	47.505.300,00	- 47.505.300,00	-100
11	Balocci	35.397.100,00	31.317.100,00	4.080.000,00	13,03
12	Bantimala	-	9.537.100,00	- 9.537.100,00	-100
13	Lk. Tupabbiring	-	957.100,00	- 957.100,00	-100
14	Sarappo	-	14.498.100,00	- 14.498.100,00	-100
15	Sailus	2.397.100,00	3.397.100,00	- 1.000.000,00	-29,44
16	Segeri	-	21.214.000,00	- 21.214.000,00	-100
	JUMLAH	37.794.200,00	576.290.600,00	(538.496.400,00)	-93,44

Rincian dapat dilihat pada lampiran 1b

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan Kas di Bendahara FKTP Non Kapitasi yang bersumber dari Penerimaan klaim dari BPJS yang belum tersetor hingga tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp37.794.200,00 dengan rincian Puskesmas Balocci Rp35.397.100,00 dan Puskesmas Sailus Rp2.397.100,00



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

7.5.3.1.d	Kas di Bendahara BLUD	2024	2023
		Rp5.182.497.148,03	Rp514.530.737,97

Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun keenam diterapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang (RSUD) Pangkep. Saldo per 31 Desember 2024 BLUD RSUD Batara Siang Pangkep disajikan sebesar Rp5.182.497.148,03.

Berikut perhitungan Kas di Bendahara BLUD pada Tahun Anggaran 2024 dan 2023, sebagai berikut:

Tabel 7.5.3.1.d Pendapatan dan Belanja BLUD

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	
				Nilai	%
1	Saldo Awal	514.530.737,97	267.917.187,31	246.613.550,66	92,05
2	Pendapatan BLUD	57.378.986.630,55	53.711.042.426,61	3.667.944.203,94	6,83
3	Belanja BLUD	52.711.020.220,49	53.464.428.875,95	-753.408.655,46	-1,41
	Jumlah	5.182.497.148,03	514.530.737,97	4.667.966.410,06	907,23

7.5.3.1.e	Kas di Bendahara FKTP	2024	2023
		Rp19.962.911,00	Rp67.189.850,00

Rincian Kas di Bendahara FKTP Kapitasi sebesar Rp19.962.911,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.3.1.e Rincian Kas di Bendahara FKTP Kapitasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	
				Nilai	%
1	PKM Pangkajene	81.552,00	56.501,00	25.051,00	44,34
2	PKM Bonto Perak	18.605.208,00	11.291.838,00	7.313.370,00	64,77
3	PKM Minasate'ne	669,00	0,00	669,00	0,00
4	PKM Kalabbirang	6.760,00	3.239.180,00	-3.232.420,00	-99,79
5	PKM Balocci	991,00	6.320.161,00	-6.319.170,00	-99,98
6	PKM Bantimala	40,00	51.516,00	-51.476,00	-99,92
7	PKM Bungoro	207,00	4.230,00	-4.023,00	-95,11
8	PKM Bowong Cindea	17.229,00	43.073,00	-25.844,00	-60,00
9	PKM Labakkang	0,00	3.329.917,00	-3.329.917,00	-100,00
10	PKM Pundata Baji	50.820,00	3.866.539,00	-3.815.719,00	-98,69
11	PKM Taraweang	44,00	0,00	44,00	0,00
12	PKM Ma'rang	0,00	4.771.459,00	-4.771.459,00	-100,00
13	PKM Padang Lampe	10.397,00	49.602,00	-39.205,00	-79,04



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	
				Nilai	%
14	PKM Segeri	0,00	0,00	0,00	0,00
15	PKM Baring	22.022,00	202.993,00	-180.971,00	-89,15
16	PKM Mandalle	70.333,00	447,00	69.886,00	15634,45
17	PKM Lk. Tupabbiring	664,00	13.146.920,00	-13.146.256,00	-99,99
18	PKM Sarappo	19.561,00	15.947.224,00	-15.927.663,00	-99,88
19	PKM Sabutung	100,00	11.065,00	-10.965,00	-99,10
20	PKM Lk. Tangaya	20.776,00	3.721.801,00	-3.701.025,00	-99,44
21	PKM Sailus	64.589,00	2.817,00	61.772,00	2192,83
22	PKM Lk. Kalmas	158.502,00	23.390,00	135.112,00	577,65
23	PKM Pammantauang	0,00	276.730,00	-276.730,00	-100,00
24	RSU Pratama	832.447,00	832.447,00	0,00	0,00
	Jumlah	19.962.911,00	67.189.850,00	-47.226.939,00	-70,29

Rincian terinci dapat dilihat pada *Lampiran 1c*.

7.5.3.1.f	Kas di Bendahara BOS	2024	2023
		Rp0,00	Rp14.299.000,00

Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2024 sudah tidak ada lagi di Kas BOS sementara di tahun 2023 Kas Satuan Pendidikan masih berada di Kas BOS sementara untuk Tahun Anggaran 2024 sudah disesuaikan dengan Kas di BOSP berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.3.1.f Rincian Kas di Bendahara BOS

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	
				Nilai	%
1	BOS SD	0,00	14.299.000,00	-14.299.000,00	(100,00)
2	BOS SMP	0,00	0,00	0,00	0,00
3	BOP PAUD	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.299.000,00	-14.299.000,00	0,00

7.5.3.1.g	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	2024	2023
		Rp791.946,36	Rp1.505.126.641,57

Saldo Kas Lainnya sebesar Rp791.946,36 merupakan Bunga Bank yang bersumber dari Dana FKTP di masing-masing Puskesmas yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2024;



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

Tabel 7.5.3.1.g Rincian Kas Lainnya Di Bendahara FKTP Bunga JKN

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	
				Nilai	%
1	Kota Pangkajene	0,42	26.488,00	-26.487,58	-100,00
2	Bonto Perak	6.488,29	10.205,53	-3.717,24	-36,42
3	Minasate'ne	65.849,00	173.701,00	-107.852,00	-62,09
4	Kalabbirang	23.428,00	90.995,00	-67.567,00	-74,25
5	Bungoro	39.437,92	52.892,00	-13.454,08	-25,44
6	Bowong Cindea	174.106,00	97.660,00	76.446,00	78,28
7	Labakkang	25.291,00	110.832,00	-85.541,00	-77,18
8	Pundata Baji	2.332,71	13.661,00	-11.328,29	-82,92
9	Taraweang	68.985,00	99.618,00	-30.633,00	-30,75
10	Ma'rang	120.951,00	327.377,00	-206.426,00	-63,05
11	Padang Lampe	0,00	17.519,50	-17.519,50	-100,00
12	Segeri	15.246,00	153.024,00	-137.778,00	-90,04
13	Baring	0,00	4.162,54	-4.162,54	-100,00
14	Mandalle	38.926,00	116.429,00	-77.503,00	-66,57
15	Balocci	16.529,00	31.629,00	-15.100,00	-47,74
16	Bantimala	23.036,00	60.975,00	-37.939,00	-62,22
17	Lk.Tupabbiring	18.595,00	94.799,00	-76.204,00	-80,38
18	Sabutung	4.806,59	1.404,00	3.402,59	242,35
19	Sarappo	33.968,00	162.229,00	-128.261,00	-79,06
20	Lk. Kalmas	96.853,00	119.585,00	-22.732,00	-19,01
21	Pamantauang	12.109,31	15.003,00	-2.893,69	-19,29
22	Lk. Tangaya	5.008,12	6.254,00	-1.245,88	-19,92
23	Sailus	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	791.946,36	1.786.442,57	-994.496,21	-55,67

Tabel 7.5.3.1.g.1 Rincian Kas Lainnya BOK

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	
				Nilai	%
1	PKM Pangkajene	0,00	141.793.782,00	-141.793.782,00	-100,00
2	PKM Bonto Perak	0,00	103.351.769,00	-103.351.769,00	-100,00
3	PKM Minasa Tene	0,00	20.088.562,00	-20.088.562,00	-100,00
4	PKM Kalabbirang	0,00	69.116.555,00	-69.116.555,00	-100,00
5	PKM Bungoro	0,00	1.823.010,00	-1.823.010,00	-100,00
6	PKM Bowong Cindea	0,00	36.236.654,00	-36.236.654,00	-100,00
7	PKM Labakkang	0,00	75.686.872,00	-75.686.872,00	-100,00
8	PKM Taraweang	0,00	108.382.990,00	-108.382.990,00	-100,00
9	PKM Pundata Baji	0,00	39.996.457,00	-39.996.457,00	-100,00



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	
				Nilai	%
10	PKM Marang	0,00	194.498.193,00	-194.498.193,00	-100,00
11	PKM Padang Lampe	0,00	81.493.476,00	-81.493.476,00	-100,00
12	PKM Segeri	0,00	91.538.934,00	-91.538.934,00	-100,00
13	PKM Baring	0,00	19.012.474,00	-19.012.474,00	-100,00
14	PKM Mandalle	0,00	70.291.992,00	-70.291.992,00	-100,00
15	PKM Balocci	0,00	36.793.000,00	-36.793.000,00	-100,00
16	PKM Bantimala	0,00	16.911.849,00	-16.911.849,00	-100,00
17	PKM LK. Tupabiring	0,00	25.874.606,00	-25.874.606,00	-100,00
18	PKM Sarappo	0,00	100.301.992,00	-100.301.992,00	-100,00
19	PKM Sabutung	0,00	8.384.064,00	-8.384.064,00	-100,00
20	PKM LK. Kalmas	0,00	18.976.014,00	-18.976.014,00	-100,00
21	PKM Pamantauang	0,00	54.901.040,00	-54.901.040,00	-100,00
22	PKM LK. Tupabiring Tanggaya	0,00	59.111.059,00	-59.111.059,00	-100,00
23	PKM Sailus	0,00	120.699.923,00	-120.699.923,00	-100,00
	Jumlah	0,00	1.495.265.267,00	-1.495.265.267,00	-100,00

Tabel 7.5.3.1.g.2 Rincian Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Pembantu

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	
				Nilai	%
1	Kec. Segeri	0,00	4.819.660,00	-4.819.660,00	-100
2	Kec. Marang	0,00	700.000,00	-700.000,00	-100
3	Kel. Pabundukang	0,00	100.000,00	-100.000,00	-100
4	Kel. Sibatua	0,00	100.000,00	-100.000,00	-100
5	Kel. Bonto Perak	0,00	37.685,00	-37.685,00	-100
6	Kel. Tekolabbua	0,00	100.000,00	-100.000,00	-100
7	Kel. Minasate'ne	0,00	100.000,00	-100.000,00	-100
8	Kel. Bontoa	0,00	100.000,00	-100.000,00	-100
9	Kel. Biraeng	0,00	99.928,00	-99.928,00	-100
10	Kel. Bonto Kio	0,00	100.000,00	-100.000,00	-100
11	Kel. Samalewa	0,00	195.460,00	-195.460,00	-100
12	Kel. Balocci Baru	0,00	134.745,00	-134.745,00	-100
13	Kel. Labakkang	0,00	100.000,00	-100.000,00	-100
14	Kel. Bontomatene	0,00	142.285,00	-142.285,00	-100
15	Kel. Bone	0,00	100.000,00	-100.000,00	-100
16	Kel. Bawasalo	0,00	99.999,00	-99.999,00	-100
17	Kel. Sapuka	0,00	145.170,00	-145.170,00	-100
18	Kel. Tumampua	0,00	100.000,00	-100.000,00	-100
19	Kel. Mappasaile	0,00	100.000,00	-100.000,00	-100
	Jumlah	0,00	7.374.932,00	-7.374.932,00	-100



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

Tabel 7.5.3.1.g.3 Rincian Kas Lainnya di Bendahara FKTP

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	
				Nilai	%
1	PKM Pundata Baji	0,00	700.000,00	-700.000,00	-100
	Jumlah	0,00	700.000,00	-700.000,00	-100,00

7.5.3.1.h	Kas Dana BOSP	2024	2023
		Rp42.884.196,00	Rp0,00

Saldo Kas di Bendahara BOSP per 31 Desember 2024 sebesar Rp42.884.196,00 merupakan saldo dana BOSP pada rekening masing-masing Satuan Pendidikan Sekolah, tidak mengalami perbandingan kenaikan/penurunan dikarenakan pada Tahun Anggaran 2023 Kas Dana BOS menjadi Kas Dana BOSP sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.3.1.h Rincian Kas di Bendahara BOSP

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	
				Nilai	%
1	BOS SD	29.777.899,00	0,00	29.777.899,00	-
2	BOS SMP	13.081.297,00	0,00	13.081.297,00	-
3	BOP PAUD	25.000,00	0,00	25.000,00	-
		42.884.196,00	0,00	42.884.196,00	-

Rincian terinci dapat dilihat pada *Lampiran 1d. dan 1e.*

7.5.3.1.i	Kas Dana BOK Puskesmas	2024	2023
		Rp971.027.209,00	Rp0,00

Saldo Kas Dana BOK per 31 Desember 2024 sebesar Rp971.027.209,00 merupakan saldo dana BOK pada rekening masing-masing Puskesmas. Pada Tahun Anggaran 2023 Kas BOK di masing-masing puskesmas masih diakui pada Kas Lainnya sementara pada Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2001/2024 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan, dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

Tabel 7.5.3.1.i Rincian Kas Dana BOK Puskesmas

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	
				Nilai	%
1	PKM Pangkajene	77.240.000,00	0,00	77.240.000,00	-
2	PKM Bonto Perak	89.850.177,00	0,00	89.850.177,00	-
3	PKM Minasa Tene	26.501.203,00	0,00	26.501.203,00	-
4	PKM Kalabbirang	29.577.610,00	0,00	29.577.610,00	-
5	PKM Bungoro	79.530.212,00	0,00	79.530.212,00	-
6	PKM Bowong Cindea	56.494.017,00	0,00	56.494.017,00	-
7	PKM Labakkang	29.750.930,00	0,00	29.750.930,00	-
8	PKM Taraweang	31.842.149,00	0,00	31.842.149,00	-
9	PKM Pundata Baji	4.059.500,00	0,00	4.059.500,00	-
10	PKM Marang	37.875.100,00	0,00	37.875.100,00	-
11	PKM Padang Lampe	105.500.735,00	0,00	105.500.735,00	-
12	PKM Segeri	50.371.857,00	0,00	50.371.857,00	-
13	PKM Baring	27.163.746,00	0,00	27.163.746,00	-
14	PKM Mandalle	30.049.801,00	0,00	30.049.801,00	-
15	PKM Balocci	41.028.000,00	0,00	41.028.000,00	-
16	PKM Bantimala	19.799.665,00	0,00	19.799.665,00	-
17	PKM LK. Tupabiring	1.267.000,00	0,00	1.267.000,00	-
18	PKM Sarappo	86.507.443,00	0,00	86.507.443,00	-
19	PKM Sabutung	34.661.155,00	0,00	34.661.155,00	-
20	PKM LK. Kalmas	19.233.482,00	0,00	19.233.482,00	-
21	PKM Pamantauang	19.045.568,00	0,00	19.045.568,00	-
22	PKM LK. Tanggaya	29.873.522,00	0,00	29.873.522,00	-
23	PKM Sailus	43.804.337,00	0,00	43.804.337,00	-
		971.027.209,00	0,00	971.027.209,00	0,00

Rincian dapat dilihat pada lampiran 1f.1 dan 1. F.2

7.5.3.1.j	Piutang	2024	2023
		Rp127.451.490.749,24	Rp124.343.614.547,40

Jumlah Piutang per 31 Desember 2024 disajikan sebesar Rp127.451.490.749,24 yang terdiri dari:

7.5.3.1.k	Piutang Pajak Daerah	2024	2023
		Rp87.154.824.781,68	Rp86.387.139.424,84

Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 disajikan sebesar Rp87.154.824.781,68 dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024
Catatan atas Laporan Keuangan

Tabel 7.5.3.1.k Rincian Piutang Pajak Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	
				Nilai	%
1	Piutang Pajak Hotel	6.200.500,00	7.864.091,00	-1.663.591,00	-21,15
2	Piutang Pajak Restoran	308.271.028,60	267.776.129,60	40.494.899,00	15,12
3	Piutang Pajak Hiburan	24.135.500,00	20.432.500,00	3.703.000,00	18,12
4	Piutang Pajak Reklame	240.380.200,00	251.964.950,00	-11.584.750,00	-4,60
5	Piutang Pajak PPj PLN	548.864.922,32	548.834.122,32	30.800,00	0,01
6	Piutang Pajak Parkir	110.439.400,00	55.800.000,00	54.639.400,00	97,92
7	Piutang Pajak Air Bawah Tanah	286.000,00	286.000,00	0,00	0,00
8	Piutang Pajak Minerba	60.724.825.470,00	63.571.903.600,00	-2.847.078.130,00	-4,48
9	Piutang Pajak Tanah Liat	125.000,00	50.000,00	75.000,00	150,00
10	Piutang Pajak Kapur	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
11	Piutang Pajak Pasir Silika	78.430.100,00	95.528.750,00	-17.098.650,00	-17,90
12	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	500.343.000,00	500.343.000,00	0,00	0,00
13	Piutang Pajak PBB P2 dan Aset Lainnya	24.612.448.660,76	21.066.356.281,92	3.546.092.378,84	16,83
	Jumlah	87.154.824.781,68	86.387.139.424,84	767.685.356,84	0,89

Rincian terinci dapat dilihat pada *Lampiran 2a s/d Lampiran 2m*

7.5.3.1.l	Piutang Retribusi Daerah	2024	2023
		Rp4.924.221.232,86	Rp4.735.902.043,86

Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp4.924.221.232,86 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.3.1.l Rincian Piutang Retribusi

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	Kenaikan/penurunan (%)		2023
1	Retribusi Dispensasi Pengguna Jalan Daerah	355.066.300,00	0,00	0,00	355.066.300,00
2	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	807.164.636,00	160.318.360,00	24,78	646.846.276,00
3	Piutang Pengendalian Menara Telekomunikasi	4.796.337,86	0,00	-	4.796.337,86
4	Piutang Retribusi pemanfaatan Ruang untuk Telekomunikasi	0,00	-3.051.000,00	0,00	3.051.000,00
5	Piutang Puja.sera (Gasebo)	52.700.000,00	3.016.000,00	6,07	49.684.000,00
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	-3.458.517.500,00	(100,00)	3.458.517.500,00
7	Piutang Tunggakan Sewa Alat Berat	64.650.000,00	-14.300.000,00	(18,11)	78.950.000,00
8	Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	3.500.853.329,00	3.500.853.329,00	0,00	0,00
9	Piutang Retribusi IMB	138.990.630,00	0,00	0,00	138.990.630,00
	Jumlah	4.924.221.232,86	188.319.189,00	3,98	4.735.902.043,86

Rincian terinci dapat dilihat pada *Lampiran 3a s/d Lampiran 3u*



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

7.5.3.1.m	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah	2024	2023
		Rp563.744.044,00	Rp563.744.044,00

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah – Penyertaan Modal per 31 Desember 2024 sebesar Rp563.744.044,00 merupakan piutang yang bersumber dari BPR Citra Mas, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.3.1.m Rincian Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah
(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	
				Nilai	%
1	BPR Citra Mas	563.744.044,00	563.744.044,00	0,00	0
	Jumlah	563.744.044,00	563.744.044,00	0,00	0,00

Rincian terinci dapat dilihat pada lampiran 4

7.5.3.1.n	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2024	2023
		Rp9.637.390.612,00	Rp9.633.100.649,00

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.637.390.612,00 merupakan dana BLUD. Sejak tahun 2018 di klasifikasikan pada Piutang lain-lain PAD yang sah.

Tabel 7.5.3.1.n Rincian Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	
				Nilai	%
1	Piutang Sewa aset Pemda	444.000.000,00	444.000.000,00	0,00	0,00
2	Piutang Pendapatan BLUD	9.141.590.612,00	9.137.300.649,00	4.289.963,00	0,05
3	Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	51.800.000,00	51.800.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	9.637.390.612,00	9.633.100.649,00	4.289.963,00	0,04

Rincian terinci dapat dilihat pada lampiran 5a s/d Lampiran 5b

7.5.3.1.o	Piutang Transfer Antar Daerah	2024	2023
		Rp24.153.388.975,00	Rp22.003.807.282,00

Piutang Transfer Antar Daerah adalah Piutang yang merupakan hak Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada Tahun Anggaran 2024 yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp24.153.388.975,00 dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

Tabel 7.5.3.1.o Rincian Piutang Dana Bagi Hasil Pajak

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	
				Nilai	%
1	Pajak Rokok Triwulan IV 2023		3.291.835.163,00	-3.291.835.163,00	-100,00
2	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan PDAM Bulan Oktober 2023		4.054.770.568,00	-4.054.770.568,00	-100,00
3	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan PDAM Bulan November 2023		4.183.350.794,00	-4.183.350.794,00	-100,00
4	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan PDAM Bulan Desember 2023		5.513.887.007,00	-5.513.887.007,00	-100,00
5	Bagi Hasil Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Peserta Penerima Biaya Iuran Lokal Pelayanan Kesehatan Gartis Triwulan III Bulan Juli sampai dengan September 2023)		2.497.040.000,00	-2.497.040.000,00	-100,00
6	Bagi Hasil Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Peserta Penerima Biaya Iuran Lokal Pelayanan Kesehatan Gartis Triwulan IV Bulan Oktober sampai dengan Desember 2023)		2.462.923.750,00	-2.462.923.750,00	-100,00
7	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan PDAM, Pajak Air Permukaan Bakaru/Sawitto, untuk Bulan Juni Tahun 2024 No 1169/X/Tahun 2024	3.883.349.650,00	0,00	3.883.349.650,00	0,00
8	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan PDAM, Pajak Air Permukaan Bakaru/Sawitto, untuk Bulan Juli Tahun 2024 No 1174/X/Tahun 2024	4.201.900.137,00	0,00	4.201.900.137,00	0,00
9	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan PDAM, Pajak Air Permukaan Bakaru/Sawitto, untuk Bulan Agustus Tahun 2024 No 1349/XI/Tahun 2024	4.426.614.798,00	0,00	4.426.614.798,00	0,00
10	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan PDAM, Pajak Air Permukaan Bakaru/Sawitto, untuk Bulan September Tahun 2024 No 1348/XI/Tahun 2024	4.033.517.459,00	0,00	4.033.517.459,00	0,00
11	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan PDAM, Pajak Air Permukaan Bakaru/Sawitto, untuk Bulan Oktober Tahun 2024 No 1575/XI/Tahun 2024	4.286.289.686,00	0,00	4.286.289.686,00	0,00
12	Pajak Rokok Triwulan IV TA 2024 No SK 188.44/1086/BKAD Tahun 2024 Tanggal 16 Januari 2025	3.321.717.245,00	0,00	3.321.717.245,00	0,00
	Jumlah	24.153.388.975,00	22.003.807.282,00	2.149.581.693,00	9,77



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024
Catatan atas Laporan Keuangan

7.5.3.1.p	Piutang Lainnya	2024	2023
		Rp1.017.921.103,70	Rp1.019.921.103,70

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.017.921.103,70 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.3.1.p Rincian Piutang Lainnya

(dalam rupiah)					
No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	
				Nilai	%
1	Sewa menyewa gedung Eks MIGO dengan CV. Permata Bunda	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	-
2	Piutang TP/TGR	282.875.453,70	284.875.453,70	-2.000.000,00	(0,70)
3	Piutang Dana Bergulir	242.268.900,00	242.268.900,00	0,00	-
4	Tunggakan Tagihan Piutang Pihak Ketiga	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	-
5	Piutang Pinjaman ke PDAM	311.776.750,00	311.776.750,00	0,00	-
	Jumlah	1.017.921.103,70	1.019.921.103,70	-2.000.000,00	-0,20

Rincian terinci dapat dilihat pada pada *Lampiran 7a s/d 7e*

1. Tagihan sewa menyewa Gedung eks Migo merupakan tagihan sewa yang jatuh tempo dengan rincian sebagai berikut:

Tagihan:

Tagihan TA 2013	Rp100.000.000,00	
Tagihan TA 2014	Rp100.000.000,00	
Tagihan TA 2015	Rp 75.000.000,00	+
		Rp.275.000.000,00

Penyetoran:

Tahun 2015	Rp.50.000.000,00	
Tahun 2016	Rp.50.000.000,00	
Tahun 2020	Rp.50.000.000,00	+
		Rp.150.000.000,00
Sisa		Rp.125.000.000,00

2. Piutang TP/TGR berasal dari kerugian daerah yang telah ditetapkan pembelanannya dengan rincian sebagai berikut.

Tagihan:

Tagihan TA 2016	Rp.162.920.830,52	
Tagihan TA 2017	Rp. 11.229.138,00	
Tagihan TA 2018	Rp.292.375.453,70	+
		Rp.466.525.422,22



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

Penyetoran:

Tahun 2016	Rp.18.384.568,00	
Tahun 2017	Rp.30.712.748,52	
Tahun 2018	<u>Rp. 7.500.000,00</u>	+
		<u>Rp.56.597.316,52</u> -

Mutasi Ke
Tagihan Jangka:
Panjang

Tahun 2018	<u>Rp.123.052.652,00</u>	+
		<u>Rp.123.052.652,00</u> -
Sisa		Rp.282.875.453,70

3. Piutang dana bergulir merupakan piutang pokok dana bergulir Dinas Koperasi, Perindustrian dan perdagangan per 31 Desember 2017 sebesar Rp242.268.900,00 namun pada Tahun 2024 tidak ada tagihan yang masuk, sehingga saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp242.268.900,00. Pinjaman dana bergulir disalurkan melalui koperasi nelayan di wilayah kepulauan kepada anggota koperasi. Daftar tunggakan dana bergulir sebagai berikut:

Tabel 7.5.3.1.p.1 Rincian Piutang Lainnya - Daftar Tunggakan Dana Bergulir

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-Dec-24	Realisasi	31-Dec-23	Kenaikan/Penurunan	
					Nilai	%
1	Kopnel Bina Lestari	59.958.000,00	0,00	59.958.000,00	0,00	-
2	Kopnel Padaelo	39.434.400,00	0,00	39.434.400,00	0,00	-
3	Kopnel Mina Bahari	28.966.000,00	0,00	28.966.000,00	0,00	-
4	Kopnel Sipatuwo	25.712.000,00	0,00	25.712.000,00	0,00	-
5	KLN Khaerana	57.114.500,00	0,00	57.114.500,00	0,00	-
6	KLN Assalamakeng	31.084.000,00	0,00	31.084.000,00	0,00	-
	Jumlah	242.268.900,00	0,00	242.268.900,00	0,00	0,00

4. Tunggakan tagihan piutang pihak ketiga tahun 2018 sebesar Rp91.000.000,00 merupakan tunggakan dari tagihan kerjasama pengelolaan aset Pemerintah Kabupaten Pangkejene dan Kepulauan dan tunggakan sewa tambak kassi kebo yang jatuh tempo tahun 2016 sebesar Rp56.000.000,00, sampai dengan 31 Desember 2024 tidak ada pembayaran sehingga saldo piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp56.000.000,00.



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

Tabel 7.5.3.1.p.2 Rincian Piutang Lainnya - Tagihan Piutang Pihak Ketiga

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-Dec-24	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31-Dec-23	Kenaikan/Penurunan	
						Nilai	%
1	Sewa Kapal Purse Sein	56.000.000,00	0,00	0,00	56.000.000,00	0,00	-
	Jumlah	56.000.000,00	0,00	0,00	56.000.000,00	0,00	0,00

5. Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah sebesar Rp311.776.750,00 merupakan pemberian pinjaman kepada PDAM Pangkajene Dan Kepulauan sesuai surat perjanjian pinjam meminjam antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan PDAM Nomor 690/018/KEU tanggal 29 Pebruari 2008. Sesuai perjanjian pengembalian pinjaman seharusnya mulai dilakukan sejak bulan September 2008 (pasal 5 ayat 1). Pembayaran dapat ditangguhkan jika PDAM masih tetap merugi (pasal 5 ayat 2).

Surat Perjanjian pinjam meminjam dimaksud per 31 Desember 2014 tidak diketahui lagi keberadaannya, baik oleh pihak pemda maupun pihak PDAM. Oleh sebab itu telah dibuatkan perjanjian ulang atau pernyataan pengakuan utang piutang antara Direktur PDAM dan Bupati Pangkep dengan nomor 014/02/KSO/IV/2015 tanggal 22 April 2015 28/PDAM/IV/2015 tentang perjanjian Hutang Piutang, pasal ke 2 yang menyebutkan pihak kesatu (Pemkab Pangkajene dan Kepulauan) telah memberikan pinjaman kepada pihak kedua PDAM sebesar Rp311.776.755,00 dan pasal 3 yang menyebutkan pihak kedua bersedia mengembalikan pinjaman kepada pihak ke satu apabila PDAM Pangkajene dan Kepulauan pada Laporan Laba Rugi menunjukkan posisi laba.

7.5.3.1.q	Penyisihan Piutang	2024	2023
		(Rp78.305.609.909,84)	(Rp76.722.197.806,61)

Jumlah Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 disajikan sebesar (Rp78.305.609.909,84) yang terdiri dari:

7.5.3.1.r	Penyisihan Piutang Pendapatan	2024	2023
		(Rp77.287.688.806,14)	(Rp75.702.276.702,91)

Jumlah Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2024 disajikan sebesar (Rp77.287.688.806,14) yang terdiri dari:



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

Penyisihan Piutang Pajak Daerah, maka besar Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebesar (Rp74.328.600.870,53) atau nilai bersih yang dapat direalisasikan per 31 Desember 2024 sebesar Rp12.826.223.911,15 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.3.1.r.1 Rincian Penyisihan Piutang Pajak

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	Penyisihan Piutang	Piutang Pajak Netto
1	Piutang Pajak Hotel	6.200.500,00	(4.913.377,50)	1.287.122,50
2	Piutang Pajak Restoran	308.271.028,60	(121.574.828,33)	186.696.200,27
3	Piutang Pajak Hiburan	24.135.500,00	(14.723.765,00)	9.411.735,00
4	Piutang Pajak Reklame	240.380.200,00	(114.958.747,00)	125.421.453,00
5	Piutang Pajak PPj PLN	548.864.922,32	(523.478.124,76)	25.386.797,56
6	Piutang Pajak Parkir	110.439.400,00	(5.433.197,00)	105.006.203,00
7	Piutang Pajak Air Bawah Tanah	286.000,00	(50.930,00)	235.070,00
8	Piutang Pajak Minerba	60.724.825.470,00	(58.848.988.909,60)	1.875.836.560,40
9	Piutang Pajak Tanah Liat	125.000,00	(5.375,00)	119.625,00
10	Piutang Pajak Kapur	75.000,00	(375,00)	74.625,00
11	Piutang Pajak Pasir Silika	78.430.100,00	(78.402.104,50)	27.995,50
12	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	500.343.000,00	(50.034.300,00)	450.308.700,00
13	Piutang Pajak PBB P2 dan Aset Lainnya	24.612.448.660,76	(14.566.036.836,84)	10.046.411.823,92
	Jumlah	87.154.824.781,68	(74.328.600.870,53)	12.826.223.911,15

Penyisihan Piutang Retribusi Daerah, maka besar Penyisihan Piutang Retribusi Daerah sebesar (Rp1.798.228.629,67) atau nilai bersih yang dapat direalisasikan per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.125.992.603,19 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.3.1.r.2 Rincian Penyisihan Piutang Retribusi

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	Penyisihan Piutang	Piutang Retribusi Netto
1	Retribusi Dispensasi Pengguna Jalan Daerah	355.066.300,00	(355.066.300,00)	-
2	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	807.164.636,00	(227.012.016,00)	580.152.620,00
3	Piutang Pengendalian Menara Telekomunikasi	4.796.337,86	(4.796.337,86)	-
4	Piutang Retribusi pemanfaatan Ruang untuk Telekomunikasi	-	-	-
5	Piutang Puja.sera (Gasebo)	52.700.000,00	(19.029.000,00)	33.671.000,00
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	-	-
7	Piutang Tunggal Sewa Alat Berat	64.650.000,00	(21.021.000,00)	43.629.000,00
8	Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	3.500.853.329,00	(1.032.313.345,81)	2.468.539.983,19
9	Piutang Retribusi IMB	138.990.630,00	(138.990.630,00)	-
	Jumlah	4.924.221.232,86	(1.798.228.629,67)	3.125.992.603,19



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah – Penyertaan Modal per 31 Desember 2024 sebesar (Rp502.734.408,00) merupakan piutang yang bersumber dari BPR Citra Mas, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.3.1.r.3 Rincian Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah - Penyertaan Modal

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	Penyisihan Piutang	Piutang Retribusi Netto
1	BPR Citra Mas	563.744.044,00	(502.734.408,00)	61.009.636,00
	Jumlah	563.744.044,00	(502.734.408,00)	61.009.636,00

Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar (Rp537.357.953,06) merupakan dana BLUD. Sejak tahun 2018 di klasifikasikan pada Piutang lain-lain PAD yang sah.

Tabel 7.5.3.1.r.4 Rincian Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	Penyisihan Piutang	Piutang Retribusi Netto
1	Piutang Pendapatan BLUD	9.141.590.612,00	(194.207.953,06)	8.947.382.658,94
2	Piutang Sewa aset Pemda	444.000.000,00	(317.250.000,00)	126.750.000,00
3	Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	51.800.000,00	(25.900.000,00)	25.900.000,00
	Jumlah	9.637.390.612,00	(537.357.953,06)	9.100.032.658,94

Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah adalah Penyisihan Piutang yang merupakan hak Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada Tahun Anggaran 2024 yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar (Rp120.766.944,88) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.3.1.r.5 Rincian Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil Pajak

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	Penyisihan Piutang	Piutang Retribusi Netto
1	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan PDAM, Pajak Air Permukaan Bakaru/Sawitto, untuk Bulan Juni Tahun 2024 No 1169/X/Tahun 2024	3.883.349.650,00	(19.416.748,25)	3.863.932.901,75
2	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan PDAM, Pajak Air Permukaan Bakaru/Sawitto, untuk Bulan Juli Tahun 2024 No 1174/X/Tahun 2024	4.201.900.137,00	(21.009.500,69)	4.180.890.636,32
3	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan PDAM, Pajak Air Permukaan Bakaru/Sawitto, untuk Bulan Agustus Tahun 2024 No 1349/XI/Tahun 2024	4.426.614.798,00	(22.133.073,99)	4.404.481.724,01



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

No	Uraian	2024	Penyisihan Piutang	Piutang Retribusi Netto
4	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan PDAM, Pajak Air Permukaan Bakaru/Sawitto, untuk Bulan September Tahun 2024 No 1348/XI/Tahun 2024	4.033.517.459,00	(20.167.587,30)	4.013.349.871,71
5	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan PDAM, Pajak Air Permukaan Bakaru/Sawitto, untuk Bulan Oktober Tahun 2024 No 1575/XI/Tahun 2024	4.286.289.686,00	(21.431.448,43)	4.264.858.237,57
5	Pajak Rokok Triwulan IV TA 2024 No SK 188.44/1086/BKAD Tahun 2024 Tanggal 16 Januari 2025	3.321.717.245,00	(16.608.586,23)	3.305.108.658,78
	Jumlah	24.153.388.975,00	(120.766.944,88)	24.032.622.030,13

Rincian terinci dapat dilihat pada lampiran 6

7.5.3.1.s	Penyisihan Piutang Lainnya	2024 (Rp1.017.921.103,70)	2023 (Rp1.019.921.103,70)

Berdasarkan kualitas dan persentase Penyisihan Piutang Lainnya, maka besar Penyisihan Piutang Lainnya sebesar (Rp1.017.921.103,70) atau nilai bersih yang dapat direalisasikan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.3.1.s Rincian Piutang Lainnya - Penyisihan Piutang Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-Dec-24	Penyisihan Piutang	31-Dec-23	Kenaikan/Penurunan	
					Nilai	%
1	Sewa menyewa gedung Eks MIGO dengan CV Permata Bunda	125.000.000,00	(125.000.000,00)	125.000.000,00	-	0,00
2	Piutang TP/TGR	282.875.453,70	(282.875.453,70)	284.875.453,70	(2.000.000,00)	(0,70)
3	Piutang Dana Bergulir	242.268.900,00	(242.268.900,00)	242.268.900,00	-	0,00
4	Tunggakan Tagihan Piutang Pihak Ketiga	56.000.000,00	(56.000.000,00)	56.000.000,00	-	0,00
5	Piutang Pinjaman ke PDAM	311.776.750,00	(311.776.750,00)	311.776.750,00	-	0,00
	Jumlah	1.017.921.103,70	(1.017.921.103,70)	1.019.921.103,70	-2.000.000,00	-0,20

7.5.3.1.t	Beban Dibayar di Muka	2024 Rp408.290.618,65	2023 Rp80.846.584,03

Saldo beban dibayar di muka per 31 Desember 2024 sebesar Rp408.290.618,65 merupakan Beban Pajak STNK tahun 2024 yang masa manfaat sampai tahun 2025, dan Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat yaitu hibah ke Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) dan Hibah Uang kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024
Catatan atas Laporan Keuangan

Tabel 7.5.3.1.t Beban Dibayar Di Muka

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	
				Nilai	%
1	Beban Barang dan Jasa di Bayar di Muka	104.539.248,65	80.846.584,03	23.692.664,62	29,31
2	Beban Hibah di Bayar di Muka	303.751.370,00	0,00	303.751.370,00	0,00
	Jumlah	408.290.618,65	80.846.584,03	327.444.034,62	405,02

Rincian terinci dapat dilihat pada *Lampiran 8*

7.5.3.1.u Persediaan	2024	2023
	Rp18.430.799.952,15	Rp13.741.026.849,61

Saldo persediaan per 31 Desember 2024 disajikan sebesar Rp18.430.799.952,15 yang mengalami kenaikan sebesar Rp4.689.773.102,54 atau lebih tinggi 34,13% dari tahun 2023 yaitu sebesar Rp13.741.026.849,61. Persediaan yang dimaksud merupakan persediaan berupa alat tulis kantor, materai, alat kedokteran, obat-obatan, Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat dan bahan pakai habis yang masih tersisa di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sampai dengan 31 Desember 2024. Persediaan disajikan sebesar biaya perolehan terakhir, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.3.1.u Rincian Persediaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	
				Nilai	%
1	Bahan Kimia	1.298.174.600,00	1.323.954.800,00	-25.780.200,00	-1,95
2	Bahan Baku	6.291.986.509,91	253.691.749,32	6.038.294.760,59	2.380,17
3	Isi Tabung Gas	5.712.540,00	0,00	5.712.540,00	-
4	Bahan Lainnya	156.000,00	56.000,00	100.000,00	178,57
5	Suku Cadang Alat Kedokteran	1.253.064.156,93	1.986.268.921,25	-733.204.764,32	-36,91
6	Suku Cadang Alat Laboratorium	207.915.691,62	116.533.164,98	91.382.526,64	78,42
7	Alat Tulis Kantor	319.896.686,00	219.759.599,00	100.137.087,00	45,57
8	Kertas dan Cover	10.575.000,00	4.016.000,00	6.559.000,00	163,32
9	Bahan Cetak	103.885.700,00	46.831.566,00	57.054.134,00	121,83
10	Benda Pos	11.900.000,00	5.224.000,00	6.676.000,00	127,79
11	Bahan Komputer	5.419.000,00	2.713.000,00	2.706.000,00	99,74
12	Alat Listrik	9.866.700,00	6.296.850,00	3.569.850,00	56,69
13	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	37.032.379,00	29.566.389,00	7.465.990,00	25,25
14	Obat	6.520.852.531,69	9.633.430.360,06	-3.112.577.828,37	-32,31



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	
				Nilai	%
15	Obat-obatan Lainnya	238.260.875,00	50.391.750,00	187.869.125,00	372,82
16	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	2.116.101.582,00	60.152.700,00	2.055.948.882,00	3.417,88
17	Pakan	0,00	2.140.000,00	-2.140.000,00	-100,00
	Jumlah	18.430.799.952,15	13.741.026.849,61	4.689.773.102,54	34,13

Rincian terinci dapat dilihat pada *Lampiran 9.a dan 9.b*

7.5.3.2	Investasi Jangka Panjang	2024	2023
		Rp39.528.791.312,05	Rp41.853.015.898,97

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp39.528.791.312,05 merupakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.3.2 Rincian Investasi Jangka Panjang

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	
				Nilai	%
1	Investasi Permanen - Penyertaan Modal Pemda	39.528.791.312,05	41.853.015.898,97	-2.324.224.586,92	(5,55)
	Jumlah	39.528.791.312,05	41.853.015.898,97	-2.324.224.586,92	-5,55

Masing-masing investasi diuraikan sebagai berikut:

7.5.3.2.a	Investasi Jangka Panjang Permanen	2024	2023
		Rp39.528.791.312,05	Rp41.853.015.898,97

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan per 31 Desember 2024 sejumlah Rp39.528.791.312,05 merupakan jumlah penyertaan modal pada PDAM Pangkep, BPR Citra Mas, Perusda Mappatuwo, dan PT Bank Sulselbar, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.3.2.a Rincian Investasi Jangka Panjang - Investasi Permanen

(dalam rupiah)

No	Uraian	saldo 31/12/2024	penyertaan modal	Mutasi	saldo 31/12/2023	Kenaikan/Penurunan	
						Nilai	%
1	PDAM Kab. Pangkep	4.560.573.762,00	0,00	(837.867.943,00)	5.398.441.705,00	837.867.943,00	15,52
2	BPR Citra Mas	1.417.422.189,00	0,00	(1.280.039.516,93)	2.697.461.705,93	1.280.039.516,93	47,45
3	Perusda Mappatuwo	26.795.361,05	0,00	(206.317.126,99)	233.112.488,04	206.317.126,99	88,51
4	PT Bank Sulselbar	33.524.000.000,00	0,00	0,00	33.524.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	39.528.791.312,05	0,00	-2.324.224.586,92	41.853.015.898,97	2.324.224.586,92	5,55

Metode penilaian investasi permanen sebagai berikut:



1. PDAM Pangkep

Tabel 7.5.3.2.a.1 Rincian Penilaian Investasi Permanen - PDAM Kab. Pangkep

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	21.440.865.850,00
Modal Hibah	967.450.000,00
Total Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pangkep (A)	22.408.315.850,00
Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (B)	1.630.426.000,00
Total Penyertaan Modal (C = A + B)	24.038.741.850,00
% Kepemilikan Pemerintah Kabupaten Pangkep (D = A/C)	1,00
% Kepemilikan Pemerintah Pusat (E = B/C)	0,00
Ekuitas Total	24.038.741.850,00
Rugi ditahan	(18.640.300.145,00)
Rugi Berjalan	(837.867.943,00)
Total Ekuitas per 31 Desember 2024 (F)	4.560.573.762,00
Sehingga Ekuitas Pemerintah Kabupaten Pangkep (G = D x F)	4.560.573.762,00
Ekuitas Pemerintah Pusat (H = E x F)	0,00
	4.560.573.762,00

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada PDAM Pangkep berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1987 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pangkep dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Sul-Sel dan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pangkep. Persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada PDAM Pangkep sebesar 100%. Penilaian Investasi Permanen pada PDAM Pangkep menggunakan metode ekuitas (equity method) yaitu sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Dengan demikian nilai penyertaan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada PDAM Pangkep per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.560.573.762,00. Nilai tersebut telah sesuai dengan Laporan Perubahan Ekuitas PDAM Pangkep Audited.

2. BPR Citra Mas

Tabel 7.5.3.2.a.2 Rincian Penilaian Investasi Permanen - BPR Citra Mas

(dalam rupiah)

Uraian	saldo 31/12/2023	Mutasi	saldo 31/12/24	Kenaikan/Penurunan	
				Nilai	%
Modal	9.125.000.000,00	0,00	9.125.000.000,00	0,00	0,00
(sesuai nilai cost method)				0,00	0,00
Cadangan Umum	1.201.416.223,00	0,00	1.201.416.223,00	0,00	0,00
Cadangan Tujuan	1.525.794.526,00	0,00	1.525.794.526,00	0,00	0,00
Laba Ditahan	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Laba / (Rugi) Tahun Lalu	(6.848.284.950,00)	(2.306.464.094,0)	(9.154.749.044,00)	-2.306.464.094,00	33,68
Laba / (Rugi) Tahun Berjalan	(2.306.464.093,07)	1.026.424.577,07	(1.280.039.516,00)	1.026.424.577,07	-44,50
Setoran PAD	0,00	-	-	0,00	0,00
Jumlah Modal (sesuai Nilai Equity Method)	2.697.461.705,93	-1.280.039.516,93	1.417.422.189,00	-1.280.039.516,93	-47,45



Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada BPR Citra Mas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024. Persentase Kepemilikan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada BPR Citra Mas adalah sebesar 100,00%. Penilaian Investasi Permanen pada BPR Citra Mas menggunakan metode ekuitas (equity method) yaitu sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Biaya perolehan penyertaan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada BPR Citra Mas adalah sebesar Rp9.125.000.000,00 Pada Laporan Keuangan BPR Citra Mas Tahun Buku 2024 (Audited) diketahui biaya perolehan penyertaan Pemkab Pangkep sebesar Rp9.125.000.000,00 ditambah akumulasi ke tahun tahun sebelumnya sebesar (9.154.749.044,00) dan ditambah rugi tahun berjalan sebesar (Rp1.280.039.516,93). Dengan demikian nilai penyertaan Pemkab Pangkajene dan Kepulauan pada BPR Citra Mas per 31 Desember 2024 menunjukkan saldo sebesar Rp1.417.422.189,00 Hal ini telah sesuai dengan nilai ekuitas berdasarkan laporan keuangan BPR Citra Mas.

3. Perumda Mappatuwo

Tabel 7.5.3.2.a.3 Rincian Penilaian Investasi Permanen - Perumda Mappatuwo
(dalam rupiah)

Uraian	31-Dec-23	Mutasi	31-Dec-24	Kenaikan/Penurunan	
				Nilai	%
Modal	784.800.000,00	-	784.800.000,00	-	0,00
(sesuai nilai cost method)				-	0,00
Laba Ditahan	(664.890.838,30)	113.203.326,34	(551.687.511,96)	113.203.326,34	-17,03
Laba / (Rugi) Tahun Berjalan	47.610.649,92	-260.936.648,91	(213.325.998,99)	- 260.936.648,91	-548,06
Koreksi Laba	65.592.676,42	(58.583.804,42)	7.008.872,00	- 58.583.804,42	-89,31
Jumlah	233.112.488,04	(206.317.126,99)	26.795.361,05	(206.317.126,99)	(88,51)

Persentase Kepemilikan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada Perumda Mappatuwo adalah sebesar 100,00%. Penilaian Investasi Permanen pada Perumda Mappatuwo menggunakan metode ekuitas (equity method) yaitu sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Nilai awal investasi sebesar Rp784.800.000,00 diperoleh dari nilai investasi pada Laporan Keuangan terakhir Perumda Mappatuwo. Pada Laporan Keuangan Perumda Mappatuwo Tahun Buku 2024 (Audited) diketahui terdapat akumulasi saldo rugi tahun lalu. Nilai penyertaan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada Perumda Mappatuwo dicatat sebesar biaya perolehan penyertaan Pemkab Pangkep sebesar Rp784.800.000,00 ditambah rugi ditahan sebesar (Rp551.687.511,96). Laba tahun berjalan sebesar (Rp213.325.998,99) dan koreksi laba sebesar Rp7.008.872,00. Dengan demikian nilai penyertaan modal Perumda Mappatuwo per 31 Desember 2024 sebesar Rp26.795.361,05.



4. PT Bank Sulselbar

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada PT Bank Sulselbar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank SulSel dan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pangkep. Berdasarkan surat PT. Bank Sulselbar Nomor: SR/64/R/DKA/II/2024 perihal Laporan Komposisi Setoran Modal Pemprop, Pemkab/Pemkot se-Sulselbar per 31 Desember 2024 bahwa persentase Kepemilikan Modal Saham Pemerintah Kabupaten Pangkep pada PT Bank Sulselbar sebesar 4,65%. Penilaian Investasi Permanen pada PT Bank Sulselbar menggunakan metode biaya (*cost method*) yaitu sebesar harga perolehan per 31 Desember 2024 sebesar Rp71.306.000.000,00 yang terdiri dari Rp33.524.000.000,00 penyertaan modal awal dan penambahan Rp37.782.000.000,00 berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi barat No. 02 Tanggal 2 Desember 2020.

7.5.3.3.	Aset Tetap	2024	2023
		Rp1.861.549.996.727,17	Rp1.891.767.588.278,29

Jumlah pada pos Aset Tetap sebesar Rp1.861.549.996.727,17 merupakan nilai aset tetap yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sampai 31 Desember 2024. Aset Tetap dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan dan telah memperhitungkan depresiasi (penyusutan). Dengan rincian kelompok aset tetap dan mutasi selama Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.3.3 Rincian Aset Tetap

(dalam rupiah)						
No	Uraian	2024	Mutasi	2023	Kenaikan/Penurunan	
					Nilai	%
1	Tanah	212.073.758.071,18	4.140.103.478,73	207.933.654.592,45	4.140.103.478,73	1,99
2	Peralatan dan Mesin	788.979.235.345,36	63.563.310.459,44	725.415.924.885,92	63.563.310.459,44	8,76
3	Gedung dan Bangunan	1.337.566.477.298,15	82.842.203.624,41	1.254.724.273.673,74	82.842.203.624,41	6,60
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.514.619.243.433,95	74.130.579.325,12	2.440.488.664.108,83	74.130.579.325,12	3,04
5	Aset Tetap Lainnya	20.202.107.113,81	644.438.400,00	19.557.668.713,81	644.438.400,00	3,30
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	63.778.749.287,69	11.184.306.457,06	52.594.442.830,63	11.184.306.457,06	21,27
7	Akumulasi Penyusutan	(3.075.669.573.822,97)	(266.722.533.295,88)	(2.808.947.040.527,09)	(266.722.533.295,88)	9,50
Jumlah		1.861.549.996.727,17	(30.217.591.551,12)	1.891.767.588.278,29	(30.217.591.551,12)	(1,60)

Rincian terinci dapat dilihat pada lampiran 10



Penyusutan Aset Tetap dilakukan pertama kali pada Tahun 2013, sehingga saldo awal Aset Tetap disajikan kembali dengan memperhitungkan akumulasi penyusutan.

Mutasi penambahan Aset Tetap Tahun Anggaran 2024 terjadi karena:

- Belanja Modal Tahun Anggaran 2024;
- Penambahan Aset lama bersumber dari APBD yang belum tercatat;
- Realisasi KDP tahun sebelumnya;
- Adanya hibah dari Pemerintah Pusat;
- Aset yang bersumber dari Belanja Barang dan Jasa;
- Reklasifikasi antar jenis aset;
- Penambahan Aset yang berasal dari Dana BOS yang dipergunakan untuk membeli Aset Tetap;
- Penambahan Aset yang berasal dari Dana Kapitasi JKN yang dipergunakan untuk membeli Aset Tetap.

Mutasi pengurangan Aset Tetap Tahun Anggaran 2024 terjadi karena:

- Aset yang sebelumnya diakui dan dicatat dalam Neraca namun tidak memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi (*capitalization threshold*) sehingga dicatat secara Ekstrakomptabel;
- Aset Tetap yang telah dihapuskan;
- Reklasifikasi antar jenis Aset;
- Hibah ke masyarakat;
- Reklasifikasi KDP tahun sebelumnya menjadi aset definitif.

Uraian Aset Tetap dijelaskan pada rincian berikut:

7.5.3.3.a	Tanah	2024	2023
		Rp212.073.758.071,18	Rp207.933.654.592,45

Tanah merupakan nilai Tanah per 31 Desember 2024 yang di sajikan sebesar Rp212.073.758.071,18 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.3.3.a Rincian Aset Tetap - Tanah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2024	Mutasi	Saldo Akhir 31 Desember 2024	Kenaikan/Penurunan	
					Nilai	%
1	Tanah	207.933.654.592,45	(4.140.103.478,73)	212.073.758.071,18	- 4.140.103.478,73	-1,99
	Jumlah	207.933.654.592,45	(4.140.103.478,73)	212.073.758.071,18	(4.140.103.478,73)	(1,99)

Rincian terinci Aset Tetap Tanah pada *Lampiran 11*



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024
Catatan atas Laporan Keuangan

Tabel 7.5.3.3.a.1 Rincian Mutasi Aset Tetap - Tanah

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo Awal 2024 (1)	207.933.654.592,45
Belanja Modal TA 2024 (2)	465.430.000,00
Reklasifikasi dari KIB C (3)	578.364.178,73
Ganti Kerugian (4)	2.081.641.600,00
Hibah (5)	848.199.200,00
Mutasi Aset (6)	726.356.678,73
Penilaian Aset (7)	184.484.000,00
Saldo Awal 2024 hasil penambahan (8 = (1 + 2 + 3 + 4+5+6+7))	212.818.130.249,91
Reklasifikasi ke Belanja Barang dan Jasa (9)	18.015.500,00
Mutasi Aset (10)	726.356.678,73
Saldo Akhir 2024 (11 = 8 - (9 + 10))	212.073.758.071,18
	212.073.758.071,18

Dengan rincian mutasi Aset Tetap Tanah untuk Tahun Anggaran 2024, terdapat Aset Tetap Tanah yang tercatat sebanyak 1.834 bidang tanah, tanah yang sudah bersertifikat sebanyak 619 bidang tanah dan sebanyak 1215 bidang tanah belum bersertifikat.

Adapun penjelasan masing – masing dari penambahan nilai Aset Tetap Tanah Tahun 2024 yaitu:

1. Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp465.430.000,00 pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dan Kecamatan Labakkang.
2. Reklasifikasi dari Aset tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Tanah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berupa Pematangan Lahan Kawasan Mattampa sebesar Rp578.364.178,73.
3. Ganti Kerugian Lahan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang terkena dampak Proyek Strategis Nasional Jalur Kereta Api Makassar – Pare pada Dinas Koperasi. Usaha Kecil. Menengah. Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp2.081.641.600,00.
4. Hibah masuk Prasarana Sarana dan Utilitas berupa Tanah Jalan. Tanah Drainase dan Tanah Taman dari Pengembang kepada Dinas Perumahan. Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sebesar Rp848.199.200,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD Penerima Hibah	Pemberi Hibah	Nilai (Rp)
1	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Hibah dari PT. Sulawesi Timur Abadi Berupa Tanah Jalan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Penyerahan Aset dengan Nomor: 593/21/DPKPP/PSU/VIII/2024. tanggal 02 Agustus 2024	55.405.000,00
		Hibah dari PT. Sulawesi Timur Abadi Berupa Tanah Drainase berdasarkan Berita Acara Serah Terima Penyerahan Aset dengan Nomor: 593/21/DPKPP/PSU/VIII/2024. tanggal 02 Agustus 2024	2.653.000,00



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

No	SKPD Penerima Hibah	Pemberi Hibah	Nilai (Rp)
		Hibah dari PT. Bumi Yusra Abadi Berupa Tanah Jalan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Penyerahan Aset dengan Nomor: 243/BYA/IX/2024 dan Nomor: 593/22/DPKPP/PSU/IX/2024. tanggal 13 September 2024	470.819.200,00
		Hibah dari PT. Bumi Yusra Abadi Berupa Tanah Drainase berdasarkan Berita Acara Serah Terima Penyerahan Aset dengan Nomor: 243/BYA/IX/2024 dan Nomor: 593/22/DPKPP/PSU/IX/2024. tanggal 13 September 2024	50.624.000,00
		Hibah dari PT. Restu Amanah Bersahaja Berupa Tanah Jalan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Penyerahan Aset dengan Nomor : 593/23/DPKPP/PSU/X/2024. tanggal 31 Oktober 2024	93.379.800,00
		Hibah dari PT. Restu Amanah Bersahaja Berupa Tanah Drainase berdasarkan Berita Acara Serah Terima Penyerahan Aset dengan Nomor: 593/23/DPKPP/PSU/X/2024. tanggal 31 Oktober 2024	11.332.575,00
		Hibah dari PT. Restu Amanah Bersahaja Berupa Tanah Taman berdasarkan Berita Acara Serah Terima Penyerahan Aset dengan Nomor: 593/23/DPKPP/PSU/X/2024. tanggal 31 Oktober 2024	16.209.625,00
		Hibah dari PT. Sinar Abadi Jaya Bontoa Mandiri Berupa Tanah Jalan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Penyerahan Aset dengan Nomor: 593/24/DPKPP/PSU/XI/2024. tanggal 26 November 2024	129.512.960,00
		Hibah dari PT. Sinar Abadi Jaya Bontoa Mandiri Berupa Tanah Drainase berdasarkan Berita Acara Serah Terima Penyerahan Aset dengan Nomor: 593/24/DPKPP/PSU/XI/2024. tanggal 26 November 2024	18.263.040,00
Jumlah			848.199.200,00

5. Mutasi Aset masuk antar SKPD sebesar Rp726.356.678,73 dengan rincian sebagai berikut:

No.	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.440.500,00	Mutasi dari Dinas Perumahan. Kawasan Pemukiman dan Pertanahan berupa Belanja Makan Minum. Benda Pos Materai. Fotocopy/Penggandaan. Belanja SPPD kegiatan Pensertifikatan Tanah
2	Dinas Kesehatan	1.295.000,00	Mutasi dari Dinas Perumahan. Kawasan Pemukiman dan Pertanahan berupa Belanja Makan Minum. Benda Pos Materai. Fotocopy/Penggandaan. Belanja SPPD kegiatan Pensertifikatan Tanah
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	88.153.000,00	Mutasi dari Dinas Perumahan. Kawasan Pemukiman dan Pertanahan berupa Belanja Makan Minum. Benda Pos Materai. Fotocopy/Penggandaan. Belanja SPPD kegiatan Pensertifikatan Tanah
4	Sekretariat Daerah	20.514.000,00	Mutasi dari Dinas Perumahan. Kawasan Pemukiman dan Pertanahan berupa Belanja Makan Minum. Benda Pos Materai. Fotocopy/Penggandaan. Belanja SPPD kegiatan Pensertifikatan Tanah
5	Badan Pendapatan Daerah	2.590.000,00	Mutasi dari Dinas Perumahan. Kawasan Pemukiman dan Pertanahan berupa Belanja Makan Minum. Benda Pos Materai. Fotocopy/Penggandaan. Belanja SPPD kegiatan Pensertifikatan Tanah
6	Dinas Pariwisata. Pemuda dan Olahraga	578.364.178,73	Mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berupa Pematangan Lahan Kawasan Mattampa
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	25.000.000,00	Mutasi dari Kecamatan Labakkang berupa Penimbunan Perkuburan Kampung Kalibara
Jumlah		726.356.678,73	



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

6. Penilaian Aset Tetap Tanah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp184.484.000,00 berupa Aset Tetap Tanah SMPN 5 Labakkang.

Adapun penjelasan masing – masing dari pengurangan nilai Aset Tetap Tanah Tahun 2024 yaitu:

1. Reklasifikasi dari Belanja Modal ke Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan berupa belanja operasional kegiatan pensertifikatan tanah untuk tanah Pulau yang diusulkan Hak Pengelolaannya berupa belanja makan minum rapat, makan minum aktifitas lapangan, belanja perjalanan dinas sebesar Rp18.015.500,00.
2. Mutasi Aset keluar antar SKPD sebesar Rp726.356.678,73 dengan rincian sebagai berikut:

No.	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	10.440.500,00	Mutasi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Belanja Makan Minum, Benda Pos Materai, Fotocopy/Penggandaan, Belanja SPPD kegiatan Pensertifikatan Tanah
		1.295.000,00	Mutasi ke Dinas Kesehatan berupa Belanja Makan Minum, Benda Pos Materai, Fotocopy/Penggandaan, Belanja SPPD kegiatan Pensertifikatan Tanah
		88.153.000,00	Mutasi ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berupa Belanja Makan Minum, Benda Pos Materai, Fotocopy/Penggandaan, Belanja SPPD kegiatan Pensertifikatan Tanah
		20.514.000,00	Mutasi ke Sekretariat Daerah berupa Belanja Makan Minum, Benda Pos Materai, Fotocopy/Penggandaan, Belanja SPPD kegiatan Pensertifikatan Tanah
		2.590.000,00	Mutasi ke Badan Pendapatan Daerah berupa Belanja Makan Minum, Benda Pos Materai, Fotocopy/Penggandaan, Belanja SPPD kegiatan Pensertifikatan Tanah
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	578.364.178,73	Mutasi ke Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga berupa Pematangan Lahan Kawasan Mattampa
3	Kecamatan Labakkang	25.000.000,00	Mutasi ke Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan berupa Penimbunan Perkuburan Kampung Kalibara
Jumlah		726.356.678,73	

7.5.3.3.b Peralatan dan Mesin	2024	2023
	Rp788.979.235.345,36	Rp725.415.924.885,92

Saldo peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp788.979.235.345,36 yang berasal dari mutasi baik penambahan maupun penghapusan aset berupa peralatan dan barang mutasi lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.3.3.b Rincian Aset Tetap - Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2024	Mutasi	Saldo Akhir 31 Desember 2024	Kenaikan/Penurunan	
					Nilai	%
1	Peralatan dan Mesin	725.415.924.885,92	(63.563.310.459,44)	788.979.235.345,36	(63.563.310.459,44)	(8,76)
	Jumlah	725.415.924.885,92	(63.563.310.459,44)	788.979.235.345,36	(63.563.310.459,44)	(8,76)

Rincian terinci Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Lampiran 12



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024
Catatan atas Laporan Keuangan

Dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 7.5.3.3.b.1 Rincian Mutasi Aset Tetap - Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo Awal 2024 (1)	725.415.924.885,92
Belanja Modal TA 2024 (2)	54.607.117.769,37
Reklasifikasi dari KIB C (3)	95.956.491,35
Reklasifikasi dari KIB D (4)	39.700.000,00
Reklasifikasi dari KIB E (5)	17.280.000,00
Reklasifikasi dari KIB F (6)	124.470.000,00
Reklasifikasi dari Aset Lainnya (7)	36.452.859,00
Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa (8)	6.931.021.722,00
Reklasifikasi dari Belanja Pegawai (9)	4.550.000,00
Hibah (10)	4.239.147.000,00
Belanja yang Diakui Aset bersumber dari utang (11)	778.406.496,02
Mutasi Aset (12)	3.065.334.524,46
Saldo Awal 2024 hasil penambahan (13 = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12))	795.355.361.748,12
Reklasifikasi ke KIB D (14)	256.329.000,00
Reklasifikasi ke KIB E (15)	750.000,00
Reklasifikasi ke KIB F (16)	39.732.450,00
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain (17)	611.309.332,00
Reklasifikasi ke Belanja Barang dan Jasa (18)	30.547.032,49
Reklasifikasi ke Belanja Barang yang Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (19)	7.000.000,00
Belanja yang Sudah Diakui Aset bersumber dari pembayaran utang (20)	178.345.507,22
Koreksi Pencatatan (21)	33.000.000,78
Ekstra Kompatabel (22)	2.153.778.555,81
Mutasi Aset (23)	3.065.334.524,46
Saldo Akhir 2024 (24 = 13 - (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23))	788.979.235.345,36
	788.979.235.345,36

Adapun penjelasan masing – masing dari penambahan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024 yaitu:

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 sebesar Rp54.607.117.769,37.
2. Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

No.	SKPD	Nilai	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	86.144.063,00	Biaya Penunjang Pengadaan Mebel SD SMP
2	Dinas Kesehatan	4.550.000,00	Honorarium PPK Pengadaan Pusling Roda 2 (dua)
		3.200.000,00	Honorarium PPK Pengadaan Alat Kesehatan
3	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	2.062.428,35	Pengadaan Papan Nama Rumah Arajang Segeri
Jumlah		95.956.491,35	

- Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Kecamatan Pangkajene sebesar Rp39.700.000,00 berupa pengadaan Container Sampah.
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp17.280.000,00. dengan rincian sebagai berikut:

No.	SKPD	Nilai	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.920.000,00	Pengadaan Amplifier (BOS SMPN 1 Balocci)
		690.000,00	Pengadaan Pianika (BOS SDN 34 Sapanjang
		1.070.000,00	Pengadaan Gitar (Bos SMPN 1 Pangkajene)
2	Sekretariat Daerah	280.000,00	Pengadaan Artifisial Anggrek
		620.000,00	Pengadaan Artifisial Orchid
		510.000,00	Pengadaan Artifisial Kaktus
		510.000,00	Pengadaan Hiasan Vas Gold
		140.000,00	Pengadaan Hiasan Vas Nordic
		190.000,00	Pengadaan Hiasan Ornamen
3	Kecamatan Balocci	7.350.000,00	Belanja Audio Visual (Proyektor)
Jumlah		17.280.000,00	

- Reklasifikasi dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp124.470.000,00 berupa pengadaan Meubelair Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SMPN 3 Satap Kalmas.
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Kesehatan sebesar Rp36.452.859,00 berupa Pengadaan Laptop dan Jaringan PKM LK. Tangaya (JKN).
- Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp6.931.021.722,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Kesehatan	38.200.000,00	Pengadaan Sepeda Motor Untuk PSC (Public Safety Car)
2	Rumah Sakit Batara Siang	293.305.000,00	Pengadaan Set AGD Madya
		401.023.574,00	Pengadaan Chemistry Analyzer / Humastar 100 and Accessories)
		50.200.000,00	Pengadaan Plasma Extactor



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

No.	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
		468.300.000,00	Pengadaan Mikroskop Pako (Operation Microscope (OMS-90))
		813.250.000,00	Pengadaan Ventilator ICU
		216.500.000,00	Pengadaan Ventilator Non Infasive Bayi
		491.730.000,00	Pengadaan Refrigerator Centrifuge 8730 kapasitas 4 bag
		113.360.000,00	Pengadaan Eletrocardiograph/EKG
		115.300.000,00	Pengadaan Hematologi Analyzer 3 Diff
		6.750.000,00	Pengadaaan Rak Stand Mikropipet
		76.148.538,00	Pengadaan Dicom Printer/Drypix Lite
		274.500.000,00	Pengadaan Auto Refractor/Auto Kerato Refractometer
		121.227.870,00	Pengadaan Catarac Se
		1.045.971.000,00	Pengadaan Xray-Stationer Manual/Analog Stationary X-Ray
		1.085.000.000,00	Pengadaan USG Epiq Elite Advance GI/Ultrasound System and Tranducer Rad MSK Breast
		617.221.600,00	Pengadaan Ventilator Konvensional Bayi/Portable Conventional Ventilator
		39.354.500,00	Pengadaan Centrifuge Fixed-Angle Rotor
		102.655.000,00	Pengadaan Monitor Neonatus/Pasien Monitor Epm 12 a Advance
		31.194.000,00	Pengadaan Urine Analyzer
		61.000.000,00	Pengadaan Electrolite Analyzer
		101.000.000,00	Pengadaan Hospital Bed + Bedside Cabinet
		120.990.000,00	Pengadaan Kogel Bio Mixer 330-1/Blood Collection Mixer)
3	Dinas Perhubungan	6.500.000,00	Pengadaan Speaker Portable Politron Pro
4	Sekretariat DPRD	125.430.000,00	Pengadaan SepedaMotor 5 (lima) unit
5	Badan Keuangan dan Aset Daerah	79.500.000,00	Pemeliharaan Jaringan Lokal
6	Kecamatan Bungoro	7.500.000,00	Pengadaan Mesin Absensi 1 (satu) unit
7	Kecamatan Lk. Kalmas	8.000.000,00	Pengadaan Printer 2 (dua) Unit
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.360.640,00	Pembelian Mesin Pompa Air
9	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.850.000,00	Pengadaan Lensa Kamera
10	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	7.700.000,00	Pengadaan Printer
	Jumlah	6.931.021.722,00	



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

8. Reklasifikasi dari Belanja Pegawai ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Kesehatan sebesar Rp4.550.000,00 berupa Honorarium PPK Paket Pekerjaan Pengadaan Prasarana Puskesmas (ambulance laut).
9. Hibah masuk sebesar Rp4.239.147.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD Penerima Hibah	Pemberi Hibah	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	Hibah dari Bank Sulselbar berupa Kendaraan Operasional berdasarkan Berita Acara Bantuan Pengadaan Kendaraan Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Batiling tanggal 05 Februari 2024	126.840.000,00
		Hibah dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan berupa Elektrokardiograf (EKG) sebanyak 7 (tujuh) unit Berdasarkan Berita Acara Bantuan Pengadaan Kendaraan Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Batiling tanggal 05 Februari 2024	195.000.000,00
		Hibah dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan berupa Pulse Oximeter sebanyak 1 (satu) unit Berdasarkan Surat Perintah Mengeluarkan Barang (SPMB) Nomor: 440.4.2/03985/ISPA tanggal 06 Mei 2024	17.077.000,00
2	Rumah Sakit Umum Batara Siang	Hibah dari PT Semen Tonasa berupa Wheel Chair Berdasarkan BAST Nomor 992/RSBS/UT/V/2024 tanggal 20 Mei 2024	21.000.000,00
		Hibah dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). Tbk Kantor Cabang Pangkep berupa Mobil Ambulance Berdasarkan BAST Nomor: B.1951-KC-XIII/LOG/09/2023	114.000.000,00
3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	Hibah dari Kementerian Hibah dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia berupa Peralatan dan Mesin berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Nomor 16/Prj/BN.06/V/2024 tanggal 15-05-2024 tentang Hibah Barang Milik Negara Dana Tugas Pembantuan Kementerian Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2023	3.765.230.000,00
Jumlah			4.239.147.000,00

10. Belanja yang diakui Aset bersumber dari utang sebesar Rp778.406.496,02 dengan rincian sebagai berikut:

No.	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Rumah Sakit Batara Siang	2.497.500,00	Pengadaan Head Lamp/lampu Kepala
		1.476.300,00	Pengadaan Timbangan badan+ukur tinggi Badan
		3.885.000,00	Pengadaaan Regulator O2
		3.885.000,00	Pengadaaan Regulator O3
		7.770.000,00	Pengadaaan Regulator O4
		3.885.000,00	Pengadaaan Regulator O5
		1.198.800,00	Pengadaan Timbangan Bayi
		854.700,00	Pengadaan Tensimeter Digital
		5.994.000,00	Pengadaan Laringoscopy
		1.198.800,00	Pengadaan Tensimeter Digital Anak
		1.198.800,00	Pengadaan Tensimeter Digital Anak
		4.662.000,00	Pengadaan Tensimeter Berdiri
		2.952.600,00	Pengadaan Stetoscope Bayi
		1.709.400,00	Pengadaan Tabung O2 Kecil (1 Kubik)
		4.662.000,00	Pengadaaan Tensimeter Berdiri



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

No.	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
		28.398.000,00	Pengadaan Pasien Monitor
		1.320.000,00	Pengadaan Manual Resuscitator pediatric
		7.215.000,00	Pengadaan Kompresor
		854.700,00	Pengadaan Timbangan Bayi digital
		5.400.000,00	Pengadaan Laringoscope Adult
		5.400.000,00	Pengadaan Laringoscope Anak
		8.749.999,02	Pengadaan Heand Seler
		2.664.000,00	Pengadaan Regulator O2
		1.332.000,00	Pengadaan Tensimeter Digital
		1.665.000,00	Pengadaan Tensimeter Mobaile Dewasa
		1.831.500,00	Pengadaan Tensimeter Mobaile Anak
		2.442.000,00	Pengadaan Oksigen Transfer/Tabung O2
		2.442.000,00	Pengadaan Oksigen Transfer/Tabung O2
		3.108.000,00	Pengadaan Bed Pasien/Kasur Pasien
		3.350.000,00	Pengadaan Mesin Pemotong Rumput
		3.532.048,00	Pengadaan Pintu Geser Almunium
		21.500.000,00	Pengadaan AC 2 PK
		4.000.000,00	Pengadaan Regulator O2
		1.000.000,00	Pengadaan Regulator O2
		3.400.000,00	Pengadaan Printer L3210
		1.287.600,00	Pengadaan Fulse Oxymeter
		11.000.000,00	Pengadaan AC 2PK
		11.000.000,00	Pengadaan AC 2PK
		11.000.000,00	Pengadaan Laptop
		635.000,00	Pengadaan Pesawat telephone
		635.000,00	Pengadaan Pesawat telephone
		635.000,00	Pengadaan Pesawat telephone
		555.000,00	Pengadaan Dispenser
		5.100.000,00	Pengadaan Printer L5290
		52.000.000,00	Pengadaan Tabung O2
		91.000.000,00	Pengadaan Tabung O2
		52.000.000,00	Pengadaan Tabung O2
		3.450.000,00	Pengadaan Printer L3210
		2.145.000,00	Pengadaan Resusitasi Dewasa
		2.220.000,00	Pengadaan Dopler
		5.350.000,00	Pengadaan Mesin Press
		888.000,00	Pengadaan Timbangan Digital
		1.332.000,00	Pengadaan Tensimeter Digital
		2.220.000,00	Pengadaan Timbangan Berta Badan + Tinggi badan



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

No.	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
		7.326.000,00	Pengadaan Velbed Aluminium Lipat
		14.182.610,00	Pengadaan Needle holder Mayo Hegar. 20 cm
		17.221.740,00	Pengadaan Scissors Metzenbaum. Cvd 20 cm
		15.195.650,00	Pengadaan dissecting Scissors. Metsenbaum-Standard 18 cm-7"
		140.710.000,00	Pengadaan Ventilator V1
		1.332.000,00	Pengadaan Regulator O2
		1.332.000,00	Pengadaan Tensimeter Digital
		5.550.000,00	Pengadaan Stetoscope
		843.600,00	Pengadaan Timbangan bayi
		2.664.000,00	Pengadaan Regulator O2
		3.330.000,00	Pengadaan Regulator O2
		666.000,00	Pengadaan Regulator O2
		666.000,00	Pengadaan Regulator O2
		1.998.000,00	Pengadaan Regulator O2
		666.000,00	Pengadaan Regulator O2
		1.332.000,00	Pengadaan Tensimeter Digital
		3.125.000,00	Pengadaan HD Webcam
		4.200.000,00	Pengadaan Cloud Managed Switch
		2.000.000,00	Pengadaan Tang Gigi Dewasa osung Extraction Forcep
		1.200.000,00	Pengadaan Osung Luxating Lurus 3MM Anterior
		1.200.000,00	Pengadaan Osung Luxating Bengkok 3MM
		7.800.000,00	Pengadaan UPS
		9.990.000,00	Pengadaan Trolley Incubator
		7.770.000,00	Pengadaan Meja Instrument
		4.650.000,00	Pengadaan Protaper H-U ASS.25MM*NOT CE*
		5.328.000,00	Pengadaan Needle Holder Osung (NH 160)
		1.455.000,00	Pengadaan Gunting Benang Osong
		50.749.000,00	Pengadaan Pasien Monitor
		507.500,00	Pengadaan Modem Orbit Star 22
		8.630.250,00	Pengadaan Valbed /Tempat Tidur Lipat
		8.212.200,00	Pengadaan Dopler
		5.128.200,00	Pengadaan Timbangan Digital (Timbangan Laundry)
		3.500.000,00	Pengadaan Printer L3210
		3.500.000,00	Pengadaan Printer L3210
		3.499.999,00	Pengadaan Printer L3210
		19.059.000,00	Rehabilitasi IPAL (BLUD 2024)
	Jumlah	778.406.496,02	



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

11. Mutasi Aset masuk antar SKPD sebesar Rp3.065.334.524,46 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Lingkungan Hidup	1.230.000.000,00	Pengalihan status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Roda 3 Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 799 Tahun 2024 tentang Pengalihan Status Pengguna Barang Milik Daerah dari Kecamatan Pangkajene Ke Dinas Lingkungan Hidup
2	Sekretariat DPRD	520.950.000,00	Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik daerah berupa Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4 (Empat) DD 1417 E dari Sekretariat Daerah ke Sekretariat DPRD sesuai BAST Nomor: 000.2.3.2/1064/SETDA tanggal 01 Juli 2024
		348.639.495,41	Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik daerah berupa Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4 (Empat) DD 1057 E dari Sekretariat Daerah ke Sekretariat DPRD sesuai BAST Nomor: 000.2.3.2/1064/SETDA tanggal 01 Juli 2024
		348.639.495,41	Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik daerah berupa Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4 (Empat) DD 1054 E dari Sekretariat Daerah ke Sekretariat DPRD sesuai BAST Nomor: 000.2.3.2/1064/SETDA tanggal 01 Juli 2024
		11.286.000,00	Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) DD 6925 EK dari Sekretariat Daerah ke Sekretariat DPRD sesuai BAST Nomor: 000.2.3.2/1064/SETDA tanggal 01 Juli 2024
		14.500.000,00	Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) DD 6971 EG dari Sekretariat Daerah ke Sekretariat DPRD sesuai BAST Nomor: 000.2.3.2/1064/SETDA tanggal 01 Juli 2024
		20.312.594,47	Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua)DD 6962 EK dari Sekretariat Daerah ke Sekretariat DPRD sesuai BAST Nomor: 000.2.3.2/1064/SETDA tanggal 01 Juli 2024
		35.445.609,00	Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua)DD 6217 E dari Sekretariat Daerah ke Sekretariat DPRD sesuai BAST Nomor: 000.2.3.2/1064/SETDA tanggal 01 Juli 2024
		19.328.305,05	Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua)) DD 6885 EJ dari Sekretariat Daerah ke Sekretariat DPRD sesuai BAST Nomor: 000.2.3.2/1064/SETDA tanggal 01 Juli 2024
3	Kecamatan Pangkajene	24.295.172,74	Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa: Meja Kerja Kayu, Meja 1/2 Biro, Kursi Tamu dan Sofa. Berdasarkan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 32 Tahun 2024 tanggal: 3 Januari 2024 tentang Pengalihan Status Pengguna Barang Milik Daerah dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Ke Kecamatan Pangkajene, Kelurahan Mappasaile berupa Meja Kerja Kayu, Meja 1/2 Biro, Kursi Tamu dan Sofa



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
4	Kecamatan Liukang Kalmas	3.731.200,00	Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Perlengkapan Kantor (Meja Kerja Pejabat lain-lain) dari Sekretariat Daerah ke Kecamatan LK. Kalmas sesuai BAST Nomor: 000.2.3.2/1002/SETDA tanggal 01 Juli 2024
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15.657.095,24	Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) DD 6821 EJ dari Sekretariat Daerah ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai BAST Nomor: 000.2.3.2/1003/SETDA tanggal 01 Juli 2024
		11.502.000,00	Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) DD 6969 EF dari Sekretariat Daerah ke Kecamatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai BAST Nomor: 000.2.3.2/1003/SETDA tanggal 01 Juli 2024
		15.657.095,24	Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) DD 6815 EJ dari Sekretariat Daerah ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai BAST Nomor: 000.2.3.2/1003/SETDA tanggal 01 Juli 2024
		11.286.000,00	Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) DD 6335 E dari Sekretariat Daerah ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai BAST Nomor: 000.2.3.2/1003/SETDA tanggal 01 Juli 2024
		18.764.543,42	Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) DD 6933 EJ dari Sekretariat Daerah ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai BAST Nomor: 000.2.3.2/1003/SETDA tanggal 01 Juli 2024
		12.540.000,00	Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) DD 6910 EH dari Sekretariat Daerah ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai BAST Nomor: 000.2.3.2/1003/SETDA tanggal 01 Juli 2024
		191.509.017,00	Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4 (Empat) DD 1146 E dari Sekretariat Daerah ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai BAST Nomor: 000.2.3.2/1003/SETDA tanggal 01 Juli 2024
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.657.095,24	Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) DD 6807 EI dari Sekretariat Daerah ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai BAST Nomor: 000.2.3.2/1065/SETDA tanggal 01 Juli 2024
		12.540.000,00	Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) DD 6178 E dari Sekretariat Daerah ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
			Manusia sesuai BAST Nomor: 000.2.3.2/1065/SETDA tanggal 01 Juli 2024
7	Dinas Pertanian	12.585.000,00	Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) DD 6954 EA dari Sekretariat Daerah ke Dinas Pertanian sesuai BAST Nomor: 000.2.3.2/1063/SETDA tanggal 01 Juli 2024
		12.585.000,00	Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) DD 6949 EA dari Sekretariat Daerah ke Dinas Pertanian sesuai BAST Nomor: 000.2.3.2/1063/SETDA tanggal 01 Juli 2024
		12.585.000,00	Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) DD 6948 EA dari Sekretariat Daerah ke Dinas Pertanian sesuai BAST Nomor: 000.2.3.2/1063/SETDA tanggal 01 Juli 2024
		12.585.000,00	Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) DD 6947 EA dari Sekretariat Daerah ke Dinas Pertanian sesuai BAST Nomor: 000.2.3.2/1063/SETDA tanggal 01 Juli 2024
		12.585.000,00	Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) DD 6944 EA dari Sekretariat Daerah ke Dinas Pertanian sesuai BAST Nomor: 000.2.3.2/1063/SETDA tanggal 01 Juli 2024
		12.585.000,00	Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) DD 6955 EA Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa sesuai BAST Nomor: 000.2.3.2/1063/SETDA tanggal 01 Juli 2024
		12.585.000,00	Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) DD 6946 EA dari Sekretariat Daerah ke Dinas Pertanian sesuai BAST Nomor: 000.2.3.2/1063/SETDA tanggal 01 Juli 2024
		12.585.000,00	Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) DD 6941 EA dari Sekretariat Daerah ke Dinas Pertanian sesuai BAST Nomor: 000.2.3.2/1063/SETDA tanggal 01 Juli 2024
		12.585.000,00	Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) DD 6952 EA dari Sekretariat Daerah ke Dinas Pertanian sesuai BAST Nomor: 000.2.3.2/1063/SETDA tanggal 01 Juli 2024
		12.585.000,00	Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) DD 6942 EA dari Sekretariat Daerah ke Dinas Pertanian sesuai BAST Nomor: 000.2.3.2/1063/SETDA tanggal 01 Juli 2024
		30.084.711,00	Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) DD 6468 Edari Sekretariat Daerah ke Dinas Pertanian sesuai BAST Nomor: 000.2.3.2/1063/SETDA tanggal 01 Juli 2024



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
		11.502.000,00	Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) DD 6983 EF dari Sekretariat Daerah ke Dinas Pertanian sesuai BAST Nomor: 000.2.3.2/1063/SETDA tanggal 01 Juli 2024
		15.657.095,24	Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) DD 6818 EI dari Sekretariat Daerah ke Dinas Pertanian sesuai BAST Nomor: 000.2.3.2/1063/SETDA tanggal 01 Juli 2024
Jumlah		3.065.334.524,46	

Adapun penjelasan masing-masing dari pengurangan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024 yaitu:

1. Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp256.329.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Rumah Sakit Umum Batara Siang	199.500.000,00	Rehabilitasi IPAL (BLUD 2024)
		19.059.000,00	Rehabilitasi IPAL (Utang BLUD 2024)
2	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	14.780.000,00	Jaringan Instalasi Air Bersih
		5.000.000,00	Wastafel
3	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	17.990.000,00	Instalasi Air Bersih Kantor
Jumlah		256.329.000,00	

2. Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp750.000,00 berupa Pengadaan Al-Quran (BOS SDN 10 Bonto).
3. Reklasifikasi ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp39.732.450,00 berupa Pengadaan Mebel SDN 33 Jollo.
4. Reklasifikasi ke Aset Lainnya dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp611.309.332,00 berupa Kendaraan Dinas Operasional.
5. Reklasifikasi ke Belanja Barang dan Jasa dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp30.547.032,49.

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Kesehatan	3.435.100,00	Pengadaan Relief Burn Kit
		62.400,00	Pengadaan Cairan Antiseptik
		1.508.000,00	Pengadaan Kantong Mayat
		1.508.000,00	Pengadaan Kantong Mayat
2	Rumah Sakit Umum Batara Siang	56.600,00	Pengadaan Cairan Antiseptik



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
3	Dinas Lingkungan Hidup	23.400.000,00	Pengadaan Peralatan Kerja Pemilah Sampah (Sapu Lidi Gagang Bambu)
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	266.400,00	Pengadaan Kabel NYH-HY 2 x 1.5
		27.750,00	Pengadaan Stop Kontak Arde Ution 4 mata
		16.650,00	Pengadaan Steker Bulat Bruco
		49.950,00	Pengadaan Sarung Tangan Bintik
		5.550,00	Pengadaan Paku Rivet 435
		11.100,00	Pengadaan Paku Rivet 640
		11.100,00	Pengadaan Paku Rivet 550
		8.880,00	Pengadaan Mata Gurinda Potong
		10.277,49	Pengadaan Mata Gurinda Amplas
		8.325,00	Pengadaan Mata Gurinda Amplas 4 Susun
		160.950,00	Pengadaan Mata Bor Besi
Jumlah		30.547.032,49	

6. Reklasifikasi ke Belanja Barang yang Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Kecamatan Marang sebesar Rp7.000.000,00 berupa barang yang diserahkan kepada Karang Taruna berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 7 Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024 (Rompi Olahraga, Sarung Tangan, Bola Sepak, Bola Takraw, Bola Volly dan Net Takraw).

7. Belanja yang sudah diakui aset bersumber dari pembayaran utang sebesar Rp178.345.507,22 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.360.000,00	Biaya Penunjang ATK Mebel SD
2	Dinas Kesehatan	13.844.000,00	Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Pratama Batiling
3	Rumah Sakit Umum Batara Siang	29.000.000,00	Pengadaan Komputer
		11.047.000,00	Pengadaan Partisi Lobi Pendaftaran Pasien
		60.855.528,00	Pengadaan Stationari Generation Set (Genset)
		2.830.500,00	Pengadaan Trolley O2 (Utang BLUD 2023)
		2.664.000,00	Pengadaan Stetoscope (Utang BLUD 2023)
		1.415.250,00	Pengadaan Trolley O2 (Utang BLUD 2023)
		5.500.000,00	Pengadaan Lemari Loker (Utang BLUD 2023)
		555.000,00	Pengadaan Dispenser
		2.775.000,00	Pengadaan Printer Epson L121
		2.775.000,00	Pengadaan Printer Epson L121
		1.554.000,00	Pengadaan Mic



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
		932.400,00	Pengadaan Fulse Oximeter
		2.741.700,00	Pengadaan Steteskop
		4.107.000,00	Pengadaan Dopler
		838.050,00	Pengadaan Exhaust Fan
		10.903.779,22	Pengadaan Saction Pump
		5.383.500,00	Pengadaan AC
		1.198.800,00	Pispot Plastik (Utang 2022)
		900.000,00	Pesawat Telephone (Utang 2021)
4	Dinas Lingkungan Hidup	6.500.000,00	Kompressor Angin 2 HP
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.665.000,00	Microphone Wireles
Jumlah		178.345.507,22	

8. Koreksi Pencatatan sebesar Rp33.000.000,78 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga berupa Belanja Aset Tak Berwujud Aplikasi Mattampa Inn yang dicatat pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp33.000.000,00 dan Koreksi atas Pencatatan Pembayaran Utang Tahun 2023 pada Rumah Sakit Batara Siang sebesar Rp78 berupa pengadaan Saction Pump.

9. Ekstra Kompatabel sebesar Rp2.153.776.555.81 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.438.466.871,00	Belanja Ekstra Kompatabel Peralatan dan Mesin
2	Dinas Kesehatan	189.120.860,00	Belanja Ekstra Kompatabel Peralatan dan Mesin
3	Rumah Sakit Umum Batara Siang	56.600,00	Belanja Ekstra Kompatabel Peralatan dan Mesin
4	Dinas Lingkungan Hidup	31.795.000,00	Belanja Ekstra Kompatabel Peralatan dan Mesin
5	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	980.000,00	Belanja Ekstra Kompatabel Peralatan dan Mesin
6	Sekretariat Daerah	164.643.900,00	Belanja Ekstra Kompatabel Peralatan dan Mesin
7	Sekretariat DPRD	54.860.000,00	Belanja Ekstra Kompatabel Peralatan dan Mesin
8	Kecamatan Pangkajene	5.728.000,00	Belanja Ekstra Kompatabel Peralatan dan Mesin
9	Kecamatan Minasate'ne	23.350.000,00	Belanja Ekstra Kompatabel Peralatan dan Mesin
10	Kecamatan Bungoro	39.800.000,00	Belanja Ekstra Kompatabel Peralatan dan Mesin
11	Kecamatan Labakkang	46.500.000,00	Belanja Ekstra Kompatabel Peralatan dan Mesin
12	Kecamatan Ma'rang	53.370.800,00	Belanja Ekstra Kompatabel Peralatan dan Mesin
13	Kecamatan Segeri	43.942.100,00	Belanja Ekstra Kompatabel Peralatan dan Mesin
14	Kecamatan Liukang Tupabbiring	7.500.000,00	Belanja Ekstra Kompatabel Peralatan dan Mesin
15	Kecamatan Liukang Kalmas	1.527.700,00	Belanja Ekstra Kompatabel Peralatan dan Mesin
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.033.570,81	Belanja Ekstra Kompatabel Peralatan dan Mesin
17	Dinas Ketahanan Pangan	1.800.000,00	Belanja Ekstra Kompatabel Peralatan dan Mesin



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	34.150.000,00	Belanja Ekstra Kompatabel Peralatan dan Mesin
19	Dinas Pertanian	3.420.000,00	Belanja Ekstra Kompatabel Peralatan dan Mesin
20	Dinas Perikanan	3.179.154,00	Belanja Ekstra Kompatabel Peralatan dan Mesin
21	Dinas Ketenagakerjaan	290.000,00	Belanja Ekstra Kompatabel Peralatan dan Mesin
22	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	2.264.000,00	Belanja Ekstra Kompatabel Peralatan dan Mesin
Jumlah		2.153.778.555,81	

10. Mutasi Aset Keluar antar SKPD sebesar Rp3.065.334.524,46 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Sekretariat Daerah	520.950.000,00	Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4 (Empat) DD 1417 E dari Sekretariat Daerah ke Sekretariat DPRD sesuai BAST Nomor: 000.2.3.2/1064/SETDA tanggal 01 Juli 2024
		348.639.495,41	Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4 (Empat) DD 1057 E dari Sekretariat Daerah ke Sekretariat DPRD sesuai BAST Nomor: 000.2.3.2/1064/SETDA tanggal 01 Juli 2024
		348.639.495,41	Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4 (Empat) DD 1054 E dari Sekretariat Daerah ke Sekretariat DPRD sesuai BAST Nomor: 000.2.3.2/1064/SETDA tanggal 01 Juli 2024
		11.286.000,00	Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) DD 6925 EK dari Sekretariat Daerah ke Sekretariat DPRD sesuai BAST Nomor: 000.2.3.2/1064/SETDA tanggal 01 Juli 2024
		14.500.000,00	Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) DD 6971 EG dari Sekretariat Daerah ke Sekretariat DPRD sesuai BAST Nomor: 000.2.3.2/1064/SETDA tanggal 01 Juli 2024
		20.312.594,47	Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) DD 6962 EK dari Sekretariat Daerah ke Sekretariat DPRD sesuai BAST Nomor: 000.2.3.2/1064/SETDA tanggal 01 Juli 2024
		35.445.609,00	Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) DD 6217 E dari Sekretariat Daerah ke Sekretariat DPRD sesuai BAST Nomor: 000.2.3.2/1064/SETDA tanggal 01 Juli 2024
		19.328.305,05	Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) DD 6885 EJ dari Sekretariat Daerah ke Sekretariat DPRD sesuai BAST Nomor: 000.2.3.2/1064/SETDA tanggal 01 Juli 2024
		3.731.200,00	Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Perlengkapan Kantor (Meja Kerja Pejabat lain-lain) dari Sekretariat Daerah ke Liukang Kalmas sesuai BAST Nomor: 000.2.3.2/1002/SETDA tanggal 01 Juli 2024
		15.657.095,24	Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) DD 6821 EJ dari Sekretariat Daerah ke Dinas Penanam Modal Terpadu Satu Pintu sesuai BAST Nomor: 000.2.3.2/1003/SETDA tanggal 01 Juli 2024
		11.502.000,00	Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) DD 6969 EF dari Sekretariat Daerah ke Dinas Penanam Modal Terpadu Satu Pintu sesuai BAST Nomor: 000.2.3.2/1003/SETDA tanggal 01 Juli 2024



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
		15.657.095,24	Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) DD 6815 EJ dari Sekretariat Daerah ke Dinas Penanam Modal Terpadu Satu Pintu sesuai BAST Nomor: 000.2.3.2/1003/SETDA tanggal 01 Juli 2024
		11.286.000,00	Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) DD 6335 E dari Sekretariat Daerah ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai BAST Nomor: 000.2.3.2/1003/SETDA tanggal 01 Juli 2024
		18.764.543,42	Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) DD 6933 EJ dari Sekretariat Daerah ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai BAST Nomor: 000.2.3.2/1003/SETDA tanggal 01 Juli 2024
		12.540.000,00	Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) DD 6910 EH dari Sekretariat Daerah ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai BAST Nomor: 000.2.3.2/1003/SETDA tanggal 01 Juli 2024
		191.509.017,00	Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4 (Empat) DD 1146 E dari Sekretariat Daerah ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai BAST Nomor: 000.2.3.2/1003/SETDA tanggal 01 Juli 2024
		15.657.095,24	Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) DD 6807 EI dari Sekretariat Daerah ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai BAST Nomor: 000.2.3.2/1065/SETDA tanggal 01 Juli 2024
		12.540.000,00	Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) DD 6178 E dari Sekretariat Daerah ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai BAST Nomor: 000.2.3.2/1065/SETDA tanggal 01 Juli 2024
		12.585.000,00	Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) DD 6954 EA dari Sekretariat Daerah ke Dinas Pertanian sesuai BAST Nomor: 000.2.3.2/1063/SETDA tanggal 01 Juli 2024
		12.585.000,00	Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) DD 6949 EA dari Sekretariat Daerah ke Dinas Pertanian sesuai BAST Nomor: 000.2.3.2/1063/SETDA tanggal 01 Juli 2024
		12.585.000,00	Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) DD 6948 EA dari Sekretariat Daerah ke Dinas Pertanian sesuai BAST Nomor: 000.2.3.2/1063/SETDA tanggal 01 Juli 2024
		12.585.000,00	Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) DD 6947 EA dari Sekretariat Daerah ke Dinas Pertanian sesuai BAST Nomor: 000.2.3.2/1063/SETDA tanggal 01 Juli 2024
		12.585.000,00	Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) DD 6944 EA dari Sekretariat Daerah ke Dinas Pertanian sesuai BAST Nomor: 000.2.3.2/1063/SETDA tanggal 01 Juli 2024
		12.585.000,00	Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) DD 6955 EA dari Sekretariat Daerah ke Dinas Pertanian sesuai BAST Nomor: 000.2.3.2/1063/SETDA tanggal 01 Juli 2024
		12.585.000,00	Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) DD 6946 EA dari Sekretariat Daerah ke Dinas Pertanian sesuai BAST Nomor: 000.2.3.2/1063/SETDA tanggal 01 Juli 2024



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
		12.585.000,00	Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) DD 6941 EA dari Sekretariat Daerah ke Dinas Pertanian sesuai BAST Nomor: 000.2.3.2/1063/SETDA tanggal 01 Juli 2024
		12.585.000,00	Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) DD 6952 EA dari Sekretariat Daerah ke Dinas Pertanian sesuai BAST Nomor: 000.2.3.2/1063/SETDA tanggal 01 Juli 2024
		12.585.000,00	Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) DD 6942 EA dari Sekretariat Daerah ke Dinas Pertanian sesuai BAST Nomor: 000.2.3.2/1063/SETDA tanggal 01 Juli 2024
		30.084.711,00	Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) DD 6468 E dari Sekretariat Daerah ke Dinas Pertanian sesuai BAST Nomor: 000.2.3.2/1063/SETDA tanggal 01 Juli 2024
		11.502.000,00	Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) DD 6983 EF dari Sekretariat Daerah ke Dinas Pertanian sesuai BAST Nomor: 000.2.3.2/1063/SETDA tanggal 01 Juli 2024
		15.657.095,24	Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) DD 6818 EI dari Sekretariat Daerah ke Dinas Pertanian sesuai BAST Nomor: 000.2.3.2/1063/SETDA tanggal 01 Juli 2024
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	24.295.172,74	Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Meja Kerja Kayu, Meja 1/2 Biro, Kursi Tamu dan Sofa berdasarkan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 32 Tahun 2024 tanggal 3 Januari 2024 tentang Pengalihan Status Pengguna Barang Milik Daerah dari Badan Keuangan dan Aset Daerah ke Kecamatan Pangkajene Kelurahan Mappasaile
3	Kecamatan Pangkajene	1.230.000.000,00	Pengalihan status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Roda 3 berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 799 Tahun 2024 tentang Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah dari Kecamatan Pangkajene ke Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah		3.065.334.524,46	

7.5.3.3.c	Gedung dan Bangunan	2024	2023
		Rp1.337.566.477.298,15	Rp1.254.724.273.673,74

Tabel 7.5.3.3.c Rincian Aset Tetap - Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2024	Mutasi	Saldo Akhir 31 Desember 2024	Kenaikan/Penurunan	
					Nilai	%
1	Bangunan Gedung	1.254.724.273.673,74	-82.842.203.624,41	1.337.566.477.298,15	-82.842.203.624,41	-6,60
	Jumlah	1.254.724.273.673,74	(82.842.203.624,41)	1.337.566.477.298,15	(82.842.203.624,41)	(6,60)

Rincian terinci dapat dilihat pada lampiran 13

Dengan rincian mutasi sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

Tabel 7.5.3.3.c.1 Rincian Mutasi Aset Tetap - Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo Awal 2024 (1)	1.254.724.273.673,74
Belanja Modal TA 2024 (2)	99.027.835.883,00
Reklasifikasi dari KIB D (3)	181.007.850,00
Reklasifikasi dari KIB F (4)	7.604.784.128,60
Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa (5)	37.379.360,00
Reklasifikasi dari Belanja Tidak Terduga (6)	210.900.000,00
Hibah (7)	7.083.700.000,00
Belanja yang Diakui Aset Bersumber Dari Utang (8)	920.250.802,67
Mutasi Aset (9)	6.363.192.354,47
Saldo Awal 2024 hasil penambahan (10 = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9))	1.376.153.324.052,48
Reklasifikasi ke KIB A (11)	578.364.178,73
Reklasifikasi ke KIB B (12)	95.956.491,35
Reklasifikasi ke KIB D (13)	2.749.668.280,93
Reklasifikasi ke KIB F (14)	19.702.595.293,85
Reklasifikasi ke Aset Lainnya (15)	4.273.086.312,00
Koreksi Pencatatan (16)	1.460.319.037,00
Belanja yang Sudah Diakui Aset Bersumber Dari Pembayaran Utang (17)	3.298.664.806,00
Reklasifikasi ke Belanja Barang yang Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (18)	65.000.000,00
Mutasi Aset (19)	6.363.192.354,47
Saldo Akhir 2024 (20 = 10 - (11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19))	1.337.566.477.298,15
	1.337.566.477.298,15

Rincian terinci aset gedung dan bangunan dapat dilihat pada lampiran 13

Nilai Gedung dan Bangunan merupakan nilai gedung dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.337.566.477.298,15 dengan rincian sebagai berikut:

Adapun penjelasan masing-masing dari penambahan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2024 yaitu:

1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 sebesar Rp99.027.835.883,00.
2. Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp181.007.850,00 dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Perhubungan	168.590.000,00	Pembangunan Terminal Penumpang Maccini Baji (Shelter)
		5.871.500,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Terminal Penumpang Maccini Baji (Shelter)
		5.866.350,00	Pengawasan Teknis Pembangunan Terminal Penumpang Maccini Baji (Shelter)
		680.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah		181.007.850,00	

3. Reklasifikasi dari Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp7.604.784.128,60 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	366.585.250,00	Laboratorium IPA SMPN 3 SATAP Lk. Kalmas
		327.128.700,00	Ruang Tata Usaha SMPN 3 SATAP Lk. Kalmas
		137.172.500,00	Ruang UKS SMPN 3 SATAP Lk. Kalmas
		362.479.650,00	Laboratorium Komputer SMPN 3 SATAP Lk. Kalmas
		25.937.500,00	Biaya Penunjang Laboratorium IPA SMPN 3 SATAP Lk. Kalmas
		11.971.100,00	Biaya Penunjang TU SMPN 3 SATAP Lk. Kalmas
		29.927.800,00	Biaya Penunjang Laboratorium Komputer SMPN 3 SATAP Lk. Kalmas
2	Dinas Kesehatan	194.714.000,00	Pembangunan Selasar Rumah Sakit Pratama Batiling
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2.408.589.595,00	Lanjutan Rehabilitasi Atap Kantor Bupati
		206.079.454,00	Pembangunan Tribune Lapangan Mawa Balocci
		1.785.332.718,00	Rumah Jabatan Sekda
		407.445.559,34	Kantor Desa Bowong Cindea
		1.241.886.602,26	Pembangunan Kantor Perwakilan Pemda Pangkep di Lombok
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	99.533.700,00	Belanja Perencanaan Bangunan Gedung Layanan Perpustakaan
Jumlah		7.604.784.128,60	

4. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp37.379.360,00 pada Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berupa Belanja Pemeliharaan Gedung MPP.

5. Reklasifikasi dari Belanja Tidak Terduga ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp210.900.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	82.000.000,00	Perbaikan Atap Pasar Sentral Segeri Kecamatan Segeri
		128.900.000,00	Perbaikan Atap Bangunan UPT SDN 32 Tumampua VI Kecamatan Pangkajene
Jumlah		210.900.000,00	



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

6. Hibah masuk sebesar Rp7.083.700.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD Penerima Hibah	Pemberi Hibah	Nilai (Rp)
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	Hibah dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia berupa Bangunan Rumah Produksi Bersama, Peralatan dan Mesin Dana Tugas Pembantuan Kementerian Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Nomor 16/Prj/BN.06/V/2024 tanggal 15-05-2024	7.083.700.000,00
Jumlah			7.083.700.000,00

7. Belanja yang diakui Aset bersumber dari utang sebesar Rp920.250.802,67 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Kesehatan	1.215.500,00	Jasa Pengawasan Teknis Pembangunan Penambahan Ruang Gedung Rehabilitasi Medik/CSSD/Farmasi/Laundry RS Batiling
2	Rumah Sakit Umum Batara Siang	5.150.000,00	Honor PPK (Pembangunan Gedung Nicu, CT Scan, Cathlab dan Cytotoxic)
		124.649.752,00	Pembangunan Ruang Cathlab RSUD Batara Siang (Utang DAK Fisik 2024)
		66.012.422,00	Pembangunan Ruang Nicu RSUD Batara Siang (Utang DAK Fisik 2024)
		66.146.519,00	Pembangunan Ruang Cytotoxic RSUD Batara Siang (Utang DAK Fisik 2024)
		47.900.671,00	Pembangunan Ruang CT Scan RSUD Batara Siang (Utang DAK Fisik 2024)
		1.463.257,00	Jasa Perencanaan Teknis Pembangunan Ruang Nicu RSUD Batara Siang (Utang DAK Fisik 2024)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	227.525.720,00	Rehabilitasi atap Kantor Bupati
		57.380.000,00	Lanjutan Pembangunan Gedung Kesenian
		6.875.050,00	Lanjutan Pembangunan Tribune Lapangan Mawa Balocci
		75.682.005,00	Rehabilitasi Stadion Andi Mappe
		65.819.051,20	Rehabilitasi Pagar Kantor Bupati
		67.398.450,00	Pembangunan Menara Jam Kota Pangkep
4	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	17.200.800,00	Pembayaran Rehabilitasi Gedung Aula Mattampa Inn
		6.000.000,00	Jasa Pengawasan Rehabilitasi Gedung Aula Mattampa Inn
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	75.408.925,47	Perbaikan Sarana dan Prasarana Pasar Sentral Pangkajene
		8.422.680,00	Jasa Pengawasan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pasar Sentral Pangkajene
Jumlah		920.250.802,67	

8. Mutasi aset masuk antar SKPD sebesar Rp6.363.192.354,47 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	128.900.000,00	Rehabilitasi Atap SDN 32 Tumampua berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 820/456.B/BPBD/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	91.158.300,00	Pembangunan Gedung Pertemuan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 000.1.4/134/BAST/Distan tanggal 31 Desember 2024
		800.000,00	Honorarium PPK Pembangunan Gedung Pertemuan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 000.1.4/134/BAST/Distan tanggal 31 Desember 2024
		4.000.000,00	Jasa Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Pertemuan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 000.1.4/134/BAST/Distan tanggal 31 Desember 2024
		3.000.000,00	Jasa Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Pertemuan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 000.1.4/134/BAST/Distan tanggal 31 Desember 2024



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
		29.767.700,00	Pembangunan Garasi berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 000.1.4/134/BAST/Distan tanggal 31 Desember 2024
		70.246.500,00	Uang Muka 50% Pembangunan Tangga Galeri Dekranasda berdasarkan Berita Acara Mutasi Barang Milik Daerah Nomor: 500.2.2/1015/XII/Dinkopdatin tanggal 31 Desember 2024
		70.246.500,00	Uang Muka 100% Pembangunan Tangga Galeri Dekranasda berdasarkan Berita Acara Mutasi Barang Milik Daerah Nomor: 500.2.2/1015/XII/Dinkopdatin tanggal 31 Desember 2024
		4.220.000,00	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Tangga Galeri Dekranasda berdasarkan Berita Acara Mutasi Barang Milik Daerah Nomor: 500.2.2/1015/XII/Dinkopdatin tanggal 31 Desember 2024
		2.821.000,00	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tangga Galeri Dekranasda berdasarkan Berita Acara Mutasi Barang Milik Daerah Nomor: 500.2.2/1015/XII/Dinkopdatin tanggal 31 Desember 2024
		49.000.000,00	Mesin Geser Pintu Pagar Otomatis berdasarkan Berita Acara Mutasi Barang Milik Daerah Nomor: 175/367.a/XII/Set-DPRD/2024 tanggal 31 Desember 2024
3	Dinas Sosial	53.160.000,00	Rehabilitasi Masjid Andi Malarangeng Kantor Bupati berdasarkan Berita Acara Mutasi Barang Milik Daerah Nomor: 600 / 823/ PUTR tanggal 23 Desember 2024
4	Sekretariat Daerah	99.251.700,00	Pemeliharaan Rehabilitasi/Sarana dan Prasarana Gedung Kantor C (Ruang Kerja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) berdasarkan BAST Nomor: 082/282/Bappelitbangda tanggal 30 Agustus 2024 tentang Mutasi Barang Milik Daerah
		47.034.018,00	Lanjutan Selasar Lantai Dua Gedung Sekretariat Daerah Ke Bappelitbangda berdasarkan Berita Acara Mutasi Barang Milik Daerah Nomor: 600/826/PUTR tanggal 26 Desember 2024
		4.612.198.120,47	Lanjutan Rehabilitasi Atap Kantor Bupati berdasarkan Berita Acara Mutasi Barang Milik Daerah Nomor: 600/826/PUTR tanggal 26 Desember 2024
		196.850.259,00	Lanjutan Rehabilitasi Islamic Center berdasarkan Berita Acara Mutasi Barang Milik Daerah Nomor: 600/826/PUTR tanggal 26 Desember 2024
		213.092.272,00	Interior Ruang Pola Kantor Bupati berdasarkan Berita Acara Mutasi Barang Milik Daerah Nomor: 600/826/PUTR tanggal 26 Desember 2024
		102.487.323,00	Rehabilitasi Rumah Singgah Masyarakat Kepulauan di Makassar berdasarkan Berita Acara Mutasi Barang Milik Daerah Nomor: 600/826/PUTR
5	Kecamatan Pangkajene	95.741.409,00	Rehabilitasi Kantor Lurah Sibatua berdasarkan Berita Acara Mutasi Barang Nomor: 600 / 831/ PUTR tanggal 27 Desember 2024
6	Kecamatan Balocci	157.332.581,00	Rehabilitasi Kantor Lurah Tonasa berdasarkan Berita Acara Mutasi Barang Nomor: 600 / 832/ PUTR tanggal 27 Desember 2024
7	Kecamatan Labakkang	53.129.346,00	Rehabilitasi Baruga Kelurahan Labakkang berdasarkan Berita Acara Mutasi Barang Nomor: 600 / 830/ PUTR tanggal 27 Desember 2024
8	Kecamatan Ma'rang	196.755.326,00	Lanjutan Rehabilitasi Kantor Camat Ma'rang berdasarkan Berita Acara Mutasi Barang Nomor: 600 / 829/ PUTR tanggal 27 Desember 2024
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	82.000.000,00	Perbaikan Atap Sentral Segeri Kecamatan Segeri berdasarkan Berita Acara Mutasi Barang Milik Daerah Nomor: 820/456.a/BPBD/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024
Jumlah		6.363.192.354,47	

Adapun penjelasan masing-masing dari pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2024 yaitu:



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

1. Reklasifikasi ke Aset Tetap Tanah dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berupa Pematangan Lahan Kawasan Mattampa sebesar Rp578.364.178,73.
2. Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp95.956.491,35 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	86.144.063,00	Biaya Penunjang Mebel SD SMP
2	Dinas Kesehatan	4.550.000,00	Honorarium PPK Pengadaan Pusling Roda 2
		3.200.000,00	Honorarium PPK Pengadaan Alat Kesehatan
3	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	2.062.428,35	Pengadaan Papan Nama Rumah Arajang Segeri
Jumlah		95.956.491,35	

3. Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.749.668.280,93 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	180.400.000,00	Pembayaran 100% Fisik dan 5 % Pemeliharaan Pemasangan Paving Blok SDN 21 JENNAE (DAU) Tahun Anggaran 2024
		9.482.000,00	Pembayaran 100% Jasa Konsultan Perencanaan Paving Blok SDN 21 JENNAE dan Penimbunan Halaman Sekolah SDN 59 PANGKAJENE (DAU) Tahun Anggaran 2024
		12.425.400,00	Pembayaran 100% Jasa Konsultan Pengawasan Paving Blok SDN 21 JENNAE dan Penimbunan Halaman Sekolah SDN 59 PANGKAJENE (DAU) Tahun Anggaran 2024
		45.000.000,00	Pembayaran 100% dan 5% Pemeliharaan Penimbunan Halaman Sekolah SDN 59 Pangkajene Tahun Anggaran 2024 (DAU)
		2.000.000,00	Pembayaran 100% Jasa Perencanaan Pemasangan Paving Blok SMPN 1 MINASATENE (DAU) Tahun Anggaran 2024
		2.500.000,00	Pembayaran 100% Jasa Pengawasan Pemasangan Paving Blok SMPN 1 MINASATENE (DAU) Tahun Anggaran 2024
		44.736.000,00	Pembayaran 100% Fisik dan 5% Pemeliharaan Pemasangan Paving Blok SMPN 1 MINASATENE (DAU) Tahun Anggaran 2024
		133.800.000,00	Pembayaran 100% Fisik dan 5% Pemasangan Paving Blok
		65.701.000,00	Pembayaran Uang Muka 25% Pembangunan Toilet (Jamban)
		118.261.800,00	Pembayaran 45% (Tahap II) Pembangunan Toilet (Jamban) beserta Sanitasinya
		78.841.200,00	Pembayaran Fisik 100% dan Pemeliharaan 5% Pembangunan Toilet (Jamban) SPNF SKB BUNGORO
		5.000.000,00	Pembayaran 100% Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Toilet (Jamban) SKB PANGKEP (DAK) Tahun Anggaran 2024
		3.927.000,00	Jasa Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jamban
		2.477.000,00	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Biaya Penunjang Rapat Koordinasi DAK SKB Tahun 2024 Bidang Pendidikan Non Formal (PNF)
		2.550.000,00	Honorarium Tim Penugasan Kelompok Kerja (POKJA)
		19.566.050,00	Uang Muka 25% Rehabilitasi Toilet (Jamban) SMPN 2 Bungoro



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
		35.218.890,00	Pembayaran 45% (Tahap II) Rehabilitasi Toilet (Jamban) SMPN 2 Bungoro
		23.479.260,00	Pembayaran 100% Fisik dan 5% Pemeliharaan Rehabilitasi Toilet (Jamban) SMPN 2 Bungoro
		33.300.000,00	Biaya Penunjang SD
		3.500.000,00	Biaya Penunjang SMP
2	Dinas Kesehatan	1.479.945.880,00	Pengadaan Sumur Bor Rumah Sakit Pratama Batiling
		4.550.000,00	Honorarium PPK Pengadaan Air Bersih
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	196.967.700,00	Paving Blok Halaman Kantor Pertanian
4	Dinas Lingkungan Hidup	211.086.650,00	Jembatan Timbang dan Gardu
5	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	34.952.450,93	Lampu Tenaga Surya Rumah Arajang Segeri
Jumlah		2.749.668.280,93	

4. Reklasifikasi ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp19.702.595.293,85 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	204.387.250,00	Pembayaran Uang Muka 25 % Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 33 JOLLO (DAK) Tahun Anggaran 2024
		33.835.675,00	Pembayaran Uang Muka 25 % Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SDN 33 JOLLO (DAK) Tahun Anggaran 2024
		13.585.288,00	Pembayaran Uang Muka 25 % Rehabilitasi Ruang Kepala Sekolah SDN 33 JOLLO (DAK) Tahun Anggaran 2024
		367.897.050,00	Pembayaran 45% (Tahap II) Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 33 JOLLO (DAK) Tahun Anggaran 2024
		24.453.518,00	Pembayaran 45% (Tahap II) Rehabilitasi Ruang Kepala Sekolah/Pimpinan SDN 33 JOLLO (DAK) Tahun Anggaran 2024
		60.904.215,00	Pembayaran 45% (Tahap II) Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SDN 33 JOLLO (DAK) Tahun Anggaran 2024
		159.980.000,00	Pembayaran 90% Fisik (Tahap III) Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 33 JOLLO (DAK) Tahun Anggaran 2024
		13.530.064,00	Pembayaran 95% Fisik (Tahap III) Rehab Ruang Kepala Sekolah/Pimpinan SDN 33 JOLLO (DAK) Tahun Anggaran 2024
		33.669.175,00	Pembayaran 95% Fisik (Tahap III) Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SDN 33 JOLLO (DAK) Tahun Anggaran 2024
		50.479.205,00	Biaya Umum SDN 33 JOLLO
2	Dinas Kesehatan	3.000.000,00	Biaya Penunjang Jamban SDN 33 JOLLO
		8.000.000,00	Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Poskesdes Tabo-tabo
3	Rumah Sakit Umum Batara Siang	5.816.500,00	Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Poskesdes Tabo-tabo
		4.560.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan (Pembangunan Gedung NICU, CT Scan, Cytotoxic dan Chatlab)
		4.080.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (Pembangunan Gedung NICU, CT Scan, Cytotoxic dan Chatlab)
		78.937.650,00	Jasa Perencanaan Teknis Pembangunan Ruang Cathlab RSUD Batara Siang (DAK Fisik 2024)
		53.063.600,00	Jasa Pengawasan Teknis Pembangunan Ruang Cathlab RSUD Batara Siang (DAK Fisik 2024)
		2.287.049.883,00	Pembangunan Ruang Cathlab RSUD Batara Siang (DAK Fisik 2024)



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
		27.801.893,00	Jasa Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Ruang NICU RSUD Bataara Siang (DAK Fisik 2024)
		19.829.040,00	Jasa Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Ruang NICU RSUD Bataara Siang (DAK Fisik 2024)
		873.754.837,00	Pembangunan Gedung Ruang NICU RSUD Bataara Siang (DAK Fisik 2024)
		24.724.695,00	Jasa Perencanaan Teknis Pembangunan Ruang CT Scan RSUD Bataara Siang (DAK Fisik 2024)
		16.694.400,00	Jasa Pengawasan Teknis Ruang CT Scan RSUD Bataara Siang (DAK Fisik 2024)
		710.450.867,00	Pembangunan Ruang CT Scan RSUD Bataara Siang (DAK Fisik 2024)
		41.818.695,00	Jasa Perencanaan Teknis Pembangunan Ruang Ciytotoxic RSUD Bataara Siang (DAK Fisik 2024)
		27.888.700,00	Jasa Pengawasan Teknis Pembangunan Ruang Ciytotoxic RSUD Bataara Siang (DAK Fisik 2024)
		1.210.716.761,00	Pembangunan Ruang Ciytotoxic RSUD Bataara Siang (DAK Fisik 2024)
		5.150.000,00	Honor PPK (Pembangunan Gedung Nicu, CT Scan, Cathlab dan Cytotoxic (Utang BLUD 2024))
		124.649.752,00	Pembangunan Ruang Cathlab RSUD Bataara Siang (Utang DAK Fisik 2024)
		66.012.422,00	Pembangunan Ruang Nicu RSUD Bataara Siang (Utang DAK Fisik 2024)
		66.146.519,00	Pembangunan Ruang Cytotoxic RSUD Bataara Siang (Utang DAK Fisik 2024)
		47.900.671,00	Pembangunan Ruang CT Scan RSUD Bataara Siang (Utang DAK Fisik 2024)
		1.463.257,00	Jasa Perencanaan Teknis Pembangunan Ruang Nicu RSUD Bataara Siang (Utang DAK Fisik 2024)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	196.454.794,00	Lanjutan Rehabilitasi Kantor Kelurahan Ma'rang
		390.169.463,00	Rehabilitasi Kantor Desa Boddie
		189.752.103,00	Lanjutan Pagar Gedung Pramuka
		215.211.748,00	Lanjutan Pembangunan Desa Bara Batu
		491.598.993,00	Lanjutan Pembangunan Gedung Assesment BKPSDM
		199.218.519,00	Lanjutan Pembangunan Kantor Desa Bulu Tellue
		348.019.420,00	Lanjutan Pembangunan Kantor Ex Dinas Pemadam Kebakaran di Kota Pangkajene
		199.082.499,00	Pembangunan Lantai 2 gedung Ikatan Bidan Indonesia (IBI)
		195.124.891,00	Lanjutan Pembangunan Gedung Bulutangkis Indoor Balocci
		1.153.401.504,00	Lanjutan Pembangunan Gedung Kesenian
		195.634.649,00	Lanjutan Pembangunan Gedung Serbaguna Pulau Balang Lompo
		194.874.455,00	Lanjutan Pembangunan Asrama IPPM Pangkep di Pare-Pare
		194.985.309,00	Lanjutan Pembangunan Asrama IPPM Pangkep Jl. Manuruki
		2.146.348.500,00	Pembangunan Menara Jam Kota Pangkep
		2.142.307.700,00	Rehabilitasi Stadion Andi Mappe
		57.380.000,00	Lanjutan Pembangunan Gedung Kesenian
		75.682.005,00	Rehabilitasi Stadion Andi Mappe
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	65.819.051,20	Rehabilitasi Pagar Kantor Bupati
		2.474.021.597,18	Rehabilitasi Pagar Kantor Bupati
		67.398.450,00	Pembangunan Menara Jam Kota Pangkep
		524.888.112,00	Uang Muka 30% Perbaikan Sarana dan Prasarana Pasar Sentral Pangkajene
		612.369.464,00	Pembayaran Termin I 65% Perbaikan Sarana dan Prasarana Pasar Sentral Pangkajene
		437.406.760,00	Pembayaran Termin II 90% Perbaikan Sarana dan Prasarana Pasar Sentral Pangkajene



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
		75.804.120,00	Pembayaran 90% Jasa Konsultasi Pengawasan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pasar Sentral Pangkajene
		3.900.000,00	Jasa Tenaga Ahli Teknis Perbaikan Sarana dan Prasarana Pasar Sentral Pangkajene Bulan Juni-Desember 2024
		99.678.000,00	Jasa Konsultansi Perencanaan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pasar Sentral Pangkajene
		75.408.925,47	Perbaikan Sarana dan Prasarana Pasar Sentral Pangkajene
		8.422.680,00	Jasa Pengawasan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pasar Sentral Pangkajene
Jumlah		19.702.595.293,85	

5. Reklasifikasi ke Aset Lainnya dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.273.086.312,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	50.080.325.00	Rumah Dinas SDN 19 Malewang Kondisi Rusak Berat
		13.680.000,00	Rumah Dinas SDN 42 Biraeng Kondisi Rusak Berat
		43.143.200,00	Rumah Dinas SDN 8 Paccelang Kondisi Rusak Berat
		10.260.000,00	Rumah Dinas SDN 50 Bonto Panno Kondisi Rusak Berat
		9.882.000,00	Rumah Dinas SDN 38 Bonto Perak Kondisi Rusak Berat
2	Dinas Kesehatan	263.400.000,00	Bangunan Gedung Puskesmas Sarappo Kondisi Rusak Berat
		123.275.000,00	Rumah Dokter Puskesmas Sarappo Kondisi Rusak Berat
		72.189.770,00	Perumahan Paramedis Puskesmas Sarappo Kondisi Rusak Berat
		1.902.003.175,00	Bangunan Gedung Puskesmas Kota Pangkajene Kondisi Rusak Berat
		1.139.357.142,00	Bangunan Gedung Ugd dan Ruang Rawat Inap Puskesmas Segeri Kondisi Rusak Berat
3	Rumah Sakit Umum Batara Siang	134.057.000,00	Bangunan Gedung Rumah Sakit Umum (Ruang Radiologi) Kondisi Rusak Berat
		511.758.700,00	Bangunan Gedung Rumah Sakit Umum (Pengembangan Ruang Bayi) Kondisi Rusak Berat
Jumlah		4.273.086.312,00	

6. Reklasifikasi ke Belanja Barang yang dijual/diserahkan kepada masyarakat pada Kecamatan Pangkajene sebesar Rp65.000.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 128/BASTB/KT/XI/2024 tanggal 16 Desember 2024 (Pembangunan Tempat Wudhu Mesjid RW 4 Toli-Toli)
7. Koreksi Pencatatan pada Rumah Sakit Batara Siang sebesar Rp1.460.319.037,00 berupa Belanja Pengadaan Ipal.
8. Belanja yang sudah diakui Aset bersumber dari pembayaran utang sebesar Rp3.298.664.806,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	26.472.750,00	Pembayaran 100% dan 5 % Pemeliharaan Pembangunan Ruang UKS SDN 1 SABARU (Utang Pihak Ketiga Tahun 2023) (DAK) Tahun Anggaran 2024
		73.483.950,00	Pembayaran 100% dan 5 % Pemeliharaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SDN 1 SABARU (Utang Pihak Ketiga Tahun 2023) (DAK) Tahun Anggaran 2024
		165.528.000,00	Pembayaran Fisik 100% dan Pemeliharaan 5% (Utang pihak Ketiga Tahun Anggaran 2023)
		4.900.000,00	Pembayaran 100% Jasa Pengawasan Pembangunan Ruang Kantor SDN 34 LOKKASALE (Utang Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2023) DAU Tahun Anggaran 2024



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
		17.527.700,00	Pembayaran Fisik 100% dan Pemeliharaan 5% (Utang pihak Ketiga Tahun Anggaran 2023)
		131.740.000,00	Pembayaran Fisik 100% dan Pemeliharaan 5% (Utang pihak Ketiga Tahun Anggaran 2023)
		69.191.850,00	Pembayaran Fisik 100% dan 5% (Utang Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2023)
		54.000.000,00	Pembayaran 100% Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Ibadah dan Rehabilitasi Pagar SD (Utang Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2023) DAU Tahun Anggaran 2024
		5.000.000,00	Pembayaran 100% Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Ibadah dan Rehabilitasi Pagar SD (Utang Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2023) DAU Tahun Anggaran 2024
		69.070.950,00	Pembayaran 100% dan 5 % Pemeliharaan Pembangunan Ruang Guru SDN 1 SABARU (Utang Pihak Ketiga tahun 2023) (DAK) Tahun Anggaran 2024
		33.900.000,00	Pembayaran 100% Jasa Pengawasan Rehabilitasi Pagar SDN 11 Pasui dan Pembangunan Gedung Ibadah (Utang Pihak Ketiga T.A 2023) DAU Tahun Anggaran 2024
		6.000.000,00	Pembayaran 100% Jasa Pengawasan Rehabilitasi Pagar SDN 11 Pasui dan Pembangunan Gedung Ibadah (Utang Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2023) DAU Tahun Anggaran 2024
		116.681.600,00	Pembayaran Fisik 100% dan Pemeliharaan 5% Pembangunan Gedung Ibadah SDN 19 GELLENGE (Utang pihak Ketiga Tahun Anggaran 2023) DAU Tahun Anggaran 2024
		3.900.000,00	Pembayaran 100% Jasa Perencanaan Pembangunan Ruang Kantor SDN 34 LOKKASAILE (Utang Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2023) DAU Tahun Anggaran 2024
		3.500.000,00	Pembayaran 100% Jasa Perencanaan Pembangunan Ruang UKS SDN 38 BONTO PERAK (Utang Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2023) DAU Tahun Anggaran 2024
		4.000.000,00	Pembayaran 100% Jasa Pengawasan Pembangunan Ruang UKS SDN 38 BONTO PERAK (Utang Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2023) DAU Tahun Anggaran 2024
		82.490.000,00	Pembayaran Fisik 100% dan 5% (Utang Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2023)
		3.500.000,00	Pembayaran 100% Jasa Perencanaan Peningkatan Lapangan SDN 57 PANDANG LAU (Utang Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2023) DAU Tahun Anggaran 2024
		89.900.000,00	Pembayaran Fisik 100% dan Pemeliharaan 5% (Utang Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2023)
		34.480.000,00	Pembayaran 100% Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Ibadah dan Drainase SMPN 1 Pangkajene (Utang Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2023)
		89.900.000,00	Pembayaran Fisik 100% dan Pemeliharaan 5% (Utang pihak Ketiga Tahun Anggaran 2023) DAU Tahun Anggaran 2024
		156.529.800,00	Pembayaran Fisik 100% dan Pemeliharaan 5% (Utang pihak Ketiga Tahun Anggaran 2023)
		4.900.000,00	Pembayaran 100% Jasa Pengawasan Peningkatan Lapangan SDN 57 PANDANG LAU (Utang Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2023) DAU Tahun Anggaran 2024
2	Dinas Kesehatan	49.990.000,00	Rehabilitasi Poskesdes Alesipitto PKM Padanglampe
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.499.892.980,00	Rehabilitasi Atap Kantor Bupati
		94.900.000,00	Pembangunan Pagar dan Penataan Halaman Kantor Lurah Kelurahan Labakkang
4	Dinas Lingkungan Hidup	311.633.226,00	Bangunan Gedung Pemeliharaan



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
5	Dinas Sosial	46.365.000,00	Pembangunan Tugu Taman Makam Pahlawan (TMP) Mangilu (Utang Pemda 2023)
		46.287.000,00	Rehabilitasi Nisan Taman Makam Pahlawan (TMP) Mangilu (Utang Pemda 2023)
		1.500.000,00	Jasa Pengawasan Pembangunan Taman Makam Pahlawan (TMP) Mangilu (Utang Pemda)
		1.500.000,00	Jasa Pengawasan Teknis Rehabilitasi Nisan Taman Makam Pahlawan (TMP) Mangilu (Utang Pemda)
Jumlah		3.298.664.806,00	

9. Mutasi Aset keluar antar SKPD sebesar Rp6.363.192.354,47 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	53.160.000,00	Berdasarkan Berita Acara Mutasi Barang Milik Daerah Nomor: 600/823/ PUTR tanggal 23 Desember 2024 berupa Rehabilitasi Mesjid Andi Malarangeng Kantor Bupati
		47.034.018,00	Berdasarkan Berita Acara Mutasi Barang Milik Daerah Nomor: 600/826/PUTR tanggal 26 Desember 2024 berupa Lanjutan Selasar Lantai Dua Gedung Sekda Ke Bappelitbangda
		4.612.198.120,47	Berdasarkan Berita Acara Mutasi Barang Milik Daerah Nomor: 600/826/PUTR tanggal 26 Desember 2024 berupa Lanjutan Rehabilitasi Atap Kantor Bupati
		196.850.259,00	Berdasarkan Berita Acara Mutasi Barang Milik Daerah Nomor: 600/826/PUTR 26 Desember 2024 berupa Lanjutan Rehabilitasi Islamic Center
		213.092.272,00	Berdasarkan Berita Acara Mutasi Barang Milik Daerah Nomor: 600/826/PUTR tanggal 26 Desember 2024 berupa Interior Ruang Pola Kantor Bupati
		102.487.323,00	Berdasarkan Berita Acara Mutasi Barang Milik Daerah Nomor: 600/826/PUTR berupa Rehabilitasi Rumah Singgah Masyarakat Kepulauan di Makassar
		196.755.326,00	Berdasarkan Berita Acara Mutasi Barang Nomor: 600 / 829/ PUTR tanggal 27 Desember 2024 berupa Lanjutan Rehabilitasi Kantor Camat Ma'rang
		53.129.346,00	Berdasarkan Berita Acara Mutasi Barang Nomor: 600 / 830/ PUTR tanggal 27 Desember 2024 berupa Rehabilitasi Baruga Kel. Labakkang
		95.741.409,00	Berdasarkan Berita Acara Mutasi Barang Nomor: 600 / 831/ PUTR tanggal 27 Desember 2024 berupa Rehabilitasi Kantor Lurah Sibatua
2	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	157.332.581,00	Berdasarkan Berita Acara Mutasi Barang Nomor: 600 / 832/ PUTR tanggal 27 Desember 2024 berupa Rehabilitasi Kantor Lurah Tonasa
		99.251.700,00	Pemeliharaan Rehabilitasi / Sarana dan Prasarana Gedung Kantor C (Ruang Kerja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) berdasarkan BAST Nomor: 082/282/Bappelitbangda. tanggal 30 Agustus 2024 tentang Mutasi Barang Milik Daerah
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	82.000.000,00	Berdasarkan Berita Acara Mutasi Barang Milik Daerah Nomor: 820/456.a/BPBD/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 (Perbaikan Atap Pasar Sentral Segeri Kecamatan Segeri)
		128.900.000,00	Berdasarkan Berita Acara Mutasi Barang Milik Daerah Nomor: 820/456.a/BPBD/XII/2024. tanggal 31 Desember 2024 (Perbaikan Atap Bangunan UPT SDN 32 Tumampung VI Kelurahan Padoangdoangan Kecamatan Pangkajene)



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
4	Sekretariat DPRD	49.000.000,00	Berdasarkan Berita Acara Mutasi Barang Milik Daerah Nomor: 175/367.a/XII/Set-DPRD/2024 tanggal 31 Desember 2024 berupa Mesin Geser Pintu Pagar Otomatis
5	Dinas Pertanian	91.158.300,00	Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 000.1.4/134/BAST/Distan tanggal 31 Desember 2024 (Pembangunan Gedung Pertemuan)
		800.000,00	Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 000.1.4/134/BAST/Distan. tanggal 31 Desember 2024 (Honorarium PPK Pembangunan Gedung Pertemuan)
		4.000.000,00	Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 000.1.4/134/BAST/Distan. tanggal 31 Desember 2024 (Jasa Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Pertemuan)
		3.000.000,00	Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 000.1.4/134/BAST/Distan. tanggal 31 Desember 2024 (Jasa Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Pertemuan)
		29.767.700,00	Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 000.1.4/134/BAST/Distan tanggal 31 Desember 2024 (Pembangunan Garasi)
6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	70.246.500,00	Berdasarkan Berita Acara Mutasi Barang Milik Daerah Nomor: 500.2.2/1015/XII/Dinkopdatin tanggal 31 Desember 2024 (Uang Muka 50% Pembangunan Tangga Galeri Dekranasda)
		70.246.500,00	Berdasarkan Berita Acara Mutasi Barang Milik Daerah Nomor: 500.2.2/1015/XII/Dinkopdatin tanggal 31 Desember 2024 (Uang Muka 100% Pembangunan Tangga Galeri Dekranasda)
		4.220.000,00	Berdasarkan Berita Acara Mutasi Barang Milik Daerah Nomor: 500.2.2/1015/XII/Dinkopdatin tanggal 31 Desember 2024 (Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Tangga Galeri Dekranasda)
		2.821.000,00	Berdasarkan Berita Acara Mutasi Barang Milik Daerah Nomor: 500.2.2/1015/XII/Dinkopdatin tanggal 31 Desember 2024 (Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tangga Galeri Dekranasda)
Jumlah		6.363.192.354,47	

7.5.3.3.d	Jalan Irigasi dan Jaringan	2024	2023
		Rp2.514.619.243.433,95	Rp2.440.488.664.108,83

Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset Tetap ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah. Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan Jalan, Irigasi dan Jaringan milik Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.514.619.243.433,95 dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024
Catatan atas Laporan Keuangan

Tabel 7.5.3.3.d Rincian Aset Tetap - Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2024	Mutasi	Saldo Akhir 31 Desember 2024	Kenaikan/Penurunan	
					Nilai	%
1	Jalan dan Jembatan	2.440.488.664.108,83	-74.130.579.325,12	2.514.619.243.433,95	74.130.579.325,12	3,04
	Jumlah	2.440.488.664.108,83	(74.130.579.325,12)	2.514.619.243.433,95	74.130.579.325,12	3,04

Rincian terinci dapat dilihat pada *lampiran 14*

Dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 7.5.3.3.d.1 Rincian Mutasi Aset Tetap - Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo Awal 2024 (1)	2.440.488.664.108,83
Belanja Modal TA 2024 (2)	70.691.907.253,00
Reklasifikasi dari KIB B (3)	256.329.000,00
Reklasifikasi dari KIB C (4)	2.749.668.280,93
Reklasifikasi dari KIB F (5)	1.020.823.337,00
Reklasifikasi dari Belanja Tidak Terduga (6)	200.000.000,00
Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa (7)	1.450.784.000,00
Hibah (8)	1.670.242.170,00
Koreksi Pencatatan (9)	1.460.319.037,00
Saldo Awal 2024 hasil penambahan (10 = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9))	2.520.092.808.813,76
Reklasifikasi ke KIB B (11)	39.700.000,00
Reklasifikasi ke KIB C (12)	181.007.850,00
Reklasifikasi ke KIB F (13)	460.929.974,81
Reklasifikasi ke Aset Lainnya (14)	25.000.000,00
Reklasifikasi ke Belanja Barang yang Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (15)	45.300.000,00
Belanja yang Sudah Diakui Aset Bersumber Dari Pembayaran Utang (16)	4.721.627.555,00
Saldo Akhir 2024 (17 = 11 - (12 + 13 + 14 + 15 + 16))	2.514.619.243.433,95
	2.514.619.243.433,95

Rincian terinci Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada *Lampiran 14*.

Adapun penjelasan masing-masing dari penambahan nilai Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi Tahun 2024 yaitu:

1. Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi Tahun 2024 sebesar Rp70.691.907.253,00.
2. Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi sebesar Rp256.329.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Rumah Sakit Umum Batara Siang	199.500.000,00	Rehabilitasi IPAL (BLUD 2024)
		19.059.000,00	Rehabilitasi IPAL (Utang BLUD 2024)
2	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	14.780.000,00	Jaringan Instalasi Air Bersih



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
		5.000.000,00	Wastafel
3	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	17.990.000,00	Instalasi Air Bersih Kantor
Jumlah		256.329.000,00	

3. Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi sebesar Rp2.749.668.280,93 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	180.400.000,00	Pembayaran 100% Fisik dan 5 % Pemeliharaan Pemasangan Paving Blok SDN 21 JENNAE (DAU) Tahun Anggaran 2024
		9.482.000,00	Pembayaran 100% Jasa Konsultan Perencanaan Paving Blok SDN 21 JENNAE dan Penimbunan Halaman Sekolah SDN 59 PANGKAJENE (DAU) Tahun Anggaran 2024
		12.425.400,00	Pembayaran 100% Jasa Konsultan Pengawasan Paving Blok SDN 21 JENNAE dan Penimbunan Halaman Sekolah SDN 59 PANGKAJENE (DAU) Tahun Anggaran 2024
		45.000.000,00	Pembayaran 100% dan 5 % Pemeliharaan Penimbunan Halaman Sekolah SDN 59 Pangkajene Tahun Anggaran 2024 (DAU)
		2.000.000,00	Pembayaran 100% Jasa Perencanaan Pemasangan Paving Blok SMPN 1 MINASATENE (DAU) Tahun Anggaran 2024
		2.500.000,00	Pembayaran 100% Jasa Pengawasan Pemasangan Paving Blok SMPN 1 MINASATENE (DAU) Tahun Anggaran 2024
		44.736.000,00	Pembayaran 100% Fisik dan 5 % Pemeliharaan Pemasangan Paving Blok SMPN 1 MINASATENE (DAU) Tahun Anggaran 2024
		133.800.000,00	Pembayaran 100% Fisik dan 5% Pemasangan Paving Blok
		65.701.000,00	Pembayaran Uang Muka 25 % Pembangunan Toilet (Jamban)
		118.261.800,00	Pembayaran 45% (Tahap II) Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya
		78.841.200,00	Pembayaran Fisik 100% dan Pemeliharaan 5% Pembangunan Toilet (Jamban) SPNF SKB BUNGORO
		5.000.000,00	Pembayaran 100% Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Toilet (Jamban) SKB PANGKEP (DAK) Tahun Anggaran 2024
		3.927.000,00	Jasa Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jamban
		2.477.000,00	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Biaya Penunjang Rapat Koordinasi DAK SKB Tahun 2024 Bidang Pendidikan Non Formal (PNF)
		2.550.000,00	Honorarium Tim Penugasan Kelompok Kerja (POKJA)
		19.566.050,00	Uang Muka 25 % Rehabilitasi Toilet (Jamban) SMPN 2 Bungoro
		35.218.890,00	Pembayaran 45% (Tahap II) Rehabilitasi Toilet (Jamban) SMPN 2 Bungoro
		23.479.260,00	Pembayaran 100% Fisik dan 5 % Pemeliharaan Rehabilitasi Toilet (Jamban) SMPN 2 Bungoro
2	Dinas Kesehatan	33.300.000,00	Biaya Penunjang SD
		3.500.000,00	Biaya Penunjang SMP
2	Dinas Kesehatan	1.479.945.880,00	Pengadaan Sumur Bor Rumah Sakit Pratama Batiling
		4.550.000,00	Honorarium PPK Pengadaan Air Bersih
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	196.967.700,00	Paving Blok Halaman Kantor Pertanian
4	Dinas Lingkungan Hidup	211.086.650,00	Jembatan Timbang dan Gardu
5	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	34.952.450,93	Lampu Tenaga Surya Rumah Arajang Segeri
Jumlah		2.749.668.280,93	



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

4. Reklasifikasi dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi sebesar Rp1.020.823.337,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	75.573.250,00	Rehabilitasi Toilet (Jamban) SMPN 13 Kecamatan Lk. Kalmas
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	101.582.500,00	Studi Hidrologi dan Pemetaan Geospasial 2023
3	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	843.667.587,00	Pengadaan dan pemasangan PJU jalan poros Kabupaten Pangkep
Jumlah		1.020.823.337,00	

5. Reklasifikasi dari Belanja Tidak Terduga ke Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp200.000.000,00 berupa Pembangunan Tanggul Penahan Tanah Panaikang Kelurahan Bonto Matene Kecamatan Segeri.
6. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa ke Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi sebesar Rp1.450.784.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Perhubungan	40.194.000,00	Pembayaran 30% Pemeliharaan Dermaga Pulau Polewali Desa Mattirololangeng. Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara
		84.760.000,00	Pembayaran 50% Pemeliharaan Dermaga Pulau Saugi Desa Mattiro Baji Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara
		40.191.000,00	Pembayaran uang muka 30% Pemeliharaan Dermaga Pulau Sarappo Caddi Desa Mattiro Langi Kecamatan Lk.Tupabbiring Utara
		40.155.000,00	Pembayaran uang muka 30% Pemeliharaan Dermaga Pulau Karanrang Desa Mattiro Bulu Kecamatan Lk.Tupabbiring Utara
		19.957.800,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Dermaga
		65.689.200,00	Perencanaan Teknis Pemeliharaan Dermaga
		84.760.000,00	Pembayaran MC 100% dan Retensi 5% Pemeliharaan Dermaga Pulau Saugi Desa Mattiro Baji Kecamatan Lk. Tupabbiring
		93.786.000,00	Pembayaran MC 100% dan Retensi 5% Pemeliharaan Dermaga Pulau Polewali Kecamatan Lk. Tupabbiring
		93.779.000,00	Pembayaran MC 100% dan Retensi 5% Pemeliharaan Dermaga Pulau Sarappo Caddi Kecamatan Lk. Tupabbiring
		66.930.000,00	Pembayaran Uang Muka 50% Pemeliharaan Dermaga Pulau Kulambing Desa Mattiro Uleng Kecamatan Lk. Tupabbiring
		40.137.000,00	Pembayaran Uang Muka 30% Pemeliharaan Dermaga Pulau Salebbo Desa Mattiro Walie Kecamatan Lk. Tupabbiring
		93.695.000,00	Pemeliharaan Dermaga Pulau Karanrang Desa Mattiro Bulu Kecamatan Lk. Tupabbiring
		134.210.000,00	Pemeliharaan Dermaga Pulau Lamputang Desa Mattiro Dolangeng Kecamatan Lk. Tupabbiring
		79.040.000,00	Pemeliharaan Dermaga Pulau Gondong Bali Desa Mattiro Matae Kecamatan Lk. Tupabbiring
		40.314.000,00	Pembayaran Uang Muka 30% Pemeliharaan Dermaga Utara Pajenekang Desa Mattiro Deceng Kecamatan Lk. Tupabbiring



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
		66.930.000,00	Pembayaran MC 100% dan Retensi 5% Pemeliharaan Dermaga Pulau Kulimbing Desa Mattiro Uleng Kecamatan Lk. Tupabiring
		93.653.000,00	Pembayaran MC 100% dan Retensi 5% Pemeliharaan Dermaga Pulau Salebbo Desa Mattiro Walie Kecamatan Lk. Tupabiring
		79.040.000,00	Pemeliharaan Dermaga Gondong Bali Desa Mattiro Matae Kecamatan Lk. Tupabbiring
		94.066.000,00	Pemeliharaan Dermaga Utara Pajenekang Desa Mattiro Deceng Kecamatan Lk. Tupabbiring
		19.547.000,00	Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis Pengelola Pelayanan Dermaga
		65.390.000,00	Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis Pengelola Pelayanan Dermaga
		7.480.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
		4.080.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
2	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	3.000.000,00	Pemasangan Instalasi Air
Jumlah		1.450.784.000,00	

7. Hibah masuk sebesar Rp1.670.242.170,00 berupa Prasarana Sarana Utilitas dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD Penerima Hibah	Pemberi Hibah	Nilai (Rp)
1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Hibah dari PT. Sulawesi Timur Abadi berupa Prasarana. Sarana dan Utilitas (PSU) Jalan Perumahan Segeri Abadi Residence. berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 593/21/DPKPP/PSU/VIII/2024. tanggal 02 Agustus 2024	639.313.920,00
		Hibah dari PT. Sulawesi Timur Abadi berupa Prasarana. Sarana dan Utilitas (PSU) Drainase Perumahan Segeri Abadi Residence. berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 593/21/DPKPP/PSU/VIII/2024. tanggal 02 Agustus 2024	189.000.000,00
		Hibah dari PT. Restu Amanah Bersahaja berupa Prasarana. Sarana dan Utilitas (PSU) Jalan Perumahan Kompleks Amanah. berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 593/23/DPKPP/PSU/X/2024. tanggal 31 Oktober 2024	135.990.000,00
		Hibah dari PT. Restu Amanah Bersahaja berupa Prasarana. Sarana dan Utilitas (PSU) Drainase Perumahan Kompleks Amanah. berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 593/23/DPKPP/PSU/X/2024. tanggal 31 Oktober 2024	27.506.250,00
		Hibah dari PT. Restu Amanah Bersahaja berupa Prasarana. Sarana dan Utilitas (PSU) Jalan Perumahan Sinar Abadi Residence. berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 593/24/DPKPP/PSU/XI/2024. tanggal 26 November 2024	607.092.000,00
		Hibah dari PT. Restu Amanah Bersahaja berupa Prasarana. Sarana dan Utilitas (PSU) Drainase Perumahan Sinar Abadi Residence. berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 593/24/DPKPP/PSU/XI/2024. tanggal 26 November 2024	71.340.000,00
Jumlah			1.670.242.170,00

8. Belanja yang diakui Aset bersumber dari utang sebesar Rp104.071.627,00 dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	65.818.500,00	Pembangunan Penahan Abrasi Pulau Pandangang Desa Mattiro Ujung. Kecamatan Lk Tupabbiring
		4.483.600,00	Drainase Kampung Pallapasang Kalabbirang
		26.971.527,00	Jalan Setapak Lingkungan Pulau Satanger
		6.798.000,00	Pengawasan Pembangunan Jalan Kampung Tanete Kecamatan Balocci
Jumlah		104.071.627,00	

9. Koreksi Pencatatan atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi pada Rumah Sakit Batara Siang sebesar Rp1.460.319.037,00 berupa Belanja Pengadaan Ipal.

Adapun penjelasan masing-masing dari pengurangan nilai Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi Tahun 2024 yaitu:

- Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi pada Kecamatan Pangkajene sebesar Rp39.700.000,00 berupa Pengadaan Container Sampah.
- Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi sebesar Rp181.007.850,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Perhubungan	168.590.000,00	Pembangunan Terminal Penumpang Maccini Baji (Shelter)
		5.871.500,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Terminal Penumpang Maccini Baji (Shelter)
		5.866.350,00	Pengawasan Teknis Pembangunan Terminal Penumpang Maccini Baji (Shelter)
		680.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah		181.007.850,00	

3. Reklasifikasi ke Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan dari Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi sebesar Rp460.929.974,81 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	73.682.380,00	Rehabilitasi Toilet (Jamban) SDN 33 JOLLO
2	Rumah Sakit Umum Batara Siang	199.500.000,00	Rehabilitasi IPAL (BLUD 2024)
		19.059.000,00	Rehabilitasi IPAL (Utang BLUD 2024)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	6.798.000,00	Pengawasan Pembangunan Jalan Kampung Tanete Kecamatan Balocci
		161.890.594,81	Pembangunan Jalan Kampung Tanete Kecamatan Balocci
Jumlah		460.929.974,81	

- Reklasifikasi ke Aset Lainnya dari Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi pada Rumah Sakit Batara Siang sebesar Rp25.000.000,00 berupa Taman Kolam Anggrek kondisi rusak berat.
- Reklasifikasi ke Belanja Barang yang Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat dari Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi sebesar Rp45.300.000,00 dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	44.500.000,00	Pengadaan Tenaga Surya 50 watt pulau Kalu kalukuang
		800.000,00	Belanja jasa honorarium pejabat pembuat (PPK) pengadaan Tenaga Surya 50 Watt kalu kalukuang
Jumlah		45.300.000,00	

6. Belanja yang sudah diakui Aset bersumber dari Pembayaran Utang sebesar Rp4.721.627.555,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	87.790.000,00	Pembayaran Fisik 100% dan 5% Paving Blok SMPN 3 Pangkajene(Utang Pihak ke Tiga Tahun Anggaran 2023)
		48.698.100,00	Pembayaran Fisik 100% dan Pemeliharaan 5% Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Perabotnya SMPN 2 Labakkang (DAK) Tahun Anggaran 2023
		29.982.000,00	Pembayaran Fisik 100% dan Pemeliharaan 5% (Utang pihak Ketiga Tahun Anggaran 2023) DAU Tahun Anggaran 2024 Pemasangan Paving Blok SMPN 2 BALOCCI
		38.325.000,00	Pembayaran Fisik 100% dan Pemeliharaan 5% (Utang pihak Ketiga Tahun Anggaran 2023) DAU Tahun Anggaran 2024 Drainase SMPN 1 Pangkajene
		8.400.000,00	Pembayaran 100% (Utang Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2023) DAU Tahun Anggaran 2024 Jasa Perencanaan Pemasangan Paving Blok SMPN 3 Pangkajene
		10.600.000,00	Pembayaran 100% Jasa Pengawasan Pemasangan Paving Blok SMPN 3 Pangkajene dan Paving Blok SMPN 2 Balocci (Utang Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2023) DAU Tahun Anggaran 2024
		42.641.850,00	Pembayaran 100% dan 5 % Pemeliharaan Pemb. Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya SDN 1 SABARU (Utang Pihak Ketiga Tahun 2023).(DAK) Tahun Anggaran 2024
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	99.250.900,00	Pembayaran Pekerjaan Drainase Segmen A. Mauraga Dan Sekitarnya (Utang Pemda)
		95.480.300,00	Pembayaran Pekerjaan Drainase Jalan Matahari Dan Sekitarnya (Utang Pemda)
		48.910.987,00	Pembayaran Pekerjaan Jalan Bonto Perak-Pa'CelangJl.Sapanang (Konsolidasi)(Utang Pemda)
		929.308.763,00	Pembayaran Pekerjaan Jalan Bonto Perak-Pa'CelangJl.Sapanang (Konsolidasi)(Utang Pemda)
		6.976.000,00	Pengawasan Teknis Paket Perubahan (Utang Pemda)
		41.310.850,00	Pembayaran Pekerjaan Jalan Galung Boko-Lamperangan-Jl.Belae (Konsolidasi) (Utang Pemda)
		784.906.150,00	Pembayaran Pekerjaan Jalan Galung BokoLamperangan-Jl.Belae (Konsolidasi) (Utang Pemda)
		812.807.465,00	Pembayaran Pekerjaan Jalan Beton Dan Aspal Tersebar 4 Ruas. Padang Lampe-Alekarajae, Senggerang-Tompo Bulu BalleanginTonasa I-Batunapara, Maccini Oto-Pacelang (Utang Pemda)
		99.012.900,00	Pembayaran Drainase Segmen Jalan Ketimun dan Sekitarnya (Utang Pemda)
		4.995.000,00	Perencanaan Teknis paket perubahan (Utang Pemda)
		26.995.200,00	Pengawasan Teknis Program SPAM (Utang Pemda)
		9.000.000,00	Perencanaan SPAM (Perubahan) (Utang Pemda)
		9.000.000,00	Pengawasan SPAM (Perubahan) (Utang Pemda)
		20.425.600,00	Pembayaran II MC 05-06 (100%) PembangunanTanggul Pengaman Abrasi Pulau Badi Desa Mattiro Deceng Kecamatan LK.Tupabiring (Utang Pemda)
3	Dinas Perhubungan	56.050.000,00	Pembangunan Dermaga Kayu Massalima Kecamatan Lk. Kalmas
		6.000.000,00	Jasa Pengawasan Teknis Dermaga Kayu Pulau Massalima
4	Dinas Lingkungan Hidup	178.285.000,00	Jaringan Listrik (Jasa Silo 3 Fase)
		960.769.600,00	Jaringan Listrik (Pemasangan Instalasi Listrik Daya KVA
		89.445.000,00	Pembayaran Pembangunan Gardu Batu PLN/Pelanggan Ukuran 4x8 meter



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
		99.672.000,00	Pembayaran Pengadaan Jembatan Timbang
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	7.683.420,00	Perencanaan pengadaan PJU perubahan (Utang Pemda 2023)
		14.374.500,00	Perencanaan Penerangan Jalan umum (Utang Pemda)
		13.388.820,00	Pengawasan Jalan Lingkungan Kawasan Kumuh (Utang Pemda 2023)
		41.142.150,00	Pengawasan Drainase Kawasan Kumuh (Utang Pemda 2023)
Jumlah		4.721.627.555,00	

7.5.3.3.e	Aset Tetap Lainnya	2024	2023
		Rp 20.202.107.113,81	Rp19.557.668.713,81

Aset Tetap Lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan, saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp20.202.107.113,81 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.3.3.e Rincian Mutasi Aset Tetap - Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)						
No	Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2024	Mutasi	Saldo Akhir 31 Desember 2024	Kenaikan/Penurunan	
					Nilai	%
1	Aset Tetap Lainnya	19.557.668.713,81	-644.438.400,00	20.202.107.113,81	-644.438.400,00	-3,30
	Jumlah	19.557.668.713,81	(644.438.400,00)	20.202.107.113,81	(644.438.400,00)	(3,30)

Rincian terinci dapat dilihat pada lampiran 15

Dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 7.5.3.3.e.1 Rincian Mutasi Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)	
Uraian	Nilai
Saldo Awal 2024 (1)	19.557.668.713,81
Belanja Modal TA 2024 (2)	8.829.456.200,00
Reklasifikasi dari KIB B (3)	750.000,00
Saldo Awal 2024 hasil penambahan (4 = (1 + 2 + 3))	28.387.874.913,81
Reklasifikasi ke KIB B (5)	17.280.000,00
Ekstra komputabel (6)	8.168.487.800,00
Saldo Akhir 2024 (7 = 4 - (5 + 6))	20.202.107.113,81
	20.202.107.113,81

Rincian terinci Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada Lampiran 15

Adapun penjelasan masing-masing dari penambahan nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 yaitu:

1. Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi Tahun 2024 sebesar Rp8.829.456.200,00.
2. Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp750.000,00 berupa Pengadaan Al-Quran (BOS SDN 10 Bonto).



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

Adapun penjelasan masing-masing dari pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 yaitu:

1. Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp17.280.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.920.000,00	Pengadaan Amplifier (BOS SMPN 1 Balocci)
		690.000,00	Pengadaan Pianika (BOS SDN 34 Sapanjang
		1.070.000,00	Pengadaan Gitar (Bos SMPN 1 Pangkajene)
2	Sekretariat Daerah	280.000,00	Pengadaan Artifisial Anggrek
		620.000,00	Pengadaan Artifisial Orchid
		510.000,00	Pengadaan Artifisial Kaktus
		510.000,00	Pengadaan Hiasan Vas Gold
		140.000,00	Pengadaan Hiasan Vas Nordic
		190.000,00	Pengadaan Hiasan Ornamen
3	Kecamatan Balocci	7.350.000,00	Belanja Audio Visual (Proyektor)
Jumlah		17.280.000,00	

2. Ekstrakompatabel pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp8.168.487.800,00 berupa belanja ekstrakompatabel aset tetap lainnya.

7.5.3.3.f	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2024	2023
		Rp63.778.749.287,69	Rp52.594.442.830,63

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Saldo sebesar Rp63.778.749.287,69 adalah merupakan nilai pekerjaan konstruksi yang belum PHO per 31 Desember 2024. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.3.3.f Rincian Aset Tetap - Konstruksi Dalam Pengerjaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2024	Mutasi	Saldo Akhir 31 Desember 2024	Kenaikan/Penurunan	
					Nilai	%
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	52.594.442.830,63	-11.184.306.457,06	63.778.749.287,69	-11.184.306.457,06	-21,27
	Jumlah	52.594.442.830,63	(11.184.306.457,06)	63.778.749.287,69	(11.184.306.457,06)	(21,27)

Rincian terinci dapat dilihat pada lampiran 16

Dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Rincian terinci Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dilihat pada Lampiran 16



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

Tabel 7.5.3.3.f.1 Rincian Mutasi Aset Tetap - Konstruksi Dalam Pengerjaan

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo Awal 2024 (1)	52.594.442.830,63
Reklasifikasi dari KIB B (2)	39.732.450,00
Reklasifikasi dari KIB C (3)	19.702.595.293,85
Reklasifikasi dari KIB D (4)	460.929.974,81
Saldo Awal 2024 hasil penambahan (5= (1 + 2 + 3 + 4))	72.797.700.549,29
Reklasifikasi ke KIB B (6)	124.470.000,00
Reklasifikasi ke KIB C (7)	7.604.784.128,60
Reklasifikasi ke KIB D (8)	1.020.823.337,00
Koreksi Pencatatan (9)	268.873.796,00
Saldo Akhir 2024 (10 = 5 - (6 + 7 + 8 + 9))	63.778.749.287,69
	63.778.749.287,69

Adapun penjelasan masing-masing dari penambahan nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 yaitu:

1. Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Konstruksi dalam Pekerjaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp39.732.450,00 berupa Pengadaan Mebel SDN 33 Jollo sebesar Rp39.732.450,00.
2. Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Konstruksi dalam Pekerjaan sebesar Rp19.702.595.293,85 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	204.387.250,00	Pembayaran Uang Muka 25 % Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 33 JOLLO (DAK) Tahun Anggaran 2024
		33.835.675,00	Pembayaran Uang Muka 25 % Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SDN 33 JOLLO (DAK) Tahun Anggaran 2024
		13.585.288,00	Pembayaran Uang Muka 25 % Rehabilitasi Ruang Kepala Sekolah SDN 33 JOLLO (DAK) Tahun Anggaran 2024
		367.897.050,00	Pembayaran 45% (Tahap II) Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 33 JOLLO (DAK) Tahun Anggaran 2024
		24.453.518,00	Pembayaran 45% (Tahap II) Rehab Ruang Kepala Sekolah/Pimpinan SDN 33 JOLLO (DAK) Tahun Anggaran 2024
		60.904.215,00	Pembayaran 45% (Tahap II) Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SDN 33 JOLLO (DAK) Tahun Anggaran 2024
		159.980.000,00	Pembayaran 90% Fisik (Tahap III) Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 33 JOLLO (DAK) Tahun Anggaran 2024
		13.530.064,00	Pembayaran 95% Fisik (Tahap III) Rehab Ruang Kepala Sekolah/Pimpinan SDN 33 JOLLO (DAK) Tahun Anggaran 2024
		33.669.175,00	Pembayaran 95% Fisik (Tahap III) Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SDN 33 JOLLO (DAK) Tahun Anggaran 2024
		50.479.205,00	Biaya Umum SDN 33 JOLLO
		3.000.000,00	Biaya Penunjang Jamban SDN 33 JOLLO
2	Dinas Kesehatan	8.000.000,00	Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Poskesdes Tabo-tabo
		5.816.500,00	Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Poskesdes Tabo-tabo
3	Rumah Sakit Umum Batara Siang	4.560.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan (Pembangunan Gedung NICU, CT Scan, Cytotoxic dan Chatlab)
		4.080.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (Pembangunan Gedung NICU, CT Scan, Cytotoxic dan Chatlab)



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
		78.937.650,00	Jasa Perencanaan Teknis Pembangunan Ruang Cathlab RSUD Batara Siang (DAK Fisik 2024)
		53.063.600,00	Jasa Pengawasan Teknis Pembangunan Ruang Cathlab RSUD Batara Siang (DAK Fisik 2024)
		2.287.049.883,00	Pembangunan Ruang Cathlab RSUD Batara Siang (DAK Fisik 2024)
		27.801.893,00	Jasa Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Ruang NICU RSUD Batara Siang (DAK Fisik 2024)
		19.829.040,00	Jasa Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Ruang NICU RSUD Batara Siang (DAK Fisik 2024)
		873.754.837,00	Pembangunan Gedung Ruang NICU RSUD Batara Siang (DAK Fisik 2024)
		24.724.695,00	Jasa Perencanaan Teknis Pembangunan Ruang CT Scan RSUD Batara Siang (DAK Fisik 2024)
		16.694.400,00	Jasa Pengawasan Teknis Ruang CT Scan RSUD Batara Siang (DAK Fisik 2024)
		710.450.867,00	Pembangunan Ruang CT Scan RSUD Batara Siang (DAK Fisik 2024)
		41.818.695,00	Jasa Perencanaan Teknis Pembangunan Ruang Ciytotoxic RSUD Batara Siang (DAK Fisik 2024)
		27.888.700,00	Jasa Pengawasan Teknis Pembangunan Ruang Ciytotoxic RSUD Batara Siang (DAK Fisik 2024)
		1.210.716.761,00	Pembangunan Ruang Ciytotoxic RSUD Batara Siang (DAK Fisik 2024)
		5.150.000,00	Honor PPK (Pembangunan Gedung Nicu, CT Scan, Cathlab dan Cytotoxic (Utang BLUD 2024)
		124.649.752,00	Pembangunan Ruang Cathlab RSUD Batara Siang (Utang DAK Fisik 2024)
		66.012.422,00	Pembangunan Ruang Nicu RSUD Batara Siang (Utang DAK Fisik 2024)
		66.146.519,00	Pembangunan Ruang Cytotoxic RSUD Batara Siang (Utang DAK Fisik 2024)
		47.900.671,00	Pembangunan Ruang CT Scan RSUD Batara Siang (Utang DAK Fisik 2024)
		1.463.257,00	Jasa Perencanaan Teknis Pembangunan Ruang Nicu RSUD Batara Siang (Utang DAK Fisik 2024)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	196.454.794,00	Lanjutan Rehabilitasi Kantor Kelurahan Ma'rang
		390.169.463,00	Rehabilitasi Kantor Desa Boddie
		189.752.103,00	Lanjutan Pagar Gedung Pramuka
		215.211.748,00	Lanjutan Pembangunan Desa Bara Batu
		491.598.993,00	Lanjutan Pembangunan Gedung Assesment BKPSDM
		199.218.519,00	Lanjutan Pembangunan Kantor Desa Bulu Tellue
		348.019.420,00	Lanjutan Pembangunan Kantor Ex Dinas Pemadam Kebakaran di Kota Pangkajene
		199.082.499,00	Pembangunan Lantai 2 gedung Ikatan Bidan Indonesia (IBI)
		195.124.891,00	Lanjutan Pembangunan Gedung Bulutangkis Indoor Balocci
		1.153.401.504,00	Lanjutan Pembangunan Gedung Kesenian
		195.634.649,00	Lanjutan Pembangunan Gedung Serbaguna Pulau Balang Lompo
		194.874.455,00	Lanjutan Pembangunan Asrama IPPM Pangkep di Pare-Pare
		194.985.309,00	Lanjutan Pembangunan Asrama IPPM Pangkep Jl. Manuruki
		2.146.348.500,00	Pembangunan Menara Jam Kota Pangkep
		2.142.307.700,00	Rehabilitasi Stadion Andi Mappe
		57.380.000,00	Lanjutan Pembangunan Gedung Kesenian
		75.682.005,00	Rehabilitasi Stadion Andi Mappe
		65.819.051,20	Rehabilitasi Pagar Kantor Bupati
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	2.474.021.597,18	Rehabilitasi Pagar Kantor Bupati
		67.398.450,00	Pembangunan Menara Jam Kota Pangkep
		524.888.112,00	Uang Muka 30% Perbaikan Sarana dan Prasarana Pasar Sentral Pangkajene
		612.369.464,00	Pembayaran Termin I 65% Perbaikan Sarana dan Prasarana Pasar Sentral Pangkajene
		437.406.760,00	Pembayaran Termin II 90% Perbaikan Sarana dan Prasarana Pasar Sentral Pangkajene



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
		75.804.120,00	Pembayaran 90% Jasa Konsultasi Pengawasan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pasar Sentral Pangkajene
		3.900.000,00	Jasa Tenaga Ahli Teknis Perbaikan Sarana dan Prasarana Pasar Sentral Pangkajene Bulan Juni-Desember 2024
		99.678.000,00	Jasa Konsultasi Perencanaan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pasar Sentral Pangkajene
		75.408.925,47	Perbaikan Sarana dan Prasarana Pasar Sentral Pangkajene
		8.422.680,00	Jasa Pengawasan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pasar Sentral Pangkajene
	Jumlah	19.702.595.293,85	

3. Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi ke Aset Tetap Konstruksi dalam Pekerjaan sebesar Rp460.929.974,81 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	73.682.380,00	Rehabilitasi Toilet (Jamban) SDN 33 JOLLO
2	Rumah Sakit Umum Batara Siang	199.500.000,00	Rehabilitasi IPAL (BLUD 2024)
		19.059.000,00	Rehabilitasi IPAL (Utang BLUD 2024)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	6.798.000,00	Pengawasan Pembangunan Jalan Kampung Tanete Kecamatan Balocci
		161.890.594,81	Pembangunan Jalan Kampung Tanete Kecamatan Balocci
	Jumlah	460.929.974,81	

Adapun penjelasan masing-masing dari pengurangan nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 yaitu:

1. Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Aset Tetap Konstruksi dalam Pekerjaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp124.470.000,00 berupa pengadaan Meubelair Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SMPN 3 Satap Kalmas.
2. Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Aset Tetap Konstruksi dalam Pekerjaan sebesar Rp7.604.784.128,60 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	366.585.250,00	Laboratorium IPA SMPN 3 SATAP Kecamatan Lk. Kalmas
		327.128.700,00	Ruang Tata Usaha SMPN 3 SATAP Kecamatan Lk. Kalmas
		137.172.500,00	Ruang UKS SMPN 3 SATAP Kecamatan Lk. Kalmas
		362.479.650,00	Laboratorium Komputer SMPN 3 SATAP Kecamatan Lk. Kalmas
		25.937.500,00	Biaya Penunjang Laboratorium IPA SMPN 3 SATAP Kecamatan Lk. Kalmas
		11.971.100,00	Biaya Penunjang TU SMPN 3 SATAP Kecamatan Lk. Kalmas
		29.927.800,00	Biaya Penunjang Laboratorium Komputer SMPN 3 SATAP Kecamatan Lk. Kalmas
2	Dinas Kesehatan	194.714.000,00	Pembangunan Selasar Rumah Sakit Pratama Batiling
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2.408.589.595,00	Lanjutan Rehabilitasi Atap Kantor Bupati
		206.079.454,00	Pembangunan Tribune Lapangan Mawa Balocci
		1.785.332.718,00	Rumah Jabatan Sekda
		407.445.559,34	Kantor Desa Bowong Cindea
		1.241.886.602,26	Pembangunan Kantor Perwakilan Pemda Pangkep di Lombok



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	99.533.700,00	Belanja Perencanaan Bangunan Gedung Layanan Perpustakaan
Jumlah		7.604.784.128,60	

3. Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi dari Aset Tetap Konstruksi dalam Pekerjaan sebesar Rp1.020.823.337,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	75.573.250,00	Rehabilitasi Toilet (Jamban) SMPN 13 Kecamatan Lk. Kalmas
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	101.582.500,00	Studi Hidrologi dan Pemetaan Geospasial 2023
3	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	843.667.587,00	Pengadaan dan pemasangan PJU jalan poros Kabupaten Pangkep
Jumlah		1.020.823.337,00	

4. Koreksi Pencatatan sebesar Rp268.873.796,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Kesehatan	261.190.376,00	Jasa Perencanaan Rumah Sakit Pratama Sailus
2	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	7.683.420,00	Perencanaan Pengadaan PJU Perubahan (Barang Persediaan Pakai Habis) (Utang Pemda 2023)
Jumlah		268.873.796,00	

7.5.3.3.g	Akumulasi	2024	2023
	Penyusutan Aset Tetap	(Rp3.075.669.573.822,97)	(Rp2.808.947.040.527,09)

Pada Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan baru melakukan penyusutan sesuai dengan amanah Peraturan Bupati nomor 34 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Akumulasi Penyusutan tahun 2024 sebesar (Rp3.075.669.573.822,97) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.3.3.g Rincian Mutasi Aset Tetap - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	Mutasi	2023	Kenaikan/Penurunan	
					Nilai	%
1	Peralatan dan Mesin	(628.223.614.090,39)	(58.975.720.015,78)	(569.247.894.074,61)	58.975.720.015,78	10,36
2	Gedung dan Bangunan	(607.545.284.581,89)	(49.961.818.104,90)	(557.583.466.476,99)	49.961.818.104,90	8,96
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(1.839.900.675.150,69)	(157.784.995.175,20)	(1.682.115.679.975,49)	157.784.995.175,20	9,38
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	
		(3.075.669.573.822,97)	(266.722.533.295,88)	(2.808.947.040.527,09)	(266.722.533.295,88)	9,50

Rincian terinci akumulasi penyusutan dapat dilihat pada lampiran 17



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

7.5.3.4.	Aset Lainnya	2024	2023
		Rp13.918.811.843,63	Rp13.566.324.647,72

Saldo aset lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp13.918.811.843,63 dengan rincian sebagai berikut:

136Tabel 7.5.3.4 Rincian Aset Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	Mutasi	2023	Kenaikan/Penurunan	
					Nilai	%
1	Tagihan Jangka Panjang	94.760.874,00	(4.500.000,00)	99.260.874,00	(4.500.000,00)	(4,53)
2	Aset Tak Berwujud	6.466.292.636,45	698.175.041,00	5.768.117.595,45	698.175.041,00	12,10
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(4.547.846.494,63)	(701.616.845,09)	(3.846.229.649,54)	(701.616.845,09)	18,24
4	Aset Tak Berwujud Netto	1.918.446.141,82	(3.441.804,09)	1.921.887.945,91	(3.441.804,09)	(0,18)
5	Aset Lain - Lain	86.238.853.690,50	(248.233.668,00)	86.487.087.358,50	(248.233.668,00)	(0,29)
6	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(74.657.427.862,69)	284.483.668,00	(74.941.911.530,69)	284.483.668,00	(0,38)
7	Aset Lain-Lain Netto	11.581.425.827,81	36.250.000,00	11.545.175.827,81	36.250.000,00	0,31
8	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	324.179.000,00	324.179.000,00	-	324.179.000,00	0,00
		13.918.811.843,63	352.487.195,91	13.566.324.647,72	352.487.195,91	2,60

Rincian terinci aset lainnya dapat dilihat pada lampiran 18.a s/d lampiran 18.f

7.5.3.4.a	Tagihan Jangka Panjang	2024	2023
		Rp94.760.874,00	Rp99.260.874,00

Saldo Tagihan Jangka Panjang milik Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan per 31 Desember 2024 sebesar Rp94.760.874,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.3.4.a Rincian Aset Lainnya - Tagihan Jangka Panjang

(dalam rupiah)

NO	PENANGGUNG JAWAB	SALDO AWAL Per JANUARI 2024	REALISASI 2024	SALDO AKHIR Per DES 2024	TANGGAL PENYETORAN	Kenaikan/Penurunan	
						Nilai	%
1	CV. SUKMA JAYA (SJ)	2.475.000,00	0,00	2.475.000,00		-	0,00
2	CV. ARTINDO KARYATAMA (AK)	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00		-	0,00



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

NO	PENANGGUNG JAWAB	SALDO AWAL Per JANUARI 2024	REALISASI 2024	SALDO AKHIR Per DES 2024	TANGGAL PENYETORAN	Kenaikan/Penurunan	
						Nilai	%
3	CV. KARYA CITRA MANDIRI (KCM)	3.529.216,00	0,00	3.529.216,00		-	0,00
4	H. SYS, SH	46.194.000,00	0,00	46.194.000,00		-	0,00
5	DRS. H. B.G.B	18.159.000,00	0,00	18.159.000,00		-	0,00
6	Drs. H.HS	5.500.000,00	4.500.000,00	1.000.000,00		(4.500.000,00)	(81,82)
7	CV. BINA SARANA	17.988.114,00	0,00	17.988.114,00		-	0,00
8	CV. AGUNG MANDIRI	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		-	0,00
9	Dana Transfer Treasuri Deposit Fasiliti (TDF)	-	-	0,00		-	0,00
10	Nuraeni Mende (Badan Pemberdayaan perempuan dan KB)	658.944,00	0,00	658.944,00		-	0,00
		0,00	0,00	0,00		-	0,00
		1.656.600,00	0,00	1.656.600,00		-	0,00
	Jumlah (Rp)	99.260.874,00	4.500.000,00	94.760.874,00		(4.500.000,00)	(4,53)

Tagihan Jangka Panjang ini merupakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang SKTJMnya belum memenuhi ketentuan yang berlaku. Saldo tersebut tidak diantaranya termasuk piutang TPTGR yang belum ditetapkan SKTJM-nya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.3.4.a.1 Rincian Piutang TP-TGR yang belum ditetapkan SKTJM

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	
				Nilai	%
1	Temuan BPK	4.545.375.556,51	2.175.841.273,40	2.369.534.283,11	108,90
2	Temuan Inspektorat Provinsi	76.606.369,00	76.606.369,00	0,00	0,00
3	Temuan Inspektorat Kabupaten	732.298.712,43	732.298.712,43	0,00	0,00
		5.354.280.637,94	2.984.746.354,83	2.369.534.283,11	79,39

Rincian terinci Tuntutan Ganti Rugi dapat dilihat pada lampiran 19.

7.5.3.4.b	Aset Tidak Berwujud	2024	2023
		Rp6.466.292.636,45	Rp5.768.117.595,45

Nilai perolehan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.466.292.636,45 terdiri dari pengadaan perangkat lunak computer (soft ware/aplikasi) yang terpasang pada sistem komputerisasi Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.3.4.b Rincian Nilai Perolehan Aset Tak Berwujud

(dalam Rupiah)

No.	Nama SKPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.354.579.415,00
2	Dinas Kesehatan	1.149.853.238,00
3	Rumah Sakit Umum Batara Siang	940.143.356,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	261.736.168,98
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	238.517.643,44
6	Dinas Perhubungan	77.972.343,75



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

No.	Nama SKPD	Nilai
7	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	70.145.000,00
8	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	47.950.000,00
9	Dinas Sosial	62.100.000,00
10	Sekretariat Daerah	362.991.865,28
11	Sekretariat DPRD	27.923.095,00
12	Badan Pendapatan daerah	15.503.315,00
13	Inspektorat Kabupaten	50.000.000,00
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	112.411.913,00
15	Kecamatan Minasate'ne	30.000.000,00
16	Kecamatan Tondong Tallasa	27.000.000,00
17	Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara	20.000.000,00
18	Kecamatan Liukang Tangaya	25.000.000,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	643.530.000,00
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	198.110.000,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pem Desa	70.014.283,00
22	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	71.329.500,00
23	Dinas Perikanan	29.800.000,00
24	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	149.850.000,00
25	Dinas Ketenagakerjaan	64.735.000,00
26	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	88.000.000,00
27	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	252.346.500,00
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	24.750.000,00
TOTAL		6.466.292.636,45

7.5.3.4.c	Akumulasi	2024	2023
	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(Rp4.547.846.494,63)	(Rp3.846.229.649,54)

Aset Lainnya berupa Aset tidak Berwujud dilakukan Amortisasi sesuai dengan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan No.38 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan menggunakan Metode Garis Lurus dengan masa manfaat Aset Tidak Berwujud selama 60 bulan. Amortisasi Aset Tidak Berwujud milik Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan per 31 Desember 2024 sebesar (Rp4.547.846.494,63), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.3.4.c Rincian Amortisasi Aset Tak Berwujud

(dalam rupiah)				
No	Uraian	Saldo 31/12/2024	Amortisasi	Netto
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.303.001.240,00	(1.277.924.540,00)	25.076.700,00
2	Dinas Kesehatan	578.031.464,94	(467.482.316,99)	110.549.147,95
3	Rumah Sakit Umum Batara Siang	839.478.531,38	(735.681.904,62)	103.796.626,76
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	180.370.615,54	(129.834.492,53)	50.536.123,01
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	161.837.136,94	(135.242.320,98)	26.594.815,96
6	Dinas Perhubungan	71.682.343,75	(69.462.343,75)	2.220.000,00
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	42.728.333,29	(32.799.583,33)	9.928.749,96



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

No	Uraian	Saldo 31/12/2024	Amortisasi	Netto
8	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	44.620.000,00	(40.624.000,00)	3.996.000,00
9	Dinas Sosial	38.295.000,00	(25.875.000,00)	12.420.000,00
10	Sekretariat Daerah	233.299.040,95	(190.164.868,51)	43.134.172,44
11	Sekretariat DPRD	17.219.241,84	(11.634.622,80)	5.584.619,04
12	Badan Pendapatan Daerah	15.503.315,00	(15.503.315,00)	-
13	Inspektorat Daerah	25.833.333,29	(15.833.333,33)	9.999.999,96
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	28.070.413,00	(6.536.413,00)	21.534.000,00
15	Kecamatan Minasatene	16.500.000,00	(10.500.000,00)	6.000.000,00
16	Kecamatan Tondong Tallasa	22.050.000,00	(16.650.000,00)	5.400.000,00
17	Kecamatan LK. Tupabbiring Utara	10.999.999,96	(7.000.000,00)	3.999.999,96
18	Kecamatan LK. Tangaya	15.833.333,38	(10.833.333,34)	5.000.000,04
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	321.996.666,69	(240.214.000,00)	81.782.666,69
20	Badan Kepegawaian, Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	198.110.000,00	(198.110.000,00)	-
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	29.172.618,00	(15.169.761,36)	14.002.856,64
22	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	69.413.025,00	(62.302.625,00)	7.110.400,00
23	Dinas Perikanan	12.416.666,71	(6.456.666,67)	5.960.000,04
24	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	64.935.000,00	(34.965.000,00)	29.970.000,00
25	Dinas Ketenagakerjaan	48.060.833,40	(28.051.833,36)	20.009.000,04
26	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	42.533.333,22	(24.933.333,30)	17.599.999,92
27	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	113.380.008,35	(69.444.041,67)	43.935.966,68
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.475.000,00	-	2.475.000,00
Jumlah		4.547.846.494,63	(3.879.229.649,54)	668.616.845,09

Aset Tak Berwujud Netto per 31 Desember 2024 merupakan Aset Tak Berwujud dikurangkan dengan Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp668.616.845,09

7.5.3.4.d	Aset Lain-Lain	2024	2023
		Rp11.581.425.827,81	Rp11.545.175.827,81

Aset Lain-Lain terdiri dari Aset Rusak Berat dan tidak diketahui keberadaannya beserta Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp11.581.425.827,81 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.3.4.d Rincian Aset Lain - Lain

No	Uraian	2024	2023	(dalam rupiah)	
				Kenaikan/Penurunan	
				Nilai	%
1	Dinas Pendidikan	608.312.579,68	608.312.579,68	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	252.140.743,42	252.140.743,42	0,00	0,00
3	Rumah Sakit Umum Batara Siang	110.451.530,38	110.451.530,38	0,00	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	3.590.673.908,61	3.590.673.908,61	0,00	0,00



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	
				Nilai	%
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	90.460.467,00	90.460.467,00	0,00	0,00
6	Dinas Perhubungan	224.361.979,94	224.361.979,94	-0,00	-0,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	607.756.425,00	571.506.425,00	36.250.000,00	6,34
8	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,01	0,01	-0,00	-0,00
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Sosial	572.922.933,77	572.922.933,77	0,00	0,00
11	Badan Penanggulangan Bencana	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	14.520.593,70	14.520.593,70	0,00	0,00
14	Sekretariat Daerah	626.100.320,96	626.100.320,96	-0,00	-0,00
15	Sekretariat DPRD	3.246.064,87	3.246.064,87	-0,00	-0,00
16	Badan Pendapatan daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Inspektorat Kabupaten	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Badan Keuangan dan Aset Daerah	10.993.505,01	10.993.505,01	0,00	-
19	Kecamatan Pangkajene	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Kecamatan Minasate'ne	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Kecamatan Balocci	5.362.501,00	5.362.501,00	0,00	-
22	Kecamatan Tondong Tallasa	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Kecamatan Bungoro	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kecamatan Labakkang	7.825.000,00	7.825.000,00	0,00	-
25	Kecamatan Ma'rang	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Kecamatan Segeri	1.895.833,00	1.895.833,00	0,00	-
27	Kecamatan Mandalle	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Liukang Tupabbiring	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Liukang Tangaya	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-
31	Kecamatan Liukang Kalmas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.083.333,00	2.083.333,00	0,00	-
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.470.833,00	7.470.833,00	0,00	-
34	Dinas Ketahanan Pangan	5.769.167,00	5.769.167,00	0,00	-
35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pem Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Dinas Pertanian	1.008.333,00	1.008.333,00	0,00	-
38	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	382.009.958,24	382.009.958,24	0,00	-
39	Dinas Perikanan	4.337.655.203,95	4.337.655.203,95	0,00	-
40	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	100.800.000,00	100.800.000,00	0,00	-
41	Dinas Ketenagakerjaan	11.072.019,27	11.072.019,27	0,00	-
42	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	4.564.469,00	4.564.469,00	0,00	-
43	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	968.125,00	968.125,00	0,00	0,00
44	Dinas Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Dinas Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Dinas Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Dinas Pertanahan	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Dinas Statistik	0,00	0,00	0,00	0,00



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	
				Nilai	%
51	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		11.581.425.827,81	11.545.175.827,81	36.250.000,00	0,31

7.5.3.4.e	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	2024	2023
		Rp324.179.000,00	Rp0,00

Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) merupakan sisa dana Tahun Anggaran 2024 penyaluran dana ke RKUD dalam rangka mendukung kebutuhan belanja daerah Tahun Anggaran 2025.

7.5.3.5	Kewajiban	2024	2023
		Rp57.559.088.035,89	Rp61.021.104.551,19

Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan per 31 Desember 2024 dibagi dalam dua golongan, diantaranya Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp57.559.088.035,89 dengan uraian sebagai berikut.

7.5.3.5.a	Kewajiban Jangka Pendek	2024	2023
		Rp57.557.292.119,22	Rp61.021.104.551,19

Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan per 31 Desember 2024 sebesar Rp57.557.292.119,22 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.3.5.a Rincian Kewajiban Jangka Pendek

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	
				Nilai	%
1	Utang Pinjaman Jangka Pendek	-	8.000.000.000,00	- 8.000.000.000,00	-100
2	Pendapatan diterima dimuka	129.570.458,33	137.457.666,70	- 7.887.208,37	-5,74
3	Utang Belanja	57.427.721.660,89	52.883.646.884,49	4.544.074.776,40	8,59
		57.557.292.119,22	61.021.104.551,19	-3.463.812.431,97	-5,68

Utang Pinjaman Jangka Pendek Per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

7.5.3.5.b	Pendapatan Diterima Dimuka	2024	2023
		Rp129.570.458,33	Rp137.457.666,70

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp129.570.458,33 merupakan pendapatan Pajak Reklame pada Badan



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

Pendapatan Daerah yang telah diterima dimuka pada tahun berjalan sebesar Rp129.570.458,33.

Secara rinci dapat dilihat pada lampiran 20.a s/d 20.b

7.5.3.5.c	Utang Belanja dan Transfer	2024	2023
		Rp57.427.721.660,89	Rp52.883.646.884,49

Saldo Utang Beban dan Transfer per 31 Desember 2024 sebesar Rp57.427.721.660,89 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp52.883.646.884,49. Saldo utang belanja dan Transfer pada tahun 2024 merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang belum dilunasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.3.5.c Rincian Utang Belanja

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Mutasi	Per 31 Desember 2024	Kenaikan/Penurunan	
					Nilai	%
1	Utang Belanja Pegawai	2.567.454.310,32	(3.577.486.891,00)	6.144.941.201,32	3.577.486.891,00	139,34
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	29.915.213.967,17	(7.626.739.404,71)	37.541.953.371,88	7.626.739.404,71	25,49
3	Utang Belanja Hibah	203.933.725,00	4.952.200,00	198.981.525,00	- 4.952.200,00	-2,43
4	Utang Belanja Modal	20.197.044.882,00	6.655.199.319,31	13.541.845.562,69	- 6.655.199.319,31	-32,95
		52.883.646.884,49	(4.544.074.776,40)	57.427.721.660,89	4.544.074.776,40	8,59

Adapun rincian dari Utang Belanja Modal sebagai berikut:

Tabel 7.5.3.5.c.1 Rincian Utang Belanja Modal

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Mutasi	Per 31 Desember 2024	Kenaikan/Penurunan	
					Nilai	%
1	Utang Belanja Modal Tanah	27.901.500,00	-	27.901.500,00	-	-
2	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.453.723.719,00	(595.960.988,02)	9.049.684.707,02	595.960.988,02	7,05
3	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.440.813.815,00	2.639.604.379,33	2.801.209.435,67	(2.639.604.379,33)	(48,51)
4	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.708.636.372,00	4.611.555.928,00	1.097.080.444,00	(4.611.555.928,00)	(80,78)
5	Utang Belanja Aset Tetap Lainnya	565.969.476,00	-	565.969.476,00	-	-
		20.197.044.882,00	6.655.199.319,31	13.541.845.562,69	(6.655.199.319,31)	(32,95)

Secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 21.a s/d Lampiran 22.r.



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

7.5.3.6	Ekuitas	2024	2023
		Rp1.982.873.827.024,74	Rp1.958.635.958.627,88

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 disajikan sebesar Rp1.982.873.827.024,74 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.3.6 Rincian Ekuitas Akhir

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	
				Nilai	%
1	Ekuitas Awal	1.958.635.958.627,88	1.937.408.637.176,95	21.227.321.450,93	1,10
2	Surplus / (Defisit) - LO	20.981.041.327,21	15.847.313.463,83	5.133.727.863,38	32,39
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar	3.256.827.069,65	5.380.007.987,10	(2.123.180.917,45)	(39,46)
4	Saldo Awal Persediaan	0,00	0,00	-	-
5	Koreksi Persediaan	0,00	0,00	-	-
6	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00	-	-
7	Saldo Awal Koreksi Ekuitas	0,00	0,00	-	-
8	Koreksi Saldo Awal BOS	0,00	0,00	-	-
9	Review BOS	0,00	0,00	-	-
10	Perubahan Aset	0,00	0,00	-	-
11	Penyusutan	0,00	0,00	-	-
12	Aset Tak Berwujud (ATB)	0,00	0,00	-	-
13	Piutang	0,00	0,00	-	-
14	Jasa Giro	0,00	0,00	-	-
15	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	-	-
16	Koreksi Lainnya	3.256.827.069,65	5.380.007.987,10	(2.123.180.917,45)	(39,46)
17	Perubahan Ekuitas	0,00	0,00	-	-
	Ekuitas Akhir	1.982.873.827.024,74	1.958.635.958.627,88	24.237.868.396,86	1,24



7.5.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan yang tercerminkan dalam pendapatan, beban dan surplus/defisit-operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

7.5.4.1	Pendapatan Daerah – LO	2024	2023
		Rp1.499.077.451.662,95	Rp1.457.053.876.157,55

Saldo Pendapatan LO Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp1.499.077.451.662,95 dan Rp1.457.053.876.157,55. Pendapatan LO terdiri dari Pendapatan Asli daerah (PAD) – LO, Pendapatan Transfer-LO, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah-LO.

Berikut ini rincian masing-masing Pendapatan tersebut:

Tabel 7.5.4.1 Rincian Pendapatan - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / (Penurunan)	
				Nilai	%
1	Pendapatan Asli Daerah - LO	229.667.584.753,97	185.435.179.061,43	44.232.405.692,54	23,85
2	Pendapatan Transfer - LO	1.229.586.942.618,00	1.231.483.333.979,02	-1.896.391.361,02	-0,15
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	39.822.924.290,98	40.135.363.117,10	-312.438.826,12	-0,78
Jumlah		1.499.077.451.662,95	1.457.053.876.157,55	41.699.396.505,40	2,86

7.5.4.1.a	Pendapatan Asli Daerah – LO	2024	2023
		Rp229.667.584.753,97	Rp185.435.179.061,43

Pendapatan Asli Daerah LO tahun 2024 senilai Rp229.667.584.753,97 merupakan akumulasi dari Pendapatan Pajak Daerah-LO, Retribusi Daerah-LO, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dan Lain-Lain PAD yang Sah-LO dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.4.1.a. Rincian Pendapatan - Pendapatan Asli Daerah - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / (Penurunan)	
				Nilai	%
1	Pajak Daerah - LO	137.296.075.639,37	96.326.568.166,50	40.969.507.472,87	42,53
2	Retribusi Daerah - LO	12.286.665.697,00	11.149.813.004,00	1.136.852.693,00	10,20



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / (Penurunan)	
				Nilai	%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	13.009.057.431,00	13.041.042.112,34	(31.984.681,34)	(0,25)
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO	67.075.785.986,60	64.917.755.778,59	2.158.030.208,01	3,32
		229.667.584.753,97	185.435.179.061,43	44.232.405.692,54	23,85

7.5.4.1.a.1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	2024 Rp137.296.075.639,37	2023 Rp96.326.568.166,50

Pajak Daerah Adalah Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola Badan Pendapatan Daerah. Pendapatan Pajak Laporan Operasional disajikan oleh dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2024, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional sebesar ketetapan yang diterima pada tahun 2024 dan bukan merupakan pembayaran atas piutang tahun sebelumnya ditambah dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maupun Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan tahun 2024.

Tabel 7.5.4.1.a.1 Rincian Pendapatan Asli Daerah - LO - Pajak Daerah
(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / (Penurunan)	
				Nilai	%
1	Pajak Hotel - LO	0,00	26.239.091,00	-26.239.091,00	-100,00
2	Pajak Restoran - LO	0,00	3.873.226.884,00	-3.873.226.884,00	-100,00
3	Pajak Hiburan - LO	0,00	22.700.000,00	-22.700.000,00	-100,00
4	Pajak Reklame - LO	365.183.108,37	369.707.235,50	-4.524.127,13	-1,22
5	Pajak Penerangan Jalan - LO	0,00	26.581.683.065,00	-26.581.683.065,00	-100,00
6	Pajak Parkir - LO	0,00	426.800.000,00	-426.800.000,00	-100,00
7	Pajak Air Tanah - LO	78.531.175,00	148.421.625,00	-69.890.450,00	-47,09
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	91.778.858.298,00	51.686.501.050,00	40.092.357.248,00	77,57
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	9.562.048.560,00	8.279.287.956,00	1.282.760.604,00	15,49
10	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	5.040.244.488,00	4.912.001.260,00	128.243.228,00	2,61
11	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) - LO	30.471.210.010,00	0,00	30.471.210.010,00	0,00
		137.296.075.639,37	96.326.568.166,50	40.969.507.472,87	42,53



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

7.5.4.1.a.2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	2024	2023
		Rp12.286.665.697,00	Rp11.149.813.004,00

Pendapatan Retribusi Daerah-LO Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.4.1.a.2 Rincian Pendapatan Asli Daerah - LO - Retribusi Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / (Penurunan)	
				Nilai	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	6.263.833.999,00	4.626.011.000,00	1.637.822.999,00	35,40
2	Retribusi Pelayanan Persampahan - LO	0,00	256.072.500,00	(256.072.500,00)	(100,00)
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	504.700.000,00	381.800.000,00	122.900.000,00	32,19
4	Retribusi Pelataran-LO	1.144.681.360,00	1.104.147.806,00	40.533.554,00	100,00
5	Retribusi Los-LO	239.153.040,00	210.893.650,00	28.259.390,00	100,00
6	Retribusi Kios-LO	271.508.840,00	241.608.630,00	29.900.210,00	100,00
7	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	90.000,00	100.028.500,00	(99.938.500,00)	(99,91)
8	Retribusi Penyediaan Penyedotan Kakus - LO	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(100,00)
9	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	0,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)	(100,00)
10	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	446.215.500,00	(446.215.500,00)	(100,00)
11	Retribusi Pelayanan Persampahan - LO	483.237.500,00	-	483.237.500,00	0,00
12	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	4.000.000,00	-	4.000.000,00	0,00
13	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	3.016.000,00	82.200.000,00	(79.184.000,00)	(96,33)
14	Retribusi Pemakaian Ruangan-LO	0,00	2.669.382.624,00	(2.669.382.624,00)	100,00
15	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO	-	220.050.000,00	(220.050.000,00)	100,00
16	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir - LO	17.700.000,00	5.000.000,00	12.700.000,00	254,00
17	Retribusi Tempat Pelelangan-LO	113.700.000,00	78.080.000,00	35.620.000,00	45,62
18	Retribusi Terminal - LO	0,00	4.200.000,00	(4.200.000,00)	(100,00)
19	Retribusi Tempat Penginapan/Pesangrahan/Vila - Lo	184.170.000,00	-	184.170.000,00	0,00
20	Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	119.685.000,00	95.795.000,00	23.890.000,00	24,94
21	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO	79.037.500,00	68.021.250,00	11.016.250,00	16,20
22	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga - LO	154.308.100,00	136.050.000,00	18.258.100,00	13,42



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / (Penurunan)	
				Nilai	%
23	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah Berupa Bibit atau Benih ikan - LO	268.200.000,00	-	268.200.000,00	0,00
24	Retribusi Pemanfaatan Aset daerah - LO	1.741.756.078,00	-	1.741.756.078,00	0,00
25	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	693.888.280,00	402.256.544,00	291.631.736,00	72,50
		12.286.665.697,00	11.149.813.004,00	1.136.852.693,00	10,20

7.5.4.1.a.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	2024	2023
		Rp13.009.057.431,00	Rp13.041.042.112,34

Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2024 merupakan pembagian dividen atas kepemilikan Bank Sul-Sel berdasarkan hasil RUPS Tahun Buku 2024.

Tabel 7.5.4.1.a.3 Rincian Pendapatan Asli Daerah - LO - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / (Penurunan)	
				Nilai	%
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN-LO	13.009.057.431,00	13.041.042.112,34	(31.984.681,34)	(0,25)
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO	0,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	13.009.057.431,00	13.041.042.112,34	(31.984.681,34)	(0,25)

7.5.4.1.a.4	Lain-Lain PAD yang Sah – LO	2024	2023
		Rp67.075.785.986,60	Rp64.917.755.778,59

Lain-lain PAD yang Sah-LO Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp67.075.785.986,60 dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

Tabel 7.5.4.1.a.4 Rincian Pendapatan Asli Daerah - LO - Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / (Penurunan)	
				Nilai	%
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	164.255.300,00	186.143.600,00	-21.888.300,00	(11,76)
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	41.780.000,00	418.000.000,00	-376.220.000,00	(90,00)
3	Jasa Giro-LO	2.101.282.998,80	1.832.661.728,00	268.621.270,80	14,66
4	Pendapatan Bunga-LO	532.065.072,09	384.321.170,66	147.743.901,43	38,44
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	4.004.746.425,16	1.328.954.970,19	2.675.791.454,97	201,35
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	56.502.102,00	27.484.846,25	29.017.255,75	105,58
7	Pendapatan dari Pengembalian-LO	2.769.077.495,00	1.427.521.299,88	1.341.556.195,12	93,98
8	Lain-Lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	-
9	Pendapatan dari BLUD-LO	57.406.076.593,55	59.312.668.163,61	-1.906.591.570,06	(3,21)
	Jumlah	67.075.785.986,60	64.917.755.778,59	2.158.030.208,01	3,32

7.5.4.1.b	Pendapatan Transfer- LO	2024	2023
		Rp1.229.586.942.618,00	Rp1.231.483.333.979,02

Pendapatan Transfer-LO Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 terdiri dari Transfer Pemerintahan Pusat-Dana Perimbangan-LO, Transfer Pemerintahan Pusat Lainnya-LO, dan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.4.1.b Rincian Pendapatan Transfer - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / (Penurunan)	
				Nilai	%
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO	1.155.197.905.071,00	1.113.890.724.231,00	41.307.180.840,00	3,71
2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	11.568.556.000,00	17.797.293.000,00	-6.228.737.000,00	-35,00
3	Transfer Pemerintah Provinsi - LO	62.820.481.547,00	99.795.316.748,02	-36.974.835.201,02	-37,05
	Jumlah	1.229.586.942.618,00	1.231.483.333.979,02	-1.896.391.361,02	-0,15



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

7.5.4.1.b.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2024	2023
		Rp1.166.766.461.071,00	Rp1.131.688.017.231,00

Transfer Pemerintah Pusat-LO Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 terdiri dari Transfer Pemerintahan Pusat-Dana Perimbangan-LO. Transfer Pemerintahan Pusat Lainnya-LO. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO. dengan rincian sebagai berikut:

7.5.4.1.b.1.a	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO	2024	2023
		Rp1.155.197.905.071,00	Rp1.113.890.724.231,00

Pendapatan Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi terdiri dari:

Tabel 7.5.4.1.b.1.a Rincian Pendapatan Transfer - LO - Dana Perimbangan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / (Penurunan)	
				Nilai	%
1	Dana Bagi Hasil Pajak - LO	14.229.219.664,00	14.684.424.120,00	(455.204.456,00)	(3,10)
	a. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan - LO	1.244.301.000,00	9.846.841.320,00	(8.602.540.320,00)	(87,36)
	b. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri - LO	12.984.918.664,00	4.837.582.800,00	8.147.335.864,00	168,42
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO	11.708.601.000,00	8.735.978.250,00	2.972.622.750,00	34,03
	a. Bagi Hasil dari Iuran Hak Penguasaan Hutan (HPH) - LO		-	-	-
	b. Bagi Hasil dari Pungutan Penguasaan Perikanan - LO	8.821.764.000,00	3.117.118.300,00	5.704.645.700,00	183,01
	c. Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LO	49.000,00	4.387.892.500,00	(4.387.843.500,00)	(100,00)
	d. Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LO	385.506.000,00	99.816.300,00	285.689.700,00	286,22
	e. Bagi Hasil SDA Mineral Batubara - LO	2.177.316.000,00	473.766.750,00	1.703.549.250,00	359,58
	f. DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	61.139.000,00	383.956.400,00	(322.817.400,00)	(84,08)
	g. Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau - LO	262.827.000,00	273.428.000,00	(10.601.000,00)	(3,88)
3	Dana Alokasi Umum - LO	787.431.926.000,00	746.290.902.260,00	41.141.023.740,00	5,51
4	Dana Alokasi Khusus - LO	341.828.158.407,00	344.179.419.601,00	(2.351.261.194,00)	(0,68)
	Jumlah	1.155.197.905.071,00	1.113.890.724.231,00	41.307.180.840,00	3,71



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

7.5.4.1.b.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO	2024	2023
		Rp11.568.556.000,00	Rp17.797.293.000,00

Realisasi Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya merupakan Dana Penyesuaian-LO Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp11.568.556.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.4.1.b.2 Rincian Pendapatan Transfer - LO - Pemerintah Pusat Lainnya (Dana Penyesuaian)
(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / (Penurunan)	
				Nilai	%
1	Dana Insentif Daerah (DID) - LO	0,00	17.797.293.000,00	-17.797.293.000,00	-100,00
2	Insentif Fiskal-LO	11.568.556.000,00	0,00	11.568.556.000,00	0,00
	Jumlah	11.568.556.000,00	17.797.293.000,00	-6.228.737.000,00	-35,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya merupakan Pendapatan Insentif Fiskal sebesar Rp11.568.556.000,00.

7.5.4.1.b.3	Transfer Antar Daerah - LO	2024	2023
		Rp62.820.481.547,00	Rp99.795.316.748,02

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan rincian sebagai berikut:

7.5.4.1.b.3.a	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	2024	2023
		Rp60.216.121.547,00	Rp68.832.746.498,02

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.4.1.b.3.a Rincian Pendapatan Transfer antar Daerah - LO (Pendapatan Bagi Hasil Pajak)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / (Penurunan)	
				Nilai	%
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor - LO	17.697.866.475,00	10.254.398.543,00	7.443.467.932,00	72,59
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO	6.947.513.620,00	11.532.647.330,00	(4.585.133.710,00)	(39,76)



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / (Penurunan)	
				Nilai	%
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	14.793.747.507,00	27.451.626.052,02	(12.657.878.545,02)	(46,11)
4	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah - LO	187.756.397,00	125.589.253,00	62.167.144,00	49,50
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok - LO	20.589.237.548,00	19.468.485.320,00	1.120.752.228,00	5,76
	Jumlah	60.216.121.547,00	68.832.746.498,02	(8.616.624.951,02)	(12,52)

7.5.4.1.b.3.b	Bantuan Keuangan dari Provinsi - LO	2024	2023
		Rp2.604.360.000,00	Rp30.962.570.250,00

Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mendapat Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023 Nomor 988/VI/TAHUN 2023 tentang Alokasi Bantuan Pembayaran Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Peserta Penerima Biaya Iuran Lokal Pelayanan Kesehatan Gratis Per Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan I Januari s/d Maret 2023 dan SK Gubernur Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023 Nomor 1381/IX/TAHUN 2023 tentang Alokasi Bantuan Pembayaran Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Peserta Penerima Biaya Iuran Lokal Pelayanan Kesehatan Gratis Per Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan II April s/d Juni 2023, SK Gubernur Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023 Nomor 344/I/TAHUN 2023 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2023, dan SK Gubernur Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023 Nomor 934/V/TAHUN 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 344/I/TAHUN 2023 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2023.

Tabel 7.5.4.1.b.3.b Rincian Pendapatan Transfer antar Daerah - LO (Bantuan Keuangan dari Provinsi)

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / (Penurunan)	
				Nilai	%
1	Bantuan Keuangan dari Provinsi - LO	0,00	9.952.402.250,00	-9.952.402.250,00	(100,00)
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	2.604.360.000,00	21.010.168.000,00	-18.405.808.000,00	(87,60)
	Jumlah	2.604.360.000,00	30.962.570.250,00	-28.358.210.250,00	(91,59)



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

7.5.4.1.c	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah- LO	2024	2023
		Rp39.822.924.290,98	Rp40.135.363.117,10

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO merupakan penerimaan Pendapatan Hibah - LO dan Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan - LO dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.4.1.c Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / (Penurunan)	
				Nilai	%
1	Pendapatan Hibah - LO	16.912.207.329,98	16.705.368.281,10	206.839.048,88	1,24
2	Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan - LO	22.910.716.961,00	23.429.994.836,00	(519.277.875,00)	(2,22)
	Jumlah	39.822.924.290,98	40.135.363.117,10	(312.438.826,12)	(0,78)

7.5.4.1.c.1	Pendapatan Hibah - LO	2024	2023
		Rp16.912.207.329,98	Rp16.705.368.281,10

Pendapatan Hibah – LO Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2024 senilai Rp16.912.207.329,98. Pendapatan Hibah merupakan Penerimaan dalam bentuk Uang dan Barang dari Pemerintah Pusat atau Lembaga untuk membiayai kebutuhan daerah.

7.5.4.1.c.2	Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan - LO	2024	2023
		Rp22.910.716.961,00	Rp23.429.994.836,00

Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2024 senilai Rp22.910.716.961,00. Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO merupakan Pendapatan Dana Kapitasi dari JKN pada FKTP.

7.5.4.2	Beban – LO	2024	2023
		Rp1.471.595.213.590,31	Rp1.433.053.185.038,15

Beban Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan kepulauan tahun 2024 senilai Rp1.471.595.213.590,31 merupakan akumulasi dari beban selama tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

Tabel 7.5.4.2 Rincian Beban - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / (Penurunan)	
				Nilai	%
1	Beban Operasi	1.386.103.510.822,32	1.344.735.741.711,15	41.367.769.111,17	3,08
2	Beban Tak Terduga	1.547.677.900,00	3.970.415.183,00	-2.422.737.283,00	-61,02
3	Beban Transfer	83.944.024.867,99	84.347.028.144,00	-403.003.276,01	-0,48
	Jumlah	1.471.595.213.590,31	1.433.053.185.038,15	38.542.028.552,16	2,69

Realisasi Beban Operasi – LO Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.386.103.510.822,32 adalah Beban Operasi Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang telah dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan terdiri dari Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Hibah, Beban Barang dan Jasa BOS-LO, Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas, Beban Barang dan Jasa BLUD-LO, Beban Bunga-LO, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO, Beban Penyisihan Piutang-LO dan Beban Lain-Lain, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.4.2.a Rincian Beban - LO - Beban Operasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / (Penurunan)	
				Nilai	%
1	Beban Pegawai - LO	663.886.369.058,00	611.395.215.006,00	52.491.154.052,00	8,59
2	Beban Barang - LO	82.592.110.083,95	102.663.483.180,68	-20.071.373.096,73	- 19,55
3	Beban Persediaan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Beban Jasa – LO	145.443.606.104,71	146.176.061.565,72	-732.455.461,01	- 0,50
5	Beban Pemeliharaan - LO	7.898.735.957,00	7.059.777.865,24	838.958.091,76	11,88
6	Beban Perjalanan Dinas – LO	47.041.568.597,00	49.954.359.813,63	-2.912.791.216,63	- 5,83
7	Beban Uang/Jasa Untuk diberikan ke Pihak ketiga/pihak lain/masyarakat - LO	7.341.404.760,00	7.376.971.100,00	-35.566.340,00	- 0,48
8	Beban barang dan Jasa BOS – LO	42.060.514.566,00	45.969.495.825,00	-3.908.981.259,00	- 8,50
9	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	500.127.264,00	0,00	500.127.264,00	0,00
10	Beban barang dan Jasa BLUD – LO	54.638.666.833,63	32.665.232.929,43	21.973.433.904,20	67,27
11	Beban Bunga - LO	215.000.000,00	0,00	215.000.000,00	0,00
12	Beban Hibah - LO	59.550.024.144,00	65.949.986.908,00	-6.399.962.764,00	- 9,70
13	Beban Bantuan Sosial – LO	2.610.556.941,00	9.258.946.913,00	-6.648.389.972,00	- 71,81
14	Beban Penyisihan Piutang – LO	2.203.469.729,06	2.445.549.516,21	-242.079.787,15	- 9,90
15	Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO	270.121.356.783,97	263.820.661.088,24	6.300.695.695,73	2,39
	Jumlah	1.386.103.510.822,32	1.344.735.741.711,15	41.367.769.111,17	3,08



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

7.5.4.2.a.1	Beban Pegawai –	2024	2023
	LO	Rp663.886.369.058,00	Rp611.395.215.006,00

Beban Pegawai Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2024 senilai Rp663.886.369.058,00. merupakan akumulasi beban pegawai diseluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan rincian sebagai berikut:

Beban Pegawai – LO merupakan Beban Pegawai Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp663.886.369.058,00. yang terdiri dari Beban Gaji dan Tunjangan sebesar Rp452.774.659.200,00. Beban Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp50.635.976.636,00. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Sebesar Rp141.463.639.221,00 Beban Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp16.004.187.664,00 Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Rp1.081.945.737,00. Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Rp1.873.530.600,00. Beban Pegawai BLUD Rp52.430.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.4.2.a.1 Rincian Beban Operasi - LO - Beban Pegawai

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / (Penurunan)	
				Nilai	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	452.774.659.200,00	418.378.673.613,00	34.395.985.587,00	8,22
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	50.613.819.386,00	45.829.222.040,00	4.784.597.346,00	10,44
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	141.485.796.471,00	126.360.861.667,00	15.124.934.804,00	11,97
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	16.004.187.664,00	17.573.631.129,00	-1.569.443.465,00	-8,93
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.081.945.737,00	1.052.000.357,00	29.945.380,00	2,85
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.873.530.600,00	2.146.761.200,00	-273.230.600,00	-12,73
7	Beban Pegawai BLUD - LO	52.430.000,00	54.065.000,00	-1.635.000,00	-3,02
	jumlah	663.886.369.058,00	611.395.215.006,00	52.491.154.052,00	8,59

7.5.4.2.a.2	Beban Barang - LO	2024	2023
		Rp82.592.110.083,95	Rp102.663.483.180,68

Beban Persediaan merupakan Beban Barang Persediaan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp82.592.110.083,95 dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

Tabel 7.5.4.2.a.2 Rincian Beban Operasi - LO - Beban Barang

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / (Penurunan)	
				Nilai	%
1	Beban Bahan Pakai Habis - LO	81.275.784.516,65	102.654.935.180,68	-21.379.150.664,03	-20,83
2	Beban Bahan Tak Pakai Habis - LO	0,00	8.548.000,00	-8.548.000,00	-100,00
3	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi -LO	1.316.325.567,30	0,00	1.316.325.567,30	0,00
4	Beban Cetak dan Penggandaan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Beban Makanan dan Minuman - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Beban Pakaian Kerja - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Beban Barang yang diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	82.592.110.083,95	102.663.483.180,68	-20.071.373.096,73	-19,55

7.5.4.2.a.3 Beban Jasa - LO 2024 2023
Rp145.443.606.104,71 Rp146.176.061.565,72

Realisasi Beban Jasa-LO Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp145.443.606.104,71 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.4.2.a.3 Rincian Beban - LO - Beban Jasa

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / (Penurunan)	
				Nilai	%
1	Beban Jasa Kantor - LO	99.951.461.802,02	100.286.432.335,14	-334.970.533,12	-0,33
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi - LO	31.671.141.572,00	31.954.410.900,00	-283.269.328,00	-0,89
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin - LO	1.720.881.000,00	2.695.902.700,00	-975.021.700,00	-36,17
4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan - LO	3.534.489.000,00	4.107.277.000,00	-572.788.000,00	-13,95
5	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud - LO	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
6	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor - LO	0,00	0,00	0,00	0,00



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / (Penurunan)	
				Nilai	%
7	Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Beban Honorarium Non Pegawai - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Beban Honorarium PNS - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Beban Honorarium Pengelola Dana BOS - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Beban Jasa Konsultasi Kontruksi - LO	491.159.100,00	590.657.146,58	-99.498.046,58	-16,85
14	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi - LO	382.081.000,00	476.651.150,00	-94.570.150,00	-19,84
15	Beban Jasa Konsultasi - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	23.287.300,00	356.382.300,00	-333.095.000,00	-93,47
17	Beban Rumah Tangga - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Beban Barang dan Jasa Dana BOS - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan - LO	6.654.834.356,00	4.700.699.149,00	1.954.135.207,00	41,57
20	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN - LO	992.967.674,00	1.007.648.885,00	-14.681.211,00	-1,46
21	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi - LO	6.480.768,00	0,00	6.480.768,00	0,00
	Jumlah	145.443.606.104,71	146.176.061.565,72	-732.455.461,01	-0,50

7.5.4.2.a.4 **Beban Pemeliharaan - LO** **2024** **2023**
Rp7.898.735.957,00 **Rp7.059.777.865,24**

Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp7.898.735.957,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.4.2.a.4 Rincian Beban Operasi - LO - Beban Pemeliharaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / (Penurunan)	
				Nilai	%
1	Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	46.943.300,00	-46.943.300,00	-100,00
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - LO	2.866.985.855,00	3.455.188.789,00	-588.202.934,00	-17,02



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / (Penurunan)	
				Nilai	%
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - LO	3.929.636.102,00	3.209.598.280,24	720.037.821,76	22,43
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi - LO	1.102.114.000,00	300.547.496,00	801.566.504,00	266,70
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya - LO	0,00	45.000.000,00	-45.000.000,00	-100,00
6	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	-100,00
	Jumlah	7.898.735.957,00	7.059.777.865,24	838.958.091,76	11,88

7.5.4.2.a.5	Beban Perjalanan Dinas – LO	2024	2023
		Rp47.041.568.597,00	Rp49.954.359.813,63

Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp47.041.568.597,00. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.4.2.a.5 Rincian Beban Operasi - LO - Beban Perjalanan Dinas

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / (Penurunan)	
				Nilai	%
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam daerah - LO	46.925.872.217,00	49.469.147.394,63	-2.543.275.177,63	-5,14
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri- LO	115.696.380,00	485.212.419,00	-369.516.039,00	-76,16
	Jumlah	47.041.568.597,00	49.954.359.813,63	-2.912.791.216,63	-5,83

7.5.4.2.a.6	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2024	2023
		Rp7.341.404.760,00	Rp7.376.971.100,00

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp7.341.404.760,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.4.2.a.6 Rincian Beban Operasi - LO - Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / (Penurunan)	
				Nilai	%
1	Beban uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.341.404.760,00	7.332.571.100,00	8.833.660,00	0,12
2	Beban jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	44.400.000,00	-44.400.000,00	-100,00
	Jumlah	7.341.404.760,00	7.376.971.100,00	-35.566.340,00	-0,48



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

7.5.4.2.a.7	Beban Barang dan Jasa BOS	2024	2023
		Rp42.060.514.566,00	Rp45.969.495.825,00

Beban Barang dan Jasa BOS Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp42.060.514.566,00. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.4.2.a.7 Rincian Beban Operasi - LO - Barang dan Jasa BOS

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / (Penurunan)	
				Nilai	%
1	Belanja Barang dan Jasa BOS	42.060.514.566,00	45.969.495.825,00	-3.908.981.259,00	-8,50
	Jumlah	42.060.514.566,00	45.969.495.825,00	-3.908.981.259,00	-8,50

7.5.4.2.a.8	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	2024	2023
		Rp500.127.264,00	Rp0,00

Beban Barang dan Jasa BOS Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp500.127.264,00. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.4.2.a.8 Rincian Beban Operasi - LO - Barang dan Jasa BOK Puskesmas

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / (Penurunan)	
				Nilai	%
1	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	500.127.264,00	0,00	500.127.264,00	0,00
	Jumlah	500.127.264,00	0,00	500.127.264,00	0,00

7.5.4.2.a.9	Barang dan Jasa BLUD	2024	2023
		Rp54.638.666.833,63	Rp32.665.232.929,43

Beban Barang dan Jasa BLUD Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp54.638.666.833,63 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.4.2.a.9 Rincian Beban Operasi - LO - Barang dan Jasa BLUD

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / (Penurunan)	
				Nilai	%
1	Belanja Barang dan Jasa BLUD	54.638.666.833,63	32.665.232.929,43	21.973.433.904,20	67,27
	Jumlah	54.638.666.833,63	32.665.232.929,43	21.973.433.904,20	67,27



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

7.5.4.2.a.10 Beban Bunga

2024
Rp215.000.000,00

2023
Rp0,00

Beban Bunga Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp215.000.000,00.
dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.4.2.a.10 Rincian Beban Operasi - LO - Beban Bunga

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / (Penurunan)	
				Nilai	%
1	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	215.000.000,00	0,00	215.000.000,00	0,00
	Jumlah	215.000.000,00	0,00	215.000.000,00	0,00

7.5.4.2.a.11 Beban Hibah -
LO

2024
Rp59.550.024.144,00

2023
Rp65.949.986.908,00

Beban Hibah Tahun Anggaran 2024 per 31 Desember 2024 sebesar Rp59.550.024.144,00 terdiri dari Hibah Uang sebesar Rp45.095.098.914,00 dan Hibah Barang sebesar Rp14.454.925.230,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.4.2.a.11 Rincian Beban Operasi - LO - Beban Hibah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / (Penurunan)	
				Nilai	%
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	29.739.812.530,00	16.343.621.600,00	13.396.190.930,00	81,97
2	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	25.385.314.948,00	48.701.925.308,00	-23.316.610.360,00	-47,88
3	Beban Hibah Dana BOS	3.509.200.000,00	0,00	3.509.200.000,00	0,00
4	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	915.696.666,00	904.440.000,00	11.256.666,00	1,24
	Jumlah	59.550.024.144,00	65.949.986.908,00	-6.399.962.764,00	-9,70

7.5.4.2.a.11.a Beban Hibah
Uang - LO

2024
Rp45.095.098.914,00

2023
Rp35.531.727.250,00

Beban Hibah Uang Tahun Anggaran 2024 per 31 Desember 2024 sebesar Rp45.095.098.914,00.



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

Tabel 7.5.4.2.a.11.a Rincian Beban Operasi - LO - Beban Hibah Uang

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / (Penurunan)	
				Nilai	%
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	26.646.248.630,00	13.800.000.000,00	12.846.248.630,00	93,09
2	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.762.606.118,00	8.317.800.000,00	-3.555.193.882,00	-42,74
3	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	8.137.840.000,00	9.759.487.250,00	-1.621.647.250,00	-16,62
4	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.123.507.500,00	2.750.000.000,00	-1.626.492.500,00	-59,15
5	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	1.402.200.000,00	0,00	1.402.200.000,00	0,00
6	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	2.107.000.000,00	0,00	2.107.000.000,00	0,00
7	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	915.696.666,00	904.440.000,00	11.256.666,00	1,24
	Jumlah	45.095.098.914,00	35.531.727.250,00	9.563.371.664,00	26,92

7.5.4.2.a.11.b	Beban Hibah Barang - LO	2024	2023
		Rp14.454.925.230,00	Rp30.418.259.658,00

Beban Hibah Barang Tahun Anggaran 2024 per 31 Desember 2024 sebesar Rp14.454.925.230,00.

Tabel 7.5.4.2.a.11.b Rincian Beban Operasi - LO - Beban Hibah Barang

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / (Penurunan)	
				Nilai	%
1	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	3.093.563.900,00	2.543.621.600,00	549.942.300,00	21,62
2	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	376.980.600,00	-376.980.600,00	-100,00
3	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	9.285.039.160,00	26.695.927.458,00	-17.410.888.298,00	-65,22



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / (Penurunan)	
				Nilai	%
4	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.025.362.170,00	801.730.000,00	1.223.632.170,00	152,62
5	Beban Hibah Barang kepada Koperasi	50.960.000,00	0,00	50.960.000,00	0,00
	Jumlah	14.454.925.230,00	30.418.259.658,00	-15.963.334.428,00	-52,48

7.5.4.2.a.12	Beban Bantuan Sosial – LO	2024	2023
		Rp2.610.556.941,00	Rp9.258.946.913,00

Beban Bantuan Sosial untuk periode 1 Januari 2024 sampai tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp2.610.556.941,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.4.2.a.12 Rincian Beban Operasi - LO - Beban Bantuan Sosial

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / (Penurunan)	
				Nilai	%
1	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	2.543.326.941,00	1.974.515.200,00	568.811.741,00	28,81
2	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	37.230.000,00	4.261.416.333,00	-4.224.186.333,00	-99,13
3	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	30.000.000,00	2.146.036.200,00	-2.116.036.200,00	-98,60
4	Beban Bantuan Sosial Barang kepada Kelompok Masyarakat	0,00	876.979.180,00	-876.979.180,00	-100,00
	Jumlah	2.610.556.941,00	9.258.946.913,00	-6.648.389.972,00	-71,81

7.5.4.2.a.13	Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO	2024	2023
		Rp270.121.356.783,97	Rp263.820.661.088,24

Beban Penyusutan dan Amortisasi senilai Rp270.121.356.783,97 merupakan akumulasi penyusutan dari aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud tahun 2024. Rincian beban penyusutan tahun 2024 sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

Tabel 7.5.4.2.a.13 Rincian Beban Operasi - LO - Beban Penyusutan dan Amortisasi
(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / (Penurunan)	
				Nilai	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - LO	59.568.701.419,78	54.509.776.430,69	5.058.924.989,09	9,28
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - LO	53.534.362.380,90	49.929.363.630,40	3.604.998.750,50	7,22
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan - LO	156.349.676.138,20	158.804.349.385,69	-2.454.673.247,49	-1,55
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Jumlah Beban Penyusutan 5 = (1 + 2 + 3 + 4)	269.452.739.938,88	263.243.489.446,78	6.209.250.492,10	2,36
6	Beban Amortisasi Tak Berwujud - LO	668.616.845,09	577.171.641,46	91.445.203,63	15,84
7	Beban Amortisasi Aset Lain-Lain - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Jumlah Beban Amortisasi 8 = (6 + 7)	668.616.845,09	577.171.641,46	91.445.203,63	15,84
	Jumlah	270.121.356.783,97	263.820.661.088,24	6.300.695.695,73	2,39

7.5.4.2.a.14 Beban Penyisihan Piutang - LO 2024 2023
Rp2.203.469.729,06 **Rp2.445.549.516,21**

Jumlah Beban Penyisihan Piutang untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp2.203.469.729,06 yang terdiri dari:

Tabel 7.5.4.2.a.14 Rincian Beban Operasi - LO - Beban Penyisihan Piutang
(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / (Penurunan)	
				Nilai	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak - LO	1.717.727.497,78	1.736.184.694,69	-18.457.196,91	-1,06
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi - LO	210.519.140,76	371.538.872,37	-161.019.731,61	-43,34
3	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	90.348.501,30	0,00	90.348.501,30	0,00
4	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - LO	149.326.862,00	207.044.128,69	-57.717.266,69	-27,88
5	Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	35.547.727,22	-11.655.906,39	47.203.633,61	-404,98
6	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Beban Penyisihan Bagian Lancar Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi - LO	0,00	142.437.726,85	-142.437.726,85	-100,00
	Jumlah	2.203.469.729,06	2.445.549.516,21	-242.079.787,15	-9,90



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

7.5.4.2.b	Beban Transfer- LO	2024	2023
		Rp83.944.024.867,99	Rp84.347.028.144,00

Beban Transfer - LO tahun 2024 sebesar Rp83.944.024.867,99 dari periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.4.2.b Rincian Beban Transfer - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / (Penurunan)	
				Nilai	%
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten Kota dan Desa	3.932.848.999,00	7.310.298.051,00	-3.377.449.052,00	-46,20
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten Kota dan Desa	519.676.708,00	937.488.790,00	-417.812.082,00	-44,57
3	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa - LO	79.113.908.100,00	76.099.241.303,00	3.014.666.797,00	3,96
5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	377.591.060,99	0,00	377.591.060,99	0,00
	Jumlah	83.944.024.867,99	84.347.028.144,00	-403.003.276,01	-0,48

7.5.4.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	2024	2023
		Rp7.121.239.116,26	Rp8.153.377.655,57

Rincian Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp7.121.239.116,26 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.4.3 Rincian Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / (Penurunan)	
				Nilai	%
1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	5.157.629.312,00	5.648.524.258,32	-490.894.946,32	-8,69
2	Defisit Investasi Non Permanen				
3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	1.963.609.804,26	2.504.853.397,25	-541.243.592,99	-21,61
	Jumlah	7.121.239.116,26	8.153.377.655,57	-1.032.138.539,31	-12,66



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

7.5.4.4	Beban Luar Biasa - LO	2024	2023
		Rp1.547.677.900,00	Rp3.970.415.183,00

Beban Luar Biasa – LO merupakan beban tidak terduga pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp1.547.677.900,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.4.4 Rincian Pos Luar Biasa - LO - Beban Luar Biasa

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / (Penurunan)	
				Nilai	%
1	Beban Luar Biasa	1.547.677.900,00	3.970.415.183,00	-2.422.737.283,00	-61,02
	Jumlah	1.547.677.900,00	3.970.415.183,00	-2.422.737.283,00	-61,02

7.5.4.5	Surplus/Defisit - LO	2024	2023
		Rp20.981.041.327,21	Rp15.847.313.463,83

Surplus (Defisit) – LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dengan Beban- LO selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan dengan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp20.981.041.327,21 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.4.5 Rincian Surplus/Defisit – LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / (Penurunan)	
				Nilai	%
1	Total Pendapatan - LO	1.499.077.451.662,95	1.457.053.876.157,55	42.023.575.505,40	2,88
2	Total Beban Operasi - LO	1.115.982.154.038,35	1.080.915.080.622,91	35.067.073.415,44	3,24
3	Total Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO	270.121.356.783,97	263.820.661.088,24	6.300.695.695,73	2,39
4	Total Beban Transfer - LO	83.944.024.867,99	84.347.028.144,00	-403.003.276,01	-0,48
5	Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Operasi - LO	29.029.915.972,64	27.971.106.302,40	1.058.809.670,24	3,79
6	Surplus dari Keg Non Operasional Lainnya	620.042.370,83	0,00	620.042.370,83	0,00
7	Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional - LO	7.121.239.116,26	8.153.377.655,57	(1.032.138.539,31)	-12,66
8	Beban Luar Biasa	1.547.677.900,00	3.970.415.183,00	(2.422.737.283,00)	-61,02
9	Surplus - LO	20.981.041.327,21	15.847.313.463,83	5.133.727.863,38	32,39



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

7.5.5 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

7.5.5.1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	2024 Rp288.580.823.376,62	2023 Rp291.266.240.910,12

7.5.5.1.a	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	2024 Rp1.544.915.975.584,74	2023 Rp1.504.451.367.717,91

Arus Kas dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp288.580.823.376,62 merupakan pengurangan Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi sebesar Rp1.544.915.975.584,74 dengan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi sebesar Rp1.256.335.152.208,12 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.5.1.a Rincian Arus Kas Masuk - Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023
1	Penerimaan Pajak Daerah	136.543.303.074,16	94.937.575.968,44
2	Penerimaan Retribusi Daerah	12.095.295.508,00	9.440.950.198,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.009.057.431,00	12.927.838.786,00
4	Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah	66.890.940.723,60	59.130.875.287,45
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil	25.613.641.664,00	27.085.286.494,00
6	Penerimaan Dana Alokasi Umum	787.431.926.000,00	746.290.902.260,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	124.338.989.980,00	134.234.092.286,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	217.489.168.427,00	209.945.327.315,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Penugasan		0,00
10	Penerimaan Dana Insentif Daerah	0,00	17.797.293.000,00
11	Penerimaan Dana Desa	66.353.379.960,00	65.102.177.990,00
	Penerimaan Insentif Fiskal	11.568.556.000,00	0,00
12	Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	53.106.576.104,00	76.123.891.525,02
13	Penerimaan Bantuan Keuangan	7.564.323.750,00	26.002.606.500,00
14	Penerimaan Hibah	100.001,98	2.002.555.272,00
15	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	22.910.716.961,00	23.429.994.836,00
16	Penerimaan dari Sumbangan Pihak Ketiga/sejenis	0,00	0,00
	Arus Kas Masuk	1.544.915.975.584,74	1.504.451.367.717,91



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

7.5.5.2	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	2024	2023
		Rp1.256.335.508.828,12	(Rp1.213.185.126.807,79)

Arus Kas Keluar adalah jumlah realisasi pengeluaran kas yang berkenaan dengan kegiatan operasional dalam periode Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.5.2 Rincian Arus Kas Keluar - Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023
1	Pembayaran Pegawai	660.312.992.167,00	611.642.239.921,00
2	Pembayaran Barang dan Jasa	379.281.519.837,12	366.587.257.014,79
3	Pembayaran Bunga	215.000.000,00	0,00
4	Pembayaran Belanja Hibah	61.888.921.596,00	64.547.861.642,00
5	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	2.758.326.941,00	16.988.146.913,00
6	Pembayaran Tak terduga	1.958.577.900,00	3.970.415.183,00
7	Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintahan Desa	4.452.525.707,00	8.247.786.841,00
8	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	145.467.288.060,00	141.201.419.293,00
Jumlah Arus Kas Keluar		1.256.335.152.208,12	1.213.185.126.807,79
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		288.580.823.376,62	291.266.240.910,12

Sehingga arus kas bersih dari aktivitas operasi pada Tahun Anggaran 2024 ini sebesar Rp288.580.823.376,62 yang merupakan pengurangan antara jumlah realisasi penerimaan dengan pengeluaran kas yang berkenaan dengan kegiatan operasional dalam periode Tahun Anggaran 2024.

7.5.5.3	Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	2024	2023
		(Rp234.159.119.705,37)	(Rp301.756.061.831,46)

7.5.5.3.a	Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Investasi	2024	2023
		Rp164.255.300	Rp186.143.600,00

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dimasa yang akan datang. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2024 sebesar (Rp234.159.119.705,37) merupakan pengurangan Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi sebesar Rp164.255.300 dengan Arus Keluar Kas dari



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

Aktivitas Investasi sebesar Rp234.323.375.005,37 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.5.3.a Rincian Arus Kas Masuk - Aktivitas Investasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023
1	Penjualan Aset Lainnya	0,00	186.143.600,00
2	Penjualan Aset Lain-lain	164.255.300,00	0,00
	Arus Kas Masuk	164.255.300,00	186.143.600,00

7.5.5.4	Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Investasi	2024 Rp234.323.375.005,37	2023 Rp301.942.205.431,46

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi adalah jumlah pengeluaran kas atas realisasi belanja modal/pembangunan/investasi dalam Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.5.4 Rincian Arus Kas Keluar - Aktivitas Investasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023
1	Perolehan Tanah	465.430.000,00	4.390.301.200,00
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	54.607.117.769,37	55.003.140.097,00
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	99.027.835.883,00	110.546.633.594,54
4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	70.691.907.253,00	118.039.776.751,92
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	8.829.456.200,00	9.404.188.287,00
6	Perolehan Aset Lainnya	701.627.900,00	58.165.501,00
7	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	4.500.000.000,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	234.323.375.005,37	301.942.205.431,46
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	-234.159.119.705,37	-301.756.061.831,46

Sehingga arus kas bersih dari aktivitas investasi pada tahun 2024 ini sebesar (Rp234.159.119.705,37) yang merupakan pengurangan antara jumlah realisasi penerimaan dengan pengeluaran kas yang berkenaan dengan kegiatan investasi dalam periode Tahun Anggaran 2024.

7.5.5.5	Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	2024 Rp0	2023 Rp8.000.000.000,00

7.5.5.5.a	Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Pendanaan	2024 Rp0	2023 Rp8.000.000.000,00

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan penggunaan surplus anggaran bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

dan klaim pemerintah terhadap pihak lain dimasa yang akan datang. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp0,00 merupakan pengurangan Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp0,00 dengan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp8.000.000.000,00. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan adalah jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.5.5.a Rincian Arus Kas Masuk - Aktivitas Pendanaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023
1	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
2	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00
3	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank	0,00	8.000.000.000,00
4	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
5	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)	0,00	0,00
6	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	0,00	8.000.000.000,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	-234.159.119.705,37	0,00

7.5.5.6	Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Pendanaan	2024	2023
		Rp8.000.000.000,00	Rp0,00

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan adalah jumlah pengeluaran kas atas realisasi Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri dalam Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.5.6 Rincian Arus Kas Keluar - Aktivitas Pendanaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023
1	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00
2	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00
3	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank	8.000.000.000,00	0,00
4	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
5	Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)	0,00	0,00
6	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	8.000.000.000,00	0,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	-8.000.000.000,00	0,00

Sehingga arus kas bersih dari aktivitas pendanaan pada tahun 2024 ini sebesar Rp8.000.000.000,00 yang merupakan pengurangan jumlah



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

antara realisasi penerimaan kas dengan pengeluaran kas yang berkenaan dengan aktivitas pendanaan dalam periode Tahun Anggaran 2024.

7.5.5.7.a	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	2024 Rp0,00	2023 Rp0,00
7.5.5.7.b	Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Transitoris	2024 Rp43.742.941.010,00	2023 Rp48.666.645.794,00

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran berupa potongan yang dipungut dari PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari PPh 21, Iuran Wajib Pegawai dan Tabungan Perumahan. Arus Kas bersih dari Aktivitas Transitoris dalam Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp43.742.941.010,00 dengan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp48.666.645.794,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.5.7.b Rincian Arus Kas Masuk - Aktivitas Transitoris
(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023
1	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	43.742.941.010,00	48.666.645.794,00
	Arus Kas Masuk	43.742.941.010,00	48.666.645.794,00

7.5.5.4.c	Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Transitoris	2024 Rp43.742.941.010,00	2023 Rp48.666.645.794,00

Dalam Tahun Anggaran 2024 terdapat penyetoran Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) atas pemotongan/pemungutan IWP dan PPh 21, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.5.4.c Rincian Arus Kas Keluar - Aktivitas Transitoris
(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023
1	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	43.742.941.010,00	48.666.645.794,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	43.742.941.010,00	48.666.645.794,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	0,00	0,00

Sehingga arus kas bersih dari aktivitas Transitoris pada tahun 2024 ini sebesar Rp0,00 yang merupakan pengurangan antara jumlah realisasi



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

penerimaan dikurangi pengeluaran kas yang berkenaan dengan kegiatan transitoris dalam periode Tahun Anggaran 2024.

7.5.5.8	Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas	2024	2023
		Rp46.421.703.671,25	(Rp2.489.820.921,34)

Kenaikan (penurunan) bersih kas selama periode berjalan merupakan total dari aliran kas bersih dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris. Kenaikan/penurunan bersih kas selama periode berjalan kemudian dijumlahkan dengan saldo awal kas, sehingga diperoleh saldo akhir kas daerah. Pada Tahun Anggaran 2024 penurunan bersih kas selama periode berjalan adalah sebesar Rp46.421.703.671,25 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 7.5.5.8. Rincian Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023
1	Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	288.580.823.376,62	291.266.240.910,12
2	Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	-234.159.119.705,37	-301.756.061.831,46
3	Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	-8.000.000.000,00	8.000.000.000,00
4	Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	0,00	0,00
	Jumlah Aliran Kas Bersih	46.421.703.671,25	-2.489.820.921,34

Sedangkan perhitungan Saldo Akhir Kas, sebagai berikut:

Tabel 7.5.5.8.a Rincian Perhitungan Saldo Akhir Kas

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023
1	Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas	46.421.703.671,25	-2.489.820.921,34
2	Saldo Awal di Kas	11.026.844.179,66	13.516.665.101,00
3	Saldo Akhir di Kas	57.448.547.850,91	11.026.844.179,66

7.5.5.8.b	Saldo Akhir Kas	2024	2023
		Rp57.448.547.850,91	Rp11.026.844.179,66

Saldo akhir kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp57.448.547.850,91 terdiri dari penjumlahan Saldo Akhir Kas, dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

Tabel 7.5.5.8.b Rincian Saldo Akhir Kas

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023
1	Saldo Akhir Kas di BUD	51.192.990.140,33	8.342.507.349,12
2	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	37.794.200,00	576.290.600,00
3	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	600.100,19	6.900.001,00
4	Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
5	Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD	5.182.497.148,03	514.530.737,97
6	Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	0,00	14.299.000,00
7	Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi Pada FKTP	19.962.911,00	67.189.850,00
8	Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	791.946,36	1.505.126.641,57
9	Saldo Akhir Kas Dana BOSP	42.884.196,00	0,00
10	Saldo Akhir Kas Dana BOK Puskesmas	971.027.209,00	0,00
	Saldo Akhir Kas	57.448.547.850,91	11.026.844.179,66

Silpa LRA sebesar Rp57.448.547.850,91 saldo akhir Kas
Rp57.448.547.850,91 sehingga tidak terdapat selisih.



7.5.6 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 menyajikan Ekuitas Awal dan Ekuitas Akhir tahun 2023. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Ekuitas, dapat dijelaskan sebagai berikut.

7.5.6.1	Ekuitas Awal	2024	2023
		Rp1.958.635.958.627,88	Rp1.937.408.637.176,95
Ekuitas Awal tahun 2024 senilai Rp1.958.635.958.627,88 yang merupakan saldo akhir ekuitas di Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca per 31 Desember 2023 (Audited).			

7.5.6.2	Surplus/Defisit- LO	2024	2023
		Rp20.981.041.327,21	Rp15.847.313.463,83
Surplus/Defisit–LO senilai Rp20.981.041.327,21 sesuai dengan Surplus/Defisit Laporan Operasional Tahun 2024.			

7.5.6.3	Dampak Kumulatif Perubahan KebijakanAkuntansi Kesalahan Mendasar	2024	2023
		Rp3.256.827.069,65	Rp5.380.007.987,10

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi Kesalahan Mendasar senilai Rp3.256.827.069,65 sesuai dengan Dampak Komulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi Kesalahan Mendasar Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2024.

7.5.6.4	Ekuitas Akhir	2024	2023
		Rp1.982.873.827.024,74	Rp1.958.635.958.627,88

Laporan Perubahan Ekuitas Akhir per 31 Desember 2024 senilai Rp1.982.873.827.024,74 sesuai dengan jumlah ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024, dengan perhitungan sebagai berikut:

1	Ekuitas Awal	Rp	1.958.635.958.627,88
2	Surplus/Defisit-LO	Rp	20.981.041.327,21
3	Koreksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar	Rp	3.256.827.069,65
Jumlah Ekuitas Akhir		Rp	1.982.873.827.024,74



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan

Rincian ekuitas akhir diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 7.5.6.1 Rincian Laporan Perubahan Ekuitas

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	
				Nilai	%
1	Ekuitas Awal	1.958.635.958.627,88	1.937.408.637.176,95	21.227.321.450,93	1,10
2	Surplus / (Defisit) - LO	20.981.041.327,21	15.847.313.463,83	5.133.727.863,38	32,39
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar	3.256.827.069,65	5.380.007.987,10	-2.123.180.917,45	-39,46
4	Saldo Awal Persediaan	0,00	0,00	-	-
5	Koreksi Persediaan	0,00	0,00	-	-
6	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00	-	-
7	Saldo Awal Koreksi Ekuitas	0,00	0,00	-	-
8	Koreksi Saldo Awal BOS	0,00	0,00	-	-
9	Review BOS	0,00	0,00	-	-
10	Perubahan Aset	0,00	0,00	-	-
11	Penyusutan	0,00	0,00	-	-
12	Aset Tak Berwujud (ATB)	0,00	0,00	-	-
13	Piutang	0,00	0,00	-	-
14	Jasa Giro	0,00	0,00	-	-
15	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	-	-
16	Koreksi Lainnya	3.256.827.069,65	5.380.007.987,10	-2.123.180.917,45	-39,46
17	Perubahan Ekuitas	0,00	0,00	-	-
	Ekuitas Akhir	1.982.873.827.024,74	1.958.635.958.627,88	24.237.868.396,86	1,24



7.6 PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Dalam melaksanakan seluruh aktifitas operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berpusat di Kantor Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin, Pangkajene. Seluruh aktifitas operasional di awasi langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati yang dibantu oleh 1 orang Sekretaris Daerah, 3 orang Asisten, 3 orang Staf Ahli, 42 Kepala Dinas/Badan/Kantor dan para staf baik ASN, THL maupun tenaga sukarela.

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri wilayah dataran rendah, pegunungan dan kepulauan ini terbagi dalam 13 kecamatan, 7 kecamatan berada di wilayah daratan, 2 kecamatan berada di wilayah pegunungan, dan 4 kecamatan berada di wilayah kepulauan. dengan luas wilayah secara keseluruhan 1.112,2 Km².

Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terletak dipesisir pantai barat Sulawesi Selatan. berada di antara 110⁰ BT dan 4⁰.40' LS sampai dengan 8⁰.00' LS dengan batas-batas administrasi sebagai berikut:

- ▲ Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Barru;
- ▲ Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Maros;
- ▲ Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone;
- ▲ Sebelah Barat berbatasan dengan Pulau Kalimantan, Pulau Jawa dan Madura, Pulau Bali dan Nusa Tenggara.

Pada Tahun Anggaran 2020 sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. terjadi perubahan struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang mengakibatkan perubahan jumlah entitas akuntansi yang pada Tahun Anggaran 2016 sebanyak 46 menjadi sebanyak 42 pada Tahun Anggaran 2021. dan terjadi perubahan kewenangan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam bidang Pendidikan, ESDM dan Kehutanan sebagai dampak penerapan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengakibatkan mobilisasi personil, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumentasi (P3D) dari Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ke Pemerintah Provinsi dan Pusat.

Keberhasilan dalam memimpin suatu wilayah. dapat dilihat dari berbagai segi. diantaranya adalah meningkatnya kesadaran penduduk akan kesehatan, pentingnya Pendidikan, dan keberhasilan meningkatkan kesejahteraan penduduk, serta keamanan suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Untuk mencapai itu semua, Kepala Daerah melakukan



koordinasi dengan semua elemen dan komponen yang berada dalam wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Keberhasilan dalam memimpin suatu wilayah. dapat dilihat dari berbagai segi. diantaranya adalah meningkatnya kesadaran penduduk akan kesehatan,. pentingnya pendidikan dan keberhasilan meningkatkan kesejahteraan penduduk, serta keamanan suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Untuk mencapai itu semua. Kepala Daerah melakukan koordinasi dengan semua elemen dan komponen yang berada dalam wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

1.Kesehatan

Pembangunan di Bidang Kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah, dan merata. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan yang baik. Salah satu indikasi adanya peningkatan derajat kesehatan adalah penurunan angka kematian bayi (AKB), meningkatnya partisipasi dalam melaksanakan imunisasi. pemerataan pelayanan dan seras serta masyarakat.

Sejak tahun anggaran 2007. Bupati telah mencanangkan kesehatan gratis di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang dimulai dari tingkat pelayanan kesehatan terbawah hingga Rumah Sakit khusus rawat inap Klas III. Pelayanan gratis ini dilakukan pada hari dan jam kerja (berlaku pada Puskesmas hingga unit terkecil), meliputi pemeriksaan dan pemberian obat-obatan, kecuali pasien dalam kondisi tertentu yang memerlukan penanganan diluar waktu yang telah disebutkan diatas ataupun bertempat tinggal jauh dari lokasi pelayanan kesehatan terdekat.

Pelayanan di RSUD diluar pasien rawat inap Klas III tetap dipungut biaya, termasuk pasien yang melakukan pengobatan berjalan.

Untuk menunjang semua kebijakan Kepala Daerah ini, telah berdiri 23 Puskesmas, 58 Pustu, dan 61 Poskesdes yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan, Maka Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

2. Pendidikan

Untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting. karena



merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan ketrampilan.

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan akan sangat menunjang dalam peningkatan mutu pendidikan. Di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berdiri 54 TK, 300 SD/ sederajat, 38 SLTP/ sederajat.

Dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terjadi beberapa perubahan mendasar terkait penyelenggaraan urusan Pemerintahan di daerah. diantaranya beralihnya urusan penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan khusus dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Provinsi.

Kepala Daerah memberikan kemudahan untuk anak usia sekolah mengenyam pendidikan dengan melakukan pendidikan gratis. Dengan adanya pendidikan gratis ini diharapkan agar menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk membangun dan mengembangkan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada Tahun Anggaran 2021 ini mendapatkan bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang tersebar pada beberapa Sekolah Dasar dengan jumlah secara keseluruhan sebesar Rp307.083.000,00.

3. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Salah satu tantangan besar yang dihadapi saat ini adalah menciptakan lapangan kerja atau usaha yang layak bagi angkatan kerja yang besar dan cenderung terus menerus meningkat karena perubahan struktur umum penduduk.

4. Keamanan

Keamanan suatu wilayah akan membuat masyarakat yang mendiami wilayah tertentu merasa aman dan tentram. Dengan luas wilayah 1.112.29Km², Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan secara umum merupakan wilayah yang aman, sehingga dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya dalam rangka pengembangan wilayah.



7.7 PENUTUP

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2024 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 7.7.1. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 disusun berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 7.7.2. Menggambarkan pencapaian target atas kinerja, komposisi aset, kewajiban dan ekuitas, serta informasi penerimaan dan pengeluaran kas berdasarkan aktivitas Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- 7.7.3. Sesuai dengan Laporan Posisi Kas per 31 Desember 2024 yang disusun oleh Kas Daerah, maka ikhtisar saldo akhir tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp51.192.990.140,33 yang terdapat pada rekening Kas Umum Daerah.
- 7.7.4. Sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2024, maka ikhtisar Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2024 adalah sebesar Rp57.448.547.850,91 terdiri dari:



Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024
Catatan atas Laporan Keuangan

Tabel Ikhtisar Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2024

Tabel Ikhtisar Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2024

No.	Uraian	2024	2023
1	Kas		
a	Saldo Akhir Kas di BUD	51.192.990.140,33	8.342.507.349,12
b	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	600.100,19	6.900.001,00
c	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	37.794.200,00	576.290.600,00
d	Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD	5.182.497.148,03	514.530.737,97
e	Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi Pada FKTP	19.962.911,00	67.189.850,00
f	Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	0,00	14.299.000,00
g	Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	791.946,36	1.505.126.641,57
h	Saldo Akhir Kas Dana BOSP	42.884.196,00	0,00
i	Saldo Akhir Kas Dana BOK Puskesmas	971.027.209,00	0,00
Jumlah Kas (a sampai dengan i)		57.448.547.850,91	11.026.844.179,66

BUPATI

H. MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

LAMPIRAN



REKAPITULASI DAFTAR GAJI PNS DAERAH GAJI INDUK
BULAN : DESEMBER 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN SELURUH SKPD

NO	URAIAN	GOL. I	GOL. II	GOL. III	GOL. IV	JUMLAH	VI. POTONGAN	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7(3+4+5+6)		
I. II III IV V	JUMLAH PENERIMA (ORANG)	33	1185	7605	5154	13977		
	1. PEGAWAI	11	438	2722	1852	5023		
	2. ISTRI / SUAMI	9	299	1885	1307	3500		
	3. ANAK	13	448	2998	1995	5454		
	JUMLAH PENERIMA (ORANG)	0	228	2.209	1.814	4.251	1. IWP 1%	246,209,345
	1. STRUKTURAL	0	0	420	164	584	2. IWP 8%	1,781,388,283
	2. FUNGSIONAL	0	227	1,770	1,646	3,643	3. BPJS	0
	3. DAERAH TERPENCIL	0	0	0	0	0	4. PFK BULOG	0
	4. FUNGSIONAL KHUSUS	0	1	19	4	24	5. TAPERUM	0
	JUMLAH GAJI / TUNJ (Rp)	33.589.967	1.492.798.387	12.191.993.641	10.927.696.000	22.900.073.246	6. P P H	24,912,905
	01. GAJI POKOK	28,647,700	1,278,754,500	10,149,408,810	8,950,521,300	20,407,332,310	7. SEWA RUMAH	0
	02. TUNJ. ISTRI / SUAMI	0	00	10	0	1,420,128,030	8. HUTANG LAIN-	0
	03. TUNJ. ANAK	2,335,790	88,821,140	702,173,280	626,797,820	439,895,454	9. POTONGAN JKK	0
	04. T.J. PERB. PENGHSLN	680,718	26,824,010	224,728,422	187,662,304	0	10. POTONGAN JKM	0
	05. TUNJ. STRUKTURAL	0	0	0	0	445,210,000		
	06. TUNJ. FUNGSIONAL	0	0	245,070,000	200,140,000	1,746,009,000		
	07. TUNJ. JAB. KHUSUS	0	60,690,000	751,473,000	933,846,000	20,750,000		
	08. TUNJ. UMUM	0	1,150,000	16,300,000	3,300,000	141,592,500		
	09. T.J. KEMAHALAN DRH	1,925,000	36,540,000	96,477,500	6,650,000	0		
	10. T.J. WIL TERPENCIL	0	0	0	0	0		
	11. SUBSIDI BPJS	0	0	0	0	0		
	12. TUNJ. PAJAK	0	0	6,224,859	18,688,046	24,912,905	JUMLAH (VI)	2.052.510.533
	13. TUNJ. JKK	0	0	0	0	0		
	14. TUNJ. JKM	0	0	0	0	0		
	15. PEMBULATAN	759	18,737	137,770	91,138	248,404		
	TUNJANGAN BERAS (Rp)	2.389.860	85.817.700	550.717.890	373.252.680	1.012.178.130		
	JUMLAH KOTOR (III + IV)	35.979.827	1.578.616.087	12.742.711.531	11.300.949.288	25.658.256.733	JUMLAH BERSIH (V-VI)	23.605.746.200



REKAPITULASI DAFTAR GAJI PPPK GAJI INDUK
BULAN : DESEMBER 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENEDANKEPULAUAN SELURUH SKPD

NO	URAIAN	GOL. I	GOL. II	GOL. III	GOL. IV	JUMLAH	VI. POTONGAN	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7(3+4+5+6)		
I.	JUMLAH PENERIMA (ORANG)	0	150	2849	0	2999	1. IWP 1%	42,605,529
	1. PEGAWAI	0	60	1066	0	1126	2. IWP 8%	126,567,029
	2. ISTRI / SUAMI	0	37	684	0	721	3. BPJS	0
	3. ANAK	0	53	1099	0	1152	4. PFK BULOG	0
	JUMLAH PENERIMA (ORANG)	0	53	1.063	0	1.116	5. TAPERUM	0
II	1. STRUKTURAL	0	0	0	0	0	6. P P H	0
	2. FUNGSIONAL	0	53	1,063	0	1,116	7. SEWA RUMAH	0
	3. DAERAH TERPENCIL	0	0	0	0	0	8. HUTANG LAIN-	0
	4. FUNGSIONAL KHUSUS	0	0	0	0	0	9. POTONGAN JKK	0
	JUMLAH GAJI / TUNJ (Rp)	0	200.026.943	4.060.552.735	0	3.896.213.794	10. POTONGAN JKM	0
III.	01. GAJI POKOK	0	172,158,000	3,418,749,00	0	3,590,907,000		
	02. TUNJ. ISTRI / SUAMI	0	10,613,560	0	0	229,949,000		
	03. TUNJ. ANAK	0	3,041,128	219,335,440	0	73,518,322		
	04. TJ. PERB. PENGHSLN	0	0	70,477,194	0	0		
	05. TUNJ. STRUKTURAL	0	0	0	0	0		
	06. TUNJ. FUNGSIONAL	0	12,950,000	0	0	364,367,000		
	07. TUNJ. JAB. KHUSUS	0	0	351,417,000	0	0		
	08. TUNJ. UMUM	0	1,260,000	0	0	1,815,000		
	09. TJ. KEMAHALAN DRH	0	0	555,000	0	0	JUMLAH (VI)	169.172.558
	10. TJ. WIL TERPENCIL	0	0	0	0	0		
	11. SUBSIDI BPJS	0	0	0	0	0		
	12. TUNJ. PAJAK	0	0	0	0	0		
	13. TUNJ. JKK	0	0	0	0	0		
	14. TUNJ. JKM	0	4,255	0	0	23,356		
	15. PEMBULATAN			19,101				
IV.	TUNJANGAN BERAS (Rp)	0	10.863.000	206.324.580	0	217.187.580		
V	JUMLAH KOTOR (III + IV)	0	210.889.943	4.266.877.315	0	4.477.767.258	JUMLAH BERSIH (V-VI)	4.308.594.700

KAS DI BENDAHARA UMUM DAERAH

per 31 Desember 2024

NOMOR	URAIAN	DEBET
1	Kas di Kas Daerah	51.192.990.140,33
2	Bank BNI Cab Pangkep	0,00
3	Bank BRI Cab. Pangkep (Pemda Kab. Pangkep)	0,00
4	Kas Umum Daerah	0,00
5	Bank Bukopin	0,00
6	Bank Mandiri Cab. Pangkep (Pemda Kab. Pangkep)	0,00
7	Bank Mandiri Cab. Tonasa (Pemda Kab. Pangkep)	0,00
JUMLAH		51.192.990.140,33

LAPORAN DANA NON KAPITASI JKN PERPUSKESMAS KABUPATEN PANGKEP TAHUN 2024

NO	PUSKESMAS	SALDO AWAL	PENERIMAAN BPJ	PENYETORAN KEKASDA	SALDO AKHIR	RINCIAN SALDO AKHIR		JKN NON KAPITASI DIKAS DAERAH					KET
						SALDO BANK	SALDO TUNAI	SALDO AWAL DIKASDA	PENYETORAN KEKASDA	BELANJA (SP2D)	JASA SARANA	SALDO AKHIR (SILPA)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
1	Kota Pangkajene	15.207.100	214.988.600	230.195.700	-	-	-	27.380.000	230.195.700	190.632.400	3.000.000	63.943.300	
2	Bonto Perak	-	201.657.500	201.657.500	-	-	-	136.897.400	201.657.500	65.915.000	4.390.000	268.249.900	
3	Minasatene	61.192.600	448.643.100	509.835.700	-	-	-	183.799.100	509.835.700	460.578.625	21.190.000	211.866.175	
4	Kalabbirang	170.316.000	223.863.100	394.179.100	-	-	-	7.155.200	394.179.100	162.081.000	11.330.000	227.923.300	
5	Bungoro	-	399.255.200	399.255.200	-	-	-	283.967.700	399.255.200	251.375.000	17.260.000	414.587.900	
6	Bowong Cindea	50.414.200	328.090.200	378.504.400	-	-	-	79.554.600	378.504.400	267.124.450	7.820.000	183.114.550	
7	Labakkang	-	351.772.300	351.772.300	-	-	-	235.055.700	351.772.300	307.989.000	23.110.000	255.729.000	
8	Taraweang	29.800.400	410.714.400	440.514.800	-	-	-	134.673.800	440.514.800	190.310.000	24.610.000	360.268.600	
9	Marang	47.617.200	739.494.600	787.111.800	-	-	-	623.296.600	787.111.800	559.006.237	13.000.000	838.402.163	
10	Padang Lampe	-	167.565.200	167.565.200	-	-	-	210.808.540	167.565.200	120.366.124	7.350.000	250.657.616	
11	Pundata Baji	66.922.600	112.314.500	179.237.100	-	-	-	331.212.051	179.237.100	140.895.000	10.330.000	359.224.151	
12	Segeri	-	117.350.200	117.350.200	-	-	-	119.124.800	117.350.200	115.390.000	9.000.000	112.085.000	
13	Baring	6.394.700	129.295.200	135.689.900	-	-	-	99.804.650	135.689.900	79.575.000	6.320.000	149.599.550	
14	Mandalle	47.505.300	443.190.500	490.695.800	-	-	-	142.400.500	490.695.800	218.555.000	16.360.000	398.181.300	
15	Balocci	31.317.100	405.622.300	401.542.300	35.397.100	35.397.100	-	177.518.800	401.542.300	233.933.850	22.440.000	322.687.250	
16	Bantimala	9.537.100	163.519.400	173.056.500	-	-	-	147.709.826	173.056.500	87.535.000	7.790.000	225.441.326	
17	Lk. Tupabbiring	957.100	65.743.900	66.701.000	-	-	-	47.612.300	66.701.000	73.100.000	2.360.000	38.853.300	
18	Sabutung	-	34.162.300	34.162.300	-	-	-	2.762.100	34.162.300	23.285.000	1.120.000	12.519.400	
19	Sarappo	14.498.100	13.108.100	27.606.200	-	-	-	3.453.557	27.606.200	10.030.000	950.000	20.079.757	
20	Lk. Kalmas	-	79.168.100	79.168.100	-	-	-	18.294.900	79.168.100	77.645.000	5.000.000	14.818.000	
21	Pamantauang	-	29.448.100	29.448.100	-	-	-	10.717.800	29.448.100	35.884.000	1.950.000	2.331.900	

22	Lk. Tangaya	-	133.226.200	133.226.200	-	-	-	21.176.000	133.226.200	103.515.500	4.605.000	46.281.700	
23	Sailus	3.397.100	31.965.200	32.965.200	2.397.100	2.397.100	-	12.029.600	32.965.200	23.201.000	3.250.000	18.543.800	
24	RSU Pratama	-	-	-	-	-	-	48.515.000	-	17.350.000	-	31.165.000	
	JUMLAH	555.076.600	5.244.158.200	5.761.440.600	37.794.200	37.794.200	-	3.104.920.524	5.761.440.600	3.815.272.186	224.535.000	4.826.553.938	

LAPORAN HASIL REVIU PENGGUNAAN DANA JKN KAPITASI PER FKTP (PUSKESMAS) KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2024

Lampiran 1.c

NO	PUSKESMAS	SALDO AKHIR 2023	PENDAPATAN DANA KAPITASI 2024	SALDO AKHIR 2023 DITAMBAH PENDAPATAN KAPITASI 2024	BELANJA DANA KAPITASI 2024	SALDO AKHIR 2024	BUNGA BANK PER DES 2023 YG DISETOR DI 2024	BUNGA BANK s/d DES 2024	BUNGA BANK YANG DISETOR KEKASDA	BUNGA BANK 2024 YANG BLM DISETOR KEKASDA	Penyetoran Pendapatan Lain-lain ke KasDa	SALDO AKHIR + BUNGA DES YG BELUM SETOR	SALDO DIBANK	SALDO TUNAI	SELISIH			KETERANGAN	SALDO AKHIR JKN KAPITASI HASIL REVIU/	SALDO AKHIR JKN + BUNGA
															DANA LAINNY A	PEMBULA TAN BANK	KOREKSI/BE- BAN LAIN- LAIN			
1	2	3	4	5 = (3+4)	6	7 = (3 + 4 - 6)	8	9	10	11 = (8+9-10)	12	13 = (7+11)	14	15	16	17	18	19	20	21
1	KOTA PANGKAJENE	56.501,00	1.537.181.805,00	1.537.238.306,00	1.537.156.754,00	81.552,00	26.488,00	930.736,13	957.224,13	-	-	81.552,00	71.005,00	-		(0,04)	(10.546,96)	1. Koreksi saldo akhir akibat adanya kelebihan setoran bunga bank sebesar Rp. 10.546.96,- disebabkan oleh biaya admin Bank lebih besar dari pada bunga pada bulan Desember 2024. 2. Pengurangan saldo akhir sebesar Rp. 0,04 krn pembulatan ke bawah oleh Bank	71.005,00	71.005,00
2	BONTO PERAK	11.291.838,00	1.101.867.737,00	1.113.159.575,00	1.094.554.367,00	18.605.208,00	10.205,53	195.601,85	199.319,30	6.488,08	-	18.611.696,08	18.612.665,00	-	968,47	0,45	-	1. Terdapat dana lain akibat kelebihan setor uang tunai ke Rek. JKN Puskesmas sebesar Rp.968,47 dana tersebut akan ditarik dan disetor ke kasda. 2. Pembulatan ke atas oleh bank sebesar Rp. 0,45	18.605.208,45	18.611.696,53
3	MINASATE'NE	-	1.670.100.323,00	1.670.100.323,00	1.670.099.654,00	669,00	173.701,00	2.675.194,00	2.783.046,00	65.849,00	-	66.518,00	66.518,00	-		-	-		669,00	66.518,00
4	KALABBIRANG	3.239.180,00	701.506.126,00	704.745.306,00	704.738.546,00	6.760,00	90.995,00	872.347,00	939.914,00	23.428,00	-	30.188,00	27.288,00	2.900,00			-		6.760,00	30.188,00
5	BUNGORO	4.230,00	1.510.536.643,00	1.510.540.873,00	1.510.540.666,00	207,00	52.892,00	884.435,08	897.889,16	39.437,92		39.644,92	39.645,00	-		0,08		Pembulatan ke atas oleh bank sebesar Rp.0,08	207,08	39.645,00
6	BOWONG CINDEA	43.073,00	825.357.354,00	825.400.427,00	825.383.198,00	17.229,00	97.660,00	1.053.008,00	976.562,00	174.106,00		191.335,00	191.335,00	-			-		17.229,00	191.335,00
7	LABAKKANG	3.329.917,00	1.216.716.355,00	1.220.046.272,00	1.220.046.272,00	-	110.832,00	1.248.327,00	1.333.868,00	25.291,00	-	25.291,00	25.291,00	-			-		-	25.291,00
8	PUNDATA BAH	3.866.539,00	803.644.249,00	807.510.788,00	807.459.968,00	50.820,00	13.661,00	122.799,18	134.127,47	2.332,71		53.152,71	53.153,00	-	-	0,29		Pembulatan ke atas oleh bank sebesar Rp.0,29	50.820,29	53.153,00
9	TARAWEANG		1.269.778.856,00	1.269.778.856,00	1.269.778.812,00	44,00	99.618,00	1.918.403,00	1.949.036,00	68.985,00		69.029,00	69.029,00	-		-	-		44,00	69.029,00
10	MA'RANG	4.771.459,00	1.536.835.004,00	1.541.606.463,00	1.541.606.463,00	-	327.377,00	2.317.283,00	2.523.709,00	120.951,00		120.951,00	120.951,00	-		-	-		-	120.951,00
11	PADANG LAMPE	49.602,00	530.541.385,00	530.590.987,00	530.580.590,00	10.397,00	17.519,50	97.250,97	114.770,47	-		10.397,00	191,00	4.820,75		0,41	(5.385,66)	1. Koreksi saldo akhir akibat adanya kelebihan setoran bunga bank sebesar Rp. (5.385,66) disebabkan oleh biaya admin Bank lebih besar dari pada bunga pada bulan Desember 2024. 2. Pembulatan ke atas oleh bank sebesar Rp.0,41.	5.011,75	5.011,75
12	SEGERI		851.091.575,00	851.091.575,00	851.091.575,00	-	153.024,00	1.511.429,00	1.649.207,00	15.246,00		15.246,00	15.246,00	-		-			-	15.246,00
13	BARING	202.993,00	375.264.020,00	375.467.013,00	375.444.991,00	22.022,00	4.162,54	68.264,63	72.427,17	-		22.022,00	17.326,00	-		(0,05)	(4.695,95)	1. Koreksi saldo akhir akibat adanya kelebihan setoran bunga bank sebesar Rp. (4.695,95) disebabkan oleh biaya admin Bank lebih besar dari pada bunga pada bulan Desember 2024. 2. Pembulatan ke bawah oleh bank sebesar Rp. (0,05)	17.326,00	17.326,00
14	MANDALLE	447,00	769.914.604,00	769.915.051,00	769.844.718,00	70.333,00	116.429,00	1.099.582,00	1.177.085,00	38.926,00		109.259,00	109.259,00	-	-		-		70.333,00	109.259,00
15	BALOCCHI	6.320.161,00	865.887.461,00	872.207.622,00	872.206.631,00	991,00	31.629,00	664.467,00	679.567,00	16.529,00	-	17.520,00	17.520,00	-		-	-		991,00	17.520,00
16	BANTIMALA	51.516,00	641.102.960,00	641.154.476,00	641.154.436,00	40,00	60.975,00	1.103.503,00	1.141.442,00	23.036,00	-	23.076,00	23.076,00	-		-	-		40,00	23.076,00
17	LK.TUPABBIRING	13.146.920,00	880.613.030,00	893.759.950,00	893.759.286,00	664,00	94.799,00	680.590,00	756.794,00	18.595,00	-	19.259,00	19.259,00	-			-		664,00	19.259,00
18	SABUTUNG	11.065,00	1.271.716.635,00	1.271.727.700,00	1.271.727.600,00	100,00	1.404,00	156.399,92	152.997,33	4.806,59	-	4.906,59	4.907,00	-		0,41	-	Pembulatan ke atas oleh bank sebesar Rp. 0,41	100,41	4.907,00
19	SARAPPO	15.947.224,00	1.124.300.776,00	1.140.248.000,00	1.140.228.439,00	19.561,00	162.229,00	1.869.002,00	1.997.263,00	33.968,00	-	53.529,00	53.529,00	-		-	-		19.561,00	53.529,00
20	LK. KALMAS	23.390,00	1.008.904.110,00	1.008.927.500,00	1.008.768.998,00	158.502,00	119.585,00	1.599.961,00	1.622.693,00	96.853,00	-	255.355,00	250.331,00	5.024,00			-		158.502,00	255.355,00
21	PAMANTAUANG	276.730,00	559.082.470,00	559.359.200,00	559.359.200,00	-	15.003,00	161.686,65	164.580,34	12.109,31	-	12.109,31	12.109,00	-		(0,31)	-	Pembulatan ke bawah oleh bank sebesar Rp. 0,31	-	12.109,00
22	LK. TANGAYA	3.721.801,00	1.209.205.399,00	1.212.927.200,00	1.212.906.424,00	20.776,00	6.254,00	226.200,44	227.446,32	5.008,12	-	25.784,12	25.784,00	-		(0,12)	-	Pembulatan ke bawah oleh bank sebesar Rp. 0,12	20.775,88	25.784,00
23	SAILUS	2.817,00	649.568.084,00	649.570.901,00	649.506.312,00	64.589,00	-	-	-	-	-	64.589,00	-	-	-	0,85	(64.589,85)	1. Mengurangi saldo akhir sebesar Rp.64.589,85 disebabkan oleh biaya Admin lebih besar daripada bunga selama satu tahun. 2. Pembulatan bank ke atas sebesar Rp.0,85	-	-
24	RSUD PRATAMA	832.447,00	-	832.447,00		832.447,00	-	-	-	-	-	832.447,00	472.447,00	-			(360.000,00)	Mengurangi saldo akhir sebesar Rp.360.000,00 disebabkan oleh biaya Admin dan denda saldo minimal (30 x 12 = 360.000,-)	472.447,00	472.447,00
JUMLAH		67.189.850,00	22.910.716.961,00	22.977.906.811,00	22.957.943.900,00	19.962.911,00	1.786.442,57	21.456.470,85	22.450.967,69	791.945,73	0,00	20.754.856,73	20.297.864,00	12.744,75	968,47	1,97	-445.218,42		19.517.694,86	20.309.640,28

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BOSP REGULER SD NEGERI
BULAN JANUARI s/d DESEMBER 2024

Lampiran 1.d

NO	NPSN	SEKOLAH	KECAMATAN	SISA SALDO 2023	PENERIMAAN	PENGGUNAAN				Pengembalian ke RKUD	SISA SALDO s/d Desember 2024
						Belanja Modal			Jumlah		
						Belanja Barang dan Jasa	Peralatan dan Mesin	Aset Tetap Lainnya			
1	40.300.779,00	SD NEGERI 1 KASSI	Balocci	-	158.400.000,00	117.042.000,00	23.500.000,00	17.858.000,00	158.400.000,00	-	-
2	40.300.899,00	SD NEGERI 2 MAJANNANG	Balocci	-	70.200.000,00	52.140.000,00	11.504.100,00	6.555.900,00	70.200.000,00	-	-
3	40.300.559,00	SD NEGERI 3 TONASA	Balocci	-	126.000.000,00	88.097.400,00	11.000.000,00	26.902.600,00	126.000.000,00	-	-
4	40.300.505,00	SD NEGERI 4 BALOCCI	Balocci	-	70.200.000,00	44.839.100,00	16.000.000,00	9.360.900,00	70.200.000,00	-	-
5	40.300.512,00	SD NEGERI 5 PADANGTANGALAU	Balocci	-	214.200.000,00	168.418.000,00	20.000.000,00	25.782.000,00	214.200.000,00	-	-
6	40.300.656,00	SD NEGERI 6 BULU BULU	Balocci	-	77.400.000,00	54.006.000,00	18.000.000,00	5.394.000,00	77.400.000,00	-	-
7	40.300.699,00	SD NEGERI 11 PADANG TANGARAYA	Balocci	-	34.200.000,00	23.940.000,00	3.497.000,00	6.759.000,00	34.196.000,00	-	4.000,00
8	40.300.737,00	SD NEGERI 13 KASSI	Balocci	-	157.500.000,00	110.250.000,00	12.672.700,00	34.577.300,00	157.500.000,00	-	-
9	40.300.870,00	SD NEGERI 16 SENGGERANG	Balocci	-	48.600.000,00	39.247.000,00	8.138.000,00	1.215.000,00	48.600.000,00	-	-
10	40.300.852,00	SD NEGERI 18 BONTO-BONTO	Balocci	-	73.800.000,00	52.540.560,00	7.585.240,00	13.674.200,00	73.800.000,00	-	-
11	40.300.873,00	SD NEGERI 19 BATUNA PARA	Balocci	-	36.900.000,00	29.151.000,00	3.883.100,00	3.865.900,00	36.900.000,00	-	-
12	40.300.818,00	SD NEGERI 23 BONTI	Balocci	-	16.200.000,00	8.657.700,00	6.950.000,00	592.300,00	16.200.000,00	-	-
13	40.300.801,00	SD NEGERI 24 BAJENG	Balocci	-	34.200.000,00	23.871.000,00	-	10.329.000,00	34.200.000,00	-	-
14	40.300.825,00	SD NEGERI 27 TONASA	Balocci	-	126.000.000,00	91.278.300,00	23.500.000,00	11.221.700,00	126.000.000,00	-	-
15	40.300.826,00	SD NEGERI 28 JENNAE	Balocci	-	46.800.000,00	32.871.000,00	6.000.000,00	7.929.000,00	46.800.000,00	-	-
16	40.300.551,00	SD NEGERI 29 TONASA	Balocci	-	53.100.000,00	37.170.000,00	10.213.000,00	5.717.000,00	53.100.000,00	-	-
17	40.300.540,00	SD NEGERI 30 SUMPANG BITA	Balocci	-	74.700.000,00	52.279.500,00	5.000.000,00	17.420.500,00	74.700.000,00	-	-
18	40.300.546,00	SD NEGERI 31 SENGGERANG	Balocci	-	77.400.000,00	54.163.300,00	10.457.500,00	12.779.200,00	77.400.000,00	-	-
19	40.300.680,00	SD NEGERI 34 MINGGI	Balocci	-	12.600.000,00	11.129.900,00	-	1.470.100,00	12.600.000,00	-	-
20	40.300.781,00	SD NEGERI 1 LEJANG	Bungoro	-	235.800.000,00	165.061.000,00	34.650.000,00	36.089.000,00	235.800.000,00	-	-

NO	NPSN	SEKOLAH	KECAMATAN	SISA SALDO 2023	PENERIMAAN	PENGUNAAN				Pengembalian ke RKUD	SISA SALDO s/d Desember 2024
						Belanja Modal			Jumlah		
						Belanja Barang dan Jasa	Peralatan dan Mesin	Aset Tetap Lainnya			
21	40.300.898,00	SD NEGERI 2 LEJANG	Bungoro	-	260.100.000,00	189.840.000,00	29.673.500,00	40.586.500,00	260.100.000,00	-	-
22	40.300.556,00	SD NEGERI 3 SAMBUNG JAWA	Bungoro	-	234.900.000,00	165.430.000,00	15.387.000,00	54.083.000,00	234.900.000,00	-	-
23	40.300.534,00	SD NEGERI 5 BOWONG	Bungoro	-	176.400.000,00	137.511.000,00	12.442.000,00	26.447.000,00	176.400.000,00	-	-
24	40.300.653,00	SD NEGERI 6 SENGKAE	Bungoro	-	132.300.000,00	97.520.000,00	14.700.000,00	20.080.000,00	132.300.000,00	-	-
25	40.300.650,00	SD NEGERI 8 TALAPPASA	Bungoro	-	120.600.000,00	75.896.000,00	26.640.000,00	18.064.000,00	120.600.000,00	-	-
26	40.300.683,00	SD NEGERI 9 BUJUNG TANGAYA	Bungoro	-	94.500.000,00	70.576.500,00	9.600.000,00	14.323.500,00	94.500.000,00	-	-
27	40.300.700,00	SD NEGERI 11 PASUI	Bungoro	-	208.800.000,00	156.868.600,00	30.700.000,00	21.231.400,00	208.800.000,00	-	-
28	40.300.742,00	SD NEGERI 13 SILORO	Bungoro	-	138.600.000,00	103.378.500,00	16.799.850,00	18.421.500,00	138.599.850,00	-	150,00
29	40.300.733,00	SD NEGERI 14 BIRINGERE	Bungoro	-	159.300.000,00	116.620.800,00	19.510.000,00	23.169.200,00	159.300.000,00	-	-
30	40.300.849,00	SD NEGERI 15 SELA	Bungoro	-	68.400.000,00	50.831.600,00	9.990.000,00	7.578.400,00	68.400.000,00	-	-
31	40.300.850,00	SD NEGERI 17 TABO-TABO	Bungoro	-	145.800.000,00	103.226.000,00	16.608.000,00	25.966.000,00	145.800.000,00	-	-
32	40.300.855,00	SD NEGERI 18 LEPPANGENG	Bungoro	-	88.200.000,00	61.736.600,00	13.254.600,00	13.208.800,00	88.200.000,00	-	-
33	40.300.891,00	SD NEGERI 19 MALEWANG	Bungoro	-	110.700.000,00	81.126.000,00	17.000.000,00	12.574.000,00	110.700.000,00	-	-
34	40.300.877,00	SD NEGERI 20 BUJUNG TANGAYA	Bungoro	-	127.800.000,00	89.440.000,00	12.800.000,00	25.560.000,00	127.800.000,00	-	-
35	40.300.881,00	SD NEGERI 21 BONTORANNU	Bungoro	-	120.600.000,00	91.375.000,00	14.000.000,00	15.225.000,00	120.600.000,00	-	-
36	40.300.815,00	SD NEGERI 22 SALEBBO	Bungoro	-	223.200.000,00	156.237.600,00	23.030.000,00	43.932.400,00	223.200.000,00	-	-
37	40.300.809,00	SD NEGERI 23 SELA	Bungoro	-	71.100.000,00	59.113.200,00	-	11.986.800,00	71.100.000,00	-	-
38	40.300.824,00	SD NEGERI 25 TABO TABO	Bungoro	-	119.700.000,00	88.125.500,00	10.215.000,00	21.359.500,00	119.700.000,00	-	-
39	40.300.839,00	SD NEGERI 26 JOLLO	Bungoro	-	59.400.000,00	43.890.000,00	6.600.000,00	8.910.000,00	59.400.000,00	-	-
40	40.300.835,00	SD NEGERI 27 TABO-TABO	Bungoro	-	34.200.000,00	27.968.000,00	-	6.232.000,00	34.200.000,00	-	-
41	40.300.828,00	SD NEGERI 28 MANGILU	Bungoro	-	44.100.000,00	37.580.000,00	-	6.520.000,00	44.100.000,00	-	-

NO	NPSN	SEKOLAH	KECAMATAN	SISA SALDO 2023	PENERIMAAN	PENGUNAAN				Pengembalian ke RKUD	SISA SALDO s/d Desember 2024
						Belanja Modal			Jumlah		
						Belanja Barang dan Jasa	Peralatan dan Mesin	Aset Tetap Lainnya			
42	40.300.693,00	SD NEGERI 29 MAJANNANG	Bungoro	-	207.000.000,00	158.400.000,00	20.183.000,00	28.417.000,00	207.000.000,00	-	-
43	40.300.537,00	SD NEGERI 30 PASSALISIANG	Bungoro	-	9.900.000,00	8.704.000,00	-	1.196.000,00	9.900.000,00	-	-
44	40.300.542,00	SD NEGERI 31 BINANGA POLO	Bungoro	-	99.900.000,00	76.878.800,00	12.400.000,00	10.621.200,00	99.900.000,00	-	-
45	40.300.579,00	SD NEGERI 32 SELA	Bungoro	-	110.700.000,00	76.474.400,00	24.160.000,00	10.065.600,00	110.700.000,00	-	-
46	40.300.584,00	SD NEGERI 33 JOLLO	Bungoro	-	57.600.000,00	40.319.000,00	3.098.000,00	14.183.000,00	57.600.000,00	-	-
47	40.300.571,00	SD NEGERI 35 TONASA II	Bungoro	-	66.600.000,00	46.620.000,00	17.004.500,00	2.975.500,00	66.600.000,00	-	-
48	40.300.780,00	SD NEGERI 1 LABAKKANG	Labakkang	-	111.600.000,00	90.739.900,00	-	20.860.100,00	111.600.000,00	-	-
49	40.300.897,00	SD NEGERI 2 LABAKKANG	Labakkang	-	165.600.000,00	115.920.000,00	28.087.000,00	21.593.000,00	165.600.000,00	-	-
50	40.300.507,00	SD NEGERI 4 KABIRISI	Labakkang	-	131.400.000,00	95.721.900,00	12.100.000,00	23.578.100,00	131.400.000,00	-	-
51	40.300.659,00	SD NEGERI 6 MONCONGBORI	Labakkang	-	177.300.000,00	130.354.000,00	30.200.000,00	16.746.000,00	177.300.000,00	-	-
52	40.300.652,00	SD NEGERI 7 KAYUMATE	Labakkang	-	108.000.000,00	78.574.600,00	19.851.500,00	9.573.900,00	108.000.000,00	-	-
53	40.300.645,00	SD NEGERI 818 BONTOWA	Labakkang	-	172.800.000,00	132.000.000,00	20.971.300,00	19.828.700,00	172.800.000,00	-	-
54	40.300.682,00	SD NEGERI 9 BEROANGIN	Labakkang	-	92.700.000,00	64.844.000,00	17.500.000,00	10.356.000,00	92.700.000,00	-	-
55	40.300.715,00	SD NEGERI 10 LEMBANG	Labakkang	-	204.300.000,00	143.000.900,00	27.700.000,00	33.599.100,00	204.300.000,00	-	-
56	40.300.705,00	SD NEGERI 1122 GENTUNG	Labakkang	-	180.900.000,00	126.614.400,00	31.250.000,00	23.035.600,00	180.900.000,00	-	-
57	40.300.704,00	SD NEGERI 1230 KANAUNGAN	Labakkang	-	125.100.000,00	90.070.000,00	17.393.300,00	17.636.700,00	125.100.000,00	-	-
58	40.300.738,00	SD NEGERI 13 KASSILOE	Labakkang	-	153.900.000,00	107.730.000,00	34.800.200,00	11.319.800,00	153.850.000,00	-	50.000,00
59	40.300.725,00	SD NEGERI 14 TAPOLE	Labakkang	-	190.800.000,00	127.890.000,00	18.076.000,00	44.834.000,00	190.800.000,00	-	-
60	40.300.727,00	SD NEGERI 15 BATILING	Labakkang	-	171.900.000,00	114.625.000,00	25.715.000,00	31.560.000,00	171.900.000,00	-	-
61	40.310.341,00	SD NEGERI 16 TARAWEANG	Labakkang	-	265.500.000,00	201.015.000,00	20.700.000,00	43.785.000,00	265.500.000,00	-	-
62	40.300.851,00	SD NEGERI 17 TARAWAEANG	Labakkang	-	243.900.000,00	170.730.000,00	31.965.000,00	41.205.000,00	243.900.000,00	-	-

NO	NPSN	SEKOLAH	KECAMATAN	SISA SALDO 2023	PENERIMAAN	PENGUNAAN				Pengembalian ke RKUD	SISA SALDO s/d Desember 2024
						Belanja Modal			Jumlah		
						Belanja Barang dan Jasa	Peralatan dan Mesin	Aset Tetap Lainnya			
63	40.300.892,00	SD NEGERI 19 PACIKOMBAJA	Labakkang	-	176.400.000,00	123.478.000,00	16.700.000,00	36.222.000,00	176.400.000,00	-	-
64	40.300.879,00	SD NEGERI 203 TONASA	Labakkang	-	172.800.000,00	132.905.000,00	18.000.000,00	21.895.000,00	172.800.000,00	-	-
65	40.300.798,00	SD NEGERI 215 PUNDATA	Labakkang	-	221.400.000,00	157.194.000,00	18.400.000,00	45.806.000,00	221.400.000,00	-	-
66	40.300.820,00	SD NEGERI 23 KANAUNGAN	Labakkang	-	135.900.000,00	105.120.000,00	10.403.000,00	20.377.000,00	135.900.000,00	-	-
67	40.300.805,00	SD NEGERI 24 TARAWEANG	Labakkang	-	147.600.000,00	99.870.000,00	25.465.000,00	22.265.000,00	147.600.000,00	-	-
68	40.310.342,00	SD NEGERI 25 TARAWEANG	Labakkang	-	191.700.000,00	134.190.000,00	25.415.000,00	32.095.000,00	191.700.000,00	-	-
69	40.300.843,00	SD NEGERI 26 TAMANROJA	Labakkang	-	196.200.000,00	136.280.100,00	42.693.000,00	17.226.900,00	196.200.000,00	-	-
70	40.300.846,00	SD NEGERI 27 PAUKIRI	Labakkang	-	93.600.000,00	72.310.000,00	17.840.000,00	3.450.000,00	93.600.000,00	-	-
71	40.300.544,00	SD NEGERI 31 MACCINI BAJI	Labakkang	-	128.700.000,00	99.152.000,00	5.550.000,00	23.998.000,00	128.700.000,00	-	-
72	40.300.581,00	SD NEGERI 32 ULU BATU	Labakkang	-	90.900.000,00	63.680.000,00	21.000.000,00	6.220.000,00	90.900.000,00	-	-
73	40.300.585,00	SD NEGERI 33 KALAMESUE	Labakkang	-	114.300.000,00	76.648.000,00	16.290.000,00	21.362.000,00	114.300.000,00	-	-
74	40.300.566,00	SD NEGERI 34 SAPANJANG	Labakkang	-	28.800.000,00	18.123.000,00	5.049.000,00	5.628.000,00	28.800.000,00	-	-
75	40.300.569,00	SD NEGERI 35 LEANGE	Labakkang	-	107.100.000,00	75.370.000,00	8.422.000,00	23.308.000,00	107.100.000,00	-	-
76	40.300.574,00	SD NEGERI 36 TANARAJAE	Labakkang	-	64.800.000,00	45.682.000,00	5.770.900,00	13.347.100,00	64.800.000,00	-	-
77	40.300.509,00	SD NEGERI 37 TURUNGAN	Labakkang	-	69.300.000,00	46.837.900,00	16.450.000,00	6.012.100,00	69.300.000,00	-	-
78	69.900.546,00	SD NEGERI 38 BUTTUE	Labakkang	-	32.400.000,00	15.009.000,00	9.750.000,00	7.641.000,00	32.400.000,00	-	-
79	69.900.582,00	SD NEGERI 39 BATILING	Labakkang	-	54.900.000,00	42.706.600,00	8.200.000,00	3.993.400,00	54.900.000,00	-	-
80	40.300.774,00	SD CULIA DOANG-DOANGAN CADDI	Liukang Kalmas	-	54.000.000,00	37.796.000,00	6.000.000,00	10.204.000,00	54.000.000,00	-	-
81	40.300.778,00	SD NEGERI 1 DEWAKANG LOMPO	Liukang Kalmas	-	191.700.000,00	136.110.000,00	17.300.000,00	38.290.000,00	191.700.000,00	-	-
82	40.300.900,00	SD NEGERI 2 MARASENDE	Liukang Kalmas	-	141.300.000,00	103.502.200,00	12.000.000,00	25.797.800,00	141.300.000,00	-	-
83	40.300.552,00	SD NEGERI 3 BANGKO-BANGKOANG	Liukang Kalmas	-	54.000.000,00	36.418.500,00	10.481.500,00	7.100.000,00	54.000.000,00	-	-

NO	NPSN	SEKOLAH	KECAMATAN	SISA SALDO 2023	PENERIMAAN	PENGUNAAN				Pengembalian ke RKUD	SISA SALDO s/d Desember 2024
						Belanja Modal			Jumlah		
						Belanja Barang dan Jasa	Peralatan dan Mesin	Aset Tetap Lainnya			
84	40.300.506,00	SD NEGERI 4 DOANG-DOANGAN LOMPO	Liukang Kalmas	-	82.800.000,00	56.293.000,00	3.982.000,00	22.525.000,00	82.800.000,00	-	-
85	40.300.524,00	SD NEGERI 5 KALU-KALUKUANG	Liukang Kalmas	-	116.100.000,00	58.635.000,00	30.300.000,00	27.165.000,00	116.100.000,00	-	-
86	40.300.662,00	SD NEGERI 6 SABARU	Liukang Kalmas	-	95.400.000,00	66.780.000,00	11.160.000,00	17.460.000,00	95.400.000,00	-	-
87	40.300.642,00	SD NEGERI 7 PAMANTAUANG	Liukang Kalmas	-	189.000.000,00	130.324.000,00	30.650.000,00	28.020.000,00	188.994.000,00	-	6.000,00
88	40.300.646,00	SD NEGERI 8 DEWAKANG CADDI	Liukang Kalmas	-	54.900.000,00	38.430.000,00	5.490.000,00	10.980.000,00	54.900.000,00	-	-
89	40.300.684,00	SD NEGERI 9 BUTUNG-BUTUNGAN	Liukang Kalmas	-	175.500.000,00	96.085.000,00	31.740.000,00	47.675.000,00	175.500.000,00	-	-
90	40.300.713,00	SD NEGERI 10 DOANG-DOANGAN CADDI	Liukang Kalmas	1.000,00	91.799.000,00	61.200.000,00	8.420.000,00	22.180.000,00	91.800.000,00	-	-
91	40.300.695,00	SD NEGERI 11 KALU-KALUKUANG	Liukang Kalmas	-	56.700.000,00	40.644.000,00	8.450.000,00	7.606.000,00	56.700.000,00	-	-
92	40.300.720,00	SD NEGERI 12 PAMALIKANG	Liukang Kalmas	-	54.000.000,00	37.658.000,00	7.950.000,00	8.392.000,00	54.000.000,00	-	-
93	40.300.741,00	SD NEGERI 13 SALIRIANG	Liukang Kalmas	-	94.500.000,00	52.389.000,00	29.761.000,00	12.350.000,00	94.500.000,00	-	-
94	40.300.723,00	SD NEGERI 14 MASSALIMA	Liukang Kalmas	-	124.200.000,00	79.885.000,00	14.660.000,00	29.655.000,00	124.200.000,00	-	-
95	40.300.726,00	SD NEGERI 15 BANGKAULUANG	Liukang Kalmas	-	54.000.000,00	37.791.300,00	7.495.400,00	8.713.300,00	54.000.000,00	-	-
96	40.300.865,00	SD NEGERI 16 KALUKALUKUANG	Liukang Kalmas	-	54.000.000,00	36.300.000,00	7.500.000,00	10.200.000,00	54.000.000,00	-	-
97	40.300.854,00	SD NEGERI 18 KALUKUANG	Liukang Kalmas	-	67.500.000,00	47.250.000,00	-	20.250.000,00	67.500.000,00	-	-
98	40.300.694,00	SD NEGERI 1 SABARU	Liukang Tangaya	-	125.100.000,00	85.736.800,00	19.500.000,00	19.863.200,00	125.100.000,00	-	-
99	40.300.895,00	SD NEGERI 2 BALO-BALOANG	Liukang Tangaya	-	85.500.000,00	59.850.000,00	9.000.000,00	16.650.000,00	85.500.000,00	-	-
100	40.300.496,00	SD NEGERI 4 SAPUKA	Liukang Tangaya	-	177.300.000,00	120.872.000,00	34.278.000,00	22.150.000,00	177.300.000,00	-	-
101	40.300.515,00	SD NEGERI 5 TAMPAANG	Liukang Tangaya	168.000,00	54.000.000,00	37.785.000,00	8.100.000,00	8.115.000,00	54.000.000,00	168.000,00	-
102	40.300.663,00	SD NEGERI 6 SAILUS	Liukang Tangaya	-	109.800.000,00	77.285.000,00	5.875.000,00	26.640.000,00	109.800.000,00	-	-
103	40.300.688,00	SD NEGERI 9 SUMANGA	Liukang Tangaya	-	204.300.000,00	143.978.000,00	39.892.000,00	20.430.000,00	204.300.000,00	-	-
104	40.300.717,00	SD NEGERI 10 SABALANA	Liukang Tangaya	-	54.000.000,00	36.220.000,00	7.992.000,00	9.788.000,00	54.000.000,00	-	-

NO	NPSN	SEKOLAH	KECAMATAN	SISA SALDO 2023	PENERIMAAN	PENGUNAAN				Pengembalian ke RKUD	SISA SALDO s/d Desember 2024
						Belanja Modal			Jumlah		
						Belanja Barang dan Jasa	Peralatan dan Mesin	Aset Tetap Lainnya			
105	40.300.696,00	SD NEGERI 11 LANGKOITANG	Liukang Tangaya	-	73.800.000,00	51.660.000,00	8.696.000,00	13.444.000,00	73.800.000,00	-	-
106	40.300.739,00	SD NEGERI 13 KAWASANG	Liukang Tangaya	-	54.000.000,00	37.678.000,00	8.108.000,00	8.214.000,00	54.000.000,00	-	-
107	40.300.722,00	SD NEGERI 14 MAKARANGANA	Liukang Tangaya	-	65.700.000,00	46.083.000,00	8.010.000,00	11.607.000,00	65.700.000,00	-	-
108	40.300.730,00	SD NEGERI 15 MARABATUANG	Liukang Tangaya	-	54.000.000,00	37.800.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	54.000.000,00	-	-
109	40.300.869,00	SD NEGERI 16 SAILUS KECIL	Liukang Tangaya	-	116.100.000,00	80.885.000,00	17.800.000,00	17.415.000,00	116.100.000,00	-	-
110	40.300.861,00	SD NEGERI 17 PELOKANG	Liukang Tangaya	-	54.000.000,00	37.200.000,00	8.732.000,00	8.068.000,00	54.000.000,00	-	-
111	40.300.857,00	SD NEGERI 18 TINGGALUNGAN	Liukang Tangaya	-	32.400.000,00	22.680.000,00	-	9.720.000,00	32.400.000,00	-	-
112	40.300.884,00	SD NEGERI 21 KAPOPOSANG BALI	Liukang Tangaya	-	101.700.000,00	70.933.000,00	16.300.000,00	14.467.000,00	101.700.000,00	-	-
113	40.300.821,00	SD NEGERI 23 MATALAANG	Liukang Tangaya	-	141.300.000,00	98.678.000,00	29.000.000,00	13.622.000,00	141.300.000,00	-	-
114	40.300.803,00	SD NEGERI 24 KEMBANG LEMARI	Liukang Tangaya	-	114.300.000,00	80.008.600,00	17.834.900,00	16.456.500,00	114.300.000,00	-	-
115	40.300.807,00	SD NEGERI 25 MAKARANGANA	Liukang Tangaya	-	54.000.000,00	37.803.000,00	6.560.000,00	9.637.000,00	54.000.000,00	-	-
116	40.300.842,00	SD NEGERI 26 SAPINGGANG	Liukang Tangaya	14.000.000,00	54.000.000,00	37.900.000,00	7.986.000,00	8.114.000,00	54.000.000,00	-	14.000.000,00
117	40.300.836,00	SD NEGERI 27 SANANE	Liukang Tangaya	-	119.700.000,00	75.020.000,00	18.600.000,00	26.080.000,00	119.700.000,00	-	-
118	40.300.831,00	SD NEGERI 28 SAPUKA	Liukang Tangaya	-	117.000.000,00	81.900.000,00	17.550.000,00	17.550.000,00	117.000.000,00	-	-
119	40.300.550,00	SD NEGERI 29 SAILUS BESAR	Liukang Tangaya	-	137.700.000,00	96.390.000,00	20.450.000,00	20.860.000,00	137.700.000,00	-	-
120	40.300.539,00	SD NEGERI 30 SATANGER	Liukang Tangaya	-	148.500.000,00	101.771.400,00	30.550.000,00	16.178.600,00	148.500.000,00	-	-
121	40.300.541,00	SD NEGERI 31 BALO-BALOANG CADDI	Liukang Tangaya	-	54.000.000,00	38.940.000,00	6.200.000,00	8.860.000,00	54.000.000,00	-	-
122	40.300.578,00	SD NEGERI 32 KAWASSANG	Liukang Tangaya	-	54.000.000,00	37.755.000,00	6.700.000,00	9.545.000,00	54.000.000,00	-	-
123	40.300.586,00	SD NEGERI 33 LILIKANG	Liukang Tangaya	-	54.000.000,00	37.764.000,00	8.200.000,00	8.036.000,00	54.000.000,00	-	-
124	40.300.565,00	SD NEGERI 34 PAMALIKANG	Liukang Tangaya	-	54.000.000,00	34.471.000,00	11.368.000,00	8.161.000,00	54.000.000,00	-	-
125	40.300.797,00	SD NEGERI I PULAU BALANG LOMPO	Liukang Tupabbiring	-	152.100.000,00	106.371.000,00	21.950.000,00	23.739.000,00	152.060.000,00	-	40.000,00

NO	NPSN	SEKOLAH	KECAMATAN	SISA SALDO 2023	PENERIMAAN	PENGUNAAN				Pengembalian ke RKUD	SISA SALDO s/d Desember 2024
						Belanja Modal			Jumlah		
						Belanja Barang dan Jasa	Peralatan dan Mesin	Aset Tetap Lainnya			
126	40.300.889,00	SD NEGERI 2 PULAU SARAPPO	Liukang Tupabbiring	-	102.600.000,00	57.112.000,00	24.276.000,00	21.212.000,00	102.600.000,00	-	-
127	40.300.687,00	SD NEGERI 9 PULAU BADI	Liukang Tupabbiring	-	103.500.000,00	65.860.000,00	15.545.000,00	22.095.000,00	103.500.000,00	-	-
128	40.300.718,00	SD NEGERI 12 KAPOPOSANG	Liukang Tupabbiring	-	72.900.000,00	50.770.000,00	-	22.130.000,00	72.900.000,00	-	-
129	40.300.736,00	SD NEGERI 13 GONDONG BALI	Liukang Tupabbiring	-	126.900.000,00	88.830.000,00	7.770.000,00	30.300.000,00	126.900.000,00	-	-
130	40.300.724,00	SD NEGERI 14 PODANG PODANG	Liukang Tupabbiring	-	115.200.000,00	81.200.000,00	15.000.000,00	19.000.000,00	115.200.000,00	-	-
131	40.300.868,00	SD NEGERI 16 PULAU PAJENEKANG	Liukang Tupabbiring	-	86.400.000,00	60.458.000,00	-	25.942.000,00	86.400.000,00	-	-
132	40.300.885,00	SD NEGERI 21 LAMPUTANG	Liukang Tupabbiring	-	41.400.000,00	31.800.000,00	4.600.000,00	5.000.000,00	41.400.000,00	-	-
133	40.300.814,00	SD NEGERI 22 PANDANGAN	Liukang Tupabbiring	-	115.200.000,00	71.640.000,00	-	43.560.000,00	115.200.000,00	-	-
134	40.300.804,00	SD NEGERI 24 PULAU PALA	Liukang Tupabbiring	-	29.700.000,00	24.050.000,00	1.800.000,00	3.850.000,00	29.700.000,00	-	-
135	40.300.841,00	SD NEGERI 26 PULAU BALANG LOMPO	Liukang Tupabbiring	-	140.400.000,00	98.280.000,00	19.200.000,00	22.880.000,00	140.360.000,00	-	40.000,00
136	40.300.847,00	SD NEGERI 27 PULAU BADDI	Liukang Tupabbiring	-	108.000.000,00	67.535.000,00	19.000.000,00	21.465.000,00	108.000.000,00	-	-
137	40.300.830,00	SD NEGERI 28 PULAU SARAPPO	Liukang Tupabbiring	-	95.400.000,00	61.945.000,00	2.700.000,00	30.755.000,00	95.400.000,00	-	-
138	40.300.679,00	SD NEGERI 32 PULAU BALANG CADDI	Liukang Tupabbiring	-	153.000.000,00	93.685.000,00	15.500.000,00	43.815.000,00	153.000.000,00	-	-
139	69.787.220,00	SD NEGERI 33 SANANE	Liukang Tupabbiring	-	120.600.000,00	79.162.000,00	11.000.000,00	30.438.000,00	120.600.000,00	-	-
140	40.300.577,00	SD NEGERI 34 BONTO SUA	Liukang Tupabbiring	-	104.400.000,00	62.335.800,00	19.600.000,00	22.464.200,00	104.400.000,00	-	-
141	40.300.525,00	SD NEGERI 44 SARAPPO KEKE	Liukang Tupabbiring	-	110.700.000,00	68.993.000,00	15.641.000,00	26.066.000,00	110.700.000,00	-	-
142	40.300.554,00	SD NEGERI 3 PULAU SABUTUNG	Liukang Tupabbiring Utara	-	136.800.000,00	95.763.000,00	14.250.000,00	26.787.000,00	136.800.000,00	-	-
143	40.300.497,00	SD NEGERI 4 PULAU SALEMO	Liukang Tupabbiring Utara	-	66.600.000,00	45.542.100,00	11.060.700,00	9.997.200,00	66.600.000,00	-	-
144	40.300.661,00	SD NEGERI 6 PULAU KULAMBING	Liukang Tupabbiring Utara	-	162.000.000,00	121.884.600,00	22.795.000,00	17.320.400,00	162.000.000,00	-	-
145	40.300.643,00	SD NEGERI 7 PULAU KARANRANG	Liukang Tupabbiring Utara	-	235.800.000,00	160.890.000,00	29.330.000,00	45.580.000,00	235.800.000,00	-	-
146	40.300.649,00	SD NEGERI 8 PULAU LAIYA	Liukang Tupabbiring Utara	-	70.200.000,00	49.140.000,00	7.100.000,00	13.960.000,00	70.200.000,00	-	-

NO	NPSN	SEKOLAH	KECAMATAN	SISA SALDO 2023	PENERIMAAN	PENGUNAAN				Pengembalian ke RKUD	SISA SALDO s/d Desember 2024
						Belanja Modal			Jumlah		
						Belanja Barang dan Jasa	Peralatan dan Mesin	Aset Tetap Lainnya			
147	40.300.716,00	SD NEGERI 10 PULAU SAPULI	Liukang Tupabbiring Utara	-	28.800.000,00	20.795.000,00	3.250.000,00	4.755.000,00	28.800.000,00	-	-
148	40.300.860,00	SD NEGERI 17 SATANDO	Liukang Tupabbiring Utara	-	70.200.000,00	53.200.000,00	1.000.000,00	16.000.000,00	70.200.000,00	-	-
149	40.300.856,00	SD NEGERI 18 SAMATELU	Liukang Tupabbiring Utara	-	45.000.000,00	23.893.000,00	10.580.000,00	10.527.000,00	45.000.000,00	-	-
150	40.300.811,00	SD NEGERI 23 PULAU SAKUALA	Liukang Tupabbiring Utara	-	41.400.000,00	27.724.500,00	7.891.500,00	5.784.000,00	41.400.000,00	-	-
151	40.300.823,00	SD NEGERI 25 PULAU SAGARA	Liukang Tupabbiring Utara	-	55.800.000,00	38.296.500,00	11.231.000,00	6.272.500,00	55.800.000,00	-	-
152	40.300.536,00	SD NEGERI 29 PULAU SALEMO	Liukang Tupabbiring Utara	-	70.200.000,00	49.238.000,00	17.200.000,00	3.762.000,00	70.200.000,00	-	-
153	40.300.538,00	SD NEGERI 30 PULAU KARANRANG	Liukang Tupabbiring Utara	-	200.700.000,00	128.900.000,00	1.800.000,00	70.000.000,00	200.700.000,00	-	-
154	40.300.545,00	SD NEGERI 31 PULAU SAMATELLU	Liukang Tupabbiring Utara	-	35.100.000,00	24.820.000,00	5.200.000,00	5.080.000,00	35.100.000,00	-	-
155	40.300.500,00	SD NEGERI 38 SALEBBO	Liukang Tupabbiring Utara	-	29.700.000,00	19.444.000,00	3.890.000,00	6.366.000,00	29.700.000,00	-	-
156	40.300.503,00	SD NEGERI 39 SAMATELLU BORONG	Liukang Tupabbiring Utara	-	29.700.000,00	19.990.000,00	3.996.000,00	5.714.000,00	29.700.000,00	-	-
157	40.300.485,00	SD NEGERI 40 POLEWALI	Liukang Tupabbiring Utara	-	18.900.000,00	14.264.000,00	-	4.636.000,00	18.900.000,00	-	-
158	40.300.491,00	SD NEGERI 41 SABANGKO	Liukang Tupabbiring Utara	-	32.400.000,00	22.642.300,00	4.900.000,00	4.857.700,00	32.400.000,00	-	-
159	40.300.492,00	SD NEGERI 42 BANGKO BANGKOANG	Liukang Tupabbiring Utara	-	26.100.000,00	18.998.000,00	-	7.102.000,00	26.100.000,00	-	-
160	40.300.513,00	SD NEGERI 43 PULAU SAUGI	Liukang Tupabbiring Utara	-	41.400.000,00	29.271.000,00	5.028.000,00	7.101.000,00	41.400.000,00	-	-
161	40.300.697,00	SD NEGERI 11 MARANGANCANG	Mandalle	-	32.400.000,00	28.763.800,00	1.500.000,00	2.136.200,00	32.400.000,00	-	-
162	40.300.735,00	SD NEGERI 13 BENTENG	Mandalle	-	26.100.000,00	20.880.000,00	2.337.800,00	2.882.200,00	26.100.000,00	-	-
163	40.300.744,00	SD NEGERI 15 PESENG	Mandalle	-	99.000.000,00	56.869.000,00	7.500.000,00	34.631.000,00	99.000.000,00	-	-
164	40.300.867,00	SD NEGERI 16 MANGGALUNG	Mandalle	-	40.500.000,00	28.343.800,00	10.700.000,00	1.456.200,00	40.500.000,00	-	-
165	40.300.894,00	SD NEGERI 19 TAMARUPA	Mandalle	-	65.700.000,00	45.990.000,00	15.000.000,00	4.710.000,00	65.700.000,00	-	-
166	40.300.878,00	SD NEGERI 20 MANDALLE	Mandalle	-	147.600.000,00	103.320.000,00	23.910.000,00	20.370.000,00	147.600.000,00	-	-
167	40.300.882,00	SD NEGERI 21 GALLA RAYA	Mandalle	-	72.900.000,00	48.963.400,00	19.500.000,00	4.436.600,00	72.900.000,00	-	-

NO	NPSN	SEKOLAH	KECAMATAN	SISA SALDO 2023	PENERIMAAN	PENGUNAAN				Pengembalian ke RKUD	SISA SALDO s/d Desember 2024
						Belanja Modal			Jumlah		
						Belanja Barang dan Jasa	Peralatan dan Mesin	Aset Tetap Lainnya			
168	40.300.833,00	SD NEGERI 29 BENTENG	Mandalle	-	112.500.000,00	78.095.000,00	18.750.000,00	15.655.000,00	112.500.000,00	-	-
169	40.300.548,00	SD NEGERI 30 MANGGALUNG	Mandalle	-	60.300.000,00	46.209.000,00	10.229.000,00	3.862.000,00	60.300.000,00	-	-
170	40.300.543,00	SD NEGERI 31 LEMPANGANG	Mandalle	-	45.900.000,00	31.958.000,00	4.500.000,00	9.442.000,00	45.900.000,00	-	-
171	40.300.583,00	SD NEGERI 33 BODDIE	Mandalle	-	79.200.000,00	55.440.000,00	19.827.000,00	3.933.000,00	79.200.000,00	-	-
172	40.300.501,00	SD NEGERI 38 TAMARUPA	Mandalle	-	89.100.000,00	62.370.000,00	17.000.000,00	9.730.000,00	89.100.000,00	-	-
173	40.300.489,00	SD NEGERI 41 AKKOBANG	Mandalle	-	37.800.000,00	26.571.500,00	2.100.000,00	9.128.500,00	37.800.000,00	-	-
174	40.300.495,00	SD NEGERI 43 LAMASA	Mandalle	-	31.500.000,00	22.050.000,00	7.098.000,00	2.352.000,00	31.500.000,00	-	-
175	40.300.511,00	SD NEGERI 44 COPPOTOMPONG	Mandalle	-	40.500.000,00	26.735.000,00	8.950.000,00	4.815.000,00	40.500.000,00	-	-
176	40.300.526,00	SD NEGERI 45 MANDALLE	Mandalle	-	87.300.000,00	61.110.000,00	12.753.000,00	13.437.000,00	87.300.000,00	-	-
177	40.300.528,00	SD NEGERI 46 WAE TUO	Mandalle	-	40.500.000,00	28.900.000,00	7.500.000,00	4.100.000,00	40.500.000,00	-	-
178	40.300.776,00	SD NEGERI 1 BONTO BONTO	Ma'rang	-	63.900.000,00	48.500.700,00	3.500.000,00	11.899.300,00	63.900.000,00	-	-
179	40.300.896,00	SD NEGERI 2 BONTO-BONTO	Ma'rang	-	38.700.000,00	26.048.300,00	6.323.200,00	6.328.500,00	38.700.000,00	-	-
180	40.300.558,00	SD NEGERI 3 TALA	Ma'rang	-	90.000.000,00	66.063.000,00	3.500.000,00	20.437.000,00	90.000.000,00	-	-
181	40.300.487,00	SD NEGERI 4 TALA	Ma'rang	-	152.100.000,00	101.375.500,00	14.300.000,00	36.424.500,00	152.100.000,00	-	-
182	40.300.522,00	SD NEGERI 5 PADANGLAMPE	Ma'rang	-	187.200.000,00	134.975.000,00	26.500.000,00	25.725.000,00	187.200.000,00	-	-
183	40.300.660,00	SD NEGERI 6 PITUE	Ma'rang	-	111.600.000,00	81.166.500,00	7.680.000,00	22.753.500,00	111.600.000,00	-	-
184	40.300.641,00	SD NEGERI 7 MARANG	Ma'rang	-	141.300.000,00	108.541.000,00	5.850.000,00	26.909.000,00	141.300.000,00	-	-
185	40.300.647,00	SD NEGERI 8 KASSIKEBO	Ma'rang	-	54.000.000,00	37.308.200,00	9.000.000,00	7.691.800,00	54.000.000,00	-	-
186	40.300.685,00	SD NEGERI 9 KALUKUE	Ma'rang	-	117.000.000,00	86.669.000,00	7.000.000,00	23.331.000,00	117.000.000,00	-	-
187	40.300.712,00	SD NEGERI 10 BOTTO	Ma'rang	-	108.000.000,00	75.581.400,00	17.025.000,00	15.393.600,00	108.000.000,00	-	-
188	40.300.707,00	SD NEGERI 11 ALE BONTO-BONTO	Ma'rang	-	164.700.000,00	113.260.600,00	19.995.000,00	31.444.400,00	164.700.000,00	-	-

NO	NPSN	SEKOLAH	KECAMATAN	SISA SALDO 2023	PENERIMAAN	PENGUNAAN				Pengembalian ke RKUD	SISA SALDO s/d Desember 2024
						Belanja Modal			Jumlah		
						Belanja Barang dan Jasa	Peralatan dan Mesin	Aset Tetap Lainnya			
189	40.300.702,00	SD NEGERI 12 ATTAS SALO	Ma'rang	-	153.900.000,00	107.730.000,00	22.315.900,00	23.854.100,00	153.900.000,00	-	-
190	40.300.740,00	SD NEGERI 13 PADANG LAMPE	Ma'rang	-	198.000.000,00	148.629.000,00	1.000.000,00	48.371.000,00	198.000.000,00	-	-
191	40.300.732,00	SD NEGERI 14 BONTO BONTO	Ma'rang	-	167.400.000,00	121.871.500,00	22.949.000,00	22.579.500,00	167.400.000,00	-	-
192	40.300.728,00	SD NEGERI 15 BONTO-BONTO	Ma'rang	-	121.500.000,00	88.661.900,00	11.000.000,00	21.838.100,00	121.500.000,00	-	-
193	40.300.866,00	SD NEGERI 16 LAIKANG	Ma'rang	-	44.100.000,00	30.860.000,00	11.078.000,00	2.162.000,00	44.100.000,00	-	-
194	40.300.871,00	SD NEGERI 17 BONTO SUNGGU	Ma'rang	-	159.300.000,00	111.510.000,00	37.730.000,00	10.060.000,00	159.300.000,00	-	-
195	40.300.859,00	SD NEGERI 18 UJUNG	Ma'rang	-	102.600.000,00	71.513.000,00	13.000.000,00	18.087.000,00	102.600.000,00	-	-
196	40.300.874,00	SD NEGERI 19 GELLENGE	Ma'rang	-	129.600.000,00	91.582.700,00	14.750.000,00	23.267.300,00	129.600.000,00	-	-
197	40.300.876,00	SD NEGERI 20 ALESIPITTO	Ma'rang	-	66.600.000,00	46.540.200,00	8.995.000,00	11.064.800,00	66.600.000,00	-	-
198	40.300.883,00	SD NEGERI 21 JENNAE	Ma'rang	-	82.800.000,00	56.205.000,00	15.180.000,00	11.415.000,00	82.800.000,00	-	-
199	40.300.813,00	SD NEGERI 22 KALUKUE	Ma'rang	-	43.200.000,00	33.513.400,00	4.620.000,00	5.066.600,00	43.200.000,00	-	-
200	40.300.810,00	SD NEGERI 23 SAMBAU	Ma'rang	-	85.500.000,00	65.786.400,00	7.000.000,00	12.713.600,00	85.500.000,00	-	-
201	40.300.800,00	SD NEGERI 24 ALEKARAJAE	Ma'rang	-	138.600.000,00	102.273.000,00	18.326.000,00	18.001.000,00	138.600.000,00	-	-
202	40.300.808,00	SD NEGERI 25 PANRURU	Ma'rang	-	123.300.000,00	86.218.000,00	18.350.000,00	18.732.000,00	123.300.000,00	-	-
203	40.300.838,00	SD NEGERI 26 BAWASALO	Ma'rang	-	65.700.000,00	45.990.000,00	11.675.000,00	8.035.000,00	65.700.000,00	-	-
204	40.300.845,00	SD NEGERI 27 BALOMBONG	Ma'rang	-	72.900.000,00	52.830.000,00	10.030.000,00	10.040.000,00	72.900.000,00	-	-
205	40.300.827,00	SD NEGERI 28 KASSIKEBO	Ma'rang	-	38.700.000,00	30.162.100,00	4.000.000,00	4.537.900,00	38.700.000,00	-	-
206	40.300.834,00	SD NEGERI 29 GUSUNGE	Ma'rang	-	73.800.000,00	51.333.800,00	12.000.000,00	10.466.200,00	73.800.000,00	-	-
207	40.300.703,00	SD NEGERI 12 BIRAENG	Minasatene	-	242.100.000,00	165.081.000,00	36.330.000,00	40.689.000,00	242.100.000,00	-	-
208	40.300.743,00	SD NEGERI 13 UJUNGLOE	Minasatene	-	68.400.000,00	48.171.500,00	13.300.000,00	6.928.500,00	68.400.000,00	-	-
209	40.300.731,00	SD NEGERI 14 BONTOTENE	Minasatene	-	197.100.000,00	137.969.500,00	24.600.000,00	34.530.500,00	197.100.000,00	-	-

NO	NPSN	SEKOLAH	KECAMATAN	SISA SALDO 2023	PENERIMAAN	PENGUNAAN				Pengembalian ke RKUD	SISA SALDO s/d Desember 2024
						Belanja Modal			Jumlah		
						Belanja Barang dan Jasa	Peralatan dan Mesin	Aset Tetap Lainnya			
210	40.300.872,00	SD NEGERI 17 LANGNGA-LANGNGA	Minasatene	-	286.200.000,00	200.339.000,00	40.851.000,00	45.010.000,00	286.200.000,00	-	-
211	40.300.875,00	SD NEGERI 19 KAJUARA	Minasatene	-	92.700.000,00	66.090.000,00	11.562.200,00	12.247.800,00	89.900.000,00	-	2.800.000,00
212	40.300.816,00	SD NEGERI 22 SOREANG	Minasatene	-	103.500.000,00	72.236.100,00	13.000.000,00	18.263.900,00	103.500.000,00	-	-
213	40.300.819,00	SD NEGERI 23 JAPING	Minasatene	-	63.000.000,00	44.100.000,00	13.096.000,00	5.804.000,00	63.000.000,00	-	-
214	40.300.802,00	SD NEGERI 24 KALIBONE	Minasatene	-	171.000.000,00	119.904.200,00	26.125.000,00	24.970.800,00	171.000.000,00	-	-
215	40.300.806,00	SD NEGERI 25 TARAWEANG KABBA	Minasatene	-	192.600.000,00	134.820.000,00	35.625.000,00	22.155.000,00	192.600.000,00	-	-
216	40.300.844,00	SD NEGERI 26 TARAWEANG KABBA	Minasatene	-	145.800.000,00	101.911.000,00	15.000.000,00	28.889.000,00	145.800.000,00	-	-
217	40.300.837,00	SD NEGERI 27 SAMAELO	Minasatene	-	114.300.000,00	82.735.000,00	13.574.000,00	17.991.000,00	114.300.000,00	-	-
218	40.300.848,00	SD NEGERI 29 LIMBUA	Minasatene	-	188.100.000,00	130.003.000,00	19.267.800,00	38.829.200,00	188.100.000,00	-	-
219	40.300.547,00	SD NEGERI 30 PANAIKANG	Minasatene	-	106.200.000,00	75.711.000,00	11.380.000,00	19.109.000,00	106.200.000,00	-	-
220	40.300.572,00	SD NEGERI 36 BIRINGERE	Minasatene	-	101.700.000,00	74.926.000,00	16.841.000,00	9.933.000,00	101.700.000,00	-	-
221	40.300.504,00	SD NEGERI 39 TAMALALANG	Minasatene	-	149.400.000,00	104.580.000,00	16.837.500,00	27.982.500,00	149.400.000,00	-	-
222	40.300.490,00	SD NEGERI 41 BONTOTENE	Minasatene	-	159.300.000,00	111.238.600,00	17.800.000,00	30.261.400,00	159.300.000,00	-	-
223	40.300.493,00	SD NEGERI 42 BIRAENG	Minasatene	-	103.500.000,00	72.450.000,00	15.600.000,00	15.450.000,00	103.500.000,00	-	-
224	40.300.510,00	SD NEGERI 44 BAKKA	Minasatene	-	35.100.000,00	24.570.000,00	5.135.750,00	5.394.250,00	35.100.000,00	-	-
225	40.300.532,00	SD NEGERI 49 BELAE	Minasatene	-	39.600.000,00	31.220.000,00	2.037.900,00	6.342.100,00	39.600.000,00	-	-
226	40.300.519,00	SD NEGERI 53 BANGGAE	Minasatene	-	63.000.000,00	41.974.100,00	3.800.000,00	17.225.900,00	63.000.000,00	-	-
227	40.300.520,00	SD NEGERI 54 TUARANG	Minasatene	-	61.200.000,00	42.840.000,00	3.652.000,00	14.708.000,00	61.200.000,00	-	-
228	40.300.521,00	SD NEGERI 55 BONTOWA	Minasatene	-	171.000.000,00	129.500.000,00	28.176.100,00	13.323.900,00	171.000.000,00	-	-
229	40.300.535,00	SD NEGERI 56 TALAKA	Minasatene	-	94.500.000,00	66.150.000,00	7.100.000,00	21.250.000,00	94.500.000,00	-	-
230	40.300.655,00	SD NEGERI 59 REA	Minasatene	-	38.700.000,00	26.895.000,00	7.000.000,00	4.805.000,00	38.700.000,00	-	-

NO	NPSN	SEKOLAH	KECAMATAN	SISA SALDO 2023	PENERIMAAN	PENGUNAAN				Pengembalian ke RKUD	SISA SALDO s/d Desember 2024
						Belanja Modal			Jumlah		
						Belanja Barang dan Jasa	Peralatan dan Mesin	Aset Tetap Lainnya			
231	40.310.343,00	SD NEGERI 60 BUNG	Minasatene	-	42.300.000,00	30.186.000,00	5.063.000,00	7.051.000,00	42.300.000,00	-	-
232	69.990.847,00	SD NEGERI 61 TERAPUNG PATALLASSANG	Minasatene	-	32.400.000,00	21.938.000,00	5.079.999,00	5.381.000,00	32.398.999,00	-	1.001,00
233	40.300.782,00	SD NEGERI 12 PANGKAJENE	Pangkajene	-	121.500.000,00	92.565.670,00	10.500.000,00	18.433.500,00	121.499.170,00	-	830,00
234	40.300.553,00	SD NEGERI 3 JAGONG	Pangkajene	-	216.900.000,00	150.167.200,00	30.900.000,00	35.832.800,00	216.900.000,00	-	-
235	40.300.498,00	SD NEGERI 4 PADOANG-DOANGAN	Pangkajene	-	233.100.000,00	168.309.000,00	25.250.000,00	39.541.000,00	233.100.000,00	-	-
236	40.300.587,00	SD NEGERI 533 MATTOANGIN	Pangkajene	-	302.400.000,00	208.518.000,00	70.025.000,00	23.857.000,00	302.400.000,00	-	-
237	40.300.658,00	SD NEGERI 6 LOKKASALE	Pangkajene	-	154.800.000,00	112.853.130,00	24.656.270,00	17.290.600,00	154.800.000,00	-	-
238	40.300.644,00	SD NEGERI 7 TEKOLABBUA	Pangkajene	-	110.700.000,00	78.731.000,00	13.158.000,00	18.811.000,00	110.700.000,00	-	-
239	40.300.648,00	SD NEGERI 8 PACELANG	Pangkajene	-	186.300.000,00	130.410.000,00	25.060.500,00	30.829.500,00	186.300.000,00	-	-
240	40.300.667,00	SD NEGERI 9 BARU-BARU TANGA	Pangkajene	-	66.600.000,00	45.961.000,00	8.359.000,00	12.280.000,00	66.600.000,00	-	-
241	40.300.711,00	SD NEGERI 10 BONTOMANGAPE	Pangkajene	-	141.300.000,00	98.500.000,00	13.750.000,00	29.050.000,00	141.300.000,00	-	-
242	40.300.698,00	SD NEGERI 11 PABUNDUKANG	Pangkajene	-	86.400.000,00	63.346.900,00	19.800.000,00	3.253.100,00	86.400.000,00	-	-
243	40.300.729,00	SD NEGERI 15 BONTOJAI	Pangkajene	-	98.100.000,00	68.990.000,00	20.290.000,00	8.820.000,00	98.100.000,00	-	-
244	40.300.863,00	SD NEGERI 16 BUCINRI	Pangkajene	-	157.500.000,00	109.836.000,00	21.450.000,00	26.214.000,00	157.500.000,00	-	-
245	40.300.858,00	SD NEGERI 18 TUMAMPUA I	Pangkajene	-	341.100.000,00	245.687.000,00	36.750.000,00	58.663.000,00	341.100.000,00	-	-
246	40.300.886,00	SD NEGERI 21 MALELENG	Pangkajene	-	173.700.000,00	121.590.000,00	-	52.110.000,00	173.700.000,00	-	-
247	40.300.832,00	SD NEGERI 28 TUMAMPUA II	Pangkajene	-	531.000.000,00	374.319.400,00	64.800.000,00	91.880.600,00	531.000.000,00	-	-
248	40.300.561,00	SD NEGERI NO 31 TUMAMPUA V	Pangkajene	-	101.700.000,00	70.959.600,00	14.400.000,00	16.256.500,00	101.616.100,00	-	83.900,00
249	40.300.580,00	SD NEGERI 32 TUMAMPUA VI	Pangkajene	-	86.400.000,00	53.348.100,00	10.700.000,00	22.351.900,00	86.400.000,00	-	-
250	40.300.564,00	SD NEGERI 34 LOKASALE	Pangkajene	-	166.500.000,00	115.250.000,00	22.934.800,00	28.315.200,00	166.500.000,00	-	-
251	40.300.570,00	SD NEGERI 35 TEKO LABBUA	Pangkajene	30.000,00	71.070.000,00	48.482.400,00	6.765.200,00	15.852.400,00	71.100.000,00	-	-

NO	NPSN	SEKOLAH	KECAMATAN	SISA SALDO 2023	PENERIMAAN	PENGUNAAN				Pengembalian ke RKUD	SISA SALDO s/d Desember 2024
						Belanja Modal			Jumlah		
						Belanja Barang dan Jasa	Peralatan dan Mesin	Aset Tetap Lainnya			
252	40.300.588,00	SD 37 BULU BULU	Pangkajene	-	192.600.000,00	134.920.000,00	37.982.000,00	19.698.000,00	192.600.000,00	-	-
253	40.300.499,00	SD NEGERI 38 BONTO PERAK	Pangkajene	-	195.300.000,00	133.075.700,00	25.550.000,00	36.674.300,00	195.300.000,00	-	-
254	40.300.527,00	SD NEGERI 45 PACELANG	Pangkajene	-	158.400.000,00	110.709.782,00	28.000.000,00	19.690.200,00	158.399.982,00	-	18,00
255	40.300.529,00	SD NEGERI 47 BARU BARU TOWA	Pangkajene	-	63.000.000,00	39.996.000,00	8.550.000,00	14.454.000,00	63.000.000,00	-	-
256	40.300.531,00	SD NEGERI 48 BONE-BONE	Pangkajene	-	144.000.000,00	92.298.000,00	32.106.000,00	19.596.000,00	144.000.000,00	-	-
257	40.300.516,00	SD NEGERI 50 BONTO PANNO	Pangkajene	-	76.500.000,00	58.337.500,00	8.800.000,00	9.362.500,00	76.500.000,00	-	-
258	40.300.517,00	SD NEGERI 51 TOLI-TOLI	Pangkajene	-	100.800.000,00	70.559.200,00	23.264.700,00	6.976.100,00	100.800.000,00	-	-
259	40.300.518,00	SD NEGERI 52 PAGANG	Pangkajene	-	38.700.000,00	25.288.000,00	4.000.000,00	9.412.000,00	38.700.000,00	-	-
260	40.300.640,00	SD NEGERI 57 PANDANG LAU	Pangkajene	-	22.500.000,00	17.000.000,00	3.500.000,00	2.000.000,00	22.500.000,00	-	-
261	40.300.654,00	SD NEGERI 58 BARU-BARU UTARA	Pangkajene	100.000,00	94.400.000,00	65.274.200,00	16.000.000,00	13.225.800,00	94.500.000,00	-	-
262	69.900.586,00	SD NEGR 59 PANGKAJENE	Pangkajene	-	72.000.000,00	50.470.000,00	4.220.000,00	17.310.000,00	72.000.000,00	-	-
263	40.300.486,00	SD NEGERI 40 BARACIKKE	Segeri	-	60.300.000,00	38.962.000,00	12.000.000,00	9.338.000,00	60.300.000,00	-	-
264	40.300.708,00	SD NEGERI 1 SEGERI	Segeri	-	101.700.000,00	68.490.000,00	12.939.100,00	20.270.900,00	101.700.000,00	-	-
265	40.300.887,00	SD NEGERI 2 SEGERI	Segeri	-	103.500.000,00	72.450.000,00	10.508.000,00	20.542.000,00	103.500.000,00	-	-
266	40.300.488,00	SD NEGERI 4 SEGERI	Segeri	-	61.200.000,00	46.289.100,00	5.720.500,00	9.190.400,00	61.200.000,00	-	-
267	40.300.533,00	SD NEGERI 5 AMPUTTANG	Segeri	-	59.400.000,00	41.580.000,00	5.946.000,00	11.874.000,00	59.400.000,00	-	-
268	40.300.657,00	SD NEGERI 6 CIKERE	Segeri	-	46.800.000,00	32.970.000,00	5.701.600,00	8.128.400,00	46.800.000,00	-	-
269	40.300.664,00	SD NEGERI 8 TIMPORONGAN	Segeri	-	211.500.000,00	148.050.000,00	22.104.000,00	41.346.000,00	211.500.000,00	-	-
270	40.300.686,00	SD NEGERI 9 MANGKACA	Segeri	-	62.100.000,00	43.725.000,00	7.000.000,00	11.375.000,00	62.100.000,00	-	-
271	40.300.709,00	SD NEGERI 10 BONE	Segeri	-	89.100.000,00	60.741.000,00	10.000.000,00	18.359.000,00	89.100.000,00	-	-
272	40.300.701,00	SD NEGERI 12 AMUNG	Segeri	-	35.100.000,00	24.570.000,00	10.530.000,00	-	35.100.000,00	-	-

NO	NPSN	SEKOLAH	KECAMATAN	SISA SALDO 2023	PENERIMAAN	PENGUNAAN				Pengembalian ke RKUD	SISA SALDO s/d Desember 2024
						Belanja Modal			Jumlah		
						Belanja Barang dan Jasa	Peralatan dan Mesin	Aset Tetap Lainnya			
273	40.300.721,00	SD NEGERI 14 LASARE	Segeri	-	57.600.000,00	41.798.000,00	7.855.000,00	7.947.000,00	57.600.000,00	-	-
274	40.300.799,00	SD NEGERI 23 TAKKU	Segeri	-	221.400.000,00	154.980.000,00	38.116.000,00	28.304.000,00	221.400.000,00	-	-
275	40.300.822,00	SD NEGERI 25 PARENRENG	Segeri	-	162.000.000,00	116.524.500,00	7.000.000,00	38.475.500,00	162.000.000,00	-	-
276	40.300.840,00	SD NEGERI 26 MANGKACA	Segeri	-	117.000.000,00	87.895.000,00	4.200.000,00	24.905.000,00	117.000.000,00	-	-
277	40.300.829,00	SD NEGERI 28 PAKKANG	Segeri	-	22.500.000,00	15.270.000,00	2.932.000,00	4.298.000,00	22.500.000,00	-	-
278	40.300.562,00	SD NEGERI 32 BAWASALO	Segeri	-	138.600.000,00	94.667.000,00	16.200.000,00	27.733.000,00	138.600.000,00	-	-
279	40.300.576,00	SD NEGERI 34 CITTA	Segeri	-	75.600.000,00	53.242.700,00	7.000.000,00	15.357.300,00	75.600.000,00	-	-
280	40.300.568,00	SD NEGERI 35 CAMBANG	Segeri	-	63.900.000,00	48.298.000,00	6.940.000,00	8.662.000,00	63.900.000,00	-	-
281	40.300.573,00	SD NEGERI 36 PARENRENG	Segeri	-	82.800.000,00	57.960.000,00	-	24.840.000,00	82.800.000,00	-	-
282	40.300.502,00	SD NEGERI 39 GUSUNG	Segeri	-	8.100.000,00	8.100.000,00	-	-	8.100.000,00	-	-
283	40.300.494,00	SD NEGERI 42 MANJELLING	Segeri	-	61.200.000,00	38.043.000,00	13.875.000,00	9.282.000,00	61.200.000,00	-	-
284	40.300.530,00	SD NEGERI 47 ULU AWERANG	Segeri	-	78.300.000,00	53.410.000,00	12.000.000,00	12.890.000,00	78.300.000,00	-	-
285	69.900.587,00	SD NEGERI 48 TANA BACUE	Segeri	-	80.100.000,00	56.070.000,00	16.020.000,00	8.010.000,00	80.100.000,00	-	-
286	40.300.651,00	SD NEGERI 7 LANNE	Tondong Tallasa	-	54.900.000,00	38.336.000,00	12.500.000,00	4.064.000,00	54.900.000,00	-	-
287	40.300.665,00	SD NEGERI 9 BANTIMURUNG	Tondong Tallasa	-	92.700.000,00	67.441.000,00	14.852.000,00	10.407.000,00	92.700.000,00	-	-
288	40.300.710,00	SD NEGERI 10 BONTO	Tondong Tallasa	-	68.400.000,00	43.637.900,00	13.250.000,00	11.512.100,00	68.400.000,00	-	-
289	40.300.714,00	SD NEGERI 10 KAMPUNG BARU	Tondong Tallasa	-	31.500.000,00	22.500.000,00	9.000.000,00	-	31.500.000,00	-	-
290	40.300.719,00	SDN 12 MALAKA	Tondong Tallasa	-	57.600.000,00	40.369.000,00	10.000.000,00	7.231.000,00	57.600.000,00	-	-
291	40.300.864,00	SD NEGERI 16 BULU TELLUE	Tondong Tallasa	-	57.600.000,00	40.299.300,00	8.550.000,00	8.750.700,00	57.600.000,00	-	-
292	40.300.862,00	SD NEGERI 17 PARANGLUARA	Tondong Tallasa	-	43.200.000,00	37.899.000,00	-	5.301.000,00	43.200.000,00	-	-
293	40.300.880,00	SD NEGERI 21 BIRAO	Tondong Tallasa	-	51.300.000,00	35.707.000,00	11.433.000,00	4.160.000,00	51.300.000,00	-	-

NO	NPSN	SEKOLAH	KECAMATAN	SISA SALDO 2023	PENERIMAAN	PENGUNAAN				Pengembalian ke RKUD	SISA SALDO s/d Desember 2024
						Belanja Modal			Jumlah		
						Belanja Barang dan Jasa	Peralatan dan Mesin	Aset Tetap Lainnya			
294	40.300.817,00	SD NEGERI 22 TONDONGKURA	Tondong Tallasa	-	116.100.000,00	81.265.100,00	30.100.000,00	4.734.900,00	116.100.000,00	-	
295	40.300.563,00	SDN 32 BONTOTINGGI	Tondong Tallasa	-	38.700.000,00	27.083.000,00	7.104.000,00	4.513.000,00	38.700.000,00	-	-
296	40.300.582,00	SD NEGERI 33 BILANGO	Tondong Tallasa	-	44.100.000,00	30.870.000,00	8.045.000,00	5.185.000,00	44.100.000,00	-	-
297	40.300.575,00	SD NEGERI 34 LIBURENG	Tondong Tallasa	-	28.800.000,00	19.385.000,00	-	9.415.000,00	28.800.000,00	-	-
298	40.300.689,00	SD NEGERI KECIL 35 BADONG	Tondong Tallasa	-	18.000.000,00	12.907.000,00	-	5.093.000,00	18.000.000,00	-	-
299	40.300.690,00	SD NEGERI KECIL MANYAMPA	Tondong Tallasa	-	28.800.000,00	20.099.100,00	5.400.000,00	3.300.900,00	28.800.000,00	-	-
300	40.300.691,00	SD NEGERI KECIL MARIO	Tondong Tallasa	-	23.400.000,00	16.343.000,00	3.800.000,00	3.257.000,00	23.400.000,00	-	-
JUMLAH				14.299.000,00	31.475.569.000,00	22.142.271.942,00	4.156.663.109,00	5.173.739.050,00	31.472.674.101,00	168.000,00	17.025.899,00

KERTAS KERJA REVIU DANA BOS REGULER SMP NEGERI TA.2024

NO	SEKOLAH	KECAMATAN	SISA SALDO 2023	PENERIMAAN	PENGGUNAAN			Jumlah belanja	Pengembalian ke RKUD	SISA SALDO s/d Desember 2024	Keterangan
					Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal					
						Peralatan dan Mesin	Aset Tetap Lainnya				
1	SMP NEGERI 2 BALOCCI	Balocci	0	268.400.000,00	155.658.000,00	15.000.000,00	97.742.000,00	268.400.000,00	0,00	0,00	
2	SMP NEGERI 3 SATAP BALOCCI	Balocci	0	79.200.000,00	63.100.000,00	4.000.000,00	12.100.000,00	79.200.000,00	0,00	0,00	
3	SMP NEGERI 1 BALOCCI	Balocci	0	498.300.000,00	348.890.000,00	22.329.000,00	127.081.000,00	498.300.000,00	0,00	0,00	
4	SMPN 5 SATAP BUNGORO	Bungoro	0	60.500.000,00	41.347.300,00	7.300.000,00	11.852.700,00	60.500.000,00	0,00	0,00	
5	SMP NEGERI 2 BUNGORO	Bungoro	0	270.600.000,00	198.575.000,00	27.640.000,00	44.385.000,00	270.600.000,00	0,00	0,00	
6	SMP NEGERI 3 BUNGORO	Bungoro	0	337.700.000,00	241.000.000,00	61.700.000,00	35.000.000,00	337.700.000,00	0,00	0,00	
7	SMP NEGERI 1 BUNGORO	Bungoro	0	884.400.000,00	590.722.100,00	110.886.900,00	182.791.000,00	884.400.000,00	0,00	0,00	
8	SMP NEGERI 4 SATAP BUNGORO	Bungoro	0	117.700.000,00	79.716.000,00	17.800.000,00	20.184.000,00	117.700.000,00	0,00	0,00	
9	SMP NEGERI 2 LABAKKANG	Labakkang	0	561.000.000,00	380.100.600,00	53.077.000,00	127.822.400,00	561.000.000,00	0,00	0,00	
10	SMPN 4 SATAP LABAKKANG	Labakkang	0	155.100.000,00	109.038.300,00	13.800.000,00	32.261.700,00	155.100.000,00	0,00	0,00	
11	SMP NEGERI 5 LABAKKANG	Labakkang	0	174.900.000,00	122.430.000,00	28.380.000,00	24.090.000,00	174.900.000,00	0,00	0,00	
12	SMP NEGERI 6 LABAKKANG LABSCHOOL UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR	Labakkang	0	147.400.000,00	109.261.400,00	26.750.000,00	11.388.600,00	147.400.000,00	0,00	0,00	
13	SMP NEGERI 1 LABAKKANG	Labakkang	0	766.700.000,00	535.049.700,00	68.100.000,00	163.550.300,00	766.700.000,00	0,00	0,00	
14	SMP NEGERI 3 LABAKKANG	Labakkang	0	508.200.000,00	361.608.800,00	51.900.000,00	94.691.200,00	508.200.000,00	0,00	0,00	
15	SMP NEGERI 6 SATU ATAP LK. KALMAS	Liukang Kalmas	0	77.000.000,00	53.900.000,00	10.100.000,00	13.000.000,00	77.000.000,00	0,00	0,00	
16	SMP NEGERI 11 SATU ATAP LK. KALMAS	Liukang Kalmas	0	83.600.000,00	58.520.000,00	9.000.000,00	16.080.000,00	83.600.000,00	0,00	0,00	
17	SMPN 9 SATAP LIUKANG KALMAS	Liukang Kalmas	0	66.000.000,00	46.145.000,00	12.950.000,00	6.905.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	
18	SMP NEGERI 8 SATU ATAP LK. KALMAS	Liukang Kalmas	0	84.700.000,00	59.290.000,00	6.000.000,00	19.410.000,00	84.700.000,00	0,00	0,00	
19	SMP NEGERI 5 SATU ATAP LK. KALMAS	Liukang Kalmas	0	66.000.000,00	45.868.000,00	12.000.000,00	8.132.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	
20	SMP NEGERI 2 LK. KALMAS PAMANTAUANG	Liukang Kalmas	0	66.000.000,00	46.200.000,00	16.810.000,00	2.990.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	
21	SMPN 10 SATAP LIUKANG KALMAS	Liukang Kalmas	0	66.000.000,00	45.845.000,00	2.200.000,00	17.955.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	

22	SMP NEGERI 1 LIUKANG KALMAS	Liukang Kalmas	0	66.000.000,00	46.163.000,00	13.500.000,00	6.337.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	
23	SMP NEGERI 4 SATAP LIUKANG KALMAS	Liukang Kalmas	0	74.800.000,00	52.360.000,00	-	22.440.000,00	74.800.000,00	0,00	0,00	
24	SMPN 13 SATAP LIUKANG KALMAS	Liukang Kalmas	0	66.000.000,00	45.899.000,00	11.300.000,00	8.801.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	
25	SMP NEGERI 3 SATAP LIUKANG KALMAS	Liukang Kalmas	0	121.000.000,00	85.281.000,00	20.570.000,00	15.149.000,00	121.000.000,00	0,00	0,00	
26	SMPN SATAP 12 LIUKANG KALMAS	Liukang Kalmas	0	84.700.000,00	58.946.000,00	5.600.000,00	20.154.000,00	84.700.000,00	0,00	0,00	
27	SMPN SATAP 7 LIUKANG KALMAS	Liukang Kalmas	0	66.000.000,00	46.275.000,00	9.500.000,00	10.225.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	
28	SMPN 6 SATAP LK. TANGAYA	Liukang Tangaya	0	81.400.000,00	54.520.000,00	19.600.000,00	7.280.000,00	81.400.000,00	0,00	0,00	
29	SMPN 11 SATAP LIUKANG TANGAYA	Liukang Tangaya	0	102.300.000,00	71.579.500,00	19.550.000,00	11.170.500,00	102.300.000,00	0,00	0,00	
30	SMPN 9 SATAP LIUKANG TANGAYA	Liukang Tangaya	0	66.000.000,00	39.570.000,00	21.630.000,00	4.800.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	
31	SMPN 5 SATAP LK. TANGAYA	Liukang Tangaya	0	66.000.000,00	46.200.000,00	11.391.000,00	8.409.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	
32	SMPN 4 SATAP LIUKANG TANGAYA	Liukang Tangaya	0	84.700.000,00	59.852.700,00	24.465.000,00	382.300,00	84.700.000,00	0,00	0,00	
33	SMPN 3 SATAP LK. TANGAYA	Liukang Tangaya	0	151.800.000,00	100.010.000,00	31.250.000,00	20.540.000,00	151.800.000,00	0,00	0,00	
34	SMPN 13 SATAP LIUKANG TANGAYA	Liukang Tangaya	0	66.000.000,00	40.685.000,00	17.200.000,00	7.830.000,00	65.715.000,00	0,00	285.000,00	saldo bank
35	SMP NEGERI 7 SATAP LIUKANG TANGAYA	Liukang Tangaya	0	66.000.000,00	44.350.000,00	12.500.000,00	9.150.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	
36	SMP NEGERI 1 LIUKANG TANGAYA	Liukang Tangaya	0	207.900.000,00	129.322.000,00	40.883.000,00	37.695.000,00	207.900.000,00	0,00	0,00	
37	SMP NEGERI 2 SATAP LIUKANG TANGAYA	Liukang Tangaya	0	85.800.000,00	60.080.000,00	20.500.000,00	5.220.000,00	85.800.000,00	0,00	0,00	
38	SMPN 10 SATAP LIUKANG TANGAYA	Liukang Tangaya	0	75.900.000,00	50.763.800,00	11.050.000,00	14.086.200,00	75.900.000,00	0,00	0,00	
39	SMP NEGERI 8 SATU ATAP LK. TANGAYA	Liukang Tangaya	0	69.300.000,00	48.510.000,00	14.110.000,00	6.680.000,00	69.300.000,00	0,00	0,00	
40	SMPN 12 LIUKANG TANGAYA	Liukang Tangaya	0	66.000.000,00	43.981.480,00	15.460.000,00	6.201.900,00	65.643.380,00	0,00	356.620,00	saldo bank
41	SMPN SATAP 13 LIUKANG TUPABBIRING	Liukang Tapabbiring	0	178.200.000,00	121.400.000,00	-	56.800.000,00	178.200.000,00	0,00	0,00	
42	SMP NEGERI 3 SATAP LIUKANG TUPABBIRING	Liukang Tapabbiring	0	44.000.000,00	32.210.000,00	2.000.000,00	9.790.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
43	SMPN 11 SATAP LIUKANG TUPABBIRING	Liukang Tapabbiring	0	67.100.000,00	46.970.000,00	9.300.000,00	10.830.000,00	67.100.000,00	0,00	0,00	
44	SMPN 7 SATAP LIUKANG TUPABBIRING	Liukang Tapabbiring	0	60.500.000,00	51.704.000,00	-	8.796.000,00	60.500.000,00	0,00	0,00	
45	SMP NEGERI 1 LIUKANG TUPABBIRING	Liukang Tapabbiring	0	238.700.000,00	167.090.000,00	21.626.000,00	37.920.000,00	226.636.000,00	0,00	12.064.000,00	saldo tunai
46	SMPN 12 SATAP LIUKANG TUPABBIRING	Liukang Tapabbiring	0	78.100.000,00	51.620.550,00	18.612.500,00	7.866.950,00	78.100.000,00	0,00	0,00	
47	SMP NEGERI SATAP 2 LIUKANG TUPABBIRING	Liukang Tapabbiring	0	146.300.000,00	102.410.000,00	20.500.000,00	23.390.000,00	146.300.000,00	0,00	0,00	

48	SMP NEGERI 8 SATAP LK. TUPABBIRING	Liukang Tapabbiring	0	63.800.000,00	44.660.000,00	13.681.800,00	5.458.200,00	63.800.000,00	0,00	0,00	
49	SMPN SATAP 14 LIUKANG TUPABIRING SELATAN	Liukang Tapabbiring	0	27.500.000,00	19.119.000,00	130.000,00	8.251.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	
50	SMPN 9 SATAP LK. TUPABBIRING	Liukang Tupabbiring Utara	0	64.900.000,00	45.430.000,00	4.000.000,00	15.470.000,00	64.900.000,00	0,00	0,00	
51	SMPN 10 SATAP LK. TUPABBIRING	Liukang Tupabbiring Utara	0	45.100.000,00	31.543.000,00	8.235.000,00	5.322.000,00	45.100.000,00	0,00	0,00	
52	SMPN 6 SATAP LK. TUPABBIRING	Liukang Tupabbiring Utara	0	71.500.000,00	49.500.000,00	8.900.000,00	13.100.000,00	71.500.000,00	0,00	0,00	
53	SMP NEGERI 1 LIUKANG TUPABBIRING UTARA	Liukang Tupabbiring Utara	0	49.500.000,00	34.650.000,00	1.965.000,00	12.885.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	
54	SMP NEGERI 5 SATAP LIUKANG TUPABIRING UTARA	Liukang Tupabbiring Utara	0	48.400.000,00	31.778.500,00	700.000,00	15.921.500,00	48.400.000,00	0,00	0,00	
55	SMP NEGERI 4 SATAP LK. TUPABBIRING	Liukang Tupabbiring Utara	0	167.200.000,00	117.040.000,00	15.500.000,00	34.660.000,00	167.200.000,00	0,00	0,00	
56	SMP NEGERI 3 MARANG	Ma`rang	0	292.600.000,00	204.819.900,00	23.645.500,00	64.134.600,00	292.600.000,00	0,00	0,00	
57	SMP NEGERI 2 MARANG	Ma`rang	0	209.000.000,00	146.300.000,00	40.935.500,00	21.764.500,00	209.000.000,00	0,00	0,00	
58	SMP NEGERI 1 MARANG	Ma`rang	0	447.700.000,00	313.390.000,00	45.544.000,00	88.766.000,00	447.700.000,00	0,00	0,00	
59	SMP NEGERI 4 SATAP MARANG	Ma`rang	0	130.900.000,00	99.630.000,00	10.950.000,00	20.320.000,00	130.900.000,00	0,00	0,00	
60	SMP NEGERI 2 MANDALLE	Mandalle	0	128.700.000,00	88.911.500,00	8.250.000,00	31.538.500,00	128.700.000,00	0,00	0,00	
61	SMP NEGERI 1 MANDALLE	Mandalle	0	261.800.000,00	190.306.600,00	27.000.000,00	44.493.400,00	261.800.000,00	0,00	0,00	
62	SMP NEGERI 1 MINASATENE	Minasatene	0	591.800.000,00	414.373.300,00	57.074.700,00	120.352.000,00	591.800.000,00	0,00	0,00	
63	SMPN 4 MINASATENE SATAP	Minasatene	0	29.700.000,00	20.790.000,00	3.508.000,00	5.402.000,00	29.700.000,00	0,00	0,00	
64	SMP NEGERI 3 MINASATENE	Minasatene	0	163.900.000,00	114.730.000,00	22.058.000,00	27.112.000,00	163.900.000,00	0,00	0,00	
65	SMP NEGERI 2 MINASATENE	Minasatene	0	321.200.000,00	224.682.200,00	38.597.000,00	57.920.800,00	321.200.000,00	0,00	0,00	
66	SMPN 4 PANGKAJENE	Pangkajene	0	139.700.000,00	97.810.000,00	21.916.500,00	19.973.500,00	139.700.000,00	0,00	0,00	
67	SMP NEGERI 1 PANGKAJENE	Pangkajene	0	1.133.000.000,00	792.172.000,00	147.415.000,00	193.413.000,00	1.133.000.000,00	0,00	0,00	
68	SMP NEGERI 2 PANGKAJENE	Pangkajene	0	864.600.000,00	604.990.000,00	105.799.100,00	153.810.900,00	864.600.000,00	0,00	0,00	
69	SMPN 3 PANGKAJENE	Pangkajene	0	108.900.000,00	74.147.500,00	18.750.000,00	15.981.800,00	108.879.300,00	0,00	20.700,00	saldo bank
70	SMP NEGERI 3 SEGERI	Segeri	0	44.000.000,00	30.763.000,00	9.500.000,00	3.737.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
71	SMP NEGERI 1 SEGERI	Segeri	0	503.800.000,00	409.618.323,00	35.100.000,00	58.985.500,00	503.703.823,00	0,00	96.177,00	saldo bank
	SMP NEGERI 2 SEGERI	Segeri	0	128.700.000,00	90.090.000,00	21.674.500,00	16.935.500,00	128.700.000,00	0,00	0,00	
73	SMPN 4 SATAP SEGERI	Tondong Tallasa	0	79.200.000,00	54.120.100,00	11.050.000,00	14.029.900,00	79.200.000,00	0,00	0,00	

74	SMP NEGERI 2 TONDONG TALLASA	Tondong Tallasa	0	99.000.000,00	69.300.000,00	19.703.000,00	9.997.000,00	99.000.000,00	0,00	0,00	
75	SMPN 4 SATU ATAP TONDONG TALLASA	Tondong Tallasa	0	38.500.000,00	26.951.200,00	8.500.000,00	3.029.500,00	38.480.700,00	0,00	19.300,00	saldo bank
76	SMP NEGERI 3 SATAP TONDONG TALLASA	Tondong Tallasa	0	123.200.000,00	92.404.000,00	17.000.000,00	13.796.000,00	123.200.000,00	0,00	0,00	
77	SMP NEGERI 1 TONDONG TALLASA	Tondong Tallasa	0	128.700.000,00	100.612.800,00	13.805.000,00	14.282.200,00	128.700.000,00	0,00	0,00	
78	SMPN 5 SATAP TONDONG TALLASA	Tondong Tallasa	0	49.500.000,00	34.650.000,00	13.250.000,00	1.600.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	
Jumlah			0	14.375.900.000,00	10.059.301.153,00	1.743.958.000,00	2.559.799.050,00	14.363.058.203,00	-	12.841.797,00	

KERTAS KERJA REVIU DANA BOS KINERJA SMP NEGERI TA.2024

NO	SEKOLAH	KECAMATAN	SALDO	PENERIMAAN	PENGGUNAAN			Jumlah	Pengembalian ke RKUD	SISA SALDO s/d Desember 2024	Keterangan
					Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal					
						Peralatan dan Mesin	Aset Tetap Lainnya				
1	SMP NEGERI 3 SATAP BALOCCI	Balocci	0	35.000.000,00	4.757.700,00	25.350.000,00	4.892.300,00	35.000.000,00	0	-	
2	SMP NEGERI 2 LABAKKANG	Labakkang	0	35.000.000,00	16.120.000,00	17.350.000,00	1.530.000,00	35.000.000,00	0	-	
3	SMP NEGERI 3 LABAKKANG	Labakkang	0	35.000.000,00	10.280.000,00	15.500.000,00	9.220.000,00	35.000.000,00	0	-	
4	SMP NEGERI 11 SATU ATAP LK. KALMAS	Liukang Kalmas	0	35.000.000,00	5.486.550,00	23.750.000,00	5.763.450,00	35.000.000,00	0	-	
5	SMPN 11 SATAP LIUKANG TANGAYA	Liukang Tangaya	0	35.000.000,00	4.757.700,00	25.350.000,00	4.892.300,00	35.000.000,00	0	-	
6	SMPN 12 LIUKANG TANGAYA	Liukang Tangaya	0	35.000.000,00	5.486.550,00	23.750.000,00	5.763.450,00	35.000.000,00	0	-	
7	SMPN SATAP 13 LIUKANG TUPABIRING	Liukang Tapabbiring	0	35.000.000,00	3.300.000,00	28.550.000,00	3.150.000,00	35.000.000,00	0	-	
8	SMP NEGERI 3 SATAP LIUKANG TUPABBIRING	Liukang Tapabbiring	0	35.000.000,00	4.757.700,00	25.350.000,00	4.892.300,00	35.000.000,00	0	-	
9	SMPN SATAP 14 LIUKANG TUPABIRING SELATAN	Liukang Tapabbiring	0	35.000.000,00	4.551.000,00	25.350.000,00	4.892.300,00	34.793.300,00	0	206.700,00	saldo bank
10	SMP NEGERI 1 MANDALLE	Mandalle	0	35.000.000,00	1.457.700,00	24.800.000,00	8.742.300,00	35.000.000,00	0	-	
11	SMP NEGERI 1 PANGKAJENE	Pangkajene	0	70.000.000,00	34.000.000,00	26.000.000,00	10.000.000,00	70.000.000,00	0	-	
12	SMP NEGERI 2 PANGKAJENE	Pangkajene	0	35.000.000,00	14.377.700,00	17.350.000,00	3.272.300,00	35.000.000,00	0	-	
13	SMPN 3 PANGKAJENE	Pangkajene	0	35.000.000,00	8.418.700,00	16.909.000,00	9.639.500,00	34.967.200,00	0	32.800,00	saldo bank
JUMLAH			0	490.000.000,00	117.751.300,00	295.359.000,00	76.650.200,00	489.760.500,00	0,00	239.500,00	

57. Tabel 7.5.3.1.f.2 Rincian Kas Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023
1	PKM Pangkajene	0,00	141.820.270,00
2	PKM Bonto Perak	6.488,08	103.361.974,53
3	PKM Minasa Tene	65.849,00	20.262.263,00
4	PKM Kalabbirang	23.428,00	69.207.550,00
5	PKM Bungoro	39.437,92	1.875.902,00
6	PKM Bowong Cindea	174.106,00	36.334.314,00
7	PKM Labakkang	25.291,00	75.797.704,00
8	PKM Taraweang	68.985,00	108.396.651,00
9	PKM Pundata Baji	2.332,71	40.096.075,00
10	PKM Marang	120.951,00	194.825.570,00
11	PKM Padang Lampe	0,00	81.510.995,50
12	PKM Segeri	15.246,00	91.691.958,00
13	PKM Baring	0,00	19.016.636,54
14	PKM Mandalle	38.926,00	70.408.421,00
15	PKM Balocci	16.529,00	36.824.629,00
16	PKM Bantimala	23.036,00	16.972.824,00
17	PKM LK. Tupabiring	18.595,00	25.969.405,00
18	PKM Sarappo	33.968,00	100.303.396,00
19	PKM Sabutung	4.806,59	8.546.293,00
20	PKM LK. Kalmas	96.853,00	19.095.599,00
21	PKM Pamantauang	12.109,31	54.916.043,00
22	PKM LK. Tupabiring Tanggaya	5.008,12	59.117.313,00
23	PKM Sailus	0,00	120.699.923,00
24	Kec. Segeri	0,00	4.819.660,00
25	Kec. Marang	0,00	700.000,00
26	PKM Pundata Baji	0,00	700.000,00
27	Kel. Pabundukang	0,00	100.000,00
28	Kel. Sibatua	0,00	100.000,00
29	Kel. Bonto Perak	0,00	37.685,00
30	Kel. Tekolabbua	0,00	100.000,00
31	Kel. Minasate'ne	0,00	100.000,00
32	Kel. Bontoa	0,00	100.000,00
33	Kel. Biraeng	0,00	99.928,00
34	Kel. Bonto Kio	0,00	100.000,00
35	Kel. Samalewa	0,00	195.460,00
36	Kel. Balocci Baru	0,00	134.745,00
37	Kel. Labakkang	0,00	100.000,00
38	Kel. Bontomatene	0,00	142.285,00
39	Kel. Bone	0,00	100.000,00
40	Kel. Bawasalo	0,00	99.999,00
41	Kel. Sapuka	0,00	145.170,00
42	Kel. Tumampua	0,00	100.000,00
43	Kel. Mappasaile	0,00	100.000,00
	Jumlah	791.945,73	1.503.271.369,57

REALISASI BOK SALUR PUSKESMAS
LINGKUP DINAS KESEHATAN KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

No.	Nama Pusk	Pagu	Realisasi	Sisa Dana	Kecamatan
1	Kota Pangkajene	1.143.944.000	1.066.704.000	77.240.000	Pangkajene
2	Bonto Perak	872.072.000	782.221.823	89.850.177	Pangkajene
3	Minasatene	1.191.258.000	1.164.756.797	26.501.203	Minasatene
4	Kalabbirang	700.835.000	671.257.390	29.577.610	Minasatene
5	Bungoro	1.163.671.000	1.084.140.788	79.530.212	Bungoro
6	Bowong Cindea	813.046.000	756.551.983	56.494.017	Bungoro
7	Labakkang	864.170.000	834.419.070	29.750.930	Labakkang
8	Taraweang	1.066.116.000	1.034.273.851	31.842.149	Labakkang
9	Pundata Baji	881.433.000	877.373.500	4.059.500	Labakkang
10	Ma'rang	958.856.000	920.980.900	37.875.100	Ma'rang
11	Padang Lampe	782.560.000	677.059.265	105.500.735	Ma'rang
12	Segeri	804.443.000	754.071.143	50.371.857	Segeri
13	Baring	740.802.000	713.638.254	27.163.746	Segeri
14	Mandalle	910.100.000	880.050.199	30.049.801	Mandalle
15	Balocci	1.017.386.000	976.358.000	41.028.000	Balocci
16	Bantimala	918.355.000	898.555.335	19.799.665	Tondong Tallasa
17	Lk. Tupabbiring	915.347.000	914.080.000	1.267.000	Lk. Tupabbiring
18	Sarappo	1.000.805.000	914.297.557	86.507.443	Lk. Tupabbiring
19	Sabutung	1.096.544.000	1.061.882.845	34.661.155	Lk. Tupabbiring Utara
20	Lk. Kalmas	1.036.779.000	1.017.545.518	19.233.482	Lk. Kalmas
21	Pamantauang	1.030.325.000	1.011.279.432	19.045.568	Lk. Kalmas
22	Lk. Tangaya	1.220.980.000	1.191.106.478	29.873.522	Lk. Tangaya
23	Sailus	878.520.000	834.715.663	43.804.337	Lk. Tangaya
	TOTAL	22.008.347.000	21.037.319.791	971.027.209	

PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URUT	N A M A	SALDO PER 31 Desember 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO PER 31 Desember 2024	PENYISIHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7=(4+5)-6	8	9
1		Piutang Pajak Daerah)	86.387.139.424,84	131.765.758.878,00	130.998.073.521,16	87.154.824.781,68	74.328.600.870,53	
	1	Pajak Hotel	7.864.091,00	65.811.136,00	67.474.727,00	6.200.500,00	4.913.377,5000	
	2	Pajak Restoran	267.776.129,60	4.278.100.102,00	4.237.605.203,00	308.271.028,60	121.574.828,3300	Tanpa Keterangan Rp.1,976,506,00
	3	Pajak Hiburan	20.432.500,00	23.705.000,00	20.002.000,00	24.135.500,00	14.723.765,0000	
	4	Pajak Reklame	251.964.950,00	379.550.400,00	391.135.150,00	240.380.200,00	114.958.747,0000	L bayar/Denda Rp.545.500,00
	5	Pajak Penerangan Jalan	548.834.122,32	25.587.713.966,00	25.587.683.166,00	548.864.922,32	523.478.124,7600	
	6	Pajak Mineral Bukan Logam(Marmer)	63.571.903.600,00	2.176.532.735,00	5.023.610.865,00	60.724.825.470,00	58.848.988.909,6000	
	7	Pajak Tanah Liat	50.000,00	15.883.631.323,00	15.883.556.323,00	125.000,00	5.375,0000	
	8	Pajak Batu Kapur	-	72.825.870.910,00	72.825.795.910,00	75.000,00	375,0000	
	9	Pajak Silika	95.528.750,00	355.637.330,00	372.735.980,00	78.430.100,00	78.402.104,5000	
	10	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	500.343.000,00	46.962.000,00	46.962.000,00	500.343.000,00	50.034.300,0000	Lebih Bayar 180,000,00
	11	Pajak Air Bawah Tanah	286.000,00	78.531.175,00	78.531.175,00	286.000,00	50.930,0000	
	12	Pajak Parkir	55.800.000,00	513.903.300,00	459.263.900,00	110.439.400,00	5.433.197,0000	
	13	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	21.066.356.281,92	9.549.809.501,00	6.003.717.122,16	24.612.448.660,76	14.566.036.836,8400	Tanpa Keterangan Rp.12,239.059,00
2		Piutang Retribusi Daerah)	529.750.300,00	1.650.316.600,00	1.426.464.771,00	753.602.129,00	500.196.145,81	
	1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Pujasera, Gasebo)	49.684.000,00	69.216.796,00	66.200.796,00	52.700.000,00	19.029.000,00	
	2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Ex Migo)	125.000.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	
	3	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Ruko Palampang)		1.091.499.732,00	958.197.268,00	133.302.464,00	663.178,99	L Bayar Rp.252,277
	4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Ruko Kalibone)		144.000.072,00	110.666.707,00	33.333.365,00	166.666,83	L bayar Rp.998,00
	5	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Ruko Ma'rang)	-	228.000.000,00	214.000.000,00	14.000.000,00	70.000,00	
	6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Rumah Susun Pekerja)		66.600.000,00	26.400.000,00	40.200.000,00	201.000,00	T.Keterangan Rp.200,00
	7	Retribusi Dispensasi Penggunaan Jalan Daerah	355.066.300,00	-	-	355.066.300,00	355.066.300,00	
		Jumlah Piutang	86.916.889.724,84	133.416.075.478,00	132.424.538.292,16	87.908.426.910,68	74.828.797.016,34	

PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
REKAP DAFTAR PIUTANG RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	N A M A	SALDO PER 1 JANUARI 2024	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2024	PENYISIHAN PIUTANG	KETERANGAN
	Hasil Retribusi Daerah ¹⁾	4.735.902.043,86	2.119.058.080,00	1.930.738.891,00	4.924.221.232,86	1.798.228.629,67	
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Ruko)	3.458.517.500,00	-	178.500.000,00	3.280.017.500,00	1.031.212.500,00	BAPENDA
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Ruko Ma'rang)		228.000.000,00	214.000.000,00	14.000.000,00	70.000,00	
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Ruko Kalibone)		144.000.072,00	110.666.707,00	33.333.365,00	166.666,83	
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Ruko Palampang)		1.091.499.732,00	958.197.268,00	133.302.464,00	663.178,99	
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Rumah Susun Pekerja)		66.600.000,00	26.400.000,00	40.200.000,00	201.000,00	
2	RINCIAN PIUTANG SEWA ALAT BERAT	78.950.000,00	19.200.000,00	33.500.000,00	64.650.000,00	21.021.000,00	PU
3	RINCIAN PIUTANG RETRIBUSI DISPENSASI JALAN	355.066.300,00	-	-	355.066.300,00	355.066.300,00	BAPENDA
4	RINCIAN PIUTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI	4.796.337,86	-	-	4.796.337,86	4.796.337,86	PERHUBUNGAN
5	RINCIAN PIUTANG RETRIBUSI FUJASERA DAN GASEBO	49.684.000,00	69.216.796,00	66.200.796,00	52.700.000,00	19.029.000,00	BAPENDA
6	REKAP RINCIAN PIUTANG PASAR	646.846.276,00	500.541.480,00	340.223.120,00	807.164.636,00	227.012.016,00	PERDAGANGAN
7	RINCIAN PIUTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)	138.990.630,00	-	-	138.990.630,00	138.990.630,00	PU
8	RINCIAN PIUTANG RETRIBUSI PEMANFAATAN RUANG UNTUK MENARA TELEKOMUNIKASI	3.051.000,00	-	3.051.000,00	-	-	KOMINFO
	Jumlah Piutang Per 31 Desember 2024	4.735.902.043,86	2.119.058.080,00	1.930.738.891,00	4.924.221.232,86	1.798.228.629,67	

PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
RINCIAN PIUTANG PENGELOLAAN HASIL KEKAYAAN DAERAH YANG SAH PENYERTAAN MODAL DEVIDEN
Per 31 Desember 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 dan 2018

LKPD : 2024

(dalam rupiah)

No.	Nama Wajib Pajak	Tahun Anggaran	Saldo Per 31 Desember 2023	Mutasi 2024		Saldo Akhir 2024	Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2024				Jumlah Piutang NETTO
				Penambahan	Pengurangan / Pelunasan		0 - 12 Bulan	13 - 36 Bulan	37 - 60 Bulan	>60 Bulan	
							Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	BPR Citra Mas	2016	80.718.746,00	-	-	80.718.746,00	-	-	-	80.718.746,00	-
2	BPR Citra Mas	2017	277.924.441,00	-	-	277.924.441,00	-	-	-	277.924.441,00	-
3	BPR Citra Mas	2018	83.081.585,00	-	-	83.081.585,00	-	-	-	83.081.585,00	-
4	BPR Citra Mas	2021	122.019.272,00	-	-	122.019.272,00	-	-	61.009.636,00	-	61.009.636,00
						-	-	-	-	-	-
T O T A L			563.744.044,00	-	-	563.744.044,00	-	-	61.009.636,00	441.724.772,00	61.009.636,00
Prosentase Penyisihan							0,5%	10%	50%	100%	
Nilai Piutang							-	-	122.019.272,00	441.724.772,00	563.744.044,00
Nilai Penyisihan							-	-	61.009.636,00	441.724.772,00	502.734.408,00
Nilai Bersih Piutang per 31 Desember 2024							-	-	61.009.636,00	-	61.009.636,00

PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
REKAP PIUTANG DAN PENYISIHAN PIUTANG LAIN - LAIN PAD
Per 31 Desember 2024

LKPD : 2024

(dalam rupiah)

No.	Nama Wajib Pajak	Tahun Anggaran	Saldo Per 01 Januari 2024	Mutasi 2024		Saldo Akhir Desember 2024	Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih Desember 2024				Penyisihan	Jumlah Piutang Netto
				Penambahan	Pengurangan / Pelunasan		0 - 12 Bulan	13 - 36 Bulan	37 - 60 Bulan	>60 Bulan		
							Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	RINCIAN PIUTANG DAN PENYISIHAN PIUTANG LAIN - LAIN PAD PADA RSUD	2024	9.137.300.649	8.841.590.612	8.837.300.649,00	9.141.590.612,00	44.207.953,06	-	150.000.000,00	-	194.207.953,06	8.947.382.658,94
2	RINCIAN PIUTANG LAIN-LAIN PAD SEWA ASET PEMDA (DINAS PARIWISATA)	2024	495.800.000	-	0,00	495.800.000,00	-	-	152.650.000,00	190.500.000,00	343.150.000,00	152.650.000,00
T O T A L			9.633.100.649,00	8.841.590.612,00	8.837.300.649,00	9.637.390.612,00	44.207.953,06	-	302.650.000,00	190.500.000,00	537.357.953,06	9.100.032.658,94

(dalam rupiah)

Halaman 1 dari 1

PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
REKAP RINCIAN PIUTANG LAINNYA
Per 31 Desember 2024

LKPD : 2024

(dalam rupiah)

No.	Nama Wajib Pajak	Tahun Anggaran	Saldo Per 31 Desember 2023	Mutasi 2024		Saldo Akhir 2024	Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2024				Jumlah Piutang NETTO
				Penambahan	Pengurangan / Pelunasan		0 - 12 Bulan	13 - 36 Bulan	37 - 60 Bulan	>60 Bulan	
							Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				-	-	-	-	-	-	-	-
1	RINCIAN PIUTANG RETRIBUSI SEWA GEDUNG Bapenda	2024	125.000.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00	125.000.000,00	-	-	-	125.000.000,00	125.000.000,00
2	RINCIAN PIUTANG TPTGR	2024	284.875.453,70	-	2.000.000,00	282.875.453,70	-	-	-	282.875.453,70	282.875.453,70
3	RINCIAN PIUTANG LAINNYA DANA BERGULIR	2024	242.268.900,00	-	-	242.268.900,00	-	-	-	242.268.900,00	242.268.900,00
4	TUNGGAKAN TAGIHAN PIHAK KETIGA Dinas Perikanan	2024	56.000.000,00	-	-	56.000.000,00	-	-	-	56.000.000,00	56.000.000,00
5	RINCIAN PIUTANG PINJAMAN KEPADA PERUSDA (PDAM)	2024	311.776.750,00	-	-	311.776.750,00	-	-	-	311.776.750,00	311.776.750,00
						-	-	-	-	-	-
T O T A L			1.019.921.103,70	51.000.000,00	53.000.000,00	1.017.921.103,70	-	-	-	1.017.921.103,70	1.017.921.103,70

**BEBAN DIBAYAR DIMUKA
PER 31 DESEMBER 2024**

No	SKPD	STNK 2023	STNK 2024	Jumlah
1	2		2	2
1	Dinas Pendidikan	499.875,00	19.625,00	480.250,00
2	Dinas Kesehatan	5.113.169,17	10.316.583,33 -	5.203.414,16
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	7.633.416,67	9.957.230,00 -	2.323.813,33
4	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	954.641,67	1.218.441,67 -	263.800,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.443.166,67	7.399.208,34 -	5.956.041,67
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.828.916,67	1.854.625,00 -	25.708,33
7	Dinas Sosial	5.354.950,00	5.142.681,67	212.268,33
8	Dinas Ketenagakerjaan	136.766,00	141.666,67 -	4.900,67
9	Dinas Ketahanan Pangan	2.677.166,67	3.541.058,33 -	863.891,66
10	Dinas Lingkungan Hidup	1.938.625,00	8.692.966,67 -	6.754.341,67
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.776.375,00	1.848.021,66 -	71.646,66
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	904.291,67	708.356,67	195.935,00
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	534.499,99	1.166.625,00 -	632.125,01
14	Dinas Perhubungan	1.159.250,00	1.106.583,33	52.666,67
15	Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik Dan Persandian	691.166,67	543.662,50	147.504,17
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	2.674.000,00	3.307.570,00 -	633.570,00

**BEBAN DIBAYAR DIMUKA
PER 31 DESEMBER 2024**

No	SKPD	STNK 2023	STNK 2024	Jumlah
1	2		2	2
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	668.795,83	933.783,33 -	264.987,50
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	136.833,33	140.966,67 -	4.133,34
19	Dinas Perikanan	3.876.625,00	5.914.841,64 -	2.038.216,64
20	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga	711.500,00	726.000,00 -	14.500,00
21	Dinas Pertanian	6.442.799,67	5.955.136,67	487.663,00
22	Sekretariat Daerah	17.869.103,33	22.067.739,17 -	4.198.635,84
23	Sekretariat DPRD	3.643.500,00	2.994.208,33	649.291,67
24	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	138.916,67	136.833,33	2.083,34
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.216.275,00	713.841,66	502.433,34
26	Badan Pendapatan Daerah	3.071.500,00	2.093.088,33	978.411,67
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manuasia	1.748.541,67	1.315.541,67	433.000,00
28	Inspektorat Daerah	1.630.750,00	1.000.164,00	630.586,00
29	Kecamatan Pangkajene	826.250,00	557.083,00	269.167,00
30	Kecamatan Minasate'ne	408.041,67	642.625,00 -	234.583,33
31	Kecamatan Balocci		-	-
32	Kecamatan Tondong Tallasa	1.982.500,00	1.445.625,00	536.875,00

**BEBAN DIBAYAR DIMUKA
PER 31 DESEMBER 2024**

No	SKPD	STNK 2023	STNK 2024	Jumlah
1	2		2	2
33	Kecamatan Bungoro		-	-
34	Kecamatan Labakkang		-	-
35	Kecamatan Ma'rang		-	-
36	Kecamatan Segeri		-	-
37	Kecamatan Mandalle	761.666,67	552.666,67	209.000,00
38	Kecamatan Liukang Tupabbiring		-	-
39	Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara		-	-
40	Kecamatan Liukang Tangaya	174.291,67	237.666,67	- 63.375,00
41	Kecamatan Liukang Kalmas		-	-
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	218.416,67	146.531,67	71.885,00
JUMLAH		80.846.584,03	104.539.248,65	- 23.692.664,62

REKAP PERSEDIAAN

NO	Nama SKPD	J U M L A H 2024	J U M L A H 2023
1	Dinas Pendidikan	320.950,00	1.529.500,00
2	Dinas Kesehatan	14.180.524.037,15	12.381.807.471,51
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	100.700,00	177.000,00
4	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	356.500,00	414.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.130.100,00	186.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.817.500,00	20.263.000,00
7	Dinas Sosial	0,00	-
8	Dinas Ketenagakerjaan	408.600,00	196.000,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	198.660.100,00	50.521.100,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	1.293.449.400,00	1.069.000,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	195.408.600,00	84.981.056,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	871.700,00	1.188.000,00
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan	312.500,00	-
14	Dinas Perhubungan	58.305.700,00	60.878.700,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik Dan Persandian	846.900,00	1.465.000,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	14.151.000,00	11.673.785,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	292.000,00	432.000,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	191.800,00	172.000,00
19	Dinas Perikanan	539.200,00	3.792.000,00
20	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga	0,00	-
21	Dinas Pertanian	30.001.800,00	11.230.400,00
22	Sekretariat Daerah	37.025.450,00	23.598.630,00
23	Sekretariat DPRD	948.500,00	3.274.500,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.160.000,00	795.000,00
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	21.863.100,00	11.371.000,00
26	Badan Pendapatan Daerah	38.778.300,00	33.877.000,00

REKAP PERSEDIAAN

NO	Nama SKPD	J U M L A H 2024	J U M L A H 2023
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	679.300,00	96.000,00
28	Inspektorat Daerah	1.000.000,00	2.887.000,00
29	Kecamatan Pangkajene	312.500,00	15.697.000,00
30	Kecamatan Minasate'ne	0,00	-
31	Kecamatan Balocci	2.323.800,00	-
32	Kecamatan Tondong Tallasa	360.000,00	-
33	Kecamatan Bungoro	1.061.200,00	-
34	Kecamatan Labakkang	6.130.900,00	172.000,00
35	Kecamatan Ma'rang	243.600,00	124.000,00
36	Kecamatan Segeri	0,00	-
37	Kecamatan Mandalle	500.000,00	-
38	Kecamatan Liukang Tupabbiring	4.240.000,00	-
39	Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara	2.470.200,00	1.500.000,00
40	Kecamatan Liukang Tangaya	72.000,00	986.000,00
41	Kecamatan Liukang Kalmas	0,00	-
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	-
		16.098.857.937,15	12.726.354.142,51

PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

REKAPITULASI BARANG KE NERACA

PER 31 DESEMBER 2024

No	NAMA SKPD	KIB A	KIB B	KIB C	KIB D	KIB E	KIB F	ASET LAINNYA	ASET TAK BERWUJUD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Dinas Pendidikan	12.341.142.675,62	130.979.836.683,33	437.722.469.414,82	22.782.312.737,89	12.594.739.623,14	1.200.460.434,00	3.929.134.233,18	1.354.579.415,00
2	Dinas Kesehatan	6.230.940.656,17	228.474.630.039,52	259.127.691.718,49	25.673.110.452,57	208.636.400,00	3.754.868.514,19	9.472.097.662,42	1.149.853.238,00
3	Rumah Sakit Umum Batara Siang	285.440.000,00	102.696.488.647,97	44.281.318.269,61	3.794.417.557,00	236.421.600,00	5.911.252.642,00	18.314.924.130,36	940.143.356,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	91.350.438.723,66	25.773.348.389,64	109.528.280.520,78	2.063.681.374.045,27	117.397.906,61	40.914.730.626,20	9.176.088.330,61	261.736.168,98
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	3.535.045.102,92	0,00	151.873.000,00	1.766.656.250,00	0,00	868.537.489,10	238.517.643,44
6	Dinas Perhubungan	879.834.773,42	17.432.002.160,11	14.611.481.901,58	35.254.986.401,39	0,00	0,00	4.457.467.777,87	77.972.343,75
7	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	31.093.643.404,53	13.789.025.459,71	5.037.496.550,00	0,00	0,00	3.810.132.887,97	0,00
8	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	2.940.911.121,70	0,00	42.282.500,00	0,00	0,00	114.458.981,85	70.145.000,00
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	12.751.626.670,38	10.840.997.356,00	40.424.430,00	121.980.000,00	0,00	633.702.546,00	47.950.000,00
10	Dinas Sosial	668.752.000,00	2.051.868.732,06	8.132.560.302,12	848.854.569,79	0,00	38.610.000,00	1.145.165.471,56	62.100.000,00
11	Badan Penanggulangan Bencana	0,00	5.462.763.900,90	1.958.390.913,43	53.408.298.979,00	50.310.000,00	403.000.900,00	0,00	0,00
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	1.181.792.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.520.000,00	0,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	13.624.843.558,92	1.642.379.264,68	112.777.556,00	155.021.000,00	0,00	362.431.298,70	0,00
14	Sekretariat Daerah	59.863.185.615,19	76.835.905.184,14	92.975.570.084,93	49.541.027.771,84	1.007.795.162,62	0,00	10.005.517.731,58	362.991.865,28
15	Sekretariat DPRD	343.764.000,00	21.531.712.525,72	3.671.779.021,00	493.715.298,00	745.547.500,00	0,00	3.330.183.286,00	27.923.095,00
16	Badan Pendapatan daerah	79.799.628,36	7.086.241.442,00	7.374.456.169,32	175.115.500,00	0,00	0,00	208.110.000,00	15.503.315,00
17	Inspektorat Kabupaten	24.354.000,00	1.869.724.647,00	33.750.000,00	26.324.000,00	0,00	0,00	70.210.090,00	50.000.000,00
18	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	8.615.907.556,46	505.605.792,76	770.629.414,93	15.400.000,00	0,00	706.035.594,24	112.411.913,00
19	Kecamatan Pangkajene	3.000.000,00	6.951.212.253,04	10.359.189.352,60	12.697.789.496,00	4.750.000,00	0,00	17.021.666,67	0,00
20	Kecamatan Minasate'ne	31.975.000,00	4.082.368.493,30	4.510.481.756,28	12.668.828.019,00	0,00	0,00	19.600.000,00	30.000.000,00
21	Kecamatan Balocci	76.396.850,00	2.536.860.179,08	4.922.731.916,62	6.414.772.000,00	0,00	0,00	146.786.250,00	0,00
22	Kecamatan Tondong Tallasa	8.470.000,00	876.771.482,00	992.989.641,00	3.550.000,00	0,00	0,00	65.285.000,00	27.000.000,00
23	Kecamatan Bungoro	797.585.000,00	2.054.908.107,17	4.975.260.391,53	5.165.318.500,00	1.650.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
24	Kecamatan Labakkang	165.000.000,00	2.872.524.126,64	4.852.238.747,09	6.968.996.155,00	0,00	0,00	145.722.333,33	0,00
25	Kecamatan Ma'rang	26.000.000,00	3.631.123.555,00	9.946.549.560,62	6.512.110.486,00	8.000.000,00	271.500.000,00	0,00	0,00
26	Kecamatan Segeri	1.400.857.000,00	2.973.790.624,66	9.181.553.303,52	9.102.340.642,00	0,00	0,00	342.184.457,14	0,00
27	Kecamatan Mandalle	22.194.404,20	744.641.885,00	2.199.765.958,06	5.000.000,00	0,00	0,00	53.852.221,00	0,00
28	Kecamatan Liukang Tupabbiring	6.000.000,00	1.442.647.151,17	2.554.496.780,00	4.124.638.000,00	0,00	0,00	114.450.000,00	0,00
29	Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara	0,00	659.280.100,00	460.273.772,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
30	Kecamatan Liukang Tangaya	21.000.000,00	1.105.011.394,00	1.445.825.473,00	2.005.651.500,00	0,00	0,00	247.332.000,00	25.000.000,00
31	Kecamatan Liukang Kalmas	43.252.500,00	1.119.919.300,00	1.221.250.214,47	2.398.047.050,00	0,00	0,00	24.738.538,48	0,00
32	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	96.000.000,00	3.186.311.381,47	10.183.296.451,41	159.800.000,00	0,00	0,00	413.704.000,00	643.530.000,00
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	3.030.492.405,76	0,00	133.960.000,00	33.662.500,00	0,00	608.247.560,57	198.110.000,00
34	Dinas Ketahanan Pangan	130.000.000,00	2.086.166.411,14	2.675.637.110,00	34.051.856,00	0,00	126.750.000,00	104.999.844,29	0,00
35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pem Desa	31.200.000,00	1.786.295.952,63	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	294.767.500,00	70.014.283,00
36	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	157.762.635,58	2.520.419.804,00	13.261.833.138,92	184.700.000,00	141.824.325,00	0,00	174.683.000,00	24.750.000,00
37	Dinas Pertanian	1.029.210.023,81	5.955.746.270,14	20.145.440.541,16	71.162.156.616,70	45.202.500,00	210.312.822,00	2.975.836.317,32	0,00
38	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	2.945.732.261,35	7.719.287.686,89	64.800.252.362,07	12.033.002.542,01	2.513.324.475,32	9.093.060.787,83	910.376.810,57	71.329.500,00
39	Dinas Perikanan	2.505.204.064,00	8.138.669.658,96	17.498.197.726,25	37.087.815.436,15	207.582.000,00	0,00	11.738.550.395,96	29.800.000,00
40	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	4.586.821.526,54	11.638.253.808,36	111.447.337.030,85	15.593.405.112,89	0,00	1.839.028.061,47	895.885.609,12	149.850.000,00
41	Dinas Ketenagakerjaan	0,00	5.275.448.939,51	9.300.367.360,52	493.381.372,00	0,00	0,00	145.763.110,27	64.735.000,00
42	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	24.187.244.733,28	3.717.705.927,63	22.967.675.307,29	47.679.568.886,52	226.205.871,12	15.174.500,00	27.715.340,00	88.000.000,00
43	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.735.200.000,00	8.935.085.690,51	1.468.077.213,66	69.339.000,00	0,00	0,00	92.634.224,34	252.346.500,00
Jumlah		212.073.758.071,18	788.979.235.345,36	1.337.566.477.298,15	2.514.619.243.433,95	20.202.107.113,81	63.778.749.287,69	86.238.853.690,50	6.466.292.636,45

[illegible]

No	NAMA SKPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN							PENGURANGAN			SALDO AKHIR
			BELANJA MODAL	REKLASIFIKASI DARI KIB C	GANTI KERUGIAN	HIBAH	MUTASI ASET	PENILAIAN ASET	JUMLAH	REKLASIFIKASI KE BELANJA BARANG & JASA	MUTASI ASET	JUMLAH	
24	Kecamatan Labakkang	165.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	165.000.000,00
25	Kecamatan Ma'rang	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00
26	Kecamatan Segeri	1.400.857.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.857.000,00
27	Kecamatan Mandalle	22.194.404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.194.404,20
28	Kecamatan Liukang Tupabbiring	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
29	Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Liukang Tangaya	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00
31	Kecamatan Liukang Kalmas	43.252.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.252.500,00
32	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	96.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000.000,00
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Dinas Ketahanan Pangan	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00
35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pem Desa	31.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200.000,00
36	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	157.762.635,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.762.635,58
37	Dinas Pertanian	1.029.210.023,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.210.023,81
38	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	2.367.368.082,62	0,00	0,00	0,00	0,00	578.364.178,73	0,00	578.364.178,73	0,00	0,00	0,00	2.945.732.261,35
39	Dinas Perikanan	2.505.204.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505.204.064,00
40	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	2.505.179.926,54	0,00	0,00	2.081.641.600,00	0,00	0,00	0,00	2.081.641.600,00	0,00	0,00	0,00	4.586.821.526,54
41	Dinas Ketenagakerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	23.014.623.533,28	440.430.000,00	0,00	0,00	848.199.200,00	25.000.000,00	0,00	1.313.629.200,00	18.015.500,00	122.992.500,00	141.008.000,00	24.187.244.733,28
43	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.735.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735.200.000,00
Jumlah Aset Tanah		207.933.654.592,45	465.430.000,00	578.364.178,73	2.081.641.600,00	848.199.200,00	726.356.678,73	184.484.000,00	4.884.475.657,46	18.015.500,00	726.356.678,73	744.372.178,73	212.073.758.071,18

Jumlah Aset Tetap Perawatan dan Mesin	725.415.624.885,92	54.637.117.749,37	4.239.147.000,00	95.956.481,35	29.780.000,00	37.280.000,00	124.670.000,00	36.452.550,00	6.831.921.722,94	4.550.000,00	779.404.404,02	3.065.324.524,46	68.839.636.862,20	356.329.000,00	750.000,00	29.732.450,00	611.399.332,94	36.547.032,48	7.000.000,00	179.346.597,22	33.900.000,78	2.153.778.555,81	3.646.324.524,46	6.376.126.402,74	788.979.235.565,56

[illegible]

PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DAFTAR ASET TETAP
RINCIAN ASET TETAP JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
PER 31 DESEMBER 2024

No	NAMA SKPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN										PENGURANGAN							Jumlah	SALDO AKHIR
			BELANJA MODAL	HIBAH	REKLASIFIKASI DARI KIB B	REKLASIFIKASI DARI KIB C	REKLASIFIKASI DARI KIB F	REKLASIFIKASI DARI BELANJA BARANG & JASA	BELANJA YANG DIKURAI ASSET BERSUMBER DARI UTANG	KOREKSI PENCATATAN	JUMLAH	REKLASIFIKASI KE KIB B	REKLASIFIKASI KE KIB C	REKLASIFIKASI KE KIB F	REKLASIFIKASI KE ASSET LAINNYA	REKLASIFIKASI KE BELANJA BARANG YANG DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT	BELANJA YANG SUDAH DIKURAI ASSET BERSUMBER DARI PEMBIAYAAN UTANG				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (4+5+6+7+8+9+10+11+12)	14	15	16	17	18	19	20 (14+15+16+17+18+19)	21 (3+13-20)	
1	Dinas Pendidikan	20.731.574.356,89	1.493.118.861,00	0,00	0,00	822.165.600,00	79.573.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.857.711,00	0,00	0,00	73.682.380,00	0,00	0,00	266.436.950,00	340.119.330,00	22.782.512.737,89	
2	Dinas Kesehatan	15.550.614.572,57	8.638.000.000,00	0,00	0,00	1.484.495.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.122.495.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.673.110.462,57	
3	Rumah Sakit Umum "Batara Siang"	2.359.098.520,00	0,00	0,00	0,00	218.559.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.339.037,50	1.478.878.037,50	0,00	0,00	218.559.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	243.559.000,00	3.794.417.567,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2.016.404.274.435,08	50.031.546.493,00	0,00	0,00	196.967.700,00	101.582.500,00	0,00	0,00	0,00	104.071.627,00	50.434.188.320,00	0,00	0,00	188.688.594,81	0,00	0,00	2.988.380.115,00	3.157.068.709,81	2.063.681.374.045,27	
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	151.873.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.873.000,00	
6	Dinas Perhubungan	32.890.265.551,39	1.159.994.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447.784.000,00	0,00	0,00	2.607.778.700,00	0,00	181.007.850,00	0,00	0,00	0,00	62.050.000,00	243.057.850,00	35.254.986.401,39	
7	Dinas Lingkungan Hidup	4.668.559.400,00	1.486.022.100,00	0,00	0,00	211.086.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697.108.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328.171.600,00	1.328.171.600,00	5.037.496.550,00	
8	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	22.502.500,00	0,00	0,00	0,00	19.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.282.500,00	
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	30.524.430,00	9.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.424.430,00	
10	Dinas Sosial	848.854.569,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.854.569,79	
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	52.667.801.979,00	540.497.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	740.497.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.408.298.979,00	
12	Badan Kestabilan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	112.777.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.777.556,00	
14	Selektoral Daerah	49.541.027.771,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.541.027.771,84	
15	Selektoral DPRD	493.715.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.715.298,00	
16	Badan Pendapatan daerah	175.115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.115.500,00	
17	Inspektorat Kabupaten	26.324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.324.000,00	
18	Badan Kewangan dan Aset Daerah	571.169.098,93	199.460.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.460.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.629.414,93	
19	Kecamatan Pangkajene	12.396.589.496,00	340.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.900.000,00	39.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.700.000,00	12.697.789.496,00	
20	Kecamatan Minasirne	12.471.576.019,00	197.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.668.826.019,00	
21	Kecamatan Balocci	6.014.772.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.414.772.000,00	
22	Kecamatan Tondong Talissa	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550.000,00	
23	Kecamatan Bungoro	5.135.518.500,00	29.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165.318.500,00	
24	Kecamatan Labakkang	6.988.396.155,00	370.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.968.996.155,00	
25	Kecamatan Marang	6.058.110.486,00	454.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.512.110.486,00	
26	Kecamatan Segeri	8.678.340.642,00	424.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.102.340.642,00	
27	Kecamatan Mandale	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	
28	Kecamatan Luukang Tupabbingri	3.774.638.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124.638.000,00	
29	Kecamatan Luukang Tupabbingri Utara	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	
30	Kecamatan Luukang Tangaya	1.905.651.500,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005.651.500,00	
31	Kecamatan Luukang Kalmas	2.198.047.050,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398.047.050,00	
32	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	159.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.800.000,00	
33	Badan Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	133.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.960.000,00	
34	Dinas Kestabilan Pangan	34.051.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.051.856,00	
35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pem Desa	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	
36	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan	184.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.700.000,00	
37	Dinas Pertanian	71.162.156.616,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.162.156.616,70	
38	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	11.877.210.091,08	99.850.000,00	0,00	0,00	17.990.000,00	34.952.450,93	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	155.792.450,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.033.062.542,01	
39	Dinas Perikanan	36.657.034.936,15	430.780.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.780.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.087.815.436,15	
40	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Industri	15.593.405.112,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.593.405.112,89	
41	Dinas Ketenagakerjaan	493.381.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.381.372,00	
42	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	41.561.360.736,52	3.736.187.283,00	1.670.242.170,00	0,00	0,00	843.667.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250.097.040,00	0,00	0,00	0,00	45.300.000,00	76.588.880,00	121.888.880,00	47.679.568.886,52		
43	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	69.339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.339.000,00	
Jumlah Aset Tetap			2.448.488.644.108,83	70.691.907.253,00	1.670.242.170,00	256.329.800,00	2.748.688.280,93	1.020.823.337,90	200.000.000,00	1.468.784.000,00	104.071.627,50	1.468.339.037,50	79.684.144.704,93	39.700.000,00	181.007.850,00	480.929.574,81	25.000.000,00	46.380.000,00	4.721.627.555,00	5.473.565.379,81	2.514.619.343.433,95

PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

DAFTAR ASET TETAP

RINCIAN ASET TETAP LAINNYA

PER 31 DESEMBER 2024

[illegible]

No	NAMA SKPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN			PENGURANGAN			SALDO AKHIR
			BELANJA MODAL	REKLASIFIKASI DARI KIB B	JUMLAH	REKLASIFIKASI KE KIB B	EKSTRA KOMPATABEL	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (7+8)	10 (3+6-9)
24	Kecamatan Labakkang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Ma'rang	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
26	Kecamatan Segeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Mandalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Liukang Tupabbiring	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Liukang Tangaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Liukang Kalmas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	33.662.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.662.500,00
34	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pem Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	141.824.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.824.325,00
37	Dinas Pertanian	45.202.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.202.500,00
38	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	2.513.324.475,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513.324.475,32
39	Dinas Perikanan	207.582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.582.000,00
40	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Dinas Ketenagakerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	226.205.871,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.205.871,12
43	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Aset		19.557.668.713,81	8.829.456.200,00	750.000,00	8.830.206.200,00	17.280.000,00	8.168.487.800,00	8.185.767.800,00	20.202.107.113,81

[illegible]

No	NAMA SKPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN					PENGURANGAN				SALDO AKHIR
			REKLASIFIKASI DARI KIB B	REKLASIFIKASI DARI KIB C	REKLASIFIKASI DARI KIB D	JUMLAH		REKLASIFIKASI KE KIB B	REKLASIFIKASI KE KIB C	REKLASIFIKASI KE KIB D	KOREKSI PENCATATAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8	9	10	11	12 (8+9+10+11)	13 (3+7-12)
23	Kecamatan Bungoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kecamatan Labakkang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Ma'rang	271.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.500.000,00
26	Kecamatan Segeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Mandalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Liukang Tupabbiring	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Liukang Tangaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Liukang Kalmas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Dinas Ketahanan Pangan	126.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.750.000,00
35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pem Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	99.533.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.533.700,00	0,00	0,00	99.533.700,00	0,00
37	Dinas Pertanian	210.312.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.312.822,00
38	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	9.093.060.787,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.093.060.787,83
39	Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	1.150.000,00	0,00	1.837.878.061,47	0,00	1.837.878.061,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839.028.061,47
41	Dinas Ketenagakerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	866.525.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.667.587,00	7.683.420,00	851.351.007,00	15.174.500,00
43	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan		52.594.442.830,63	39.732.450,00	19.702.595.293,85	460.929.974,81	20.203.257.718,66	124.470.000,00	7.604.784.128,60	1.020.823.337,00	268.873.796,00	9.018.951.261,60	63.778.749.287,69

PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DAFTAR ASET AKUMULASI PENYUSUTAN
PER 31 DESEMBER 2024

No	OPD	AKUMULASI PENYUSUTAN Per 31 Desember 2024				
		PERALATAN & MESIN	GEDUNG & BANGUNAN	JALAN, IIRIGASI & JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA	JUMLAH
1	2	22	23	24	25	26=22+23+24+25
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	107.924.009.157,85	227.141.251.961,00	10.377.485.988,00	-	345.442.747.106,85
2	Dinas Kesehatan	181.353.520.707,35	79.040.371.529,00	8.993.895.570,00	-	269.387.787.806,35
3	Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang	86.761.768.463,06	20.694.818.886,00	3.480.927.486,00	-	110.937.514.835,06
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	18.929.105.946,23	42.463.726.424,00	1.552.531.082.382,18	-	1.613.923.914.752,41
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.317.455.994,92	-	132.046.900,00	-	3.449.502.894,92
6	Dinas Perhubungan	17.168.870.451,11	10.686.641.688,18	27.957.699.669,05	-	55.813.211.808,34
7	Dinas Lingkungan Hidup	14.600.030.478,53	2.676.843.634,00	1.960.589.185,00	-	19.237.463.297,53
8	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.489.613.400,70	-	23.160.000,00	-	2.512.773.400,70
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.350.423.570,38	3.276.695.712,00	15.308.381,00	-	13.642.427.663,38
10	Dinas Sosial	1.705.909.794,35	3.128.536.719,00	653.368.228,00	-	5.487.814.741,35
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.257.856.328,90	607.596.603,00	32.656.000.750,00	-	38.521.453.681,90
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	827.771.959,00	-	-	-	827.771.959,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	10.099.402.131,92	806.832.291,00	90.428.774,00	-	10.996.663.196,92
14	Sekretariat Daerah	66.540.300.367,40	57.275.722.982,41	44.109.086.587,00	-	167.925.109.936,81
15	Sekretariat DPRD	12.962.972.462,44	1.898.676.302,00	324.674.918,00	-	15.186.323.682,44
16	Badan Pendapatan Daerah	6.454.836.493,00	4.165.087.435,00	175.115.500,00	-	10.795.039.428,00
17	Inspektorat Kabupaten	1.524.955.902,00	33.750.000,00	25.665.900,00	-	1.584.371.802,00
18	Badan Keuangan dan Aset Daerah	6.719.996.812,11	138.763.444,00	568.015.430,93	-	7.426.775.687,04
19	Kecamatan Pangkajene	5.171.413.111,04	4.448.598.612,00	4.491.738.529,00	-	14.111.750.252,04
20	Kecamatan Minasate'ne	2.835.583.950,30	2.556.274.016,00	4.236.333.842,00	-	9.628.191.808,30
21	Kecamatan Balocci	2.028.241.718,08	2.225.465.752,00	1.901.876.935,00	-	6.155.584.405,08
22	Kecamatan Tondong Tallasa	777.136.096,00	822.312.493,00	3.342.917,00	-	1.602.791.506,00
23	Kecamatan Bungoro	1.524.577.820,17	3.507.526.801,90	1.889.848.085,00	-	6.921.952.707,07
24	Kecamatan Labakkang	2.076.535.714,64	2.401.065.039,00	2.401.449.584,00	-	6.879.050.337,64
25	Kecamatan Ma'rang	2.644.497.081,00	4.905.109.170,00	2.080.812.888,00	-	9.630.419.139,00
26	Kecamatan Segeri	2.148.305.279,66	4.376.309.688,00	2.975.392.144,00	-	9.500.007.111,66
27	Kecamatan Mandalle	649.502.668,00	1.395.713.318,00	4.541.667,00	-	2.049.757.653,00
28	Kecamatan Liukang Tupabbiring	1.077.793.798,17	1.307.177.641,00	1.232.451.930,00	-	3.617.423.369,17
29	Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara	570.371.955,00	218.234.567,00	6.000.000,00	-	794.606.522,00
30	Kecamatan Liukang Tangaya	720.123.934,00	749.695.629,00	658.073.850,00	-	2.127.893.413,00
31	Kecamatan Liukang Kalmas	871.553.797,00	629.767.697,00	694.091.827,00	-	2.195.413.321,00
32	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.499.689.715,47	2.637.689.811,00	148.565.000,00	-	5.285.944.526,47
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.615.322.588,06	-	130.683.500,00	-	2.746.006.088,06

34	Dinas Ketahanan Pangan	1.938.127.843,14	1.035.788.898,00	29.593.560,00	-	3.003.510.301,14
35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.463.869.285,63	-	70.666.667,00	-	1.534.535.952,63
36	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.625.202.992,00	1.760.528.568,00	176.586.666,00	-	3.562.318.226,00
37	Dinas Pertanian	5.018.253.063,14	8.218.015.434,00	62.131.454.012,00	-	75.367.722.509,14
38	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	7.048.742.534,38	34.773.133.844,00	7.947.068.249,86	-	49.768.944.628,24
39	Dinas Perikanan	6.980.639.809,25	8.272.041.337,00	30.925.726.416,67	-	46.178.407.562,92
40	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	5.312.794.664,36	55.310.980.143,00	14.886.181.372,00	-	75.509.956.179,36
41	Dinas Ketenagakerjaan	4.852.341.437,51	5.647.988.711,00	373.676.072,00	-	10.874.006.220,51
42	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	2.754.909.328,63	5.184.288.596,00	16.391.908.638,00	-	24.331.106.562,63
43	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	8.029.283.484,51	1.126.263.205,40	38.059.150,00	-	9.193.605.839,91
Jumlah		628.223.614.090,39	607.545.284.581,89	1.839.900.675.150,69	-	3.075.669.573.822,97

REKAP ASET LAINNYA

No	Uraian	2023	Mutasi	2024
1	Tagihan Jangka Panjang	99.260.874,00	(4.500.000,00)	94.760.874,00
2	Aset Tak Berwujud	5.768.117.595,45	698.175.041,00	6.466.292.636,45
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	3.879.229.649,54	668.616.845,09	4.547.846.494,63
4	Aset Tak Berwujud Netto	1.888.887.945,91	29.558.195,91	1.918.446.141,82
5	Aset Lain - Lain	86.487.087.358,50	(248.233.668,00)	86.238.853.690,50
6	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(74.941.911.530,69)	284.483.668,00	(74.657.427.862,69)
7	Aset Lain-Lain Netto	11.545.175.827,81	36.250.000,00	11.581.425.827,81
		13.533.324.647,72	61.308.195,91	13.594.632.843,63

**REKAPITULASI NILAI KERUGIAN DAERAH
YANG MASIH BERUPA INFORMASI KERUGIAN DAERAH ATAU BELUM DITETAPKAN DENGAN SKTJM DAN BELUM DITINDAKLANJUTI**

KEADAAN PER 31 DESEMBER 2024

NO	JENIS TEMUAN KERUGIAN	JUMLAH NILAI	ANGSURAN	PELUNASAN	SISA ANGSURAN	KETERANGAN
1	Temuan BPK					Terdapat tambahan nilai TGR dari temuan BPK LHP Tahun 2023 dan Tahun 2024 total sebesar Rp3.874.793.617,74 (TGR Non Bendahara sebesar Rp.646.328.794,02 dan TGR Pihak Ketiga sebesar Rp.3.228.464.823,72)
	a. Tuntutan Perbendaharaan	938.663.313,00	135.500.000,00	33.563.358,00	769.599.955,00	
	b. TGR Non Bendahara	2.045.649.284,77	288.400.710,48	696.777.337,21	1.060.471.237,08	
	c. TGR Pihak ketiga	9.849.771.718,39	1.841.094.400,20	5.293.372.953,76	2.715.304.364,43	
	Sub Total BPK	12.834.084.316,16	2.264.995.110,68	4.727.322.359,41	4.545.375.556,51	
2	Temuan BPKP					
	TGR Pihak ketiga	74.926.334,00	-	74.926.334,00	-	
	Sub Total BPKP	74.926.334,00	-	74.926.334,00	-	
3	Temuan Inspektorat Kabupaten					
	a. Tuntutan Perbendaharaan	28.750.050,00	28.750.050,00	-	-	
	b. TGR Non Bendahara	491.479.156,00	163.446.760,00	201.477.426,00	126.554.970,00	
	c. TGR Pihak ketiga	875.545.498,41	75.849.158,00	193.952.597,98	605.743.742,43	
	Sub Total Inspektorat Kabupaten	1.395.774.704,41	268.045.968,00	395.430.023,98	732.298.712,43	
4	Temuan Inspektorat provinsi					
	a. Tuntutan Perbendaharaan	-	-	-	-	
	b. TGR Non Bendahara	29.235.552,00	-	29.235.552,00	-	
	c. TGR Pihak ketiga	178.622.025,00	-	102.015.656,00	76.606.369,00	
	Sub Total Inspektorat provinsi	207.857.577,00	-	131.251.208,00	76.606.369,00	
	JUMLAH KESELURUHAN (Rp)	14.512.642.931,57	2.533.041.078,68	5.328.929.925,39	5.354.280.637,94	

REKAP PENDAPATAN DIBAYAR DIMUKA

No	Uraian	2023	Penambahan	Pengurangan	2024
1	PAJAK REKLAME	114.657.666,70	129.570.458,33	114.657.666,70	129.570.458,33
2	SEWA LAHAN	22.800.000,00	12.000.000,00	34.800.000,00	-
		137.457.666,70	141.570.458,33	149.457.666,70	129.570.458,33

No	SKPD	REKAP UTANG BELANJA PEGAWAI				REKAP UTANG BELANJA BARANG DAN JASA				REKAP UTANG BELANJA HIBAH				REKAP UTANG BELANJA MODAL				
		SALDO AWAL PER 31 DESEMBER 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2024	SALDO AWAL PER 31 DESEMBER 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2024	SALDO AWAL PER 31 DESEMBER 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2024	SALDO AWAL PER 31 DESEMBER 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	KOREKSI	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Dinas Pendidikan	1.145.135.800,00	2.097.392.907,00	1.145.135.800,00	2.097.392.907,00	224.529.003,00	222.661.124,00	224.529.003,00	222.661.124,00	179.003.125,00	-	-	179.003.125,00	2.996.008.498,00	-	1.520.393.550,00	-	1.475.614.948,00
2	Dinas Kesehatan	776.847.476,00	2.047.247.291,00	776.847.476,00	2.047.247.291,00	9.872.597.468,00	8.425.571.633,00	4.974.540.171,00	13.323.628.930,00				-	8.388.093.326,00	1.215.500,00	63.834.000,00	261.190.376,00	8.064.284.450,00
3	Rumah Sakit	-	-	-		17.816.300.274,17	19.470.964.882,88	15.066.102.160,17	22.221.162.996,88					192.832.119,00	1.089.729.117,02	147.976.507,22	0,78	1.134.584.728,02
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	-	-	-	-	183.598.561,00	27.631.163,00	183.598.561,00	27.631.163,00	24.930.600,00	19.978.400,00	24.930.600,00	19.978.400,00	5.616.252.765,00	604.751.903,20	4.583.173.095,00	-	1.637.831.573,20
5	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	-	297.351,00	-	297.351,00	838.985.473,00	859.462.252,00	838.985.473,00	859.462.252,00				-	114.496.390,00	-	76.588.890,00	-	37.907.500,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	929.679,00	-	929.679,00	82.676.684,00	83.295.101,00	82.676.684,00	83.295.101,00				-					-
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	215.812.493,00	9.528.410,00	44.365.355,00	180.975.548,00				-	379.224.867,00	-	-	-	379.224.867,00
8	Dinas Sosial	-	140.330,00	-	140.330,00	840.000,00	-	-	840.000,00				-	98.011.400,00	-	95.652.000,00	-	2.359.400,00
9	Dinas Ketenagakerjaan	-	-	-	-	10.714.076,00	5.899.401,00	10.714.076,00	5.899.401,00				-					-
10	Dinas Ketahanan Pangan	-	896.328,00	-	896.328,00	3.884.212,00	7.307.857,00	3.884.212,00	7.307.857,00				-	2.470.000,00	-	-	-	2.470.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	1.855.633,00	-	1.855.633,00	-	-	-	-	-				-	1.750.304.826,00	-	1.646.304.826,00	-	104.000.000,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	6.448.929,00	7.170.542,00	6.448.929,00	7.170.542,00				-					-
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.108.807,00	1.612.400,00	6.108.807,00	1.612.400,00	4.310.124,00	3.216.894,00	4.310.124,00	3.216.894,00				-					-
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.400.092,00	-	3.400.092,00	-	7.470.000,00	-	-	7.470.000,00				-	1.200.000,00	-	-	-	1.200.000,00
15	Dinas Perhubungan	4.220.686,00	-	4.220.686,00	-	10.242.319,00	27.594.212,00	10.242.319,00	27.594.212,00				-	56.050.000,00	-	56.050.000,00	-	-
16	Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik Dan Persandian	23.770.002,00	1.787.696,00	23.770.002,00	1.787.696,00	76.076.227,00	87.616.312,00	76.076.227,00	87.616.312,00				-	4.979.100,00	-	-	-	4.979.100,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Jasa	138.251.775,00	1.895.813,00	138.251.775,00	1.895.813,00	5.957.895,00	7.878.798,00	5.957.895,00	7.878.798,00				-	544.506.661,00	83.831.605,47	-	-	628.338.266,47
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	143.956.986,00	66.746.520,00	143.956.986,00	66.746.520,00	7.119.232,00	8.181.242,00	7.119.232,00	8.181.242,00				-	9.465.980,00	-	-	-	9.465.980,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan	1.166.706,00	373.490,00	1.166.706,00	373.490,00	10.931.043,00	3.821.397,00	10.931.043,00	3.821.397,00				-					-
20	Dinas Perikanan	6.116.870,00	-	6.116.870,00	-	9.632.495,00	52.168.151,00	9.632.495,00	52.168.151,00	614.750.000,00		614.750.000,00	-	5.994.000,00	-	-	-	5.994.000,00
21	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga	-	-	-	-	7.794.765,00	8.181.845,00	7.794.765,00	8.181.845,00				-	25.889.950,00	191.677.000,00	168.476.200,00	-	49.090.750,00
22	Dinas Pertanian	394.065,00	-	394.065,00	-	115.206.470,00	7.147.602,00	107.231.470,00	15.122.602,00				-					-
23	Sekretariat Daerah	21.714.764,00	1.076.500,00	21.714.764,00	1.076.500,00	178.900.517,00	133.072.447,00	178.900.517,00	133.072.447,00				-					-
24	Sekretariat DPRD	118.157.382,00	-	118.157.382,00	-	114.558.636,00	106.313.998,00	111.058.636,00	109.813.998,00				-					-
25	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	2.643.372,00	268.132,00	2.643.372,00	268.132,00	4.828.606,00	8.088.407,00	4.828.606,00	8.088.407,00				-					-
26	Badan Keuangan dan Aset Daerah	24.258.900,00	1.838.359.232,00	24.258.900,00	1.838.359.232,00	13.146.468,00	12.642.612,00	13.146.468,00	12.642.612,00				-					-
27	Badan Pendapatan Daerah	17.720.136,32	-	-	17.720.136,32	10.709.232,00	8.390.264,00	10.709.232,00	8.390.264,00				-					-
28	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	97.588.176,00	-	97.588.176,00	-	4.834.264,00	3.440.649,00	4.834.264,00	3.440.649,00				-					-
29	Inspektorat Daerah	-	-	-	-	5.781.672,00	5.231.024,00	5.781.672,00	5.231.024,00				-					-
30	Kecamatan Pangkajene	-	-	-	-	4.017.301,00	6.164.323,00	4.017.301,00	6.164.323,00				-	8.600.000,00	-	4.100.000,00	-	4.500.000,00
31	Kecamatan Minasate'ne	12.750.302,00	-	12.750.302,00	-	4.920.326,00	7.378.777,00	4.920.326,00	7.378.777,00				-					-
32	Kecamatan Balocci	715.236,00	26.010.552,00	715.236,00	26.010.552,00	-	-	-	-				-					-
33	Kecamatan Tondong Tallasa	482.994,00	-	482.994,00	-	363.200,00	571.346,00	363.200,00	571.346,00				-	-				-
34	Kecamatan Bungoro	2.496.022,00	-	2.496.022,00	-	-	2.056.705,00	-	2.056.705,00				-	-				-
35	Kecamatan Labakkang	2.064.382,00	6.038.474,00	2.064.382,00	6.038.474,00	904.450,00	17.795.752,00	904.450,00	17.795.752,00				-	-				-
36	Kecamatan Ma'rang	-	-	-	-	1.654.804,00	4.040.159,00	954.804,00	4.740.159,00				-	-				-
37	Kecamatan Segeri	-	-	-	-	7.321.591,00	8.691.389,00	7.321.591,00	8.691.389,00				-	-				-
38	Kecamatan Mandalle	855.312,00	-	855.312,00	-	645.157,00	731.452,00	645.157,00	731.452,00				-	-				-
39	Kecamatan Liukang Tupabbiring	7.376.696,00	-	-	7.376.696,00	-	-	-	-				-	-				-
40	Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-				-
41	Kecamatan Liukang Tangaya	1.134.942,00	2.735.313,00	1.134.942,00	2.735.313,00	-	357.700,00	-	357.700,00				-	-				-

No	SKPD	REKAP UTANG BELANJA PEGAWAI				REKAP UTANG BELANJA BARANG DAN JASA				REKAP UTANG BELANJA HIBAH				REKAP UTANG BELANJA MODAL				
		SALDO AWAL PER 31 DESEMBER 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2024	SALDO AWAL PER 31 DESEMBER 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2024	SALDO AWAL PER 31 DESEMBER 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2024	SALDO AWAL PER 31 DESEMBER 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	KOREKSI	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
42	Kecamatan Liukang Kalmas	5.647.080,00	-	-	5.647.080,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	623.716,00	20.389.281,00	623.716,00	20.389.281,00	51.500.000,00	-	-	51.500.000,00	-	-	-	-	2.665.000,00	-	2.665.000,00	-	-
JUMLAH		2.567.454.310,32	6.114.197.289,00	2.536.710.398,00	6.144.941.201,32	29.915.213.967,17	29.650.265.822,88	22.023.526.418,17	37.541.953.371,88	818.683.725,00	19.978.400,00	639.680.600,00	198.981.525,00	20.197.044.882,00	1.971.205.125,69	8.365.214.068,22	261.190.376,78	13.541.845.562,69
JUMLAH UTANG BELANJA																		57.427.721.660,89

REKAP UTANG BELANJA PEGAWAI

No	SKPD	SALDO AWAL PER 31 DESEMBER 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2024
1	2				
1	Dinas Pendidikan	1.145.135.800,00	2.097.392.907,00	1.145.135.800,00	2.097.392.907,00
2	Dinas Kesehatan	776.847.476,00	2.047.247.291,00	776.847.476,00	2.047.247.291,00
3	Rumah Sakit				
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	-			-
5	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	-	297.351,00		297.351,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	929.679,00		929.679,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-			-
8	Dinas Sosial	-	140.330,00		140.330,00
9	Dinas Ketenagakerjaan	-			-
10	Dinas Ketahanan Pangan	-	896.328,00		896.328,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	1.855.633,00		1.855.633,00	-
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-			-
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.108.807,00	1.612.400,00	6.108.807,00	1.612.400,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.400.092,00		3.400.092,00	-
15	Dinas Perhubungan	4.220.686,00		4.220.686,00	-
16	Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik Dan Persandian	23.770.002,00	1.787.696,00	23.770.002,00	1.787.696,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	138.251.775,00	1.895.813,00	138.251.775,00	1.895.813,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	143.956.986,00	66.746.520,00	143.956.986,00	66.746.520,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.166.706,00	373.490,00	1.166.706,00	373.490,00
20	Dinas Perikanan	6.116.870,00		6.116.870,00	-
21	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga	-			-
22	Dinas Pertanian	394.065,00		394.065,00	-
23	Sekretariat Daerah	21.714.764,00	1.076.500,00	21.714.764,00	1.076.500,00
24	Sekretariat DPRD	118.157.382,00		118.157.382,00	-
25	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	2.643.372,00	268.132,00	2.643.372,00	268.132,00
26	Badan Keuangan dan Aset Daerah	24.258.900,00	1.838.359.232,00	24.258.900,00	1.838.359.232,00
27	Badan Pendapatan Daerah	17.720.136,32			17.720.136,32
28	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	97.588.176,00		97.588.176,00	-
29	Inspektorat Daerah	-			-
30	Kecamatan Pangkajene	-			-
31	Kecamatan Minasate'ne	12.750.302,00		12.750.302,00	-
32	Kecamatan Balocci	715.236,00	26.010.552,00	715.236,00	26.010.552,00
33	Kecamatan Tondong Tallasa	482.994,00		482.994,00	-
34	Kecamatan Bungoro	2.496.022,00		2.496.022,00	-
35	Kecamatan Labakkang	2.064.382,00	6.038.474,00	2.064.382,00	6.038.474,00

REKAP UTANG BELANJA PEGAWAI

No	SKPD	SALDO AWAL PER 31 DESEMBER 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2024
1	2				
36	Kecamatan Ma'rang	-			-
37	Kecamatan Segeri	-			-
38	Kecamatan Mandalle	855.312,00		855.312,00	-
39	Kecamatan Liukang Tupabbiring	7.376.696,00			7.376.696,00
40	Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara	-			-
41	Kecamatan Liukang Tangaya	1.134.942,00	2.735.313,00	1.134.942,00	2.735.313,00
42	Kecamatan Liukang Kalmas	5.647.080,00			5.647.080,00
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	623.716,00	20.389.281,00	623.716,00	20.389.281,00
JUMLAH		2.567.454.310,32	6.114.197.289,00	2.536.710.398,00	6.144.941.201,32

REKAP UTANG BELANJA BARANG DAN JASA

No	SKPD	SALDO AWAL PER 31 DESEMBER 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2024
1	2				
1	Dinas Pendidikan	224.529.003,00	222.661.124,00	224.529.003,00	222.661.124,00
2	Dinas Kesehatan	9.872.597.468,00	8.425.571.633,00	4.974.540.171,00	13.323.628.930,00
3	Rumah Sakit	17.816.300.274,17	19.470.964.882,88	15.066.102.160,17	22.221.162.996,88
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	183.598.561,00	27.631.163,00	183.598.561,00	27.631.163,00
5	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	838.985.473,00	859.462.252,00	838.985.473,00	859.462.252,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	82.676.684,00	83.295.101,00	82.676.684,00	83.295.101,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	215.812.493,00	9.528.410,00	44.365.355,00	180.975.548,00
8	Dinas Sosial	840.000,00			840.000,00
9	Dinas Ketenagakerjaan	10.714.076,00	5.899.401,00	10.714.076,00	5.899.401,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	3.884.212,00	7.307.857,00	3.884.212,00	7.307.857,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	-			-
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.448.929,00	7.170.542,00	6.448.929,00	7.170.542,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.310.124,00	3.216.894,00	4.310.124,00	3.216.894,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.470.000,00			7.470.000,00
15	Dinas Perhubungan	10.242.319,00	27.594.212,00	10.242.319,00	27.594.212,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik Dan Persandian	76.076.227,00	87.616.312,00	76.076.227,00	87.616.312,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	5.957.895,00	7.878.798,00	5.957.895,00	7.878.798,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.119.232,00	8.181.242,00	7.119.232,00	8.181.242,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10.931.043,00	3.821.397,00	10.931.043,00	3.821.397,00
20	Dinas Perikanan	9.632.495,00	52.168.151,00	9.632.495,00	52.168.151,00
21	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga	7.794.765,00	8.181.845,00	7.794.765,00	8.181.845,00
22	Dinas Pertanian	115.206.470,00	7.147.602,00	107.231.470,00	15.122.602,00
23	Sekretariat Daerah	178.900.517,00	133.072.447,00	178.900.517,00	133.072.447,00
24	Sekretariat DPRD	114.558.636,00	106.313.998,00	111.058.636,00	109.813.998,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	4.828.606,00	8.088.407,00	4.828.606,00	8.088.407,00
26	Badan Keuangan dan Aset Daerah	13.146.468,00	12.642.612,00	13.146.468,00	12.642.612,00
27	Badan Pendapatan Daerah	10.709.232,00	8.390.264,00	10.709.232,00	8.390.264,00
28	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.834.264,00	3.440.649,00	4.834.264,00	3.440.649,00
29	Inspektorat Daerah	5.781.672,00	5.231.024,00	5.781.672,00	5.231.024,00
30	Kecamatan Pangkajene	4.017.301,00	6.164.323,00	4.017.301,00	6.164.323,00
31	Kecamatan Minasate'ne	4.920.326,00	7.378.777,00	4.920.326,00	7.378.777,00
32	Kecamatan Balocci	-			-
33	Kecamatan Tondong Tallasa	363.200,00	571.346,00	363.200,00	571.346,00
34	Kecamatan Bungoro	-	2.056.705,00		2.056.705,00
35	Kecamatan Labakkang	904.450,00	17.795.752,00	904.450,00	17.795.752,00
36	Kecamatan Ma'rang	1.654.804,00	4.040.159,00	954.804,00	4.740.159,00
37	Kecamatan Segeri	7.321.591,00	8.691.389,00	7.321.591,00	8.691.389,00
38	Kecamatan Mandalle	645.157,00	731.452,00	645.157,00	731.452,00
39	Kecamatan Liukang Tupabbiring	-			-
40	Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara	-			-
41	Kecamatan Liukang Tangaya	-	357.700,00		357.700,00
42	Kecamatan Liukang Kalmas	-			-
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	51.500.000,00			51.500.000,00
JUMLAH		29.915.213.967,17	29.650.265.822,88	22.023.526.418,17	37.541.953.371,88

REKAP UTANG BELANJA HIBAH

No	SKPD	SALDO AWAL PER 31 DESEMBER 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2024
1	2				
1	Dinas Pendidikan	179.003.125,00			179.003.125,00
2	Dinas Kesehatan	-			-
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	24.930.600,00	19.978.400,00	24.930.600,00	19.978.400,00
4	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan				-
5	Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				-
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				-
7	Dinas Sosial				-
8	Dinas Ketenagakerjaan				-
9	Dinas Ketahanan Pangan				-
10	Dinas Lingkungan Hidup				-
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				-
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				-
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				-
14	Dinas Perhubungan				-
15	Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik Dan Persandian				-
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian				-
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				-
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				-
19	Dinas Perikanan				-
20	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga				-
21	Dinas Pertanian				-
22	Sekretariat Daerah				-
23	Sekretariat DPRD				-
24	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah				-
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah				-
26	Badan Pendapatan Daerah				-
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				-
28	Inspektorat Daerah				-
29	Kecamatan Pangkajene				-
30	Kecamatan Minasate'ne				-
31	Kecamatan Balocci				-
32	Kecamatan Tondong Tallasa				-
33	Kecamatan Bungoro				-
34	Kecamatan Labakkang				-
35	Kecamatan Ma'rang				-
36	Kecamatan Segeri				-
37	Kecamatan Mandalle				-
38	Kecamatan Liukang Tupabbiring				-

REKAP UTANG BELANJA HIBAH

No	SKPD	SALDO AWAL PER 31 DESEMBER 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2024
1	2				
39	Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara				-
40	Kecamatan Liukang Tangaya				-
41	Kecamatan Liukang Kalmas				-
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				-
JUMLAH		203.933.725,00	19.978.400,00	24.930.600,00	198.981.525,00

REKAP UTANG BELANJA MODAL
PER 31 DESEMBER 2024

No	NAMA SKPD	SALDO AWAL PER 31 DESEMBER 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	KOREKSI	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2024
1	2	3				3
1	Dinas Pendidikan	2.996.008.498,00		1.520.393.550,00		1.475.614.948,00
2	Dinas Kesehatan	8.388.093.326,00	1.215.500,00	63.834.000,00	261.190.376,00	8.064.284.450,00
3	Rumah Sakit Umum	192.832.119,00	1.089.729.117,02	147.976.507,22	0,78	1.134.584.728,02
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	5.616.252.765,00	604.751.903,20	4.583.173.095,00		1.637.831.573,20
5	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	114.496.390,00		76.588.890,00		37.907.500,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	379.224.867,00				379.224.867,00
7	Dinas Sosial	98.011.400,00		95.652.000,00		2.359.400,00
8	Dinas Ketahanan Pangan	2.470.000,00				2.470.000,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	1.750.304.826,00		1.646.304.826,00		104.000.000,00
10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.200.000,00				1.200.000,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik Dan Persandian	4.979.100,00				4.979.100,00
12	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	544.506.661,00	83.831.605,47			628.338.266,47
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.465.980,00				9.465.980,00
14	Dinas Perikanan	5.994.000,00				5.994.000,00
15	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga	25.889.950,00	191.677.000,00	168.476.200,00		49.090.750,00
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.665.000,00		2.665.000,00		0,00
17	Dinas Perhubungan	56.050.000,00		56.050.000,00		0,00
18	Kecamatan Pangkajene	8.600.000,00		4.100.000,00		4.500.000,00
	Total	20.197.044.882,00	1.971.205.125,69	8.365.214.068,22		13.541.845.562,69

B U M D

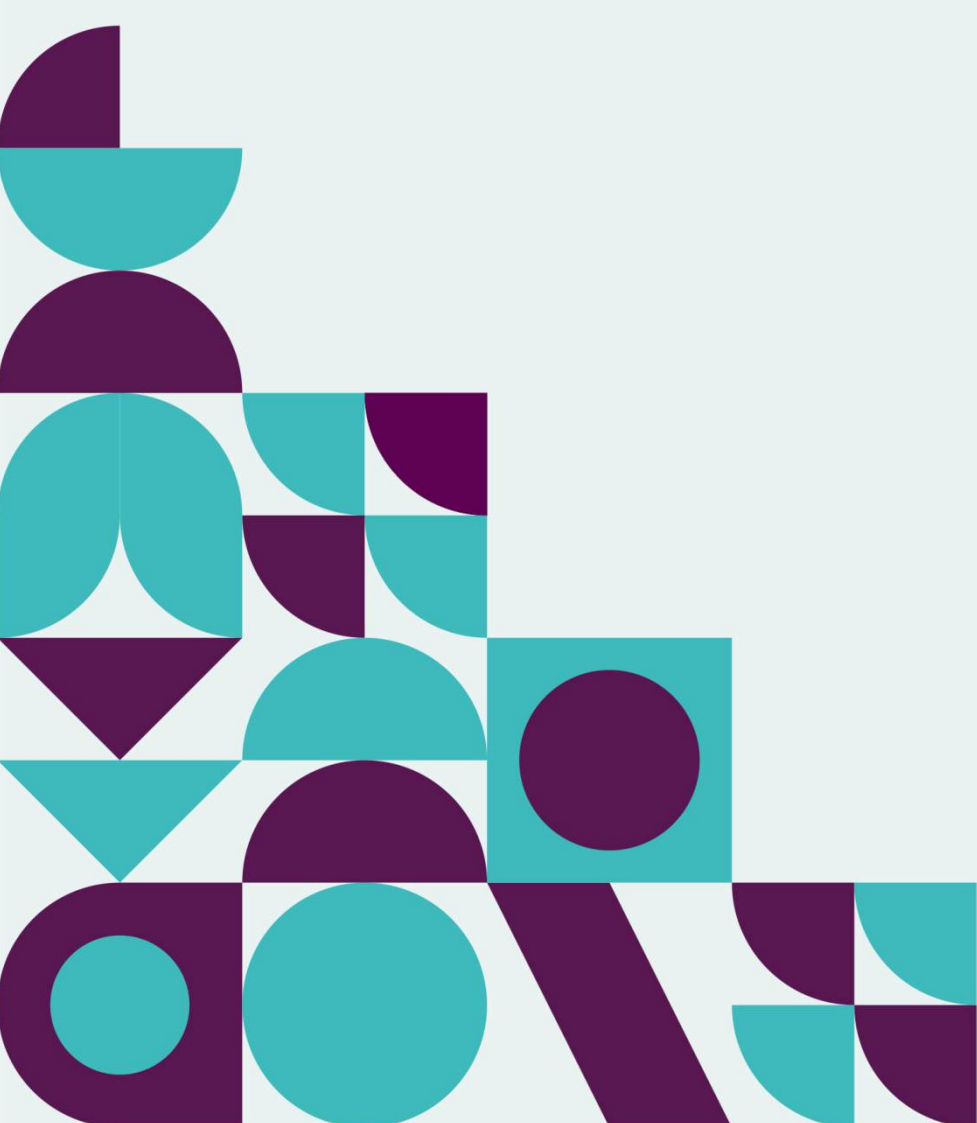
PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT CITRA MAS

Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 desember 2024

Dengan Angka Perbandingan Untuk 2023

Beserta Laporan Auditor Independen





PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT CITRA MAS

Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024

Dengan Angka Perbandingan Untuk 2023

Beserta Laporan Auditor Independen

DAFTAR ISI

Surat Pernyataan Klien

Laporan Keuangan

Neraca	1
Laporan Laba Rugi	3
Laporan Perubahan Ekuitas	4
Laporan Arus Kas	5
Catatan Atas Laporan Keuangan	6-30

Laporan Auditor Independen



BANK CITRA MAS

Perumda Bank Perkreditan Rakyat

SURAT PENYATAAN KLIEN

TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT CITRA MAS PANGKEP

PERIODE 31 DESEMBER 2024

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Satriawan Achsa
Alamat kantor : Kab. Pangkep
Jabatan : Direktur

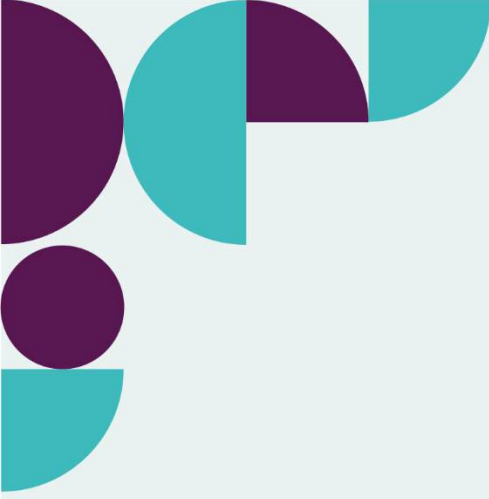
Menyatakan Bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perumda Bank Perkreditan Rakyat Citra Mas Pangkep
2. Laporan Keuangan Perumda Bank Perkreditan Rakyat Citra Mas Pangkep telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Semua informasi dalam laporan keuangan dan informasi tambahan telah dimuat secara lengkap dan benar.
4. Laporan keuangan dan informasi tambahan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta materil.
5. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal untuk periode 31 Desember 2024.
6. Sampai saat ini, baik entitas dan manajemen Perumda Bank Perkreditan Rakyat Citra Mas Pangkep tidak sedang menghadapi masalah tuntutan hukum dari pihak lain.



A. Satriawan Achsa

Direktur



Laporan Keuangan



PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT CITRA MAS

NERACA

Per 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	2.g.3.a.	51.400.700	24.322.800
Penempatan Pada Bank Lain	2.h.3.b.	2.493.297.396	5.309.190.412
(-) Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	2.h.3.c.	-	(4.978.695)
Penempatan Pada Bank Lain - Net		2.493.297.396	5.304.211.717
Kredit Yang Diberikan	2.h.3.d.	5.673.870.733	4.673.565.645
(-) Provisi Belum Diamortisasi	2.j.3.e.	(21.148.898)	(15.137.030)
(-) Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif		(1.231.570.786)	(247.476.829)
Kredit Yang Diberikan - Netto		4.421.151.049	4.410.951.786
Jumlah Aset Lancar		6.965.849.145	9.739.486.303
ASET TETAP			
Nilai Perolehan	2.l.3.j.	637.733.140	789.733.140
(-) Akumulasi Penyusutan	2.l.3.j.	(408.951.347)	(508.237.104)
Jumlah Nilai Buku Aset Tetap		228.781.793	281.496.036
ASET TIDAK BERWUJUD	2.l.3.j.	-	-
Nilai Perolehan		290.500.000	180.500.000
(-) Amortisasi		(159.666.674)	(112.104.171)
Jumlah Aset Tidak Berwujud - Netto		130.833.326	68.395.829
ASET LAIN-LAIN		124.031.237	161.043.905
TOTAL ASET		7.449.495.501	10.250.422.073

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT CITRA MAS

NERACA

Per 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Kewajiban Segera	3.k.	3.318.411.191	3.080.154.788
Simpanan	3.l.	2.101.597.225	3.327.255.772
Pinjaman Yang Diterima	3.m.	605.810.312	1.134.098.142
Kewajiban Lain-Lain	3.n.	6.254.584	11.451.666
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		6.032.073.312	7.552.960.368
Jumlah Kewajiban		6.032.073.312	7.552.960.368
EKUITAS			
Modal	3.q.	9.125.000.000	9.125.000.000
Saldo Laba	3.r.	(6.427.538.295)	(4.121.074.202)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	3.s.	(1.280.039.516)	(2.306.464.093)
Jumlah Ekuitas		1.417.422.189	2.697.461.705
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		7.449.495.501	10.250.422.073

Pangkajene Kepulauan , 06 Mei 2025


Andi Satriawan Achsa, SE
 Direktur Utama

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT CITRA MAS

LAPORAN LABA RUGI

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tgl 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Catatan	2024	2023
PENDAPATAN OPERASIONAL			
Pendapatan Bunga	2.d.3.v.		
Bunga Kontraktual		554.954.210	550.576.779
Bunga Penempatan Pada Bank Lain		96.834.860	147.088.033
Provisi Kredit		10.440.632	56.682.879
Jumlah Pendapatan Bunga		662.229.703	754.347.691
Beban Bunga	2.d.3.v.		
Beban Bunga Kontraktual		(146.189.179)	(483.340.625)
Premi Penjaminan		(1.713.728)	(4.833.335)
Jumlah Beban Bunga		(147.902.907)	(488.173.960)
Pendapatan Operasional Lainnya		1.212.418.850	1.738.350.345
Jumlah Pendapatan Operasional		1.726.745.646	2.004.524.076
BEBAN OPERASIONAL			
Beban penyisihan penghapusan		(1.479.243.386)	(2.519.660.183)
Beban penyusutan dan amortisasi		(173.522.638)	(67.263.994)
Beban pemasaran		(2.500.000)	(6.759.000)
Beban Administrasi dan Umum		(1.248.818.072)	(1.552.448.544)
Jumlah Beban Operasional		(2.904.084.096)	(4.146.131.721)
Laba (Rugi) Operasional		(1.177.338.450)	(2.141.607.645)
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 2.d.3.ab.			
Pendapatan Non Operasional		10.390.771	3.278.153
Beban non Operasional Lainnya		(113.091.837)	(168.134.601)
Selisih lebih (kurang) Pendapatan atas Beban Non Operasional		(102.701.066)	(164.856.448)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak		(1.280.039.516)	(2.306.464.093)
Taksiran Pajak Penghasilan		-	-
Laba (Rugi) Setelah Pajak		(1.280.039.516)	(2.306.464.093)

Pangkajene Kepulauan, 06 Mei 2025


Andi Satriawan Achsa, SE
 Direktur Utama

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT CITRA MAS
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tgl 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Modal Saham	Cadangan Umum dan Tujuan	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
Saldo Awal Ekuitas : 1 Januari 2023	4.625.000.000	2.727.210.748	(6.848.284.950)	503.925.798
Penambahan (Pengurangan) Modal	4.500.000.000	-	-	4.500.000.000
Pembagian Laba Tahun Lalu :	-	-	-	-
Laba (Rugi) Periode Berjalan Setelah Pajak	-	-	(2.306.464.093)	(2.306.464.093)
Saldo Akhir Ekuitas : 31 Des 2023	9.125.000.000	2.727.210.748	(9.154.749.043)	2.697.461.705
Penambahan (Pengurangan) Modal	-	-	-	-
Pembagian Laba Tahun Lalu :	-	-	-	-
Laba (Rugi) Periode Berjalan Setelah Pajak	-	-	(1.280.039.516)	(1.280.039.516)
Saldo Akhir Ekuitas : 31 Des 2024	9.125.000.000	2.727.210.748	(10.434.788.559)	1.417.422.189

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT CITRA MAS

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tgl 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	2024	2023
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Laba (Rugi) Setelah Pajak	(1.280.039.516)	(2.306.464.093)
Penyesuaian :		
Penyusutan Aset Tetap	(99.285.757)	41.763.988
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	47.562.503	25.500.006
Hasil Usaha Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja	(1.331.762.769)	(2.239.200.099)
Perubahan-perubahan Pos-Pos Modal Kerja		
Penurunan (kenaikan) Aset Lancar :		
Penurunan (Kenaikan) Kredit yang diberikan	(10.199.263)	2.498.458.003
Penurunan (Kenaikan) Aset Lain-lain	37.012.668	40.354.899
Kenaikan (Penurunan) Kewajiban segera	238.256.403	559.239.955
Kenaikan (Penurunan) Utang pajak	-	-
Kenaikan (Penurunan) Simpanan	(1.225.658.547)	(1.835.155.456)
Kenaikan (Penurunan) Pinjaman yang diterima	(528.287.830)	(1.718.804.577)
Kenaikan (Penurunan) Kewajiban lain-lain	(5.197.082)	(22.948.675)
Arus Kas netto dari Aktifitas Operasi	(2.825.836.420)	(2.718.055.950)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Penurunan (Penambahan) Aset Tetap	152.000.000	(5.200.000)
Penurunan (Penambahan) Aset Tidak Berwujud	(110.000.000)	-
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	42.000.000	(5.200.000)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Penurunan (Penambahan) Modal	-	4.500.000.000
Koreksi Saldo Laba	-	-
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	-	4.500.000.000
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	(2.783.836.420)	1.776.744.050
Kas dan Setara Kas Awal Periode	5.328.534.517	3.551.790.467
Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Periode	2.544.698.096	5.328.534.517
Kas dan Setara Kas Terdiri dari		
Kas	51.400.700	24.322.800
Penempatan Pada Bank Lain	2.493.297.396	5.304.211.717
Jumlah Kas dan Setara Kas	2.544.698.096	5.328.534.517

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT CITRA MAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tgl 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

Perumda BPR Citra Mas ("Perusahaan") berkedudukan di Pangkajene, sebelumnya bernama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Citra Mas yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 03 TAHUN 2004 tanggal 29 Juli 2004.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 2 TAHUN 2021 tanggal 16 Februari 2021 :

- a. Status hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD BPR Citra Mas diubah menjadi BUMD berbentuk Perusahaan Umum Daerah dengan nama Perumda BPR Citra Mas.
- b. Maksud dan tujuan Perusahaan ialah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah; dengan kegiatan usaha Perusahaan meliputi :
 - 1) Menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan yang berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan.
 - 2) Memberikan kredit, termasuk kredit usaha rakyat lain dan/atau kredit rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah.
 - 3) Melakukan kerja sama dengan Bank Umum, BPR lainnya, dan/atau lembaga keuangan lainnya/lembaga lainnya, dan
 - 4) Menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Citra Mas Nomor : 59 tanggal 29 Juli 2021 dari Arminah Taliu, SH, MH, Notaris di Pangkajene dan Kepulauan, dihasilkan beberapa keputusan, antara lain :

- a. Menyetujui perubahan bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Citra Mas, menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Citra Mas, sekaligus menyetujui pembubaran Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Citra Mas.
- b. Menyetujui pengalihan segala hak dan kewajiban serta tanggung jawab Badan Hukum lama (Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Citra Mas) ke Badan Hukum yang baru (Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Citra Mas).
- c. Bahwa selanjutnya, segala hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang timbul sebelum tanggal Akta ini, tetap menjadi hak dan kewajiban serta tanggung jawab Badan Hukum yang baru. yaitu Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Citra Mas.
- d. Menyetujui Tn. Andi Satriawan Achsa, SE sebagai Direktur Utama Perusahaan.
- e. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah pemegang saham satu- satunya dari Perusahaan.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perusahaan telah memiliki izin-izin sebagai berikut :

Nomor Pokok Wajib Pajak	: 02.556.868.4-809.000
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	: 20.10.9.67.00000004
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 2709210027685

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT CITRA MAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tgl 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. PERMODALAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 11 TAHUN 2023 tanggal 7 November 2023 :

- a. Modal dasar Perusahaan ditetapkan sebesar Rp 9.125.000.000,-.
- b. Dari jumlah modal dasar tersebut, telah disetor sebesar Rp 4.625.000.000,- yang selanjutnya disebut sebagai modal disetor dan merupakan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah
- c. Tahun anggaran 2023, disetor sebesar Rp 4.500.000.000,- .
- d. Modal dasar Perusahaan merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

3. SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Citra Mas Nomor : 59 tanggal 29 Juli 2021 dari Arminah Taliu, SH, MH, Notaris di Pangkajene dan Kepulauan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : A. Satriawan Achsa, SE

Tidak terdapat pengangkatan Komisaris Utama, Komisaris, maupun Direktur lainnya sebagaimana tercantum dalam akta tersebut.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan keuangan Bank disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (PA BPR) di Indonesia, kecuali untuk (SAK ETAP) Bab 23 tentang Kewajiban Imbalan Kerja.

Manajemen Bank berpendapat bahwa laporan keuangan tahun 2024 dan 2023 telah disajikan sesuai dengan SAK-ETAP dan PA BPR dan telah memenuhi semua persyaratannya.

Kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan oleh Bank secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan sebagai berikut:

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi dasar:

- Disajikan dalam mata uang Rupiah.
- Dasar akrual (accrual basis), kecuali tagihan bunga atas aset produktif yang digolongkan sebagai non performing dicatat atas dasar kas basis.
- Biaya historis (historical cost), kecuali aset tetap tertentu yang dinilai kembali berdasarkan peraturan pemerintah, penyertaan saham tertentu yang dicatat berdasarkan metode ekuitas dan surat-surat berharga tertentu yang dinilai berdasarkan nilai pasar serta aset yang menurut standar akuntansi harus dilakukan penilaian uang.

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT CITRA MAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tgl 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Laporan arus kas disusun berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang dikelompokkan ke dalam kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan dengan menggunakan metode tidak langsung.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah.

b. Transaksi Dengan Pihak-Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak tertentu sebagai transaksi hubungan istimewa sebagaimana diatur SAK-ETAP Bab 28 Pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa" Semua transaksi – transaksi signifikan dengan pihak – pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan persyaratan dan kondisi yang sama atau berbeda apabila dilakukan dengan pihak ketiga telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

Transaksi dan saldo perusahaan terhadap pihak hubungan entitas diungkapkan yang meliputi jumlah - jumlah transaksi, saldo termasuk syarat dan kondisi serta sifat pembayaran dan rincian jaminan yang diberikan atau diterima, penyisihan kerugian piutang tidak tertagih terkait jumlah saldo piutang, dan beban yang diakui dalam periode yang berkaitan dengan piutang ragu-ragu yang jatuh tempo dari pihak hubungan istimewa. Hubungan entitas anak dan induk diungkapkan baik ada atau tidak terdapat transaksi antar pihak hubungan istimewa. Kompensasi personil manajemen kunci harus diungkapkan secara total.

Suatu pihak mempunyai hubungan istimewa dengan entitas jika

- 1) Secara langsung, atau tidak langsung melalui satu atau lebih perantara, pihak tersebut:
 - a) Mengendalikan, dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama dengan, entitas (termasuk entitas induk, entitas anak, dan fellow subsidiaries)
 - b) Memiliki kepemilikan di entitas yang memberikan pengaruh signifikan atas entitas atau
 - c) Memiliki pengendalian bersama atas entitas
- 2) Pihak tersebut adalah entitas asosiasi dari entitas.
- 3) Pihak tersebut adalah joint ventures dimana entitas tersebut merupakan venture.
- 4) Pihak tersebut adalah personil manajemen kunci entitas atau entitas induknya.
- 5) Pihak tersebut adalah keluarga dekat dari setiap orang yang diuraikan dalam 1) atau 4).
- 6) Pihak tersebut adalah entitas yang dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh, atau memiliki hak suara secara signifikan, secara langsung atau tidak langsung, setiap orang yang diuraikan dalam (iv) atau (v) atau
- 7) Pihak tersebut adalah program imbalan pasca kerja untuk imbalan pekerja entitas atau setiap entitas yang mempunyai hubungan istimewa dengan entitas tersebut.

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT CITRA MAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tgl 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Perusahaan menetapkan bahwa personil manajemen kunci meliputi Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan. Sedangkan anggota keluarga dekat meliputi suami, istri, anak atau tanggungnya.

c. Kas

Kas adalah mata uang kertas dan logam rupiah yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Dalam pengertian kas termasuk kas besar, kas kecil, kas dalam mesin Anjungan Tunai Mandiri dan kas dalam perjalanan.

Mata uang rupiah yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku. Mata uang dimaksud tidak termasuk dalam pengertian kas dan disajikan dalam aset lain-lain. Tidak termasuk dalam pengertian kas adalah emas batangan, uang logam yang diterbitkan untuk memperingati peristiwa nasional (commemorative coins/notes) dan mata uang emas.

d. Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima

Pendapatan bunga yang akan diterima adalah pendapatan bunga dari kredit dengan kualitas lancar (performing) yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya. Termasuk dalam pengertian ini adalah pengakuan pendapatan bunga dari penempatan pada bank lain.

e. Penempatan Pada Bank Lain

Penempatan Pada Bank Lain terdiri dari: giro pada bank umum, tabungan pada bank lain, deposito pada bank lain dan sertifikat deposito pada bank umum.

1) Giro pada bank umum

Merupakan simpanan BPR pada bank umum yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM (kartu debit), sarana perintah pembayaran lain atau dengan cara pemindahbukuan.

2) Tabungan pada bank lain

Merupakan simpanan BPR pada bank umum dan BPR lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu.

3) Deposito pada bank lain

Merupakan simpanan BPR pada bank umum dan BPR lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara BPR dan bank yang bersangkutan. Deposito terdiri dari deposito yang berjangka waktu dan deposit on call. Deposit on call adalah deposito yang berjangka waktu relatif singkat dan dapat ditarik sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya.

4) Sertifikat deposito

Merupakan simpanan BPR pada bank umum dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan (atas unjuk). Bunga sertifikat deposito dihitung dengan cara diskonto, yaitu selisih antara nominal deposito dengan jumlah uang yang disetor.

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT CITRA MAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tgl 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

5) Penempatan pada bank syariah

Merupakan penempatan dana BPR pada bank umum syariah, unit usaha syariah bank umum dan BPR syariah dengan menggunakan akad syariah.

f. Kredit Yang Diberikan

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara BPR dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (debitur) untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit disajikan di neraca sebesar pokok kredit/baki debet dikurangi provisi serta ditambah biaya transaksi yang belum diamortisasi.

Pokok kredit adalah saldo kredit yang telah digunakan debitur dan belum dilunasi oleh debitur (biasa disebut sebagai baki debet).

Biaya transaksi adalah semua biaya tambahan yang terkait secara langsung dengan pemberian kredit yang ditanggung oleh BPR, misalnya marketing fee. Dalam hal biaya transaksi dibebankan kepada nasabah maka biaya tersebut tidak termasuk dalam biaya perolehan pemberian kredit. Biaya tambahan adalah biaya yang tidak akan dikeluarkan apabila tidak terdapat penyaluran kredit.

Provisi kredit adalah biaya yang harus dibayar debitur pada saat kredit disetujui dan biasanya dinyatakan dalam persentase.

Kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai non performing pada saat pokok kredit tersebut jatuh tempo dan/atau pada saat manajemen berpendapat bahwa penerimaan atas pokok atau bunga kredit tersebut diragukan realisasinya yang oleh perusahaan telah digolongkan sebagai kredit yang kurang lancar, diragukan dan macet, yang pengelompokan kolektabilitas mengacu pada POJK No.33/POJK.03/2018.

g. Penyisihan Kerugian dan Penghentian Pengakuan

1) Kredit

Penyisihan Kerugian Kredit dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dana ke dalam kredit.

Tarif penyisihan kerugian kredit atau Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) Kredit berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33/POJK.03/2019 tanggal 27 Desember 2018, berikut:

Kualitas Pembiayaan	Tarif Penyisihan	Keterangan
• Lancar	0,5%	Dari aset produktif yang tergolong lancar
• Dalam Perhatian Khusus *)	3,0%	Dari aset produktif yang tergolong dalam perhatian khusus

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT CITRA MAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tgl 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

• Kurang Lancar	10,0%	Dari aset produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan
• Diragukan	50,0%	Dari aset produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan
• Macet	100,0%	Dari aset produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan

Catatan *):

Berdasarkan surat OJK No. S-326/KO.0605/2021 tanggal 17 November 2021 bahwa penerapan tarif untuk pembentukan PPAP dengan kredit kualitas dalam perhatian khusus mulai 1 Desember 2021 adalah 3% dari sebelumnya 1%.

Besarnya Nilai Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan penyisihan kerugian tersebut ditetapkan paling tinggi sebesar :

- 100% dari Agunan yang bersifat Likuid;
- 85% dari Nilai Pasar untuk agunan berupa Emas perhiasan;
- 80% dari hak tanggungan untuk agunan berupa tanah bangunan/rumah yang memiliki sertifikat yang di ikat dengan hak tanggungan;
- 70% dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan kurang dari atau sampai dengan 12 bulan;
- 60% dari NJOP untuk agunan berupa tanah, bangunan/rumah yang memiliki sertifikat yang tidak di ikat dengan hak tanggungan;
- 50% dari NJOP untuk agunan berupa tanah, bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Surat Girik atau yang dipersamakan dengan ini termasuk Akta Jual Beli (AJB) yang dilampirkan dengan SPPT pada satu tahun terakhir;
- 50% dari harga pasar, harga sewa atau harga pengalihan untuk agunan berupa tempat usaha/Los/Kios/Lapak Hak Pakai/Hak Garap yang disertai dengan bukti kepemilikan atau surat izin pemakaian tempat usaha/Los/Kios/Lapak Hak Pakai/Hak Garap yang dikeluarkan oleh pengelola yang Sah dan disertai dengan Surat Kuasa Menjual;
- 50% dari nilai pasar untuk agunan berupa kendaraan bermotor, kapal, atau perahu bermotor yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah di ikat sesuai ketentuan yang berlaku;
- 50% dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 12 bulan sampai dengan 18 bulan;
- 50% untuk bagian dana yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit;

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT CITRA MAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tgl 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

- 30% dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 18 bulan namun belum melampaui 24 bulan dan sejalan dengan undang – undang serta ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Penghapusbukuan Kredit (Hapus Buku) adalah tindakan administratif BPR untuk menghapus buku kredit macet dari neraca sebesar kewajiban debitur tanpa menghapus hak tagih BPR kepada debitur.

Penghapusan Hak Tagih Kredit (Hapus Tagih) adalah tindakan BPR menghapus kewajiban debitur yang tidak dapat diselesaikan.

2) Penempatan pada bank lain

Penempatan pada Bank lain merupakan Giro pada Bank lain, yaitu saldo rekening giro Bank, baik dalam Rupiah maupun dalam valuta asing di Bank lain yang dinyatakan sebesar saldo Giro pada tanggal neraca; serta penempatan pada Bank lain (tabungan dan deposito berjangka) yang dinyatakan sebesar saldo penempatan dikurangi dengan penyisihan penghapusan yang dibentuk berdasarkan hasil penelaahan terhadap kualitas dari penempatan dana pada Bank lain.

h. Restrukturisasi Kredit Yang Diberikan

- 1) Restrukturisasi Kredit yang diberikan adalah upaya perbaikan yang dilakukan BPR dalam kegiatan perkreditan yang diberikan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.
- 2) Nilai Tunai Penerimaan Kas Masa Depan adalah nilai tunai perkiraan arus kas masa depan dari total kewajiban debitur sesuai dengan perjanjian restrukturisasi kredit yang diberikan berdasarkan tingkat diskonto tertentu.
- 3) Restrukturisasi kredit yang diberikan dilakukan apabila BPR mempunyai keyakinan bahwa debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajibannya setelah kredit yang diberikannya direstrukturisasi.
- 4) Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat dalam Penjelasan Pasal 21, restrukturisasi kredit dapat dilakukan antara lain melalui satu atau lebih cara sebagai berikut ::
 - a) Modifikasi syarat-syarat kredit yang diberikan, yang antara lain berupa:
 - Penurunan suku bunga kredit yang diberikan;
 - Perpanjangan jangka waktu kredit yang diberikan;
 - Pengurangan tunggakan bunga kredit yang diberikan baik secara absolut (tidak terdapat persyaratan tertentu) atau secara kontinjen (terdapat persyaratan tertentu dan telah diperjanjikan sebelumnya, misalnya pembatalan pengurangan tunggakan bunga apabila kondisi usaha debitur membaik);
 - Pengurangan jumlah pokok kredit yang diberikan baik secara absolut (tidak terdapat persyaratan tertentu) atau secara kontinjen (terdapat persyaratan tertentu dan telah diperjanjikan sebelumnya, misalnya pembatalan pengurangan tunggakan pokok apabila kondisi usaha debitur membaik).

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT CITRA MAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tgl 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

- b) Penambahan fasilitas kredit yang diberikan baik melalui konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit yang diberikan baru baik dilakukan dalam satu akad kredit yang diberikan maupun dengan menerbitkan akad kredit yang diberikan baru.

i. Agunan Yang Diambil Alih

Agunan Yang Diambil Alih adalah aset yang diperoleh BPR, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada BPR.

j. Aset Tetap dan Inventaris serta Penyusutan

Aset tetap dan inventaris adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan jasa atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode.

Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan (cost) dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus (straight-line method) sesuai dengan taksiran masa manfaat ekonomisnya.

Penyusutan dimulai ketika suatu aset tersedia untuk digunakan, misalnya aset berada di lokasi dan kondisi yang diperlukan sehingga mampu beroperasi sebagaimana maksud manajemen. Penyusutan dihentikan ketika aset tetap dan inventaris dihentikan pengakuannya.

Masa manfaat dan tarif penyusutan sebagai berikut:

- Bangunan	: 10 dan 20 tahun	(10,0% - 5,0% per tahun)
- Inventaris Kantor	: 4 dan 8 tahun	(25,0% - 12,5% per tahun)
- Kendaraan Bermotor	: 4 dan 8 tahun	(25,0% - 12,5% per tahun)

Pemeliharaan dan perbaikan rutin dibebankan sebagai biaya pada laporan laba rugi pada saat terjadinya, sedangkan pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat keekonomian di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas ditambahkan pada jumlah tercatat aset yang bersangkutan (kapitalisasi).

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual, dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan laba/rugi yang terjadi dibukukan sebagai pendapatan atau biaya pada periode bersangkutan.

k. Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Aset tidak berwujud disajikan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan rugi penurunan nilai (jika ada).

Piranti Lunak Komputer

Biaya yang berhubungan dengan pengembangan atau pemeliharaan program piranti lunak komputer diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Biaya-biaya yang terkait

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT CITRA MAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tgl 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

langsung dengan produksi piranti lunak yang unik dan dapat diidentifikasi serta dikendalikan oleh Bank dan kemungkinan besar akan memberikan manfaat ekonomi yang melebihi biayanya dalam jangka waktu lebih dari satu tahun, diakui sebagai aset tidak berwujud.

Biaya pengembangan piranti lunak komputer yang diakui sebagai aset dan diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama estimasi masa manfaatnya (4 tahun).

Penurunan nilai aset tidak berwujud diakui sebagai kerugian periode terjadinya.

l. Aset Lain – Lain

Aset Lain-lain adalah pos-pos aset yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam kelompok pos aset yang ada dan tidak secara material untuk disajikan tersendiri.

Aset lain-lain antara lain terdiri dari beban dibayar di muka, uang muka, agunan yang diambil alih, taksiran tagihan pajak penghasilan, persediaan dan lain-lain. Aset lain-lain diakui pada saat terjadinya sebesar biaya perolehan.

Beban dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

Aset lain-lain disajikan secara gabungan, kecuali nilainya material maka wajib disajikan tersendiri dalam neraca.

m. Kewajiban Segera

Kewajiban segera adalah kewajiban yang telah jatuh tempo dan atau yang segera dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar.

n. Utang Bunga

Utang bunga adalah utang bunga yang timbul dari transaksi lainnya, seperti sewa pembiayaan, pinjaman yang diterima, pinjaman subordinasi, modal pinjaman dll.

Utang Bunga diakui sebesar jumlah bunga kontraktual, baik untuk akrual bunga maupun yang telah jatuh tempo.

o. Utang Pajak

Utang pajak merupakan selisih kurang atas kewajiban pajak penghasilan BPR setelah memperhitungkan angsuran pajak atau pajak dibayar dimuka. Utang Pajak disajikan sebesar jumlah yang harus diselesaikan.

p. Simpanan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat (di luar bank umum atau BPR lain) kepada BPR berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.

Dalam kegiatan pengumpulan dana masyarakat, BPR menjual produk simpanannya kepada nasabah berupa tabungan dan deposito atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

Beban bunga simpanan meliputi bunga kontraktual atas simpanan dan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung kepada simpanan tersebut.

q. Simpanan Dari Bank Lain

Simpanan dari Bank Lain adalah kewajiban BPR kepada bank lain, dalam bentuk tabungan dan deposito.

- 1) Tabungan dari bank lain Tabungan disajikan sebesar kewajiban BPR kepada bank lain pemilik tabungan.
- 2) Deposito dari bank lain
 - Deposito disajikan sebesar jumlah nominalnya atau sebesar kewajiban BPR yang diperjanjikan.
 - Kewajiban bunga deposito yang belum atau yang sudah jatuh tempo disajikan dalam pos Utang Bunga.

3) Dana Setoran Modal – Kewajiban

Dana Setoran Modal – Kewajiban (DSM – Kewajiban) adalah dana yang telah disetor secara riil ke rekening BPR di bank umum dan diblokir untuk tujuan penambahan modal dan belum dinyatakan telah memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku atau telah dinyatakan tidak memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku.

Beban bunga simpanan meliputi bunga kontraktual atas simpanan dan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung kepada simpanan tersebut.

r. Pinjaman Yang Diterima

Pinjaman yang diterima merupakan dana yang diterima Bank dari kreditur dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pinjaman yang diterima diakui sebesar saldo pinjaman yang belum dilunasi dikurangi saldo biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan pinjaman dan saldo diskonto yang belum diamortisasi. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung kepada perolehan pinjaman dan diskonto diamortisasi secara garis lurus dan diakui sebagai beban bunga.

s. Imbalan Kerja

Perseroan **belum mengakui** kewajiban imbalan pasca kerja sebagaimana diatur dalam SAK-ETAP Bab 23 “Imbalan Kerja”. Pengakuan kewajiban tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam ketentuan tersebut Perseroan diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap. Besarnya imbalan pascakerja tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan besarnya kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja. Pada dasarnya imbalan kerja berdasarkan UU RI No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah program imbalan pasti.

t. Kewajiban Lain – Lain

Kewajiban lain-lain diakui sebesar jumlah yang harus diselesaikan. Termasuk dalam Kewajiban Lain-lain antara lain dana yang diterima BPR dari pihak ketiga bukan bank dalam rangka penerusan kredit tetapi belum disalurkan kepada nasabah.

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT CITRA MAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tgl 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

u. Modal

1) Modal Disetor

- Modal disetor diakui pada saat penerimaan setoran modal baik berupa dana kas maupun aset non-kas.
- Modal disetor dicatat berdasarkan:
 - a) Jumlah uang yang diterima.
 - b) Setoran saham dalam bentuk uang, sesuai transaksi nyata.
 - c) Besarnya utang yang dikonversi menjadi modal.
 - d) Setoran saham dalam dividen saham dilakukan dengan harga wajar saham, yaitu nilai wajar yang disepakati RUPS untuk saham.
 - e) Nilai wajar aset non-kas yang diterima.

Setoran saham dalam bentuk aset non-kas, menggunakan nilai wajar aset non-kas yang diserahkan, yaitu nilai appraisal tanggal transaksi yang disetujui Dewan Komisaris, atau nilai kesepakatan Dewan Komisaris dan penyetor aset non-kas.

- Pengeluaran saham dicatat sebesar nilai nominal yang bersangkutan. Apabila jumlah yang diterima dari pengeluaran saham tersebut lebih besar daripada nilai nominalnya, maka selisihnya dibukukan pada akun Agio Saham.

2) Tambahan Modal Disetor (Agio Saham).

- Tambahan modal disetor diakui pada saat penerimaan setoran modal dari pihak ketiga baik berupa dana kas maupun aset non- kas.
- Penambahan pos Tambahan Modal Disetor diakui pada saat:
 - a) dilakukan penambahan setoran kas oleh pemilik sebesar kas yang diterima;
 - b) dilakukan penambahan setoran aset non-kas sebesar nilai wajar aset non-kas yang diterima.

3) Modal Sumbangan

- Modal sumbangan diakui pada saat diterimanya sumbangan berupa kas atau aset nonkas dari pemilik.
- Modal sumbangan berupa kas dinilai sebesar kas yang diterima.
- Sumbangan berupa aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar aset non-kas yang diterima.

4) Dana Setoran Modal – Ekuitas (DSM – Ekuitas)

Dana Setoran Modal – Ekuitas (DSM – Ekuitas) adalah dana yang telah disetor secara riil ke rekening BPR di bank umum dan diblokir untuk tujuan penambahan modal dan dinyatakan telah memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku, namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor seperti Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota maupun pengesahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT CITRA MAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tgl 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Dana setoran modal yang dinyatakan memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku direklasifikasi dari kewajiban (DSM – Kewajiban) ke ekuitas (DSM – Ekuitas) sebesar jumlah dana yang memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku.

Laba/Rugi yang Belum Direalisasi

Laba/Rugi yang Belum Direalisasi adalah selisih nilai wajar surat berharga dalam kategori tersedia untuk dijual pada tanggal neraca dengan nilai tercatat.

Surplus Revaluasi Aset Tetap

Surplus Revaluasi Aset Tetap adalah selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dan inventaris sebelum dilakukan revaluasi.

v. Saldo laba

Saldo laba (laba ditahan) adalah akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen, koreksi laba rugi periode lalu, dan reklasifikasi surplus revaluasi aset tetap. Saldo laba dikelompokkan menjadi:

- 1) Cadangan tujuan, yaitu cadangan yang dibentuk dari laba netto setelah pajak yang tujuan penggunaannya telah ditetapkan.
- 2) Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari laba netto setelah pajak yang dimaksudkan untuk memperkuat modal, dan
- 3) Saldo laba yang belum ditentukan tujuannya, terdiri dari:
 - laba rugi periode lalu yang belum ditetapkan penggunaannya; dan
 - laba rugi periode berjalan

Pembagian laba Bank ditetapkan melalui Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan diakui sebagai kewajiban dalam laporan keuangan Bank pada periode ketika pembagian laba tersebut disetujui.

w. Pendapatan dan Beban

Pendapatan operasional adalah semua pendapatan yang berasal dari kegiatan utama BPR. Pendapatan operasional terdiri dari pendapatan bunga dan pendapatan operasional lainnya.

Pendapatan Bunga adalah pendapatan yang diperoleh dari penanaman dana BPR pada aset produktif. Pendapatan bunga meliputi pendapatan bunga kontraktual, amortisasi provisi dan pendapatan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, diskonto, dikurangi amortisasi biaya-biaya yang terkait langsung dengan penanaman dana Bank pada aset produktif yang ditanggung oleh Bank (biaya transaksi). Amortisasi provisi dan pendapatan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu serta amortisasi biaya-biaya transaksi dilakukan dengan metode garis lurus sesuai dengan jangka waktu penanaman dana Bank dalam aset produktif.

Amortisasi provisi dan pendapatan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu serta amortisasi biaya transaksi dilakukan tanpa memperhatikan kualitas penanaman dana, apakah termasuk kategori performing atau nonperforming.

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT CITRA MAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tgl 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Dalam hal biaya transaksi dibebankan kepada nasabah maka biaya tersebut tidak termasuk dalam biaya perolehan penanaman dana Bank pada aset produktif.

Beban bunga adalah beban yang dibayarkan kepada nasabah atau pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana dan penerimaan pinjaman. Beban bunga meliputi beban bunga kontraktual dan amortisasi biaya transaksi yang terkait secara langsung dengan penghimpunan dana.

Amortisasi biaya transaksi dilakukan dengan metode garis lurus sesuai dengan jangka waktu penghimpunan dana.

Pendapatan dan beban bunga kontraktual diakui berdasarkan metode akrual. Pendapatan bunga kontraktual atas aset produktif dihentikan pada saat aset produktif tersebut diklasifikasikan sebagai non-performing (kurang lancar, diragukan dan macet). Pendapatan bunga kontraktual dari aset produktif yang diklasifikasikan sebagai nonperforming dilaporkan sebagai tagihan kontinjensi dan diakui sebagai pendapatan pada saat pendapatan tersebut diterima (cash basis).

Seluruh penerimaan kas yang berhubungan dengan kredit non-performing yang digolongkan sebagai kurang lancar, diragukan dan macet diakui terlebih dahulu sebagai pengurang pokok kredit. Kelebihan penerimaan kas di atas pokok kredit diakui sebagai pendapatan bunga kontraktual dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.

Pendapatan bunga kontraktual dari kredit kategori performing yang telah diakui Bank sebagai pendapatan namun belum diterima secara kas dibukukan pada akun pendapatan bunga yang akan diterima.

Beban bunga kontraktual dari penghimpunan dana Bank yang telah diakui sebagai beban namun belum dibayarkan kepada nasabah maupun kreditur dibukukan pada akun utang bunga.

Pendapatan dan biaya operasional lainnya dicatat secara akrual yaitu saat timbulnya pendapatan dan beban yang bersangkutan.

Pendapatan dan beban non-operasional adalah semua pendapatan dan beban yang berasal dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama BPR.

x. Pajak Penghasilan Badan

Bank menghitung pajak penghasilan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) Bab 24 tentang "Pajak Penghasilan".

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Perubahan terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak (SKP) diterima atau, jika Bank mengajukan keberatan pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

5. PERPAJAKAN

Perumda Bank Perkreditan Rakyat Citra Mas telah terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Maros dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 02.556.868.4-809.000

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT CITRA MAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tgl 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

6. LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023

Laporan Keuangan Perumda Bank Perkreditan Rakyat Citra Mas tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Buntaran & Lisawati dengan pendapat —Wajar Dengan Pengecualian berdasarkan Laporan Auditor Independen Nomor: 00083/2.0915/AU.2/07/0892-1/1/1X1/2024 tanggal 11 November 2024.

Laporan tersebut disajikan kembali untuk tujuan komparatif.

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT CITRA MAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tgl 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

7. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini merupakan saldo Kas dan Setara Kas dengan rincian sebagai berikut :

	31 Des 2024	31 Des 2023
Kas	51.400.700	24.322.800
Jumlah Kas dan Setara Kas	51.400.700	24.322.800

Nilai Kas merupakan uang tunai yang ada di Kas Teller dan tersimpan di brankas, Nilai tersebut merupakan hasil opname kas per tanggal 31 Desember 2024 yang dilakukan oleh manajemen bank.

8. PENEMPATAN PADA BANK LAIN

Akun ini merupakan penempatan dana BPR dalam bentuk giro dan tabungan di Bank umum dan BPR sebagai berikut:

	31 Des 2024	31 Des 2023
Tabungan :		
Bank Alinma	1.836.112	249.997.100
Bank Mandiri a/c No. 152-00-8880444-4	-	465.301
Bank BRI 022301007989530	28.052.323	26.073.977
Bank Banten Ac No. 7001000246	7.454.353	-
Bank Banten Ac No. 7001000424	21.044.168	-
BPR Hasamitra	340.538	16.364.061
Giro :		
Bank Sulselbar a/c No. 011-004-000000001-6	11.966.940	995.738.908
Bank BRI a/c No. 00000223-01-000573-30-4	-	52.708.294
Bank Bukopin Ac No. 100488-0-08-7	5.779.300	8.413.129
Bank Bukopin Ac No. 100444-1-08-3	648.978.425	685.387.268
Bank CIMB Niaga a/c No. 800041171600	267.845.238	274.042.374
Deposito :		
Bank Alinma	1.000.000.000	1.000.000.000
Bank Sulselbar	-	2.000.000.000
Bank Banten	500.000.000	-
Jumlah Penempatan Pada Bank Lain	2.493.297.396	5.309.190.412
(-) Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	-	(4.978.695)
Jumlah Penempatan Pada Bank Lain - Netto	2.493.297.396	5.304.211.717

Deposito sebesar Rp500.000.000 yang ditempatkan pada Bank Banten dijadikan agunan atas fasilitas kredit yang diperoleh dari Bank Banten berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 001/F/700/RK7/07/24 tertanggal 31 Juli 2024 (Catatan 15).

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT CITRA MAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tgl 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Berdasarkan perjanjian tersebut, deposito tersebut diblokir dan tidak dapat digunakan oleh Perusahaan hingga jangka waktu berakhirnya kredit, yaitu pada tanggal 31 Juli 2025

9. KREDIT YANG DIBERIKAN

Akun ini merupakan baki debit dari kredit yang diberikan kepada Nasabah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

	31 Des 2024	31 Des 2023
a. Berdasarkan Jenis Kredit :		
<i>Modal Kerja</i>	1.970.284.037	1.467.106.549
<i>Konsumsi</i>	3.703.586.696	3.206.459.096
Jumlah Kredit Yang Diberikan Bruto	5.673.870.733	4.673.565.645
<i>(-) Provisi Kredit</i>	(21.148.898)	(15.137.030)
<i>(-) PPAP</i>	(1.231.570.786)	(247.476.829)
Jumlah Kredit Yang Diberikan Netto	4.421.151.049	4.410.951.786
b. Berdasarkan Kualitas Kredit :		
<i>Lancar</i>	2.936.294.950	2.872.729.283
<i>Dalam Perhatian Khusus</i>	1.044.285.556	710.117.974
<i>Kurang Lancar</i>	172.435.779	218.833.069
<i>Diragukan</i>	705.074.564	442.057.562
<i>Macet</i>	815.779.884	429.827.757
Jumlah Kredit Yang Diberikan Bruto	5.673.870.733	4.673.565.645
<i>(-) Provisi Kredit</i>	(21.148.898)	(15.137.030)
<i>(-) PPAP</i>	(1.231.570.786)	(247.476.829)
Jumlah Kredit Yang Diberikan Netto	4.421.151.049	4.410.951.786
c. Berdasarkan Hubungan dengan pihak terkait dan tidak terkait :		
<i>Pihak Terkait</i>	464.916.659	227.812.500
<i>Pihak Tidak Terkait</i>	5.208.954.074	4.445.753.145
Jumlah Kredit Yang Diberikan Bruto	5.673.870.733	4.673.565.645
<i>(-) Provisi Kredit</i>	(21.148.898)	(15.137.030)
<i>(-) PPAP</i>	(1.231.570.786)	(247.476.829)
Jumlah Kredit Yang Diberikan Netto	4.421.151.049	4.410.951.786

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT CITRA MAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tgl 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

d. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Kredit (PPAP)

Akun ini merupakan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif kredit yang diberikan per 31 Desember 2024 dan 2023.

	Jumlah Rek.	Jumlah
Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Kredit :		
<i>Lancar</i>	53	14.681.472
<i>Dalam Perhatian Khusus</i>	19	31.328.568
<i>Kurang Lancar</i>	6	17.243.579
<i>Diragukan</i>	9	352.537.283
<i>Macet</i>	12	815.779.884
Jumlah	99	1.231.570.786

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian yang dibentuk per 31 Desember 2024 telah memadai untuk menutupi potensi kerugian atas kredit yang tidak tertagih dan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

10. ASET TETAP

Merupakan saldo Jumlah Nilai Buku Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut :

2024				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Nilai Perolehan				
<i>Kendaraan</i>	496.704.140		154.000.000	342.704.140
<i>Inventaris</i>	293.029.000	2.000.000	-	295.029.000
Jumlah Nilai Perolehan	789.733.140	2.000.000	154.000.000	637.733.140
Akumulasi Penyusutan				
<i>Ak. Penyusutan Kendaraan</i>	252.428.994	39.084.000	154.000.000	137.512.994
<i>Ak. Penyusutan Inventaris</i>	255.808.111	15.630.243		271.438.354
Jumlah Ak. Penyusutan	508.237.104	54.714.243	-	408.951.347
Nilai Buku Bersih	281.496.036			228.781.793
2023				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Nilai Perolehan				
<i>Kendaraan</i>	496.704.140	-	-	496.704.140
<i>Inventaris</i>	287.829.000	5.200.000	-	293.029.000
Jumlah Nilai Perolehan	784.533.140	5.200.000	-	789.733.140
Akumulasi Penyusutan				
<i>Ak. Penyusutan Kendaraan</i>	223.115.993	29.313.001	-	252.428.994
<i>Ak. Penyusutan Inventaris</i>	243.357.124	12.450.987	-	255.808.111
Jumlah Ak. Penyusutan	466.473.116	41.763.988	-	508.237.104
Nilai Buku Bersih	318.060.024			281.496.036

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT CITRA MAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tgl 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

11. ASET TIDAK BERWUJUD

Aset tidak berwujud merupakan software yang digunakan untuk kegiatan operasional Bank.

	31 Des 2024	31 Des 2023
<i>Nilai Perolehan</i>	290.500.000	180.500.000
<i>(-) Amortisasi</i>	(159.666.674)	(112.104.171)
Jumlah Aset Tidak Berwujud	130.833.326	68.395.829

12. ASET LAIN-LAIN

Akun ini merupakan saldo Aset Lain-Lain dengan rincian sebagai berikut :

	31 Des 2024	31 Des 2023
<i>Persediaan Meterai & Barang cetakan</i>	-	161.043.905
<i>Pendapatan Bunga Kredit</i>	108.300.135	-
<i>Biaya dibayar dimuka</i>	-	-
<i>Persediaan Buku / Bilyet Deposito</i>	7.009.970	-
<i>Lainnya</i>	8.721.132	-
Jumlah Aset Lain-Lain	124.031.237	161.043.905

13. KEWAJIBAN SEGERA

Akun ini merupakan saldo Kewajiban Segera dengan rincian sebagai berikut :

	31 Des 2024	31 Des 2023
<i>PPh 23 Deposito</i>	141.489	-
<i>PPh 23 Tabungan</i>	1.722.137	-
<i>Titipan Bank Bukopin (Kredit Channeling)</i>	3.250.224.550	3.000.000.000
<i>Titipan Kendaraan Operasional</i>	40.150.140	80.154.788
<i>Titipan Notaris</i>	23.590.000	-
<i>PPh 21</i>	2.582.875	-
Jumlah Kewajiban Segera	3.318.411.191	3.080.154.788

Pada tanggal 28 Maret 2013, Perumda Bank Perkreditan Rakyat Citra Mas menandatangani Perjanjian Kerja Sama Penerusan Pinjaman (Channeling) dengan PT Bank KB Bukopin Tbk, sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris No. 1665 tanggal 28 Maret 2013 yang dibuat dihadapan notaris Yenni Saleh, S.H., M.Kn. Notaris di Makassar.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Bank Bukopin bertindak sebagai pemberi dana, sedangkan BPR bertindak sebagai mitra pembiayaan dalam menyalurkan pembiayaan kepada debitur akhir, dengan ketentuan BPR tetap berkewajiban untuk mengadimnistrasikan kewajiban pembayaran Debitur, melakukan penagihan, dan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Bukopin.

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT CITRA MAS**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN****Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tgl 31 Desember 2024 dan 2023**

(Disajikan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Saldo Titipan Bank Bukopin (Kredit Channeling) sebesar Rp3.250.224.550 merupakan akumulasi kewajiban BPR kepada Bank Bukopin yang berasal dari pembayaran pinjaman oleh debitur kepada BPR. Namun, dalam pelaksanaannya, pembayaran yang dilakukan oleh BPR kepada Bank Bukopin tidak seluruhnya dilakukan secara akurat, baik dari sisi nominal maupun identitas debitur yang bersangkutan, dan saldo tersebut merupakan akumulasi dari transaksi yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

Sampai dengan tanggal laporan, Manajemen BPR masih dalam proses melengkapi dokumen pendukung dan melakukan verifikasi tambahan untuk menyusun penyesuaian yang diperlukan atas saldo kewajiban tersebut.

14. SIMPANAN

Akun ini merupakan saldo Simpanan dengan rincian sebagai berikut :

	31 Des 2024	31 Des 2023
a. Tabungan		
Berdasarkan Jenis Tabungan :		
<i>Tabungan Citra Mas</i>	742.613.743	988.289.022
<i>Tabungan Pendidikan</i>	66.983.482	40.966.750
Jumlah	809.597.225	1.029.255.772
Berdasarkan Hubungan dengan pihak terkait dan tidak terkait :		
<i>Pihak Terkait</i>	635.386	164.100
<i>Pihak Tidak Terkait</i>	808.961.839	1.029.091.672
Jumlah	809.597.225	1.029.255.772
b. Deposito		
Berdasarkan Jangka waktu :		
<i>Deposito Berjangka Nasabah 1 bulan</i>	1.292.000.000	798.000.000
<i>Deposito Berjangka Nasabah 2 bulan</i>	-	10.000.000
<i>Deposito Berjangka Nasabah 3 bulan</i>	-	(10.000.000)
<i>Deposito Berjangka Nasabah 4 bulan</i>	-	1.500.000.000
Jumlah	1.292.000.000	2.298.000.000
Berdasarkan Hubungan dengan pihak terkait dan tidak terkait :		
<i>Pihak Terkait</i>	-	-
<i>Pihak Tidak Terkait</i>	1.292.000.000	2.298.000.000
Jumlah	1.292.000.000	2.298.000.000
Jumlah Simpanan	2.101.597.225	3.327.255.772

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT CITRA MAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tgl 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

15. PINJAMAN YANG DITERIMA

Akun ini merupakan saldo Pinjaman Yang Diterima dengan rincian sebagai berikut :

	31 Des 2024	31 Des 2023
<i>Bank CIMB Niaga No. Rek : 132.01.00180.00.6</i>	<i>205.045.519</i>	<i>1.233.333.349</i>
<i>Bank Banten</i>	<i>500.000.000</i>	<i>-</i>
Jumlah Pinjaman Yang Diterima - Bruto	705.045.519	1.233.333.349
(-) Provisi dan Adm Pinjaman Bank	(99.235.207)	(99.235.207)
Jumlah Pinjaman Yang Diterima - Netto	605.810.312	1.134.098.142

PT. Bank CIMB Niaga, Tbk.

- No. Pinjaman : 164/ML4/SLW/16
- Tanggal : 18 Agustus 2016
- Jenis Fasilitas : Pinjaman Transaksi Khusus 4 (PTK 4) Executing - On Liquidation
- Jangka Waktu : 60 Bulan
- Suku Bunga : 13%
- Plafond : Rp 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah)
- Jaminan : Fidusia atas tagihan BPR ke end user yang berstatus Kolektabilitas 1 (satu) Sebesar Plafond, diikat secara notariil dan didaftarkan pada lembaga Fidusia. Asuransi Penjaminan kredit atau asuransi jiwa kredit yang merupakan *Approved Insurance* di Bank CIMB Niaga (*Banker's Clause* Bank CIMB Niaga) dengan *coverage* minimal 75% dari jumlah *outstanding*.

Bank Pembangunan Daerah Banten

- No. Pinjaman : 001/F/700/RK7/07/24
- Tanggal : 31 Juli 2024
- Jenis Fasilitas : Cashcollateral BPR Pinjaman Tetap Jawara
- Jangka Waktu : 12 Bulan (31 Juli 2024 s.d. 31 Juli 2025)
- Suku Bunga : 3,25%
- Plafond : Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- Jaminan : Agunan berupa bilyet deposito atas nama Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Citra Mas nominal sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang dilakukan pemblokiran dengan jangka waktu sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan fasilitas kredit lunas.

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT CITRA MAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tgl 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

16. KEWAJIBAN LAIN-LAIN

Akun ini merupakan saldo Kewajiban Lain-Lain dengan rincian sebagai berikut :

	31 Des 2024	31 Des 2023
<i>Kewajiban Lainnya</i>	<i>6.254.584</i>	<i>11.451.666</i>
Jumlah Kewajiban Lain-Lain	6.254.584	11.451.666

17. MODAL

Akun ini merupakan saldo Modal dengan rincian sebagai berikut :

	31 Des 2024	31 Des 2023
Pemegang Saham :		
<i>Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene</i>	<i>9.125.000.000</i>	<i>9.125.000.000</i>
<i>dan Kepulauan</i>		
Jumlah Modal	9.125.000.000	9.125.000.000

18. SALDO LABA/(RUGI)

Akun ini merupakan Saldo Laba dengan rincian sebagai berikut :

	31 Des 2024	31 Des 2023
<i>Cadangan Umum</i>	<i>1.201.416.223</i>	<i>1.201.416.223</i>
<i>Cadangan Tujuan</i>	<i>1.525.794.525</i>	<i>1.525.794.525</i>
<i>Belum Ditentukan Tujuannya</i>	<i>(9.154.749.043)</i>	<i>(6.848.284.950)</i>
<i>Koreksi Saldo Laba</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Laba (Rugi) Tahun Berjalan</i>	<i>(1.280.039.516)</i>	<i>(2.306.464.093)</i>
Jumlah Saldo Laba	(7.707.577.811)	(6.427.538.295)

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT CITRA MAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tgl 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

19. PENDAPATAN OPERASIONAL

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Operasional selama tahun berjalan dengan rincian sebagai berikut :

	2024	2023
Pendapatan Bunga :		
Bunga dari Kredit yang diberikan (Kontraktual) :		
<i>Pendapatan Bunga Kredit</i>	554.954.210	550.576.779
Jumlah Pendapatan Bunga Kredit	554.954.210	550.576.779
Bunga dari Penempatan Pada Bank Lain :		
<i>Pendapatan Bunga Giro</i>	8.016.519	28.453.912
<i>Pendapatan Bunga Tabungan</i>	4.726.221	3.615.024
<i>Pendapatan Bunga Deposito</i>	84.092.120	115.019.097
Jumlah Pendapatan Bunga dari Penempatan Pada Bank Lain	96.834.860	147.088.033
Pendapatan Provisi dan Administrasi :		
<i>Provisi Kredit</i>	10.440.632	25.629.112
<i>Administrasi Kredit Modal Kerja</i>	-	31.053.767
Jumlah Pendapatan Bunga Kredit	10.440.632	56.682.879
Jumlah Pendapatan Bunga	662.229.703	754.347.691

20. BEBAN BUNGA

Jumlah tersebut merupakan Beban Bunga selama tahun berjalan dengan rincian sebagai berikut :

	2024	2023
Beban Bunga Kontraktual		
<i>Bunga Tabungan</i>	8.136.294	15.508.947
<i>Bunga Deposito</i>	51.519.577	102.337.157
<i>Bunga Pinjaman Pihak Ketiga bukan Bank</i>	-	125.000.001
<i>Bunga Pinjaman yang diterima dari Bank Lain</i>	86.533.308	226.632.435
<i>Transaksi Kepada Bank Lain</i>	-	13.862.085
Premi Penjaminan		
<i>Fee Penjamin LPS</i>	1.713.728	4.833.335
Jumlah Beban Bunga	147.902.907	488.173.960

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT CITRA MAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tgl 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

21. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Operasional Lainnya selama tahun berjalan dengan rincian sebagai berikut :

	2024	2023
<i>Pemulihan PPAP</i>	501.391.115	988.933.082
<i>Pendapatan Administrasi simpanan Tabungan/Deposito</i>	55.499.261	20.876.459
<i>Penerimaan Kredit yang Dihapus Buku</i>	291.808.515	316.122.807
<i>Pendapatan Chanelling (Bank Bukopin)</i>	341.971.959	411.473.997
<i>Pendapatan Keuntungan Penjualan Aset Tetap</i>	20.000.000	-
<i>Pendapatan Operasional Lainnya</i>	1.748.000	944.000
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	1.212.418.850	1.738.350.345

22. BEBAN OPERASIONAL

Jumlah merupakan Beban Operasional selama tahun berjalan dengan rincian sebagai berikut :

	2024	2023
a. Beban Penyisihan Penghapusan		
<i>Beban penyisihan penghapusan aset produktif</i>	1.479.243.386	2.519.660.183
Jumlah	1.479.243.386	2.519.660.183
b. Beban Penyusutan & Amortisasi		
<i>Beban Penyusutan Kendaraan</i>	39.084.000	12.450.988
<i>Beban Penyusutan Inventaris</i>	15.630.243	29.313.000
<i>Beban amortisasi-Beban Dibayar Di Muka (Program)</i>	118.808.395	25.500.006
Jumlah	173.522.638	67.263.994
c. Beban Pemasaran		
<i>Beban Iklan dan Promosi</i>	2.500.000	6.759.000
Jumlah	2.500.000	6.759.000
d. Beban Administrasi dan Umum		
<i>Gaji/upah/Tunjangan</i>	793.562.017	1.064.944.596
<i>Tunjangan Hari raya</i>	108.235.479	127.696.650
<i>Seminar dan Kursus , pelatihan</i>	38.440.000	37.892.104
<i>Asuransi</i>	-	2.140.000

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT CITRA MAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tgl 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

<i>Beban Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)</i>	-	9.169.054
<i>Premi Asuransi Kesehatan (BPJS)</i>	108.260.130	127.682.632
<i>Pemeliharaan Inventaris Kantor</i>	26.795.000	55.609.850
<i>Pemeliharaan Kendaraan Dinas</i>	10.569.065	7.030.000
<i>Makan/minum rapat</i>	112.000	5.537.835
<i>Listrik, telpon dan fax</i>	25.606.296	8.022.560
<i>Cetakan dan ATK</i>	3.000.800	6.145.000
<i>Rumah Tangga Kantor</i>	9.264.550	6.858.700
<i>BBM</i>	37.770.000	42.100.000
<i>Perjalanan Dinas</i>	53.505.928	30.920.498
<i>Jasa & Honorium Pihak ketiga</i>	18.289.270	6.052.305
<i>Pajak Kendaraan Kantor</i>	5.513.000	5.620.000
<i>Pajak PPh 21</i>	9.894.537	9.026.760
Jumlah	1.248.818.072	1.552.448.544
Jumlah Beban Operasional	2.904.084.096	4.146.131.721

23. PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Dan Beban Non Operasional Selama Tahun Berjalan Dengan Rincian Sebagai Berikut :

a. Pendapatan Non Operasional

	2024	2023
<i>Pendapatan Selesih Kas</i>	-	7.154
<i>Pendapatan fee Notaris</i>	5.436.000	1.692.000
<i>Pendapatn Fee Asuransi dan BUMIDA</i>	4.954.771	1.578.999
Jumlah	10.390.771	3.278.153

b. Beban non Operasional

<i>Administrasi Bank</i>	3.265.047	4.053.812
<i>Iuran dan Denda OJK</i>	42.703.600	5.050.000
<i>Denda</i>	-	8.439.957
<i>Sumbangan</i>	16.710.000	8.982.500
<i>Lainnya</i>	50.413.190	141.608.332
Jumlah	113.091.837	168.134.601
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional	(102.701.066)	(164.856.448)

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT CITRA MAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tgl 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

24. KELANGSUNGAN USAHA

Pada tahun 2024, BPR mencatatkan rugi bersih sebesar Rp1.280.039.516, lebih rendah dibandingkan rugi bersih tahun 2023 sebesar Rp2.306.464.093. Meskipun demikian, per 31 Desember 2024 BPR masih membukukan saldo laba negatif sebesar Rp7.707.577.811, dengan modal disetor sebesar Rp9.125.000.000.

Kualitas aset kredit BPR juga menunjukkan tren penurunan, tercermin dari rasio kredit bermasalah (NPL) yang meningkat menjadi 29,84% pada tahun 2024 dibandingkan 23,33% pada tahun 2023. Peningkatan NPL ini berkontribusi terhadap kenaikan penyisihan kerugian penurunan nilai kredit dari Rp247.476.829 pada tahun 2023 menjadi Rp1.231.570.786 pada tahun 2024.

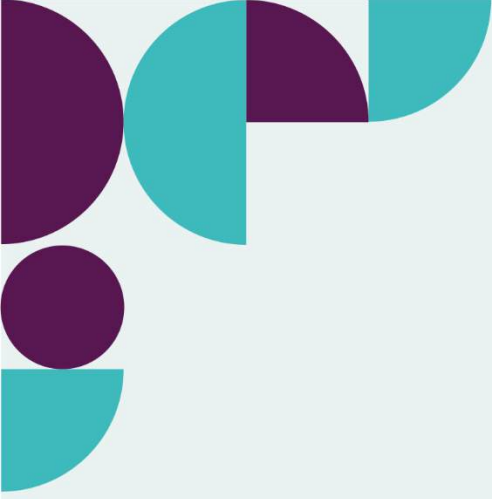
Kondisi keuangan dan kualitas aset tersebut menimbulkan ketidakpastian material yang dapat mempengaruhi kemampuan BPR untuk mempertahankan kelangsungan usaha.

Laporan keuangan ini tetap disusun dengan menggunakan asumsi kelangsungan usaha, dengan mempertimbangkan langkah-langkah yang sedang diambil oleh manajemen untuk memperbaiki kinerja keuangan, meningkatkan kualitas aset kredit, serta memperkuat struktur permodalan BPR.

25. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen perusahaan bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan Perumda Bank Perkreditan Rakyat Citra Mas tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan telah menyetujui penerbitan laporan auditor independen pada tanggal 6 Mei 2025.

=====



Laporan Auditor Independen





LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No: 00099/2.1418/AU.2/07/1533-1/1/V/2025

Kepada Yth.

**Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Direksi Perumda Bank Perkreditan Rakyat Citra Mas
Di Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan.**

Laporan Audit Atas Laporan Keuangan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan **Perumda Bank Perkreditan Rakyat Citra Mas** terlampir, yang terdiri dari neraca per tanggal 31 Desember 2024 serta Laporan laba(rugi), laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf Basis untuk Opini Wajar dengan Pengecualian pada laporan kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material Posisi Keuangan **Perumda Bank Perkreditan Rakyat Citra Mas** tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (PA BPR) yang berlaku di Indonesia.

Basis Opini Wajar dengan Pengecualian

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 13 atas laporan keuangan, saldo kewajiban segera Uang Titipan (*Kredit Channeling*) per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.250.224.550 merupakan akumulasi kewajiban BPR kepada Bank Bukopin yang berasal dari pembayaran pinjaman oleh debitur yang disalurkan melalui skema kerja sama channeling. Namun, kami tidak memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat atas rincian dan validitas saldo tersebut. Oleh karena itu, kami tidak dapat meyakini kewajaran penyajian saldo kewajiban tersebut pada tanggal laporan keuangan.

Perusahaan belum menerapkan akuntansi imbalan pasca kerja sebagaimana yang diatur di dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) bab 23, dan kami tidak melakukan pemeriksaan khusus atas pajak-pajak perusahaan, sehingga kami tidak bertanggungjawab jika terjadi permasalahan perpajakan perusahaan dikemudian hari.

Hal Lain

Sebagaimana dijelaskan pada Catatan 24 atas laporan keuangan terlampir, yang menjelaskan bahwa BPR mencatatkan rugi bersih sebesar Rp 1.280.039.516 pada tahun 2024 dan masih membukukan saldo laba negatif sebesar Rp 7.707.577.822 per 31 Desember 2024. Selain itu, rasio kredit bermasalah (NPL) BPR meningkat menjadi 29,84% dari total kredit bruto, yang berdampak pada kenaikan signifikan penyisihan kerugian penurunan nilai. Kondisi-kondisi tersebut



menimbulkan ketidakpastian material yang dapat mempengaruhi kemampuan BPR untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Namun demikian, laporan keuangan ini disusun dengan asumsi kelangsungan usaha.

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini wajar dengan pengecualian kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (PA BPR) di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:



KANTOR AKUNTAN PUBLIK ASRI

Registered Public Accountants No. AP 1533

Menkeu RI No. 228/KM.1/2023

Our Services:

- General Audit • Review
- Agreed-Upon Procedures
- Accounting Service • Taxation
- Financial Statement Preparation

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kantor Akuntan Publik Asri

Asri, SE., Ak., CA., CPA., ASEAN CPA

Nomor Register Negara Akuntan : RNA 13372

Nomor Izin Akuntan Publik : AP.1533

6 Mei 2025





**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
JE'NE TAGARI
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan tahun 2023

BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN





Halaman

Laporan Auditor Independen

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Direksi

Laporan Keuangan - Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

Laporan Neraca.....	1
Laporan Laba Rugi	2
Laporan Perubahan Ekuitas	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan Atas Laporan Keuangan	5 - 16

Lampiran

- 1 Rincian Daftar Aset
- 2 Rincian Daftar Piutang dan Penyisihan
- 3 Rincian Daftar Persediaan

SURAT PERNYATAAN DIREKSI



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
JE'NE TAGARI



Jl. Sultan Hasanuddin No. 56 Telp. 0410 21196 Fax 323744
Email : pdampangkep9@gmail.com

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA JE'NE TAGARI
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ir. H. AKBAR
Alamat Kantor : Jl. Sultan Hasanuddin No. 56 Pangkajene 90611
Alamat Domisili : Jl. Matahari Perum Golkar No. 10
Jabatan : Direktur

Dalam kedudukannya tersebut di atas bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Je'ne Tagari Kab. Pangkajene dan Kepulauan menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Je'ne Tagari Kab. Pangkajene dan Kepulauan.
2. Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Je'ne Tagari Kab. Pangkajene dan Kepulauan tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas dan Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).
3.
 - a. Semua Informasi dalam Laporan Keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - b. Laporan Keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi dan fakta material; dan
 - c. Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan disimpan oleh Perumda Air Minum Tirta Je'ne Tagari Kab. Pangkajene dan Kepulauan sesuai ketentuan.
4. Kami bertanggungjawab atas Sistem Pengendalian Internal, pencegahan dan penanggulangan kecurangan serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan bagi perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pangkep, 04 Maret 2025



LAPORAN KEUANGAN



PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JE'NE TAGARI
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Neraca
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)



	Catatan	Tahun 2024	Tahun 2023
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	3	294,989,725.00	200,798,356.00
Piutang Usaha	4	14,588,602,000.00	13,922,897,500.00
Penyisihan Piutang Usaha	4	(9,353,404,136.00)	(8,752,519,638.00)
Piutang Lain-lain	5	454,600,416.00	483,005,416.00
Persediaan	6	67,546,889.00	88,800,782.00
Biaya Dibayar Dimuka		-	-
JUMLAH ASET LANCAR		6,052,334,894.00	5,942,982,416.00
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap	7	1,251,748,284.00	(9,976,204,063.00)
Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp2,108,590,104.00 dan Rp. 13.242.049.122,00 masing-masing tahun 2024 dan 2023			
Jumlah Aset Tetap	7	1,251,748,284.00	(9,976,204,063.00)
Aset Lainnya		651.00	11,330,856,417.00
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		1,251,748,935.00	1,354,652,354.00
JUMLAH ASET		7,304,083,829.00	7,297,634,770.00
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Hutang Usaha	8	96,900,253.00	96,900,253.00
Utang Pajak	12	133,882,325.00	150,993,832.00
Hutang Bank	13	8,853,964.00	8,853,964.00
Utang Pegawai	10	351,672,206.00	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		591,308,748.00	256,748,049.00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Hutang Lainnya	11	42,598,517.00	42,598,517.00
Hutang Pemda	11	311,776,755.00	311,776,755.00
Imbalan Kerja	14	1,797,826,047.00	1,288,069,744.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		2,152,201,319.00	1,642,445,016.00
JUMLAH KEWAJIBAN		2,743,510,067.00	1,899,193,065.00
EKUITAS			
Modal	15	24,038,741,850.00	24,038,741,850.00
Saldo Laba	16	(19,478,168,088.00)	(18,640,300,145.00)
JUMLAH EKUITAS		4,560,573,762.00	5,398,441,705.00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		7,304,083,829.00	7,297,634,770.00

Pangkep, 04 Maret 2025

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Je'ne Tagari
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan



Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan secara keseluruhan



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JE'NE TAGARI
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
LAPORAN LABA RUGI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)**



	Catatan	2024	2023
PENDAPATAN			
Pendapatan Usaha			
Pendapatan Air	15	8,517,372,000.00	8,674,593,700.00
Pendapatan Non Air	16	563,350,000.00	571,157,500.00
Jumlah		9,080,722,000.00	9,245,751,200.00
BEBAN USAHA			
Beban Pegawai	17	5,253,975,658.00	5,015,965,928.00
Beban Pemakaian Bahan Bakar	17	66,915,650.00	60,861,210.00
Beban Listrik	17	2,147,773,654.00	2,333,093,867.00
Beban Pemeliharaan	17	272,022,144.00	218,423,118.00
Beban Penyisihan dan penghapusan Piutang	17	600,884,498.00	645,583,682.00
Beban Penyusutan	17	197,396,749.00	202,009,087.00
Beban Operasional Lainnya	17	1,389,090,856.00	957,403,413.00
Jumlah Beban Usaha		9,928,059,209.00	9,433,340,305.00
LABA (RUGI) USAHA		- 847,337,209.00	- 187,589,105.00
Pendapatan (Beban) Lain-lain			
Pendapatan Lain-lain	20	9,469,266.00	12,028,076.00
Beban Non Operasional	20	-	-
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain		9,469,266.00	12,028,076.00
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		- 837,867,943.00	- 175,561,029.00
Estimasi PPh Badan		-	-
RUGI BERSIH SETELAH PAJAK		- 837,867,943.00	- 175,561,029.00

Pangkep, 04 Maret 2025

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Je'ne Tagari
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan



Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JE'NE TAGARI
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)



	Penyertaan Kabupaten Pangkep	Penyertaan Pemerintah Pusat	Modal Hibah	Laba/Rugi Ditahan	Laba / (Rugi) Tahun Berjalan	Ekuitas
Saldo 1 Januari 2023	21,440,865,850.00	1,630,426,000.00	967,450,000.00	- 18,464,739,116.00		5,574,002,734.00
Laba Rugi Tahun 2023					- 175,561,029.00	- 175,561,029.00
Saldo 31 Desember 2023	21,440,865,850.00	1,630,426,000.00	967,450,000.00	- 18,464,739,116.00	- 175,561,029.00	5,398,441,705.00
Koreksi Laba Imbalan Kerja						
Saldo 1 Januari 2024	21,440,865,850.00	1,630,426,000.00	967,450,000.00	- 18,640,300,145.00		5,398,441,705.00
Laba Rugi Tahun 2024					- 837,867,943.00	- 837,867,943.00
Saldo 31 Desember 2024	21,440,865,850.00	1,630,426,000.00	967,450,000.00	- 18,640,300,145.00	- 837,867,943.00	4,560,573,762.00

Pangkep, 04 Maret 2025
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Je'ne Tagari
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan



Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JE'NE TAGARI
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)**



	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Laba (Rugi) Bersih	- 837,867,943.00	- 175,561,029.00
Penyesuaian :		
Beban Penyusutan	197,396,749.00	202,009,087.00
Beban Penyisihan Piutang	600,884,498.00	645,583,682.00
Arus Kas Sebelum Perubahan Modal Kerja	- 39,586,696.00	672,031,740.00
(Kenaikan) / Penurunan :		
Deposito		150,000,000.00
Piutang Usaha	- 665,704,500.00	- 898,046,800.00
Piutang Lain-lain	28,405,000.00	18,525,000.00
Persediaan	21,253,893.00	- 23,245,267.00
Uang Muka		
Jumlah	- 616,045,607.00	- 752,767,067.00
Kenaikan / (Penurunan)		
Utang pajak	- 17,111,507.00	- 107,852,760.00
Utang lainnya	509,756,303.00	230,510,072.00
Utang Bunga	351,672,206.00	
Jumlah	844,317,002.00	122,657,312.00
Kas Bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	188,684,699.00	41,921,985.00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
(Penambahan)/Penurunan Aset Tetap	- 94,493,330.00	- 178,916,000.00
(Penambahan)/Penurunan Aset Lain-lain		
Kas Bersih yang diperoleh dari aktivitas Investasi	- 94,493,330.00	- 178,916,000.00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Utang J. Pendek Lainnya	-	-
Modal Hibah	-	-
Kas Bersih Yang diperoleh Dari Aktivitas Pendapatan	-	-
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	94,191,369.00	- 136,994,015.00
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN 2023	200,798,356.00	337,792,371.00
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 2024	294,989,725.00	200,798,356.00

Pangkep, 04 Maret 2025

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Je'ne Tagari
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan



Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JE'NE TAGARI
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)



1. UMUM

A. Pendirian Perusahaan dan Informasi Umum

PDAM Kabupaten semula bernama badan pengelola air minum (BPAM) yang didirikan berdasarkan surat keputusan menteri pekerjaan umum cq. Direktorat jendral cipta karya nomor: 051/KPTS/CK/XII/1982 tanggal 30 april 1982 dan mulai beroperasi bulan agustus 1982. PDAM kabupaten pangkep dibentuk berdasarkan peraturan daerah kabupaten pangkep nomor: 6 tahun 1987, Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 8 tahun 2023 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta je'ne Tagari, penyerahan pengelolaan BPAM kepada PDAM dilaksanakan berdasarkan surat keputusan menteri pekerjaan umum nomor: 667/KPTS/1991 tanggal 2 desember 1991, sedangkan penyerahan pengelolaan dari pemerintah provinsi sulawesi selatan kepada pemerintah kabupaten pangkep dilakukan dengan berita acara nomor: 690/6662/SET tanggal 19 desember 1991.

B. Kegiatan Usaha

PDAM Kabupaten Pangkep dibentuk dengan tugas dan tujuan sebagai berikut:

1. Melaksanakan Kegiatan-kegiatan dalam rangka pengolahan/pengawasan sarana penyediaan air minum sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat kota Pangkep dan sekitarnya dalam hal penyediaan air minum yang sehat
3. Sebagai Badan Usaha yang akan dikembangkan lebih lanjut menjadi salah satu usaha Negara Negara sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku

C. Susunan Pengurus Perusahaan

Direktur PDAM Kabupaten Pangkep diangkat Surat Keputusan Bupati Pangkep No.219 tahun 2021 tanggal 9 maret 2021 dan kepala bagian keuangan diangkat dengan SK. Direktur PDAM pangkep nomor : 03/SK/PDAM/I/2019 tanggal 11 januari 2019 dan kepala bagian teknik diangkat dengan SK. Direktur PDAM pangkep nomor : 74/SK/PDAM/X/2023 Tanggal, 11 Oktober 2023 dengan susunan sebagai berikut :

Direktur	: Ir.Akbar
kepala bagian Adm, keuangan & umum	: Muh. Ali Siri, SE
Kepala bagian teknik	: Latasu

Susunan badan pengawas PDAM kabupaten pangkep ditetapkan dengan surat keputusan bupati pangkep nomor: 220 tahun 2021 tanggal 9 maret 2021 dengan susunan sebagai berikut:

ketua merangkap anggota	: Sulfida, S.Sos, M.Si
sekretaris merangkap anggota	: Drs. A. Yathrib Pare
Anggota	: Ir. Dirham Hijaz

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Kebijakan laporan keuangan

laporan keuangan disusun dengan menggunakan prinsip dan praktek akuntansi yang belum berlaku umum. Perusahaan menetapkan SAK-ETAP sebagai basis penyusunan laporan keuangan dan penentuan kebijakan akuntansi penting yang diterapkan untuk mengakui dan mengukur transaksi dan peristiwa yang relevan dengan perusahaan.



PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JE'NE TAGARI
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)



2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

a. Kebijakan laporan keuangan

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat likuid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan. Cerukan bank pada umumnya termasuk aktivitas pendanaan sejenis dengan pinjaman. Namun, jika cerukan bank dapat ditarik sewaktu-waktu dan merupakan bagian yang tak terpisah dari pengelolaan kas entitas, maka cerukan tersebut termasuk komponen kas dan setara kas.

Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung

b. Kas dan Setara Kas

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri atas kas, bank, dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijadikan serta dibatasi penggunaannya

c. Piutang Usaha

Piutang Usaha disajikan sebesar jumlah neto setelah dikurangi penurunan nilai yang dibentuk sebesar estimasi penyisihan piutang tak tertagih. Penurunan nilai ditentukan dengan memperhatikan antara nilai pengalaman, prospek usaha, dan industri, kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas, kemampuan membayar debitur dan agunan yang dikuasai. Piutang usaha disajikan menurut pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan piutang pihak ketiga.

Piutang adalah hak PDAM yang timbul dari transaksi penjualan air dan atau penjualan non air dan lainnya yang akan diterima pembayarannya pada masa yang akan datang. Piutang usaha atas:

- Piutang usaha yaitu Piutang yang timbul dari transaksi penjualan air dan non air
- Piutang non usaha yaitu Piutang yang timbul dari transaksi lainnya.

Pangukuran Awal

- Piutang Usaha
Piutang Usaha penjualan air dicatat sebagai tagihan pemakaian air kepada pelanggan yang tertera dalam DRD air. Sedangkan piutang usaha penjualan non air dicatat sebagai tagihan non air
- Piutang Non Usaha
Piutang non usaha dicatat sebesar nilai wajar yang dapat direalisasi.

Penyisihan Piutang

Piutang disajikan dengan nilai wajar yang dapat direalisasikan. Berdasarkan pengalaman dan data historis selama tiga tahun terakhir, perusahaan menetapkan estimasi kerugian piutang tak tertagih sebagai berikut :

a. Kelompok Sosial	: 31%
b. Kelompok Rumah Tangga	: 69%
c. Kelompok Instansi Pemerintah	: 42%
d. Kelompok Niaga Kecil	: 25%
e. Kelompok Niaga Besar	: 9%
f. Industri	: -%



PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JE'NE TAGARI
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)



2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

d. Persediaan

Persediaan disajikan dengan nilai mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan harga jual dikurangi biaya untuk menjual. Pembebanan atas pemakaian persediaan dicatat dengan menggunakan metode First In First Out (FIFO). Pencatatan persediaan bahan instalasi dan persediaan suku cadang (pipa, water meter dan bahan instalasi lainnya) dilakukan dengan perpetual inventory method,

sedangkan persediaan bahan operasi lainnya (bahan kimia dan bahan bakar) dilakukan dengan fisik inventory method.

Atas persediaan yang telah rusak atau tidak digunakan lagi perusahaan menghitung penurunan nilai persediaan dengan metode market sales comparison approach.

e. Pengakuan Sebagai Beban atau Pengeluaran Barang Modal

Pengeluaran untuk belanja modal ditetapkan berdasarkan pengeluaran yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dengan batasan nilai lebih dari Rp. 1.000.000,-. Pengeluaran untuk pemeliharaan rutin dicatat sebagai beban. Pengeluaran untuk perbaikan / penggantian komponen yang dimaksudkan untuk memperpanjang umur ekonomis, meningkatkan kapasitas, mutu atau meningkatkan standar kinerja dan nilainya melebihi nilai dalam tabel berikut dicatat sebagai penambah nilai aset induknya dan disusutkan mengikuti umur aset induknya.

Tabel batas pengeluaran perbaikan / penggantian

NO	Jenis Aset Tetap	Nilai Perbaikan / Penggantian
1	Bangunan	Rp 50,000,000.00
2	Pompa, Genset	Rp 10,000,000.00
3	Jaringan Pipa	Rp 25,000,000.00
4	AC, Komputer, dan Peralatan Elektronik	Rp 2,500,000.00
5	Kendaraan roda 4 keatas	Rp 25,000,000.00

f. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang:

- Dimiliki atau digunakan dalam proses produksi dan distribusi air atau tujuan administrasi.
- Diharapkan atau digunakan lebih dari satu periode / tahun buku.

Tanah dan bangunan adalah aset yang dipisahkan dan harus dicatat secara terpisah, meskipun tanah dan bangunan tersebut diperoleh secara bersamaan.

Pengukuran Awal

- Harga beli, termasuk biaya hukum dan broker, bea import dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan, setelah dikurangi diskon dan potongan lainnya.
- Biaya-biaya yang dapat dibebankan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi siap digunakan sesuai dengan peruntukannya. Biaya ini termasuk penyiapan tanah (seperti instalasi dan pengolahan air), biaya penanganan dan penyerahan awal, biaya instalasi dan perakitan, dan biaya pengujian fungsionalitas.



PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JE'NE TAGARI
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)



2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

f. Aset Tetap (Lanjutan)

Pengukuran Biaya Perolehan

Biaya perolehan aset tetap adalah setara harga tunai pada tanggal pengakuan. Jika pembayaran ditangguhkan lebih dari waktu kredit normal, maka biaya perolehan adalah nilai tunai atas semua pembayaran masa yang akan datang.

Pengukuran Setelah Pengukuran Awal

- PDAM mengukur seluruh aset tetap (termasuk aset yang tidak produktif) setelah pengakuan awal sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.
- Aset tetap dalam penyelesaian harus dilaporkan terpisah dari aset tetap yang beroperasi dan belum dapat disusutkan sampai aset tetap tersebut dinyatakan beroperasi kembali.

Penyusutan

Penyusutan dimulai ketika aset telah digunakan dan berakhir ketika aset dihentikan pengakuannya. Penyusutan tidak dihentikan ketika aset tidak digunakan atau dihentikan penggunaan aktifnya (aset tidak produktif), kecuali aset tersebut telah disusutkan secara penuh. beban penyusutan harus diakui dalam laporan laba rugi perusahaan.

Kelompok Aset	Tarif	Masa Manfaat	Metode
Golongan Non Bangunan			
Kelompok 1 <i>Peralatan bengkel kantor, kendaraan Roda 4, dsb</i>	50%	4 Tahun	Saldo Menurun
Kelompok 2 <i>Genset, AC, Peralatan Kantor, Kendaraan Roda 4, dsb</i>	25%	8 Tahun	
Kelompok 3 <i>Pompa Air, Water Meter, Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi, Jembatan Pipa</i>	12%	16 Tahun	
Golongan Bangunan			
<i>Permanan</i>	5%	20 Tahun	Garis Lurus
<i>Non Permanen</i>	10%	10 Tahun	

Pada tiap tanggal pelaporan terhadap aset tetap dilakukan penilaian kemungkinan terjadi penurunan nilai aset. Aset tetap mengalami penurunan nilai diestimasi sesuai dengan nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual aset tersebut. Penilaian aset bisa secara individu, tetapi dalam kondisi tertentu harus diestimasi sesuai kelompok aset.

g. Pencatatan Uang / Kewajiban

Kewajiban jangka pendek dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya. Kewajiban jangka panjang diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang jatuh tempo lebih dari satu tahun dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. Kewajiban bunga atas kewajiban jangka panjang yang timbul selama masa tenggang yang tidak akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun mendatang dicatat dalam perkiraan "Kewajiban Bunga Masa Tenggang". Kewajiban jangka panjang dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya. Kewajiban jangka panjang dicatat berdasarkan realisasi penarikan dana ditambah dengan bunga masa tenggang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun mendatang.



PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JE'NE TAGARI
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)



2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

h. Kewajiban Diestimasi

Kewajiban Diestimasi diakui di dalam neraca sebagai beban didalam laporan laba rugi, apabila kemungkinan terjadi perusahaan yang diisyaratkan untuk mentransfer manfaat ekonomi pada masa yang akan datang dengan jumlah kewajiban yang dapat diestimasi secara handal. Termasuk dalam kewajiban estimasi adalah pembayaran pesangon, uang penghargaan, jasa pengabdian, uang kompensasi dan pembayaran lainnya yang diberikan kepada karyawan dan direksi pada saat yang bersangkutan berhenti atau berakhir masa jabatannya.

i. Kewajiban Kontijensi

Kewajiban Kontijensi merupakan kewajiban potensial yang belum pasti, perusahaan tidak mengakui kewajiban kontijensi sebagai kewajiban. Kewajiban kontijensi diungkapkan pada tanggal laporan uraian dan sifat kewajiban jika praktis dilakukan dan sifat kewajiban kontijensi sebagai berikut:

1. Estimasi dampak keuangan yang diukur seperti halnya kewajiban diestimasi.
2. Indikasi adanya ketidakpastian atas jumlah atau waktu dari pengeluaran;
3. Kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.
4. Jika tidak praktis membuat pengungkapan salah satu atau lebih pengungkapan di atas, maka harus diungkapkan alasannya.

j. Pengakuan Pendapatan

Pendapatan PDAM terdiri atas pendapatan operasional dan pendapatan non operasional

Pendapatan Operasional terdiri dari pendapatan air dan non air.

a. Pendapatan penjualan air terdiri dari harga air, administrasi rekening dan biaya pemeliharaan meter air, diakui, dicatat dan dilaporkan tiap-tiap bulan berdasarkan rekening air yang diterbitkan pada bulan yang bersangkutan, sedangkan untuk transaksi penjualan air tunai, seperti melalui mobil tangki diakui, dicatat dan dilaporkan pada saat penerimaan uang.

b. pendapatan sambungan baru dan pendapatan non air lainnya diakui dan di catat sebagai pendapatan tahun berjalan dengan ketentuan:

sambungan baru yang di bayar tunai, pendapatannya diakui pada saat pembayaran.

sambungan baru yang di bayar secara angsuran, pendapatannya diakui pada saat ditanda taganinya perjanjian sambungan baru.

Jumlah angsuran baru diakui sebagai piutang non air.

pendapatan non air lainnya seperti baik nama, ganti meter, buka kembali, dan denda diakui pada saat dilakukan pembayaran oleh pelanggan.

k. pengakuan beban

1. beban operasional

beban operasional adalah biaya yang dikeluarkan atas kegiatan yang lazim sebagai usaha. PDAM beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset peningkatan kewajiban telah terjadi dan nilainya dapat diukur secara andal.

2. beban non operasional

beban non operasional adalah semua biaya yang dikeluarkan atas kegiatan yang bukan usaha utama PDAM. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan nilainya dapat diukur secara andal.



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JE'NE TAGARI
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)



2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

- I. Penentuan harga jual air minum
penentuan harga jual air minum adalah sebagai berikut:
- harga jual air minum tanpa mobil tangki diklasifikasikan menjadi 3 kelompok yakni domestik, niaga dan sosial
 - harga jual air minum dengan mobil tangki diklasifikasikan menjadi 3 kelompok yakni domestik, niaga dan sosial serta disesuaikan dengan jarak tempuh.
- M Imbalan kerja
sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan No. 13/2003 ("UU 13/2003") sebagaimana diubah melalui undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja ("UU 11/2020"), perusahaan disyaratkan memberikan imbalan pensiun sekurang-kurangnya seperti imbalan pensiun yang diatur dalam UU 11/2020, yang pada dasarnya adalah program imbalan pasti. UU 11/2020 menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun. sebagaimana yang diatur pad bab 23 SAK-ETAP "IMBALAN KERJA" entitas harus mengakui biaya atas seluruh imbalan kerja yang menjadi hak pekerja akibat dari jasa yang diberikan kepada entitas selama periode pelaporan.



PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JE'NE TAGARI
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)



**INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS
PELAPORAN KEUANGAN**

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
3. KAS DAN SETARA KAS		
Kas	99,800,200.00	85,088,900.00
Kas Kecil	5,250,000.00	-
Bank		
BRI Cabang Pangkep	161,950,938.00	82,366,127.00
BPD Cabang Pangkep	24,591,158.00	32,201,616.00
BPR	3,397,429.00	1,141,713.00
Jumlah Kas dan Bank	294,989,725.00	200,798,356.00
Deposito		
Deposito Bank BPD	-	-
Jumlah Setara Kas	-	-
Jumlah Kas dan Setara Kas	294,989,725.00	200,798,356.00

Deposito baejangka waktu 3 bulan dengan tingkat suku bunga kontraktual dalam mata uang rupiah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 desember 2021 dan 2020 adalah 2,85% dan 4,25%.

4. PIUTANG USAHA

Perusahaan memiliki piutang usaha sebesar Rp 14.588.602.000,00 per 31 desember 2024 dan Rp 13.922.897.500,00 pada tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Piutang Langganan Air		13,922,897,500.00
Kantor Pusat	10,289,583,489.00	9,801,601,500.00
Unit IKK Bontoa	1,386,107,001.00	1,304,178,200.00
Unit IKK Marang	553,552,188.00	543,024,000.00
Unit IKK Segeri	1,178,160,162.00	1,149,636,500.00
Unit IKK Kabba	782,135,313.00	752,357,700.00
Unit IKK Padang Lampe	118,900,820.00	119,403,600.00
Unit IKK Mandale	280,163,027.00	252,696,000.00
Sub Jumlah Piutang Usaha	14,588,602,000.00	13,922,897,500.00
Penyisihan Piutang	- 9,353,404,136.00	- 8,752,519,638.00
Jumlah Piutang Usaha	5,235,197,864.00	4,654,302,276.00

Rincian Rekapitulasi piutang dan penyisihan dapat dilihat pada lampiran II

Perusahaan memiliki piutang usaha sebesar Rp14.588.602.000,00 pada tahun 2024. Manajemen perusahaan telah mengirimkan konfirmasi atas saldo piutang tersebut akan tetapi hingga laporan ini diterbitkan perusahaan hanya menerima beberapa balasan formfirmasi dan sebagian tidak dapat teridentifikasi dokumen pendukung atas saldo piutang usaha tersebut.

Manajemen melakukan pencadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha setelah melakukan penelaahan atas ketertagihan piutang usaha.

Berdasarkan penelaahan individual dan kolektif atas masing-masing piutang usaha pada akhir tahun, manajemen berpendapat bahwa penyisihan penurunan nilai tersebut cukup untuk menutupi risiko penurunan nilai piutang.

5. PIUTANG LAIN-LAIN

Perusahaan memiliki piutang lain-lain sebesar Rp 454.600.416,00 pada tahun 2024 dan Rp 483.005.416 ,00pada tahun 2023. Piutang lain-lain ini atas piutang milik direksi sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Piutang Direksi	121,836,138.00	121,836,138.00
Piutang Karyawan	287,766,600.00	316,171,600.00
Piutang PADM Tirta Sawitto Pinrang	44,997,678.00	44,997,678.00
Jumlah Piutang Lain-lain	454,600,416.00	483,005,416.00



PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JE'NE TAGARI
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)



6. PERSEDIAAN

Perusahaan memiliki persediaan sebesar Rp 67.546.889,00 pada tahun 2024 dan Rp 88.800.782,00 pada tahun 2023 Dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Persediaan Bahan Instalasi	65,446,889.00	85,750,782.00
Bahan Kimia (Kaporit dan Tawas)	2,100,000.00	3,050,000.00
Jumlah Persediaan	67,546,889.00	88,800,782.00
Rincian persediaan dapat dilihat pada lampiran III		

7. ASET TETAP

Jumlah tersebut merupakan nilai buku aset tetap PDAM Kabupaten Pangkep per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

	2024	2023
Nilai Perolehan		
Tanah	148,139,259.00	148,139,259.00
Instalasi Sumber Air	-	-
Instalasi Pompa	66,007,500.00	66,007,500.00
Instalasi Transmisi/Distribusi	2,969,128,277.00	2,884,134,947.00
Bangunan/Gedung	75,376,000.00	75,376,000.00
Peralatan & Perlengkapan	26,582,117.00	26,582,117.00
Kendaraan	-	-
Inventaris Kantor / Perabot kantor	75,105,236.00	65,605,236.00
Jumlah	3,360,338,389.00	3,265,845,059.00
Akumulasi Penyusutan		
Instalasi Sumber Air	-	266,255,786.00
Instalasi Pompa	49,829,896.00	368,425,386.00
Instalasi Transmisi/Distribusi	1,919,458,232.00	11,110,471,914.00
Bangunan/Gedung	67,838,401.00	321,071,118.00
Peralatan & Perlengkapan	20,705,593.00	76,330,353.00
Kendaraan	-	654,233,015.00
Inventaris Kantor / Perabot Knator	50,757,983.00	445,261,550.00
Jumlah	2,108,590,105.00	13,242,049,122.00
Nilai Buku		
Tanah	148,139,259.00	148,139,259.00
Instalasi Sumber	-	266,255,786.00
Instalasi Pompa	16,177,604.00	302,417,886.00
Instalasi Transmisi/Distribusi	1,049,670,045.00	8,226,336,967.00
Bangunan/Gedung	7,537,599.00	245,695,118.00
Peralatan & Perlengkapan	5,876,524.00	49,748,236.00
Kendaraan	-	654,233,015.00
Inventaris Kantor / Perabot Knator	24,347,253.00	379,656,314.00
Nilai Buku Bersih	1,251,748,284.00	9,976,204,063.00
Rincian Daftar Aset dapat dilihat pada lampiran I		

8. ASET LAIN - LAIN

Aset Lain - Lain merupakan bagian dari Aset Tetap yang direklasifikasi karena nilai penyusutannya sudah tidak ada atau bisa dikatakan umur ekonomisnya sudah habis

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	11,330,856,417.00	11,330,856,417.00
	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Lain Lain	11,330,855,766.00	-
Nilai Buku Aset Lain - Lain	651.00	11,330,856,417.00



PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JE'NE TAGARI
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)



9. UTANG USAHA

Perusahaan memiliki utang usaha sebesar Rp 96.900.253 pada tahun 2024, utang usaha tersebut terjadi sejak tahun 2018. manajemen perusahaan telah pengiriman konfirmasi atas saldo utang usaha tersebut. Hingga laporan ini di terbitkan, perusahaan tidak menerima balasan konfirmasi atas utang usaha dan tidak dapat teridentifikasi dokumen pendukung atas saldo utang usaha tersebut.

	2024	2023
Utang Alat Ledeng :		
Bangunan Tower Tahap II	6,502,023.00	6,502,023.00
Sisa Biaya Pengawas Tower	6,763,000.00	6,763,000.00
Biaya Pemasangan Pipa	8,000,000.00	8,000,000.00
Sisa Biaya Pemasangan Pipa	6,888,000.00	6,888,000.00
Biaya Pemasangan Pipa SUDP	1,381,980.00	1,381,980.00
Hutang Lainnya	67,365,250.00	67,365,250.00
Jumlah Utang Usaha	96,900,253.00	96,900,253.00

10 UTANG PEGAWAI

Utang Pegawai merupakan gaji Direksi, pegawai, dewan pengawas dan dana representasi direksi yang belum dibayarkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 351.672.206,00

	2024	2023
Utang Pegawai	351,672,206.00	-
Jumlah Utang Pegawai	351,672,206.00	-

11 UTANG JANGKA PANJANG

Perusahaan memiliki utang jangka panjang kepada pemerintah daerah dan utang lain-lain dengan saldo sebesar Rp354.375.272,00 pada tahun 2024, utang usaha tersebut terjadi sejak tahun 2018. manajemen perusahaan telah mengirimkan konfirmasi atas saldo utang usaha tersebut diatas. Hingga laporan ini di terbitkan, perusahaan tidak menerima balasan konfirmasi atas utang usaha dan tidak dapat teridentifikasi dokumen pendukung atas saldo usaha tersebut.

	2024	2023
Utang Kepada Pemerintah Daerah :		
Utang Pemda	311,776,755.00	311,776,755.00
Sub Jumlah Utang Pemerintah Daerah	311,776,755.00	311,776,755.00
Utang Lain-lain		
CV. Karya Utama	42,598,517.00	42,598,517.00
Utang Fee Audit	-	-
Sub Jumlah Utang Lain-lain	42,598,517.00	42,598,517.00
Total Utang Jangka Panjang	354,375,272.00	354,375,272.00

12 PERPAJAKAN

Utang Pajak dibawa merupakan hasil pemeriksaan perpajakan masa pajak tahun 2020 sesuai dengan no. Surat SPHP-00022/WPJ.15/KP.1104/RIK.SIS/2022 pada 22 Mei 2022 telah dilakukan pembayaran selama tahun 2023 sehingga sisa utang pajak PDAM Kab. Pangkep per 31 desember 2023 sebesar Rp 150.993.832,00

	2024	2023
Hutang PPH 21	-	-
Hutang Pajak	133,882,325.00	150,993,832.00
Jumlah	133,882,325.00	150,993,832.00

HUTANG BANK

13 Pinjaman BRI Unit Bonto Pole

	2024	2023
Pinjaman BRI Unit Bonto Pole	8,853,964.00	8,853,964.00
Jumlah	8,853,964.00	8,853,964.00



PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JE'NE TAGARI
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)



14 LIABILITAS IMBALAN KERJA

Perusahaan menghitung imbalan Pasca Kerja untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Dengan rincian sebagai berikut:

Perhitungan Imbalan pasca kerja dihitung dengan menggunakan asumsi utama sebagai berikut:

	2024	2023
Tingkat Diskonto		
Tingkat Kenaikan Gaji Usia Pensiun Normal	8.0%	8.0%
	4.5%	4.5%
Rincian liabilitas atas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:		
Kekayaan	1,417,294,676.00	1,100,492,333.00
(Surplus) / Defisit	380,531,371.00	187,577,411.00
Kewajiban / (Aset) diakui di Neraca	1,797,826,047.00	1,288,069,744.00

15 MODAL

Berdasarkan surat keputusan bupati Pangkajene dan kepulauan Nomor 677 Tahun 2020, sebesar Rp250,000,000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), Jumlah Modal per 31 Desember 2023 dan 2022 Terdiri dari:

Pemegang Saham	Presentase Kepemilikan	2024
Modal Penyertaan Kabupaten Pangkep	90.13%	21,440,865,850.00
Bantuan Pemerintah Pusat	6.85%	1,630,426,000.00
Modal Hibah	4.07%	967,450,000.00
Total	101%	24,038,741,850.00

Pemegang Saham	Presentase Kepemilikan	2023
Modal Penyertaan Kabupaten Pangkep	90.13%	21,440,865,850.00
Bantuan Pemerintah Pusat	6.85%	1,630,426,000.00
Modal Hibah	4.07%	967,450,000.00
Total	101%	24,038,741,850.00

16 SALDO LABA

	2024	2023
Laba (Rugi) Ditahan	- 18,640,300,145.00	- 18,464,739,116.00
Koreksi Imbalan Kerja		-
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	- 837,867,943.00	- 175,561,029.00
Jumlah Saldo Laba	- 19,478,168,088.00	- 18,640,300,145.00

17 PENDAPATAN USAHA

	2024	2023
Pendapatan Penjualan Air	8,099,448,500.00	8,252,662,200.00
Jasa Administrasi	417,273,500.00	420,504,000.00
Pendapatan Penjualan Air Lainnya	650,000.00	1,427,500.00
Jumlah Pendapatan Usaha	8,517,372,000.00	8,674,593,700.00



PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JE'NE TAGARI
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)



	2024	2023
18 PENDAPATAN NON USAHA		
Pendapatan Sambungan Baru	307,230,000.00	339,625,000.00
Pendapatan Penyambungan Kembali	16,650,000.00	18,450,000.00
Pendapatan Penggantian Meter Rusak	250,000.00	-
Pendapatan Denda	239,220,000.00	213,082,500.00
Jumlah Pendapatan Non Usaha	563,350,000.00	571,157,500.00
19 BEBAN OPERASIONAL		
Beban Pegawai	5,253,975,658.00	5,015,965,928.00
- Gaji dan Honor Pegawai	2,928,829,130.00	2,816,334,789.00
- Tunjangan	1,348,317,660.00	1,279,751,135.00
- Iuran Pensiun	367,875,832.00	331,693,584.00
- Rupa-rupa Beban Pegawai	592,653,036.00	572,486,420.00
- Pendidikan Dan Latihan	16,300,000.00	15,700,000.00
Beban Pemakaian Bahan Bakar	66,915,650.00	60,861,210.00
- BBM untuk mobil tangki air	9,720,000.00	13,863,380.00
- BBM kendaraan dinas	56,885,650.00	46,147,830.00
- BBM sumber Air	310,000.00	850,000.00
Beban Listrik	2,147,773,654.00	2,333,093,867.00
- listrik Sumber Air	2,109,829,155.00	2,291,436,772.00
- Listrik Kantor dan Rumah Jabatan Dir.	34,344,499.00	38,157,095.00
- Lain-lain	3,600,000.00	3,500,000.00
Beban Pemeliharaan	272,022,144.00	218,423,118.00
- Pemeliharaan sumber air	119,658,003.00	98,059,280.00
- Pemeliharaan transmisi dan distribusi	126,184,781.00	76,883,838.00
- pemeliharaan kendaraan	20,303,000.00	34,046,500.00
- Pemeliharaan Inventaris kantor	3,830,500.00	6,055,000.00
- Pemeliharaan Bangunan	1,416,200.00	2,628,500.00
- Pemeliharaan taman dan lainnya	629,660.00	750,000.00
Beban Penyisihan dan Penghapusan Piutang	600,884,498.00	645,583,682.00
Beban Penyusutan	197,396,749.00	202,009,087.00
Beban Operasional Lainnya	1,389,090,856.00	957,403,413.00
- Biaya Badan Pengawas	159,939,326.00	157,795,500.00
- Biaya Perjalanan Dinas	88,625,900.00	55,910,340.00
- Biaya Pajak	254,540,704.00	91,240,374.00
- Insentif anggota penagih	13,648,940.00	10,651,500.00
- Dana Refresentasi	68,240,077.00	67,944,000.00
- Biaya Telpn	27,109,526.00	26,918,676.00
- Biaya rapat dan tamu	3,965,300.00	6,710,500.00
- Biaya pembacaan meteran	-	-
- Biaya kantor	34,073,050.00	39,309,300.00
- Biaya Jasa Billing	65,568,800.00	27,463,700.00
- Imbalan kerja	509,756,303.00	230,510,072.00
- Rupa-rupa operasional lainnya	163,622,930.00	242,949,451.00
Jumlah Beban Operasional	9,928,059,209.00	9,433,340,305.00
20 PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Pendapatan Non Operasional		
Penerimaan Piutang Air Yang Telah Dihapus	6,116,500.00	7,240,200.00
Penerimaan Bunga Bank	3,352,766.00	4,787,876.00
Penerimaan Pajak SR	-	-
Pendapatan Lainnya	-	-
Jumlah Pendapatan Lain-lain	9,469,266.00	12,028,076.00
Beban Non Operasional	-	-
Beban Pajak Bank	-	-
Jumlah Biaya Non Operasional	-	-
Jumlah Pendapatan (Lain-lain)	9,469,266.00	12,028,076.00



PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JE'NE TAGARI
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)



	2024	2023
21 LABA SEBELUM PAJAK		
- Laba Sebelum Pajak	- 837,867,943.00	- 175,561,029.00
- Estimasi PPh badan	-	-
LABA SETELAH PAJAK	- 837,867,943.00	- 175,561,029.00

22 PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk yang berakhir 31 Desember 2024 yang diselesaikan dan disetujui diterbitkan pada tanggal Maret 2025

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

LAMPIRAN

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DAFTAR ASET TETAP
PER 31 DESEMBER 2024



NO.	JENIS HARTA	PEROLEHAN						Nilai buku 2023	Penyusutan	Ak.Penyusutan	Nilai Buku
		TAHUN	(Rp.)	Tarif	lm. Eknm	umur					
1	2	3	4					2023		2024	
	TANAH DAN HAK ATAS TANAH										
1	Tanah dan Hak atas Tanah	1982	2,500,000.00					2,500,000			2,500,000
2	Tanah dan Hak atas Tanah	1997	94,180,000.00					94,180,000			94,180,000
3	Bunga Masa Konstruksi	1996	21,888,322.03					21,888,322			21,888,322
4	Bunga Masa Konstruksi	1999	13,927,971.08					13,927,971			13,927,971
5	Bunga Masa Konstruksi	2000	15,642,966.31					15,642,966			15,642,966
	SUB JUMLAH		148,139,259.42					148,139,259.42			148,139,259
	INSTALASI SUMBER AIR										
				Tarif	lm. Eknm	umur		2023		2024	
	SUB JUMLAH		-					-	-		
	INTALASI POMPA										
				Tarif	lm. Eknm	umur		2023		2024	
27	Instalasi Pompa	2019	34,007,500.00	25.00%	8	5		8,070,139	2,017,535	27,954,896	6,052,604
28	1 unit Panel Star Delta 37kw	2021	12,000,000.00	25.00%	8	3		5,062,500	1,265,625	8,203,125	3,796,875
29	1 unit pompa celup Everyush EXL08	2021	20,000,000.00	25.00%	8	3		8,437,500	2,109,375	13,671,875	6,338,125
	SUB JUMLAH		66,007,500.00					21,570,138	5,392,535	49,829,896	16,177,604
	INSTALASI TRANSMISI DAN DISTRIBUSI										
				Tarif	lm. Eknm	umur		2023		2024	
1	Instalasi Sambungan Rumah	2008	43,210,500.00	12.50%	16	16	1	-		43,210,499	1
2	Instalasi Sambungan Rumah	2009	116,526,270.00	12.50%	16	15		15,723,334	15,723,333	116,526,269	1
3	Instalasi Sambungan Rumah	2010	122,073,930.00	12.50%	16	14		18,825,030	2,353,129	105,602,029	16,471,901
4	Interkoneksi Jaringan Pipa	2010	53,115,000.00	12.50%	16	14		8,190,868	1,023,859	45,947,990	7,167,010
5	Instalasi Sambungan Rumah	2011	140,516,000.00	12.50%	16	13		24,764,552	3,095,569	118,847,017	21,668,983
6	Interkoneksi Jaringan Pipa	2011	26,087,000.00	12.50%	16	13		4,597,575	574,697	22,064,122	4,022,878
7	Instalasi Sambungan Rumah	2012	161,355,000.00	12.50%	16	12		32,499,678	4,062,460	132,917,781	28,437,219
8	Interkoneksi Jaringan Pipa	2012	27,437,950.00	12.50%	16	12		5,526,476	690,810	22,602,283	4,835,667
9	Instalasi Sambungan Rumah	2013	187,215,000.00	12.50%	16	11		43,095,232	5,386,904	149,506,672	37,708,328
10	Interkoneksi Jaringan Pipa	2013	11,790,000.00	12.50%	16	11		2,713,954	339,244	9,415,291	2,374,709
11	Instalasi Jaringan Pipa DM 50 mm	2014	23,580,000.00	12.50%	16	10		6,203,322	775,415	18,152,093	5,427,907
12	Instalasi Sambungan Rumah	2014	187,270,000.00	12.50%	16	10		49,266,163	6,158,270	144,162,107	43,107,893
13	Instalasi Sambungan Rumah	2015	175,465,000.00	12.50%	16	9		52,754,921	6,594,365	129,304,444	46,160,556
14	Instalasi Sambungan Rumah	2016	252,627,500.00	12.50%	16	8		86,805,062	10,850,633	176,673,071	75,954,429
15	Instalasi Jaringan Pipa DM 50 mm	2016	13,680,000.00	12.50%	16	8		4,700,570	587,571	9,567,001	4,112,999
16	Instalasi Sambungan Rumah	2017	275,506,000.00	12.50%	16	7		108,190,078	13,523,760	180,839,682	94,666,318
17	Instalasi Sambungan Rumah	2018	251,671,500.00	12.50%	16	6		112,948,991	14,118,624	152,841,133	98,830,367
18	Instalasi Sambungan Rumah	2019	165,639,000.00	12.50%	16	5		84,957,723	10,619,715	91,300,992	74,338,008
19	Instalasi Sambungan Rumah	2020	223,405,500.00	12.50%	16	4		130,956,203	16,369,525	108,818,823	114,586,677
20	Instalasi Sambungan Rumah	2021	67,460,500.00	12.50%	16	3		45,193,265	5,649,158	27,916,393	39,544,107
21	Instalasi Sambungan Rumah	2022	194,290,000.00	12.50%	16	2		148,753,281	18,594,160	64,130,879	130,159,121
22	Instalasi Sambungan Rumah	2023	164,213,297.00	12.50%	16	1		143,686,635	17,960,829	38,487,491	125,725,806
23	Instalasi Sambungan Rumah	2024	84,993,330.00	12.50%	16	-			10,624,166	10,624,166	74,369,164
	SUB JUMLAH		2,969,128,276					1,130,352,912	165,676,196	1,919,458,232	1,049,670,046
	BANGUNAN GEDUNG										
				Tarif	lm. Eknm	umur		2023		2024	
1	Bangunan Rumah Jaga Kantor	2007	23,648,000.00	5%	20	17		3,547,200	1,182,400	21,283,200	2,364,800
2	Taman Kantor	2007	44,385,000.00	5%	20	17		6,657,750	2,219,250	39,946,500	4,438,500
3	Pintu Gerbang	2007	7,343,000.00	5%	20	17		1,101,450	367,150	6,608,700	734,300
	SUB JUMLAH		75,376,000.00					11,306,399	3,768,800	67,838,401	7,537,599
	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN										
				Tarif	lm. Eknm	umur		2023		2024	
1	1 unit Alkon DM 2"	2016	1,850,000.00	25%	8	8	1	-		1,849,999	1.00
2	2 unit Alkon DM 2"	2017	3,000,000.00	25%	8	7		400,452	400,451	2,999,999	1.00
3	1 unit Alkon DM 2"	2018	1,650,000.00	25%	8	6		293,665	73,416	1,429,752	220,248.41
4	1 unit Alkon DM 3"	2018	2,725,000.00	25%	8	6		484,991	121,248	2,361,256	363,743.59
5	1 unit Alkon DM 2"	2019	1,650,000.00	25%	8	5		391,553	97,888	1,356,335	293,664.55
6	1 unit Alkon DM 3"	2019	3,087,500.00	25%	8	5		732,678	183,170	2,537,991	549,508.67
7	1 unit Pompa pendorong 2"	2020	2,900,000.00	25%	8	4		917,578	229,395	2,211,816	688,183.59
8	1 unit Alkon	2020	2,117,500.00	25%	8	4		669,990	167,498	1,615,007	502,492.68
9	Pompa Pengisap	2020	1,210,000.00	25%	8	4		382,852	95,713	922,861	287,138.67
10	1 set alkon DM 3"	2021	1,550,000.00	25%	8	3		653,906	163,477	1,059,570	490,429.69
11	1 set alkon DM 3"	2022	1,725,000.00	25%	8	2		970,313	242,578	997,266	727,734.38

12	1 unit Alkon 2"	2023	2,117,117.00	25%	8	1	1,587,838	396,959	926,239	1,190,878.31
13	1 unit Alkon 2"	2023	1,000,000.00	25%	8	1	750,000	187,500	437,500	562,500.00
	SUB JUMLAH		26,582,117.00				8,235,815	2,359,292	20,705,593	5,876,523.62
	KENDARAAN / ALAT PENGANGKUTAN									
							Nilai buku	Penyusutan	Ak.Penyusutan	Nilai Buku
				Tarif	m. Eknm	umur	2023	2024		
	SUB JUMLAH		-				-	-	-	-
	INVENTARIS / PERABOT KANTOR									
							Nilai buku	Penyusutan	Ak.Penyusutan	Nilai Buku
				Tarif	m. Eknm	umur	2024	2023		
1	1 unit Print LX 310	2021	2,750,000	25%	4	3	1,160,156	1,160,155	2,749,999	1
2	1 unit AC SHARP 1 PK	2021	3,900,000	25%	4	3	1,645,313	1,645,312	3,899,999	1
3	5 Buah kursi kerja	2021	1,634,000	25%	4	3	689,344	689,343	1,633,999	1
4	1 unit mesin rumput	2021	1,650,000	25%	4	3	696,094	696,093	1,649,999	1
5	1 unit Laptop HP	2021	6,600,000	25%	4	3	2,784,375	2,784,374	6,599,999	1
6	1 unit CPU	2021	2,640,000	25%	4	3	1,113,750	1,113,749	2,639,999	1
7	1 unit mesin ceklok	2021	1,500,000	25%	4	3	632,813	632,812	1,499,999	1
8	1 unit CPU	2021	4,950,000	25%	4	3	2,088,281	2,088,280	4,949,999	1
9	1 unit Sound system	2021	3,020,000	25%	4	3	1,274,063	1,274,062	3,019,999	1
10	1 unit Laptop 14"	2022	6,000,000	25%	4	2	3,375,000	843,750	3,468,750	2,531,250
11	1 unit CPU	2022	3,000,000	25%	4	2	1,687,500	421,875	1,734,375	1,265,625
12	1 unit CPU	2022	3,250,000	25%	4	2	1,828,125	457,031	1,878,906	1,371,094
13	1 pcs Kursi kantor EC O26 Mbl	2022	2,125,650	25%	4	2	1,195,678	298,920	1,228,891	896,759
14	1 unit Laptop 14"	2022	6,250,000	25%	4	2	3,515,625	878,906	3,613,281	2,636,719
15	CCTV	2022	4,750,000	25%	4	2	2,671,875	667,969	2,746,094	2,003,906
16	1 Unit Printer Dot matrix	2023	5,585,586	25%	4	1	4,189,190	1,047,297	2,443,694	3,141,892
17	1 unit Monitor LG	2023	1,350,000	25%	4	1	1,012,500	253,125	590,625	759,375
18	1 Unit Laptop Asus	2023	4,650,000	25%	4	1	3,487,500	871,875	2,034,375	2,615,625
19	1 unit Print Epson L121	2024	1,850,000	25%	4	-		462,500	462,500	1,387,500
20	1 unit Print Epson L121	2024	1,850,000	25%	4	-		462,500	462,500	1,387,500
21	1 unit AC SHARP 1 PK	2024	3,950,000	25%	4	-		987,500	987,500	2,962,500
22	1 unit print Epson	2024	1,850,000	25%	4	-		462,500	462,500	1,387,500
	SUB JUMLAH		75,105,236				35,047,179	20,199,927	50,757,983	24,347,252.62
	J U M L A H		3,360,338,389				1,354,651,703	197,396,749	2,108,590,104	1,251,748,284



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor: 00002/2.1375/AU.2/11/1805-1/1/III/2025

Kepada Yth.

Badan Pengawas dan Direktur PDAM JE'NE TAGARI

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan **PDAM JE'NE TAGARI** terlampir, yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf Basis untuk Opini Wajar dengan Pengecualian di bawah ini, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material terhadap posisi keuangan **PDAM JE'NE TAGARI** pada tanggal 31 Desember 2024 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

Basis Opini untuk Opini Wajar dengan Pengecualian

Sebagaimana dijelaskan pada catatan 4 atas laporan keuangan, perihal Piutang Usaha sebesar Rp14.588.602.000,- kami tidak dapat memperoleh bukti yang cukup dan memadai untuk mendukung asersi manajemen tersebut. Selanjutnya, kami memberikan perhatian terhadap catatan 16 atas laporan keuangan yang menyajikan saldo laba negatif pada ekuitas perusahaan per 31 Desember 2024 sebesar (Rp19.478.168.088,-). Kondisi tersebut disebabkan oleh akumulasi nilai kerugian pada tahun-tahun sebelumnya dan rugi pada tahun buku 2024 yaitu sebesar (Rp837.867.943,-). Kondisi tersebut mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kelangsungan usaha (*going concern*). Untuk mempertahankan kelangsungan usaha Perusahaan diperlukan komitmen dan rencana aksi dari pihak manajemen.

Hal Lain

Laporan Keuangan **PDAM JE'NE TAGARI** tanggal 31 Desember 2023 dan untuk yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disajikan sebagai angka-angka komparatif terhadap Laporan Keuangan **PDAM JE'NE TAGARI** untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024, karena telah diaudit dengan nomor Laporan Auditor Independen (LAI) 00033/2.1253/AU.2/11/1622-2/1/III/2024 tanggal 07 Maret 2024 dengan laporan opini modifikasi.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen **PDAM JE'NE TAGARI** bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan **PDAM JE'NE TAGARI** dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan **PDAM JE'NE TAGARI**.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

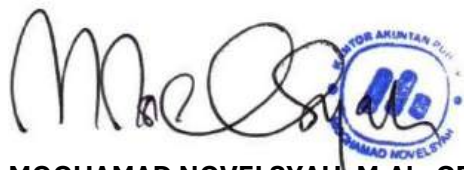
Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Organisasi untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan **PDAM JE'NE TAGARI** tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)
MOCHAMAD NOVELSYAH



MOCHAMAD NOVELSYAH, M.Ak, CPA, Cert.SF
NRAP: AP.1805



Banjarmasin, 04 Maret 2025

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM JE'NE TAGARI
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

DAFTAR AKTIVA TETAP LAIN- LAIN

PER 31 DESEMBER 2024



NO.	JENIS HARTA	PEROLEHAN		Tarif	Um. Eknm	umur	Nilai buku	Penyusutan	Ak.Penyusutan	Nilai Buku
		TAHUN	(Rp.)							
1	2	3	4				2023		2024	
	TANAH DAN HAK ATAS TANAH									
	SUB JUMLAH		-				-			-
	INSTALASI SUMBER AIR			Tarif	Um. Eknm	umur	Nilai buku	Penyusutan	Ak.Penyusutan	Nilai Buku
							2023		2024	
1	Bangunan bronkaptering	1982	13,262,000.00	5%	20	42	1	-	13,261,999	1
2	Pek. Tamb. Bronkaptering	1982	698,000.00	5%	20	42	1	-	697,999	1
3	Pagar besi siku, tembok beton	1982	2,199,466.40	5%	20	42	1	-	2,199,465	1
4	Bangunan bronkaptering	1982	10,080,000.00	5%	20	42	1	-	10,079,999	1
5	Penyempurnaan bronkaptering	1985	6,998,000.00	5%	20	39	1	-	6,997,999	1
6	Penyempurnaan bronkaptering	1986	6,215,000.00	5%	20	38	1	-	6,214,999	1
7	Rehab. Bronkaptering	1987	1,750,000.00	5%	20	37	1	-	1,749,999	1
8	Penyempurnaan bronkaptering	1987	12,315,000.00	5%	20	37	1	-	12,314,999	1
9	Pembuatan bronkaptering	1990	9,738,647.00	5%	20	34	1	-	9,738,646	1
10	Pemb. Bang. Pelengkap	1991	408,346.00	5%	20	33	1	-	408,345	1
11	Pembuatan intake SUD	1991	11,110,000.00	5%	20	33	1	-	11,109,999	1
12	Bak Klorinasi	1992	2,284,000.00	5%	20	32	1	-	2,283,999	1
13	Bangunan bronkaptering	1992	9,981,000.00	5%	20	32	1	-	9,980,999	1
14	Pemb. Bang. Pelengkap	1992	1,122,000.00	5%	20	32	1	-	1,121,999	1
15	Pemb. Bang. Pelengkap	1992	2,553,000.00	5%	20	32	1	-	2,552,999	1
16	Pemb. Bang. Pelengkap	1992	9,985,500.00	5%	20	32	1	-	9,985,499	1
17	Rehab air Bersih	1992	10,230,000.00	5%	20	32	1	-	10,229,999	1
18	Pembuatan tanggul mata air	1992	20,000,000.00	5%	20	32	1	-	19,999,999	1
19	Bang. Pagar L. Kassi	1993	1,436,000.00	5%	20	31	1	-	1,435,999	1
20	Pembuatan bronkaptering	1994	12,094,806.00	5%	20	30	1	-	12,094,805	1
21	Pemb. pagar Sumber Kabba	1996	2,860,000.00	5%	20	28	1	-	2,859,999	1
22	Pagar sumber Mattampa	1997	6,720,654.00	5%	20	27	1	-	6,720,653	1

23	Gudang	1997	21,856,303.00	5%	20	27	1	-	21,856,302	1
24	Pagar sumber L. Kassi	1997	5,616,458.00	5%	20	27	1	-	5,616,457	1
25	Lantai Rabat Beton	1997	7,252,650.00	5%	20	27	1	-	7,252,649	1
26	Bronkaptering	1997	2,472,362.00	5%	20	27	1	-	2,472,361	1
27	Pagar Sumber Jatie	1997	15,593,252.00	5%	20	27	1	-	15,593,251	1
28	Pos Jaga	1997	2,955,641.00	5%	20	27	1	-	2,955,640	1
29	Rumah Jaga	1997	5,645,919.00	5%	20	27	1	-	5,645,918	1
30	Dinding Kolam Sumber Jatie	1997	8,798,051.00	5%	20	27	1	-	8,798,050	1
31	Bunga Masa Konstruksi	1997	17,874,910.63	5%	20	27	1	-	17,874,910	1
32	Bunga Masa Konstruksi	1999	11,374,158.24	5%	20	25	1	-	11,374,157	1
33	Bunga Masa Konstruksi	2000	12,774,694.40	5%	20	24	1	-	12,774,693	1
SUB JUMLAH			266,255,818.67				33	-	266,255,786	33
INTALASI POMPA				Tarif	Um. Eknm	umur	Nilai buku	Penyusutan	Ak.Penyusutan	Nilai Buku
							2023	2024		
1	Peng & Pems. Pompa	1984	26,219,500.00	25.00%	8	40	1	-	26,219,499	1
2	Peng & Pems. Pompa	1984	2,763,500.00	25.00%	8	40	1	-	2,763,499	1
3	Peng & Pems. Aparpar	1984	529,925.00	25.00%	8	40	1	-	529,924	1
4	Peng & Pems. Pompa & Genset	1986	17,995,000.00	25.00%	8	38	1	-	17,994,999	1
5	Penambahan daya PLN	1990	4,122,990.00	25.00%	8	34	1	-	4,122,989	1
6	Pompa Sentrifugal	1991	2,245,000.00	25.00%	8	33	1	-	2,244,999	1
7	Rumah Genset	1992	12,343,000.00	5%	20	32	1	-	12,342,999	1
8	Rumah Genset	1992	14,491,000.00	5%	20	32	1	-	14,490,999	1
9	Penambahan daya PLN	1992	2,606,000.00	25.00%	8	32	1	-	2,605,999	1
10	Panel Pompa	1992	1,125,000.00	25.00%	8	32	1	-	1,124,999	1
11	Panel Pompa	1994	3,000,000.00	25.00%	8	30	1	-	2,999,999	1
12	Pompa	1994	14,000,000.00	25.00%	8	30	1	-	13,999,999	1
13	Peng. & Pems. Pompa	1995	18,012,500.00	25.00%	8	29	1	-	18,012,499	1
14	Panel Pompa IKK Segeri	1996	1,375,000.00	25.00%	8	28	1	-	1,374,999	1
15	Pompa (pertukaran dari Barru)	1996	13,745,000.00	25.00%	8	28	1	-	13,744,999	1
16	Pengadaan/Pemasangan Pompa	1997	17,195,927.00	25.00%	8	27	1	-	17,195,926	1
17	Pengadaan/Pemasangan Pompa	1997	49,485,000.00	25.00%	8	27	1	-	49,484,999	1
18	Instalasi Listrik PLN Jatie	1998	7,195,500.00	25.00%	8	26	1	-	7,195,499	1
19	Bunga Masa Konstruksi	1996	3,107,314.35	25.00%	8	28	1	-	3,107,313	1
20	Bunga Masa Konstruksi	1997	15,497,277.59	25.00%	8	27	1	-	15,497,277	1
21	Penambahan daya PLN	1999	36,600,000.00	25.00%	8	25	1	-	36,599,999	1
22	Bunga Masa Konstruksi	1999	13,918,839.75	25.00%	8	25	1	-	13,918,839	1
23	Bunga Masa Konstruksi	1999	11,838,468.85	25.00%	8	25	1	-	11,838,468	1

24	Bunga Masa Konstruksi	2000	19,375,308.15	25.00%	8	24	1	-	19,375,307	1	
25	Penyempurnaan Inst.Pompa Ma'rang	2009	5,501,000.00	25.00%	8	15	1	-	5,500,999	1	
26	Panel Pompa 1 unit	2014	9,700,000.00	25.00%	8	10	1	-	9,699,999	1	
	SUB JUMLAH		323,988,050.69				25	-	323,988,025	26	
	INSTALASI TRANSMISI DAN DISTRIBUSI										
							Nilai buku	Penyusutan	Ak.Penyusutan	Nilai Buku	
				Tarif	Um. Eknm	umur	2023	2024			
1	Grafitasi pipa DM. 10 mm	1982	76,473,888.72	12.50%	16	42	1	-	76,473,888	1	
2	Grafitasi pipa DM. 100 mm	1982	30,887,900.00	12.50%	16	42	1	-	30,887,899	1	
3	Grafitasi pipa DM. 50 mm	1982	8,213,700.00	12.50%	16	42	1	-	8,213,699	1	
4	Ins. Pipa tersier	1982	8,100,000.00	12.50%	16	42	1	-	8,099,999	1	
5	Pemas. Alat bantu pipa	1982	1,520,000.00	12.50%	16	42	1	-	1,519,999	1	
6	Hidran umum	1982	1,010,000.00	12.50%	16	42	1	-	1,009,999	1	
7	Jln. Masuk ke Sb. Mattampa	1982	2,400,000.00	12.50%	16	42	1	-	2,399,999	1	
8	Prasarana	1982	900,000.00	5%	20	42	1	-	899,999	1	
9	Saluran air hujan	1982	1,400,000.00	5%	20	42	1	-	1,399,999	1	
10	Instalasi pipa	1982	14,390,000.00	12.50%	16	42	1	-	14,389,999	1	
11	Instalasi pipa tertier	1982	11,993,000.00	12.50%	16	42	1	-	11,992,999	1	
12	Ins. SR 200 bh dan HU	1982	9,875,000.00	12.50%	16	42	1	-	9,874,999	1	
13	Inst. Pipa distribusi	1983	8,700,000.00	12.50%	16	41	1	-	8,699,999	1	
14	Inst. Pipa 2862 M. HU 50 bh	1983	25,954,000.00	12.50%	16	41	1	-	25,953,999	1	
15	Penyerap samb. Rumah	1983	668,790.00	12.50%	16	41	1	-	668,789	1	
16	Inst. Samb. Rumah	1984	3,093,198.00	12.50%	16	40	1	-	3,093,197	1	
17	Instalasi pipa tertier	1984	4,940,000.00	12.50%	16	40	1	-	4,939,999	1	
18	Inst. Pipa ACP DM 150 mm	1984	78,164,000.00	12.50%	16	40	1	-	78,163,999	1	
19	Penyerap samb. Rumah	1984	7,631,000.00	12.50%	16	40	1	-	7,630,999	1	
20	Hidran umum	1985	303,000.00	12.50%	16	39	1	-	302,999	1	
21	Instalasi pipa	1985	1,970,280.00	12.50%	16	39	1	-	1,970,279	1	
22	Inst. Pipa PVC DM 100 mm	1985	14,508,000.00	12.50%	16	39	1	-	14,507,999	1	
23	Inst. Pipa PVC DM 50 mm	1985	10,424,000.00	12.50%	16	39	1	-	10,423,999	1	
24	Inst. Samb. Rumah	1985	3,058,000.00	12.50%	16	39	1	-	3,057,999	1	
25	Inst. Hidran Umum	1985	280,000.00	12.50%	16	39	1	-	279,999	1	
26	Inst. Pipa PVC DM 50 mm	1985	3,544,400.00	12.50%	16	39	1	-	3,544,399	1	
27	Inst. Samb. Rumah	1986	748,000.00	12.50%	16	38	1	-	747,999	1	
28	Instalasi pipa	1987	1,024,925.00	12.50%	16	37	1	-	1,024,924	1	
29	Inst. Pipa PVC DM 100, 150 mm	1987	47,329,000.00	12.50%	16	37	1	-	47,328,999	1	
30	Inst. Samb. Rumah	1987	4,400,000.00	12.50%	16	37	1	-	4,399,999	1	
31	Instalasi perpiPaan	1988	2,886,200.00	12.50%	16	36	1	-	2,886,199	1	

32	Instalasi pipa DM. 50 mm	1988	13,492,980.00	12.50%	16	36	1	-	13,492,979	1
33	Inst. Samb. Rumah	1988	2,662,000.00	12.50%	16	36	1	-	2,661,999	1
34	Instalasi pipa DM. 40 mm	1988	9,414,200.00	12.50%	16	36	1	-	9,414,199	1
35	Instalasi perpipaan	1989	3,912,495.00	12.50%	16	35	1	-	3,912,494	1
36	Ins. Samb. Khusus dermaga	1989	2,952,000.00	12.50%	16	35	1	-	2,951,999	1
37	Instalasi hidran umum	1989	24,275,000.00	12.50%	16	35	1	-	24,274,999	1
38	Ins. Pipa PVC DM 100,200 mm	1989	55,618,480.00	12.50%	16	35	1	-	55,618,479	1
39	Inst. Samb. Rumah	1989	14,579,520.00	12.50%	16	35	1	-	14,579,519	1
40	Ins. Pipa PVC DM 100 mm	1989	52,845,000.00	12.50%	16	35	1	-	52,844,999	1
41	Ins. Pipa PVC DM 100 mm	1989	18,257,280.00	12.50%	16	35	1	-	18,257,279	1
42	Ins. Pipa PVC DM 50 mm	1989	17,568,075.00	12.50%	16	35	1	-	17,568,074	1
43	Inst. Samb. Rumah	1989	1,803,000.00	12.50%	16	35	1	-	1,802,999	1
44	Instalasi perpipaan	1989	11,282,750.00	12.50%	16	35	1	-	11,282,749	1
45	Ins. Pipa PVC DM 50 mm	1990	10,598,671.00	12.50%	16	34	1	-	10,598,670	1
46	Inst. Samb. Rumah	1990	2,171,120.00	12.50%	16	34	1	-	2,171,119	1
47	Inst. Terminal air	1990	6,186,209.00	12.50%	16	34	1	-	6,186,208	1
48	Inst. Pipa PVC DM 40 mm	1990	16,948,400.00	12.50%	16	34	1	-	16,948,399	1
49	Inst. Pipa PVC DM 25 mm	1990	11,830,000.00	12.50%	16	34	1	-	11,829,999	1
50	Inst. Pipa GIP DM 40 mm	1990	5,229,244.00	12.50%	16	34	1	-	5,229,243	1
51	Instalasi pelintas pipa	1990	4,357,696.00	12.50%	16	34	1	-	4,357,695	1
52	Inst. Kran umum	1991	3,519,413.00	12.50%	16	33	1	-	3,519,412	1
53	Rehab rumah pompa	1991	6,385,500.00	12.50%	16	33	1	-	6,385,499	1
54	Ins. Pipa dan SR	1991	23,073,000.00	12.50%	16	33	1	-	23,072,999	1
55	Inst. Pipa PVC DM 50 mm	1991	17,870,449.00	12.50%	16	33	1	-	17,870,448	1
56	Inst. Pipa PVC DM 75 mm	1991	17,958,405.00	12.50%	16	33	1	-	17,958,404	1
57	Inst. Hidran Umum	1991	6,060,644.00	12.50%	16	33	1	-	6,060,643	1
58	Instalasi terminal air 3 M3	1991	1,651,178.00	12.50%	16	33	1	-	1,651,177	1
59	Instalasi terminal air 3 M3	1991	1,651,178.00	12.50%	16	33	1	-	1,651,177	1
60	Pemasangan pipa	1992	61,325,000.00	12.50%	16	32	1	-	61,324,999	1
61	Inst. Hidran Umum	1992	20,497,000.00	12.50%	16	32	1	-	20,496,999	1
62	Pemasangan pipa	1992	38,204,000.00	12.50%	16	32	1	-	38,203,999	1
63	Peng. & Pemasangan pipa	1992	11,759,000.00	12.50%	16	32	1	-	11,758,999	1
64	Pemb. S. pompa tangan	1992	51,856,000.00	12.50%	16	32	1	-	51,855,999	1
65	Pemas. Pipa dan HU	1992	81,968,500.00	12.50%	16	32	1	-	81,968,499	1
66	Pemas. Pipa dan HU	1992	32,443,000.00	12.50%	16	32	1	-	32,442,999	1
67	Pemas. Pipa dan HU	1992	10,000,000.00	12.50%	16	32	1	-	9,999,999	1
68	Upah kerja pemas. SR	1992	750,000.00	12.50%	16	32	1	-	749,999	1
69	Peng. Pem. Pipa DM 50 mm	1992	6,203,100.00	12.50%	16	32	1	-	6,203,099	1
70	Inst. Samb. Rumah	1992	5,079,600.00	12.50%	16	32	1	-	5,079,599	1
71	Peng. & Pemasangan pipa	1993	4,814,400.00	12.50%	16	31	1	-	4,814,399	1

72	Pemas. Sambungan Rumah	1993	4,880,400.00	12.50%	16	31	1	-	4,880,399	1
73	Upah kerja pemas. SR	1993	1,065,000.00	12.50%	16	31	1	-	1,064,999	1
74	Peng. & Pemasangan	1993	3,965,950.00	12.50%	16	31	1	-	3,965,949	1
75	Pompa ut. Peng. Kebocoran	1993	1,080,000.00	12.50%	16	31	1	-	1,079,999	1
76	Upah kerja pemas. SR	1994	120,000.00	12.50%	16	30	1	-	119,999	1
77	Upah kerja pemas. SR	1994	105,000.00	12.50%	16	30	1	-	104,999	1
78	Sambungan Rumah	1994	1,547,304.00	12.50%	16	30	1	-	1,547,303	1
79	Sambungan Rumah	1994	1,969,296.00	12.50%	16	30	1	-	1,969,295	1
80	Sambungan Rumah	1994	1,265,976.00	12.50%	16	30	1	-	1,265,975	1
81	Sambungan Rumah	1994	1,969,296.00	12.50%	16	30	1	-	1,969,295	1
82	Sambungan Rumah	1994	984,648.00	12.50%	16	30	1	-	984,647	1
83	Sambungan Rumah	1994	2,109,960.00	12.50%	16	30	1	-	2,109,959	1
84	Sambungan Rumah	1994	3,235,272.00	12.50%	16	30	1	-	3,235,271	1
85	Sambungan Rumah	1994	5,907,888.00	12.50%	16	30	1	-	5,907,887	1
86	Sambungan Rumah	1994	3,235,272.00	12.50%	16	30	1	-	3,235,271	1
87	Sambungan Rumah	1994	2,672,616.00	12.50%	16	30	1	-	2,672,615	1
88	Sambungan Rumah	1994	1,406,640.00	12.50%	16	30	1	-	1,406,639	1
89	Sambungan Rumah	1994	562,656.00	12.50%	16	30	1	-	562,655	1
90	Peng. & Pemas pipa	1994	90,239,888.00	12.50%	16	30	1	-	90,239,887	1
91	Peng. & Pemas. HU	1994	21,105,806.00	12.50%	16	30	1	-	21,105,805	1
92	Peng. & Pemas. Pipa	1994	132,094,175.00	12.50%	16	30	1	-	132,094,174	1
93	Peng. & Pemas. HU	1994	12,864,170.00	12.50%	16	30	1	-	12,864,169	1
94	Peng. & Pemas. Pipa	1994	34,941,928.00	12.50%	16	30	1	-	34,941,927	1
95	Peng. & Pemas. HU	1994	6,734,222.00	12.50%	16	30	1	-	6,734,221	1
96	Peng. & Pemas. TA	1994	25,000,000.00	12.50%	16	30	1	-	24,999,999	1
97	Peng. & Pemas. Pipa & KU	1994	15,000,000.00	12.50%	16	30	1	-	14,999,999	1
98	Peng. & Pemas. Pipa & KU	1994	64,740,000.00	12.50%	16	30	1	-	64,739,999	1
99	Peng. & Pemas. Pipa & KU	1994	57,942,000.00	12.50%	16	30	1	-	57,941,999	1
100	Peng. & Pemas. Pipa	1994	13,570,000.00	12.50%	16	30	1	-	13,569,999	1
101	Peng. & Pemas. Pipa & HU	1995	57,006,730.00	12.50%	16	29	1	-	57,006,729	1
102	Peng. & Pemas. Pipa & HU	1995	109,087,070.00	12.50%	16	29	1	-	109,087,069	1
103	Peng. & Pemas. Tangki filter	1995	13,026,750.00	12.50%	16	29	1	-	13,026,749	1
104	Tambahan bahan SR	1995	174,000.00	12.50%	16	29	1	-	173,999	1
105	Sambungan Rumah	1995	2,250,624.00	12.50%	16	29	1	-	2,250,623	1
106	Sambungan Rumah	1995	1,547,304.00	12.50%	16	29	1	-	1,547,303	1
107	Sambungan Rumah	1995	2,391,288.00	12.50%	16	29	1	-	2,391,287	1
108	Sambungan Rumah	1995	3,375,936.00	12.50%	16	29	1	-	3,375,935	1
109	Sambungan Rumah	1995	11,062,654.00	12.50%	16	29	1	-	11,062,653	1
110	Sambungan Rumah	1995	3,328,556.00	12.50%	16	29	1	-	3,328,555	1
111	Sambungan Rumah	1995	302,596.00	12.50%	16	29	1	-	302,595	1

146	Pemakaian pipa Pangkajene - 80 mm = 2950 M - 100 mm = 2894 M - 50 mm = 460 M - Alat bantu pipa	1997	89,926,804.00	12.50%	16	27	1	-	89,926,803	1
147	Pemasangan pipa - 80 mm = 2950 M - 100 mm = 2894 M - 50 mm = 460 M	1998	67,388,000.00	12.50%	16	26	1	-	67,387,999	1
148	Pemasangan pipa 250 mm 2.000 meter / kontrak 1997	1998	43,600,000.00	12.50%	16	26	1	-	43,599,999	1
149	Pemasangan pipa 250 mm 2.000 meter + alat bantu	1998	178,926,126.50	12.50%	16	26	1	-	178,926,126	1
150	Samb. Langanan 613 bh	1998	93,156,000.00	12.50%	16	26	1	-	93,155,999	1
151	Instalasi Pipa (pipa pusat)	1998	2,183,500.00	12.50%	16	26	1	-	2,183,499	1
152	Instalasi Pipa (Bontoa)	1998	1,500,000.00	12.50%	16	26	1	-	1,499,999	1
153	Instalasi Pipa (Bontoa)	1998	1,175,000.00	12.50%	16	26	1	-	1,174,999	1
154	Instalasi Pipa (Segeri)	1998	495,000.00	12.50%	16	26	1	-	494,999	1
155	Instalasi Pipa (Segeri)	1998	500,000.00	12.50%	16	26	1	-	499,999	1
156	Instalasi Pipa (Segeri)	1998	495,000.00	12.50%	16	26	1	-	494,999	1
157	Instalasi Pipa (Segeri)	1998	4,234,000.00	12.50%	16	26	1	-	4,233,999	1
158	Instalasi Pipa (Segeri)	1998	15,414,000.00	12.50%	16	26	1	-	15,413,999	1
159	Sambungan RT Kabba 160 bh	1998	21,120,000.00	12.50%	16	26	1	-	21,119,999	1
160	Upah kerja 160 SR kabba	1998	3,200,000.00	12.50%	16	26	1	-	3,199,999	1
161	Samb. RT Kabba 80 bh	1998	10,560,000.00	12.50%	16	26	1	-	10,559,999	1
162	Upah kerja 80 SR kabba	1998	1,200,000.00	12.50%	16	26	1	-	1,199,999	1
163	Bunga Masa konstruksi	1996	7,045,608.69	12.50%	16	28	1	-	7,045,608	1
164	Bunga Masa konstruksi	1997	119,016,598.65	12.50%	16	27	1	-	119,016,598	1
165	Bunga Masa konstruksi	1998	67,752,497.19	12.50%	16	26	1	-	67,752,496	1
166	Sambungan Rumah 8 bh	1999	1,216,000.00	12.50%	16	25	1	-	1,215,999	1
167	Sambungan Rumah 8 bh	1999	1,216,000.00	12.50%	16	25	1	-	1,215,999	1
168	Sambungan Rumah 38 bh	1999	5,791,000.00	12.50%	16	25	1	-	5,790,999	1
169	Sambungan Rumah 6 bh	1999	932,000.00	12.50%	16	25	1	-	931,999	1
170	Bunga Masa konstruksi	1999	3,011,945.82	12.50%	16	25	1	-	3,011,945	1
171	Sambungan Rumah 63 bh	1999	13,027,518.00	12.50%	16	25	1	-	13,027,517	1
172	Sambungan Rumah 42 bh	1999	8,979,012.00	12.50%	16	25	1	-	8,979,011	1
173	Sambungan Rumah 43 bh	1999	9,192,798.00	12.50%	16	25	1	-	9,192,797	1
174	Sambungan Rumah 59 bh	1999	12,613,374.00	12.50%	16	25	1	-	12,613,373	1
175	Sambungan Rumah 43 bh	1999	9,192,798.00	12.50%	16	25	1	-	9,192,797	1
176	Sambungan Rumah 93 bh	1999	19,882,098.00	12.50%	16	25	1	-	19,882,097	1

177	Sambungan Rumah 38 bh	1999	8,123,868.00	12.50%	16	25	1	-	8,123,867	1
178	Sambungan Rumah 3 bh	1999	641,358.00	12.50%	16	25	1	-	641,357	1
179	Pengadaan pipa Segeri	1999	1,385,000.00	12.50%	16	25	1	-	1,384,999	1
180	Pemas. Pipa 200 mm 1600 m	1999	28,999,000.00	12.50%	16	25	1	-	28,998,999	1
181	Pemas. Pipa 200 mm 1600 m	1999	87,297,298.00	12.50%	16	25	1	-	87,297,297	1
182	Pemas. Pipa 250 mm 2976 m	1999	64,876,000.00	12.50%	16	25	1	-	64,875,999	1
183	Pemas. Pipa 250 mm 2976 m	1999	253,535,799.00	12.50%	16	25	1	-	253,535,798	1
184	Bunga Masa konstruksi	1999	140,645,729.36	12.50%	16	25	1	-	140,645,728	1
185	Peng. & Pemas. Pipa SLA	1999	365,496,974.00	12.50%	16	25	1	-	365,496,973	1
186	Peng. & Pemas. Pipa SGR	1999	3,414,000.00	12.50%	16	25	1	-	3,413,999	1
187	Bunga Masa konstruksi	1999	123,328,119.72	12.50%	16	25	1	-	123,328,119	1
188	Bunga Masa konstruksi	2000	201,257,194.98	12.50%	16	24	1	-	201,257,194	1
189	Instalasi Pipa / Bungoro	2000	1,251,000.00	12.50%	16	24	1	-	1,250,999	1
190	Sambungan Rumah 30 bh	2000	6,413,580.00	12.50%	16	24	1	-	6,413,579	1
191	Sambungan Rumah 22 bh	2000	4,703,292.00	12.50%	16	24	1	-	4,703,291	1
192	Sambungan Rumah 62 bh	2000	17,530,452.00	12.50%	16	24	1	-	17,530,451	1
193	Sambungan Rumah 41 bh	2000	8,765,226.00	12.50%	16	24	1	-	8,765,225	1
194	Sambungan Rumah 52 bh	2000	11,116,872.00	12.50%	16	24	1	-	11,116,871	1
195	Sambungan Rumah 32 bh	2000	6,841,152.00	12.50%	16	24	1	-	6,841,151	1
196	Inst. Pipa perumahan polres	2000	5,661,300.00	12.50%	16	24	1	-	5,661,299	1
197	Sambungan Rumah 116 bh	2000	24,799,176.00	12.50%	16	24	1	-	24,799,175	1
198	Sambungan Rumah 124 bh	2000	26,509,464.00	12.50%	16	24	1	-	26,509,463	1
199	Sambungan Rumah 59 bh	2000	12,613,374.00	12.50%	16	24	1	-	12,613,373	1
200	Sambungan Rumah 52 bh	2000	11,116,872.00	12.50%	16	24	1	-	11,116,871	1
201	Sambungan Rumah 15 bh	2000	3,206,790.00	12.50%	16	24	1	-	3,206,789	1
202	Sambungan Rumah 32 bh	2000	6,841,152.00	12.50%	16	24	1	-	6,841,151	1
203	upah Kerja 12 bh SR	2000	324,000.00	12.50%	16	24	1	-	323,999	1
204	Bunga Masa konstruksi (SLA)	2000	103,084,176.10	12.50%	16	24	1	-	103,084,175	1
205	Instalasi Pipa GIP	2000	1,800,000.00	12.50%	16	24	1	-	1,799,999	1
206	Instalasi Pipa Gentung	2000	8,000,000.00	12.50%	16	24	1	-	7,999,999	1
207	Pemasangan pipa PVC 250 MM (Swak)	2001	5,000,000.00	12.50%	16	23	1	-	4,999,999	1
208	Pemasangan pipa PVC 250 MM (Swak)	2001	5,000,000.00	12.50%	16	23	1	-	4,999,999	1
209	Pemasangan pipa PVC 250 MM (Swak)	2001	5,000,000.00	12.50%	16	23	1	-	4,999,999	1

210	Pemasangan pipa PVC 250 MM (Swak)	2001	5,000,000.00	12.50%	16	23	1	-	4,999,999	1
211	Pemasangan pipa PVC 250 MM (Swak)	2001	5,000,000.00	12.50%	16	23	1	-	4,999,999	1
212	Pemasangan Jembatan pipa	2001	7,660,000.00	12.50%	16	23	1	-	7,659,999	1
213	Interkoneksi pipa	2001	1,849,000.00	12.50%	16	23	1	-	1,848,999	1
214	Tower	2001	2,141,782,387.42	5.00%	20	23	1	-	2,141,782,386	1
215	Pemas.Pipa PVC 75(1.500 M) dan 50 MM (1.000 M)	2002	46,950,000.00	12.50%	16	22	1	-	46,949,999	1
216	Pemas Pipa PVC 100 (3,600 M) dan 50 mm (1,500 M)	2002	124,600,000.00	12.50%	16	22	1	-	124,599,999	1
217	Peng.Pipa PVC 100 (3,600 M) dan 75 (1,500 M) 50 (	2002	259,600,000.00	12.50%	16	22	1	-	259,599,999	1
218	Pengadaan Sambungan Rumah	2002	123,800,000.00	12.50%	16	22	1	-	123,799,999	1
219	pemas.pipa PVC Dia 250 mm (5,520 M)	2002	168,580,000.00	12.50%	16	22	1	-	168,579,999	1
220	Pengadaan Pipa Pvc Dia 250 MM (5.520 M)	2002	481,637,000.00	12.50%	16	22	1	-	481,636,999	1
221	Pemas.Pipa PVC Dia 150 (3,228 M) dan 50 MM (4,1	2002	170,715,000.00	12.50%	16	22	1	-	170,714,999	1
222	Pemas Pipa PVC 250 (337 M) dan 200 mm (342 M)	2002	24,000,000.00	12.50%	16	22	1	-	23,999,999	1
223	Pengadaan Pipa Pvc Dia 250 MM (337 M) & 200 MM	2002	125,814,000.00	12.50%	16	22	1	-	125,813,999	1
224	Pemas.Pipa PVC 150 MM (2,000 M) & 50 MM (1,200	2002	111,360,000.00	12.50%	16	22	1	-	111,359,999	1
225	Pemas . Pipa PVC dia 150 MM (1,400 M)	2002	43,680,000.00	12.50%	16	22	1	-	43,679,999	1
226	Pemas.Pipa PVC 75 MM (3,000 M)	2002	77,620,000.00	12.50%	16	22	1	-	77,619,999	1
227	Peng. Pipa PVC 150 MM (3.400 M),75 MM (3,000),5	2002	427,020,000.00	12.50%	16	22	1	-	427,019,999	1
228	Sambungan Rumah 30 bh	2004	4,500,000.00	12.50%	16	20	1	-	4,499,999	1
229	Stop Kran 6 Inci.	2004	2,574,000.00	12.50%	16	20	1	-	2,573,999	1
230	Sambungan Rumah	2005	54,703,200.00	12.50%	16	19	1	-	54,703,199	1
231	Instalasi sambungan rumah	2006	130,174,350.00	12.50%	16	18	1	-	130,174,349	1
232	Pengadaan dan pemasangan gate valve dia 150 mm	2006	1,916,000.00	12.50%	16	18	1	-	1,915,999	1
233	linterkoneksi pipa dia 150 x 50 mm	2006	1,464,000.00	12.50%	16	18	1	-	1,463,999	1
234	Instalasi sambungan rumah	2007	101,584,800.00	12.50%	16	17	1	-	101,584,799	1
235	INTERKONEKSI PIPA DIA 150 MM X 75 MM	2007	3,783,000.00	12.50%	16	17	1	-	3,782,999	1
SUB JUMLAH			9,356,690,113.00				234	-	9,356,689,879	235
BANGUNAN GEDUNG										
							Nilai buku	Penyusutan	Ak.Penyusutan	Nilai Buku
				Tarif	Um. Eknm	umur	2023	2024		
1	R. Pompa, R.Jaga, R. Genset	1982	15,200,633.60	5%	20	42	1	-	15,200,633	1
2	Pembuatan Pagar Kantor	1984	3,054,000.00	5%	20	40	1	-	3,053,999	1
3	Pembuatan Trotoar	1992	622,150.00	5%	20	32	1	-	622,149	1
4	Penamb. Ruang Kantor	1993	2,600,000.00	5%	20	31	1	-	2,599,999	1
5	Paving Blok	1993	1,500,000.00	5%	20	31	1	-	1,499,999	1
6	Bg. Inst. Pengab. Air M. Tangki	1994	2,150,000.00	5%	20	30	1	-	2,149,999	1
7	Bg. Pagar Kantor IKK segera	1994	2,870,000.00	5%	20	30	1	-	2,869,999	1
8	Pengaspalan jl. S. jatie	1994	19,000,000.00	5%	20	30	1	-	18,999,999	1

9	Pemb. Ktr. IKK Segeri	1994	18,482,000.00	5%	20	30	1	-	18,481,999	1
10	Pemb. Ktr. Unit Gentung	1995	6,600,000.00	5%	20	29	1	-	6,599,999	1
11	Pagar halaman Tower	1997	43,455,150.00	5%	20	27	1	-	43,455,149	1
12	Doukker	1997	7,610,440.00	5%	20	27	1	-	7,610,439	1
13	Bunga Masa Kostruksi	1997	11,868,125.70	5%	20	27	1	-	11,868,125	1
14	Bunga Masa Kostruksi	1999	7,551,922.50	5%	20	25	1	-	7,551,922	1
15	Bunga Masa Kostruksi	2000	8,481,814.65	5%	20	24	1	-	8,481,814	1
16	Bangunan Garasi Mobil Tangki	2002	13,373,300.00	5%	20	22	1	-	13,373,299	1
17	Bangunan Rumah Jaga Tower (APBD)	2001	25,000,000.00	5%	20	23	1	-	24,999,999	1
18	Bangunan Bengkel Meter	2003	51,540,000.00	5%	20	21	1	-	51,539,999	1
19	Tambahan Rumah Jaga Tower	2003	16,042,000.00	5%	20	21	1	-	16,041,999	1
SUB JUMLAH			257,001,536.45				18	-	257,001,518	19
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN										
							Nilai buku	Penyusutan	Ak.Penyusutan	Nilai Buku
				Tarif	Um. Eknm	umur	2023	2024		
1	Pesawat Komunikasi	1984	1,690,000.00	25%	8	40	1	-	1,689,999	1
2	Pesawat Telepon	1984	150,000.00	25%	8	40	1	-	149,999	1
3	Antena Pesawat	1984	319,500.00	25%	8	40	1	-	319,499	1
4	Mesin Pemotong Rumput	1985	200,000.00	25%	8	39	1	-	199,999	1
5	Kunci Sok	1987	30,000.00	25%	8	37	1	-	29,999	1
6	Alat Laboratorium	1989	650,000.00	25%	8	35	1	-	649,999	1
7	Kompressor	1992	375,000.00	25%	8	32	1	-	374,999	1
8	Handy Talki	1994	1,350,000.00	25%	8	30	1	-	1,349,999	1
9	Senei pipa 1/2 s/d 2"	1994	65,000.00	25%	8	30	1	-	64,999	1
10	Handy Talki	1994	495,000.00	25%	8	30	1	-	494,999	1
11	Pompa minyak	1994	65,000.00	25%	8	30	1	-	64,999	1
12	Senei pipa 1/2 s/d 2"	1994	204,000.00	25%	8	30	1	-	203,999	1
13	Kereta Dorong	1994	65,000.00	25%	8	30	1	-	64,999	1
14	Alat bantu Handy talki	1994	350,000.00	25%	8	30	1	-	349,999	1
15	Spoit Diko	1994	80,000.00	25%	8	30	1	-	79,999	1
16	Pompa Air	1994	120,000.00	25%	8	30	1	-	119,999	1
17	Mesing Gurinda	1995	140,000.00	25%	8	29	1	-	139,999	1
18	Mesin Bor Listrik	1995	160,000.00	25%	8	29	1	-	159,999	1
19	Mesin Ketam Listrik	1995	315,000.00	25%	8	29	1	-	314,999	1
20	Pesawat Telepon	1996	250,000.00	25%	8	28	1	-	249,999	1
21	Antena Parabola	1996	900,000.00	25%	8	28	1	-	899,999	1
22	Catok + senei	1996	100,000.00	25%	8	28	1	-	99,999	1
24	Pesawat Telepon	1996	323,100.00	25%	8	28	1	-	323,099	1

25	Antena Pesawat HT	1997	115,500.00	25%	8	27	1	-	115,499	1
26	Handy Talki	1999	975,000.00	25%	8	25	1	-	974,999	1
27	Pompa air	2000	2,497,000.00	25%	8	24	1	-	2,496,999	1
29	Mesin Alkon 2 Inci	2007	2,300,000.00	25%	8	17	1	-	2,299,999	1
30	Mesin Pemotong Rumput 1 Bh	2008	1,000,000.00	25%	8	16	1	-	999,999	1
31	Faximile	1996	1,600,000.00	50%	4	28	1	-	1,599,999	1
32	Kalkulator Listrik	2001	1,000,000.00	50%	4	23	1	-	999,999	1
33	Mesin Alkon 2 Inci	2009	1,450,000.00	25%	8	15	1	-	1,449,999	1
34	Mesin Alkon 2 Inci	2009	1,250,000.00	25%	8	15	1	-	1,249,999	1
35	Mesin Alkon 2 Inci	2010	1,250,000.00	25%	8	14	1	-	1,249,999	1
36	Mesin Alkon 3 Inci	2010	1,750,000.00	25%	8	14	1	-	1,749,999	1
37	Mesin Alkon 2 Inci	2011	1,250,000.00	25%	8	13	1	-	1,249,999	1
38	Mesin Alkon 2 Inci	2011	1,620,000.00	25%	8	13	1	-	1,619,999	1
39	Mesin Alkon	2012	1,525,000.00	25%	8	12	1	-	1,524,999	1
40	Pompa Embara	2012	6,900,000.00	25%	8	12	1	-	6,899,999	1
41	Mesin Pompa	2012	1,750,000.00	25%	8	12	1	-	1,749,999	1
42	Pesawat komujnikasi (HT)	2012	4,400,000.00	25%	8	12	1	-	4,399,999	1
43	1 unit Kompresor	2013	1,330,000.00	25%	8	11	1	-	1,329,999	1
44	1 unit Alkon	2013	1,650,000.00	25%	8	11	1	-	1,649,999	1
45	1 unit Alkon	2013	1,650,000.00	25%	8	11	1	-	1,649,999	1
46	1 unit Alkon DM 2"	2014	1,900,000.00	25%	8	10	1	-	1,899,999	1
47	1 unit Alkon DM 3"	2014	2,400,000.00	25%	8	10	1	-	2,399,999	1
48	1 unit Alkon DM 3"	2014	2,900,000.00	25%	8	10	1	-	2,899,999	1
49	1 unit Alkon DM 3"	2014	2,150,000.00	25%	8	10	1	-	2,149,999	1
50	1 unit katrol	2015	1,100,000.00	25%	8	9	1	-	1,099,999	1
51	1 unit Alkon DM 2"	2015	1,875,000.00	25%	8	9	1	-	1,874,999	1
	SUB JUMLAH		57,984,100.00				48	-	57,984,051	49
	KENDARAAN / ALAT PENGANGKUTAN									
							Nilai buku	Penyusutan	Ak.Penyusutan	Nilai Buku
				Tarif	Um. Eknm	umur	2023	2024		
5	Mobil kijang Pick Up DD 8146 JE	1988	12,000,000.00	25%	8	36	1	-	11,999,999	1
9	Kapal Tangki Air	1990	52,467,000.00	25%	8	34	1	-	52,466,999	1
10	Mobil Tangki Air	1990	37,980,666.00	25%	8	34	1	-	37,980,665	1
11	Kapal Tangki Air	1991	99,985,000.00	25%	8	33	1	-	99,984,999	1
12	Mobil Tangki Air	1991	42,240,000.00	25%	8	33	1	-	42,239,999	1
15	Mobil Tangki Air	1992	84,900,000.00	25%	8	32	1	-	84,899,999	1
23	Mobil Kijang DD 679 E	1994	33,900,000.00	25%	8	30	1	-	33,899,999	1
25	Mobil Tangki Air	1995	46,160,000.00	25%	8	29	1	-	46,159,999	1

26	Mobil kijang Pick Up DD 8995 JE	1995	25,400,000.00	25%	8	29	1	-	25,399,999	1
28	Mobil kijang Pick Up DD 8008 E	1996	29,094,500.00	25%	8	28	1	-	29,094,499	1
29	Mobil Dump Truk	1996	55,112,000.00	25%	8	28	1	-	55,111,999	1
1	Sepeda Motor	1982	875,000.00	50%	4	42	1	-	874,999	1
2	Sepeda Motor	1983	1,225,000.00	50%	4	41	1	-	1,224,999	1
3	Sepeda Motor	1983	1,100,000.00	50%	4	41	1	-	1,099,999	1
4	Sepeda Motor	1984	1,200,000.00	50%	4	40	1	-	1,199,999	1
6	Sepeda Motor	1989	2,243,500.00	50%	4	35	1	-	2,243,499	1
7	Sepeda Motor	1989	2,525,000.00	50%	4	35	1	-	2,524,999	1
8	Sepeda Motor	1990	2,729,000.00	50%	4	34	1	-	2,728,999	1
13	Sepeda Motor	1991	3,000,000.00	50%	4	33	1	-	2,999,999	1
14	Sepeda Motor	1991	3,000,000.00	50%	4	33	1	-	2,999,999	1
16	Sepeda Motor	1992	5,800,000.00	50%	4	32	1	-	5,799,999	1
17	Sepeda	1992	440,000.00	50%	4	32	1	-	439,999	1
18	Tambahan Harga Motor	1993	800,000.00	50%	4	31	1	-	799,999	1
19	Sepeda Motor	1993	10,806,750.00	50%	4	31	1	-	10,806,749	1
20	Sepeda	1993	885,000.00	50%	4	31	1	-	884,999	1
21	Sepeda motor	1994	3,760,000.00	50%	4	30	1	-	3,759,999	1
22	Sepeda Motor	1994	3,825,000.00	50%	4	30	1	-	3,824,999	1
24	Sepeda Motor	1994	4,150,000.00	50%	4	30	1	-	4,149,999	1
27	Sepeda Motor	1995	4,150,000.00	50%	4	29	1	-	4,149,999	1
30	Sepeda Motor 8 bh	1997	38,726,000.00	50%	4	27	1	-	38,725,999	1
31	Sepeda Motor	1998	15,740,000.00	50%	4	26	1	-	15,739,999	1
32	Sepeda Motor	2000	350,000.00	50%	4	24	1	-	349,999	1
33	Sepeda Motor 2 Buah	2003	27,663,632.00	50%	4	21	1	-	27,663,631	1
SUB JUMLAH			654,233,048.00				33	-	654,233,015	33
INVENTARIS / PERABOT KANTOR										
							Nilai buku	Penyusutan	Ak.Penyusutan	Nilai Buku
				Tarif	Um. Eknm	umur	2024	2023		
1	Mesin Ketik	1982	375,000.00	50%	4	42	1	-	374,999	1
2	Kalkulator	1982	68,000.00	50%	4	42	1	-	67,999	1
3	Tustel	1982	-	50%	4	42	-	-	-	-
4	Mesin Ketik	1982	180,000.00	50%	4	42	1	-	179,999	1
5	Meja 1/2 Biro	1982	47,500.00	50%	4	42	1	-	47,499	1
6	Cax Box	1983	90,000.00	50%	4	41	1	-	89,999	1
7	Panel Gambar	1983	100,000.00	50%	4	41	1	-	99,999	1
8	Meja Kerja	1983	160,000.00	50%	4	41	1	-	159,999	1
9	Kursi	1983	20,000.00	50%	4	41	1	-	19,999	1

10	Mesin Ketik	1983	225,000.00	50%	4	41	1	-	224,999	1
11	Almari	1983	350,000.00	50%	4	41	1	-	349,999	1
12	Meja Kerja	1983	90,000.00	50%	4	41	1	-	89,999	1
13	Kursi	1983	30,000.00	50%	4	41	1	-	29,999	1
14	Kursi Tamu	1983	80,000.00	50%	4	41	1	-	79,999	1
15	Kipas Angin	1983	75,000.00	25%	8	41	1	-	74,999	1
16	Meja Kerja	1984	45,000.00	50%	4	40	1	-	44,999	1
17	Mesin Ketik	1984	225,000.00	50%	4	40	1	-	224,999	1
18	Kalkulator	1984	50,000.00	50%	4	40	1	-	49,999	1
19	Lemari Arsip	1984	100,000.00	50%	4	40	1	-	99,999	1
20	Pelbed	1984	40,000.00	50%	4	40	1	-	39,999	1
21	Helm	1985	32,000.00	50%	4	39	1	-	31,999	1
22	Kalkulator	1988	20,000.00	50%	4	36	1	-	19,999	1
23	Timbangan	1988	9,000.00	50%	4	36	1	-	8,999	1
24	Mesin Ketik	1989	824,750.00	50%	4	35	1	-	824,749	1
25	Panel Gambar J. Pipa	1989	100,000.00	50%	4	35	1	-	99,999	1
26	Lemari Kayu	1990	150,000.00	50%	4	34	1	-	149,999	1
27	Perangkat Komputer	1990	3,500,000.00	50%	4	34	1	-	3,499,999	1
28	Kusri dan Meja	1990	365,000.00	50%	4	34	1	-	364,999	1
29	Mesin Ketik	1991	275,000.00	50%	4	33	1	-	274,999	1
30	Meja 1/2 Biro	1991	150,000.00	50%	4	33	1	-	149,999	1
31	Meja 1/2 Biro	1991	150,000.00	50%	4	33	1	-	149,999	1
32	Meja Komputer	1991	500,000.00	50%	4	33	1	-	499,999	1
33	Kursi	1991	137,500.00	50%	4	33	1	-	137,499	1
34	Meja Biro	1991	300,000.00	50%	4	33	1	-	299,999	1
35	Kursi	1992	395,000.00	50%	4	32	1	-	394,999	1
36	Kursi Tamu	1992	350,000.00	50%	4	32	1	-	349,999	1
37	Meja Kerja	1992	815,000.00	50%	4	32	1	-	814,999	1
38	Meja + Kursi	1992	290,000.00	50%	4	32	1	-	289,999	1
39	Meja Gambar	1992	400,000.00	50%	4	32	1	-	399,999	1
40	Mistar Gambar	1992	525,000.00	50%	4	32	1	-	524,999	1
41	Meja Komputer	1992	225,000.00	50%	4	32	1	-	224,999	1
42	Stabilizer ut. Komputer	1992	115,000.00	50%	4	32	1	-	114,999	1
43	Almari	1992	1,295,000.00	50%	4	32	1	-	1,294,999	1
44	Papan Whiteboard	1992	140,000.00	50%	4	32	1	-	139,999	1
45	R a k	1992	170,000.00	50%	4	32	1	-	169,999	1
46	AC	1992	1,370,000.00	50%	4	32	1	-	1,369,999	1
47	Papan nama Kantor	1992	650,000.00	50%	4	32	1	-	649,999	1
48	Pelbed	1992	107,000.00	50%	4	32	1	-	106,999	1
49	Meja telepon	1992	50,000.00	50%	4	32	1	-	49,999	1

50	Kalkulator	1992	50,000.00	50%	4	32	1	-	49,999	1
51	Komputer	1992	3,500,000.00	50%	4	32	1	-	3,499,999	1
52	Komputer (panjar)	1992	1,250,000.00	50%	4	32	1	-	1,249,999	1
53	Tambahan harga Komputer	1993	1,500,000.00	50%	4	31	1	-	1,499,999	1
54	Komputer	1993	2,750,000.00	50%	4	31	1	-	2,749,999	1
55	Pengaman Telepon	1993	80,000.00	50%	4	31	1	-	79,999	1
56	Meja + Kursi	1993	1,050,000.00	50%	4	31	1	-	1,049,999	1
57	Kursi Tamu	1993	300,000.00	50%	4	31	1	-	299,999	1
58	Kursi + Meja Darma Wanita	1993	620,000.00	50%	4	31	1	-	619,999	1
59	Meja	1993	350,000.00	50%	4	31	1	-	349,999	1
60	AC	1993	475,000.00	25%	8	31	1	-	474,999	1
61	Almari Arsip	1993	1,490,000.00	25%	8	31	1	-	1,489,999	1
62	Almari Arsip	1994	350,000.00	25%	8	30	1	-	349,999	1
63	Almari Arsip	1994	350,000.00	25%	8	30	1	-	349,999	1
64	Almari Arsip	1994	350,000.00	25%	8	30	1	-	349,999	1
65	Almari Arsip	1994	350,000.00	25%	8	30	1	-	349,999	1
66	Almari Arsip	1994	350,000.00	25%	8	30	1	-	349,999	1
67	Almari Arsip	1994	350,000.00	25%	8	30	1	-	349,999	1
68	Kursi Logam	1994	136,500.00	25%	8	30	1	-	136,499	1
69	Almari Arsip	1994	350,000.00	25%	8	30	1	-	349,999	1
70	Almari Arsip	1994	350,000.00	25%	8	30	1	-	349,999	1
71	Almari Arsip	1994	700,000.00	25%	8	30	1	-	699,999	1
72	Kipas Angin	1994	85,000.00	25%	8	30	1	-	84,999	1
73	Almari Arsip	1994	700,000.00	25%	8	30	1	-	699,999	1
74	Meja	1994	175,000.00	50%	4	30	1	-	174,999	1
75	R a k	1994	185,000.00	50%	4	30	1	-	184,999	1
76	Almari Gantung	1994	85,000.00	50%	4	30	1	-	84,999	1
77	Meja	1994	350,000.00	50%	4	30	1	-	349,999	1
78	Kursi tamu	1994	77,000.00	50%	4	30	1	-	76,999	1
79	Kursi Logam	1994	180,000.00	50%	4	30	1	-	179,999	1
80	Komputer	1994	3,750,000.00	50%	4	30	1	-	3,749,999	1
81	Meja Komputer	1994	85,000.00	50%	4	30	1	-	84,999	1
82	Tustel	1994	295,000.00	50%	4	30	1	-	294,999	1
83	Panel Gambar	1994	460,000.00	50%	4	30	1	-	459,999	1
84	Mesin Absensi	1994	2,900,000.00	50%	4	30	1	-	2,899,999	1
85	AC	1995	2,400,000.00	25%	8	29	1	-	2,399,999	1
86	Antena Pesawat Komunikasi	1995	67,500.00	25%	8	29	1	-	67,499	1
87	Mesin Jahit Listrik	1995	250,000.00	25%	8	29	1	-	249,999	1
88	Mikrophone	1995	149,000.00	25%	8	29	1	-	148,999	1
89	Sirine Mobil	1995	111,500.00	25%	8	29	1	-	111,499	1

90	Kipas Angin	1995	85,000.00	25%	8	29	1	-	84,999	1
91	AC	1995	1,175,000.00	25%	8	29	1	-	1,174,999	1
92	Kursi Logam	1995	144,000.00	25%	8	29	1	-	143,999	1
93	AC	1995	2,476,000.00	25%	8	29	1	-	2,475,999	1
94	Tape mobil	1995	447,500.00	50%	4	29	1	-	447,499	1
95	Tape mobil	1995	800,000.00	50%	4	29	1	-	799,999	1
96	Tustel	1995	255,000.00	50%	4	29	1	-	254,999	1
97	Mesin Ketik	1995	295,000.00	50%	4	29	1	-	294,999	1
98	Almari 2 Pintu	1995	350,000.00	50%	4	29	1	-	349,999	1
99	Dipan	1995	230,000.00	50%	4	29	1	-	229,999	1
100	Almari 2 Pintu	1995	350,000.00	50%	4	29	1	-	349,999	1
101	Meja 1/2 Biro	1995	75,000.00	50%	4	29	1	-	74,999	1
102	Almari 2 Pintu	1995	700,000.00	50%	4	29	1	-	699,999	1
103	Almari 2 Pintu	1995	350,000.00	50%	4	29	1	-	349,999	1
104	AC	1996	1,925,000.00	25%	8	28	1	-	1,924,999	1
105	Almari 2 Pintu	1996	350,000.00	50%	4	28	1	-	349,999	1
106	TV. Color 14"	1996	490,000.00	50%	4	28	1	-	489,999	1
107	TV. Color 20"	1996	1,650,000.00	50%	4	28	1	-	1,649,999	1
108	Almari 2 Pintu	1996	350,000.00	50%	4	28	1	-	349,999	1
109	Kursi Fropit	1996	375,000.00	50%	4	28	1	-	374,999	1
110	Cas Box	1996	475,000.00	50%	4	28	1	-	474,999	1
111	Meja Kerja	1996	240,000.00	50%	4	28	1	-	239,999	1
112	Kursi Tamu	1996	802,500.00	50%	4	28	1	-	802,499	1
113	Almari 2 Pintu	1996	350,000.00	50%	4	28	1	-	349,999	1
114	Almari 2 Pintu	1996	350,000.00	50%	4	28	1	-	349,999	1
115	Komputer + Printer	1996	5,200,000.00	50%	4	28	1	-	5,199,999	1
116	Kursi Rapat	1996	1,540,000.00	50%	4	28	1	-	1,539,999	1
117	Meja Rapat	1996	660,000.00	50%	4	28	1	-	659,999	1
118	Kursi Putar	1996	200,000.00	50%	4	28	1	-	199,999	1
119	Mesin Ketik Listrik	1996	400,000.00	50%	4	28	1	-	399,999	1
120	Tempat Sampah	1996	175,000.00	50%	4	28	1	-	174,999	1
121	Almari Bori	1996	150,000.00	50%	4	28	1	-	149,999	1
122	Meja Kantor	1996	1,650,000.00	50%	4	28	1	-	1,649,999	1
123	Printer	1996	3,410,000.00	50%	4	28	1	-	3,409,999	1
124	Kulkas 1 bh	1997	715,000.00	50%	4	27	1	-	714,999	1
125	Dispenser 1 bh	1997	550,000.00	50%	4	27	1	-	549,999	1
126	Meja Kerja 5 bh	1997	425,000.00	50%	4	27	1	-	424,999	1
127	Komputer 1 unit (laptop acer)	1997	4,235,000.00	50%	4	27	1	-	4,234,999	1
128	Almari 2 bh	1997	650,000.00	50%	4	27	1	-	649,999	1
129	Meja kerja 4 bh	1998	340,000.00	50%	4	26	1	-	339,999	1

130	Meja kerja 5 bh	1998	425,000.00	50%	4	26	1	-	424,999	1
131	Almari Koperasi (Segeri)	1998	480,000.00	50%	4	26	1	-	479,999	1
132	Meja kerja 2 bh (Gentung)	1998	750,000.00	50%	4	26	1	-	749,999	1
133	Mesin Ketik 1 bh	1999	1,150,000.00	50%	4	25	1	-	1,149,999	1
134	Almari 1 bh	1999	750,000.00	50%	4	25	1	-	749,999	1
135	Kursi Plastik 2 set	2000	400,000.00	50%	4	24	1	-	399,999	1
136	Kursi 3,2,1 1 set	2000	1,500,000.00	50%	4	24	1	-	1,499,999	1
137	Rosban Kipas 1 bh	2000	375,000.00	50%	4	24	1	-	374,999	1
138	Meja Kerja 1 bh	2000	250,000.00	50%	4	24	1	-	249,999	1
139	Kursi Putura 4 bh	2000	600,000.00	50%	4	24	1	-	599,999	1
140	kursi Lipat 4 bh + 2 k.kerja	2000	600,000.00	50%	4	24	1	-	599,999	1
141	Kursi tamu 1 set	2000	2,800,000.00	50%	4	24	1	-	2,799,999	1
142	Kipas Angin	2001	90,000.00	25%	8	23	1	-	89,999	1
143	Kipas Angin	2001	180,000.00	25%	8	23	1	-	179,999	1
144	Meja 1/2 Biro	2001	375,000.00	50%	4	23	1	-	374,999	1
145	Meja 1/2 Biro	2001	250,000.00	50%	4	23	1	-	249,999	1
146	Sekat Rotan	2001	250,000.00	50%	4	23	1	-	249,999	1
147	kursi lipat	2001	1,875,000.00	50%	4	23	1	-	1,874,999	1
148	Komputer dan Printer	2001	5,700,000.00	50%	4	23	1	-	5,699,999	1
149	Tafe Recorder	2002	480,000.00	50%	4	22	1	-	479,999	1
150	Komputer Dan Printer	2002	7,260,000.00	50%	4	22	1	-	7,259,999	1
151	Komputer P.III 5 Unit	2003	27,500,000.00	50%	4	21	1	-	27,499,999	1
152	Komputer 1 Unit	2003	2,502,500.00	50%	4	21	1	-	2,502,499	1
153	Printer LX - 300+ 5 Unit	2003	9,750,000.00	50%	4	21	1	-	9,749,999	1
154	UPS 3 Unit	2003	3,550,000.00	50%	4	21	1	-	3,549,999	1
155	Printer LQ - 2180 1 Unit	2003	5,800,000.00	50%	4	21	1	-	5,799,999	1
156	Televisi 20 Inci	2003	1,495,000.00	50%	4	21	1	-	1,494,999	1
157	AC Split 1/2 PK, 1 Unit	2004	5,000,000.00	25%	8	20	1	-	4,999,999	1
158	Komputer, 3 Unit	2004	21,425,000.00	50%	4	20	1	-	21,424,999	1
159	Printer LX 300+, 1 Unit	2004	1,950,000.00	50%	4	20	1	-	1,949,999	1
160	Kursi Lipat Merk Chitose, 6 Unit	2004	810,000.00	50%	4	20	1	-	809,999	1
161	Meja 1/2 Biro, 6 Buah	2004	1,650,000.00	50%	4	20	1	-	1,649,999	1
162	Kalkulator, 4 Buah	2004	215,000.00	50%	4	20	1	-	214,999	1
163	UPS 1000 VA, 1 Buah	2004	1,950,000.00	50%	4	20	1	-	1,949,999	1
164	Monitor Vistek 14 Inci, 1 Buah	2004	850,000.00	50%	4	20	1	-	849,999	1
165	AC 1/2 PK	2005	5,500,000.00	25%	8	19	1	-	5,499,999	1
166	Printer LX 300+, 1 Unit	2005	1,950,000.00	50%	4	19	1	-	1,949,999	1
167	Kursi Putar	2005	880,000.00	50%	4	19	1	-	879,999	1
168	Scanner	2005	745,000.00	50%	4	19	1	-	744,999	1
169	Meja Komputer	2005	650,000.00	50%	4	19	1	-	649,999	1

170	1 BUAH PRINTER CANON	2006	650,000.00	50%	4	18	1	-	649,999	1
171	1 BUAH MEJA 1/2 BIRO	2006	975,000.00	50%	4	18	1	-	974,999	1
172	1 BUAH MESIN ALKON	2006	1,567,500.00	25%	8	18	1	-	1,567,499	1
173	Printer Canon 2 Buah	2007	1,500,000.00	50%	4	17	1	-	1,499,999	1
174	Kursi Putar Isabel 1 Buah	2007	215,000.00	50%	4	17	1	-	214,999	1
175	Kursi Tamu 1 Set	2007	210,000.00	50%	4	17	1	-	209,999	1
176	Pesawat Telepon Asia Phone 8688 1 Buah	2007	150,000.00	25%	8	17	1	-	149,999	1
177	KOMPUTER LAPTOP 1 Bh	2008	11,715,000.00	50%	4	16	1	-	11,714,999	1
178	MEJA KERJA 2 BH	2008	1,825,000.00	50%	4	16	1	-	1,824,999	1
179	MEJA KOMPUTER 1 BH	2008	550,000.00	50%	4	16	1	-	549,999	1
180	BUAH FUN ELEKTRIK MSP DAN JAM DINDING IK	2008	225,000.00	50%	4	16	1	-	224,999	1
181	1 BH TELEVISI TCL IKK SEGERI	2008	1,340,000	50%	4	16	1	-	1,339,999	1
182	1 BH TELEVISI TOSHIBA IKK BONTA	2008	1,124,000	50%	4	16	1	-	1,123,999	1
183	1 BH MEJA KASIR	2008	2,150,000	50%	4	16	1	-	2,149,999	1
184	6 BH KURSI CHITOSE BR IKK SEGERI	2008	1,170,000	25%	8	16	1	-	1,169,999	1
185	Printer Epson LX-300 + II	2009	2,530,000	50%	4	15	1	-	2,529,999	1
186	Kursi Putar	2009	535,000	50%	4	15	1	-	534,999	1
187	Printer Canon iP 1980	2009	850,000	50%	4	15	1	-	849,999	1
188	Kipas angin	2009	219,000	50%	4	15	1	-	218,999	1
189	Faximile	2009	1,299,000	50%	4	15	1	-	1,298,999	1
190	Printer Canon iP 1980	2009	850,000	50%	4	15	1	-	849,999	1
191	Kursi Kerja	2009	550,000	50%	4	15	1	-	549,999	1
192	Meja kerja 1/2 biro	2009	750,000	50%	4	15	1	-	749,999	1
193	Almari arsip 2 pintu	2009	2,035,000	50%	4	15	1	-	2,034,999	1
194	Alat komunikasi	2009	1,327,000	50%	4	15	1	-	1,326,999	1
195	Printer Epson LX-300 + II	2009	2,530,000	50%	4	15	1	-	2,529,999	1
196	Kipas angin	2009	197,500	50%	4	15	1	-	197,499	1
197	pesawat telepon	2009	179,000	50%	4	15	1	-	178,999	1
198	Mesin absensi	2009	3,250,000	50%	4	15	1	-	3,249,999	1
199	Kamera digital	2009	600,000	50%	4	15	1	-	599,999	1
200	1 buah Kipas angin	2010	250,000	50%	4	14	1	-	249,999	1
201	1 buah Televisi 14"	2010	970,000	50%	4	14	1	-	969,999	1
202	1 buah Monitor	2010	700,000	50%	4	14	1	-	699,999	1
203	Monitor 1 bh	2011	950,000	50%	4	13	1	-	949,999	1
204	Televisi 1 bh	2011	825,000	50%	4	13	1	-	824,999	1
205	Kursi futura 6 bh	2011	1,650,000	50%	4	13	1	-	1,649,999	1
206	Printer 1 bh	2011	360,000	50%	4	13	1	-	359,999	1
207	Kipas angin 1 bh	2011	265,000	25%	8	13	1	-	264,999	1
208	Meja 1/2 biro 3 bh	2011	2,250,000	50%	4	13	1	-	2,249,999	1
209	Kipas angin 1 bh	2011	275,000	50%	4	13	1	-	274,999	1

210	Printer 1 bh	2011	800,000	50%	4	13	1	-	799,999	1
211	6 buah kuri + 1 buah Rak	2011	1,700,000	25%	8	13	1	-	1,699,999	1
212	Printer 1 buah	2011	770,000	50%	4	13	1	-	769,999	1
213	Monitor 1 buah	2011	850,000	50%	4	13	1	-	849,999	1
214	Kamera Digital 1 bh	2011	799,000	50%	4	13	1	-	798,999	1
215	Monitor 1 bh	2011	850,000	50%	4	13	1	-	849,999	1
216	Monitor 1 bh	2011	850,000	50%	4	13	1	-	849,999	1
217	CPU	2012	2,152,000	50%	4	12	1	-	2,151,999	1
218	Kursi kerja(lipat) 6 bh	2012	1,380,000	25%	8	12	1	-	1,379,999	1
219	Note book Acer ASP	2012	2,775,000	50%	4	12	1	-	2,774,999	1
220	Printer Epson LX-300 + II	2012	1,850,000	50%	4	12	1	-	1,849,999	1
221	5 unit Laptop	2013	20,250,000	50%	4	11	1	-	20,249,999	1
222	1 unit CPU	2013	2,475,000	50%	4	11	1	-	2,474,999	1
223	1 unit Laptop	2013	4,050,000	50%	4	11	1	-	4,049,999	1
224	1 unit Laptop ACER	2013	4,500,000	50%	4	11	1	-	4,499,999	1
225	3 unit Meja kerja 1/2 biro	2013	2,550,000	50%	4	11	1	-	2,549,999	1
226	1 unit Printer Epson Lx310	2014	2,350,000	50%	4	10	1	-	2,349,999	1
227	1 unit Printer Epson Lx310	2015	2,350,000	50%	4	9	1	-	2,349,999	1
228	1 unit LCD Projektorinfokus	2015	4,750,000	50%	4	9	1	-	4,749,999	1
229	1 unit Printer Epson Lx310	2015	2,350,000	50%	4	9	1	-	2,349,999	1
230	1 unit Printer Epson Lx310	2015	2,350,000	50%	4	9	1	-	2,349,999	1
231	1 unit CVU	2016	2,930,000	50%	4	8	1	-	2,929,999	1
232	1 unit Printer Epson Lx310	2016	2,450,000	50%	4	8	1	-	2,449,999	1
233	1 unit Komputer	2016	3,975,000	50%	4	8	1	-	3,974,999	1
234	1 unit Monitor	2016	1,100,000	50%	4	8	1	-	1,099,999	1
235	1 unit CVU	2017	3,100,000	50%	4	7	1	-	3,099,999	1
236	1 unit Warles Xelulani 2802	2017	2,050,000	50%	4	7	1	-	2,049,999	1
237	1 unit Printer Epson Lx310	2017	2,525,000	50%	4	7	1	-	2,524,999	1
238	i unit Komputer	2017	3,750,000	50%	4	7	1	-	3,749,999	1
239	1 unit Printer Epson Inkjet L.210	2017	1,750,000	50%	4	7	1	-	1,749,999	1
240	1 unit CVU	2017	3,500,000	50%	4	7	1	-	3,499,999	1
241	1 set Kursi Tamu	2017	4,500,000	50%	4	7	1	-	4,499,999	1

242	1 unit Printer Epson LX 310	2018	2,650,000	50%	4	6	1	-	2,649,999	1
243	1 unit Server Dell Edge T30(Tower)	2018	13,000,000	50%	4	6	1	-	12,999,999	1
244	1 unit CPU	2018	2,850,000	50%	4	6	1	-	2,849,999	1
245	10 buah kursi Kerja	2018	3,650,000	25%	4	6	1	-	3,649,999	1
246	1 buah kursi putar KD 104	2018	1,500,000	25%	4	6	1	-	1,499,999	1
247	10 buah meja kerja	2018	10,700,000	25%	4	6	1	-	10,699,999	1
248	1 Unit AC Sharf AG AGTEY Y 1PK	2019	4,300,000	25%	4	5	1	-	4,299,999	1
249	10 bh Kursi Kerja	2019	3,700,000	25%	4	5	1	-	3,699,999	1
250	1 unit Printer Epson L 1110	2019	1,950,000	25%	4	5	1	-	1,949,999	1
251	1 unit Printer Epson L 120	2019	1,750,000	25%	4	5	1	-	1,749,999	1
252	1 unit AC Panasonic	2020	4,644,000	25%	4	4	1	-	4,643,999	1
253	1 unit Monitor LG 19"	2020	1,350,000	25%	4	4	1	-	1,349,999	1
254	1 unit Epson L120	2020	1,450,000	25%	4	4	1	-	1,449,999	1
255	1 unit Epson LX310	2020	2,230,000	25%	4	4	1	-	2,229,999	1
256	1 set Komputer	2020	3,696,000	25%	4	4	1	-	3,695,999	1
257	1 unit Laptop HP 14'	2020	8,120,000	25%	4	4	1	-	8,119,999	1
SUB JUMLAH			414,703,750				256	-	414,703,493	256.00
J U M L A H			11,330,856,417				651	-	11,330,855,766	651

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DAFTAR PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2024



NO	DAFTAR PERSEDIAAN PDAM KAB. PANGKEP	Volume	Harga/Unit	Total Harga
1	2	3	4	5
1	Ball Valve	1	690,000	Rp 690,000.00
2	Bend PVC 45° Ø 3 Inchi	1	175,000	Rp 175,000.00
3	Bend PVC 45° Ø 4 Inchi	1	210,000	Rp 210,000.00
4	Bend PVC 90° Ø 4 Inchi	1	175,000	Rp 175,000.00
5	Clamp Saddle Ø 6x4 Inchi	1	255,000	Rp 255,000.00
6	Clamp Saddle Ø 4x3 Inchi	1	135,000	Rp 135,000.00
7	Dop PVC Ø 10 Inchi	1	750,000	Rp 750,000.00
8	Dop Ø Inchi	109	3,000	Rp 327,000.00
9	Dop PVC Ø ½ Inchi	14	2,000	Rp 28,000.00
10	Dop PVC Ø 3/4 Inchi	5	2,000	Rp 10,000.00
11	Elbow (Knee) Ø 2 Inchi	5	35,000	Rp 175,000.00
12	Elbow (Knee) 90° Ø 3 Inchi	1	135,000	Rp 135,000.00
13	Elbow (Knee) Biasa Ø ½ Inchi	30	2,500	Rp 75,000.00
14	Elbow (Knee) DD Ø ½ Inchi	30	4,000	Rp 120,000.00
15	Elbow (Knee) Ø 4 Inchi	1	115,000	Rp 115,000.00
16	Elbow (Knee) GIP Ø ½ Inchi	100	5,539.76	Rp 553,975.50
17	Long Elbow (Knee) Ø 3 Inchi	1	170,000	Rp 170,000.00
18	Flange Socket Ø 6 Inchi	1	1,100,000	Rp 1,100,000.00
19	Flange Socket Ø 6 Inchi	2	365,000	Rp 730,000.00
20	Flange Las Ø 3 Inchi	4	95,000	Rp 380,000.00
21	Flange Spigot Ø 8 Inchi	1	750,000	Rp 750,000.00
22	Flange Spigot Ø 4 Inchi	1	270,000	Rp 270,000.00
23	Gate Valve Flange Ø 4 Inchi	1	1,450,000	Rp 1,450,000.00
24	Giboul Joint Ø 4 Inchi	1	265,000	Rp 265,000.00
25	Giboul Joint Ø 6 Inchi	3	470,000	Rp 1,410,000.00
26	Isolasi/Sealtipe/Tiplon	117	3,000	Rp 351,000.00
27	Isolasi/Sealtipe/Tiplon 10 M	22	4,000	Rp 88,000.00
28	Kaporit	50	42,000	Rp 2,100,000.00
29	Karet Flange	2	17,000	Rp 34,000.00
30	Karet Flange Ø 8 Inchi	2	27,500	Rp 55,000.00
31	Lem Pipa	1	11,000	Rp 11,000.00
32	Meter Air Ø 10 Inchi	2	9,250,000	Rp 18,500,000.00
33	Meter Air Ø 10 Inchi	1	9,750,000	Rp 9,750,000.00
34	Meter Air Ø 4 Inchi	1	2,450,000	Rp 2,450,000.00
35	Meter Air Ø 6 Inchi	3	3,350,000	Rp 10,050,000.00
36	Meter Air Ø 8 Inchi	1	4,225,000	Rp 4,225,000.00
37	Mour Baut Ø 5/8 x 7 Inchi	32	15,000	Rp 480,000.00
38	Mour Baut Ø 5/8 x 7 Inchi	64	6,000	Rp 384,000.00
39	Mour Baut Ø 3/4 x 10 cm	8	15,000	Rp 120,000.00
40	Pipa GIP Ø ½ Inchi	4	140,000	Rp 560,000.00
41	Pipa PVC Ø 1 Inchi	6	10,500	Rp 63,000.00
42	Pipa PVC Ø 2 Inchi	24	26,416.7	Rp 634,000.08
43	Pipa PVC Ø 4 Inchi	1	97,500	Rp 97,500.00
44	Pipa PVC Ø 6 Inchi	2	1,122,000	Rp 2,244,000.00
45	Pipa PVC Ø ½ Inchi	5	25,000	Rp 125,000.00
46	Reduser Ø 3 x 2 Inchi	3	75,000	Rp 225,000.00
47	Reduser Sok Ø 3 x 2 Inchi	4	45,000	Rp 180,000.00
48	Reduser Ø 6 x 4 Inchi	2	180,000	Rp 360,000.00
49	Socket PVC DD Ø ½ Inchi	32	2,300	Rp 73,600.00

50	Socket PVC DD Ø ½ Inchi	20	4,000	Rp	80,000.00
51	Socket PVC DL Ø ½ Inchi	231	1,500	Rp	346,500.00
52	Socket PVC DL Ø ½ Inchi	10	2,000	Rp	20,000.00
53	Socket PVC DL Ø ½ Inchi	40	900	Rp	36,000.00
54	Socket PVC DL Ø ½ Inchi	3	3,000	Rp	9,000.00
55	Socket PVC DL Ø 2 Inchi	1	30,000	Rp	30,000.00
56	Socket PVC DL Ø ¾ Inchi	217	2,300	Rp	499,100.00
57	Socket PVC DL Ø 3 Inchi	1	45,000	Rp	45,000.00
58	Socket PVC DL Ø 4 Inchi	2	45,000	Rp	90,000.00
59	Socket PVC DL Ø 4 Inchi	2	75,000	Rp	150,000.00
60	Socket Drak Lurus Ø ½ Inchi	27	3,000	Rp	81,000.00
61	Socket GIP Ø 1 Inchi	15	15,000	Rp	225,000.00
62	Stop Kran Ø ½ Inchi	7	10,000	Rp	70,000.00
63	Kran DD Ø ½ Inchi	160	4,000	Rp	640,000.00
64	Tee GIP Ø ½ Inchi	20	9,500	Rp	190,000.00
65	Tee PVC Ø ½x½ Inchi	28	3,000	Rp	84,000.00
66	Tee PVC Ø 4x2 Inchi	1	145,000	Rp	145,000.00
67	Tee PVC Ø 4x3 Inchi	2	225,000	Rp	450,000.00
68	Tee PVC Ø 6 Inchi	1	425,000	Rp	425,000.00
69	Ventil Udara Ø 1 Inchi	1	265,000	Rp	265,000.00
70	Water Mour Ø ¾ Inchi	3	17,405	Rp	52,213.50
SUB JUMLAH			39,848,860.93		67,546,889.08

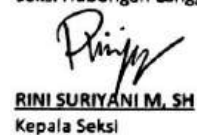
**REKAPITULASI DAFTAR PIUTANG PELANGGAN
TAHUN 2024**

NO.	IKK	KELOMPOK I	KELOMPOK II	KELOMPOK III.a	KELOMPOK III.b	KELOMPOK III.c	KELOMPOK IV.a	KELOMPOK IV.b	TOTAL
1	Pusat	15,155,418	32,852,006	600,497,908	8,680,016,913	715,229,594	125,885,602	119,946,048	10,289,583,489
2	Kabba	-	3,232,304	1,518,078	732,762,663	41,091,268	-	3,531,000	782,135,313
3	Bontoa	-	7,077,312	185,689,976	1,179,998,679	-	-	13,341,034	1,386,107,001
4	Marang	2,771,758	4,752,280	59,318,748	399,255,311	4,918,104	60,162,347	22,373,640	553,552,188
5	Padang Lampe	-	1,546,008	245,208	109,067,364	2,679,418	5,362,822	-	118,900,820
6	Segeri	5,045,742	56,000	423,660,978	660,171,688	343,500	10,126,612	78,755,642	1,178,160,162
7	Mandalle	-	808,854	-	229,229,153	50,125,020	-	-	280,163,027
Jumlah Total		22,972,918	50,324,764	1,270,930,896	11,990,501,771	814,386,904	201,537,383	237,947,364	14,588,602,000
Grand Jml Total		14,588,602,000							

Diperiksa Oleh
Bagian Adm. Umum & Keuangan


MUH. ALI SIRI, SE
Kepala Bagian

Pangkajene, 04 Maret 2025
Dibuat Oleh
Seksi Hubungan Langganan


RINI SURIYANI M, SH
Kepala Seksi



REKAPITULASI DAFTAR
PENYISIHAN PIUTANG USAHA AIR
PER 31 DESEMBER 2024



JENIS PELANGGAN	Saldo per, 31-Dec-23	DRAD 2024	LPPA 2024	Saldo sebelum penyisihan	% tak tertagih	Rata-rata %	Penyisihan per, 31-Dec-24	Piutang bersih per, 31-Dec-24
SOSIAL	20,241,600	93,313,000	98,730,800	14,823,800	13	15	2,174,157	12,649,643
R.TANGGA	11,608,143,304	6,769,673,900	6,170,116,400	12,207,700,804	66	65	7,894,313,187	4,313,387,617
I.PEMERINTAH	657,621,306	854,110,700	840,606,100	671,125,906	44	46	306,480,830	364,645,076
NIAGA KECIL	1,441,937,890	586,295,600	558,661,800	1,469,571,690	72	71	1,038,497,328	431,074,362
NIAGA BESAR	194,953,400	213,328,800	182,902,400	225,379,800	55	50	111,938,634	113,441,166
INDUSTRI	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	13,922,897,500	8,516,722,000	7,851,017,500	14,588,602,000			9,353,404,136	5,235,197,864
Penyisihan per 31/12/2024							8,752,519,638	
							600,884,498	

Pangkep, 04 Maret 2025

Dibuat
Kasi. Hubungan Langgan


RINI SURIYANI, M.SH



Mengetahui,
Kabag. Adm. Umum & Keuangan

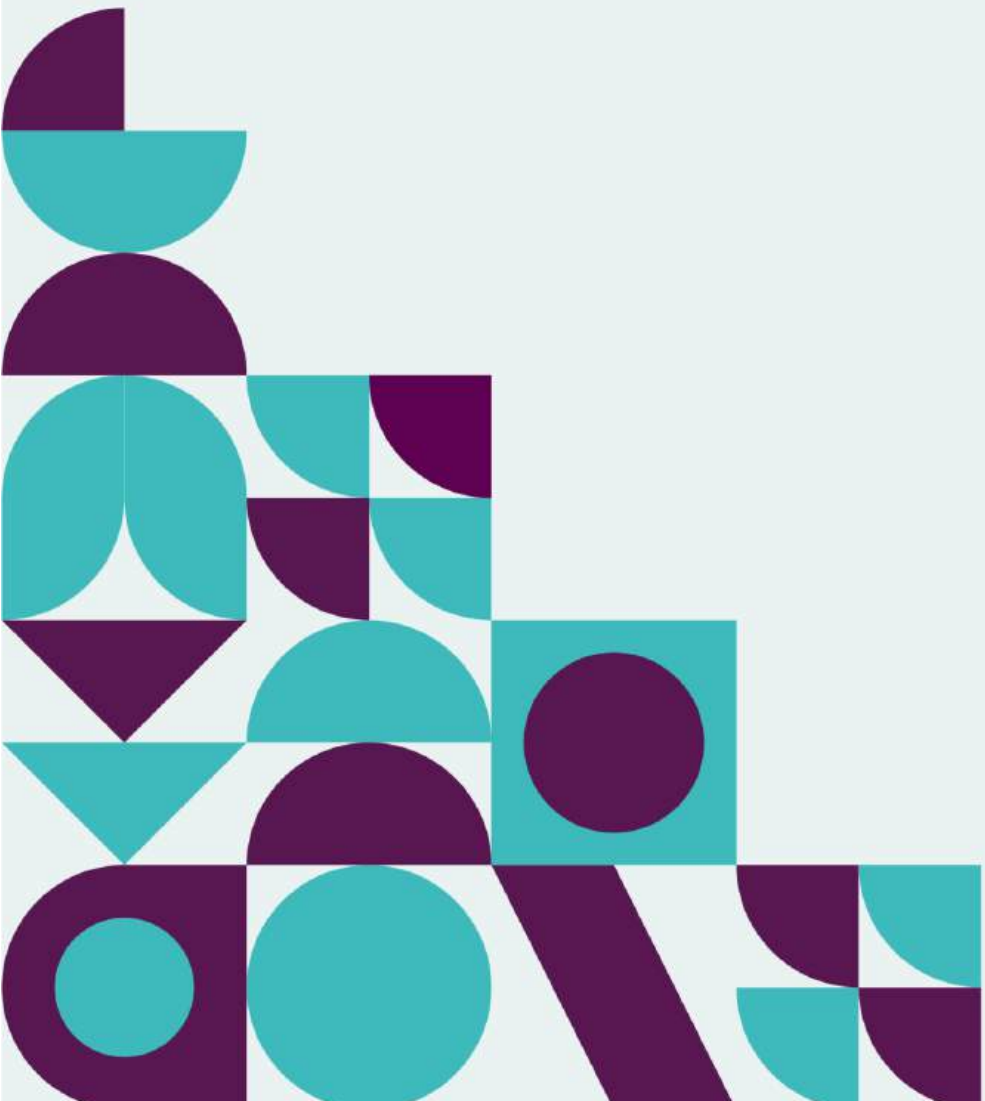

MUH. ALI SIRI, SE

**PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH MAPPATUWO**

Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023

Beserta Laporan Auditor Independen



PERUSAHAAN UMUM DAERAH MAPPATUWO

Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024

Dengan Angka Perbandingan Untuk 2023

Beserta Laporan Auditor Independen

DAFTAR ISI

Surat Pernyataan Klien

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan

Neraca	1
Laporan Laba Rugi	3
Laporan Perubahan Ekuitas	4
Laporan Arus Kas	5
Catatan Atas Laporan Keuangan	6-17

Lampiran

Daftar Aset Tetap	Lampiran 1

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) MAPPATUWO
PERIODE 31 DESEMBER 2024

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

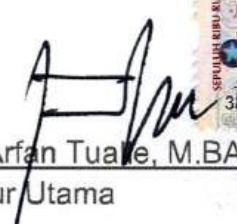
Nama : Ir. H. Arfan Tualle, M.BA
Jabatan : Direktur Utama
Alamat Kantor : Jl. Andi Mappe Nomor 20A, Bungoro, Pangkep - Sulsel

Nama : Hj. Mustabsyirah, S.E
Jabatan : Direktur Umum dan Keuangan
Alamat Kantor : Jl. Andi Mappe Nomor 20A Poros Makassar-Pare

Dalam kedudukan tersebut di atas bertindak dan atas nama Direksi Perusahaan Umum Daerah Mappatuwo Pangkajene dan Kepulauan menyatakan Bahwa:

1. Bertanggungjawab atas penyusunan penyajian laporan keuangan Perumda Mappatuwo Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk tahun buku 2024.
2. Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).
3. Semua informasi dalam laporan keuangan dan informasi tambahan telah dimuat secara lengkap dan benar.
4. Laporan keuangan dan informasi tambahan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta materiil.
5. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan Umum Daerah Mappatuwo Pangkajene dan Kepulauan untuk tahun buku 2024.

Kab. Pangkep, 24 april 2025
Atas nama dan mewakili Pengurus,


Ir. H. Arfan Tualle, M.BA
Direktur Utama


Hj. Mustabsyirah, S.E
Direktur Umum & Keuangan





LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN



**KANTOR AKUNTAN PUBLIK ASRI**

Registered Public Accountants No. AP 1533

Menkeu RI No. 228/KM.1/2023

Our Services:

- General Audit • Review
- Agreed-Upon Procedures
- Accounting Service • Taxation
- Financial Statement Preparation

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**No: 00090/2.1418/AU.2/05/1533-1/1/IV/2025****Kepada Yth.****Pemerintah Kabupaten Pangkep****Direksi dan Dewan Pengawas Perumda Mappatuwo****Laporan Audit Atas Laporan Keuangan****Opini Wajar dengan Pengecualian**

Kami telah mengaudit laporan keuangan **Perumda Mappatuwo Kabupaten Pangkep** terlampir, yang terdiri dari neraca per tanggal 31 Desember 2024 serta Laporan laba(rugi), laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf Basis untuk Opini Wajar dengan Pengecualian pada laporan kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material Neraca **Perumda Mappatuwo Kabupaten Pangkep** tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

Basis Opini

Perusahaan belum menerapkan akuntansi imbalan pasca kerja sebagaimana yang diatur di dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) bab 23, serta kami tidak melakukan pemeriksaan untuk pajak.

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Entitas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.



Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan (lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Entitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Entitas.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Entitas.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Entitas untuk mempertahankan



KANTOR AKUNTAN PUBLIK ASRI

Registered Public Accountants No. AP 1533

Menkeu RI No. 228/KM.1/2023

Our Services:

- General Audit • Review
- Agreed-Upon Procedures
- Accounting Service • Taxation
- Financial Statement Preparation

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Entitas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kantor Akuntan Publik Asri

Asri, SE., Ak., CA., CPA., ASEAN CPA

Nomor Register Negara Akuntan : RNA 13372

Nomor Izin Akuntan Publik : AP.1533



Makassar, 24 April 2025



LAPORAN KEUANGAN



PERUSAHAAN UMUM DAERAH MAPPATUWO

N E R A C A

Per 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Bank	2.g.3.a.	520.314.932,57	645.809.361,14
Piutang	2.h.3.b.	459.419.586,00	481.349.586,00
Perlengkapan	2.i.3.c.	-	11.000.000,00
Jumlah Aset Lancar		979.734.518,57	1.138.158.947,14
Aset Tidak Lancar			
Aset Tetap	2.l.3.d.	159.079.995,00	140.929.995,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	2.l.3.d.	(114.028.330,52)	(83.982.290,10)
Jumlah Aset Tidak Lancar		45.051.664,48	56.947.704,90
TOTAL ASET		1.024.786.183,05	1.195.106.652,04

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERUSAHAAN UMUM DAERAH MAPPATUWO

N E R A C A

Per 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
KEWAJIBAN & EKUITAS			
Kewajiban Lancar			
Utang Usaha	3.e.	500.000.000,00	622.000.000,00
Utang Gaji	3.f.	70.453.000,00	35.648.000,00
Utang Asuransi	3.g.	56.883.324,00	-
Utang Bunga	3.h.	135.000.000,00	163.500.000,00
Utang Pajak	3.i.	68.057.801,00	-
Jumlah Kewajiban Lancar		830.394.125,00	821.148.000,00
Kewajiban Jangka Panjang			
Utang Jangka Panjang YJT	3.j.	54.229.700,00	54.229.700,00
Utang Pembiayaan	3.k.	867.000,00	19.949.995,00
Utang Bank	3.l.	112.499.997,00	66.666.469,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		167.596.697,00	140.846.164,00
Jumlah Kewajiban		997.990.822,00	961.994.164,00
Ekuitas			
	3.m		
Modal		784.800.000,00	784.800.000,00
Saldo Laba		(544.678.639,96)	(599.298.161,88)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan		(213.325.998,99)	47.610.649,92
Jumlah Ekuitas		26.795.361,05	233.112.488,04
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.024.786.183,05	1.195.106.652,04

Kabupaten Pangkep , 24 April 2025

Ir. H. ARFAN TUALLE, MBA

Direktur Utama

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERUSAHAAN UMUM DAERAH MAPPATUWO

LAPORAN LABA RUGI

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Catatan	2024	2023
Pendapatan	2.d.3.n.	14.141.702.170,61	13.399.360.222,00
Beban Pokok Pendapatan	2.d.3.o.	(7.624.852.663,00)	(7.085.651.478,00)
Laba (Rugi) Bruto		6.516.849.507,61	6.313.708.744,00
Beban Operasional	2.d.3.p.	(6.705.927.383,42)	(6.255.129.800,08)
Laba (Rugi Usaha)		(189.077.875,81)	58.578.943,92
Pendapatan dan Beban Lain-lain :			
Pendapatan Lain-lain	2.d.3.q.	1.143.900,30	1.589.994,00
Beban Lain-lain	2.d.3.r.	(25.392.023,48)	(12.558.288,00)
Selisih lebih (kurang) Pendapatan atas Beban Non Operasional		(24.248.123,18)	(10.968.294,00)
Laba (Rugi) Usaha Sebelum Pajak		(213.325.998,99)	47.610.649,92
Pajak Penghasilan		-	-
Laba (Rugi) Setelah Pajak		(213.325.998,99)	47.610.649,92

Kabupaten Pangkep , 24 April 2025

Ir. H. ARFAN TUALLE, MBA

Direktur Utama

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERUSAHAAN UMUM DAERAH MAPPATUWO
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Keterangan	Modal	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
1	Saldo Awal Ekuitas : 31 Dec 2024	784.800.000,00	(551.687.511,96)	233.112.488,04
2	Penambahan (Pengurangan) Ekuitas Tahun 2024	-	-	-
3	Penambahan (Pengurangan)	-	-	-
4	Koreksi Saldo Laba	-	7.008.872,00	7.008.872,00
5	Laba (Rugi) Periode Berjalan Setelah Pajak	-	(213.325.998,99)	(213.325.998,99)
	Saldo Akhir Ekuitas : 31 Dec 2024	784.800.000,00	(758.004.638,95)	26.795.361,05

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERUSAHAAN UMUM DAERAH MAPPATUWO
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	2024	2023
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Laba (Rugi) Setelah Pajak	(213.325.998,99)	47.610.649,92
Penyesuaian :		
Penyusutan Aset Tetap	30.046.040,42	34.425.207,08
Hasil Usaha Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja	(183.279.958,57)	82.035.857,00
Perubahan-perubahan Pos-Pos Modal Kerja		
Penurunan (kenaikan) Aset Lancar :		
Piutang	21.930.000,00	98.231.000,00
Perlengkapan	11.000.000,00	(7.000.000,00)
Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Jangka Pendek :		
Utang Usaha	(122.000.000,00)	122.000.000,00
Utang Gaji	34.805.000,00	35.648.000,00
Utang Asuransi	56.883.324,00	(235.648.026,00)
Utang Bunga	(28.500.000,00)	(15.000.000,00)
Utang Pajak	68.057.801,00	-
Arus Kas netto dari Aktifitas Operasi	42.176.125,00	(1.769.026,00)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Penurunan (Penambahan) Aset Tetap	(18.150.000,00)	(8.750.000,00)
Penurunan (Penambahan) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-	-
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(18.150.000,00)	(8.750.000,00)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Penurunan (Penambahan) Utang Jangka Panjang YJT	-	-
Penurunan (Penambahan) Utang Pembiayaan	(19.082.995,00)	(23.940.000,00)
Penurunan (Penambahan) Utang Bank	45.833.528,00	(30.000.200,00)
Penurunan (Penambahan) Modal	-	-
Penurunan (Penambahan) Saldo Laba	7.008.872,00	65.592.676,42
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	33.759.405,00	11.652.476,42
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	(125.494.428,57)	83.169.307,42
Kas dan Setara Kas Awal Periode	645.809.361,14	562.640.053,72
Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Periode	520.314.932,57	645.809.361,14

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERUSAHAAN UMUM DAERAH MAPPATUWO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. PERNYATAAN KEPATUHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Direksi perseroan menyatakan bahwa laporan keuangan tahun 2024 dengan informasi komparatif pendekatan angka koresponding untuk tahun 2023 disajikan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dan telah memenuhi persyaratannya.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Perseroan menetapkan SAK-ETAP sebagai basis penyusunan laporan keuangan dan penentuan kebijakan akuntansi penting yang diterapkan untuk mengakui dan mengukur transaksi dan peristiwa yang relevan dengan Perseroan.

Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Perseroan menyajikan laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas secara tersendiri.

Laporan keuangan disusun berdasarkan basis kesinambungan usaha dan biaya historis. Laporan keuangan juga disusun berdasarkan basis kas dan akrual.

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Cerukan bank pada umumnya termasuk aktivitas pendanaan sejenis pinjaman. Namun jika cerukan bank dapat ditarik sewaktu-waktu dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan kas entitas, maka cerukan tersebut termasuk komponen kas dan setara kas. Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung.

b. Mata Uang Pelaporan, Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Mata uang pelaporan entitas adalah mata uang Rupiah, sekaligus sebagai mata uang fungsional.

Pembukuan Perseroan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Sedangkan transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs tunai (*spot rate*) pada saat terjadinya transaksi.

Pada tanggal pelaporan, saldo aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah penuh dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dibebankan atau dikreditkan pada laporan laba (rugi) tahun berjalan.

c. Transaksi-transaksi Dengan Pihak-pihak Yang mempunyai Hubungan Istimewa

Perseroan mengungkapkan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Suatu entitas mempunyai hubungan istimewa dengan entitas jika :

- i Secara langsung atau tidak langsung melalui satu atau lebih perantara, pihak tersebut :
 - a). Mengendalikan, dikendalikan oleh atau berada di bawah pengendalian bersama dengan entitas (termasuk entitas induk, entitas anak dan *fellow subsidiaries*)

PERUSAHAAN UMUM DAERAH MAPPATUWO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

c. Transaksi-transaksi Dengan Pihak-pihak Yang mempunyai Hubungan Istimewa (Lanjutan)

- b). Memiliki kepemilikan di entitas yang memberikan pengaruh signifikan atas entitas; atau
- c). Memiliki pengendalian bersama atas entitas;
- ii. Pihak tersebut adalah entitas asosiasi dari entitas;
- iii. Pihak tersebut adalah joint ventures dimana entitas tersebut merupakan venture;
- iv. Pihak tersebut adalah personil manajemen kunci entitas atau entitas induknya;
- v. Pihak tersebut adalah keluarga dekat dari setiap orang yang diuraikan dalam (i) atau (iv), Pihak tersebut adalah entitas yang dikendalikan; dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh, atau memiliki hak suara secara signifikan, secara langsung atau tidak langsung, setiap orang yang diuraikan dalam (iv) atau (v); atau
- vi. Pihak tersebut adalah program imbalan pasca kerja untuk imbalan pekerja entitas, atau setiap entitas yang mempunyai hubungan istimewa dengan entitas tersebut.

Perseroan menetapkan bahwa personil manajemen kunci meliputi, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Sedangkan keluarga dekat meliputi suami, istri, anak atau tanggungannya.

Perseroan mengungkapkan saldo dan transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yaitu jenis dan jumlah transaksi, saldo termasuk syarat dan kondisi dan sifat pembayaran dan rincian jaminan yang diberikan atau diterima, penyisihan kerugian piutang tidak tertagih terkait jumlah saldo piutang dan beban yang diakui dalam periode yang berkaitan dengan piutang ragu-ragu jatuh tempo dari pihak hubungan istimewa. Hubungan entitas anak dan induk diungkapkan baik ada atau tidak terdapat transaksi antar pihak hubungan istimewa. Kompensasi personil manajemen kunci diungkapkan secara total.

d. Pendapatan dan Beban

Pendapatan dicatat sebesar nilai wajar atau pembayaran yang diterima atau masih harus diterima secara bruto, tidak termasuk diskon penjualan dan potongan volume. Jumlah yang menjadi bagian pihak ketiga seperti pajak pertambahan nilai dikeluarkan dari pendapatan. Jika terjadi pembayaran tangguh, maka entitas mengakui pendapatan sebesar nilai wajar yaitu sebagai nilai kini dari seluruh penerimaan masa depan yang ditentukan berdasarkan tingkat bunga terkait (*input interest rate*).

Pendapatan terdiri dari penjualan barang dan jasa. Pendapatan diakui sebagai berikut:

- i. Penjualan barang
Penjualan barang diakui ketika semua kondisi berikut telah terpenuhi, yaitu:
 - a). Risiko dan manfaat signifikan terkait dengan barang tersebut telah dialihkan kepada pembeli;
 - b). Perseroan tidak mempertahankan atau meneruskan keterlibatan manajerial sampai kepada tingkat dimana biasanya diasosiasikan dengan kepemilikan maupun kontrol efektif atas barang yang terjual;
 - c). Jumlah pendapatan dapat diukur dengan handal;

PERUSAHAAN UMUM DAERAH MAPPATUWO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

d. Pendapatan dan Beban (Lanjutan)

- d). Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir masuk ke Perseroan, dan
- e). Biaya yang telah terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi dapat diukur secara andal.
- ii. Penjualan jasa
Penjualan jasa diakui dengan metode persentase penyelesaian dalam periode akuntansi ketika semua kondisi berikut terpenuhi:
 - a). Jumlah pendapatan dapat diukur dengan handal;
 - b). Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir masuk ke Perseroan;
 - c). Tingkat penyelesaian transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal; dan
 - d). Biaya yang telah terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi dapat diukur secara andal.

e. Imbalan Kerja

Perseroan **belum mengakui imbalan pascakerja** karyawan berdasarkan ketentuan dalam UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada saat karyawan berhenti bekerja, Perseroan harus membayarkan sejumlah imbalan pada saat karyawan meninggal dunia, pensiun normal, cacat tetap, atau mengundurkan diri sebesar formula yang ditentukan oleh UU tersebut. Besarnya imbalan yang dibayarkan tergantung pada besaran gaji dan tunjangan tetap pada saat berhenti bekerja, masa kerja, dan jenis peristiwa yang menyebabkan berhentinya hubungan kerja. Perseroan belum mengakui imbalan pascakerja tersebut sebagai beban pada saat karyawan masih aktif berdasarkan metode projected unit credit dan mengakui keuntungan kerugian actuarial sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan. Dalam menentukan beban dan kewajiban imbalan pascakerja per tanggal laporan keuangan, Perseroan menggunakan asumsi keuangan dan asumsi aktuarial.

f. Pajak Penghasilan

Perseroan mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, Perseroan harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. Perusahaan tidak mengakui adanya pajak tangguhan.

Perusahaan telah terdaftar sebagai Wajib Pajak pada KPP dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.164.755.7-809.000. Perusahaan telah menghitung dan mencadangkan sendiri kewajiban perpajakannya. Kami tidak melakukan audit khusus atas pajak-pajak tersebut.

g. Kas & Setara Kas

Kas dan setara kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi likuid jangka pendek lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang.

Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, disajikan sebagai "Aset yang dibatasi penggunaannya" yang kategorikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo yaitu pada saat selesai pembatasan penggunaannya.

h. Piutang

Piutang disajikan sesuai dengan nilai terjadinya tanpa dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih. Piutang yang tidak tertagih dihapus dalam periode dimana piutang tersebut tidak akan tertagih.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH MAPPATUWO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

i. Biaya dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka dibebankan sesuai masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

j. Persediaan

Persediaan dinyatakan dengan biaya atau nilai realisasi bersih mana yang lebih rendah. Penilaian biaya ditentukan berdasarkan metode masuk pertama keluar pertama (MPKP).

k. Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Entitas Anak

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh entitas induk. Pengendalian adalah kemampuan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional dari suatu entitas sehingga mendapatkan manfaat dari aktivitas tersebut.

Perseroan mencatat investasi pada entitas anak dengan metode ekuitas (*equity method*) sedangkan investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan metode biaya (*cost method*). Dalam metode ekuitas Perseroan mengakui bagian laba atau rugi pada entitas anak sesuai dengan porsi kepemilikan dalam laporan laba rugi. Dividen yang diterima dari entitas anak diakui sebagai pengurang saldo investasi, sedangkan dividen yang diterima dari entitas asosiasi diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi.

Sesuai SAK-ETAP laporan keuangan entitas anak tidak dikonsolidasikan dalam laporan keuangan Perseroan.

l. Aset Tetap

Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Biaya perolehan meliputi harga beli aset tetap termasuk biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang siap digunakan serta estimasi awal biaya pembongkaran aset, biaya pemindahan aset dan biaya restorasi relokasi. Pajak-pajak yang dapat kreditkan dan semua diskon dikurangkan dalam menentukan biaya perolehan. Revaluasi aset tetap tidak diperkenankan, kecuali dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Penyusutan dimulai pada saat aset tetap tersedia untuk digunakan dan berhenti ketika aset tetap dihapuskan. Penyusutan tidak berhenti ketika aset tidak digunakan. Penyusutan diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi, kecuali memenuhi syarat untuk dikapitalisasi sebagai perolehan suatu aset berdasarkan SAK-ETAP.

Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.

Penyusutan Aset tetap diperhitungkan sebagai berikut:

1. Tanah	Tidak dilakukan penyusutan	
2. Bangunan	10 – 20	Tahun
3. Kendaraan	4 – 8	Tahun
4. Inventaris Kantor	4 – 8	Tahun

Pengeluaran untuk perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produk atau peningkatan standar kinerja dikapitalisasi.

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual, dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan, dan laba atau rugi yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH MAPPATUWO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

m. Properti Investasi

Properti investasi merupakan tanah atau bangunan yang dimiliki untuk sewa operasi atau kenaikan nilai, dan tidak digunakan atau dijual dalam kegiatan operasi Perseroan.

Pada saat pengakuan awal, properti investasi diukur sebesar biaya perolehannya. Setelah perolehan awal properti investasi diukur pada biaya perolehan dikurang akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai. Biaya perolehan properti investasi meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung.

n. Penurunan Nilai Aset

Perseroan pada setiap tanggal pelaporan menilai apakah terdapat indikasi penurunan nilai aset yang bersumber dari informasi internal dan eksternal, yang dilakukan berdasarkan kelompok aset penghasil kas. Jika indikasi tersebut ada, entitas mengestimasi nilai wajar aset dikurangi dengan biaya menjual. Kerugian penurunan nilai aset diakui jika nilai wajar dikurangi biaya menjual lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat. Pemulihan kerugian penurunan nilai aset diakui dalam laporan laba rugi tidak boleh melebihi jumlah tercatat tanpa kerugian penurunan nilai.

o. Sewa

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset. Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

p. Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang belum pasti, Perseroan tidak mengakui kewajiban kontinjensi sebagai kewajiban. Kewajiban kontinjensi diungkapkan pada tanggal pelaporan, uraian dan sifat kewajiban kontinjensi jika praktis dilakukan.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH MAPPATUWO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN

a. Kas dan Bank

Akun ini merupakan saldo Kas dan Bank dengan rincian sebagai berikut :

	31 Des 2024	31 Des 2023
<i>Kas Tunai</i>	238.641,00	-
<i>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, A/C 022301000699304</i>	2.496.680,00	44.547.816,00
<i>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, A/C 022301005149532</i>	438.149,60	93.441.366,60
<i>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, A/C 167501000102561</i>	28.529.235,80	32.828.757,20
<i>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, A/C 022301002150306</i>	11.796.835,80	-
<i>PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, A/C 0838461357</i>	8.507.018,00	10.219.976,00
<i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, A/C 151-00-1682669-1</i>	467.987.653,30	464.451.585,53
<i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, A/C 152-00-8755557-5</i>	-	-
<i>PT Bank Syariah Indonesia (Persero), A/C 7193115351</i>	320.719,07	319.859,81
Jumlah Kas dan Bank	520.314.932,57	645.809.361,14

b. Piutang

Akun ini merupakan saldo Piutang dengan rincian sebagai berikut :

	31 Des 2024	31 Des 2023
<i>Piutang Usaha</i>		
<i>PT PLN</i>	26.550.000,00	48.480.000,00
Jumlah Piutang Usaha	26.550.000,00	48.480.000,00
 <i>Piutang Non Usaha</i>		
<i>Piutang Andi Syaiful Adam</i>	108.000.000,00	108.000.000,00
<i>Piutang Aswar Zaenal, SE</i>	32.500.000,00	32.500.000,00
<i>Piutang Dewan Pengawas Lama</i>	9.131.000,00	9.131.000,00
<i>Piutang Pengurus Lama</i>	224.884.586,00	224.884.586,00
<i>Piutang Semen Tidak Lancar</i>	58.354.000,00	58.354.000,00
Jumlah Piutang Non Usaha	432.869.586,00	432.869.586,00
Jumlah Piutang	459.419.586,00	481.349.586,00

c. Perlengkapan

Akun ini merupakan saldo Perlengkapan dengan rincian sebagai berikut :

	31 Des 2024	31 Des 2023
<i>Perlengkapan</i>	-	11.000.000,00
Jumlah Perlengkapan	-	11.000.000,00

PERUSAHAAN UMUM DAERAH MAPPATUWO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

d. Aset Tetap

Akun ini merupakan saldo Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut :

	2024			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
<i>Peralatan Kantor</i>	<i>140.929.995,00</i>	<i>18.150.000,00</i>	<i>-</i>	<i>159.079.995,00</i>
<i>Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor</i>	<i>(83.982.290,10)</i>	<i>(30.046.040,42)</i>	<i>-</i>	<i>(114.028.330,52)</i>
Nilai Buku Bersih	56.947.704,90			45.051.664,48

Mutas Aset Tetap Tahun 2023:

	2023			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Nilai Perolehan				
<i>Peralatan Kantor</i>	<i>132.179.995,00</i>	<i>8.750.000,00</i>	<i>-</i>	<i>140.929.995,00</i>
<i>Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor</i>	<i>(49.557.083,02)</i>	<i>(34.425.207,08)</i>	<i>-</i>	<i>(83.982.290,10)</i>
Nilai Buku Bersih	82.622.911,98			56.947.704,90

(Lihat Lampiran Daftar Aset Tetap)

e. Utang Usaha

Akun ini merupakan saldo Utang Usaha dengan rincian sebagai berikut :

	31 Des 2024	31 Des 2023
<i>Pinjaman ke Tn. Arifin Ali</i>	<i>500.000.000,00</i>	<i>500.000.000,00</i>
<i>Bagi Hasil Pengelolaan Parkir ke RSUD Batara Siang</i>	<i>-</i>	<i>122.000.000,00</i>
Jumlah Utang Usaha	500.000.000,00	622.000.000,00

Pinjaman Modal Kerja oleh Perumda Mappatuwo Pangkep kepada Tn. Arifin Ali yang diatur dalam Akta Pangakuan Hutang Nomor 17 Tanggal 25 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Tn. Andi Agus, S.H., Notaris PPAT di Pangkajene dan Kepulauan.

f. Utang Gaji

Akun ini merupakan saldo Utang Gaji dengan rincian sebagai berikut :

	31 Des 2024	31 Des 2023
<i>Gaji Karyawan</i>	<i>70.453.000,00</i>	<i>35.648.000,00</i>
Jumlah Utang Gaji	70.453.000,00	35.648.000,00

g. Utang Asuransi

Akun ini merupakan saldo Utang Asuransi dengan rincian sebagai berikut :

	31 Des 2024	31 Des 2023
<i>Asuransi Karyawan</i>	<i>56.883.324,00</i>	<i>-</i>
Jumlah Utang Asuransi	56.883.324,00	-

PERUSAHAAN UMUM DAERAH MAPPATUWO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

h. Utang Bunga

Akun ini merupakan saldo Utang Bunga dengan rincian sebagai berikut :

	31 Des 2024	31 Des 2023
<i>Bunga atas Pinjaman ke Tn. Arifin Ali</i>	<i>135.000.000,00</i>	<i>135.000.000,00</i>
<i>Bunga atas Pinjaman ke BPR Citra Mas</i>	<i>-</i>	<i>28.500.000,00</i>
Jumlah Utang Bunga	135.000.000,00	163.500.000,00

i. Utang Pajak

Akun ini merupakan saldo Utang Pajak dengan rincian sebagai berikut :

	31 Des 2024	31 Des 2023
<i>PPh Pasal 21 yang masih harus dibayar</i>	<i>68.057.801,00</i>	<i>-</i>
Jumlah Utang Pajak	68.057.801,00	-

j. Utang Jangka Panjang YJT

Akun ini merupakan saldo Utang Jangka Panjang YJT dengan rincian sebagai berikut :

	31 Des 2024	31 Des 2023
<i>Utang Jangka Panjang YJT</i>	<i>54.229.700,00</i>	<i>54.229.700,00</i>
Jumlah Utang Jangka Panjang YJT	54.229.700,00	54.229.700,00

k. Utang Pembiayaan

Akun ini merupakan saldo Utang Pembiayaan dengan rincian sebagai berikut :

	31 Des 2024	31 Des 2023
<i>Pinjaman ke Adira Finance</i>	<i>867.000,00</i>	<i>19.949.995,00</i>
Jumlah Utang Pembiayaan	867.000,00	19.949.995,00

l. Utang Bank

Akun ini merupakan saldo Utang Bank dengan rincian sebagai berikut :

	31 Des 2024	31 Des 2023
<i>Pinjaman ke BPR Citra Mas</i>	<i>112.499.997,00</i>	<i>66.666.469,00</i>
Jumlah Utang Bank	112.499.997,00	66.666.469,00

PERUSAHAAN UMUM DAERAH MAPPATUWO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

m. Ekuitas

Akun ini merupakan saldo Ekuitas dengan rincian sebagai berikut :

	31 Des 2024	31 Des 2023
<i>Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pangkep</i>	784.800.000,00	784.800.000,00
<i>Laba Ditahan</i>	(551.687.511,96)	(664.890.838,30)
<i>Koreksi Saldo Laba</i>	7.008.872,00	65.592.676,42
<i>Laba (Rugi) Tahun Berjalan</i>	(213.325.998,99)	47.610.649,92
Jumlah Ekuitas	26.795.361,05	233.112.488,04

n. Pendapatan

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan selama tahun berjalan dengan rincian sebagai berikut :

	2024	2023
<i>Pendapatan OS</i>	6.040.416.666,61	5.816.305.035,00
<i>Pendapatan PLTS</i>	530.640.000,00	612.450.000,00
<i>Pendapatan SPBU-N</i>	7.112.800.000,00	6.528.033.347,00
<i>Pendapatan parkir</i>	420.621.550,00	415.689.000,00
<i>Pendapatan Limbah B3</i>	17.251.050,00	19.882.840,00
<i>Pendapatan Es Batu MB</i>	4.000.000,00	7.000.000,00
<i>Pendapatan Kantor</i>	15.972.904,00	-
Jumlah Pendapatan	14.141.702.171	13.399.360.222

o. Beban Pokok Pendapatan

Jumlah tersebut merupakan Beban Pokok Pendapatan selama tahun berjalan dengan rincian sebagai berikut :

	2024	2023
<i>Beban Operasional SPBU-N</i>	6.916.837.261,00	6.312.552.679,00
<i>Beban Operasional OS</i>	651.691.302,00	719.761.063,00
<i>Beban Operasional PLTS</i>	56.324.100,00	53.337.736,00
Jumlah Beban Pokok Pendapatan	7.624.852.663,00	7.085.651.478,00

PERUSAHAAN UMUM DAERAH MAPPATUWO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

p. Beban Operasional

Jumlah tersebut merupakan Beban Operasional selama tahun berjalan dengan rincian sebagai berikut :

	2024	2023
<i>Beban Operasional Kantor</i>	644.476.220,00	344.078.746,00
<i>Beban Gaji/Upah OS</i>	3.938.778.708,00	3.868.660.000,00
<i>Beban Gaji/Upah PLTS</i>	143.760.000,00	155.748.150,00
<i>Beban Gaji/Upah SPBU-N</i>	56.400.000,00	56.704.500,00
<i>Beban Gaji Karyawan Kantor</i>	544.612.000,00	543.982.500,00
<i>Beban Asuransi</i>	348.362.034,00	367.588.822,00
<i>Beban Sewa</i>	204.000.000,00	187.000.000,00
<i>Beban THR</i>	357.210.892,00	401.902.009,00
<i>Beban Perjalanan Dinas</i>	6.960.000,00	21.820.000,00
<i>Beban BPJS</i>	-	38.471.815,00
<i>Beban Perlengkapan</i>	224.229.938,00	216.597.269,00
<i>Beban Pajak</i>	119.999.786,00	-
<i>Beban Penyusutan Peralatan</i>	30.046.040,42	34.425.207,08
<i>Beban Lain-Lain</i>	57.091.765,00	18.150.782,00
<i>Beban Deviden</i>	30.000.000,00	-
Jumlah Beban Operasional	6.705.927.383,42	6.255.129.800,08

q. Pendapatan Lain-lain

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Lain-lain selama tahun berjalan dengan rincian sebagai berikut

	2024	2023
<i>Pendapatan Bunga</i>	1.143.900,30	1.589.994,00
Jumlah Pendapatan Lain-lain	1.143.900,30	1.589.994,00

r. Beban Lain-lain

Jumlah tersebut merupakan Beban Lain-lain selama tahun berjalan dengan rincian sebagai berikut :

	2024	2023
<i>Beban Administasi Bank</i>	2.478.473,48	1.574.013,00
<i>Beban PPh</i>	8.288.550,00	10.984.275,00
<i>Beban Bunga Pinjaman</i>	14.625.000,00	-
Jumlah Beban Lain-lain	25.392.023,48	12.558.288,00

PERUSAHAAN UMUM DAERAH MAPPATUWO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

s. Sumber Utama Ketidakpastian Estimasi

Dalam menyusun laporan keuangan, Perseroan menggunakan basis estimasian dan pertimbangan untuk menentukan saldo-saldo dalam laporan keuangan. Estimasi dan pertimbangan yang digunakan tersebut terus dievaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktor lainnya, termasuk ekspektasi dari peristiwa masa depan yang diyakini wajar. Meskipun estimasi dan pertimbangan tersebut disusun berdasarkan pengetahuan terbaik Perseroan atas peristiwa dan kondisi pada saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah estimasi semula. Berikut ini penjelasan sifat beberapa akun yang menggunakan estimasi dan pertimbangan secara signifikan, sedangkan terkait dengan penyajian jumlah dan saldo dapat dilihat pada catatan yang relevan.

Penyusutan

Perseroan mengakui beban penyusutan aset tetap berdasarkan estimasi umur manfaat berdasarkan suatu metode penyusutan sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan. Metode penyusutan ditetapkan berdasarkan ekspektasi pola pemanfaatan ekonomi aset pada masa mendatang. Pada setiap akhir tahun, Perseroan mereviu umur manfaat, nilai sisa, dan metode penyusutan untuk mendapatkan basis estimasi yang paling optimal.

Lihat catatan 2. I Aset Tetap yang mengungkapkan besarnya beban dan akumulasi penyusutan.

Imbalan Pascakerja

Perseroan **belum mengakui imbalan pascakerja karyawan** berdasarkan ketentuan dalam UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada saat karyawan berhenti bekerja, Perseroan harus membayarkan sejumlah imbalan pada saat karyawan meninggal dunia, pensiun normal, cacat tetap, atau mengundurkan diri sebesar formula yang ditentukan oleh UU tersebut. Besarnya imbalan yang dibayarkan tergantung pada besaran gaji dan tunjangan tetap pada saat berhenti bekerja, masa kerja, dan jenis peristiwa yang menyebabkan berhentinya hubungan kerja. **Perseroan belum mengakui imbalan pascakerja tersebut** sebagai beban pada saat karyawan masih aktif berdasarkan metode projected unit credit dan mengakui keuntungan kerugian actuarial sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan. Dalam menentukan beban dan kewajiban imbalan pascakerja per tanggal laporan keuangan, Perseroan menggunakan asumsi keuangan dan asumsi actuarial.

4. PENGUNGKAPAN LAINNYA

a. Informasi Umum Perseroan

Perusahaan Umum Daerah Mappatuwo adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pangkajene dan Kepulauan Nomor 6 Tahun 1984, Berdasarkan kedudukannya sebagai Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Umum Daerah Mappatuwo yang membantu Bupati dalam hal usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Perusahaan Umum Daerah Mappatuwo diatur dalam Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 Nomor 10 tentang Perusahaan Umum Daerah Mappatuwo .

PERUSAHAAN UMUM DAERAH MAPPATUWO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PENGUNGKAPAN LAINNYA (lanjutan)

b. Kegiatan Usaha

Perumda Mappatuwo Pangkep dibentuk dengan tugas dan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan manfaat bagi Perekonomian Daerah.
2. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.
3. Memperoleh laba atau keuntungan

Adapun unit usaha yang dioperasikan oleh Perusahaan Umum Daerah Mappatuwo Pangkep di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Usaha Penyaluran solar bersubsidi pola SPBU-N di Maccini Baji dengan mitra PT Pertamina (Persero)
2. Pengelolaan Jasa Outsourcing Kebersihan Lingkungan Luar Pabrik (KLLP) dengan mitra PT Semen Tonasa (SIG) (Persero)
3. Usaha penyediaan tenaga listrik (Pembangkt Listrik Tenaga Surya) kapasitas 1 MWp dikelurahan Saalewa Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan mitra PT PLN unit induk wilayah Sulselbar

c. Manajemen

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Mappatuwo Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, susunan organisasi Perusahaan Daerah terdiri dari :

Kuasa Pemilik Modal (KPM)	: Bupati Pangkajene dan Kepulauan
Dewan Pengawas	: dr. Hj. Hartiny Djafar, M.Kes

Direksi

Direktur Utama	: Ir. H. Arfan Tualle, M.BA
Direktur Umum dan Keuangan	: Hj. Mustabsyirah, S.E

d. Pajak Kini dan Utang Pajak

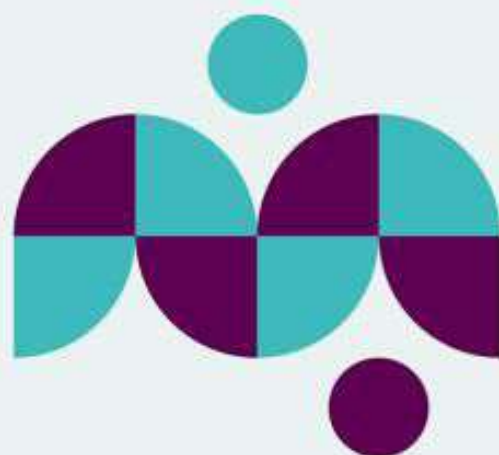
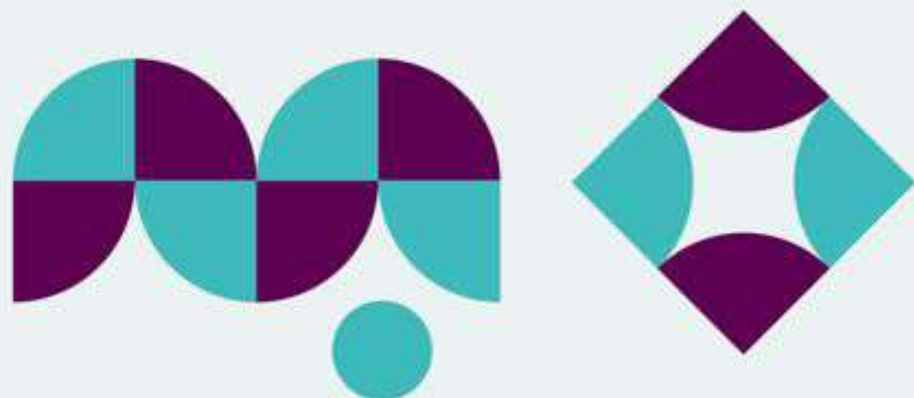
Perhitungan pajak kini yang tersaji pada laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan utang pajak yang tersaji pada neraca per 31 Desember 2024 adalah merupakan perhitungan manajemen perusahaan.

e. Tanggal Penyelesaian Laporan Keuangan

Direksi bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 yang disusun dan diotorisasi pada tanggal 24 April 2025

PERUSAHAAN UMUM DAERAH MAPPATUWO
DAFTAR ASET TETAP
Per 31 Desember 2024

NO	KETERANGAN	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Masa Manfaat (Tahun)	Ak. Penyusutan 31 Des 2023	Penyusutan 2024	Ak. Penyusutan 31 Des 2024	Nilai Buku 31 Des 2024
1	Alat Komunikasi	2020	3.000.000,00	4	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
2	Laptop Merk Asus	2020	3.750.000,00	4	3.750.000,00	-	3.750.000,00	-
3	AC 4 Unit	2020	11.900.000,00	4	11.900.000,00	-	11.900.000,00	-
4	Lemari Arsip Beris	2020	1.800.000,00	4	1.800.000,00	-	1.800.000,00	-
5	Printer Epson L-6170	2020	4.900.000,00	4	4.900.000,00	-	4.900.000,00	-
6	Laptop ACER	2020	3.100.000,00	4	3.100.000,00	-	3.100.000,00	-
7	Printer Canon	2020	950.000,00	4	950.000,00	-	950.000,00	-
8	Printer Epson L-120	2020	1.800.000,00	4	1.800.000,00	-	1.800.000,00	-
9	Pompa Padi	2020	1.800.000,00	4	1.800.000,00	-	1.800.000,00	-
10	Handy Talky	2020	2.000.000,00	4	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
11	Drum Plastik	18 Januari 2021	800.000,00	4	583.333,33	200.000,00	783.333,33	16.666,67
12	Chainsaw Still 1 unit	22 Januari 2021	13.800.000,00	4	10.062.500,00	3.450.000,00	13.512.500,00	287.500,00
13	Chainsaw Still 1 unit	22 Januari 2021	2.900.000,00	4	2.114.583,33	725.000,00	2.839.583,33	60.416,67
14	Brush Culture Pro Tanaka 11 unit	22 Januari 2021	20.900.000,00	4	15.239.583,33	5.225.000,00	20.464.583,33	435.416,67
15	Travo Las Lakoni 1 unit	22 Januari 2021	1.150.000,00	4	838.541,67	287.500,00	1.126.041,67	23.958,33
16	Gerobak	3 Februari 2021	550.000,00	4	401.041,67	137.500,00	538.541,67	11.458,33
17	Pompa Rumput	15 Februari 2021	500.000,00	4	364.583,33	125.000,00	489.583,33	10.416,67
18	Tangga Lipat 3m	22 Februari 2021	800.000,00	4	566.666,67	200.000,00	766.666,67	33.333,33
19	Viar - New Karya 200 L	1 Oktober 2022	55.779.995,00	4	17.431.248,44	13.944.998,75	31.376.247,19	24.403.747,81
20	PC	1 Mei 2023	4.010.000,00	4	668.333,33	1.002.500,00	1.670.833,33	2.339.166,67
21	CCTV	1 Mei 2023	990.000,00	4	165.000,00	247.500,00	412.500,00	577.500,00
22	PC AIO	1 Juli 2023	3.750.000,00	4	546.875,00	937.500,00	1.484.375,00	2.265.625,00
23	Pembelian AC 2 Unit	17 Jan 24	7.700.000,00	4		1.764.583,33	1.764.583,33	5.935.416,67
24	Pembelian Laptop Merk Lenovo	17 Jan 24	7.850.000,00	4		1.798.958,33	1.798.958,33	6.051.041,67
25	Pompa Air	31 Dec 24	2.600.000,00	4		-	-	2.600.000,00
	Total		159.079.995,00		83.982.290,10	30.046.040,42	114.028.330,52	45.051.664,48





PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)				
No	Uraian	Reff	2024	2023
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	7.5.2.	11.026.844.179,66	13.516.665.101,00
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		11.026.844.179,66	13.516.665.101,00
3	Subtotal (1 - 2)		-	-
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)		57.448.547.850,91	11.026.844.179,66
5	Subtotal (3 + 4)		57.448.547.850,91	11.026.844.179,66
6	Koreksi/Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		-	-
7	Lain-Lain		-	-
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)		57.448.547.850,91	11.026.844.179,66

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

Pangkajene, 23 Mei 2025

PEMERINTAH KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
BUPATI



H. MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	Uraian	Reff	2024	2023
1	EKUITAS AWAL	7.5.6.1	1.958.635.958.627,88	1.937.408.637.176,95
2	SURPLUS / (DEFISIT) - LO		20.981.041.327,21	15.847.313.463,83
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR		3.256.827.069,65	5.380.007.987,10
4	Saldo Awal Persediaan		-	-
5	Persediaan		-	-
6	Selisih Revaluasi Aset Tetap		-	-
7	Saldo Awal Koreksi Ekuitas		-	-
8	Saldo Awal BOS		-	-
9	Review BOS		-	-
10	Perubahan Aset		-	-
11	Penyusutan		-	-
12	Aset Tak Berwujud (ATB)		-	-
13	Piutang		-	-
14	Jasa Giro		-	-
15	Utang Jangka Pendek Lainnya		-	-
16	Koreksi Lainnya		3.256.827.069,65	5.380.007.987,10
17	Perubahan Ekuitas		-	-
18			-	-
19	EKUITAS AKHIR		1.982.873.827.024,74	1.958.635.958.627,88

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

Pangkajene, 23 Mei 2025
PEMERINTAH KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
BUPATI,



H. MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Reff	2024		%	2023
			Anggaran	Realisasi		
1	PENDAPATAN - LRA	7.5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	a.				
3	Pendapatan Pajak Daerah	1	105.900.082.990,00	136.543.303.074,16	128,94	94.937.575.968,44
4	Pendapatan Retribusi Daerah	2	14.558.602.523,00	12.095.295.506,00	83,08	9.440.950.198,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3	13.309.057.431,00	13.009.057.431,00	97,75	12.927.838.786,00
6	Lain-Lain PAD yang Sah	4	66.529.377.337,00	67.055.196.023,60	100,79	59.317.018.887,45
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		200.297.120.261,00	228.702.852.036,76	114,18	176.623.383.839,89
8						
9	PENDAPATAN TRANSFER	b.				
10	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1				
11	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERimbangan	1.1				
12	Dana Bagi Hasil Pajak	1.1.a	21.979.024.000,00	25.613.641.664,00	116,54	27.085.286.494,00
13	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		-	-	-	-
14	Dana Alokasi Umum	1.1.b	769.416.938.000,00	787.431.926.000,00	102,34	746.290.902.260,00
15	Dana Alokasi Khusus	1.1.c	349.390.409.000,00	341.828.158.407,00	97,84	344.179.419.601,00
16	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		1.140.786.371.000,00	1.154.873.726.071,00	101,23	1.117.555.808.365,00
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA INSENTIF DAERAH	1.2				
18	Dana Insentif Daerah (DID)	1.2.a	-	-	-	17.797.293.000,00
19	Jumlah Dana Insentif Daerah (DID)		-	-	-	17.797.293.000,00
20						
21	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA DESA	1.2.b				
22	Dana Desa (DD)		66.353.380.000,00	66.353.379.960,00	100,00	65.102.177.990,00
23	Insentif fiskal		11.568.556.000,00	11.568.556.000,00	100,00	-
24	Jumlah Dana Desa (DD) & Insentif Fiskal		77.921.936.000,00	77.921.935.960,00	100,00	65.102.177.990,00
25	Jumlah Pendapatan Transfer - Pemerintah Pusat		1.218.708.307.000,00	1.232.795.662.031,00	101,16	1.200.455.079.345,00
26						
27	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	2				
28	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah	2.a	67.958.846.017,00	53.106.576.104,00	78,15	76.123.891.525,02
29	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	2.b	19.998.430.750,00	7.564.323.750,00	37,82	26.002.606.500,00
30	Jumlah Pendapatan Antar Daerah		87.957.276.767,00	60.670.899.854,00	68,98	102.126.498.025,02
31	Jumlah Pendapatan Transfer dan Bantuan Keuangan		1.306.665.583.767,00	1.293.466.561.886,00	98,99	1.302.581.577.370,02
32						
33	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	c				
34	Pendapatan Hibah	1.c	-	100.001,98	-	2.002.555.272,00
35	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	2.c	28.389.375.000,00	22.910.716.961,00	80,70	23.429.994.836,00
36	Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah		28.389.375.000,00	22.910.816.962,98	80,70	25.432.550.108,00
37	Jumlah Pendapatan		1.535.352.079.048,00	1.545.080.230.884,74	100,63	1.504.637.511.317,81
38						
39	BELANJA	7.5.1.2				
40	BELANJA OPERASI	a.				
41	Belanja Pegawai	1.	671.113.470.504,00	680.312.992.167,00	98,39	611.642.239.921,00
42	Belanja Barang dan Jasa	2.	409.741.881.763,00	379.281.519.837,12	92,57	366.587.257.014,79
43	Belanja Bunga	3	220.000.000,00	215.000.000,00	97,73	-
44	Belanja Hibah	4	62.351.073.001,00	61.888.921.596,00	99,26	64.547.861.642,00
45	Belanja Bantuan Sosial	5	2.905.933.319,00	2.758.326.941,00	94,92	16.988.146.913,00
46	Jumlah Belanja Operasi		1.146.332.358.587,00	1.104.466.790.541,12	96,36	1.059.766.505.490,79
47						
48	BELANJA MODAL	b.				
49	Belanja Modal Tanah	1.	927.888.300,00	465.430.000,00	50,16	4.390.301.200,00
50	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.	57.574.173.999,00	54.607.117.769,37	94,85	55.003.140.097,00
51	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.	102.420.248.244,00	99.027.835.883,00	96,69	110.546.633.594,54
52	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.	71.557.435.386,00	70.691.907.253,00	98,79	118.039.778.751,92
53	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.	8.825.647.800,00	8.829.456.200,00	100,04	9.404.188.287,00
54	Belanja Modal Aset Lainnya	6.	929.849.400,00	701.827.900,00	75,46	58.165.501,00
55	Jumlah Belanja Modal		242.235.243.129,00	234.323.376.005,37	96,73	297.442.205.431,46
56						
57	BELANJA TAK TERDUGA					
58	Belanja Tak Terduga	c.	1.961.000.800,00	1.958.577.900,00	99,88	3.970.415.183,00
59	Jumlah Belanja Tak Terduga		1.961.000.800,00	1.958.577.900,00	99,88	3.970.415.183,00
60	Jumlah Belanja		1.390.528.602.516,00	1.340.738.713.446,49	96,42	1.361.178.126.105,25
61						
62	TRANSFER DAERAH	d.				
63	BAGI HASIL	1				
64	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa	a	5.295.004.150,00	3.932.848.999,00	74,27	7.310.298.051,00
65	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa	b	727.930.126,00	519.676.708,00	71,39	937.488.790,00
66	Jumlah Transfer / Bagi Hasil Pendapatan ke Desa		6.022.934.276,00	4.452.525.707,00	73,93	8.247.786.841,00
67	BANTUAN KEUANGAN	2				
68	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa					

No	Uraian	Reff	2024		%	2023
			Anggaran	Realisasi		
69	Bantuan Keuangan ke Desa	a.	145.467.288.100,00	145.467.288.060,00	100,00	141.201.419.293,00
70	Bantuan Keuangan Lainnya		-	-	-	-
71	Jumlah Transfer Bantuan Keuangan		145.467.288.100,00	145.467.288.060,00	100,00	141.201.419.293,00
72	Jumlah Transfer		151.490.222.376,00	149.919.813.767,00	98,96	149.449.206.134,00
73	Jumlah Belanja dan Transfer		1.542.018.824.892,00	1.490.658.527.213,49	96,67	1.510.627.332.239,25
74						
75	SURPLUS / (DEFISIT)		(6.666.745.844,00)	54.421.703.671,25	(816,32)	(5.989.820.921,34)
76						
77	PEMBIAYAAN	7.5.1.3				
78	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	a.				
79	Penggunaan SILPA		14.666.745.844,00	11.026.844.179,66	75,18	13.516.665.101,00
80	Penerimaan Pinjaman Daerah		-	-	-	8.000.000.000,00
81	Penerimaan Kembali Piutang		-	-	-	-
82	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		14.666.745.844,00	11.026.844.179,66	75,18	21.516.665.101,00
83						
84	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	b.				
85	Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah		-	-	-	4.500.000.000,00
86	Pembayaran Pokok Utang		8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	100,00	-
87	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	100,00	4.500.000.000,00
88	Pembiayaan Netto		6.666.745.844,00	3.026.844.179,66	45,40	17.016.665.101,00
89						
90	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	7.5.1.4	-	57.448.547.850,91	-	11.026.844.179,66

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Pangkajene, 23 Mei 2025
 PEMERINTAH KABUPATEN
 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
 BUPATI



H. MUHAMMAD YUSRIAN TALOGAU



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NERACA

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Reff	2024	2023
1	ASET	7.5.3		
2	ASET LANCAR	7.5.3.1		
3	Kas di Kas Daerah	a.	51.192.990.140,33	8.342.507.349,12
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	b.	600.100,19	6.900.001,00
5	Kas di Bendahara Penerimaan	c.	37.794.200,00	576.290.600,00
6	Kas di Bendahara BLUD	d.	5.182.497.148,03	514.530.737,97
7	Kas di Bendahara FKTP	e.	19.962.911,00	67.189.850,00
8	Kas di Bendahara BOS	f.	-	14.299.000,00
9	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	g.	791.946,36	1.505.126.641,57
10	Kas Dana BOSP	h.	42.884.196,00	-
11	Kas Dana BOK Puskesmas	i.	971.027.209,00	-
12	Piutang	j.	127.451.490.749,24	124.343.614.547,40
13	Piutang Pajak Daerah	k.	87.154.824.781,68	86.387.139.424,84
14	Piutang Retribusi Daerah	l.	4.924.221.232,86	4.735.902.043,86
15	Piutang Pengelolaan Hasil Kekayaan Daerah yang Sah	m.	563.744.044,00	563.744.044,00
16	Piutang Lain-Lain PAD yang SAH	n.	9.637.390.612,00	9.633.100.649,00
17	Piutang Transfer Antar Daerah	o.	24.153.388.975,00	22.003.807.282,00
18	Piutang Lainnya	p.	1.017.921.103,70	1.019.921.103,70
19	Penyisihan Piutang	q.	(78.305.609.909,84)	(76.722.197.806,61)
20	Penyisihan Piutang Pendapatan	r.	(77.287.688.806,14)	(75.702.276.702,91)
21	Penyisihan Piutang Lainnya	s.	(1.017.921.103,70)	(1.019.921.103,70)
22	Beban dibayar Dimuka	t.	408.290.618,65	80.846.584,03
23	Persediaan	u.	18.430.799.952,15	13.741.026.849,61
24	Jumlah Aset Lancar		125.433.519.261,11	72.470.134.354,09
25	INVESTASI JANGKA PANJANG	7.5.3.2		
26	Investasi Non Permanen			
27	Investasi Permanen			
28	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	a.	39.528.791.312,05	41.853.015.898,97
29	Jumlah Investasi Permanen		39.528.791.312,05	41.853.015.898,97
30	ASET TETAP	7.5.3.3		
31	Tanah	a.	212.073.758.071,18	207.933.654.592,45
32	Peralatan dan Mesin	b.	788.979.235.345,36	725.415.924.885,92
33	Gedung dan Bangunan	c.	1.337.566.477.298,15	1.254.724.273.673,74
34	Jalan, Irigasi dan Jaringan	d.	2.514.619.243.433,95	2.440.488.664.108,83
35	Aset Tetap Lainnya	e.	20.202.107.113,81	19.557.668.713,81
36	Konstruksi dalam Pengerjaan	f.	63.778.749.287,69	52.594.442.830,63
37	Akumulasi Penyusutan	g.	(3.075.669.573.822,97)	(2.808.947.040.527,09)
38	Jumlah Aset Tetap		1.861.549.996.727,17	1.891.767.588.278,29
41	DANA CADANGAN			
42	Dana Cadangan			
43	Jumlah Dana Cadangan		-	-
44	ASET LAINNYA	7.5.3.4		
45	Tagihan Jangka Panjang	a.	94.760.874,00	99.260.874,00
46	Aset Tak Berwujud	b.	6.466.292.636,45	5.768.117.595,45
47	Amortisasi Aset Tak Berwujud	c.	(4.547.846.494,63)	(3.846.229.649,54)
48	Aset Tak Berwujud Netto	d.	1.918.446.141,82	1.921.887.945,91
49	Aset Lain-Lain	e.	11.581.425.827,81	11.545.175.827,81
	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)		324.179.000,00	-
50	Jumlah Aset Lainnya		13.918.811.843,63	13.566.324.647,72
51	Jumlah Aset		2.040.431.119.143,96	2.019.657.063.179,07
52	KEWAJIBAN	7.5.3.5		
53	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
54	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	a.	-	8.000.000.000,00
55	Pendapatan diterima dimuka	b.	129.570.458,33	137.457.666,70
56	Utang Belanja	c.	57.427.721.660,89	52.883.646.884,49
57	Utang Jangka Pendek Lainnya	d.	-	-
58	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		57.557.292.119,22	61.021.104.551,19
59	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
60	Kewajiban Jangka Panjang			
61	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-

No	Uraian	Reff	2024	2023
62	Jumlah Kewajiban		57.557.292.119,22	61.021.104.551,19
63	EKUITAS	7.5.3.6	1.982.873.827.024,74	1.958.635.958.627,88
64	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.040.431.119.143,96	2.019.657.063.179,07
			-	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

Pangkajene, 23 Mei 2025
PEMERINTAH KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
BUPATI.



H. MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Reff	2024	2023
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
2	Arus Masuk Kas	7.5.5.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah	a	136.543.303.074,16	94.937.575.968,44
4	Penerimaan Retribusi Daerah	b	12.095.295.508,00	9.440.950.198,00
5	Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	c	13.009.057.431,00	12.927.838.786,00
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	d	66.890.940.723,60	59.130.875.287,45
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil	e	25.613.641.664,00	27.085.286.494,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum	f	787.431.926.000,00	746.290.902.260,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	g	124.338.989.980,00	134.234.092.286,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	h	217.489.168.427,00	209.945.327.315,00
11	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Penugasan	i	-	-
12	Penerimaan Dana Insentif Daerah	j	-	17.797.293.000,00
13	Penerimaan Dana Desa	j	66.353.379.960,00	65.102.177.990,00
14	Penerimaan Insentif Fiskal		11.568.556.000,00	-
15	Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	k	53.106.576.104,00	76.123.891.525,02
16	Penerimaan Bantuan Keuangan	l	7.564.323.750,00	26.002.606.500,00
17	Penerimaan Hibah	m	100.001,98	2.002.555.272,00
18	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	n	22.910.716.961,00	23.429.994.836,00
		g	-	-
19	Jumlah Arus Masuk Kas (01 s/d 20)		1.544.915.975.584,74	1.504.451.367.717,91
20	Arus Keluar Kas	7.5.5.2		
21	Pembayaran Pegawai	a	660.312.992.167,00	611.642.239.921,00
23	Pembayaran Barang dan Jasa	b	379.281.519.837,12	366.587.257.014,79
24	Pembayaran Subsidi		215.000.000,00	0,00
26	Pembayaran Hibah	c	61.888.921.596,00	64.547.861.642,00
27	Pembayaran Bantuan Sosial	d	2.758.326.941,00	16.988.146.913,00
29	Pembayaran Bantuan Keuangan		-	-
30	Pembayaran Tak Terduga	f	1.958.577.900,00	3.970.415.183,00
32	Pembayaran Belanja Bagi Hasil Retribusi kepada Pemerintahan	g	4.452.525.707,00	8.247.786.841,00
33	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan ke Daerah Provinsi			
35	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	h	145.467.288.060,00	141.201.419.293,00
36	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik			
38	Pembayaran Kejadian Luar Biasa		-	-
39	Jumlah Arus Keluar Kas (22 s/d 34)		1.256.335.152.208,12	1.213.185.126.807,79
41	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi (20 - 34)		288.580.823.376,62	291.266.240.910,12
42	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN	7.5.5.3		
43	Arus Masuk Kas			
44	Penjualan Aset Lainnya	a	-	186.143.600,00
45	Penjualan Aset Lain-lain	b	164.255.300,00	-
46	Jumlah Arus Masuk Kas (39 s/d 47)		164.255.300,00	186.143.600,00
47	Arus Kas Keluar	7.5.5.4		
48	Perolehan Tanah	a	465.430.000,00	4.390.301.200,00
49	Perolehan Peralatan dan mesin	b	54.607.117.769,37	55.003.140.097,00
50	Perolehan Gedung dan Bangunan	c	99.027.835.883,00	110.546.633.594,54
51	Perolehan Jalan, irigasi dan jaringan	d	70.691.907.253,00	118.039.776.751,92
52	Perolehan Aset Tetap Lainnya	e	8.829.456.200,00	9.404.188.287,00
53	Perolehan Aset Lainnya	f	701.627.900,00	58.165.501,00
54	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	4.500.000.000,00
55	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen			
56	Jumlah Arus Keluar Kas (50 s/d 58)		234.323.375.005,37	301.942.205.431,46
57	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi		(234.159.119.705,37)	(301.756.061.831,46)
58	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	7.5.5.5		
59	Arus Masuk Kas	7.5.5.5		
60	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
61	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain		0,00	0,00
62	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank	a	0,00	8.000.000.000,00

No	Uraian	Reff	2024	2023
63	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
64	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
65	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
66	Jumlah Arus Masuk Kas (61 s/d 71)		0,00	8.000.000.000,00
67	Arus Keluar Kas	7.5.5.6		
68	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat		0,00	0,00
69	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain		0,00	0,00
70	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank	a	8.000.000.000,00	0,00
71	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
72	Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
73	Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
74	Jumlah Arus Keluar Kas (75 s/d 83)		8.000.000.000,00	0,00
75	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan (72 - 84)		-8.000.000.000,00	8.000.000.000,00
76	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	7.5.5.7		
77	Arus Masuk Kas			
78	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	a	43.742.941.010,00	48.666.645.794,00
79	Penyesuaian Saldo awal Bendahara Penerima		-	-
80	Penyesuaian Saldo awal FKTP		-	-
81	Jumlah Arus Masuk Kas		43.742.941.010,00	48.666.645.794,00
80	Arus Keluar Kas			
81	Pengeluaran perhitungan pihak ketiga		43.742.941.010,00	48.666.645.794,00
82	Jumlah Arus Keluar Kas		43.742.941.010,00	48.666.645.794,00
83	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris		-	-
84	Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	7.5.5.8	46.421.703.671,25	(2.489.820.921,34)
85				
86	Saldo Awal Kas	7.5.5.8.a	11.026.844.179,66	13.516.665.101,00
87	Saldo Akhir Kas	7.5.5.8.b	57.448.547.850,91	11.026.844.179,66
88	Saldo Akhir Kas		57.448.547.850,91	11.026.844.179,66

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

Pangkajene, 23 Mei 2025
PEMERINTAH KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
BUPATI,



H. MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Reff	2024	2023	Kenalkan / (Penurunan)	%
1	KEGIATAN OPERASIONAL					
2	PENDAPATAN	7.5.4.1				
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	a.				
4	Pendapatan Pajak Daerah - LO	1.	137.296.075.839,37	96.326.568.166,50	40.969.507.472,87	42,53
5	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	2.	12.286.665.697,00	11.149.813.004,00	1.136.852.693,00	10,20
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	3.	13.009.057.431,00	13.041.042.112,34	(31.984.681,34)	(0,25)
7	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO	4.	67.075.785.986,60	64.917.755.778,59	2.158.030.208,01	3,32
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (4 s/d 7)		229.667.584.753,97	185.435.179.061,43	44.232.405.692,54	55,81
9						
10	PENDAPATAN TRANSFER - LO	b.				
11	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.				
12	Dana Bagi Hasil Pajak - LO		14.229.219.664,00	14.684.424.120,00	(455.204.456,00)	(3,10)
13	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO		11.708.601.000,00	8.735.978.250,00	2.972.622.750,00	34,03
14	Dana Alokasi Umum - LO		787.431.926.000,00	746.290.902.260,00	41.141.023.740,00	5,51
15	Dana Alokasi Khusus - LO		341.828.158.407,00	344.179.419.601,00	(2.351.261.194,00)	(0,68)
16	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan (11 s/d 16)		1.155.197.905.071,00	1.113.890.724.231,00	41.307.180.840,00	3,71
17						
18	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya					
19	Dana Penyesuaian - LO	2.	11.568.556.000,00	17.797.293.000,00	(6.228.737.000,00)	(35,00)
20	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		11.568.556.000,00	17.797.293.000,00	(6.228.737.000,00)	(35,00)
21						
22	Transfer Pemerintah Provinsi	3				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	a)	60.216.121.547,00	68.832.746.498,02	(8.616.624.951,02)	(12,52)
24	Bantuan Keuangan dari Provinsi - LO	b)	2.604.360.000,00	30.962.570.250,00	(28.358.210.250,00)	(91,59)
25	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (22 s/d 23)		62.820.481.547,00	99.795.316.748,02	(36.974.835.201,02)	(37,05)
26	Jumlah Pendapatan Transfer - LO (17 + 20 + 24)		1.229.586.942.618,00	1.231.483.333.979,02	(1.896.391.361,02)	(0,15)
27						
28	LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	c.				
29	Pendapatan Hibah - LO		16.912.207.329,98	16.705.368.281,10	206.839.048,88	1,24
30	Pendapatan Lainnya - LO		22.910.716.961,00	23.429.994.836,00	(519.277.875,00)	(2,22)
31	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO (27 s/d 28)		39.822.924.290,98	40.135.363.117,10	(312.438.826,12)	(0,78)
32	Jumlah Pendapatan (8 + 25 + 29)		1.499.077.451.662,95	1.457.053.876.157,55	42.023.575.505,40	2,88
33						
34	BEBAN	7.5.4.2				
35	BEBAN OPERASI	a.				
36	Beban Pegawai - LO	1.	663.886.369.058,00	611.395.215.006,00	52.491.154.052,00	8,59
37	Beban Barang - LO	2.	82.592.110.083,95	102.663.483.180,68	(20.071.373.096,73)	(19,55)
38	Beban Persediaan - LO		-	-	-	-
39	Beban Jasa - LO	3.	145.443.606.104,71	146.176.061.565,72	(732.455.461,01)	(0,50)
40	Beban Pemeliharaan - LO	4.	7.898.735.957,00	7.059.777.865,24	838.958.091,76	11,88
41	Beban Perjalanan Dinas - LO	5.	47.041.568.567,00	49.954.359.813,63	(2.912.791.216,63)	(5,83)
42	Beban Uang/Jasa Untuk diberikan ke Pihak	6.	7.341.404.760,00	7.376.971.100,00	(35.566.340,00)	(0,48)
43	Beban barang dan Jasa BOS - LO	7.	42.060.514.566,00	45.969.495.825,00	(3.908.981.259,00)	(8,50)
44	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	8.	500.127.264,00	-	500.127.264,00	-
45	Beban barang dan Jasa BLUD - LO	9.	54.638.666.833,63	32.685.232.929,43	21.973.433.904,20	67,27
46	Beban Bunga - LO	10.	215.000.000,00	-	215.000.000,00	-
47	Beban Subsidi - LO		-	-	-	-
48	Beban Hibah - LO	11.	59.550.024.144,00	65.949.988.908,00	(6.399.962.764,00)	(9,70)
49	Beban Bantuan Sosial - LO	12.	2.610.556.941,00	9.258.946.913,00	(6.648.389.972,00)	(71,81)
50	Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO	13.	270.121.356.783,97	263.820.661.088,24	6.300.695.695,73	2,39
51	Beban Penyisihan Piutang - LO	14.	2.203.469.729,06	2.445.549.516,21	(242.079.787,15)	(9,90)
52	Beban Lain-Lain - LO		-	-	-	-
53	Jumlah Beban Operasi (33 s/d 44)		1.386.103.510.822,32	1.344.735.741.711,15	41.367.769.111,17	3,08
54						
55	BEBAN TRANSFER	b				
56	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa - LO	1.	83.566.433.807,00	84.347.028.144,00	(780.594.337,00)	(0,93)
57	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya - LO		-	-	-	-
58	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO		377.591.060,99	-	377.591.060,99	-
59	Jumlah Beban Transfer (47 s/d 48)		83.944.024.867,99	84.347.028.144,00	(403.003.276,01)	(0,48)
60	Jumlah Beban		1.470.047.535.690,31	1.429.082.769.855,15	40.964.765.835,16	2,87
61						
62	Jumlah Surplus / (Defisit) dari Beban (30 - (45 + 49))		29.029.915.972,64	27.971.106.302,40	1.058.809.670,24	3,79
63						
64						
65						
66	SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	7.5.4.3				
67	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		620.042.370,83	-	620.042.370,83	-
68	SURPLUS NON OPERASIONAL		620.042.370,83	-	-	-
69						
70	Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	a	7.121.239.116,26	8.153.377.655,57	(1.032.138.539,31)	(12,66)

No	Uraian	Reff	2024	2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
71	DEFISIT NON OPERASIONAL		7.121.239.116,26	8.153.377.655,57	(1.032.138.539,31)	(12,66)
72	Jumlah Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional (52 s/d 53)		(6.501.196.745,43)	(8.153.377.655,57)	1.652.180.910,14	(20,26)
73						
74	Surplus / (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		22.528.719.227,21	19.817.728.646,83	2.710.990.580,38	13,68
75						
76	POS LUAR BIASA					
77	PENDAPATAN LUAR BIASA - LO					
78	Pendapatan Luar Biasa - LO		-	-	-	-
79	Jumlah Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
80						
81	BEBAN LUAR BIASA - LO					
82	Beban Luar Biasa - LO	7.5.4.4	1.547.677.900,00	3.970.415.183,00	(2.422.737.283,00)	(61,02)
83	Jumlah Beban Luar Biasa		1.547.677.900,00	3.970.415.183,00	(2.422.737.283,00)	(61,02)
84	Jumlah Surplus / (Defisit) dari Pos Luar Biasa		(1.547.677.900,00)	(3.970.415.183,00)	(2.422.737.283,00)	61,02
85						
86	SURPLUS / (DEFISIT)	7.5.4.5	20.981.041.327,21	15.847.313.463,83	5.133.727.863,38	32,39

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

Pangkajene, 23 Mei 2025
PEMERINTAH KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN



H. MUHAMMAD YUSRI LALOGAU